

TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU..... 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah 7
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 11 10
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 14
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 14
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 15
BAB IV RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 20
BAB V PENUTUP..... 24
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan perlunya Perangkat Daerah menyusun Renja- Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra- Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di atas, dan lebih meningkatakan keterpaduan dan keselarasan antar Renstra Kementrian Pendidikan Nasional dengan program-program Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam menyusun Renja - Perangkat Daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kaitannya dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik,

demokratis, akuntabel, dan pembangunan daerah berkelanjutan. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process.

Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan optimal.

Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya.

Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Renja PERANGKAT DAERAH berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan Perangkat Daerah yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.

Tujuan utama Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una adalah mempercepat pencapaian target kebijakan nasional mengenai Pendidikan

untuk semua (education for all) dan dalam rangka pelaksanaan Konsep Pembangunan Nasional bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan fungsi tersebut, penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia Indonesia agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan cakap.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 16.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 2025;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) 2024 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga disusun dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan di bidang pendidikan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una untuk menyusun rancangan awal yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dalam kurun waktu 1 tahun di antaranya:

1. Mendiskripsikan tentang program-program serta kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una sehingga program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.
2. Merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari Visi dan Misi Wali Bupati terpilih periode 2021-2026. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una.
3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi pada hasil.

4. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum dan program pembangunan daerah di Kabupaten Tojo Una-Una dengan kewenangan Dinas sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.
5. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Dinas dan jajarannya secara seimbang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una 2024 disusun dalam Lima Bab :

Bab I Pendahuluan

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisannya.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat daerah Tahun Lalu

Berisikan Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat daerah Tahun lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah, Isu-isu Penting Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah

Berisikan Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat daerah dan Program dan Kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah

Berisikan Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, Pencapaian Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun lalu (Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2023). Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana Strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkiraan akan timbul, yang dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat daerah dan/atau realisasi Anggaran untuk Perangkat daerah. Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Renja ditetapkan pada awal tahun 2024. Renja tahun 2024 memuat target kinerja tahun 2024 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan.

Realisasi program/kegiatan yang memenuhi/tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una s.d tahun 2023 adalah yang tercantum dalam tabel berikut:

2.2. Analisis Kinerja Perangkat daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolaholah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan di atas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance

Berdasarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan di Daerah Propinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota ada 3 (Tiga) jenis pelayanan dasar yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Kota dengan sasaran pelaksanaan program/kegiatan meliputi Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, Tingkat partisipasi

warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yangberpartisipasi dalam PAUD,

Jenis pelayanan dasar ter sebut terdiri atas:

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
3. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

Dalam mengukur kinerja Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 ditetapkan kategori indikator Kinerja dengan kategori sebagai berikut :

Indikator inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dana, sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan/ peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagiainya.

Indikator Outputs adalah segala Sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik

Indikator Outcomes adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.

Indikator Benefits adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Indikator Inpacts (dampak) adalah memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan.seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang.

Indikator impact ini menunjukan dasar pemikiran dilaksanakan kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Pengukuran kinerja Dinas pendidikan, pemuda dan Olahraga dalam Tahun 2022 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

1. Pengukuran Kinerja
   a. Metode Pengukuran Kerja

   Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

   - Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

     $$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{R}{R} \times 100\ \%$$

   - Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

     $$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{R \quad -(R \quad -R \quad)}{R} \times 100\ \%$$

     Atau :

     $$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times R \quad) - R}{R} \times 100\ \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator- indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s.d 100	:	Sangat berhasil
70 ≤ x < 85	:	berhasil
55 ≤ x < 70	:	Cukup berhasil
X < 55	:	tidak berhasil

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan **" Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok ".** dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu

sangat berhasil (Nilai Tengah 92,5 %) berhasil (Nilai Tengah 77,5%), Cukup berhasil (Nilai Tengah 62,5 %), dan tidak berhasil (nilai tengah 27,5 %).

Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, atau dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Kelompok Kategori x Mean Kategorinya)}}{Ju \quad h\,I} = x\ 100\ \%$$

2. Hasil pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atau pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil (outcomes).

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Tojo Una-Una

No	Indikator	SPM/ Standar Nasinal	IKK	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Terpenuhinya kebutuhan warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		**95,64**	**96,09**	**96,54**	**96,99**	**95,09**	**99,03**	**99,41**	**99,53**	
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Terpenuhinya kebutuhan warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		**95,64**	**96,09**	**96,54**	**96,99**	**95,09**	**100**	**96,54**	**96,99**	
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Terpenuhinya kebutuhan warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		**99,65**	**99,70**	**99,75**	**99,77**	**99,65**	**98,80**	**99,75**	**99,77**	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Sebagai OPD yang memiliki *leading sector* dalam bidang penyelenggaraan Pendidikan Baik Formal,In-formal Maupun Non Formal di semua jenjang Pendidikan. Kabupaten Tojo Una-Una tidak terlepas dari berbagai permasalahan strategis terkait dengan karakteristik wilayah Kabupaten Tojo Una-Una antara lain:

- Kondisi Geografis

Kondisi geografis Kabupaten Tojo Una Una yang merupakan wilayah kepulauan sekaligus daerah rawan bencana, menjadi kendala dalam pelayanan pendidikan, karena setiap wilayah khususnya di wilayah kepulauan masih terbatasnya sarana komunikasi dan informasi yang menyebabkan layanan pendidikan terhambat.

- Kondisi Sosiologis

Mayarakat Tojo Una Una secara Socio Cultural merupakan masyarakat yang heterogen yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Hal ini membawa dampak tersendiri terhadap layanan pendidika karena beragamnya budaya yang ada di Kabupaten Tojo Una Una.

- Kurangnya SDM

Secara Internal kendala yang di hadapi adalah kurangya SDM aparatur pengelola kegiatan, sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi kesalahan administrasi dan manajmen yang akibatnya capaian kinerja belum maksimal.

- Minimnya Sumber Pembiayaan

Minimnya APBD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun anggaran 2021-2022, menyebabkan banyak program dan kegiatan khususnya pembangunan sarana dan prasarana disemaua jenjang pendidikan, di sisi lain belum memadainya dokumen Renstra sebagai master perencanaan OPD menyebabkam program dan kegiatan yang di laksanakan kurang maksimal. Namun di tahun 2023 dengan adanya Pembiayaan Spesifik Green hingga anggaran bidang Pendidikan menjadi lebih banyak sehingga di harapkan dapat menaikan angka Indeks Pendidikan, Rata Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Prestasi Dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

- Sosial, Budaya dan Lingkungan

Kondisi sosial, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) jumlah penduduk miskin yang tergolong tinggi menempatkan posisi pendidikan bagi masyrakat bukan hal yang utama, (2) angka ketidaklulusan siswa masih tergolong tinggi, (3) masih tingginya kesenjangan antar jender, antar penduduk kaya dan miskin, anatara perkotaan dan

perdesaaan, anatara wilayah kecamatan dan wilayah tertinggal, dan atar jenis kelamin, (4) masih rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tojo Una Una di banding Kabupaten lain di wilayah Propinsi sulawesi Tengah.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una Una dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsinya harus sanantiasa mengacu pada pencapaian Visi, Misi maupun Program Kerja Bupati–Wakil Bupati Periode 2021-2026 sebagaimana telah terdokumentasi dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2026 yaitu:

'' Visi Bupati-Wakil Bupati Tojo UnaUna ''

"TERWUJUDNYA KABUPATEN TOJO UNA-UNA TANGGUH, MAJU DAN SEJAHTERA (TAMARA)"

Pernyataan Visi tersebut dijabarkan lebih detail pada misi IV (empat) yang hendak diwujudkan pada program-program yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan Terpadu.
2. Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Pekerja
3. Perluasan Kesempatan Kerja
4. Peningkatan Akses/ keterjangkauan dan Kualitas Pendidikan
5. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan
6. Mewujudkan perkembangan wilayah yang merata dan seimbang antara wilayah darat dan kepulauan

Berdasarkan identifikasi secara tekstual, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menjadi prioritas pembangunan dari pada perwujudan Visi, Misi dan Program Bupati–Wakil Bupati Tojo Una-Una tahun 2021-2026 yang menitik beratkan pembangunan disektor pendidikan dengan pelaksanaan terpenuhinya pengembangan sumber daya kualitas manusia yang berdaya saing tinggi dan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar Secara Merata dengan Melanjutkan Pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dan Kesehatan Gratis.

Dinas Pendidikan Pemudadan Olahraga dalam kaitannya dengan Misi Bupati/wakil bupati periode 2021-2026 sebagaimana yang tertuang dalam misi keempat program keempat yaitu Mewujudkan pengembangan akses/ keterjangkauan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga akan menyelenggarakan pendidikan baik formal, informal maupun nonformal yang berkualitas serta pemenuhan sarana prasarana pendidikan secara merata dan berkelanjutan.

2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Renja tahun 2024 sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada program yang telah disesuaikan berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2024. Berikut Review terhadap Rancangan Awal Renja tahun 2024:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan telaahan program usulan dari berbagai pihak (stakeholder) pendidikan mengenai berbagai isu pendidikan, maka program peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama di samping program fisik. Hal ini didasarkan dari kualitas mutu pendidikan yang belum merata pada setiap sekolah, angka kelulusan siswa yang masih di bawah harapan serta siswa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi favorit masih rendah.

Mengingat terbatasnya sumber daya daerah, maka penetapan agenda dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya (resources) yang ada untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2024 disusun dengan beberapa pertimbangan berikut : 1) Memiliki dampak yang signifikan, terukur, dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat; 2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Sesuai dan sejalan dengan Visi, Misi, program Daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Unas Tahun 2021-2026.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Tojo una-Una Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	**228,229,021,764**	
	Perencanaan, Penggunaan, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	DIKPORA	Presentase Dokumen Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	178,923,038	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DIKPORA	Presentase Dokumen Keuangan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	218,559,730,726	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DIKPORA	Presentase Dokumen Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	102,060,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DIKPORA	Presentase Administrasi Umum Perangkat daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	726,871,696	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DIKPORA	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	25,000,000	
	Penyediaan Jasa Pununjang Urusan Pemerintah Daerah	DIKPORA	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	8,397,297,553	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIKPORA	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	239,138,751	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 1000)	**72,774,962**	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DIKPORA	Presentase Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	72,774,962	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Rata-rata lama sekolah Harapan Lama Sekolah	**67,512,151,000**	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DIKPORA	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1,130,911,000	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DIKPORA	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	8,622,600,000	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	DIKPORA	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	30,955,660,000	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DIKPORA	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menenga	21,156,980,000	

	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Peningkatan Prestasi Olahraga	**225,000,000**	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DIKPORA	Peningkatan Sarana Prasarana Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kab/Kota	50,000,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	DIKPORA	Peningkatan Prestasi Olahraga Tkt Propinsi	75,000,000	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DIKPORA	Presentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	100,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	**1,435,000,000**	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	DIKPORA	Jumlah Kwatir Ranting yang Aktif dalam Kegiatan PRAMUKA	1,435,000,000	
TOTAL				**297,473,947,726**	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional tahun 2021-2024 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di pusat dan di daerah terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis.

Untuk itu, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional ditujukan pada penguatan layanan pendidikan yaitu dengan terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif, dengan upaya meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas mutu/relevansi layanan pendidikan, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Sedangkan tujuan strategis nasional dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana yang dikehendaki, yaitu:

a) Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.

b) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.

c) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi.

d) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

e) Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan nasional yang mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana serta pendanaan dan

Pada bagian ini akan menjelaskan factor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yakni sebagai berikut:

- **Faktor Manusia**
  1. Kesadaran serta kondisi ekonomi dan social budaya masyarakat belum menunjang penyelenggaraan pendidikan
  2. Sumber Daya Manusia Pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar kompetensi
  3. Masalah keluarga yang berimbas pada peserta didik
  4. Peran dan kontribusi komite sekolah serta masyarakat lingkungan sekolah belum maksimal dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan
- **Faktor Geografis**

  Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari wilayah daratan dengan bukit-bukit yang terjal serta wilayah kepulauan dengan hamparan pulau-pulau kecil dan besar yang terpisah-pisah.
- **Faktor Infrastruktur**
  1. Terbatasnya fasilitas transportasi
  2. Akses Jalan didaerah pedalaman masih sulit

Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No.	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1		Meningkatkan Sumberdaya Manusia Tojo Una-Una Yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pemangunan Manusia (IPM)	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
				Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan
					Harapan Lama Sekolah
					Rata-Rata Lama Sekolah
				Meningkatnya prestasi olahraga dan peranan pemuda dalam pembangunan	Jumlah Prestasi Bidang Olahraga dan Kepemudaan Tingkat Propinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun penetapan tujuan didasarkan pada Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu faktual yang berkembang ke arah perubahan dari analisis strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai di masa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis). Berdasarkan visi dan misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tojo Una-Una, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tojo Una-Una dari penjabaran misi adalah Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran: 1)

Meningkatnya kuantitas dan kualitas akses penyelenggaraan pendidikan dasar. 2) Meningkatnya SDM yang kreatif dan kompetitif. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021 58 3) Tersedianya SDM cerdas sejak dini. 4) Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan nonformal. 5) Meningkatnya kualitas pelayanan bidang pendidikan. 6) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 3.2.2 Sasaran Secara detail, upaya penyediaan layanan pendidikan tahun 2021 dapat dilihat pada tingkatan per jenjang pendidikan yaitu:

Tabel 3.2. Sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Tahun 2024
1	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	BB
2	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,30 - 0,35
		Harapan Lama Sekolah	8,99 - 9,19
		Rata-Rata Lama Sekolah	12,88 - 13,08
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peranan Pemuda Dalam Pembangunan	Jumlah Prestasi Bidang Olahraga dan Kepemudaan Tingkat Propinsi	8 - 12

Tabel 3.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO	SASARAN	INDIKATOR/ TUJUAN SASARAN	TARGET
1.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,25 Indeks
		Rata - rata Lama Sekolah	8,79 Tahun
		Harapan lama Sekolah	12,68 Tahun
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peranan Pemuda dalam Pembangunan	Jumlah Prestasi Bidang Olahraga dan Kepemudaan Tingkat Propinsi	8 - 12

3.	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	BB

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara detail, upaya penyediaan layanan pendidikan tahun 2024 dapat dilihat pada tingkatan per jenjang pendidikan yaitu :

Tebel 4.1 Sasaran dan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah	Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penggunaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Administrasi Umum Perangkat daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Perorangan Dinas Jabatan

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Peningkatan Kualitas pendidikan yang memenuhi standar nasional	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/penjaga Sekolah
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

				Pengadaan Mebel Sekolah
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
			Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3.	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

			Kabupaten/ Kota	
				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Seleksi Atlet Daerah
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berfungsi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024. Rencana Kerja juga dapat digunakan selain sebagai sarana atau pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, juga memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 bersifat holistik dan integratif. Artinya pembangunan dilakukan secara menyeluruh dan antara satu aspek dengan aspek pembangunan lainnya, baik fisik maupun nonfisik dilakukan secara terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan itu, diperlukan dukungan dan partisipasi langsung semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dukungan masyarakat dalam pembangunan pendidikan cukup nyata diperlukan karena pendidikan itu sendiri terkait dengan kebutuhan atau hajat para orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah.

Ampana, 24 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tojo Una Una,

RISAL C. PANJILI, SE.,M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19640310 198703 1 026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan Ridho-Nya, sehingga penyusunan Laporan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 dapat terlaksana. Laporan Laporan Rencana Kinerja (RENJA) Bidang Urusan Pendidikan dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una dengan harapan pencapaian Laporan Rencana Kinerja (RENJA) ini dapat meningkatkan pelayanan mutu dan pelayanan Pendidikan kepada masyarakat.

Akhir kata semoga Laporan Laporan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 ini dapat menjadi sarana evaluasi dan analisis lebih lanjut atas pencapaian kinerja yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian kinerja tersebut di masa yang akan datang.

Atas kerjasama dari semua pihak, khususnya para pejabat struktural maupun fungsional serta staf administrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta tim penyusun Laporan Rencana Kinerja (RENJA) tahun 2024 sehingga terwujud laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Ampana, 24 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tojo Una Una,

RISAL C. PANJILI, SE.,M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19640310 198703 1 026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA						**297.473.947.726,00**							**335.014.984.547,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**295.813.947.726,00**							**332.088.819.847,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**295.813.947.726,00**							**332.088.819.847,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**BB Nilai**		**BB Nilai**	**BB Nilai**	**228.229.021.764,00**						**BB Nilai**	**258.888.819.847,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Dokumen Perencanaan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	178.923.038,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Dokumen	205.761.493,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	178.923.038,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Dokumen	205.761.493,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Dokumen Keuangan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	218.559.730.726,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2100 Orang/bulan	248.468.690.335,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100 Orang/bulan		2100 Orang/bulan	2100 Orang/bulan	218.559.730.726,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2100 Orang/bulan	248.468.690.335,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	102.060.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	-	100 Orang	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	102.060.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	-	100 Orang	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	726.871.696,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Paket	1.089.230.466,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Paket	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	7 Paket	65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	56.871.696,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	8 Paket	58.528.153,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112 Laporan		112 Laporan	112 Laporan	610.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	112 Laporan	930.702.313,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	25.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	20 Unit	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	25.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	20 Unit	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	8.397.297.553,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	7 Laporan	8.475.137.553,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	212.160.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	7 Laporan	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	85 Laporan		85 Laporan	85 Laporan	8.185.137.553,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	85 Laporan	8.225.137.553,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	239.138.751,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	67 Unit	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit		67 Unit	67 Unit	239.138.751,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	67 Unit	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama*** ***Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD*** ***Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar***	**96,99 Persen 99,77 Persen 99,53 Persen**		**96,99 Persen 99,77 Persen 99,53 Persen**	**96,99 Persen 99,77 Persen 99,53 Persen**	**67.512.151.000,00**						**96,99 Persen 99,77 Persen 99,53 Persen**	**72.950.000.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Rasio Siswa Sekolah Dasar Per Sekolah*	94 -		94 -	94 -	30.955.660.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	2 Unit	34.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	2 Unit	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang		6 Ruang	6 Ruang	3.200.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	6 Ruang	3.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	1 Ruang	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	200.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	2 Ruang	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit		5 Unit	5 Unit	1.000.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	5 Unit	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas														
			Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Ruang		13 Ruang	13 Ruang	2.028.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	13 Ruang	2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang		7 Ruang	7 Ruang	1.200.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	7 Ruang	1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang		5 Ruang	5 Ruang	500.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	5 Ruang	650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	200.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	2 Ruang	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.200.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	10 Unit	1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	350.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Paket	650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	17280 Peserta Didik		17280 Peserta Didik	17280 Peserta Didik	2.177.880.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	17280 Peserta Didik	2.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket		10 Paket	10 Paket	1.200.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	10 Paket	1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	187 Satuan Pendidikan		187 Satuan Pendidikan	187 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	187 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar														
			Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	100 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	100 Orang	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	187 Satuan Pendidikan		187 Satuan Pendidikan	187 Satuan Pendidikan	25.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	187 Satuan Pendidikan	175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	187 Satuan Pendidikan		187 Satuan Pendidikan	187 Satuan Pendidikan	16.394.780.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	187 Satuan Pendidikan	16.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	500.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	2 Ruang	650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Rasio Siswa Sekolah Menengah Pertama Per Sekolah*	136 -		136 -	136 -	21.156.980.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	1 Unit	22.980.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	1 Unit	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	3.200.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	1 Ruang	3.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	900.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	4 Ruang	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	300.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	2 Ruang	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	500.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	2 Ruang	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	500.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	2 Ruang	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit		3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	3 Unit	650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang		12 Ruang	12 Ruang	1.700.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	12 Ruang	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah														
			Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		3 Ruang	3 Ruang	500.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	3 Ruang	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	200.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	2 Ruang	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	800.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	4 Ruang	900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		3 Unit	3 Unit	700.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	3 Unit	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket		10 Paket	10 Paket	500.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	10 Paket	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6816 Peserta Didik		6816 Peserta Didik	6816 Peserta Didik	880.920.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	6816 Peserta Didik	900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	20 Paket		20 Paket	20 Paket	600.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	20 Paket	750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	6816 Peserta Didik		6816 Peserta Didik	6816 Peserta Didik	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	6816 Peserta Didik	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	51 Satuan Pendidikan		51 Satuan Pendidikan	51 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	51 Satuan Pendidikan	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	350 Orang		350 Orang	350 Orang	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	350 Orang	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	51 Satuan Pendidikan		51 Satuan Pendidikan	51 Satuan Pendidikan	8.976.060.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	51 Satuan Pendidikan	9.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Rasio Siswa Pendidikan Anak Usia Dini Per Sekolah*	27 -		27 -	27 -	1.130.911.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	2 Unit	1.445.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD														
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	350.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	2 Unit	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD														
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		3 Unit	3 Unit	400.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	3 Unit	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD														
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	2 Paket	65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3575 Peserta Didik		3575 Peserta Didik	3575 Peserta Didik	62.940.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	3575 Peserta Didik	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	2 Paket	65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	3525 Peserta Didik		3525 Peserta Didik	3525 Peserta Didik	52.971.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	3525 Peserta Didik	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD														
			Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	30.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	100 Satuan Pendidikan	45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	255 Orang		255 Orang	255 Orang	35.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	255 Orang	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	100 Orang	65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	50 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Rasio Siswa Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Per Sekolah*	79 -		79 -	79 -	14.268.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	1396 Peserta Didik	14.375.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1396 Peserta Didik		1396 Peserta Didik	1396 Peserta Didik	8.622.600.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	1396 Peserta Didik	8.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	5.646.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	150 Orang	5.675.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	***Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 1000)***	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**72.774.962,00**						**100 Persen**	**250.000.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Presentase Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan*	53 Persen		53 Persen	53 Persen	72.774.962,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	72.774.962,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.660.000.000,00**							**2.926.164.700,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**1.660.000.000,00**							**2.926.164.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Peningkatan Prestasi Olahraga*** ***Peningkatan Prestasi Olahraga***	**15-18 undefined 15-18 Poin**		**15-18 undefined 15-18 Poin**	**15-18 undefined 15-18 Poin**	**225.000.000,00**						**15-18 undefined 15-18 Poin**	**822.064.700,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Peningkatan Sarana Prasarana Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kab/Kota*	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Unit	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Unit	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/kota*	50 Persen		50 Persen	50 Persen	100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	-	6 Dokumen	222.064.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	-	6 Dokumen	222.064.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Peningkatan Prestasi Olahraga Tkt Propinsi*	10 undefined		10 undefined	10 undefined	75.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	80 Orang	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	80 Orang		80 Orang	80 Orang	75.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	80 Orang	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	***Presentase Organisasi Kepramukaan Yang Aktiv***	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**1.435.000.000,00**						**100 Persen**	**2.104.100.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah Kwartir Ranting Yang Aktiv Dalam kegiatan Pramuka*	12 Kwaran		12 Kwaran	12 Kwaran	1.435.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	1 Unit	2.104.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.435.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	1 Unit	2.104.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	J U M L A H							**297.473.947.726,00**							**335.014.984.547,00**	

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2021 s/d 2023
Provinsi Kabupaten Tojo Una-Una

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**									
1.01. 1.01.01	**Pendidikan**									
1.01. 1.01.01. 01	**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**									
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
5.2.01	**Perencanaan, Penggunaan, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**									
5.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	30 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100.00%	5 Dokumen	15 Dokumen	50.0%
5.2.05	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
5.2.05.09	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12000 Orang	1950 Orang	1977 Orang	1977 Orang	100.00%	2100 Orang	6027 Orang	50.2%
5.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
5.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1500 Orang	100 Orang	235 Orang	235 Orang	100.00%	150 Orang	485 Orang	32.3%
5.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
5.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	30 Laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100.00%	5 Laporan	15 Laporan	50.0%
5.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60 Paket	5 paket	10 Paket	10 Paket	100.00%	6 Paket	21 Paket	35.0%
5.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	45 paket	6 Paket	10 Paket	10 Paket	100.00%	8 paket	24 Paket	53.3%
5.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	985 laporan	150 Laporan	135 laporan	135 laporan	100.00%	181 Laporan	466 Laporan	47.3%

5.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
5.2.07.09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0.00%	4 Unit	5 Unit	62.5%
5.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	342 Unit	55 Unit	90 Unit	90 Unit	100.00%	35 Unit	180 Unit	52.6%
5.2.08		**Penyediaan Jasa Pununjang Urusan Pemerintah Daerah**									
5.2.08.03		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	5 Paket	12 Paket	12 Paket	100.00%	3 Paket	20 Paket	55.6%
5.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	580 Laporan	60 laporan	71 laporan	71 laporan	100.00%	181 Laporan	352 Laporan	60.7%
5.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
5.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	360 Unit	58 Unit	60 Unit	60 Unit	100.00%	56 Unit	174 Unit	48.3%
5.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0.00%	2 Unit	4 Unit	33.3%
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**										
5.2.15		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**									
5.2.15.01		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	80 Unit	50 Unit	20 Unit	20 Unit	200.00%	4 Unit	74 Unit	92.5%
5.2.15.03		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	25 Ruang	5 Ruang	8 Ruang	8 Ruang	100.00%	9 Ruang	22 Ruang	88.0%
5.2.15.04		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	50 Ruang	12 Ruangan	25 Ruang	25 Ruang	100.00%	10 Ruang	40 Ruang	80.0%
5.2.15.08		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	36 Ruang	8 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	100.00%	12 Raung	22 Ruang	61.1%
5.2.15.11		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	26 Ruang	8 Ruang	4 Ruang	4 Ruang	100.00%	2 Ruang	14 Ruang	53.8%

5.2.15.13			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	21 Unit	6 Unit	4 Unit	4 Unit	100.00%	11 Uni	21 Unit	100.0%
5.2.15.21			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	92563 Peserta Didik	16520 Peserta Didik	7263 Peserta Didik	7263 Peserta Didi	100.00%	7263 Peserta Didi	61046 Peserta Didik	66.0%
5.2.15.22			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	120 Paket	8 Paket	46 Paket	46 Paket	100.00%	15 Paket	69 Paket	57.5%
5.2.15.23			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1110 Satuan Pendidikan	183 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0.00%	185 Satuan Pendidikan	368 Satuan Pendidikan	33.2%
5.2.15.24			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1110 Satuan Pendidikan	183 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0.00%	185 Satuan Pendidikan	368 Satuan Pendidikan	33.2%
5.2.15.27			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	150 Orang	100 Orang	0 Orang	0.00%	100 Orang	250 Orang	71.4%
5.2.15.29			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1110 Satuan Pendidikan	183 Satuan Pendidikan	185 Satuan Pendidikan	185 Satuan Pendidikan	185 Satuan Pendidikan	185 Satuan Pendidikan	553 Satuan Pendidikan	49.8%
5.2.16		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**										
			Pembangunan Fasilitas parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	11 Unit	4 Unit	24 Unit	24 Unit	100.00%	2 Unit	30 Unit	272.7%
5.2.16.14			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	150 Ruang	10 Ruang	41 Ruang	41 Ruang	100.00%	26 Ruang	77 Ruang	51.3%
5.2.16.32			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	41147 Peserta Didik	16785 Peserta Didik	6816 Peserta Didik	6816 Peserta Didi	100.00%	6816 Peserta Didi	20417 Peserta Didik	49.6%
5.2.16.37			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	300 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	100.00%	50 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	50.0%
5.2.16.39			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1938 Orang	300 Orang	323 Orang	323 Orang	100.00%	323 Orang	946 Orang	48.8%
5.2.16.43			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	300 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	100.00%	50 Satuan Pendidikan	200 Satuan Pendidikan	66.7%
5.2.17		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**										
5.2.17.01			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	55 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00%	12 Unit	17 Unit	30.9%
5.2.17.03			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	80 Unit	3 Unit	13 Unit	13 Unit	100.00%	29 Unit	45 Unit	56.3%

5.2.17.11			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21114 Peserta Didik	3480 Peserta Didik	3519 Peserta Didik	3519 Peserta Didik	100.00%	3519 Peserta Didik	10518 Peserta Didik	49.8%
5.2.17.13			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	21114 Peserta Didik	3480 Peserta Didik	3519 Peserta Didik	3519 Peserta Didik	100.00%	3519 Peserta Didik	10518 Peserta Didik	49.8%
5.2.17.14			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1296 Satuan Pendidikan	212 Satuan Pendidikan	216 Satuan Pendidikan	216 Satuan Pendidikan	100.00%	216 Satuan Pendidikan	644 Satuan Pendidikan	49.7%
5.2.17.16			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	320 Orang	20 Orang	250 Orang	250 Orang	100.00%	40 Orang	310 Orang	96.9%
5.2.17.17			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	650 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	216 Satuan Pendidikan	216 Satuan Pendidikan	100.00%	216 Satuan Pendidikan	532 Satuan Pendidikan	81.8%
5.2.18		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**										
5.2.18.12			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	8376 Peserta Didik	1312 Peserta Didik	1396 Peserta Didi	396 Peserta Didi	100.00%	1396 Peserta Didi	4104 Peserta Didik	49.0%
5.2.18.14			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal /Kesetaraan	1200 Orang	143 Orang	150 Orang	150 Orang	100.00%	487 Orang	780 Orang	65.0%
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN											
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan									
5.2.01.01			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	3 Dokumen	50.0%
1.01.04	**PROGRAM KAPASITAS PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**										-	
5.2.19		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota**										
5.2.19.03			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Prasarana Olahraga Kab/Kota	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	6 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00%	1 Unit	3 Unit	50.0%

5.2.19		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat daerah Daerah kabupaten**									
5.2.19.02		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	25 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	5 Dokumen	11 Dokumen	73.3%
5.2.19		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**									
5.2.19.01		Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	250 Orang	20 Orang	21 Orang	21 Orang	100.00%	75 Orang	116 Orang	46.4%
1.01.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPRAMUKAAN**										
5.2.22		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**									
5.2.22.06		Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten /Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00%	3 Unit	5 Unit	83.3%

Tabel. T-III.1.
Prioritas dan Sasaran Dinas Pendidikan, Pem

No.	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah
1	2	3	4
1		Meningkatkan Sumberdaya Manusia Tojo Una-Una Yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pemangunan Manusia (IPM)

uda dan Olahraga

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
5	6
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan
	Harapan Lama Sekolah
	Rata-Rata Lama Sekolah
Meningkatnya prestasi olahraga dan peranan pemuda dalam pembangunan	Jumlah Prestasi Bidang Olahraga dan Kepemudaan Tingkat Propinsi

Tabel. T-I
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pe
Kabupaten Tojo

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Pe	
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)
-1	-2	-3	-4	5	6
1	Nilai SAKIP OPD			CC	B
2	Indeks Pendidikan	1.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.		0,2 - 0,25	0,25 - 0,30
3	Rata-Rata Lama Sekolah	2.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.		8,59 - 8,79	8,79 - 8,99
4	Harapan Lama Sekolah	3.Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		12,48 - 12,68	12,68 - 12,88
5	Jumlah Prestasi Bidang Olahraga dan Kepemudaan Tingkat Propinsi			4 - 8	8 - 12

1.3.
endidikan, Pemuda dan Olahraga
› Una-una

erangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
Tahun 2024(tahun n)	Tahun 2025(tahun n+1)	Tahun 2022(tahun n-2)	Tahun 2023(tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (Thn n+1	
7	8	9	10	11	12	13
BB	BB - A	B	B	BB	BB - A	
0,30 - 0,35	0,35 - 0,40	0,62	0,63	0,63	0,64	
8,99 - 9,19	9,19 - 9,39	8,41	8,45	8,46	8,47	
12,88 - 13,08	13,08 - 13,28	12,36	12,40	12,41	12,42	
8 - 12	12 - 15	8	10	12	13	

TUJUAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TOJO UNA UNA

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
1	Meningkatkan Sumberdaya Manusia Tojo Una-Una Yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,89-67,74

SASARAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TOJO UNA UNA

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024
1	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	BB
2	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,30 - 0,35
		Harapan Lama Sekolah	8,99 - 9,19
		Rata-Rata Lama Sekolah	12,88 - 13,08
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peranan Pemuda Dalam Pembangunan	Jumlah Prestasi Bidang Olahraga dan Kepemudaan Tingkat Propinsi	8 - 12

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS P
KABUPATEN T

NO	SASARAN	IND
1.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks I
		Rata - ra
		Harapar
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peranan Pemuda dalam Pembangunan	Jumlah Kepemu
3.	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SA dan Ola

ENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
'OJO UNA UNA

IKATOR/ TUJUAN SASARAN	**TARGET**
Pendidikan	0,25 Indeks
ata Lama Sekolah	8,79 Tahun
ı lama Sekolah	12,68 Tahun
Prestasi Bidang Olahraga dan daan Tingkat Propinsi	8 - 12
KIP Dinas Pendidikan, Pemuda hraga	BB

Rencana Kerja T.A 2024

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

SUBAG. PERENCANAAN PROGRAM, Datin, dan Humas

Jln. Sultan Hasanuddin No. 115
Kel. Ampana, Kec. Ampana Kota
Pos 94683

(0464) 22221/ Fax 21877

perencanaandinkestouna@gmail.com/

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas perkenannya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una di dalamnya berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Serta Pagu Indikatif yang di butuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Tahun anggaran 2024, yang diuraikan berdasarkan kelompok program (kegiatan) utama, penunjang dan regular.

Sesuai dengan kedudukannya, dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021 – 2026.

Kami sangat menyadari bahwa Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una di tahun yang akan datang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik materil maupun moril dalam penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, dan akhir kata semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Ampana, Maret 2023.

Kepala Dinas Kesehatan,
Kabupaten Tojo Una Una

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KESEHATAN TOJO UNA-UNA

Dra. Jafanet Alfari, MAP, M.Kes
Pembina Tingkat
Nip . 19650115 199303 2 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 30
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas, Fungsi OPD Dinas Kesehatan 34
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 41
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 66

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 71
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 71
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD Dinas Kesehatan 74

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 77

BAB V PENUTUP 103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una..7

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una tahun 2021 – 2022 31

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2024..... 41

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Tojo Una Una 67

Tabel 3.1. Prioritas dan Sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una..... 73

Tabel 3.2 Tujuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una..... 74

Tabel 3.3 Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una..... 75

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una 76

Tabel 4.1 Sasaran dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan 77

Tabel Matrix Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2024 85

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengamanatkan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yaitu RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah, dalam hal ini penyusunan RENSTRA PERANGKAT DAERAH dan RENJA PERANGKAT DAERAH. Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis perangkat daerah periode 5 tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif; sedangkan Renja Perangkat Daerah adalah rencana kerja perangkat daerah periode 1 tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan tetap memperhatikan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. perencanaan dan penganggaran berpedoman pula pada Permendagri 90 Tahun 2019 yang mengatur tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Renja Perangkat Daerah ini akan menjadi acuan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo

Una Una dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una Una.

Penyusunan Renja OPD 2023 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antara usulan tingkat kecamatan, kegiatan yang disusun di tingkat dinas, kajian di tingkat Kabupaten, serta usulan dari para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD Kabupaten, usulan ke Provinsi maupun ke tingkat pusat.

Renja OPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024, termasuk di dalamnya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Dinas Kesehatan tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja OPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi

Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Dokumen Renja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2024 merupakan pedoman resmi bagi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-una dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tojo Una-una selama satu tahun. Renja ini menyajikan acuan penentuan program kegiatan tahun 2024 yang telah dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2024 ini untuk menyediakan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Pembangunan Kesehatan dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Tojo Una-una.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review pelaksanaan renja OPD tahun sebelumnya berguna untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian program.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Secara umum Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Tojo Una Una untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tersebut, didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. *review* terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun 2021 dan perkiraan capaian Tahun 2022 dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB-A	CC	B	B	100 %	B	B	50%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlasananya penyusunan dokumen - dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya	108 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100 %	18 Dokumen	54 Dokumen	50 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100 %	18 Dokumen	54 Dokumen	50 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	108 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100 %	18 Dokumen	54 Dokumen	50 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	36 Bulan	50 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	537 Orang	530 Orang	530 Orang	512 Orang	96,6 %	535 Orang	530 Bulan	99 %
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	50 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	100 %	2 Keg	6 Keg	50 %
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	50 %
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	50 %
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	0 Orang	4 Orang	0 Orang	0 %	4 Orang	4 Orang	14 %
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	96 PKM	16 PKM	16 PKM	16 PKM	100 %	16 PKM	48 PKM	50 %
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	50 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penunjang kebutuhan pelayanan administrasi perkatoran	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	36 Bulan	50 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	90 Paket	10 Paket	12 Paket	12 Paket	100 %	14 Paket	36 Paket	40 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	6 Paket	3 Paket	9 Paket	300 %	3 Paket	18 Paket	86 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket	7 Paket	7 Paket	19 Paket	271,4 %	7 Paket	33 Paket	79 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	2 Paket	3 Paket	3 Paket	100 %	3 Paket	8 Paket	44 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	315 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	33 Laporan	66 %	50 Laporan	133 Laporan	42 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan perkatoran	124 Unit	1 Unit	25 Unit	10 Unit	40 %	24 Unit	35 Unit	28 %
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	1 Unit	2 Unit	9 Unit	450 %	1 Unit	11 Unit	157 %
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Paket	0 Paket	20 Paket	0 Paket	0 %	20 Paket	20 Paket	20 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	2 Unit	1 Unit	0 Unit	0 %	1 Unit	3 Unit	50 %
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	2 Unit	33 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0 %	1 Unit	1 Unit	20 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan perkatoran	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	36 Bulan	50 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	50 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	50 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	50 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan perkatoran	906 Unit	100 Unit	151 Unit	161 Unit	107 %	151 Unit	412 Unit	45 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1012 Unit	81 Unit	161 Unit	161 Unit	100 %	165 Unit	407 Unit	40 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	10 Unit	20 Unit	20 Unit	100 %	20 Unit	50 Unit	42 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	0 / 1.000 KH	5 / 1.000 KH	10 / 1.000 KH	9 / 1.000 KH	111,1 %	10 / 1.000 KH	5 / 1.000 KH	0 %
		Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH	89 / 1.000 KH	247 / 1.000 KH	5 / 1.000 KH	1 / 1.000 KH	500 %	5 / 1.000 KH	127 / 1.000 KH	70 %
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan puskesmas (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Cakupan puskesmas pembantu (%)	35 %	33,56 %	40 %	33 %	83 %	40 %	34 %	97 %
		Persentase Puskesmas yang memiliki Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik sesuai standar	80 %	30 %	50 %	81 %	162 %	62,5 %	50 %	63 %
		Persentase Bahan Habis Pakai tersedia sesuai kebutuhan puskesmas	80 %	24 %	30 %	90 %	300 %	33 %	30 %	38 %
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 %	1 Unit	1 Unit	20 %
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	5 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0 %	1 Unit	1 Unit	20 %
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	16 Unit	7 Unit	1 Unit	0 Unit	0 %	2 Unit	9 Unit	56 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	10 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	100 %	2 Unit	4 Unit	40 %
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	15 Unit	0 Unit	3 Unit	1 Unit	33 %	3 Unit	4 Unit	27 %
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	9 Unit	4 Unit	1 Unit	6 Unit	600 %	1 Unit	11 Unit	122 %
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2029 Unit	24 Unit	357 Unit	219 Unit	61 %	360 Unit	603 Unit	30 %
		Kegiatan singkronisasi data Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	6 Keg	0 Keg	1 Keg	0 Keg	0 %	1 Keg	1 Keg	17 %
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	826 Unit	126 Unit	130 Unit	0 Unit	0 %	135 Unit	261 Unit	32 %
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1100 Paket	59 Paket	175 Paket	196 Paket	112 %	180 Paket	435 Paket	40 %
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	345 Paket	59 Paket	50 Paket	72 Paket	144 %	55 Paket	186 Paket	54 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan	75 %	33 %	41 %	8 %	20 %	50 %	41 %	55 %
		Persentase penanganan kasus Gizi Buruk sesuai standar	50 %	10 %	10 %	100 %	1000 %	20 %	100 %	200 %
		Persentase Cakupan Pneumonia balita yang di tangani secara standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase cakupan Penderita Kusta yang di tangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Cakupan Penderita diare yang ditangani (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Cakupan Pengobatan penderita Malaria	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Kasus Gigitan hewan penular Rabies yang di tangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Presentase Puskesmas yang Melaksanakan POPMC	76 %	63 %	65 %	67 %	103 %	67 %	65 %	86 %
		Persentase kecamatan yang menerapkan Implementasi KTR pada 9 Tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	38,5 %	0 %	7,7 %	0 %	0 %	15,4 %	7,7 %	20 %
		Persentase Capaian UCI (Universal Child Imunisation)	75 %	50 %	55 %	31 %	56 %	85 %	55 %	73 %
		Persentase Cakupan Vaksinasi Covid 19	70 %	20 %	30 %	70 %	233 %	40 %	30 %	43 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20341 Orang	2513 Orang	3396 Orang	2370 Orang	70 %	3391 Orang	8274 Orang	41 %
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19415 Orang	2730 Orang	3241 Orang	2571 Orang	79 %	3237 Orang	8538 Orang	44 %
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18491 Orang	2030 Orang	3087 Orang	2721 Orang	88 %	3083 Orang	7834 Orang	42 %
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	87707 Orang	5161 Orang	14656 Orang	5434 Orang	37 %	14610 Orang	25205 Orang	29 %
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	153470 Orang	15001 Orang	98601 Orang	24478 Orang	25 %	99249 Orang	138728 Orang	90 %
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	596408 Orang	36024 Orang	15131 Orang	52045 Orang	344 %	15746 Orang	103815 Orang	17 %
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95867 Orang	8135 Orang	35143 Orang	10833 Orang	31 %	35533 Orang	54501 Orang	57 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	213908 Orang	10153 Orang	9667 Orang	5897 Orang	61 %	9775 Orang	25825 Orang	12 %
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58844 Orang	2460 Orang	331 Orang	2032 Orang	614 %	333 Orang	4825 Orang	8 %
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2004 Orang	187 Orang	4980 Orang	187 Orang	4 %	4970 Orang	5344 Orang	267 %
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29380 Orang	132 Orang	5035 Orang	132 Orang	3 %	5286 Orang	5550 Orang	19 %
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	32680 Orang	2961 Orang	5035 Orang	2961 Orang	59 %	5286 Orang	11208 Orang	34 %
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	100 %	2 Dok.	6 Dok.	50 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	6 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	100 %	1 Dok.	3 Dok.	50 %
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	36920 Paket	2055 Paket	5000 Paket	9720 Paket	194 %	5500 Paket	17275 Paket	47 %
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	100 %	1 Dok.	3 Dok.	50 %
		Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana Gizi Buruk Pada balita	11 PKM	1 PKM	5 PKM	5 PKM	100 %	1 PKM	5 PKM	50 %
		Jumlah bayi usia kurang dari 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	10102 Bayi	1149 Bayi	1530 Bayi	1432 Bayi	94 %	1684 Bayi	4265 Bayi	42 %
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dok.	0 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	100 %	2 Dok.	3 Dok.	25 %
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	72 Dok.	12 Dok.	12 Dok.	9 Dok.	75 %	12 Dok.	24 Dok.	33 %
		Jumlah sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	222 Unit	172 Unit	182 Unit	Unit	0 %	192 Unit	182 Unit	82 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Desa/Kel. Yang Melaksanakan STBM	146 Desa	90 Desa	95 Desa	Desa	0 %	102 Desa	95 Desa	65 %
		Jumlah Keluarga yang menggunakan jamban sehat	43.722 KK	31014 KK	31.014 KK	KK	0 %	32791 KK	31014 KK	71 %
		Jumlah Unit Yankes Yang Lakukan Tata Kelola Limbah Medis	16 PKM	16 PKM	16 PKM	PKM	0 %	16 PKM	16 PKM	100 %
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	6 Dok.	0 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	100 %	1 Dok.	2 Dok.	33 %
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	90 Dok.	8 Dok.	8 Dok.	5 Dok.	63 %	12 Dok.	25 Dok.	28 %
		Jumlah Pangkalan Saka Bakti Husada yang terbentuk di Kecamatan	63 Klmpk	0 Klmpk	6 Klmpk	0 Klmpk	0 %	9 Klmpk	9 Klmpk	14 %
		Jumlah Sarana Prasarana Media Promosi Kesehatan	110 Media	10 Media	20 Media	10 Media	50 %	20 Media	40 Media	36 %
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	24 Dok.	7 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	100 %	2 Dok.	11 Dok.	46 %
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72 Dok.	12 Dok.	12 Dok.	12 Dok.	100 %	12 Dok.	36 Dok.	50 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	5 Dok.	0 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	100 %	1 Dok.	2 Dok.	40 %
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	30 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	0 Laporan	0 %	5 Laporan	5 Laporan	17 %
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6 Dok.	0 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	100 %	1 Dok.	2 Dok.	33 %
		Jumlah Penderita Kusta yang di tangani sesuai standar	51 Orang	15 Orang	10 Orang	38 Orang	380 %	8 Orang	61 Orang	120 %
		Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan POPMC	66 PKM	13 PKM	10 PKM	16 PKM	160 %	11 PKM	40 PKM	61 %
		Jumlah kecamatan yang menerapkan Implementasi KTR pada 9 Tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	15 Kec.	0 Kec.	1 Kec.	0 Kec.	0 %	2 Kec.	2 Kec.	13 %
		Jumlah orang yang telah mendapatkan Vaksinasi Covid 19	114.399 Orang	76525 Orang	91519 Orang	93391 Orang	102 %	102959 Orang	91.519 Orang	80 %
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dok.	0 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	100 %	1 Dok.	2 Dok.	33 %
		Jumlah masyarakat dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui lembaga operator BPJS	160.486 Orang	160486	160.486 Orang	146758 Orang	91 %	160.486 Orang	160.486 Orang	100 %
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	86 Dok.	11 Dok.	11 Dok.	16 Dok.	145 %	16 Dok.	43 Dok.	50 %
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	4.800 Orang	624 Orang	800 Orang	1276 Orang	160 %	800 Orang	2700 Orang	56 %
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	45 Unit	0 Unit	9 Unit	9 Unit	100 %	9 Unit	18 Unit	40 %
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	18 Unit	15 Unit	15 Unit	13 Unit	87 %	18 Unit	15 Unit	83 %
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	43,8 %	0 %	12,5 %	0 %	0 %	25 %	0 %	0 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	50 %
		Terselenggaranya Diseminasi Informasi kesehatan melalui akses Internet	5 Keg	0 Keg	1 Keg	1 Keg	100 %	1 Keg	0 Keg	0 %
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	40 %
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	5 Paket	0 Paket	1 Paket	0 Paket	0 %	1 Paket	1 Paket	20 %
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menerapkan sistem manajemen mutu dengan baik	87,5 %	25 %	43,8 %	43,8 %	100 %	62,5 %	43,8 %	50 %
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	80 Unit	0 Unit	16 Unit	1 Unit	6 %	16 Unit	17 Unit	21 %
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	300 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	25 %	0 %	17 %	12 %	71 %	19 %	17 %	68 %
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen data kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	50 %
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	700 Orang	508 Orang	508 Orang	807 Orang	159 %	550 Orang	508 Orang	73 %
		Jumlah kegiatan rencana kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan	5 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100 %	1 Keg	3 Keg	60 %
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	50 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	274 Orang	20 Orang	50 Orang	20 Orang	40 %	50 Orang	90 Orang	33 %
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	274 Orang	20 Orang	50 Orang	20 Orang	40 %	50 Orang	90 Orang	33 %
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, UMOT, IRTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar	68 %	0 %	52 %	100 %	192 %	56 %	52 %	76 %
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diperiksa/diawasi	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	68 Dokumen	0 Dokumen	11 Dokumen	6 Dokumen	55 %	12 Dokumen	18 Dokumen	26 %
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase P-IRT yang mendapat izin Produksi	100 %	3 %	100 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	219 Dokumen	1 Dokumen	35 Dokumen	39 Dokumen	111 %	36 Dokumen	76 Dokumen	35 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase IRTP yang di lakukan Pengawasan Postmarket	100 %	13 %	100 %	88 %	88 %	100 %	100 %	100 %
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	685 Unit	12 Unit	103 Unit	24 Unit	23 %	111 Unit	147 Unit	21 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	89,33 %	84,2 %	86,33 %	72 %	83 %	87,08 %	86,33 %	97 %
		Persentase Posyandu Aktif	35,11 %	21,6 %	29,11 %	59 %	203 %	30,16 %	29,11 %	83 %
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan Kebijakan Germas	55 %	30 %	35 %	26 %	74 %	40 %	35 %	64 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2 Dokumen	3 Dokumen	25 %
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	35 %	22 %	25 %	59 %	236 %	27 %	25 %	71 %
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	395 Dokumen	0 Dokumen	41 Dokumen	3 Dokumen	7 %	62 Dokumen	65 Dokumen	16 %

Berdasarkan Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat di lihat bahwa untuk capaian indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ada yang mencapai target dan tidak mencapi target berikut hasil penjabaran masing – masing Program dan Kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di laksanakan dengan berdasarkan indikator tujuan Nilai Sakip OPD dan ada 8 kegiatan yang di laksanakan untuk menunjang pencapaian indikator yaitu sebagai berikut :
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di ukur dengan indikator tujuan Terlaksananya penyusunan dokumen - dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya dengan capaian indikator tahun 2022 yaitu 100% walaupun masih ada beberapa kendala seperti belum maksimalnya proses perencanaan sesuai dengan siklus dan alur perencanaan akan tetapi telah di sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Untuk mendukung kegiatan ini terdapat 2 Sub kegiatan dengan rata – rata capaian indikator 100%.
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di ukur dengan indikator tujuan Terlaksananya Pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan capaian indikator tahun 2022 yaitu 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala seperti keterlambatan proses Realisasi Keuangan akan tetapi telah di sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Untuk mendukung kegiatan ini terdapat 2 Sub kegiatan dengan rata – rata capaian indikator 98%.
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di ukur dengan indikator tujuan Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan capaian indikator tahun 2022 yaitu 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala seperti belum terjangkaunya seluruh UPT Pelaksana yg ada di wilyah kerja dan ada beberapa kegiatan tidak dapat di laksanakan. Untuk mendukung kegiatan ini terdapat 3 Sub kegiatan dengan rata – rata capaian indikator 67%.
   d. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di ukur dengan indikator tujuan Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan capaian indikator tahun 2022 yaitu 100%. Untuk mendukung kegiatan ini terdapat 1 Sub kegiatan dengan rata – rata capaian indikator 100%. Walaupun capaian indikator kegiatan ini dapat di capai dengan baik akan tetapi hasil yang di capai belum maksimal di karenakan ada kegiatan yang belum dapat di laksanakan.
   e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di ukur dengan indikator tujuan Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik

Daerah dengan capaian indikator tahun 2022 yaitu 100%. Untuk mendukung kegiatan ini terdapat 5 Sub kegiatan dengan rata – rata capaian indikator 100%. Walaupun capaian indikator kegiatan ini dapat di capai dengan baik akan tetapi hasil yang di capai belum maksimal di karenakan ada kegiatan yang belum dapat di laksanakan.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di ukur dengan indikator tujuan Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan perkatoran dengan capaian indikator tahun 2022 yaitu 40%. Untuk mendukung kegiatan ini terdapat 5 Sub kegiatan dengan rata – rata capaian indikator 40%. Rendannya capaian indikator Kegiatan ini dikarenakan belum dapat menyediakan barang sesuai dengan kebutuhan.
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di ukur dengan indikator tujuan Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan perkatoran dengan capaian indikator tahun 2022 yaitu 100%. Untuk mendukung kegiatan ini terdapat 3 Sub kegiatan dengan rata – rata capaian indikator 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga Jasa untuk menunjang urusan perkantoran dapat terpenuhi.
h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di ukur dengan indikator tujuan Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan perkatoran dengan capaian indikator tahun 2022 yaitu 100%. Untuk mendukung kegiatan ini terdapat 2 Sub kegiatan dengan rata – rata capaian indikator 100%. Walaupun capaian indikator kegiatan ini dapat di capai dengan baik akan tetapi hasil yang di capai belum maksimal dikarenakan masih ada kendaraan yang rusak berat dan rusak ringan tidak dapat di perbaiki.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat di laksanakan dengan berdasarkan indikator tujuan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH dengan capaian indikator tahun 2022 100% dan Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH dengan capaian indikator tahun 2022 100%. Dalam pelaksanaan Program ini terdapat 4 Kegiatan untuk menunjang pencapaian indaktor target yaitu sebagai berikut :
   a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di ukur dengan indikator tujuan Persentase Cakupan puskesmas, Persentase Cakupan Puskesmas Pembantu, Persentase Puskesmas yang memiliki Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik sesuai standar dan Persentase Bahan Habis Pakai tersedia sesuai kebutuhan puskesmas dengan rata – rata capian indikator 59%. Untuk mendukung kegiatan ini terdapat 10 Sub kegiatan dengan rata – rata capaian indikator 45%. Capaian indikator Kegiatan ini belum mencapai target dikarenakan masih banyak kebutuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan, Obat dan Bahan Habis Pakai yang belum tersedia sesuai dengan standar kebutuhan.

b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di ukur dengan indikator tujuan Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan, Persentase penanganan kasus Gizi Buruk sesuai standar, Persentase Cakupan Pneumonia balita yang di tangani secara standar, Persentase cakupan Penderita Kusta yang di tangani, Persentase Cakupan Penderita diare yang ditangani, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, Persentase Cakupan Pengobatan penderita Malaria, Persentase Kasus Gigitan hewan penular Rabies yang di tangani, Presentase Puskesmas yang Melaksanakan POPMC, Persentase kecamatan yang menerapkan Implementasi KTR pada 9 Tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll), Persentase Capaian UCI (Universal Child Imunisation), Persentase Cakupan Vaksinasi Covid 19, dan Persentase penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan rata – rata capian indikator 83%. Untuk mendukung kegiatan ini terdapat 30 Sub kegiatan dengan rata – rata capaian indikator 69%. Banyak hal yang mempengaruhi untuk pencapaian target indikator pada kegiatan ini karena merupakan kegiatan pemberian layanan kepada masayarakat dan aspek yang paling utama adalah dari segi Kualitas dan Kuantitas SDM serta sarana dan prasarana serta operasional kegiatan.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di ukur dengan indikator tujuan Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi dengan capaian indicator 0%. Untuk mendukung kegiatan ini terdapat 3 Sub kegiatan dengan rata – rata capaian indikator 75%. Sangat Rendahnya capaian indikator Kegiatan ini dikarenakan pemenuhan prasarana dan pelaksanaan kegiatan bimbingan tehknis belum di laksanakan.

d. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di ukur dengan indikator tujuan Persentase Puskesmas yang menerapkan sistem manajemen mutu dengan baik dengan capaian indicator 43%. Untuk mendukung kegiatan ini terdapat 3 Sub kegiatan dengan rata – rata capaian indikator 53%. Sangat Rendahnya capaian indikator Kegiatan ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan bimbingan tehknis belum berjalan secara berkesinambungan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di laksanakan dengan berdasarkan indikator tujuan Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar dengan capaian indikator tahun 2022 12% Dalam pelaksanaan Program ini terdapat 2 Kegiatan untuk menunjang pencapaian indaktor target yaitu sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota di ukur dengan indikator tujuan Tersedianya dokumen data kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar dengan capaian indikator 100%. Untuk mendukung kegiatan ini terdapat 3 Sub kegiatan dengan rata – rata capaian

indikator 100%. Hal ini menunjukan bahwa setiap dokumen untuk pemenuhan kebutuhan Sumberdaya Manusia kesehatan telah tersedia akan tetapi dalam pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan pada unit pelayanan kesehatan sesuai standar belum tercapai di karenakan kelangkaan profesi tertentu untuk tenaga kesehatan seperti dr, Gigi, dan Apoteker.

b. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di ukur dengan indikator tujuan Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan capaian indikator 40%. Untuk mendukung kegiatan ini terdapat 1 Sub kegiatan dengan rata – rata capaian indikator 40%. Permasalahan dalam pencapian indikator Kegiatan ini adalah keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman di laksanakan dengan berdasarkan indikator tujuan Presentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, UMOT, IRTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar dengan capaian indikator tahun 2022 100%. Dalam pelaksanaan Program ini terdapat 3 Kegiatan untuk menunjang pencapaian indaktor target yaitu sebagai berikut :

   a. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) di ukur dengan indikator tujuan Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diperiksa/diawasi dengan capaian indikator 55%. Untuk mendukung kegiatan ini terdapat 1 Sub kegiatan dengan rata – rata capaian indikator 55%. Sangat Rendahnya capaian indikator Kegiatan ini dikarenakan adanya kegiatan yang tidak dapat di laksanakan oleh Pihak POM.

   b. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga di ukur dengan indikator tujuan Persentase P-IRT yang mendapat izin Produksi dengan capaian indikator 85%. Untuk mendukung kegiatan ini terdapat 1 Sub kegiatan dengan rata – rata capaian indikator 85%. Belum tercapainya indikator Kegiatan ini dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku Produksi Pangan Industri Rumah Tangga untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Izin Produksi.

   c. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga di ukur dengan indikator tujuan Persentase IRTP yang di lakukan Pengawasan Postmarket dengan capaian indikator 23%. Untuk mendukung kegiatan ini terdapat 1 Sub kegiatan dengan rata – rata capaian indikator 23%. Sangat

Rendahnya capaian indikator Kegiatan ini dikarenakan adanya Pandemi adanya kegiatan yang tidak dapat di laksanakan.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di laksanakan dengan berdasarkan indikator tujuan Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan capaian indikator tahun 2022 72% dan Persentase Posyandu Aktif dengan capaian indikator tahun 2022 100%. Dalam pelaksanaan Program ini terdapat 2 Kegiatan untuk menunjang pencapaian indaktor target yaitu sebagai berikut :
   a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di ukur dengan indikator tujuan Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan Kebijakan Germas dengan capaian indikator 26%. Untuk mendukung kegiatan ini terdapat 1 Sub kegiatan dengan rata – rata capaian indikator 26%. Sangat Rendahnya capaian indikator Kegiatan ini dikarenakan kegiatan belum semua dapat di laksanakan.
   b. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di ukur dengan indikator tujuan Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri dengan capaian indikator 59%. Untuk mendukung kegiatan ini terdapat 1 Sub kegiatan dengan rata – rata capaian indikator 7%. Sangat Rendahnya capaian indikator Kegiatan ini dikarenakan belum maksimalnya pengawasan dan tindak lanjut dari berbagai macam kegiatan Pengembangan UKBM.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Tojo Una-Una terdiri atas wilayah daratan dan wilayah kepulauan dengan luas wilayah daratan 5.721,51 km2 dan luas laut 3.566,21 km2. Wilayah tersebut sebagian besar berada di daratan pulau sulawesi, sementara lainnya merupakan gugusan pulau-pulau kecil dimana 81 pulau sudah memiliki nama, serta sekitar 40 pulau diantaranya berpenghuni. Wilayah daratan terdiri dari 6 Kecamatan yakni Kecamatan Tojo, Kecamatan Tojo Barat, Kecamatan Ulubongka, Kecamatan Ampana Kota, Kecamatan Ratolindo dan Kecamatan Ampana Tete serta wilayah kepulauan terdiri dari 6 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Batudaka, Kecamatan Una-Una, Kecamatan Togean, Kecamatan Talatako, Kecamatan Walea Kepulauan, dan Kecamatan Walea Besar.

Kondisi geografis dengan luasnya wilayah Kabupaten Tojo Una-Una dan kondisi kependudukan dengan besarnya jumlah penduduk miskin memberikan peluang dan tantangan karena mempunyai dampak terhadap timbulnya masalah kesehatan yang komprehensif, oleh karena itu program/kegiatan yang dilaksanakan

harus memiliki tolok ukur serta indikator yang lengkap sehingga akan mudah dalam melakukan evaluasinya.

Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una, diukur dengan mempergunakan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan berdasarkan Peraturan menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2109, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan mengacu kepada indikator SPM yang ditetapkan Menteri Kesehatan, dan diatur dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una.

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tojo Una-Una, terdapat 12 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal untuk mengukur keberhasilan pelayanan kesehatan, dimana setiap tahun indikator ini diukur pencapaiannya dengan membandingkannya terhadap target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap capaian beberapa program dan kegiatan yang dilakukan pengawasan dan perhatian khusus, disebabkan karena indikator yang harus dicapai merupakan prioritas daerah dan nasional, maka hasil capaian dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Tojo Una Una tahun 2021 – 2022

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		100%	100%	100%	100%	74,1%	69,8%	74,1%	74,1%	
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		100%	100%	100%	100%	84,3%	79,3%	84,3%	84,3%	
3	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		100%	100%	100%	100%	88,4%	88,1%	88,4%	88,4%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
4	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Pelayanan Kesehatan Balita		100%	100%	100%	100%	53,2%	37,1%	53,2%	53,2%	
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		100%	100%	100%	100%	59,1%	96%	100%	100%	
6	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		100%	100%	100%	100%	36,8%	52,8%	68,8%	84,8%	
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		100%	100%	100%	100%	55,9%	71,6%	87,3%	100%	
8	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		100%	100%	100%	100%	29,2%	40,5%	51,8%	63,1%	
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (Dm)		100%	100%	100%	100%	25,7%	42,6%	59,5%	76,4%	
10	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berat		100%	100%	100%	100%	49,8%	76,4%	100%	100%	
11	Persentase pelayanan orang terduga TB sesuai standar	Pelayanan Orang Dengan Tuberkulosis (Tb)		100%	100%	100%	100%	10,1%	33,7%	57,3%	80,9%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv		100%	100%	100%	100%	58,7%	57%	58,7%	58,7%	

Berdasarkan tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una bahwa dari 12 indikator layanan rata – rata hanya mencapai 62,1% dari target yang di tentukan 100%, hal ini menggambarkan bahwa capian layanan indikator standar pelayanan minimal masih sangat jauh dari target hal ini tentunya di pengaruhi berbagai macam faktor yaitu ketersediaan SDM dari segi Kualitas dan Kuantitas, Sarana dan Prasarana, serta Operasional Kegiatan. Standar Pelayanan Minimal sangat berpengaruh terhadap capaian indikator Renstra serta Renja karena di dalam aturan Standar Pelayanan Minimal mengatur tentang pemberian layanan ke masyarakat untuk pencegahan dan pelayanan kejadian suatu penyakit dengan prinsip Promotif Prefentif dan Rehabilitatif.

Dalam pencapaian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dapat kita lihat dari sinergitas antara capaian SPM tahun 2022 dan Capaian output indikator program utama sesuai amanat pemerintah pusat antara lain Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin yang belum mencapai target yaitu semua Ibu Hamil dan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar sehingga berdampak pada Indikator Angka Kematian Ibu pada tahun 2022 dari target 5/1000 KH capaian 1/1000 KH atau masih terdapat 5 kasus kematian Ibu pada tahun 2022. Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir dan Balita yang belum mencapai target yaitu semua Bayi baru lahir dan Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar sehingga berdampak pada Indikator Angka Kematian bayi pada tahun 2022 dari target 10/1000 KH capaian 9/1000 KH atau masih terdapat 20 kasus kematian Bayi pada tahun 2022. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar yang belum mencapai target yaitu semua Anak pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar sehingga berdampak pada rendahnya

pencegahan dini terhadap resiko kejadian kasus Gizi kurang dan Gizi Buruk pada anak dan peyakit lainnya seperti Gigi dan mulut serta gangguan Ketajaman Indera. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif dan Usia Lanjut yang belum mencapai target yaitu semua Orang Pada Usia Produktif dan Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar sehingga berdampak pada kurangnya pencegahan atau deteksi dini terhadap kejadian Penyakit Tidak Menular dapat kita lihat pada Tahun 2022 penyakit Hipertensi / Tekanan Darah Tinggi masih merupakan penyakit terbanyak yang di temukan pada fasilitas pelayanan kesehatan yaitu sebanyak 23.430 Orang kemudian di urutan ke 2 terdapat penyakit Infeksi Akut Pada Saluran Pernapasan yaitu sebanyak 11.751 Orang dan berikutnya penyakit DM (Diabetes Melitus) berada di urutan ke 5 dengan jumlah kasus sebanyak 7.914 Orang. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dan DM (Diabetes Melitus) yang belum mencapai target yaitu semua Orang Penderita Hipertensi dan DM (Diabetes Melitus) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar sehingga Penyakit Tidak Menular masih merupakan penyakit yang merupakan Penyebab tertinggi terhadap kasus kematian hal ini di karenakan Hipertensi dan DM (Diabetes Melitus) merupakan pencetus dari penyebab terjadinya Penyakit tidak menular yang mematikan seperti Penyakit Jantung.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas, Fungsi OPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada tahun 2023 OPD Dinas Kesehatan terjadi perubahan Nomenklatur atu penggabungan dari 2 OPD sehingga menjadi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una. Kemudian Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una Sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una berupaya meningkatkan kualitas pembangunan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara berkesinambungan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta analisis terhadap gambaran capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una secara tugas dan fungsi mendukung Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tojo Una Una periode 2021 - 2026 pada Misi ke I yaitu “Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan” dan Misi ke IV yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang Berkeadilan” oleh karena itu untuk mendukung Misi tersebut Dinas Kesehatan kabupaten Tojo Una Una merumuskan Rencana Strategis 2021 – 2026 dengan Tujuan Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat serta indikator tujuan Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk dan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat serta Sasaran Strategis Penduduk Tumbuh Seimbang dan Terjaminya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar bagi seluruh masyarakat dan meningkatkan status kesehatan Ibu dan Anak.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una di rumuskan lah isu – isu penting yang harus di laksanakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan
2. Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan
3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Percepatan penurunan stunting
5. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular
6. Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)
7. Peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
8. Integrasi kepesertaan JKN
9. Penggerakan masyarakat melalui Stakeholder dan Mitra Kerja dalam pelaksanaan program keluarga berencana

Untuk menilai tingkat keberhasilan dalam pelaksanan isu isu penting tersebut dapat di lihat pada capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Pada tahun 2022 sebagi berikut :

1. Usia Harapan Hidup Target 2022 66,13 Capaian 2022 66,08
2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Target 2022 17,68%, Capaian 2022 17,34%

3. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Target 2022 10/1000 KH, Capaian 2022 9/1000 KH
4. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) per 1000 kelahiran Target 2022 1.000 KH, Capaian 2022 999 KH
5. Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup Target 2022 10/1000 KH, Capaian 2022 9/1000 KH
6. Angka Kematian Ibu per 1.000 kelahiran hidup Target 2022 5/1000 KH, Capaian 2022 1/1000 KH
7. Rasio posyandu per satuan balita (per 1.000 balita) Target 2022 20/1000 Balita, Capaian 2022 14/1000 Balita
8. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000) Target 2022 5/10.000 Pddk, Capaian 2022 4/10.000 Pddk
9. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000) Target 2022 2/100.000, Capaian 2022 2/100.000
10. Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000) Target 2022 4/10.000, Capaian 2024 2/10.000
11. Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000) Target 2022 5/10.000, Capaian 2022 4/10.000
12. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) Target 2022 95%, Capaian 2022 79,5%
13. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) Target 2022 85%, Capaian 2021 88%
14. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Target 2022 85%, Capaian 2022 31%
15. Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%) Target 2022 40%, Capaian 2022 100%
16. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) Target 2022 100%, Capaian 2022 100%
17. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 10.000 penduduk) Target 2021 15/10.000 Pddk, Capaian 2022 8,4/10.000 Pddk
18. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Target 2022 2/100.000, Capaian 2022 4/100.000

19. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%) Target 2022 90%, Capaian 2022 100%
20. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) Target 2022 100%, Capaian 2022 100%
21. Penderita diare yang ditangani (%) Target 2022 100%, Capaian 2022 100%
22. Angka kejadian Malaria (per 100.000) Target 2022 5/100.000 Pddk, Capaian 2021 0,5/100.000 Pddk
23. Tingkat kematian akibat malaria Target 2022 0, Capaian 2022 0
24. Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat Target 2022 100%, Capaian 2022 100%
25. Cakupan puskesmas (%) Target 2022 100%, Capaian 2022 100%
26. Cakupan pembantu puskesmas (%)Target 2022 40%, Capaian 2022 33,6%
27. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)Target 2022 100%, Capaian 2022 100%.
28.

Dari data capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat kita lihat bahwa dari 34 Indikator Kinerja yang mencapai target sebanyak 21 Indikator Sedangkan yang belum mancapai target sebanyak 13 Indikator dari hasil analisis situasi Program dan Kegiatan yang belum mencapai target maupun yang sudah mencapai target di dapat berbagai macam permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara lain Deteksi Dini penyakit sesuai standar pada penduduk sasaran masih belum optimal/pencegahan penyakit melalui perilaku dan lingkungan belum optimal, Keterlambatan informasi analisa kinerja bidang kesehatan secara terintegrasi kepada pimpinan, Konvergensi lintas sektor belum berjalan dengan baik, Pemberdayaan masyarakat masih rendah diukur dari Posyandu aktif masih kurang (26,11%) dan Pelayanan dalam posyandu belum terpadu, SDM Kesehatan belum terampil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik preventif dan promotif permasalahan penyakit/masalah kesehatan lainnya yang terjadi di masyarakat, Pemberdayaan SDM Kesehatan yang belum sesuai Profesi atau pendidikan, Sinkronisasi Evaluasi dan Perencanaan lintas program/Sektor belum Maksimal, Belum optimal Tatakelola Administrasi yang baik (Good Governance), Manajemen Penyediaan obat dan BMHP yang dimulai dari

analisa RKO belum disusun dengan baik menurut paradigma sehat yang mendukung Puskesmas untuk melakukan Preventif dan Promotif Kesehatan.

Dalam merumuskan metode pemecahan masalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una harus mampu menjawab setiap tantangan dan mengadaptasi peluang yang ada agar dapat menghasilkan Rencana Program dan Kegiatan yang akan di tuangkan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2024.

Berdasarkan permasalah yang telah di uraikan di atas maka sangat perlu dilaksanakan kegiatan peningkatan Deteksi Dini penyakit sesuai standar, Penguatan Sistem informasi analisa kinerja bidang kesehatan secara terintegrasi, Lebih memperkuat Konvergensi lintas sektor dalam setiap pelaksanaan kegiatan, Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan Posyandu aktif dan terpadu, Meningkatkan keterampilan SDM Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik preventif dan promotif serta permasalahan penyakit/masalah kesehatan lainnya yang terjadi di masyarakat, Sinkronisasi Evaluasi dan Perencanaan lintas program/Sektor perlu dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan tahapan yanga ada, mengoptimalkan Tatakelola Administrasi yang baik (Good Governance), Memperkuat Manajemen Penyediaan obat dan BMHP yang dimulai dari analisa RKO yang juga harus mengacu pada paradigma sehat yang mendukung Puskesmas untuk melakukan Preventif dan Promotif Kesehatan.

Untuk melaksanakan strategi pemecahan masalah tentunya harus didukung dengan ketersediaan SDM yang berkualitas, Sarana dan Prasarana serta dukungan Operasional kegiatan, sehingga dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2024 di tuangkan dalam Program dan Kegiatan seuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah yaitu sebagi berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
   d. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
   a. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
   b. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pengendalian Penduduk
   a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
   b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
   a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
   b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
   c. KegiatanPengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
   d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
8. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
   a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk melihat kesesuaian antara hasil analisis kebutuhan dengan Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Nilai SAKIP OPD**	**B**	**59.810.841.046**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Nilai SAKIP OPD**	**B**	**62.212.592.017**	
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Terlasananya penyusunan dokumen - dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya**	**18 Dokumen**	**10.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Terlasananya penyusunan dokumen - dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya**	**18 Dokumen**	**150.570.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	66.570.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18 Dokumen	84.000.000	
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**12 Bulan**	**47.410.423.766**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**12 Bulan**	**47.439.223.766**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	535 Orang	47.405.423.766	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	535 Orang	36.440.018.911	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	28.800.000	
C	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah**	**16 PKM**	**5.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah**	**16 PKM**	**28.800.000**	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	28.800.000	
D	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian**	**2 Keg**	**10.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian**	**2 Keg**	**57.600.000**	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	28.800.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	5.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	28.800.000	
E	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terpenuhinya penunjang kebutuhan pelayanan administrasi perkatoran**	**12 Bulan**	**235.530.750**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terpenuhinya penunjang kebutuhan pelayanan administrasi perkatoran**	**12 Bulan**	**462.980.750**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	4.940.750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	4.940.750	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	37.450.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	220.590.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	220.590.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	5.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	200.000.000	
F	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan perkatoran**	**24 Unit**	**25.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan perkatoran**	**24 Unit**	**1.840.419.071**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	5.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.240.419.071	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	5.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	5.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	
G	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan perkatoran**	**12 Bulan**	**11.812.998.430**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan perkatoran**	**12 Bulan**	**11.812.998.430**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	228.278.162	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	228.278.162	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11.584.720.268	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11.584.720.268	
H	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan perkatoran**	**151 Unit**	**301.888.100**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan perkatoran**	**151 Unit**	**420.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	165 Unit	281.888.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	165 Unit	400.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000	
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KHAngka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH**	**4 Orang**	**51.768.154.821**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KHAngka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH**	**4 Orang**	**64.034.101.374**	
			Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH	**117 Orang**				**Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH**	**117 Orang**		
A	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan puskesmas (%)**	**100%**	11.928.575.000	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan puskesmas (%)**	**100%**	17.837.158.990	
			Cakupan puskesmas pembantu (%)	**34%**				**Cakupan puskesmas pembantu (%)**	**34%**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Persentase Puskesmas yang memiliki Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik sesuai standar	**62,5%**				**Persentase Puskesmas yang memiliki Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik sesuai standar**	**62,5%**		
			Persentase Bahan Habis Pakai tersedia sesuai kebutuhan puskesmas	**33%**				**Persentase Bahan Habis Pakai tersedia sesuai kebutuhan puskesmas**	**33%**		
	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	100.000.000	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1.000.000.000	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	100.000.000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1.000.000.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	100.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	3.408.583.990	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	100.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	1.000.000.000.	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	3.482.243.000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	3.482.243.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	360 Unit	3.249.317.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	360 Unit	3.249.317.000	
			Kegiatan singkronisasi data Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	1 Unit							
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	135 Unit	175.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	135 Unit	175.000.000	
	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	180 Paket	1.926.721.625	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	180 Paket	1.926.721.625	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	55 Paket	2.595.293.375	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	55 Paket	2.595.293.375	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
B	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase capian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan	50 %	38.339.349.821	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase capian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan	50 %	44.287.912.384	
			Persentase penanganan kasus Gizi Buruk sesuai standar	20 %				Persentase penanganan kasus Gizi Buruk sesuai standar	20 %		
			Persentase Cakupan Pneumonia balita yang di tangani secara standar	100%				Persentase Cakupan Pneumonia balita yang di tangani secara standar	100%		
			Persentase cakupan Penderita Kusta yang di tangani	100%				Persentase cakupan Penderita Kusta yang di tangani	100%		
			Persentase Cakupan Penderita diare yang ditangani (%)	100%				Persentase Cakupan Penderita diare yang ditangani (%)	100%		
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100%				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100%		
			Persentase Cakupan Pengobatan penderita Malaria	100%				Persentase Cakupan Pengobatan penderita Malaria	100%		
			Persentase Kasus Gigitan hewan penular Rabies yang di tangani	100%				Persentase Kasus Gigitan hewan penular Rabies yang di tangani	100%		
			Presentase Puskesmas yang Melaksanakan POPMC	67%				Presentase Puskesmas yang Melaksanakan POPMC	67%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Persentase kecamatan yang menerapkan Implementasi KTR pada 9 Tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	**15,4%**				**Persentase kecamatan yang menerapkan Implementasi KTR pada 9 Tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)**	**15,4%**		
			Persentase Capaian UCI (Universal Child Imunisation)	**60%**				**Persentase Capaian UCI (Universal Child Imunisation)**	**60%**		
			Persentase Cakupan Vaksinasi Covid 19	**40%**				**Persentase Cakupan Vaksinasi Covid 19**	**40%**		
			Persentase penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)	**100%**				**Persentase penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)**	**100%**		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3391 Orang	2.602.320.800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3391 Orang	2.602.320.800	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3237 Orang	110.240.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3237 Orang	1.306.044.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3083 Orang	246.340.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3083 Orang	478.513.825	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14610 Orang	246.340.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14610 Orang	858.373.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25567 Orang	764.624.750	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25567 Orang	764.624.750	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	99249 Orang	360.916.250	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	99249 Orang	878.109.875	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15746 Orang	100.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15746 Orang	262.936.900	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35533 Orang	100.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35533 Orang	100.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9775 Orang	100.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9775 Orang	100.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	333 Orang	100.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	333 Orang	260.638.875	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4970 Orang	341.590.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4970 Orang	341.590.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5286 Orang	356.660.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5286 Orang	356.660.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	157.107.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	209.950.075	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	100.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	2.267.870.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	3.268.939.850	
			Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana Gizi Buruk Pada balita	7 PKM				Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana Gizi Buruk Pada balita	7 PKM		
			Jumlah bayi usia kurang dari 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	1684 Bayi				Jumlah bayi usia kurang dari 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	1684 Bayi		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	213.799.354	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	328.094.750	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	192 Unit				Jumlah sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	192 Unit		
			Jumlah Desa/Kel. Yang Melaksanakan STBM	102 Desa				Jumlah Desa/Kel. Yang Melaksanakan STBM	102 Desa		
			Jumlah Keluarga yang menggunakan jamban sehat	32791 KK				Jumlah Keluarga yang menggunakan jamban sehat	32791 KK		
			Jumlah Unit Yankes Yang Lakukan Tata Kelola Limbah Medis	16 PKM				Jumlah Unit Yankes Yang Lakukan Tata Kelola Limbah Medis	16 PKM		
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	284.701.275	
			Jumlah Pangkalan Saka Bakti Husada yang terbentuk di Kecamatan	9 Kelompok				Jumlah Pangkalan Saka Bakti Husada yang terbentuk di Kecamatan	9 Kelompok		
			Jumlah Sarana Prasarana Media Promosi Kesehatan	20 Media				Jumlah Sarana Prasarana Media Promosi Kesehatan	20 Media		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 Dokumen	5.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 Dokumen	28.800.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	100.000.000	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	278.800.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	400.000.000	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	2.663.325.875	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	3.678.355.675	
			Jumlah Penderita Kusta yang di tangani sesuai standar	8 Orang				Jumlah Penderita Kusta yang di tangani sesuai standar	8 Orang		
			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan POPMC	11 PKM				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan POPMC	11 PKM		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah kecamatan yang menerapkan Implementasi KTR pada 9 Tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	2 Kecamatan				Jumlah kecamatan yang menerapkan Implementasi KTR pada 9 Tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	2 Kecamatan		
			Jumlah orang yang telah mendapatkan Vaksinasi Covid 19	102959 Orang				Jumlah orang yang telah mendapatkan Vaksinasi Covid 19	102959 Orang		
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	23.338.801.630	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	23.338.801.630	
			Jumlah masyarakat dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui lembaga operator BPJS	160486 Orang							
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		umlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	800 Orang	100.000.000	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		umlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	800 Orang	100.000.000	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	5500 Paket	100.000.000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	5500 Paket	100.000.000	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Seha	1 Dokumen	100.000.000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Seha	1 Dokumen	100.000.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	2.921.162.016	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	3.000.000.000	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	18 Unit	100.000.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	18 Unit	362.922.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5 Laporan	41.830.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5 Laporan	41.830.000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	108.326.250	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	150.000.000	
C	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**		**Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**25%**	**15.000.000**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**		**Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**25%**	**400.000.000**	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	2 Dokumen	5.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	2 Dokumen	50.000.000	
			Terselenggaranya Diseminasi Informasi kesehatan melalui akses Internet	1 Kegiatan				Terselenggaranya Diseminasi Informasi kesehatan melalui akses Internet	1 Kegiatan		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	5.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	50.000.000	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
D	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Puskesmas yang menerapkan sistem manajemen mutu dengan baik**	**62,5%**	**1.485.230.000**	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Puskesmas yang menerapkan sistem manajemen mutu dengan baik**	**62,5%**	**1.509.030.000**	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	16 Unit	1.480.230.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	16 Unit	1.480.230.000	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	5.000.000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	28.800.000	
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)**	**19%**	**1.386.898.500**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)**	**19%**	**1.581.210.000**	
A	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**		**Tersedianya dokumen data kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar**	**1 Dokumen**	**1.381.898.500**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**		**Tersedianya dokumen data kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar**	**1 Dokumen**	**1.481.210.000**	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	550 Orang	1.334.688.500	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	550 Orang	1.434.000.000	
			Jumlah kegiatan rencana kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan	1 Kegiatan				Jumlah kegiatan rencana kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan	1 Kegiatan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	47.210.000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	47.210.000	
B	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot**		**Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**50 Orang**	**5.000.000**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot**		**Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**50 Orang**	**100.000.000**	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	5.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	100.000.000	
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**Presentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, UMOT, IRTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar**	**56%**	**334.994.000**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**Presentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, UMOT, IRTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar**	**56%**	**446.923.100**	
A	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**		**Persentase P-IRT yang mendapat izin Produksi**	**100%**	187.798.000	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**		**Persentase P-IRT yang mendapat izin Produksi**	**100%**	**299.727.100**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	36 Dokumen	187.798.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	36 Dokumen	299.727.100	
B	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**		**Persentase IRTP yang di lakukan Pengawasan Postmarket**	**100%**	147.196.000	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**		**Persentase IRTP yang di lakukan Pengawasan Postmarket**	**100%**	147.196.000	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	111 Unit	147.196.000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	111 Unit	147.196.000	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	87,08%	**2.399.928.575**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	87,08%	**3.000.000.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	30,61%				Persentase Posyandu Aktif	30,61%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
A	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan Kebijakan Germas**	**40%**	**1.645.384.950**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan Kebijakan Germas**	**40%**	**2.000.000.000**	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	1.645.384.950	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	2.000.000.000	
B	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri**	**27%**	**754.543.625**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri**	**27%**	**1.000.000.000**	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	62 Dokumen	754.543.625	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	62 Dokumen	1.000.000.000	
6	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**Presentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, UMOT, IRTP dan TTU**	**34,30%**	**200.000.000**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**Presentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, UMOT, IRTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar**	**34,30%**	**200.000.000**	
			TFR (Angka Kelahiran Total)								
			Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	**27%**				**Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)**	**27%**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	**0,71%**				**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)**	**0,71%**		
			Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age SpeciicFertilityRatio (ASFR) 15-19 tahun	**20%**				**Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age SpeciicFertilityRatio (ASFR) 15-19 tahun**	**20%**		
A	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**		**Jumlah kegiatan pemaduan dan sinkronisasi pengendalian kuantitas penduduk yang dilaksanakan**	**2 Kegiatan**	**100.000.000**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**		**Jumlah kegiatan pemaduan dan sinkronisasi pengendalian kuantitas penduduk yang dilaksanakan**	**2 Kegiatan**	**100.000.000**	
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)		Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	1 Dokumen	100.000.000	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)		Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	1 Dokumen	100.000.000	
B	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah pengolahan dan pelaporan data KKBPK**	**1 Laporan**	**100.000.000**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah pengolahan dan pelaporan data KKBPK**	**1 Laporan**	**100.000.000**	
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	100.000.000	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	100.000.000	
7	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**Cakupan peserta KB aktif MKJP**	**0%**	**3.026.757.000**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**Cakupan peserta KB aktif MKJP**	**0%**	**3.026.757.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
A	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**umlah kegiatan KIE program KKBPK pada Stakeholder dan Mitra Kerja**	**12 kecamatan**	**226.757.000**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**umlah kegiatan KIE program KKBPK pada Stakeholder dan Mitra Kerja**	**12 kecamatan**	**226.757.000**	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	226.757.000	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	226.757.000	
B	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**Jumlah kegiatan KKBPK yang dilaksanakan oleh PKB/PLKB di 12 Kecamatan**	**60 Kegiatan**	**2.600.000.000**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**Jumlah kegiatan KKBPK yang dilaksanakan oleh PKB/PLKB di 12 Kecamatan**	**60 Kegiatan**	**2.600.000.000**	
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	2.600.000.000	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	2.600.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
C	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Faskes yang melayani akseptor KB dan mendapatkan alat dan obat kontrasepsi**	**17 Faskes**	**100.000.000**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Faskes yang melayani akseptor KB dan mendapatkan alat dan obat kontrasepsi**	**17 Faskes**	**100.000.000**	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	100.000.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	100.000.000	
D	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		**Jumlah pembentukan Kampung KB di wilayah Kabupaten**	**0 Desa**	**100.000.000**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		**Jumlah pembentukan Kampung KB di wilayah Kabupaten**	**0 Desa**	**100.000.000**	
	Pembinaan Terpadu Kampung KB		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	100.000.000	Pembinaan Terpadu Kampung KB		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	100.000.000	
8	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**	**37,00 persen**	**200.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**	**37,00 persen**	**200.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
A	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Jumlah kelompok kegiatan ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan UPPKS)**	**12 Bulan**	**100.000.000**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Jumlah kelompok kegiatan ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan UPPKS)**	**12 Bulan**	**100.000.000**	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)]		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	100.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	100.000.000	
B	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Jumlah Ormas yang terlibat dalam program pembangunan keluarga**	**0 Organisasi**	**100.000.000**	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Jumlah Ormas yang terlibat dalam program pembangunan keluarga**	**0 Organisasi**	**100.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Organisasi	100.000.000	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Organisasi	100.000.000	

Berdasarkan tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una bahwa Anggaran yang tersedia pada Rancangan Awal RKPD adalah sebesar Rp.119.127.573.942 sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan di butuhkan anggaran sebesar Rp.134.701.583.491 terdapat kekurangan Anggaran sebesar Rp.15.574.009.549 sehingga masih banyak kebutuhan untuk penyediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Operasional Kegiatan dan Kegiatan Penunjang Lainnya yang belum dapat di sediakan atau di laksanakan. Berikut rincian anggaran masing – masing Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran yang tersedia pada Rancangan Awal RKPD adalah sebesar Rp.59.810.841.046 sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan di butuhkan anggaran sebesar Rp.62.212.592.017 terdapat kekurangan Anggaran sebesar Rp.2.401.750.971.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Anggaran yang tersedia pada Rancangan Awal RKPD adalah sebesar Rp.51.768.154.821 sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan di butuhkan anggaran sebesar Rp.64.034.101.374 terdapat kekurangan Anggaran sebesar Rp.12,265.946.553.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Anggaran yang tersedia pada Rancangan Awal RKPD adalah sebesar Rp.1.386.898.500 sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan di butuhkan anggaran sebesar Rp.1.581.210.000 terdapat kekurangan Anggaran sebesar Rp.194.311.500.
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Anggaran yang tersedia pada Rancangan Awal RKPD adalah sebesar Rp.334.994.000 sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan di butuhkan anggaran sebesar Rp.446.923.100 terdapat kekurangan Anggaran sebesar Rp.111.929.100.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Anggaran yang tersedia pada Rancangan Awal RKPD adalah sebesar Rp.2.399.928.575 sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan di butuhkan anggaran sebesar Rp.3.000.000.000 terdapat kekurangan Anggaran sebesar Rp.600.071.425.
6. Program Pengendalian Penduduk Anggaran yang tersedia pada Rancangan Awal RKPD adalah sebesar Rp.200.000.000 sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan di butuhkan anggaran sebesar Rp.200.000.000.

7. Program Pembinaankeluarga Berencana (Kb) Anggaran yang tersedia pada Rancangan Awal RKPD adalah sebesar Rp.3.026.757.000 sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan di butuhkan anggaran sebesar Rp.3.026.757.000.
8. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) Anggaran yang tersedia pada Rancangan Awal RKPD adalah sebesar Rp.200.000.000 sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan di butuhkan anggaran sebesar Rp.200.000.000.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Proses penjaringan aspirasi dari Masyarakat di laksanakan melalui kegiatan MUSRENBANG baik di tingkat Desa/Kelurahan dan sampai ke tingkat Kecamatan yang proses pelaksanaannya di bawah arahan langsung dari Bappelitbangda, kemudian usulan dari tingkat Desa/Kelurahan yang telah disortir oleh Bappelitbangda disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing OPD dan di Bahas di Forum OPD bersama Seluruh Kecamatan.

Proses pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan masing – masing Desa/Kelurahan membuat usulan dan merumuskan 3 Perioritas yang akan di Akomodir Pada Tahun Anggaran 2024, Kemudian Bappelitbangda membuat rekapan usulan perioritas yang bersumber dari Musrenbang dan Reses dan menyerahkan ke masing – masing OPD untuk menindak lanjuti usulan tersebut. Berdasarkan rekapan usulan yang diberikan dari Bappelitbangda dilakukan penelaahan di lingkup Dinas Kesehatan.

Untuk usulan yang bersifat pembangunan fisik yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, akan disesuaikan dengan Anggaran yang tersedia serta diprioritaskan kepada daerah yang memenuhi ketentuan petunjuk teknis pemanfaatan anggaran. Sedangkan untuk usulan yang bersifat non fisik yang dapat diakomodir dalam renja ini, disesuaikan kembali bentuk program dan kegiatannya agar sejalan dengan Rencana Strategis yang telah disusun. Adapun usulan-usulan dari para pemangku kepentingan yang tertuang dalam hasil Musrenbang kecamatan berdasarkan pertimbangan prioritas dalam table berikut :

Tabel. 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Tojo Una Una

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
A.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				
I	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
1	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Desa Kambutu	Terlaksanaya Pembangunan Puskesmas Pembantu	1 Unit	Akses untuk sarana kesehatan sangat terbatas karena jauh dari puskesmas di ibu kota kecamatan
2	Pengadaan Tenaga Kesehatan	Desa Tanjung Pude	Tersedianya tenaga kesehatan di Desa	2 Orang	Masih kurangnya Tenaga Kesehatan yang ada di Desa
3	Rehab Puskesmas Pembantu	Desa Bomba	Terlaksanaya Rehab Puskesmas Pembantu	1 Unit	Karena Kondisi yang ada sekarang sudah rusak berat
4	Pengadaan Tenaga Kesehatan	Desa Binanguna	Tersedianya tenaga kesehatan di Desa	2 Orang	Masih kurangnya Tenaga Kesehatan yang ada di Desa
5	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Desa Kadoda	Terlaksanaya Pembangunan Puskesmas Pembantu	1 Unit	Desa Kadodo Bukan Pustu Tetapi Poskesdes
6	Rehab Puskesmas Pembantu	Desa Bambu	Terlaksanaya Rehab Puskesmas Pembantu	1 Unit	Fasilitas yang ada sudah rusak
7	Rehab Puskesmas Pembantu	Desa Urulepe	Terlaksanaya Rehab Puskesmas Pembantu	1 Unit	Fasilitas yang ada sudah rusak
8	Rehab Puskesmas Pembantu	Desa Tumotok	Terlaksanaya Rehab Puskesmas Pembantu	1 Unit	Desa Tumotok Bukan Pustu Tetapi Poskesdes

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
9	Rehab Puskesmas Pembantu	Desa Malapo	Terlaksanaya Rehab Puskesmas Pembantu	1 Unit	Desa Malapo Bukan Pustu Tetapi Poskesdes
10	Rehab Puskesmas Pembantu	Desa Tojo	Terlaksanaya Rehab Puskesmas Pembantu	1 Unit	Tahun 2020 sudah ada pembangunan Baru/Relokasi Pustu Tojo
11	Rehab Puskesmas Pembantu	Desa Uedele	Terlaksanaya Rehab Puskesmas Pembantu	1 Unit	Karena keadaan didalam Pustu sudah tidak layak
12	Pengadaan Tenaga Kesehatan	Desa Tongkabo	Tersedianya tenaga kesehatan di Desa	2 Orang	Belum tersedianya tenaga kesehatan
13	Rehab Puskesmas Pembantu	Desa Baulu	Terlaksanaya Rehab Puskesmas Pembantu	1 Unit	Kondisi bangunan sudah tidak memadai
14	Pengadaan Tenaga Kesehatan	Desa Bangkagi	Tersedianya tenaga kesehatan di Desa	2 Orang	Kurangnya Tenaga Kesehatan Desa Bangkagi
15	Rehab Puskesmas Pembantu	Desa Taningkola	Terlaksanaya Rehab Puskesmas Pembantu	1 Unit	Bangunan sudah lama
16	Pengadaan Tenaga Kesehatan	Desa Taningkola	Tersedianya tenaga kesehatan di Desa	2 Orang	Kurangnya Tenaga Kesehatan Desa Taningkola
17	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Desa Kalemba	Terlaksanaya Pembangunan Puskesmas Pembantu	1 Unit	Untuk mempermudah Pelayanan Kesehatan Masyarakat
18	Pengadaan Tenaga Kesehatan	Desa Tanimpo	Tersedianya tenaga kesehatan di Desa	2 Orang	Kurangnya Tenaga Kesehatan Terampil di Desa
19	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Desa Pulau Enam	Terlaksanaya Pembangunan Puskesmas Pembantu	1 Unit	Desa Pualu Enam Bukan Pustu Tetapi Poskesdes
20	Pengadaan Tenaga Kesehatan	Desa Wakai	Tersedianya tenaga kesehatan di Desa	2 Orang	Masih kurangnya Nakes Desa

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
21	Rehab Puskesmas Pembantu	Desa Podi	Terlaksanaya Rehab Puskesmas Pembantu	1 Unit	Pembuatan Pagar Puskesmas Pebantu
22	Rehab Puskesmas Pembantu	Desa Podi	Terlaksanaya Rehab Puskesmas Pembantu	1 Unit	Pembuatan Papan Nambor Puskesmas Pembantu
23	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Desa Katupat	Terlaksanaya Pembangunan Puskesmas Pembantu	1 Unit	Belum tersedia lahan yang layak untuk pembangunan Pustu
24	Rehab Puskesmas Pembantu	Desa Tutung	Terlaksanaya Rehab Puskesmas Pembantu	1 Unit	Kondisi Pustu yang ada sudah Rusak
25	Pengadaan Tenaga Kesehatan	Desa Wanasari	Tersedianya tenaga kesehatan di Desa	2 Orang	Masih kurangnya Nakes Desa
26	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Desa Urundaka	Terlaksanaya Pembangunan Puskesmas Pembantu	1 Unit	Bangunan Pustu di Desa Urundaka Rusak Berat
27	Pengadaan Alat Kesehatan	Puskesmas Tete	Tersedianya Alat kesehatan di Puskesmas dan Wilayahnya	1 Paket	Kurangnya Punjang Tempat Tidur Pasien
28	Pengadaan Tenaga Kesehatan	Desa Tongidon	Tersedianya tenaga kesehatan di Desa	2 Orang	Masih kurangnya Nakes Desa
29	Rehab Puskesmas	Puskesmas Dataran Bulan	Terlaksanaya Rehab Puskesmas	1 Unit	Halaman Puskesmas Dataran Bulan sering becek, sehingga perlu dipasangkan Paving Blok
30	Rehab Puskesmas	Puskesmas Dataran Bulan	Terlaksanaya Rehab Puskesmas	1 Unit	Belum adanya Pos Jaga Puskesmas Dataran Bulan
31	Rehab Puskesmas	Puskesmas Dataran Bulan	Terlaksanaya Rehab Puskesmas	1 Unit	Tempat Laboratorium belum ada
32	Rehab Puskesmas Pembantu	Desa Uemalingku	Terlaksanaya Rehab Puskesmas Pembantu	1 Unit	Bangunan sudah tua

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
33	Rehab Puskesmas Pembantu	Desa Bantuga	Terlaksanaya Rehab Puskesmas Pembantu	1 Unit	Sudah kusam dan terlihat kumuh
34	Pengadaan Alat Kesehatan	Desa Bongkakoy	Tersedianya Alat kesehatan di Puskesmas dan Wilayahnya	1 Paket	Kurangnya alat kesehatan yang tersedia di Pustu

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional Sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan periode 2020-2024, Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia serta peningkatan Pengendalian Penduduk melalui Program Keluarga Berencana sehingga dapat mencapai Keluarga Sejahtera.

Sasaran pembangunan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita, Menekan laju angka pertumbuhan Penduduk dan Penerapan keluarga sejahtera .

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka strategi pembangunan kesehatan 2005 - 2025 adalah: 1) pembangunan nasional berwawasan kesehatan; 2) pemberdayaan masyarakat dan daerah; 3) pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan; 4) pengembangan dan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan 5) penanggulangan keadaan darurat kesehatan. Yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejah-teraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, kelompok masyarakat, dan daerah.

Sedangkan kebijakan pembangunan kesehatan dalam jangka menengah nasional yang termuat dalam RPJMN 2020-2024, adalah Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta Terutama Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar (Primary Health Care) Dengan Mendorong Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif, Didukung Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi.

Strategi RPJMN 2020 – 2024 adalah :

a. Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi,
b. Percepatan perbaikan gizi masyarakat,
c. Peningkatan pengendalian penyakit,
d. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas),
e. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makan.

Sasaran pokok RPJMN 2020-2024 adalah:

a. Angka kematian Ibu (per 100.000 KH),
b. Angka kematian Bayi (per 1000 KH),
c. Prevalensi stunting pada balita,
d. Prevalensi wasting pada balita,
e. InsidensiHIV (per 1000 pendudukyang tidak terinfeksi HIV),
f. InsidensiTB (per 100.000 penduduk),
g. Eliminasi Malaria (kab/kota),
h. Persentase merokok penduduk usia10-18 tahun,
i. Prevalensi obesitas pada penduduk umur >= 18 tahun,
j. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia12-23 bulan,
k. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terakreditasi,
l. Persentase rumah sakit terakreditasi,
m. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar,
n. Persentase puskesmas tanpa dokter,
o. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial,
p. Persentase obat memenuhi syarat,
q. Persentase makanan memenuhi syarat.

Selain apa yang telah diuraikan, beberapa masalah yang dihadapi secara nasional saat ini sudah sangat mendesak untuk diselesaikan, yaitu Penurunan Prevalensi Stunting, AKI dan AKB, Ketersediaan Jaminan Kesehatan Nasional Mencakup Seluruh Masyarakat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan

Obat dan Alat Kesehatan. Masalah dimaksud telah ditekankan pada pertemuan Rakerkesnas (Rapat Kerja Kesehatan Nasional) oleh Menteri Kesehatan tahun 2020, sehingga dimintakan seluruh jenjang lembaga implementor untuk menyusun strategi dalam penanganannya.

Untuk mendukung sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Kabupaten Tojo Una Una membuat prioritas sasaran Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat di lihat pada tabel Berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	Meningkatkan Sumberdaya Manusia Tojo Una-Una Yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Terjaminnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar bagi seluruh masyarakat dan Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak	Usia Harapan Hidup (UHH)
					Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
2	Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memperkuat ketangguhan ekonomi masyarakat	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Penduduk Tumbuh Seimbang	Ratio Akseptor KB

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Tojo Una-una diselenggarakan dalam upaya mendukung Visi Nasional di bidang kesehatan, Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Visi Kabupaten Tojo Una-una dengan melalui analisis situasi dan kondisi, memperhatikan dasar penyelenggaraan pembangunan dalam RPJMN bidang kesehatan, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJMD Kabupaten Tojo Una-una.

Sektor kesehatan merupakan sektor yang menjadi urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah meletakkan sektor kesehatan merupakan prioritas dalam pembangunan. Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una yang berkomitmen bahwa Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan sektor prioritas dan tertuang dalam misi yang ke satu dan ke empat RPJMD Periode 2021 -2026, yaitu: Misi 1 "Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memperkuat ketangguhan ekonomi masyarakat", Misi 4 "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidkan dan Kesehatan Yang Berkeadilan", sehingga tujuan dan sasaran renja OPD Dinas Kesehatan Tahun 2024, Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una periode 2021 -2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Tujuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat daerah tahun 2024
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,773
2	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,35
3	Terselenggaranya Pelayanan Publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada Inovasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	B

Tabel 3.3

Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat daerah	Target Kinerja Perangkat daerah tahun 2024
1	Terjaminnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar bagi seluruh masyarakat dan Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10
		Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) per 1.000 kelahiran	1.000
		Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	10
		Angka Kematian Ibu per 1.000 kelahiran hidup	5
		Rasio posyandu per satuan balita (per 1.000 balita)	20
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 100.00)	5
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000)	2
		Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000)	4
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000)	5
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	95
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	85
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	85
		Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	40
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	100
		Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 10.000 penduduk)	15
		Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	2
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	90
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100
		Penderita diare yang ditangani (%)	100
		Angka kejadian Malaria (per 100.000)	5
		Tingkat kematian akibat malaria	0

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat daerah	Target Kinerja Perangkat daerah tahun 2024
		Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	100
		Cakupan puskesmas (%)	100
		Cakupan pembantu puskesmas (%)	40
		Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100
2	Penduduk Tumbuh Seimbang	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)	2
		Ratio Akseptor KB (%)	83
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	16
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	100
		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	100
		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	100
		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	100
3	Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Daerah	B

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una

No	**Indikator Kinerja Utama**	**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**	**Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	67,50
2	Angka Stunting	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	12,68
3	Ratio Akseptor KB	Jumlah Ratio Akseptor KB	83

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan, sesuai dengan arah pembangunan kesehatan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan isu strategis maka akan ditempuh melalui berbagai program/kegiatan yang terinci dalam usulan Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-una tahun 2024. Secara rinci, rencana kerja yang dituangkan dalam usulan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Sasaran dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	**Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	**Terjaminnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar bagi seluruh masyarakat dan Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Pembangunan Puskesmas
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
		Pengadaan Obat, Vaksin
		Pengadaan Bahan Habis Pakai
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
		Operasional Pelayanan Puskesmas
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		Pembinaan Terpadu Kampung KB
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Dalam pelaksanan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una Berdasarkan tabel di atas bahwa Jumlah Program yang akan di laksanakan sebanyak 8 Program, Jumlah Kegiatan 26, Jumlah Sub Kegiatan 80, di harapkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat Mendukung pencapaian Rencana Strategi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, RPJMD Kabupaten Tojo Una Una, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah serta RPJMN periode 2021 – 2026.

Berdasarkan Tabel 4.1 Sasaran dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan maka dirumuskanlah matrix pendanaan rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una tahun 2024 berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**119.127.573.942,00**							**131.040.331.339,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**115.700.816.942,00**							**127.270.898.639,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**115.700.816.942,00**							**127.270.898.639,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**Nilai**		**Nilai**	**BB Nilai**	**59.810.841.046,00**						**BB Nilai**	**65.791.925.151,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlasananya penyusunan dokumen - dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya*	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	10.000.000,00						18 Dokumen	11.000.000,00	
	1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	18 Dokumen	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	18 Dokumen	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pembayaran gaji dan tunjangan ASN*	Bulan		Bulan	12 Bulan	47.410.423.766,00						535 Orang/bulan	52.151.466.143,00	
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan	535 Orang/bulan	47.405.423.766,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	535 Orang/bulan	52.145.966.143,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Dokumen	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	Puskesmas		Puskesmas	16 Puskesmas	5.000.000,00						1 Laporan	5.500.000,00	
	1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Laporan	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*	Kegiatan Kegiatan		Kegiatan Kegiatan	2 Kegiatan 2 Kegiatan	10.000.000,00						1 Dokumen	11.000.000,00	
	1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Dokumen	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	4 Orang	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	4 Orang	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya penunjang kebutuhan pelayanan administrasi perkatoran*	Bulan		Bulan	12 Bulan	235.530.750,00						16 Paket	259.083.825,00	
	1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	16 Paket	4.940.750,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	16 Paket	5.434.825,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	4 Paket	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	7 Paket	220.590.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	7 Paket	242.649.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	55 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	55 Laporan	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan perkatoran*	Unit		Unit	24 Unit	25.000.000,00						1 Unit	27.500.000,00	
	1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Unit	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		Unit	20 Unit	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	20 Unit	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Unit	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Unit	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Unit	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan perkatoran*	Bulan		Bulan	12 Bulan	11.812.998.430,00						1 Laporan	12.994.298.273,00	
	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	1 Laporan	228.278.162,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Laporan	251.105.978,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	1 Laporan	11.584.720.268,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Laporan	12.743.192.295,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan perkatoran*	Unit		Unit	151 Unit	301.888.100,00						170 Unit	332.076.910,00	
	1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	170 Unit	281.888.100,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	170 Unit	310.076.910,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	20 Unit	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	20 Unit	22.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Angka Kematian Ibu (AKI) Per 1.000 KH*** ***Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH***	**/1.000 KH** **/1.000 KH**		**/1.000 KH** **/1.000 KH**	**5 /1.000 KH** **10 /1.000 KH**	**51.768.154.821,00**						**5 /1.000 KH** **10 /1.000 KH**	**56.944.970.305,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan puskesmas pembantu (%)* *Cakupan puskesmas pembantu (%)* *Cakupan puskesmas (%)* *Persentase Puskesmas yang memiliki Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang memiliki Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik sesuai standar* *Cakupan puskesmas (%)* *Persentase Bahan Habis Pakai tersedia sesuai kebutuhan puskesmas* *Persentase Bahan Habis Pakai tersedia sesuai kebutuhan puskesmas*	% persen % % persen persen % persen		% persen % % persen persen % persen	40 % 40 persen 100 % 75 % 75 persen 100 persen 36 % 36 persen	11.928.575.000,00					1 Unit	13.121.432.501,00	
	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Unit	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Unit	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit		Unit	2 Unit	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Unit	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit		Unit	2 Unit	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Unit	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit		Unit	3 Unit	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Unit	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	3.482.243.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Unit	3.830.467.300,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit		Unit	370 Unit	3.249.317.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	370 Unit	3.574.248.700,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit		Unit	140 Unit	175.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	140 Unit	192.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin														
			Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket		Paket	185 Paket	1.926.721.625,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	185 Paket	2.119.393.788,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai														
			Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket		Paket	60 Paket	2.595.293.375,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	60 Paket	2.854.822.713,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Cakupan Vaksinasi Covid 19* *Persentase Cakupan Pengobatan penderita Malaria* *Persentase capian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan* *Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)* *Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)* *Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)* *Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)* *Persentase penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)* *Persentase penanganan kasus Gizi Buruk sesuai standar* *Persentase kecamatan yang menerapkan Implementasi KTR pada 9 Tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)* *Persentase kecamatan yang menerapkan Implementasi KTR pada 9 Tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)* *Persentase Kasus Gigitan hewan penular Rabies yang di tangani* *Presentase Puskesmas yang Melaksanakan POPMC* *Persentase Cakupan Penderita diare yang ditangani (%)* *Persentase cakupan Penderita Kusta yang di tangani*	% % % % persen % % % % % % % % % % %		% % % % persen % % % % % % % % % % %	50 % 100 % 58 % 40 % 40 persen 85 % 100 % 100 % 30 % 23.1 % 23,1 % 100 % 70 % 100 % 100 %	38.339.349.821,00					3388 Orang	42.173.284.804,00	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		Orang	3388 Orang	2.602.320.800,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	3388 Orang	2.862.552.880,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		Orang	3234 Orang	110.240.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	3234 Orang	121.264.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		Orang	3080 Orang	246.340.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	3080 Orang	270.974.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		Orang	14580 Orang	246.340.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	14580 Orang	270.974.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		Orang	99838 Orang	764.624.750,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	99838 Orang	841.087.225,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		Orang	16382 Orang	360.916.250,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	16382 Orang	397.007.875,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		Orang	35912 Orang	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	35912 Orang	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		Orang	9879 Orang	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	9879 Orang	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		Orang	336 Orang	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	336 Orang	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang		Orang	4970 Orang	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	4970 Orang	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		Orang	5550 Orang	341.590.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	5550 Orang	375.749.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		Orang	5550 Orang	356.660.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	5550 Orang	392.326.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	157.107.500,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	2 Dokumen	172.818.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	2.267.870.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	1 Dokumen	2.494.657.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	2 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	328.094.750,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	12 Dokumen	360.904.225,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen		Dokumen	16 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	16 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	2 Dokumen	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	12 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	278.800.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	1 Dokumen	306.680.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	2.663.325.875,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	1 Dokumen	2.929.658.463,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	23.338.801.630,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	1 Dokumen	25.672.681.793,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang		Orang	800 Orang	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	800 Orang	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket		Paket	5500 Paket	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	5500 Paket	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	16 Dokumen	2.921.162.016,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	16 Dokumen	3.213.278.218,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit		Unit	18 Unit	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	18 Unit	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan		Laporan	5 Laporan	41.830.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	-	5 Laporan	46.013.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit		Unit	1 Unit	108.326.250,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	1 Unit	119.158.875,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi* *Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi*	% %		% %	37.5 % 37,5 %	15.000.000,00						2 Dokumen	16.500.000,00	
	1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	2 Dokumen	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	1 Dokumen	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	1 Unit	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Puskesmas yang menerapkan sistem manajemen mutu dengan baik* *[deleted]* *Persentase Puskesmas yang menerapkan sistem manajemen mutu dengan baik*	% persen		% persen	81.3 % 81,3 persen	1.485.230.000,00						16 Unit	1.633.753.000,00	
	1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit		Unit	16 Unit	1.480.230.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	16 Unit	1.628.253.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	1 Dokumen	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)***	**Persen**		**Persen**	**21.00 Persen**	**1.386.898.500,00**						**21.00 Persen**	**1.525.588.350,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Tersedianya dokumen data kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar*	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1.381.898.500,00						600 Orang	1.520.088.350,00	
	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		Orang	600 Orang	1.334.688.500,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	600 Orang	1.468.157.350,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	47.210.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	1 Dokumen	51.931.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan*	Orang		Orang	50 Orang	5.000.000,00						50 Orang	5.500.000,00	
	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang		Orang	50 Orang	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	50 Orang	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Presentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, UMOT, IRTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar***	**Persen**		**Persen**	**60.00 Persen**	**334.994.000,00**						**60.00 Persen**	**368.493.400,00**	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Persentase P-IRT yang mendapat izin Produksi*	%		%	100 %	187.798.000,00						37 Dokumen	206.577.800,00	
	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen		Dokumen	37 Dokumen	187.798.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	37 Dokumen	206.577.800,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Persentase IRTP yang di lakukan Pengawasan Postmarket*	%		%	100 %	147.196.000,00						119 Unit	161.915.600,00	
	1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit		Unit	119 Unit	147.196.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	119 Unit	161.915.600,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Posyandu Aktif Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan***	**Persen Persen**		**Persen Persen**	**32.11 Persen 87.83 Persen**	**2.399.928.575,00**						**32.11 Persen 87.83 Persen**	**2.639.921.433,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan Kebijakan Germas*	%		%	45 %	1.645.384.950,00						2 Dokumen	1.809.923.445,00	
	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	1.645.384.950,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	2 Dokumen	1.809.923.445,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri*	%		%	30 %	754.543.625,00						76 Dokumen	829.997.988,00	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen	76 Dokumen	754.543.625,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	76 Dokumen	829.997.988,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.426.757.000,00**							**3.769.432.700,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**3.426.757.000,00**							**3.769.432.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***TFR (Angka Kelahiran Total)*** ***Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)*** ***Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)*** ***Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun/Age SpeciicFertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun***	**persen** **persen** **persen** **persen**		**persen** **persen** **persen** **persen**	**34,30 persen** **0,71 persen** **27,00 persen** **20,00 persen**	**200.000.000,00**						**34,30 persen** **0,71 persen** **27,00 persen** **20,00 persen**	**220.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah kegiatan pemaduan dan sinkronisasi pengendalian kuantitas penduduk yang dilaksanakan*	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	100.000.000,00						1 Dokumen	110.000.000,00	
	2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengolahan dan pelaporan data KKBPK*	Laporan		Laporan	0 Laporan	100.000.000,00						1 Dokumen	110.000.000,00	
	2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Cakupan peserta KB aktif MKJP***	**persen**		**persen**	**0 persen**	**3.026.757.000,00**						**0 persen**	**3.329.432.700,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah kegiatan KIE program KKBPK pada Stakeholder dan Mitra Kerja*	Kecamatan		Kecamatan	12 Kecamatan	226.757.000,00						4 Organisasi	249.432.700,00	
	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi		Organisasi	4 Organisasi	226.757.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	4 Organisasi	249.432.700,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah kegiatan KKBPK yang dilaksanakan oleh PKB/PLKB di 12 Kecamatan*	Kegiatan		Kegiatan	60 Kegiatan	2.600.000.000,00						12 Laporan	2.860.000.000,00	
	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan		Laporan	12 Laporan	2.600.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	12 Laporan	2.860.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Faskes yang melayani akseptor KB dan mendapatkan alat dan obat kontrasepsi*	Faskes		Faskes	17 Faskes	100.000.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan		Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	1 Laporan	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah pembentukan Kampung KB di wilayah Kabupaten*	Desa		Desa	0 Desa	100.000.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan		Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	1 Laporan	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)***	**persen**		**persen**	**37,00 persen**	**200.000.000,00**						**37,00 persen**	**220.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah kelompok kegiatan ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan UPPKS)*	Bulan		Bulan	12 Bulan	100.000.000,00						12 Laporan	110.000.000,00	
	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan		Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	12 Laporan	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Ormas yang terlibat dalam program pembangunan keluarga*	Organisasi		Organisasi	0 Organisasi	100.000.000,00						0 Organisasi	110.000.000,00	
	2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi		Organisasi	0 Organisasi	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	0 Organisasi	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H							**119.127.573.942,00**							**131.040.331.339,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegitan Tahun 2023 di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2023. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2023 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005 – 2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2021. Penyusunan renja ini juga telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja juga menjadi hal penting, sebab formulasi perencanaan yang telah dilakukan dengan maksimal tidak akan mencapai apa yang menjadi tujuannya jika pada tahapan implementasi/teknis pelaksanaan perencanaan tidak dilakukan dengan strategi yang tepat. Diantara strategi yang harus digunakan salah satunya melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan untuk ikut ambil peran sesuai kapasitasnya dalam program dan kegiatan pembangunan kesehatan, sehingga penyebab masalah yang bersumber dari multi faktor semakin banyak alternative pemecahan yang dapat digunakan dalam penyelesaiannya.

Semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mencapai tujuan akhir pembangunan bidang kesehatan. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ampana, Maret 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tojo Una-Una.

Dra. Jafanet Alfari. MAP, M.Kes
Pembina Tkt.I
ip. 19650115 199303 2 005



Jln. Sultan Hasanuddin No. 115
Kel. Ampana, Kec. Ampana Kota
Pos 94683

RENCANA KERJA
(RENJA)
2024



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA

Jl. Sultan Hasanudin No.32 Ampana 94683 Sulawesi Tengah
☎ (0464) 22069 Faks. (0464) 21163 e-mail : rsu_ampana@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya, telah berhasil disusun Rencana Kerja (Renja) RSUD Ampana Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 yang berisikan Rencana Kerja Tahunan.

Renja ini disusun berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Diktum Kedua Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman, acuan atau rujukan yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat struktural, fungsional dan karyawan/karyawati, non struktural/fungsional dilingkungan RSUD Ampana.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh Karyawan-karyawati, khususnya Tim Penyusun Renja serta pihak-pihak terkait 'stakeholders' yang telah memberikan masukan, baik secara langsung pada saat diskusi maupun secara tak langsung atas terwujudnya Renja 2022 RSUD Ampana Kabupaten Tojo Una-Una.

Pembangunan Kesehatan merupakan bagian terpadu dari Pembangunan Sumber daya Manusia untuk mencapai tujuan Pembangunan yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai derajat kesehatan yang tinggi. Untuk itu pembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas dan produktif .

Bidang kesehatan merupakan dimensi yang tidak dapat ditinggalkan dan merupakan salah satu persyaratan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan professional. Dalam konteks pembangunan bangsa yang berbudaya serta profesional diperlukan peningkatan mutu kesehatan masyarakat dan lingkungan yang saling mendukung dengan paradigma hidup sehat, pengetahuan tentang hidup sehat pada setiap individu dalam masyarakat, sehingga setiap warga mampu untuk memelihara kesehatan secara mandiri dan memajukan taraf hidup baik secara keluarga maupun berkelompok.

Mudah-mudahan dengan adanya Renja ini sebagai pedoman, acuan ataurujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif dan amalan yang baik di bidang Kesehatan sebagai sarana guna peningkatan pelayanan dimasa yang akan datang dan Terwujudnya Pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada kepuasaan pasien.

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
Kabupaten Tojo Una-una

dr.NIKO S,Ked., M.K.M.,M.M
Pembina, IV/a
Nip. 19811125 200902 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....iii
IKHTISAR EKSEKUTIF iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum.....3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.3 Sistematika Penulisan.....6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD AMPANA TAHUN 2022
2.1 Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Ampana 13
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Ampana 15
2.3 Akuntabiltas Keuangan.....17
2.4 Analisis Hasil Kinerja layanan RSUD Ampana 17
2.5 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 17
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Ampana 21
3.3 Program dan Kegiatan 23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, dan mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam proses penyusunan Renja RSUD Ampana diawali dengan penjelasan arah kebijakan Direktur RSUD Ampana mengenai penjabaran Rencana Strategis RSUD Ampana, ditambah dengan gambaran isu-isu strategis akurat yang berdampak terhadap pelayanan rumah sakit. Atas dasar penjelasan arah kebijakan tersebut setiap Unit Kerja dilingkungan rumah sakit membuat program kegiatan dimana rangkuman program kegiatan tersebut menjadikan sebuah RENJA RSUD Ampana 2024. Sehingga Uraian Renja RSUD Ampana adalah merupakan bagian dari Program Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis RSUD Ampana.

Rincian Program Kegiatan dalam Rencana Kerja Rumah Sakit harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una, mengingat bahwa rincian kegiatan yang ada dalam RKPD merupakan rangkuman dari usulan Renja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kabupaten Tojo Una-Una.

RKPD merupakan bahan untuk ditindak lanjuti menjadi RAPBD dan apabila RAPBD telah dibahas dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tojo Una-Una maka secara otomatis RAPBD tersebut menjadi Dokumen APBD, sehingga setiap rincian RKA-OPD harus sesuai dan selaras dengan Dokumen APBD Kabupaten Tojo Una-Una.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4286);
2. UU Nomor 32 thn 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2009 No.144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5063);
9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 2009 No.153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan No.1333/Menkes/SK/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah KabupatenTojo Una-UnaTahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten TojoUna-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten TojoUna-Una;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rancangan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit kerja RSUD Ampana Kabupaten Tojo Una-Una secara konsekuen dan konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan rencana, tugas pokok dan fungsi yang diemban.

2. Tujuan

Penyusunan Rancangan Renja ini bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya rencana kegiatan prioritas RSUD Ampana Kabupaten Tojo Una-Una dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Rencana Kerja RSUD Ampana Kabupaten Tojo Una-Una tahun secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Rancangan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap

rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan/program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD AMPANA

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Ampana

Berdasarkan PERDA Kabupaten Tojo Una Una Nomor 19 Tahun 2005 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah Sakit Umum Daerah Ampana merupakan sebagian unsur penunjang tugas Pemerintah Daerah di Bidang Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ampana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan upaya kegiatan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat yang dilaksanakan selama 24 jam dan dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan serta penelitian.

1. **Tugas dan Fungsi RSUD Ampana:**

   Untuk menyelenggarakan kegiatan yang dimaksud, RSUD mempunyai fungsi dan Fungsi sebagai berikut :

   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan Kesehatan
   b. Pelayanan rawat darurat
   c. Pelayanan rawat inap
   d. Pelayanan one day care
   e. Pelayanan rawat jalan
   f. Pelayanan tindakan medis dan terapi
   g. Penunjang medis dan non medis
   h. Asuhan keperawatan
   i. Pelayanan rujukan
   j. Pengujian Kesehatan
   k. Pelayanan informasi Kesehatan
   l. Bimbingan teknis dan pelatihan
   m. Penelitian bidang Kesehatan dan Perumahsakitan
   n. Administrasi keuangan, sumber daya manusia, dan administrasi umum
   o. Pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana.

2. Susunan Organisasi RSUD Ampana

Susunan Organisasi RSUD, terdiri dari :

a. Direktur

b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi : Subbagian Keuangan dan Aset Subbagian Kepegawaian dan SDM dan Subbagian Umum dan Perlengkapan

c. Bidang Pelayanan, membawahi : Seksi Pelayanan Medik dan Seksi Pelayanan Keperawatan

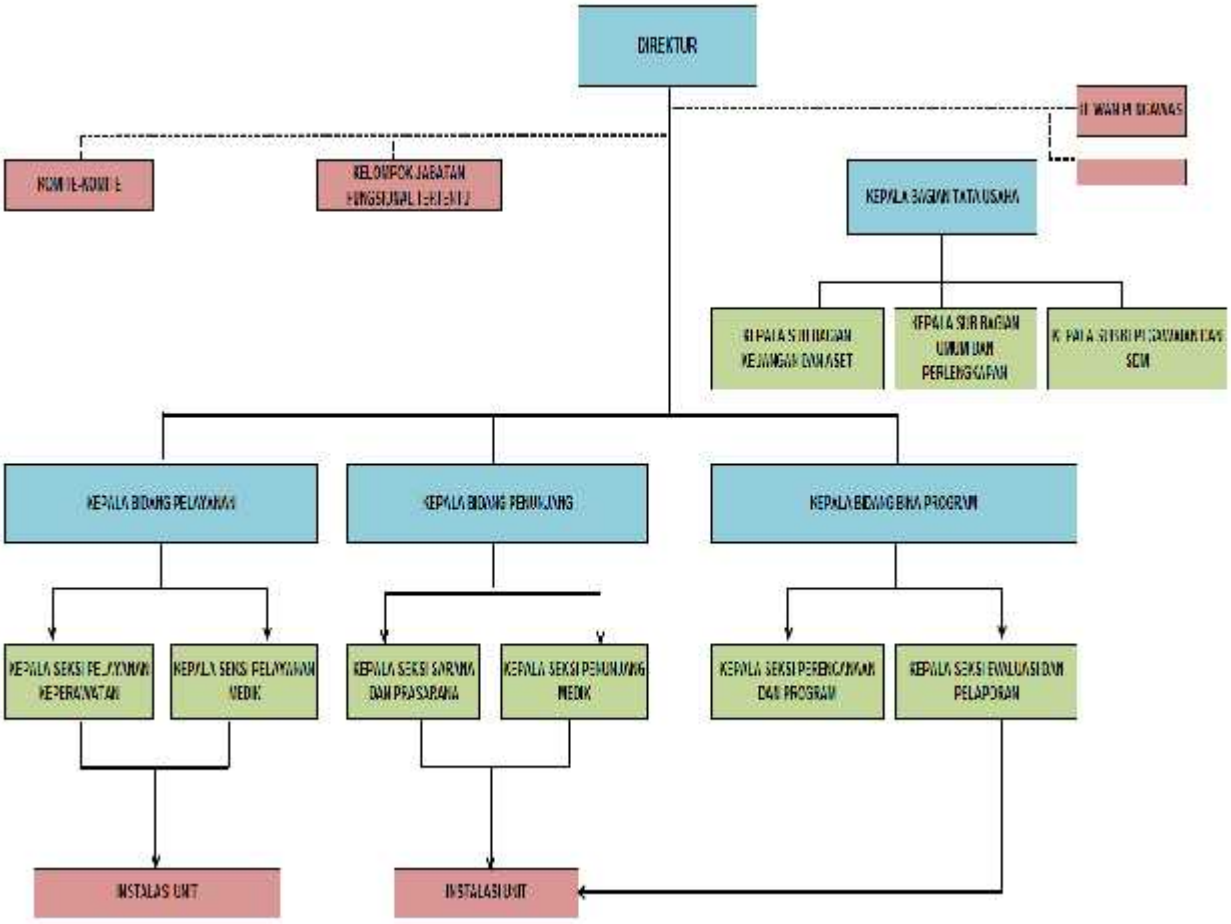
d. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, membawahi : Seksi Penunjang Medik dan Seksi Penunjang Non Medik.

e. Bidang Bina Program membawahi : Seksi Perencanaan dan Program danSeksi Evaluasi dan Pelaporan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Instalasi

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMAPANA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. DIREKTUR

TUGAS

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran;
2. Meyusun dokumen pelaksanaan anggaran
3. Menandatangani surat perintah membayar
4. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
6. Menetapkan pejabat pelaksana teknis
7. Kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
8. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan daerah.

FUNGSI

1. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi
2. Penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya
3. Penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit
4. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi
5. Evaluasi, pencatatan dan pelaporan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

URAIAN TUGAS

1. Membantu bupati melaksanakan tugasnya di bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam perencanaan maupun perumusan kebijakan
2. Memimpin, mengoordinir, serta mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan rumah sakit
3. Mengesahkan RKA dan DPA, program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasny
4. Memberi informasi mengenai usaha pelayanan kesehatan di rumah sakit
5. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada bupati
6. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas rumah sakit secara teknis administrasi atau operasional medis kepada bupati
7. Menetapkan rencana dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya

8. Mengadakan koordinasi secara horizontal dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una
9. Mengadakan hubungan kerja sama dengan instansi lain baik instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan dan kelancaran tugasnya
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan
11. Mengangkat atau menunjuk pegawai-pegawai rumah sakit dalam jabatan tertentu di lingkungan rumah sakit
12. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketetapan yang berlaku
13. Menetapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RBA, RKA, DPA, PK, IKU, Lakip, Laporan keuangan, LPPD dan LKPJ Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
14. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunujuk teknis dan Standar Operasioanl Prosedur (SOP) serta mengkordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan RSUD Ampana
15. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis dan teknis kegiatan lingkup RSUD Ampana sesuai dengan kewenangannya
16. Merumuskan dan menetapkan bahan pengembangan kerumah sakita
17. Merumuskan dan menetapkan bahan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi
18. Merumuskan dan menetapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran pada RSUD Ampana dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan RSUD Ampana
19. Merumuskan dan menetapkan bahan penyusunan pengelolaan retribusi yang menjadi kewenangannya
20. Merumuskan dan menetapkan bahan penyusunan data hasil kegiatan urusan pelayanan RSUD Ampana
21. Merumuskan dan menetapkan penyusunan bahan laporan akuntabilitas kerja dan laporan kegiatan keuangan dan asset rumah sakit
22. Merumuskan dan menetapkan bahan penyusunan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup RSUD Ampana
23. Melaksankan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi

2. BAGIAN TATA USAHA

TUGAS

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional Administrasi Umum dan Perlengkapan, Keuangan dan Aset, Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (SDM).

FUNGSI

1. Penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan,
2. keuangan dan aset, kepegawaian dan SDM;
3. Perencanaan operasional kegiatan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian dan SDM;
4. Pengendalian dan pembinaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian dan SDM.

URAIAN TUGAS

1. Pengoordinasian penyusunan program dan laporan subbagian;
2. Pengoordinasian penyusunan program dan laporan bidang-bidang;
3. Pengelolaan kerumahtanggaan, perlengkapan rumah sakit, barang/aset, pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan SDM, pendidikan dan pelatihan lingkup RSUD Ampana;
4. Merumuskan rencana dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
5. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan;
6. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada direktur;
7. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketetapan yang berlaku;
8. Merumuskan bahan penyusunan, Renstra, Renja, RBA, RKA, DPA, PK, IKU, Lakip, Laporan keuangan, LPPD dan LKPJ Rumah Sakit Umum Daerah Ampana bersama pihak terkait;
9. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengkordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan RSUD Ampana;
10. Menyelenggarkan pengkajian bahan fasilitasi pelaksanaan kordinasi dengan unit kerja terkait;

11. Menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja sekertariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekertariatan di bidang umum dan perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian dan SDM;
12. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di sub bagian umum dan perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian dan SDM;
13. Menyelenggarakan pengkajian bahan pemantauan dan evaluasi ketatusahaan, umum dan perlengkapan, administrasi keuangan dan aset, administrasi kepegawaian dan SDM;
14. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol, dan hubungan masyarakat;
15. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
16. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan;
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bagian Tata Usaha, membawahi : Subbagian Keuangan dan Aset, Subbagian Kepegawaian dan SDM dan Subbagian Umum dan Perlengkapan. Subbagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

A. SUBBAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

TUGAS

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Subbagian Umum dan Perlengkapan RSUD Ampana.

FUNGSI

1. Menyusun rencana program kerja di Subbagian Umum dan Perlengkapan;
2. Melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan, pengelolaan perpustakaan, dan kearsipan;
3. Melaksanakan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan bahan kebijakan teknis Bagian Tata Usaha, Umum dan Perlengkapan;
4. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
5. Menghimpun, menelaah dan menggandakan serta menyebar luaskan peraturan di RSUD Ampana;

6. Menyusun SOP yang berkaitan dengan Bagian Tata Usaha, Umum dan Perlengkapan;
7. Menerima dan melakukan penyortiran/klasifikasi surat masuk;
8. Menyimpan dan memelihara dokumen, surat dan warkat yang berhubungan dengan program di bagian tata usaha, umum dan perlengkapan;
9. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan naskah dinas, perlengkapan rumah tangga, keindahan, keamanan dan ketertiban;
10. Melaksanakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
11. Mengatur pemakaian kendaraan dinas;
12. Melakukan pemeliharaan/perbaikan kendaraan dinas;
13. Melayani peminjaman sarana prasarana untuk keperluan operasional rumah sakit;
14. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketatausahaan, umum dan perlengkapan;
15. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
16. Mempersiapkan sarana pelaksanaan rapat dinas, upacara resmi dan pertemuan di lingkup RSUD Ampana;
17. Membantu mempersiapkan rapat pimpinan, mulai pembuatan undangan, koordinasi dengan unit terkait, membuat daftar hadir rapat dan koordinasi konsumsi peserta rapat;
18. Membantu pembuatan Surat Tugas karyawan yang mendapat tugas resmi dari pimpinan;
19. Mengurus penerimaan tamu dinas di RSUD Ampana;
20. Melaksanakan tugas lain yang tidak masuk dalam tugas dan fungsi bidang dan sub bidang/bagian lain yang diperintahkan oleh atasan langsung;
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung.

B. SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

TUGAS

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana.

FUNGSI

1. Menyusun rencana program kerja di Subbagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Melaksanakan pengelolaan data dan pelayanan administrasi kepegawaian, pembinaan SDM, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan RSUD Ampana;
3. Melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, Analisis Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pegawai yang sesuai di lingkungan RSUD Ampana;
4. Menyiapkan bahan penerimaan pegawai baru di lingkungan RSUD Ampana, dan melakukan orientasi pegawai baru;
5. Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan disiplin pegawai,pembinaan dan penyelesaian masalah kepegawaian;
6. Menertibkan absensi seluruh pegawai di lingkungan RSUD Ampana;
7. Pengelolaan dan penyelenggaraan penilaian angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan, pendidikan dan pelatihan;
8. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian;
9. Memberikan pelayanan kesejahteraan pegawai meliputi pengurusan tabungan perumahan, korpri, dan pembuatan karis/karsu dan karpeg, juga penghargaan pengabdian ASN;
10. Mengoordinasikan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan evaluasi kinerja pegawai;
11. Menyampaikan laporan kepegawaian secara berkala kepada Badan Kepegawaian Daerah;
12. Melaksanakan koordinasi untuk penilaian, Penetapan Angka Kredit (PAK) dan pengusulan kenaikan pangkat;
13. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
14. Melaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan langsung

C. SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET

TUGAS

Melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengelolaan aset pengendalian, dan evaluasi serta menyiapkan bahan laporan keuangan.

FUNGSI

1. Pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di subbagian keuangan dan aset;
2. Pelaksanaan pengadministrasian keuangan dan aset;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

URAIAN TUGAS

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset
2. Melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis keuangan dan aset;
3. Melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
4. Melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
5. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
6. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset rumah sakit;
7. Melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit;
8. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Subbagian Keuangan dan Aset;
9. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup rumah sakit;
10. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keuangan dan aset sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintahan Daerah Tojo Una-Una;
11. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi keuangan dan neraca aset rumah sakit;
13. Mengkoordinasikan penyusunan retribusi pelayanan, remunerasi/jasa pelayanan dan Unit cost;

14. Mengkoordinasikan penatausahaan barang milik rumah sakit;
15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset;

3. BIDANG PELAYANAN

TUGAS

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan medik dan pelayanan keperawatan rumah sakit, merencanakan operasional, mengelola, mengordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan meliputi pelayanan medik kegawat-daruratan, medik dasar, medik spesialistik, pelayanan rujukan, pelayanan keperawatan, penyelenggaraan medical check up serta pelayanan kesehatan akibat bencana dan wabah di rumah sakit.

FUNGSI

1. Merencanakan kegiatan bidang pelayanan medik, dan pelayanan keperawatan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan, petunjuk serta penilaian kinerja untuk mengangkat profesionalisme dan kelancaran tugas;
3. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan operasional bidang pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
4. Menyiapkan dan menyusun standar pelayanan dan prosedur kerja dalam pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
5. Melaksanakan dan menyusun perencanaan semua kebutuhan pengelolaan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
6. Melaksanakan perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan tenaga dan sumberdaya di bidang pelayanan;
7. Menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
8. Menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan kesehatan medik dan keperawatan bagi korban bencana dan wabah;
9. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
10. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan;
11. Menyelenggarakan kordinasi dengan bidang atau bagian lain;
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta

menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bidang pelayanan;

13. Mengajukan usulan tentang kebutuhan peralatan pelayanan medik dan peralatan pelayanan keperawatan;
14. Pelaksana penyusunan perumusan kebijakan teknis dan operasional, standar dan prosedur kerja dalam pengembangan serta pelaksanaan peningkatan dan pengawasan mutu bidang pelayanan;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

A. SEKSI PELAYANAN MEDIK

TUGAS

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan medik dasar sekunder dan medik spesialistik di RSUD Ampana.

FUNGSI

1. Merencanakan kegiatan pelayanan medik dasar, sekunder dan spesialistik, meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, pelayanan kesehatan akibat bencana dan
2. wabah, juga pelayanan rujukan, berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan
3. Merencanakan kebutuhan ketenagaan, pengembangan mutu layanan, pengembangan kualitas dan kompetensi petugas medik, peralatan dan sarana lainnya untuk pelayanan medik;
4. Menyusun, kebijakan teknis dan operasional, standar dan prosedur pelaksanaan pelayanan medik;
5. Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan, memberi petunjuk serta penilaian kinerja untuk mengangkat profesionalisme dan kelancaran tugas;
6. Mengatur pelaksanaan pelayanan medik paripurna bagi pasien rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, dan pelayanan rujukan;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medik;
8. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik;
9. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan mutu pelayanan medik;
10. Mengadakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan

keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bidang pelayanan medik;

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN

TUGAS

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan keperawatan kesehatan RSUD Ampana

FUNGSI

1. Merencanakan kegiatan pelayanan keperawatan meliputi asuhan keperawatan, koordinasi kegiatan pembinaan etika dan mutu keperawatan dan kebidanan;
2. Merencanakan kebutuhan ketenagaan, pengembangan mutu layanan keperawatan, pengembangan kualitas dan kompetensi petugas keperawatan, penambahan peralatan dan sarana lainnya di seksi pelayanan keperawatan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Melaksanakan koordinasi dalam pengaturan jadwal dan pembagian tugas perawat, bidan dan pembantu perawat di seksi pelayanan keperawatan;
4. Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan, memberi petunjuk serta penilaian kinerja untuk mengangkat profesionalisme dan kelancaran tugas;
5. Menyusun, kebijakan teknis dan operasional, standar dan prosedur pelaksanaan pelayanan keperawatan;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan;
7. Memberikan pengarahan, pembinaan dan bimbingan kepada staf keperawatan di Seksi Pelayanan Keperawatan;
8. Mengadakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan
9. pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bidang pelayanan keperawatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. BIDANG PENUNJANG

TUGAS

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Penunjang Medik dan Sarana Prasarana di lingkungan RSUD Ampana.

FUNGSI

1. Pelaksana perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, koordinasi, pengawasan pengendalian, evaluasi kegiatan pengelolaan bidang penunjang, berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Pelaksana peningkatan, pengawasan mutu pengelolaan bidang penunjang;
3. Pelaksana penyusunan perumusan kebijakan teknis, kebijakan operasional, prosedur, dan standar dalam pengembangan dan peningkatan mutu pengelolaan dan pelayanan bidang penunjang;
4. Pelaksana penyusunan standar dan prosedur kerja bidang penunjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pelaksana perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan tenaga dan sumber daya bidang penunjang;
6. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS :

1. Merencanakan kegiatan di bidang penunjang berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan bidang penunjang;
2. Melaksanakan peningkatan dan pengawasan mutu pengelolaan bidang penunjang;
3. Menyusun standar pelayanan dan prosedur tetap di bidang penunjang
4. Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan, petunjuk serta penilaian kinerja untuk mengangkat profesionalisme dan kelancaran tugas
5. Melaksanakan koordinasi dengan bagian-bagian terkait dalam rangka kelancaran dan keselarasan pengelolaan bidang penunjang
6. Mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan bidang penunjang
7. Melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan pengelolaan bidang penunjang
8. Mengadakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bidang penunjang
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

A. SEKSI PENUNJANG MEDIK

TUGAS

Kepala Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pelayanan anestesi, rehabilitasi medik, farmasi, radiologi, pelayanan gizi, pelayanan laboratorium, pelayanan darah.

FUNGSI

1. Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan penunjang medik;
2. Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan, memberi petunjuk serta penilaian kinerja untuk mengangkat profesionalisme dan kelancaran tugas;
3. Menyusun, merencanakan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan operasional berdasarkan standar pelayanan;
4. Mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan pendistribusian peralatan penunjang medik;
5. Memberi petunjuk, mengarahkan dan membimbing dalam pengelolaan peralatan penunjang medik kepada bawahan;
6. Mengadakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bidang penunjang medik;
7. Melaksanakan perencanaan kebutuhan, pembinaan pelaksanaan, mengkoordinasikan dan pendayagunaan tenaga dan sumber daya penunjang medik
8. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan peralatan penunjang medik
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. SEKSI SARANA PRASARANA

TUGAS

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan, pemeliharaan sarana prasarana, gas medis, pelayanan laundry, sanitasi, gizi, sterilisasi, pemulasaran jenazah dan

FUNGSI

1. Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan penunjang non medik yang meliputi: pengelolaan dan pemeliharaan bangunan fisik, kebersihan, pertamanan, serta pemeliharaan ambulans;
2. Menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kebijaksanaan pelaksanaan pengelolaan penunjang non medik berdasar hasil evaluasi tahun sebelumnya, sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan
3. Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan, petunjuk serta penilaian kinerja untuk mengangkat profesionalisme dan kelancaran tugas
4. Menyiapkan penyusunan standar dan prosedur, kebijakan teknis, operasional pengelolaan penunjang non medik
5. Melaksanakan koordinasi dengan bagian Instalasi, dan seksi yang lain guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan pemeliharaan penunjang non medis
6. Mengatur, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan penunjang non medis
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bidang penunjang non medik;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG BINA PROGRAM

TUGAS

Penyelenggaraan penyusunan rencana strategis rumah sakit, evaluasi monitoring kegiatan dan rencana pengembangan rumah sakit, informasi dan komunikasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Bina Program RSUD Ampana.

FUNGSI

1. Memimpin pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan dan program, monitoring evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijakan pimpinan
2. Melakukan koordinasi perencanaan dan evaluasi program rumah sakit;
3. Menyusun kebutuhan dan pelatihan serta sistem informasi managemen dan medical record;
4. Menyiapkan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dilingkup tugas

5. Berkoordinasi dengan bagian atau bidang lain terkait pelaksanaan tugas dan fungsi
6. Menyusun perencanaan program dan anggaran berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan bidang lainnya dalam lingkungan RSUD Ampana dan SKPD terkait.
7. Memberikan laporan kepada pimpinan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

A. SEKSI PERENCANAAN DAN PROGRAM

TUGAS

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah lingkup Perencanaan dan Program RSUD Ampana

FUNGSI

1. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data, dalam rangka pembuatan rencana strategis dan rencana kerja tahunan;
2. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap sistem perencanaan rumah sakit;
4. Melakukan koordinasi perencaan program;
5. Membuat laporan dan evaluasi kegiatan sub bagian perencanaan program;
6. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkordinasi dengan bidang terkait dalam pelaksanaannya.

B. SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

TUGAS

Melaksanakan kegiatan sistem informasi kesehatan, Medical Record sesuai dengan peraturan yang berlaku

FUNGSI

1. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data, dalam rangka Evaluasi dan Pelaporan tahunan;
2. Menyusun pembuatan SOP Medical Record dalam rangka meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan
3. Melaksanakan penyimpanan, jalur keluar masuknya data Medical Record
4. Melaksanakan system Central Opname Rumah Sakit
5. Melakukan pengumpulan dan mengelola data Medical Record serta meneliti Catalan Medical Record

6. Melaksanakan program evaluasi, analisa pengendalian dan pemutakhiran data medis secara professional sesuai peraturan yang berlaku
7. Melakukan upaya perlindungan hukum terhadap rahasia pasien dan rahasia medis di Rumah Sakit; dan
8. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi denagn bagian / bidang terkait dalam pelaksanaannya.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RSUD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
3. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur RSUD;
4. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. INSTALASI

1. Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan bagi pasien rawat jalan, serta tempat untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya, dan juga dengan Unit Pelayanan Kesehatan diluar Rumah Sakit.
2. Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan bagi pasien rawat inap, serta tempat untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya, dan juga dengan Unit Pelayanan Kesehatan diluar Rumah Sakit.
3. Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan sementara, serta pelayanan pembedahan darurat, pasien yang datang dengan gawat darurat medis, serta tempat untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalsi lainnya, dan juga dengan Unit Pelayanan Kesehatan diluar Rumah Sakit.

4. Intensive Care Unit mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis serta asuhan keperawatan pemulihan bagi pasien rawat jalan maupun rawat inap yang menjalani tindakan medis, serta menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan secara instensif bagi pasien dengan rawat darurat medis.
5. Instalasi Kebidanan dan Kandungan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan bagi pasien anak- anak yang usianya kurang dari 1 (satu) bulan, pasien penyakit kandungan dan kebidanan, serta tempat untuk pendidikan pelatihan dan penilitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya, dan juga dengan Unit Pelayanan Kesehatan diluar Rumah Sakit.
6. Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyelengarakan pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik guna penunjang penegakan diagnosa dan penyelenggaraan pelayanan radioterapi bagi pasien rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.
7. Istalasi Bedah Sentral mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pembedahan mayor paripurna dan pelayanan indoskopi bagi pasien rawat inap.
8. Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyediaan, peracikan dan penyaluran obat, alat kedokteran, alat kesehatan, gas medik dan bahan kimia bagi pasien rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap.
9. Instalasi Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, penataan dan penyediaan makanan biasa maupun dietari serta penyalurannya bagi pasien rawat inap, dan menyelenggarakan penyuluhan gizi serta penelitian.
10. Instalasi Laborat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang laboratorium untuk keperluan diagnose dan kegiatan tranfusi darah yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional
11. Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, artotik/mastatik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi
12. Instalasi Pemeliharaan sarana Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta perencanaan dan penelitian penggantian sarana dan prasarana Rumah Sakit, sebelum habis masa pakainya
13. Instalansi Pemulasaraan Jenazah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemulasaraan jenazah dan pelayanan kedokteran forensik.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD AMPANA CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

1. Evaluasi Pelaksanaa Renja RSUD Ampana Tahun 2021

Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana pada umumnya telah mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk membiayai seluruh program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana padaTahun 2021mendapat anggaran sebesar ***Rp.87.988.270.627.*** Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar ***Rp.91.564.331.599*** atau sebesar ***105%***,dari anggaran yang tersedia

RSUD Ampana belum berhasil melaksanakan capaian kegiatan yaitu kegiatan peningkatan pengetahuan dan kemampuan petugas kesehatan (pelatihan), kegiatan akreditasi rumah sakit. Kegiataan ini belum tercapai targetnya di karenakan pada tahun 2021 terjadi peningkatan wabah penyakit covid-19 sehingga pelatihan kesehatan dan Akreditasi Rumah Sakit yang sudah di rencanakan harus di tunda (tidak dilaksanakan) dikarenakan adanya pembatasan sosial berskala besar sehingga tidak di anjurkan untuk melakukan perkumpulan dalam satu tempat, untuk mencegah terjadinya penularan penyakit covid-19. Selain itu program kesehatan masyarakat miskin (operasi katarak) juga belum mencapai sasaran dikarenakan sebagian besar anggaran rumah sakit yang ditetapkan harus di alihkan untuk penanganan masalah penyakit covid-19 pada tahun 2022

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah RSUD AMPANA Tahun 2021 dapat dilihat di Tabel 2.2.1 berikut:

2. Evaluasi Pelaksanaa Renja RSUD Ampana Tahun 2022

Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana pada umumnya telah mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk membiayai seluruh program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana padaTahun 2022 mendapat anggaran sebesar ***Rp.90.842.424.925.*** Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp94.838.803.747**atau sebesar ***104%***,dari anggaran yang tersedia, dengan rincain sebagai berikut:

Indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah yang telah ditargetkan dalam Tahun 2022 semua telah tercapai. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 indikator kinerja meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai Tidak tercapai dikarenakan adanya penundaan pendidikan dan pelatihan akibat covid19 oleh karena itu tahun 2022 telah dilaksanakannya indikator

peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai dan telah terealisasi tahun 2022. Selain itu untuk indikator pelayanan BLUD tahun 2022 terjadinya pelampauan realisasi belanja BLUD dikarenakan adanya pelampauan belanja barang dan jasa (belanja oprasional) BLUD sehingga Pendapatan yang telah ditetapkan meningkat melampui target sehingga belanja BLUD juga meningkat, akan tetapi belanja BLUD yang melampaui anggaran akan di evaluasi kembali agar sesuai dengan pendapatan yang ada

Indikator kinerja sasaran meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan yang telah di targetkan dalam tahun 2022 terdapat 1 indikator yang tidak tercapai yaitu terpeliharanya Fasilitas Pelayananan Kesehatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 untuk indikator pemeliharaan tahun 2021 terealisasi sesuai dengan capaian indikator, namun di tahun 2022 indikator pemeliharaan belum tercapai di karenakan anggaran pemeliharaan yang tersedia belum mencukupi untuk perbaikan kelas 1 oleh karena itu di tahun selanjutnya akan di usulkan kembali untuk penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk perbaikan ruangan.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah RSUD AMPANA Tahun 2022 dapat dilihat di Tabel 2.2.2 berikut:

2.2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021									Catatan Penting
Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Realisasi Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Realisasi Keuangan**	**%**	**Fisik(%)**	
7	8	9	10		11	12			13
Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	**RSUD AMPANA**				**Rp75.013.887.895**	**Rp79.093.322.034**	**104%**	**100%**	
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD AMPANA				**Rp15.811.117.931**	**Rp15.595.728.936**	**99%**	**100%**	
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	200org/bulan	198org/bulan	Rp15.811.117.931	Rp15.595.728.936	**99%**	**100%**	
2.. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD AMPANA	Tersedianya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai RSUD Ampana			**Rp74.000.000**	**Rp27.537.503**	**37%**	**45%**	
- Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	25 orang	12 orang	Rp74.000.000	Rp27.537.503	**37%**	**45%**	
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD AMPANA				**Rp1.195.336.979**	**Rp1.140.437.020**	**95%**	**100%**	
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket	Rp1.081.300.000	Rp1.032.479.518	**95%**	**100%**	
- Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah RapatKoordinasi dan konsultasi yang diikuti	50 kali	50 kali	Rp114.036.979	Rp107.957.502	**95%**	**100%**	
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD AMPANA	Tersedianya Perlengakpan Gedung Kantor			**Rp589.246.942**	**Rp537.367.100**	**91%**	**95%**	
- Pengadaan Mebel		Jumlah mebel untuk menunjang pelayanan	1 paket	1 paket	Rp47.557.696	Rp47.508.250	**100%**	**100%**	
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralaan dan mesin untuk menunjang pelayanan kesehatan	1 paket	1 paket	Rp541.689.246	Rp489.858.850	**90%**	**100%**	

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD AMPANA	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			**Rp12.379.949.786**	**Rp11.840.228.234**	**96%**	**100%**	
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa pelayanan umu kantor	1 paket	1 paket	Rp12.379.949.786	Rp11.840.228.234	**96%**	**100%**	
6. Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD AMPANA	Tersedianya Pelayanan BLUD			**Rp44.964.236.257**	**Rp49.952.023.241**	**111%**	**100%**	
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1 paket	1 paket	Rp44.964.236.257	Rp49.952.023.241	**111%**	**100%**	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**RSUD AMPANA**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai**			**Rp12.974.382.732**	**Rp12.471.009.565**	**96%**	**100%**	
1.Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	RSUD AMPANA	Tersedianya Sarana dan Prasarana RS yang memadai	1 paket	1 paket	**Rp9.294.563.232**	**Rp8.997.857.336**	**97%**	**100%**	
- Pengembangan RS		Jumlah Sarana Prasarana RS yang memadai	1 paket	1 paket	Rp3.749.060.000	Rp3.551.387.000	**95%**	**100%**	
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang		Jumlah alat kesehatan yang memadai	1 paket	1 paket	Rp5.157.503.232	Rp5.129.657.250	**99%**	**100%**	
- Pengadaan Obat Vaksin		Jumlah Obat yang memadai	1 paket	1 paket	Rp300.000.000	Rp237.597.461	**79%**	**90%**	
- Pemeliharaan Sarana Faslitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara	1 paket	1 paket	Rp88.000.000	Rp79.215.625	**90%**	**100%**	
2. Penyediaaan Layan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	RSUD AMPANA				**Rp3.679.819.500**	**Rp3.473.152.229**	**94%**	**100%**	
- Pengelolaan pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/Atau Berpotensi bencana		Tersedianya Layanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	1 paket	1 paket	Rp3.679.819.500	Rp3.473.152.229	**94%**	**100%**	
TOTAL					**Rp87.988.270.627**	**Rp91.564.331.599**	**104%**	**100%**	

2.2.2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022									Catatan Penting
Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Realisasi Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Realisasi Keuangan**	**%**	**Fisik(%)**	
7	8	9	10		11	12			13
Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	**RSUD AMPANA**				**Rp83.875.290.925**	**Rp87.995.145.301**	**104%**	**100%**	
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD AMPANA				**Rp15.892.456.934**	**Rp15.650.721.060**	**98%**	**100%**	
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	200org/bulan	191org/bulan	Rp15.892.456.934	Rp15.650.721.060	**98%**	**100%**	
2.. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD AMPANA	Tersedianya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai RSUD Ampana			**Rp662.474.000**	**Rp619.040.545**	**93%**	**95%**	
- Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	25 orang	25 orang	Rp662.474.000	Rp619.040.545	**93%**	**95%**	
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD AMPANA				**Rp614.578.000**	**Rp605.416.950**	**98%**	**100%**	
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket	Rp400.000.000	Rp390.838.950	**97%**	**100%**	
- Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah RapatKoordinasi dan konsultasi yang diikuti	50 Laporan	49 Laporan	Rp214.578.000	Rp214.578.000	**100%**	**100%**	
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD AMPANA	Tersedianya Perlengakpan Gedung Kantor			**Rp2.982.078.500**	**Rp2.843.816.979**	**95%**	**97%**	
- Pengadaan Mebel		Jumlah mebel untuk menunjang pelayanan	15 Unit	40 Unit	Rp39.125.000	Rp38.322.200	**97%**	**98%**	
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralaan dan mesin untuk menunjang pelayanan kesehatan	534 Unit	400 Unit	Rp2.942.953.500	Rp2.805.494.779	**95%**	**98%**	

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD AMPANA	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			**Rp4.998.126.994**	**Rp4.157.319.272**	**83%**	**86%**	
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa pelayanan umu kantor	1 Laporan	1 laporan	Rp4.998.126.994	Rp4.157.319.272	**83%**	**86%**	
6. Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD AMPANA	Tersedianya Pelayanan BLUD			**Rp58.725.576.497**	**Rp64.118.830.495**	**109%**	**100%**	
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	2 Unit	2 Unit	Rp58.725.576.497	Rp64.118.830.495	**109%**	**100%**	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**RSUD AMPANA**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai**			**Rp6.967.134.000**	**Rp6.843.658.446**	**98%**	**100%**	
1.Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	RSUD AMPANA	Tersedianya Sarana dan Prasarana RS yang memadai			**Rp6.408.000.000**	**Rp6.299.248.058**	**98%**	**100%**	
- Pengembangan RS		Jumlah Sarana Prasarana RS yang memadai	3 Unit	3 Unit	Rp2.795.000.000	Rp2.793.680.000	**99%**	**100%**	
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang		Jumlah alat kesehatan yang memadai	90 Unit	126 Unit	Rp3.100.000.000	Rp3.007.424.700	**97%**	**100%**	
- Pengadaan Obat Vaksin		Jumlah Obat yang memadai	1 Paket	1 paket	Rp500.000.000	Rp498.143.358	**99%**	**90%**	
- Pemeliharaan Sarana Faslitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara	1 Unit	0 Unit	Rp13.000.000	Rp0	**0%**	**100%**	
2. Penyediaaan Layan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	RSUD AMPANA				**Rp559.134.000**	**Rp544.410.388**	**97%**	**100%**	
-Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	Rp559.134.000	Rp544.410.388	**97%**	**100%**	
TOTAL					**Rp90.842.424.925**	**Rp94.838.803.747**	**104%**	**100%**	

2.3 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKP

Capaian kinerja pelayanan RSUD Ampana berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan RSUD Ampana. Keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan RSUD Ampana dapat dilihat pada tabel berikut :

Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
KABUPATEN Tojo Una-Una

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-							Realisasi Capaian Tahun ke-							Rasio Capaian pada Tahun ke						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	Indikator Wajib																		=Realisasi/target dikali 100%						
1	Bed Ocupancy Ratio (BOR)				65%	66%	67%	68,00%	69,00%	70,00%	70,00%	69%	72,00%	74,00%	74,17%	77,00%	77%	77%	106%	109,09%	110%	109,07%	112%	110,00%	110%
2	Average Lenght Of Stay (AVLOS)				4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	100%	100%	125%	100%	100%	100%	80%
3	Turn Over Interval (TOI)				2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Bed Turn Over (BTO)				40	40	40	40	40	40	40	34	40	48	54	55	55	45	85%	100%	120%	135%	138%	138%	112,50%
5	Gross Death Rateb (GDR)				0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,04	0,19	0,2	0,21	0,25	0,25	0,36	89%	422%	444%	467%	556%	556%	800%
6	Net Death Rate (NDR)				0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,08	0,09	0,12	0,13	0,19	0,19	0,21	320%	360%	480%	520%	760%	760%	840%

2.4 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis kinerja pelayanan RSUD AMPANA yang tercantum dalam pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pelayanan kesehatan. Sehingga isu-isu strategis yang faktual tersebut akan mementukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang akan digulirkan dalam rencana kerja tahun yang akan datang.

Permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pelayaan di RSUD AMPANA antara Lain:

1. Masih Kurangnya jumlah sumber daya manusia dibeberapa instalasi/unit termasuk perawat, bidan, dokter umum dan dokter spesialis
2. Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan baik tempat maupun peralatan masih memerlukan penyempurnaan
3. Belum semua data/informasi terintegrasi

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan RSUD Ampana, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis RSUD Ampana sebagai berikut:

1. Tersedianya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan standar Rumah Sakit Kelas C
2. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
3. Meningkatnya Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang akuntabel dan terintegrasi.

2.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh RSUD Ampana, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk RSUD Ampana berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel 2.5 berikut ini:

TABEL 2.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD RENJA TAHUN 2022					Catatan Penting
Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
7	8	9	10	11	13
Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	**RSUD AMPANA**			**Rp83.875.290.925**	
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD AMPANA			**Rp15.892.456.934**	
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	200org/bulan	Rp15.892.456.934	
2.. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD AMPANA	Tersedianya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai RSUD Ampana		**Rp662.474.000**	
- Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	25 orang	Rp662.474.000	
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD AMPANA			**Rp614.578.000**	
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 paket	Rp400.000.000	
- Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah RapatKoordinasi dan konsultasi yang diikuti	1 paket	Rp214.578.000	
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD AMPANA	Tersedianya Perlengakpan Gedung Kantor		**Rp2.982.078.500**	
- Pengadaan Mebel		Jumlah mebel untuk menunjang pelayanan	1 paket	Rp39.125.000	
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralaan dan mesin untuk menunjang pelayanan kesehatan	1 paket	Rp2.942.953.500	
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD AMPANA	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		**Rp4.998.126.994**	
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa pelayanan umu kantor	1 paket	Rp4.998.126.994	
6. Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD AMPANA	Tersedianya Pelayanan BLUD		**Rp58.725.576.497**	
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1 paket	Rp58.725.576.497	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**RSUD AMPANA**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai**		**Rp6.967.134.000**	
1.Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	RSUD AMPANA	Tersedianya Sarana dan Prasarana RS yang memadai		**Rp6.408.000.000**	
- Pengembangan RS		Jumlah Sarana Prasarana RS yang memadai	1 paket	Rp2.795.000.000	

- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang		Jumlah alat kesehatan yang memadai	1 paket	Rp3.100.000.000	
- Pengadaan Obat Vaksin		Jumlah Obat yang memadai	1 Paket	Rp500.000.000	
- Pemeliharaan Sarana Faslitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara	1 paket	Rp13.000.000	
2. Penyediaaan Layan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota				**Rp559.134.000**	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota	RSUD AMPANA	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1 paket	Rp559.134.000	
TOTAL				**Rp90.842.424.925**	

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Peningkatan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi peningkatan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan peningkatan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Peningkatan kesehatan Indonesia mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan menitikberaktan pada Strategi Arah Kebijakan antara lain :

1. Peningkatan KIA, KB dan Kespro
2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Pengikatan Pengendalian Penyakit
4. Pembudayaan Germas
5. Penguatan Sistem Kesehatan dan POM

Arah kebijakan dan strategi peningkatan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembanguan jangka Panjang bidang kesehata (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemempuan hidup sehat bagi setiap orang agar penignkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Penjabaran kebijakan yang ada secara nasional terurai dalam Tupoksi RSUD AMPANA berdasarkan Peraturan Bupati Tojo Una-Uan No 19 Tahun 2005 tentang Pmbentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ampana. Berdasarkan Peraturan Bupati Tojo Una-Una tersebut, tugas RSUD AMPANA yaitu melaksanakan urusan Rumah tangga Daerah dibidang Rumah Sakit serta pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan mempunyai fungsi

a. Perumasan Kebijakan Teknis dalam Rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan di bidang Rumah Sakit yang ditetapkan Oleh Bupati

b. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pelayanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

c. Pembinaan Teknis, Pengelolaan, Dokumentasi Bidang Rumah Sakit

d. Penyusunan Program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyelarasan dan perawatan serta pengawasan bidang rumah sakit

e. Memantau dan mengendalikan tugas pokok yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

f. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan Badan

g. Pembinanan UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA RSUD AMPANA

Rencana Kerja RSUD Ampana ini disusun dengan tujuan untuk Meningkatkan Kuantitas dan kualitas pelayanan yang profesional Kepada pelanggan. Sedangkan sasaran yang inngin dicapai dalam penyusunan Renja RSUD Ampana Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatnya cakupan layanan kesehatan:
   a. Meningkatnya jumlah kunjungan pasien rawat darurat;
   b. Meningkatnya jumlah kunjungan pasien rawat jalan;
   c. Meningkatnya jumlah kunjungan pasien rawat inap;
   d. Meningkatnya angka pemanfaatantempat tidur (BOR);
   e. Meningkatnya jumlah pasien miskin yang terlayani.
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
   a. Meningkatnya alat kesehatan/kedokteran yang beroperasi sesuai standar;
   b. Meningkatnya penyediaan obat esensial generik atas persediaan obat diRS;
   c. Meningkatnya jumlah tenaga dokter spesialis.
3. Menciptakan lingkungan rumah sakit yang "*Berorientasi pada pelanggan(Oriented Customer)*".
   a. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
   b. Terlaksananya peningkatan sarana dan prasaranaa paratur;
   c. Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD AMPANA

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi kepala daerah nomor 2 yaitu Mewujudkan kelembagaan Birokrasi yang bersih, efisien, efektif dan akuntabel dan misi nomor 3 yaitu Mewujudkan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi. Daftar sasaran dan Program/kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 secara lengkap kami sampaikan dalam tabel berikut:

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) RSUD Ampana tahun 2024 ini memegang peranan penting sebagai dokumen perencanaan pelayanan kesehatan tahunan daerah dan juga menjadi acuan dan pedoman bagi RSUD Ampana dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2024.

Beberapa Kaidah pelaksanaan Rencana kerja RSUD Ampana tahun 2024 yang perlu diatur sebagai berikut:

a. Bagian dan Bidang pada RSUD Ampana agar mendukung pencapaian target-target Renja dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan beserta target triwulanan.
b. Diharapkan seluruh aparatur di bidang dan bagian pada RSUD Ampana dapat menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.
c. Dalam Rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renja, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renja secara berkala.
d. Koordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang memiliki kepentingan dalam rangka mencapai target program-program yang masih rendah capaianya.

Dengan disusunnya dan ditetapkannya Renja Tahun 2024 ini, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang kemudian dikonversi ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), dengan melihat KUAPPAS

Dengan demikian, hasil-hasil pelayanan diharapkan dapat diterima seluruh lapisan masyarakat, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan.

Ampana,
Direktur RSUD Ampana

dr.NIKO S,Ked., M.K.M.,M.M

NIP. 19811125 200902 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
RUMAH SAKIT UMUM WAKAI
Alamat : Desa Tanimpo Kecamatan :una-una Email : rsudwakai@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM WAKAI
KABUPATEN TOJO UNA – UNA
NOMOR : 700.1.1.3/138/IV RSUD WAKAI/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PADA
RUMAH SAKIT UMUM WAKAI
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

RUMAH SAKIT UMUM WAKAI
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 125 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, maka seluruh OPD segera membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Penyusun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD Kabupaten Tojo Una-Una;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tojo Una-una di Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PADA RUMAH SAKIT UMUM WAKAI KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KESATU :

KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan data penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 Pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una;
b. Menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 Pada Rumah Sakit Umum Wakai Kabupaten Tojo Una-Una;

Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024 melalui DPA OPD.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapka

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM WAKAI KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dr.Ratih Septi Dewi,S.Ked
Nip. 19840926 201403 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Nomor : 800/ /RSUD WAKAI/2023
Tanggal : 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Penyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Umum Wakai Kabupaten Tojo Una-Una

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA)
RUMAH SAKIT UMUM WAKAI
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ketua Tim : DIREKTUR
Sekretaris Tim : Sub Bagian Tata Usaha
Kelompok Kerja :
1. Bidang : Kasie Pelayan
: Kasie Keperwatan
Anggota : Sub Bagian Keuangan dan Aset

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 2023
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM WAKAI
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dr.Ratih Septi Dewi,S.Ked
Nip. 19840926 201403 2 002

RENCANA KERJA (RENJA)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI

TAHUN 2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	2
1.3.	Maksud dan Tujuan	2
1.4.	Sistematika Penulisan	3
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD WAKAI THN 2021**	4
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Wakai Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah RSUD Wakai Thn 2022	
2.2.	Analisis Hasil Kinerja Layanan RSUD Wakai	8
2.3.	Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	12
2.4.	Review Terhadap Ranncangan Awal RKPD	14
2.5.	Penelaanhan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III	**TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN**	
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	16
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Wakai	16
3.3.	Program dan Kegiatan	16
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	
BAB V	**PENUTUP**	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya, telah berhasil disusun Rencana Kerja (Renja) RSUD Wakai Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 yang berisikan Rencana Kerja Tahunan.

Renja ini disusun berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Diktum Kedua Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman, acuan atau rujukan yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat struktural, fungsional dan karyawan/karyawati, non struktural/fungsional dilingkungan RSUD Wakai.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh Karyawan-karyawati, khususnya Tim Penyusun Renja serta pihak-pihak terkait 'stakeholders' yang telah memberikan masukan, baik secara langsung pada saat diskusi maupun secara tak langsung atas terwujudnya Renja 2022 RSUD Wakai Kabupaten Tojo Una-Una.

Pembangunan Kesehatan merupakan bagian terpadu dari Pembangunan Sumber daya Manusia untuk mencapai tujuan Pembangunan yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai derajat kesehatan yang tinggi. Untuk itu pembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas dan produktif .

Bidang kesehatan merupakan dimensi yang tidak dapat ditinggalkan dan merupakan salah satu persyaratan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan professional. Dalam konteks pembangunan bangsa yang berbudaya serta profesional diperlukan peningkatan mutu kesehatan masyarakat dan lingkungan yang saling mendukung dengan paradigma hidup sehat, pengetahuan tentang hidup sehat pada setiap individu dalam masyarakat, sehingga setiap warga mampu untuk memelihara kesehatan secara mandiri dan memajukan taraf hidup baik secara keluarga maupun berkelompok.

Mudah-mudahan dengan adanya Renja ini sebagai pedoman, acuan atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif dan amalan yang baik di bidang Kesehatan sebagai sarana guna peningkatan pelayanan dimasa yang akan datang dan Terwujudnya Pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada kepuasaan pasien.

Wakai, 05 April 2023
Direktur RSUD Wakai
Kabupaten Tojo Una-Una

dr. Ratih Septi Dewi, S.Ked
Nip. 19840926 201403 2 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja RSUD Wakai ini merupakan suatu pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit sehingga rincian rencana kerja dan anggaran dibuat tidak menyimpang dari Rencana Kerja.

Untuk Program dan Kegiatan Rumah Sakit yang belum terangkum dalam Rencana Kerja dan Anggaran maka dibuat usulan dalam bentuk proposal ke setiap sumber anggaran yang memungkinkan dapat merealisasikan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam RENJA RSUD Wakai misalnya ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan/Dana Alokasi Khusus atau melalui anggaran sektoral maupun ke sumber dana lainnya.

Dalam proses penyusunan Renja RSUD Wakai diawali dengan penjelasan arah kebijakan Direktur RSUD Wakai mengenai penjabaran Rencana Strategis RSUD Wakai, ditambah dengan gambaran isu-isu strategis akurat yang berdampak terhadap pelayanan rumah sakit. Atas dasar penjelasan arah kebijakan tersebut setiap Unit Kerja dilingkungan rumah sakit membuat program kegiatan dimana rangkuman program kegiatan tersebut menjadikan sebuah RENJA RSUD Wakai 2019. Sehingga Uraian Renja RSUD Wakai adalah merupakan bagian dari Program Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis RSUD Wakai.

Rincian Program Kegiatan dalam Rencana Kerja Rumah Sakit harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una, mengingat bahwa rincian kegiatan yang ada dalam RKPD merupakan rangkuman dari usulan Renja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kabupaten Tojo Una-Una.

RKPD merupakan bahan untuk ditindak lanjuti menjadi RAPBD dan apabila RAPBD telah dibahas dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tojo Una-Una maka secara otomatis RAPBD tersebut menjadi Dokumen APBD, sehingga setiap rincian RKA-OPD harus sesuai dan selaras dengan Dokumen APBD Kabupaten Tojo Una-Una.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai dasar acuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Wakai Tahun 2024 yaitu :

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.
3. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2016
9. Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Wakai Tahun 2016-2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Wakai tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi Rumah Sakit Umum Wakai dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengembangan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1. Tujuan :

1) Mengevaluasi kinerja Rumah Sakit Umum Wakai tahun 2016 serta menganalisis rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
2) Memiliki perencanaan pengembangan Rumah Sakit tahun 2019 untuk menunjang visi Rumah Sakit Umum Wakai yaitu **“**Menjadi Pusat Rujukan Masyarakat Kepulauan**”**
3) Menyusun kebijakan pengembangan Rumah Sakit Umum Wakai yang dituangkan dalam susunan program dan kegiatan tahun 2024

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja RSUD Wakai tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD WAKAI TAHUN 2022

Bab ini menguraikan Evaluasi Kinerja tahun 2022, Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Wakai, Isu-isu penting mengenai kondisi dan peranan rumah sakit umum wakai di wilayah kepulauan,

BAB III TUJUAN SASARAN DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Wakai dan Program Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

Mengemukakan harapan-harapan atas keberadaan Renja Tahun 2024 agar dapat dijadikan acuan dalam program kegiatan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD WAKAI TAHUN 2022

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Wakai

Rumah Sakit Umum Daerah Wakai merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. RSUD Wakai dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan masyarakat,
2. Pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan masyarakat,
3. Penyelenggaraan tugas bidang kesehatan masyarakat, dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI terdiri dari :

1. Direktur;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan Umum, Gizi dan KIA;
4. Seksi Keperawatan, Radiologi dan IGD;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Wakai terdiri dari:

1. Direktur

2. Seksi Keperawatan, Radiologi dan IGD

Seksi Keperawatan, Radiologi dan IGD mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelayanan medis dan keperawatan. Seksi Keperawatan, Radiologi dan IGD dalammelaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
b) Perumusan kebijakan teknis pelayanan medis dan keperawatan;
c) Pengkoordinasian pelayanan medis dan keperawatan;
d) Penyelenggaraan analisis kebutuhan tenaga medis dan keperawatan;
e) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tenaga medis dan keperawatan;
f) Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
g) Penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan pada instalasi rawat jalan dan rawat darurat;
h) Penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan pada instalasi rawat inap; perawatan intensif, dan rehabilitasi medis;
i) Penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan pada instansi bedah;
j) Penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan pada instalasi rekam medis dan teknologi informasi;
k) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan.

3. Seksi Pelayanan Umum, Gizi dan KIA

Seksi Pelayanan Umum, Gizi dan KIA mempunyai tugas menyelenggaraan dan mengoordinasi kan pelayanan penunjang dan pengelolaan sarana pelayanan kesehatan. Seksi Pelayanan Umum, Gizi dan KIA dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana kerja Seksi Seksi Pelayanan Umum, Gizi dan KIA;
b) Perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan pengnelolaan sarana pelayanan kesehatan;
c) Pengoordinasian pelayanan penunjang;
d) Pengoordinasian pengelolaan sarana pelayanan kesehatan;
e) Penyelenggaraan analisis kebutuhan sarana pelayanan penunjang dan pelayanan keehatan;
f) Penyelanggaraan pelayanan penunjang pada instalasi penunjang medis;
g) Penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi farmasi;
h) Penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi gizi;
i) Penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi kamar jenazah;
j) Penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit;
k) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja kerja Seksi Pelayanan Penunjang da Sarana Pelayanan Kesehatan.

4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaa, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Subbagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

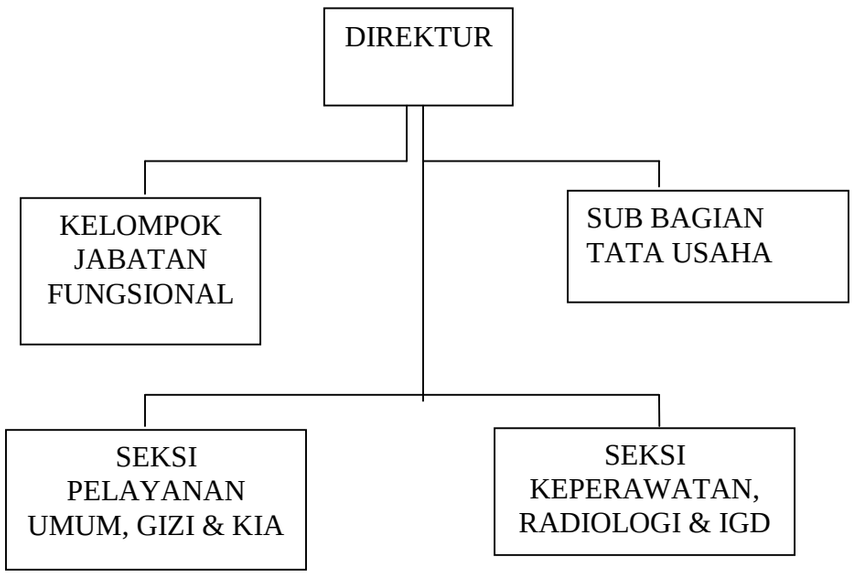
a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
b) Perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
c) Penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
d) Penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan;
e) Pemyelenggaraan kehumasan;
f) Penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
g) Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan;
h) Pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
i) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
j) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organiasasi; dan Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.

Struktur Organisasi

Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Wakai diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Rumah Sakit Umum Daerah Wakai merupakan lembaga

organisasi pelayanan kesehatan dipimpin oleh Direktur (Esselon III) dengan tiga pejabat struktural, yaitu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Keperawatan, Radiologi dan IGD, dan Kepala Seksi Pelayanan Umum, Gizi dan KIA. Struktur Rumah Sakit Umum Daerah Wakai sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2015 adalah :

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi RSUD Wakai



Keterangan :

———— : Garis Komando

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD WAKAI TAHUN 2022

A. EVALUASI KINERJA KEGIATAN

1. Perencanaan,Pengangggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumenperencanaan Perangkat daerah

      Pencapian Kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 100 % dengan capainan realisai anggran Rp. 45.765.000,-

   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja.Pencapian kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 100 % dengan ralisasianggaran Rp. 141.143.920,-
2. Administrasi Perangkat daerah

   Pencapian kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 96 % dengan capaian realisasi anggran Rp.2.432.394.378,-
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyedian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

      Percapaian Kinerja Dalam kegiatan ini yakni terlaksananya sebanyak 100 % dengan capaian realisasi anggaran Rp. 30.791.000,-
   b. Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

      kegiatan ini secara keseluruhan sebanyak 100 % dengan capaian realisasi anggaran Rp.561.184.000,-
   c. Penyedian Bahan Logistik Kantor

      Kegiatan ini secara keseluruhan sebnyak 100 % dengan pencapianaan realisasi Rp. 1.195.432.464,-
   d. Fasilitas Kunjungan Tamu

      Pencapaiaan kinerja dalam kegiatan ini sebanyak 100 % dengan capaian realisasi Rp.3.575.000,-
   f. Penyelnggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

      Pencapaian kinerja dalam kegiatan ini sebanyak 100 % dengan capaian alisasi anggaran Rp.461.526.185,-
5. Penyedianan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

      Rencana pencapaian kinerja yakni dengan realisasi anggaran sebesar Rp.33.195.000,-
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik

      Pencapaian kinerja dalam kegiatan ini sebanyak 99 % dengan pencapiain realisasi anggran Rp. 100.160.364,-
   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

      Pencapain kinerja dalam kegaitan ini sebnayak 100 %, dengan pencapaian realisasi anggaran Rp. 20.247.661,-
   d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

      Pencapaian kinerja dalam kegaitan ini sebanyak 93 % dengan pencapaian realisasi anggaran Rp.3.319.719.900,-

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahPengadaan Kenderaan Dinas Operasional
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak perizinan Kenderaan Perorangan atau Kenderaan dinas Jabatan

      Rencana pencapaian kinerja yakni tersedianya pemeliharaan kegiatan ini sebanyak 100 % dengan pencapaian realisasi anggaran Rp.24.853.000,-
   b. diaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau LapanganRencana Pencapaian kinerjanya yakni terpeliharanya kenderaan dinas oprasional Kantor dan Peralatan dengan realisasi Rp 44.685.000,-
   c. Pemeliharaan / Rehabilitas Saranan dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan LainnyaRencana

      Pencapaian kinerjanya yakni terpeliharanya gedung kantor dengan realisasi anggaran Rp. 39.970.000,-
   d. Pemeliharaan / Rehabilitas Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

      Rencana pencapaian kinerja. Realisasi Anggarannya adalah Rp. 59.521.000,-
7. Penyedian Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenagan Daerah Kabupaten / Kota
   a. Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasaranan Pendukung

      Pencapaian kinerja dalam kegiatan ini 99 %, capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 7.748.567.000,-
   b. Pengadaan Obat,Vaksin

      Pencapaian kinerja dalam kegiatan ini 100 % capaian realisasi anggran sebesar Rp. 362.915.957.
   c. Pengaadaan Alat Kesehatan /alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan dimana pencapaian realisasi anggaran Rp. 2.713.737.381,-
   d. Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang Medik Fasilitas kesehatan yang dimana realisasinya Rp. 30.894.000 yg mencapai 100 %.

B. EVALUASI KINERJA SASARAN

1. Perencanaan,Pengangggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Penyusunan Dokumenperencanaan Perangkat daerah

      Pencapian sasaran Kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 37 dokumen
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja.Pencapian sasaran kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 170 dokumen
2. Administrasi Perangkat daerah

   Pencapian sasaran kinerja kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 12 bulan
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyedian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

      Percapaian sasaran Kinerja Dalam kegiatan ini yakni 2 paket
   b. Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pencapaian sasaran kinerja kegiatan ini secara keseluruhan sebanyak 9 paket

c. Penyedian Bahan Logistik Kantor

Sasaran kinerja Kegiatan ini secara keseluruhan sebnyak 3 paket

e. Fasilitas Kunjungan Tamu

Pencapaiaan sasaran kinerja dalam kegiatan ini 56 laporan

f .Penyelnggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

Pencapaian sasaran kinerja dalam kegiatan ini sebanyak 257 kali

4. Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah

d. Pengadaan Mebel

Pencapaian sasaran kinerja dalam kegiatan ini sebanyak 2 jenis

5. Penyedianan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pencapaian ssaran kinerja yakni sebanyk 2 laporan

b. Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik

Pencapaian sasran kinerja dalam kegiatan ini sebanyak 2 rekening

e. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pencapain sasran kinerja dalam kegaitan ini sebnayak 2 jenis

f. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pencapaian sasran kinerja dalam kegaitan ini sebanyak 18 laporan

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahPengadaan Kenderaan Dinas Operasional

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak perizinan Kenderaan Perorangan atau Kenderaan dinas Jabatan

Pencapaian sasaran kinerja yakni tersedianya pemeliharaan kegiatan ini sebanyak 2 jenis

b. diaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau LapanganRencana Pencapaian pencapaian sasaran kinerjanya yakni terpeliharanya kenderaan dinas oprasional Kantor dan Peralatan dengan kegiatan ini sebanyak 2 jenis

c. Pemeliharaan / Rehabilitas Saranan dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan LainnyaRencana

Pencapaian sasaran kinerjanya yakni terpeliharanya gedung kantor sebanyak 2 jenis

g. Pemeliharaan / Rehabilitas Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

Pencapaian sasaran kinerja. Dengn kegiatan 5 jenis

7. Penyedian Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenagan Daerah Kabupaten / Kota

a. Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasaranan Pendukung

Pencapaian sasaran kinerja dalam kegiatan ini 5 paket

b. Pengadaan Obat,Vaksin

Pencapaian sasaran kinerja dalam kegiatan ini 4 paket

c. Pengadaan alat kesehatan dalam kegiatan ini da 1 paket
d. Pemeliharaan Rutin dan berkala kesehatan / alat menunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan dalam kegitan ini ada dua paket 2 paket

a. AKUNTABILITAS KEUANGAN

a. Rencana dan Realisasi Belanja Rumah Sakit

Rencana belanja RSUD Wakai tahun anggaran 2022 terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dengan anggaran besumber APBD Kabupaten. Berikut rincian rencana dan realisasi belanja RSUD Wakai Tahun **2022:**

Tabel 2.1

Data Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja

RSUD Wakai Tahun 2022

NO	NAMA KEGIATAN	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.431.394.378**	**2.431.394.378**
1.	Belanja Pegawai	**2.696.174.902**	**2.431.394.378**
a.	Belanja Gaji dan Tunjangan	**2.696.174.902**	**2.431.394.378**

NO	NAMA KEGIATAN	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4
B	**BELANJA LANGSUNG**	**10.867.236.004**	**10.432.424.655**
1.	**Perencanaan,penganngaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**187.025.000**	**186.908.920**
a.	Penyusunan Dokumen Penrencanaan Perangkat Daerah	45.840.000	45.765.000
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja	141.185.000	141.143.920
2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.318.175.476**	**2.315.931.099**
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.795.000	30.791.000
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	563.051.175	561.184.000
c.	Penyediaan Bahan Logistik	1.195.562.301	1.195.432.464
d.	Penyediaan Bahan Cetak	63..430.000	63.422.450
e.	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.575.000	3.575.000
f	Penyelnggara Rapat Koordinas dan Konsultasi	461.762.000	461.526.185

3	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**3.243.600.487**	**3.189.613.292**
a.	Penyediaan jasa surat menyurat	33.500.000	33.195.000
B	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	101.653.275	100.160.364
C	Penyediaan jasa peralatan dan pelengkapan kantor	20.250.000	20.247.661
D	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.569.864.880	3.043.382.110
4	**Pemeliharaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**169.235.000**	**169.029.000**
a	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kenderaan perorangan atau kenderaan dinas jabatan	24.875.000	24.853.000
b	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak dan perijinan kenderaan dinas operasional atau lapangan	44.750.000	44.685.000
c	Pemeliharaan /Reahabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bagunan lainya	40.000.000	39.970.000
d	Pemeliharaan ./rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainya	59.610.000	59.521.000
6	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenagan daerah kabupaten /kota‘**	**5.885.353.547**	**5.943.556.337**
a	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana pendukung	7.820.000.000	7.748.567.000
b	Pengadaan Alat Kesehatan /alat penunjang Medik fasilitas kesehatan	2.716.500.000	2.713.737.381
c	Pengadaan Obat Vaksin	363.027.471	362.915.957
d	Pemeliharaan Rutin Lata Kesehatan	31.000.000	30.894.000

2.3 ANALISIS HASIL KINERJA LAYANAN RSUD WAKAI

Output Kinerja Pelayanan RSUD Wakai baik kunjungan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Kunjungan IGD Tahun 2022 adalah sebagi berikut :

Tabel 2.2

JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN TAHUN 2022

No	Poliklinik	Jumlah Kunjungan
1	Umum	553
2	Gigi	0
3	Penyakit Dalam	0
4	Bedah	0
5	Kebidanan	0

Dari kunjungan Poliklinik RSUDD Wakai dapat dilihat bahwa hanya Poliknik Umum yang difungsikan, hal ini di sebabkan belum adanya tenaga Dokter Spesialis yang melakukan pelayanan di RSUD Wakai sepanjang Tahun 2019.

Tabel 2.3

JUMLAH KUNJUNGAN IGD dan RAWAT INAP TAHUN 2022

No	Instalasi	Jumlah Kunjungan
1	IGD	307
2	Rawat Inap	300

Tabel 2.4
INDIKATOR PELAYANAN RSUD WAKAI TAHUN 2021

No	Indikator	Nilai
1	B O R	**4.25**
2	L O S	**3.1**
3	T O I	**72.1**
4	B T O	**3.1**
5	NDR	**20.1**
6	GDR	**27.51**

Tabel 2.5
Output Kinerja Layanan RSUD Wakai Tahun 2021

No	Uraian	Target Output Kinerja	Realisasi Output Kinerja	Ket
1.	Kunjungan Rawat Jalan	10.950	553	
2.	Kunjungan Rawat Inap	2000	300	
3.	Kunjungan IGD	2500	307	

Melihat data output kinerja layanan RSUD Wakai tahun 2021 jelas Masih jauh dari target yang sudah ditetapkan, namun berdasarkan identifikasi masalah dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dapat dirumuskan beberapa masalah yang dibatasi pada masalah yang berhubungan dengan peralatan, Ketenagaan dan sistem manajemen administrasi sebagai berikut :

- *Jumlah dan jenis Peralatan medis maupun non medis masih kurang*
- *Belum terpenuhinya tenaga kesehatan dan administrasi yaitu Dokter spesialis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan dan administrasi untuk pengembangan pelayanan*
- *RSUD Wakai masih terkendala pada perijinan*
- *Belum ada kerjasama dengan pihak penyelenggara jaminan kesehatan.*

2.4 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Wakai.

Rumah Sakit Umum Wakai adalah Rumah Sakit Dengan kelas D yang merupakan pusat rujukan di wilayah kepulauan. melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan perundang– undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Rumah Sakit Umum Wakai mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelayanan medik
b. pelayanan kefarmasian
c. pelayanan kefarmasian
d. pelayanan penunjang klinik
e. pelayanan penunjang nonklinik
f. pelayanan rawat inap.
g. Pengelolaan administrasi dan keuangan

2.1.2. Isu-isu Strategis yang perlu Mendapat Prioritas Penanganan dan Perhatian pada Tahun 2022

Rumah Sakit Umum Wakai merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang diresmikan pada oktober 2014 namun efektiv beroperasi pada Januari 2015. Selama pelaksanaan kegiatan di tahun 2016 kendala terbesar yang dihadapi adalah pada persoalan ketenagaan, terutama tenaga medis atau dokter.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah menetapkan kelas RSUD Wakai sebagai Rumah Sakit Kelas D. Di awal tahun 2015 Rumah Sakit Umum Wakai Belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan kegiatan pelayanan sebagaimana mestinya. Tidak adanya tenaga fungsional dokter, serta saranan dan prasarana penunjang lainnya menjadi isu penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit. Sehingga rencana kerja rumah sakit wakai tahun 2021 masih di fokuskan pada penyediaan tenaga, sarana dan prasarana serta kebutuhan akan alat kesehatan. Isu yang tak kalah pentingnya adalah letak dari RSUD wakai yang berada di wilayah kepulauan togean yang merupakan daerah wisata bahari yang sering dikunjungi oleh turis asing dari manca Negara sehingga keberadaan dan peran Rumah Sakit Wakai menjadi sangat penting.

Berdasarkan gambaran tersebut diatas jelas isu tersebut merupakan tantangan rumah sakit untuk selalu dituntut meningkatkan kualitas layanannya, diantaranya rencana untuk memperoleh akreditasi.

Dengan rencana tersebut diatas maka konsekwensinya RSUD Wakai harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan tahapan pembangunan fisik

Rumah Sakit sesuai master plan, pengadaan peralatan baik peralatan medik maupun nonmedik, peningkatan Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitasnya serta penataan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Program Nasional atau Prioritas Nasional maupun program Provinsi setiap tahun selalu memunculkan Program Peningkatan Derajat Kesehatan termasuk Program Tahun 2019, dimana sasaran utamanya yaitu peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta Preventif dan Promotif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).

Sejalan dengan Program Nasional dan Propinsi tersebut diatas Rumah Sakit Umum Wakai yang berperan dalam pelayanan kesehatan secara kuratif dan rehabilitative tentu sangat erat menunjang terhadap Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak. Sehingga dilapangan kami memprioritaskan Program Pelayanan Obstetri Neonatal Komprehensif (PONEK).

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

3.2.1. TUJUAN

Berdasarkan Rancangan Awal Renstra RSUD Wakai Tahun 2021-2026, telah dirumuskan beberapa tujuan untuk rencana kerja tahun 2022 sebagai berikut :

1) Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran RS secara Cepat dan Tepat.
2) Penyediaan Sarana Prasarana untuk mendukung Pelayanan Kesehatan RS.
3) Meningkatkan performance Personel RS.
4) Meningkatkan Kualitas SDM Rumah Sakit
5) Melaksanakan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan yang baik
6) Menyediakan bahan habis pakai untuk pelayanan.
7) Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Yang profesional dan bermutu
8) Melaksanakan Pelayanan Kesehatan di RS yang berkelanjutan
9) Menjamin Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Miskin.

3.2.2. SASARAN

Guna mendapatkan fokus pada penyusunan program dan kegiatan, maka diperlukan suatu sasaran yang spesifik, terinci dan dapat dicapai dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan tersebut maka sasaran untuk setiap tujuan pada renja ini, adalah sebagai berikut :

1) Terlaksananya Pelayanan Administrasi RS yang cepat dan tepat.
2) Tersedianya Sarana Prasarana untuk mendukung Pelayanan Kesehatan RS
3) Meningkatnya performance Personel RS
4) Adanya SDM yang berkualitas dalam setiap pelayanan RS
5) Terlaksananya Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan yang baik
6) Tersedianya Bahan Medis Habis Pakai untuk pelayanan
7) Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Yang profesional dan bermutu
8) Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di RS yang berkelanjutan
9) Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Masayarakat Miskin.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrumen dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapatmenggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran Program Rumah Sakit Umum Daerah Wakai Tahun 2022 sebagai berikut :

Sasaran I : Terlaksananya Pelayanan Administrasi RS yang cepat dan tepat

a. Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

a.1. Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah

a.2 Koordinasi dan pelayanan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja

B Administrasi Umum Perangkat Daerah

b.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

C Administasi Umum Perangkat Daerah

c.1 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

c.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

c.3 Penyediaan Logostik

c.4 Penyediaan cetak dan penggandaan

c.5 Fasilitas kunjngan Tamu

c.6 Penyelnggara Rapat Koordinasi dan konsultasi

Sasaran II : Tersedianya Sarana Prasarana untuk mendukung Pelayanan Kesehatan RS

D Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah

b.1 Penyediaan Surat Menyurat

b.2 Penyediaan Jasa Peralatan,sumber daya dan listrik

b.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

b.4 Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor

E Pemeliharaan Barang Milik daerah

e.1 Pemelihara rutin/berkala kenderaan dinas jabatan

b.2 Pemeilaharan Rutin / Berkala Kenderaan dinas / oprasional lainnya

b.3 Pemeilaharan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

b.4 Pemeilaharan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor atau bantunan lainya

Sasaran III : Adanya SDM yang berkualitas dalam setiap pelayanan RS

F Penyediaan Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah

f.1 Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukukungnya

f.2 Pengadaan alat kesehatan /alat penunjang medik

f.3 Pengadaan obat vaksin

f.4 Pemeiharaan Rutin dab berkala alat kesehatan

Sasaran V : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Yang profesional dan bermutu

d. Program Kemtraan Pengikatan pelayanan kesehatan

d.1 Kemitraan pengobatan lnjutan bagi pasien rujukan

CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

a. Menyusun Program/ Kegiatan dan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang selanjutnya disyahkan dengan DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) SKPD
b. Membentuk Satuan Pengelola Kegiatan (terdiri dari PA, KPA, PPTK, Pembantu administrasi)
c. Membentuk Satuan Pengelola Keuangan
d. Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa dan Panitia Penerima Barang
e. Sosialisasi Program/Kegiatan beserta Anggaran (DPA) yang telah disyahkan kepada PPTK untuk pedoman pelaksanaan kegiatan
f. Setiap PPTK membuat POA sesuai Program/Kegiatan yang di kelolanya
g. KPA beserta PPTK menyerahkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa ke Panitia Pengadaan barang/jasa
h. Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui : Pengadaan langsung, penunjukan langsung, lelang sederhana dan lelang umum.
i. Panitia pengadaan menyerahkan barang/jasa ke Panitia Pemeriksa yang selanjutnya diberikan ke Panitia Penerima/Bendahara barang
j. KPA dan PPTK melaksanakan laporan rutin atas perkembangan program dan kegiatannya.

SKEDUL (JADWAL) PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Kegiatan	2022												Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Menyusun Program &RKA	X						X						
2	Membentuk Satuan Pengelola Kegiatan	X												
3	Membentuk Satuan Pengelola Keuangan	X												
‘4	Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa dan Panitia Penerima Barang	X												
5	Sosialisasi Program/ Kegiatan dan Anggaranya	X												
6	Pembuatan POA Program/ Kegiatan oleh PPTK		X											
7	Proses Pengadaan Barang/Jasa			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Pencatatan, Pelaporan, RTL			X			X			X			X	
9	Penyusunan Dok.Evaluasi												X	
10	Umpan balik Dok evalusi												X	

BAB IV
P E N U T U P

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Wakai Tahun 2023 merupakan pedoman atau acuan bagi Rumah Sakit Umum Wakai Kabupaten Tojo Una-Una dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengembangan Rumah Sakit dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, baik dari sumber dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan sumber dana lainnya.

Program peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit khususnya kegiatan pembangunan Gedung Instalasi Pemulasaran Jenazah, Pembangunan Gedung Perawatan Kelas III serta Pengadaan Alat Kesehatan mendapat perhatian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), termasuk Pemenuhan Tenaga Dokter dan serta Pengadaan Peralatan Medik dan non Medik melalui APBD Kabupaten. Program kegiatan RSUD Wakai membutuhkan anggaran yang cukup besar sedangkan kemampuan APBD Kabupaten Tojo Una-Una terbatas.

Pelaksanaan Program Kegiatan dalam RENJA 2022 tentu menggunakan pihak ketiga dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Semoga Rencana Kerja RSUD Wakai tahun 2023ini dapat dijadikan pedoman dan landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit dan kepada semua pihak hendaknya dapat membantu merealisasikan program kegiatan tersebut.

Wakai, 05 April 2023
Direktur RSUD Wakai



dr.Ratih Septi Dewi S.ked
Nip: 19840926 201403 2 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) RSUD Pratama Togean merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Arah pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah.

Rencana Kerja (RENJA) RSUD Pratama Togean ini disusun melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up.* Unit kegiatan di lingkungan Rumah Sakit sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing unit kegiatan tersebut. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program-program prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Tojo Una - Una bidang kesehatan dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu selama Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

RSUD Pratama Togean Kabupaten Tojo Una - Una merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan berbagai program kesehatan. Tugas utama melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan, dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuannya adalah terselenggaranya pelayanan upaya kesehatan perorangan (UKP) secara efektif dan efisien. Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Pratama Togean Kabupaten Tojo Una – Una berpedoman pada peraturan perundangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan :

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.
3. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2016

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) RSUD Pratama Togean tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran.

1. Tujuan :

1) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD Pratama Togean yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan.
2) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
3) Menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Pratama Togean Kabupaten Tojo Una - una tahun 2021-2026 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Pratama Togean tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD PRATAMA TOGEAN TAHUN 2023

Bab ini menguraikan Evaluasi Kinerja tahun 2023, Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Pratama Togean, Isu-isu penting mengenai kondisi dan peranan RSUD Pratama Togean.

BAB III TUJUAN SASARAN DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Pratama Toegan dan Program Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

Mengemukakan harapan-harapan atas keberadaan Renja Tahun 2023 agar dapat dijadikan acuan dalam program kegiatan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD PRATAMA TOGEAN TAHUN 2023

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Pratama Togean

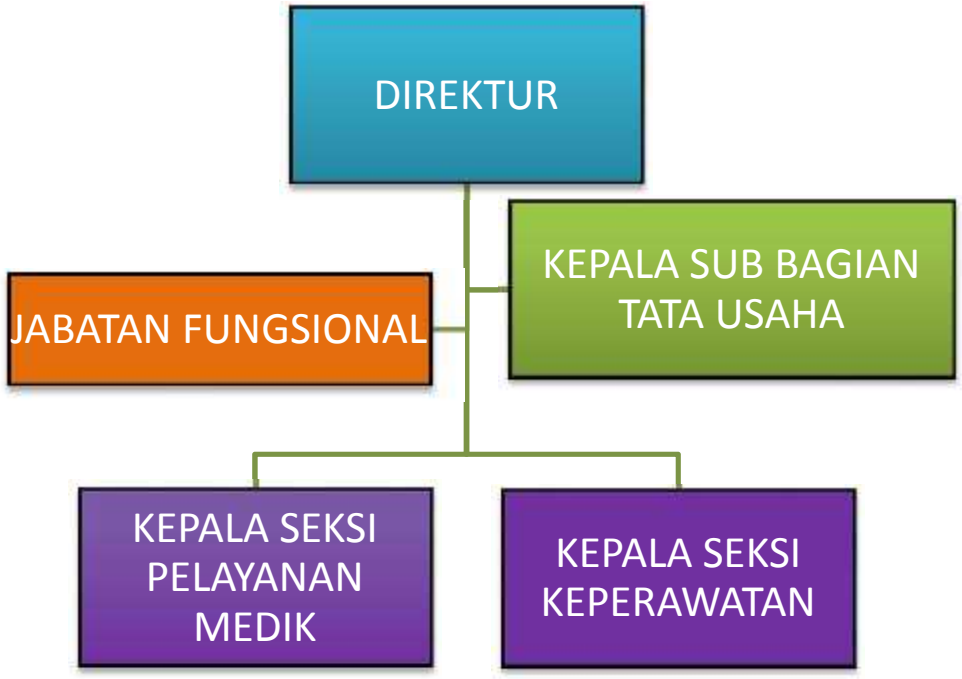
Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Togean mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna, bermutu, terpadu dan berkesinambungan, kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RSUD Pratama Togean adalah Rumah Sakit Tipe D Pratama, dalam melaksanakan tugas, RSUD Pratama Togean menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan dibidang pelayanan kesehatan.
b. Pelaksanaan kebijakan operasional pemberian bimbingan dan pembinaan, pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
c. Pembinaan teknis, pengelolaan dan dokumentasi bidang RSUD Pratama Togean.
d. Penyusunan program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyelarasan, perawatan serta pengawasan.
e. Pemantauan dan pengendalian tugas pokok yang ditetapkan oleh Bupati Tojo Una Una berdasarkan peraturan perundang-undangan.
f. Pengelolaan administrasi umum.
g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional

RSUD Pratama Togean adalah salah satu unit pelaksana kegiatan bidang Kesehatan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una Una berdasarkan surat Keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor 5 tahun 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi UPT RSUD Kabupaten Tojo Una Una.

Berikut gambaran umum Struktur Organisasi RSUD Kelas D Pratama

Gambar 2.1



Adapun uraian tugas dan fungsi masing adalah sebagai berikut:

1. **Direktur**

   Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi yang bertugas memimpin penyelengaraan Rumah Sakit. Dalam melaksanakan tugas Direktur Rumah Sakit juga menyelengarakan fungsi:

   a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi.
   b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya.
   c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit.
   d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi.
   e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi RSUD Pratama Togean meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan, administrasi, kepegawaian, diklat dan pelaporan.

Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha:

a. Penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
b. Penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan
c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan RSUD Pratama Togean
d. Pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan RSUD Pratama Togean
e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha:

a. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, displin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai
b. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan
c. Melakukan telaah dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundangundangan
d. Menyusun program, rencana pendapatan, pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan pemantauan keuangan
f. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan
g. Mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi dan bahan lainnya dalam penyusunan perecanaan pelaporan
h. Mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha, serta sumber daya yang berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas

j. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dinas
k. Menyiapkan berkas-berkas perencanaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Pelayanan Medik

Merupakan unsur organisasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit, Kepala Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan medik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala seksi pelayanan mempunyai rincian uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun Standar Pelayanan Medik;
b. Membuat perencanaan dan mengusulkan kebutuhan dan pengembangan fasilitas pelayanan medik;
c. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan biaya pelayanan medik;
d. Melakukan koordinasi rencana kebutuhan dan penempatan tenaga pelayanan medik;
e. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan ketenagaan dan pengendalian mutu pelayanan medik;
f. Pelaksanaan dan mengkoordinir kegiatan pelayanan medik dan pelayanan rujukan;
g. Menyiapkan dan menyajikan informasi kegiatan pelayanan medik dan rujukan;
h. Melakukan evaluasi proses kegiatan pelayanan medik;
i. Melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
j. Membuat analisis penilaian kinerja pelayanan medik;
k. Melaksanakan, dan mengevaluasi sistem remunerasi jasa pelayanan; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Seksi Keperawatan

Merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit. Kepala Seksi Perawatan, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis serta mengelola data dibidang asuhan keperawatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Keperawatan mempunyai rincian uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun program kerja, rencana kegiatan dan rencana kebutuhan yang berkaitan dengan berfungsinya organisasi dan mantapnya pengelolaan di bidang keperawatan.
b. Mengorganisir sumber daya yang tersedia di lingkungan bidang keperawatan untuk merealisasikan rencana kegiatan dan pelaksanaan secara efektif dan efisien.
c. Menggerakkan seluruh sumber daya manusia yang tersedia di lingkungan bidang keperawatan agar mencapai yang optimal.
d. Merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis asuhan keperawatan;
e. Merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis etika, profesi keperawatan.
f. Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan pelayanan keperawatan.
g. Membina, memfasilitasi norma pelayanan keperawatan kepada semua tenaga keperawatan agar dapat diketahui, dimengerti, dihayati dan dilaksanakan.
h. Melakukan pengawasan berdasarkan kerja harian dan prosedur kerja sebagai tolak ukur dan kriteria penilaian seksi keperawatan.
i. Menyusun rencana kebutuhan tenaga, peralatan dan pengembangan pelayanan perawatan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan dan kebutuhan rumah sakit khususnya dalam pelayanan.
j. Menyiapkan bahan koordinasi melaksanakan program orientasi bagi tenaga baru.
k. Mengendalikan pendayagunaan tenaga keperawatan secara efektif dan efisien.

l. Melaksanakan kebijakan dan peraturan/tata tertib pelayanan keperawatan yang berlaku.
m. Menyusun rencana pembinaan dan pengembangan karir perawatan.
n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
o. Menetapkan tolak ukur dan kriteria yang dapat dipakai untuk melakukan penilaian, peningkatan dan pengembangan terhadap kegiatan pelayanan keperawatan.
p. Memelihara serta mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan yang tepat, sehingga dapat tercipta sistem informasi rumah sakit yang akurat.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD PRATAMA TOGEAN TAHUN 2022

A. EVALUASI KINERJA KEGIATAN

1. Perencanaan,Pengangggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumenperencanaan Perangkat daerah
      Pencapian Kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 100 % dengan capainan realisai anggran Rp. 3.750.000,-
2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
   Pencapian kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 89,41 % dengan capaian realisasi anggran Rp.322.906.075,-
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      kegiatan ini secara keseluruhan sebanyak 96 % dengan capaian realisasi anggaran Rp.227.325.000,-
   b. Penyelnggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
      Pencapaian kinerja dalam kegiatan ini sebanyak 99 % dengan capaian alisasi anggaran Rp.306.068.636,-
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
      Pencapaian kinerja dalam kegaitan ini sebanyak 98 % dengan pencapaian realisasi anggaran Rp.460.120.760,-

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
    a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor , Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua

       Rencana pencapaian kinerja yakni tersedianya pemeliharaan kegiatan ini sebanyak 89 % dengan pencapaian realisasi anggaran Rp.76.084.000,-
    b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor, Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang

       Pencapaian kinerjanya yakni terpeliharanya kenderaan dinas oprasional Kantor dan Peralatan dengan realisasi Rp 49.950.000,-
6. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenagan Daerah Kabupaten / Kota
    a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

       Pencapaian kinerja dalam kegiatan ini 100 %, capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 3.450.000,-
    b. Pengadaan Obat,Vaksin

       Pencapaian kinerja dalam kegiatan ini 71 % capaian realisasi anggran sebesar Rp. 21.293.851.-
    c. Pengaadaan Alat Kesehatan /alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan dimana

       Pencapaian kinerja dalam kegiatan ini 100 % realisasi anggaran Rp. 8.600.000,-
    d. Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang Medik Fasilitas kesehatan yang dimana realisasinya Rp. 10.080.000 yg mencapai 74 %.
    e. Pengadaan Bahan Habis Pakai

       Pencapaian kinerja dalam kegiatan ini 92 % adapun capaian realisasi anggaran sebesar Rp 11.501.533.-
    f. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

       Pencapaian kinerja dalam kegiatan ini 100 % dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp 5.950.000.-

7. Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

   a. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

      Pencapaian kinerja dalam kegiatan ini 97 % dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp 46.713.615.-

B. EVALUASI KINERJA SASARAN

1. Perencanaan,Pengangggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   b. Penyusunan Dokumenperencanaan Perangkat daerah

      Pencapian sasaran Kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 37 dokumen

2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah

   Pencapian sasaran Kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 12 Bulan

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   a. Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

      kegiatan ini secara keseluruhan dengan capaian sasaran Kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 12 Bulan

   b. Penyelnggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

      Pencapaian sasaran Kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 120 Kali

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

      Pencapaian sasaran Kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 12 Bulan

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

   a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor dan Alat Angkutan Apung Bermotor , Belanja Modal Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

      Pencapaian sasaran Kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 4 Unit

6. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenagan Daerah Kabupaten / Kota

   a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

      Pencapaian sasaran Kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 4 paket.

b. Pengadaan Obat,Vaksin

Pencapaian sasaran Kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 3 paket.

c. Pengaadaan Alat Kesehatan /alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan dimana

Pencapaian sasaran Kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 1 Jenis.

d. Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang Medik Fasilitas kesehatan

Pencapaian sasaran Kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 1 Paket.

e. Pengadaan Bahan Habis Pakai

Pencapaian sasaran Kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 2 Paket.

f. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pencapaian sasaran Kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 1 Paket.

7. Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

a. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Pencapaian sasaran Kinerja dalam kegiatan ini yakni terlaksana 12 Paket.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

a. Rencana dan Realisasi Belanja Rumah Sakit

Rencana belanja RSUD Pratama Togean tahun anggaran 2022 terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dengan anggaran besumber APBD Kabupaten. Berikut rincian rencana dan realisasi belanja RSUD Pratama Togean Tahun **2022:**

Tabel 2.1

Data Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja

RSUD Pratama Togean Tahun 2022

Anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Belanja	Tahun Anggaran 2022		
	Anggaran (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**%**
Belanja Operasi	1.294.501.186,00	1.226.845.470,00	94,77
Belanja Modal	342.590.778,00	323.198.000,00	94,34
Jumlah Belanja	**1.637.091.964,00**	**1.550.043.470,00**	**94,68%**

Jumlah realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 Rp. **1.550.043.470,00** atau **94,68%** dari anggaran sebesar Rp. **1.637.091.964,00** dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Togean meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang / jasa, dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Belanja Operasi :	**Tahun Anggaran 2022**	
	Anggaran (Rp)	**Realisasi (Rp)**
Belanja Pegawai	410.116.445,00	371.866.075,00
Belanja Barang /Jasa	884.384.741,00	854.979.395,00
Jumlah Belanja Operasi	1.294.501.186,00	1.226.845.470,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.226.845.470,00atau 94,77% dari anggaran Rp. 1.637.091.964,00 dengan perincian sebagai berikut :

	Anggaran (Rp)	**Realisasi (Rp)**
Belanja Pegawai	**410.116.445,00**	**371.866.075,00**
Belanja Gaji Pokok PNS	220.561.463,00	219.374.625,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.996.878,00	18.892.502,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.615.500,00	8.575.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	19.896.625,00	19.780.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.735.000,00	1.735.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	14.053.101,00	13.977.060,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.025.000,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.446,00	4.420,00

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.606.616,00	10.262.721,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	454.600,00	451.751,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.363.779,00	1.355.234,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	337.257,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	62.506.180,00	28.497.762,00
Belanja Honorarium	48.960.000,00	48.960.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	40.920.000,00	40.920.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.040.000	8.040.000
Belanja Barang dan Jasa	**884.384.741,00**	**854.979.395,00**
Belanja Barang Pakai Habis	97.718.876,00	1.536.076.250,00

2. Belanja Modal

	Anggaran (Rp)	**Realisasi (Rp)**
Belanja Modal	**342.590.778,00**	**323.198.000,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	342.590.778,00	323.198.000,00
Belanja Modal Mesin Proses Apung	71.500.000	67.051.000,00
Belanja Modal Electric Generating Set	9.656.761	9.466.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	85.550.020	76.084.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	50.000.000	49.950.000
Belanja Modal Mebel	9.000.000	8.750.000
Belanja Modal Alat Pembersih	4.400.000	4.400.000
Belanja Modal Alat Pendingin	1.740.000	1.740.000
Belanja Modal Alat Dapur	1.464.000	1.464.000
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	8.600.000	8.600.000
Belanja Modal Personal Computer	78.814.997	77.333.000
Belanja Modal Peralatan Jaringan	750.000	750.000
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	13.865.000	10.510.000
Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	3.250.000	3.100.000
Lainnya	4.000.000	4.000.000
Belanja Modal Elektrik		

2.3 ANALISIS HASIL KINERJA LAYANAN RSUD PRATAMA TOGEAN

Kinerja pelayanan RSUD Pratama Togean di tahun 2022 hanya melayani kunjungan rawat jalan hal ini disebabkan karena belum tersedianya sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Adapun output kinerja pelayanan rawat jalan tahun 2022 adalah sebagi berikut :

Tabel 2.2

JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN TAHUN 2022

No	Poliklinik	Jumlah Kunjungan
1	Umum	178

Dari data kunjungan Poliklinik RSUD Pratama Togean dapat dilihat bahwa hanya Poliknik Umum yang difungsikan, hal ini di sebabkan karena belum tersedianya tenaga Dokter Spesialis yang melakukan pelayanan di RSUD Pratama Togean sepanjang Tahun 2022.

Tabel 2.3

INDIKATOR PELAYANAN RSUD PRATAMA TOGEAN TAHUN 2022

No	Indikator	Nilai
1	B O R	**0**
2	L O S	**0**
3	T O I	**0**
4	B T O	**0**
5	NDR	**0**
6	GDR	**0**

2.4 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Pratama Togean.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan no 24 Tahun 2014, Rumah Sakit Kelas D Pratama dalam melaksanakan tugas paling sedikit menyelenggarakan:

a. pelayanan medik umum,
b. pelayanan gawat darurat,
c. pelayanan keperawatan,
d. pelayanan laboratorium pratama,

e. pelayanan radiologi dan
f. pelayanan farmasi
g. Pengelolaan administrasi dan keuangan

2.1.2. Penentuan Isu-isu Strategis

1. Manajemen kesehatan yang belum optimal terutama aspek perencanaan dan penganggaran pembangunan maupun aspek pelaksanaan dan monitoring evaluasi program kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, hukum kesehatan, yang perlu ditingkatkan pada era desentralisasi demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas serta terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Profesional.
2. Kualitas sumber daya manusia kesehatan yang ada belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan sehingga perlu adanya upaya-upaya dalam menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan, selain itu sumber daya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu belum sepenuhnya tersedia secara merata dan terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat. Penyediaan sarana ini secara bertahap perlu ditingkatkan.
3. Adanya pergeseran siklus dan pola penyakit baik menular maupun tidak menular.
4. Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit untuk menjamin mutu pelayanan.
5. Peningkatan Sarana Prasarana dan Alat kesehatan dalam menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
6. Kurangnya Tenaga fungsional dalam pengelolaan Administrasi dan Keuangan Rumah Sakit perlu mendapat perhatian, hal ini dikarenakan Fungsi Administrasi dan Keuangan Merupakan Motor penggerak Organisasi. Sehinga diharapkan RSUD Pratama Togean dapat menciptakan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang baik.
7. Belum tersedianya pelayanan kesehatan yang berbasis wisata di wilayah Kabupaten Tojo Una Una yang sebagian besar masih bergantung pada sektor pariwisata.
8. Belum terselenggaranya kerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai salah satu provider kesehatan yang berlaku di Kabupaten Tojo Una Una.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Sebagai SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sektor kesehatan, Rencana Kerja RSUD Pratama Togean tahun 2024 disusun dengan memperhatikan pula Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019-2024. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Ayat 2 UUD 1945, “Negara Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan martabat rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah atas kemanusiaan” dan Pasal 28 H ayat 3 UUD 1945 “Setiap Orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat”. Yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Perpres No. 12/2013 Tentang Jaminan Kesehatan, UU No. 40/2004 Tentang SJSN, UU No. 24/2011 Tentang BPJS.

Pengaturan APBD sesuai PERMENDAGRI 27 TAHUN 2013, Ayat 10. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Ayat 37. Pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-undang 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional. Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan atau pemberian iuran kepada BPJS, yang dianggarkan pada PPKD, jenis belanja bantuan sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka program dan kegiatan yang dilakukan oleh RSUD Pratama Togean dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berlandaskan keselamatan pasien wajib didukung oleh semua stakeholder.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

3.2.1. TUJUAN

Berdasarkan Rancangan Awal Renstra RSUD Pratama Togean Tahun 2021-2026, telah dirumuskan beberapa tujuan untuk rencana kerja tahun 2024 sebagai berikut :

1) Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rumah Sakit secara Cepat dan Tepat.
2) Penyediaan Sarana Prasarana untuk mendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.
3) Meningkatkan Performance Personel Rumah Sakit.
4) Meningkatkan Kualitas SDM Rumah Sakit
5) Melaksanakan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan yang baik
6) Menyediakan bahan habis pakai untuk pelayanan.
7) Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Yang profesional dan bermutu
8) Melaksanakan Pelayanan Kesehatan di RS yang berkelanjutan
9) Menjamin Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Miskin.

3.2.2. SASARAN

Guna mendapatkan fokus pada penyusunan program dan kegiatan, maka diperlukan suatu sasaran yang spesifik, terinci dan dapat dicapai dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan tersebut maka sasaran untuk setiap tujuan pada renja ini, adalah sebagai berikut :

1) Terlaksananya Pelayanan Administrasi Rumah Sakit yang cepat dan tepat.
2) Tersedianya Sarana Prasarana untuk mendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
3) Adanya SDM yang berkualitas dalam setiap pelayanan Rumah Sakit
4) Terlaksananya Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan yang baik
5) Tersedianya Obat dan Bahan Medis Habis Pakai untuk pelayanan
6) Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Yang profesional dan bermutu
7) Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang berkelanjutan
8) Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Masayarakat Miskin.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrumen dari suatu kebijakan

yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran Program Rumah Sakit Umum Daerah Wakai Tahun 2022 sebagai berikut :

Sasaran I : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Rumah Sakit yang cepat dan tepat

a. Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
   a.1. Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah
b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   b.1 Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   b.2 Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sasaran II : Tersedianya Sarana Prasarana untuk mendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota.
   a.1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
   a.2 Pengadaan Kendaraan Dinas / operasional
   a.3 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
   a.4 Pengadaan Obat, Vaksin
   a.5 Pengadaan Bahan Habis Pakai
   a.6 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
   a.7 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

b. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten Kota.
   b.1 Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Tabel 3.1

Rumusan Rencana

CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

a. Menyusun Program/ Kegiatan dan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang selanjutnya disyahkan dengan DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) SKPD
b. Membentuk Satuan Pengelola Kegiatan (terdiri dari PA, KPA, PPTK, Pembantu administrasi)
c. Membentuk Satuan Pengelola Keuangan
d. Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa dan Panitia Penerima Barang
e. Sosialisasi Program/Kegiatan beserta Anggaran (DPA) yang telah disyahkan kepada PPTK untuk pedoman pelaksanaan kegiatan
f. Setiap PPTK membuat POA sesuai Program/Kegiatan yang di kelolanya
g. KPA beserta PPTK menyerahkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa ke Panitia Pengadaan barang/jasa
h. Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui : Pengadaan langsung, penunjukan langsung, lelang sederhana dan lelang umum.
i. Panitia pengadaan menyerahkan barang/jasa ke Panitia Pemeriksa yang selanjutnya diberikan ke Panitia Penerima/Bendahara barang
j. KPA dan PPTK melaksanakan laporan rutin atas perkembangan program dan kegiatannya.

SKEDUL (JADWAL) PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Kegiatan	2024												Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Menyusun Program &RKA	X						X						
2	Membentuk Satuan Pengelola Kegiatan	X												
3	Membentuk Satuan Pengelola Keuangan	X												
`4	Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa dan Panitia Penerima Barang	X												
5	Sosialisasi Program/ Kegiatan dan Anggaranya	X												
6	Pembuatan POA Program/ Kegiatan oleh PPTK		X											
7	Proses Pengadaan Barang/Jasa			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Pencatatan, Pelaporan, RTL			X			X			X			X	
9	Penyusunan Dok.Evaluasi												X	
10	Umpan balik Dok evalusi												X	

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) RSUD Pratama Togean Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (RENJA) RSUD Pratama Togean Kabupaten Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai tugas pokok dan fungsi RSUD Pratama Togean serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja (RENJA) RSUD Pratama Togean Tahun 2024 merupakan pedoman atau acuan bagi RSUD Pratama Togean Kabupaten Tojo Una-Una dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengembangan Rumah Sakit dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, baik dari sumber dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan sumber dana lainnya.

Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Pratama Togean nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Atas Kinerja Tahunan (LAKIP).

Dengan demikian, Renja ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Plt. Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Togean

Ronal, S, Kep
NIP. 19831022 201001 1 009

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN						**1.157.752.578,00**							**1.332.255.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.157.752.578,00**							**1.332.255.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.157.752.578,00**							**1.332.255.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**BB Nilai**		**BB Nilai**	**BB Nilai**	**1.051.938.828,00**						**BB Nilai**	**1.135.455.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 %		100 %	100 %	6.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	5 Laporan	1.100.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	5 Laporan	1.100.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN*	100 %		100 %	100 %	359.872.578,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN	5 Orang/bulan	380.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5 Orang/bulan		5 Orang/bulan	5 Orang/bulan	359.872.578,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN	5 Orang/bulan	380.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tersedia dan Terselenggaranya Administrasi Umum*	100 %		100 %	100 %	247.135.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	1 Paket	273.100.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	1 Paket	1.100.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	19.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	4 Paket	22.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	4 Paket	22.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	207.135.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	60 Laporan	228.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %		100 %	100 %	53.131.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	2 Unit	56.875.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	46.881.250,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	2 Unit	50.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	6.250.000,00	-	-	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	5 Unit	6.875.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah*	100 %		100 %	100 %	385.800.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	12 Laporan	424.380.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	385.800.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	12 Laporan	424.380.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase pemenuhan layanan pasien***	**41.5 Persen**		**41.5 Persen**	**41.5 Persen**	**105.813.750,00**						**41.5 Persen**	**196.800.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	100 %		100 %	100 %	62.813.750,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	4 Unit	149.800.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	4 Unit		4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	4 Unit	1.100.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	4 Unit		4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	4 Unit	55.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	10 Unit	1.100.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin														
			Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	24.813.750,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	1 Paket	75.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai														
			Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	1 Paket	11.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	1 Unit	1.100.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	3 Unit		3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	3 Unit	5.500.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tersedianya layanan kesehatan untuk rujukan tingkat daerah kabupaten/kota*	100 %		100 %	100 %	43.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	4 Dokumen	47.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	43.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	4 Dokumen	47.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
	J U M L A H							**1.157.752.578,00**							**1.332.255.000,00**	

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHN
ALAMAT : JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA TELP;FAX. 0464- 21611 KODE POS 94683

RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN 2024



SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

Ketua Tim : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan

Kelompok Kerja :

1. Bidang Bina Marga
   - Koordinator : Kepala Bidang Bina Marga
   - Anggota : Tatang Setioko, S.T.
   - Anggota : Muhammad Ishak, S.T.
   - Anggota : Moh. Irsyad Muhaimin, S.T.

2. Bidang Cipta Karya
   - Koordinator : Kepala Bidang Cipta Karya
   - Anggota : Muliadi, S.T., M.T.
   - Anggota : Teguh Widodo, S.T.
   - Anggota : Arie Kurniawan Rioeh, S.T.

3. Bidang Sumber Daya Air
   - Koordinator : Kepala Bidang Sumber Daya Air
   - Anggota : Andi Laskaria, S.T.
   - Anggota : Fahmi Musbudi, S.T.
   - Anggota : Khaerunisa, S.T.

4. Bidang Tata Ruang
   - Koordinator : Kepala Bidang Tata Ruang
   - Anggota : Hamsiah DG. Dahlan, S.T.
   - Anggota : Raehan Mei Maloto, S.T.
   - Anggota : Armin, S.T.

5. Bidang Jasa Konstruksi

Koordinator	: Kepala Bidang Jasa Konstruksi
Anggota	: Alam Bido, S.T.
Anggota	: Muhammad Faisal, S.T.
Anggota	: Fahrin Monoarfa, S.T

6. Bidang Perumahan

Koordinator	: Kepala Bidang Perumahan
Anggota	: Syuhri S. Abdul Kadir, S.T.
Anggota	: Zahra, S.T.
Anggota	: Rusdin, S.T., M.M.
Anggota	: Yunita, S.E.

7. Bagian Penyusun Program

Koordinator	: Kasubag. Penyusun Program
Anggota	: Gledis Hasvita Sari Laata, S.E.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN,
DAN PETANAHAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Dr. MUHAMMAD ILYAS, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19720811 200502 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
Alamat : Jl. Merdeka Kota Bumi Mas No. Telp/Fax 0464 – 21611 KodePos 94683 Ampana

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR :

T E N T A N G

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
(RENJA OPD-DPUPRPKPP)
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN 2024

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan Kepala organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menyusun Rencana Kerja OPD tahun 2024;

b. Bahwa Rencana Kerja (Renja) OPD memuat arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;

c. bahwa Rencana Kerja (Renja) OPD tahun 2024 memuat program/kegiatan pembangunan OPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefiasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 24)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Rencana Kerja organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permuahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RENJA OPD-DPUPRPKPP Tahun 2024, adalah dokumen Program/Kegiatan/Sub Kegiatan periode 1 (satu) Tahun.

Kedua : RENJA OPD-DPUPRPKPP Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU
3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN
4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
5. BAB V PENUTUP

Ketiga : RENJA OPD-DPUPRPKPP Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 18 Tahun 2021 yang memuat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Lokasi Kegiatan, Target Pencapaian Kinerja dan Pagu Indikatif.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ampana, Mei 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman,
Dan Pertanahan
Kabupaten Tojo Una-Una

Dr. MUHAMMAD ILYAS, S.T. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720811 200502 1 004

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 merupakan rencana tahunan dengan mempertimbangkan RPJMN, RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah dan RPJPD Kabupaten dan bersifat indikatif.

Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa input, output, dan outcome dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Penyusunan Rencana Kerja ini disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas daerah, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti peningkatan jalan dan jembatan kabupaten, penyediaan sanitasi dan air bersih, peningkatan panjang jaringan irigasi, dan kualitas permukiman dan perumahan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan dan merupakan Tolok Ukur *(benchmark)* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Rencana Kerja 2024 ini merupakan bentuk komitmen penuh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Rencana Kerja ini. Kami sadari adanya kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Ampana, Mei 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman,
Dan Pertanahan
Kabupaten Tojo Una-Una

Dr. MUHAMMAD ILYAS, ST. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720811 200502 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Kepala Dinas PUPRPKPP Kabupaten Tojo Una-Una..... i
Kata Pengantar v
Daftar Isi..... vii
Daftar Gambar..... ix
Daftar Tabel x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra..... 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan..... 22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 75

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 93
3.2 Tujuan dan sasaran Renja..... 97

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan..... 102

BAB V PENUTUP

Penutup..... 129

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen Perencanaan lainnya... 2

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan..... 95

Tabel 3.2 Tujuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan..... 98

Tabel 3.3 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan..... 100

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan..... 101

Tabel 4.1 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan..... 103

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini dimana setiap organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka diharapkan organisasi publik dapat membuat suatu Rencana Stratejik (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas tersebut.

Rencana Kerja (*Performance Plan*) Tahun 2024 yang disusun ini merupakan suatu dokumen yang tidak terpisah dari dan merupakan uraian lebih lanjut dari rencana stratejik (Renstra). Rencana Kinerja merupakan uraian lebih mendetail dari rencana stratejik yang telah disusun sebelumnya. Rencana stratejik sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diurakan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program, kegiatan dan Sub Kegiatan lebih terfokus.

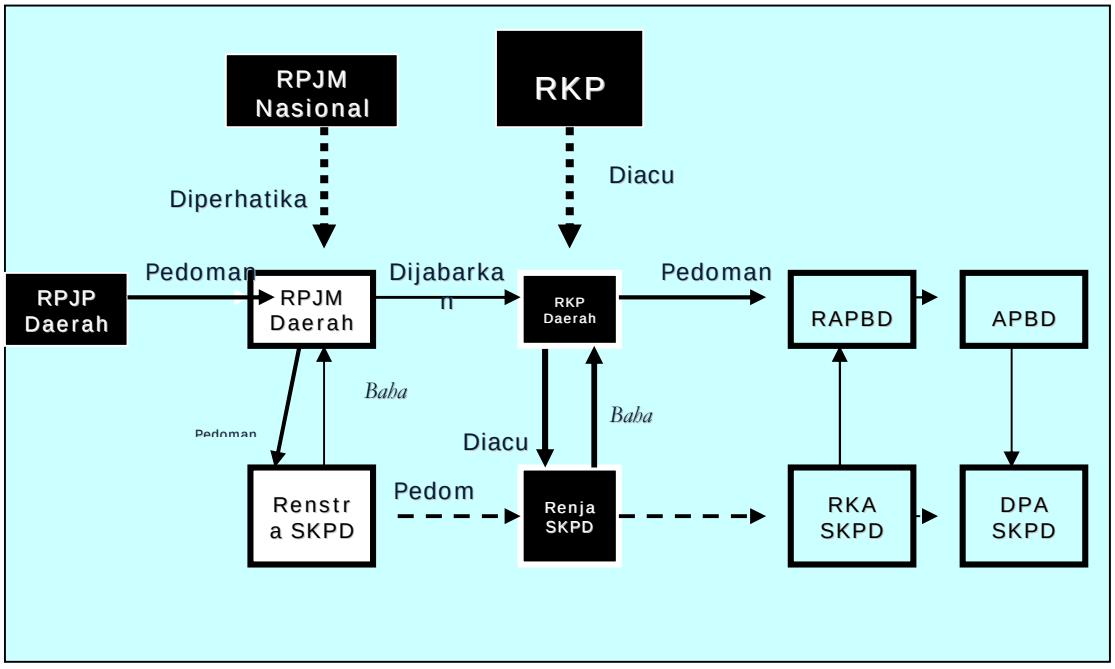
Penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan sebagai unit kerja yang mempunyai kewenangan untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang percepatan pembangunan infrastruktur, diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan tugas yang demikian penting, maka diperlukan satuan kerja yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan OPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra OPD yang telah ditetapkan.

Keterkaitan antara dokumen Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1
Keterkaitan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Landasan Operasional, terdiri dari :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefiasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 24);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
n. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2022.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan pada bagian ini akan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur dan pedoman kerja sepanjang tahun 2024 bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai dengan posisi dan kewenangan yang diemban yaitu membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam bidang percepatan pembangunan infrastruktur.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen OPD, dan terwujudnya keselarasan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan dengan Perencanaan Tahunan, serta terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan, landasan hukum penyusunan rencana kerja, maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja dan sistematika penulisan dokumen rencana kerja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan tahun lalu beserta capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal OPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini berisi faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan tahun lalu adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya, yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA), serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan tahun 2021 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2022 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan tahun 2023, dan realisasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan atau realisasi APBD untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan disajikan dalam bab ini.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan s/d Tahun 2022 Kabupaten Tojo Una-Una

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcame)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d tahun 2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2020 (n-2)			Target program/kegiatan Renja tahun berjalan 2021 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d tahun 2021 (tahun berjalan n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Adminstrasi Perkantoran								
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi, konsultasi luar daerah	279 kali	376 kali	33 kali	33 kali	100 %	76 kali	4851	173
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi, konsultasi dalam daerah	1.043 kali	717 kali	68 kali	68 kali	100 %	76 kali	861	82
	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	5 tahun	5 tahun	1 tahun	1 tahun	100 %	0 tahun	6	120
	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terpenuhinya jasa pelayanan perkantoran	480 orang	360 orang	90 orang	90 orang	100 %	97 orang	547	113

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur															
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/oprasional yang diadakan	5	unit mobil op lapangan	1	unit mobil op lapangan	-	unit mobil op lapangan	-	unit mobil op lapangan	-	%	-	unit mobil op lapangan	1	20
			10	unit motor op lapangan	3	unit motor op lapangan	-	unit motor op lapangan	-	unit motor op lapangan	-	%	-	unit motor op lapangan	3	30
			12	Unit kendaraan roda 3	-	Unit kendaraan roda 3	-	Unit kendaraan roda 3	-	Unit kendaraan roda 3	-		-	Unit kendaraan roda 3	-	-
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	25	unit laptop/ notebook,/PC	33	unit laptop/ notebook,/PC	1	unit laptop/ notebook,/PC	1	unit laptop/ notebook,/PC	100	%	7	unit laptop/ notebook,/PC	41	164
			18	unit printer	26	unit printer	1	unit printer	1	unit printer	100	%	1	unit printer	28	155
			4	unit kamera dan faximili	2	unit kamera dan faximili	-	unit kamera dan faximili	-	unit kamera dan faximili	-	%	-	unit kamera dan faximili	2	50
			4	unit harddisk eksternal	8	unit harddisk eksternal	-	unit harddisk eksternal	-	unit harddisk eksternal	-	%	-	unit harddisk eksternal	8	200
			4	unit GPS	-	unit GPS	-	GPS	-	GPS	-	%	-	GPS	-	-

			4	Meter digital	-	Meter digital	-	Meter digital	-	Meter digital	-	%	-	Meter digital	-	
			4	Mesin ketik listrik	1	Mesin ketik listrik	-	Mesin ketik listrik	-	Mesin ketik listrik	-	%	-	Mesin ketik listrik	1	25
			2	Scanner A3/A4	1	Scanner A3/A4	-	Scanner A3/A4	-	Scanner A3/A4	-	%	-	Scanner A3/A4	1	50
			2	Aplikasi	-	Aplikasi	-	Aplikasi	-	Aplikasi	-	%	-	Aplikasi	-	-
			2	Altimeter	-	Altimeter	-	Altimeter	-	Altimeter	-	%	-	Altimeter	-	-
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan														
			30	unit meja kerja	10	unit meja kerja	-	unit meja kerja	-	unit meja kerja	-	%	-	unit meja kerja	10	33
			100	unit kursi kerja	58	unit kursi kerja	-	unit kursi kerja	-	unit kursi kerja	-	%	-	unit kursi kerja	58	58
			10	unit lemari arsip	6	unit lemari arsip	-	unit lemari arsip	-	unit lemari arsip	-	%	-	unit lemari arsip	6	60
			8	unit papan data	3	unit papan data	-	unit papan data	-	unit papan data	-	%	-	unit papan data	3	37
			12	AC	9	AC	-	AC	-	AC	-	%	-	AC	9	75
			5	Kipas Angin	-	Kipas Angin	-	Kipas Angin	-	Kipas Angin	-	%	-	Kipas Angin	-	-

			1	Sound system	1	Sound system	-	Sound system	-	Sound system	-	%	-	Sound system	1	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas /operasional yang dipelihara														
			10	unit mobil dinas	21	unit mobil dinas	5	unit mobil dinas	5	unit mobil dinas	100	%	5	unit mobil dinas	31	310
			74	unit motor dinas	142	unit motor dinas	34	unit motor dinas	34	unit motor dinas	100	%	34	unit motor dinas	210	283
			10	unit mobil sampah	10	unit mobil sampah	-	unit mobil sampah	-	unit mobil sampah	-	%	-	unit mobil sampah	10	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara														
			36	unit PC/Notebook	48	unit PC/Notebook	30	unit PC/Notebook	30	unit PC/Notebook	100	%	30	unit PC/Notebook	108	300
			30	unit AC	78	unit AC	4	unit AC	4	unit AC	100	%	5	unit AC	87	290
	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara														
			500	m2	1.650	m2	630	m2	630	m2	100	%	593	m2	2.873	574

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kopetensi sesuai bidangnya														
	Pendidikan dan pelatihan Fornal		30	orang	9	orang	-	orang	-	orang	-	%	-	orang	9	30
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah	Cakupan penyediaan air Minum/ Air bersih bagi masyarakat														
	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Panjang Jaringan Air Bersih yang disediakan bagi masyarakat	204,798	m	182.778	m	79.811	m	65.063	m	81,52	%	-	m	247.841	121
	Program Penyediaan air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat	Cakupan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat														
	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Jumlah Desa yang ditingkatkan Infrastrukturnya	36	Desa	24	Desa	-	Desa	-	Desa	-	%	-	Desa	24	66
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-Gorong dalam kondisi baik														
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang dibangun	22.950	m	28.003	m	2.000	m	1.294,3	m	64,71	%	2.400	m	31.697,3	138
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Prosesntase Infrstruktur Perdesaan yang dibangun														

	Penataan Lingkungan permukman penduduk perdesaan	Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun														
	Pengawasan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengembangan Permukiman	Jumlah Desa penerima program	60		31	Desa	-	Desa	-	Desa	-	%	-	Desa	31	51
	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah sarana Sanitasi untuk masyarakat	30		56	Paket	-	Paket	-	Paket	-	%	-	Paket	56	186
	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Layanan Sanitasi berbasis masyarakat	5		1	kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	%	-	kegiatan	1	20
	Program Peningkatan Kualitas Permukiman	Cakupan Peningkatan Kualitas Permukiman dengan sarana dan prasarana dasar														
	Pembangunan Jalan Setapak Beton	Tersedianya jalan setapak di kawasan permukiman	17.500	m	12.682	m	-	m	-	m	-	%	1.386	m	14.068	80
	Program Lingkungan sehat perumahan	Jumlah sarana dan prasarana air bersih														
	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar Terutama bagi masyarakat miskin	Jumlah sarana dan prasarana air bersih	30	unit	30	Unit	-	unit	-	unit	-	%	-	unit	30	100
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Cakupan Panjang Jalan dan Jembatan dalan Kondisi baik														

	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang direbilitasi	6	km	46	km	18,35	km	9,02	km	49	%	3	km	58,02	967
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan yang direhabilitasi	17	Unit	14	Unit	3	Unit	2	Unit	66	%	2	Unit	18	105
	Program Peningkatan Sarana & Sarana Kebinamargaan	Cakupan sarana dan Prasarana Kebinamargaan														
	Pengadaan Alat –alat berat	Jumlah Alat-alat berat yang diadakan	10	Unit	7	unit	1	unit	1	unit	100	%	1	unit	9	90
	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat ukur dan alat laboratorium yang diadakan	6	Paket	6	paket	-	paket	-	paket	-	%	-	paket	6	100
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	6	Paket	3	paket	-	paket	-	paket	-	%	-	paket	3	50
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	18	Unit	18	Unit	4	Unit	4	Unit	100	%	6	unit	28	155
	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Jumlah alat-alat peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	21	Unit	5	unit	-	unit	-	unit	-	%	-	unit	5	23
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	jumlah pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	15	Unit	2	unit	-	unit	-	unit	-	%	-	unit	2	13

	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan yang Terbangun												
	Pembangunan Jalan	Meningkatnya panjang jalan yang dibangun	456	km	329	km	36,7	km	151,82	km	413	%	65	km	545,82	119
	Pembangunan Jembatan	Meningkatnya panjang jembatan yang dibangun	71	Unit	48	Unit	4	Unit	6	Unit	150	%	1	Unit	55	77
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairannya Lainnya	*Cakupan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik*														
	Pelaksanaan Normalisasi Sungai	Panjang Saluran Sungai yang berfungsi baik	6	wil. Sungai	74	wil. Sungai	10	wil. Sungai	8	wil. Sungai	80	%	10	wil. Sungai	92	1.533
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi yang berfungsi baik	21	D. Irigasi	41	D. Irigasi	3	D. Irigasi	3	D. Irigasi	100	%	-	D. Irigasi	44	209
	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi yang berfungsi baik	49	D. Irigasi	45	D. Irigasi	8	D. Irigasi	8	D. Irigasi	100	%	9	D. Irigasi	62	126
	WISMP	Meningkatnya fasilitasi untuk petani pemakai air	10	Kegiatan	3	kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	%	-	kegiatan	3	30
	Pembangunan Pintu Air	Meningkatnya fasilitasi untuk petani pemakai air	45	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	%	-	DI	-	-
	Program Perencanaan Tata Ruang	*Cakupan Perencanaan Tata Ruang*														

	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	12	dokumen	11	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	%	-	dokumen	11	92
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan Pengendalian Pemanfaatan Ruang														
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Pokja Pengawasan Pemnfaatan Ruang	5	Pokja	5	pokja	3	pokja	1	pokja	33	%	-	pokja	6	120
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Cakupan Kawasan Ruang terbuka Hijau														
	Penataan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Perencanaan dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau	5	Kegiatan	3	kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	%	-	kegiatan	3	60
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan Kinerja Pengelolaan Persampahan														
	Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang disediakan	6		1	unit	-	unit	-	unit	-	%	-	unit	1	16
	Operasional dan Perencanaan Sistem Persampahan	Jumlah Aparat Pengaolah Persampahan	990		276	orang	-	orang	-	orang	-	%	-	orang	276	27
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Tersedianya kegiatan pembinaan jasa konstruksi														

	Pembinaan Jasa Konstruksi	Meninkatnya pengetahuan masyarakat tentang jsa konstruksi	5	kegiatan	2	kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	%	-	kegiatan	2	40
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	cakupan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ														
	Rehabilitas/pemeliharaan pelabuhan ferry	jumlah pelabuhan/dermaga yang dipelihara	5	buah	3	buah	-	buah	-	buah	-	%	-	buah	3	60
	Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalulintas	jumlah rambu lalulintas yang dipelihara	119	buah	75	buah	-	buah	-	buah	-	%	-	buah	75	63
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan Peningkatan Pelayanan Angkutan														
	pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya	Jumlah Personil pengendalian Disiplin dan tertib angkutan umum di jalan raya	54	org	21	org	-	org	-	org	-	%	-	org	21	39
	Pengumpulan dan Analisis data base pelayanan angkutan	jumlah kegiatan	1	kali	1	kali	-	kali	-	kali	-	%	-	kali	1	100
	Sosialisasi / Penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan	jumlah peserta bimtek	230	org	200	org	-	org	-	org	-	%	-	org	200	87
	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Tersedianya 6 orang sopir/juru mudi teladan		100%		100%	-	-	-	-		%	-	-	-	

	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	cakupan peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan												
	Pengadaan Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah lahan	54	ha	-	ha	-	ha	-	ha	-	%	-	ha	-	-
	Pembangunan terminal Type B	jumlah terminal	1	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	%	-	unit	-	-
	Pembangunan Halte Bus, Taxi gedung terminal	jumlah halte bus	32	unit	12	unit	-	unit	-	unit	-	%	-	unit	12	38
	Pengadaan Alat-Alat angkutan	jumlah Mobil Angkutan	10	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	%	-	unit	-	-
	Pengadaan speed boat operasional keselamatan pelayaran	jumlah Speed boat	1	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	%	-	unit	-	-
	Pembangunan Jembatan Penyeberangan	jumlah jembatan	3	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	%	-	unit	-	-
	Pembangunan Jembatan/Dermaga/Tambatan Perahu	jumlah tambatan	16	unit	10	unit	-	unit	-	unit	-	%	-	unit	10	63
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pelabuhan Rakyat	Jumlah Pelabuhan rakyat	2	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	%	-	unit	-	-
	Pengadaan lampu suar	jumlah lampu suar	1	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	%	-	unit	-	-
	Pembangunan tanggul penahan gelombang	jumlah tanggul	1	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	%	-	unit	-	-
	Pembangunan pengerukan pelabuhan	jumlah pelabuhan	1	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	%	-	unit	-	-

	Monitoring dan evaluasi Proyek	jumlah pelakasanaan monev	138	kali	45	kali	-	kali	-	kali	-	%	- kali	45	33
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	cakupan Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas													
	Pengadaan rambu-rambu lalulintas	jumlah rambu-rambu lalulintas	152	buah	98	R.Darat	-	R.Darat	-	R.Darat	-	%	- R.Darat	98	64
			65	buah	30	R.Laut	-	R.Laut	-	R.Laut	-	%	- R.Laut	30	46
	Pengadaan marka jalan	jumlah marka jalan	7	paket	2	paket	-	paket	-	paket	-	%	- paket	2	29
	Pengadaan warning Light	jumlah warning light	5	unit	1	unit	-	unit	-	unit	-	%	- unit	1	20
	Pengadaan warniing tex	jumlah warning tex	2	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	%	- unit	-	-
	Pengadaan Traffic Light	jumlah Traffic Light	8	unit	3	unit	-	unit	-	unit	-	%	- unit	3	38
	Pengendalian dan pengamanan operasi ketupat lilin dan tahun baru	jumlah waktu Pengendalian dan pengamanan	20	kali	8	kali	-	kali	-	kali	-	%	- kali	8	40
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor												-		
	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor		100%		100%	-		-		-	%	- -	-	-
	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Tersedianya Alat Studio dan Komunikasi		100%		100%	-		-		-	%	- -	-	-

	Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	cakupan Fasilitas Peningkatan Kelaikan Pengoperasian kend.wajib uji							-		
	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji Kendaraan	3	paket	-	paket	-	paket	-	paket	-	%	-	paket	-	-
	Pengadaan mobil Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah mobil	1	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	%	-	unit	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM Bidang Pekerjaan Umum maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas pokok fungsi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Adapun indikator yang akan diuji dalam kajian ini adalah meliputi indikator kinerja yang mengacu pada pencapaian sasaran, yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta norma standar pelayanan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una, dan mengacu pada RKPD dan RPJMD.

Keberhasilan Kinerja OPD dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Format tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan disajikan sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
Kabupaten Tojo Una-Una

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra DINAS PUPR				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Nilai Sakip OPD			CC	B	B	BB	CC	B	B	BB	
2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)			53,37-54,00	54,00-55,00	55,00-56,00	56,00-57,00	55,57	60,33	55,00-56,00	56,00-57,00	
3	Rasio Panjang Jalan (m) dengan Jumlah penduduk			700-900	700-900	700-900	700-900	700	700	700-900	700-900	
4	Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak (%)			60-70	60-70	60-70	60-70	64,26	70	60-70	60-70	

5	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)			45-50	45-50	45-50	45-50	59,29	59,29	45-50	45-50	
6	Presentase Penduduk Berakses Air Minum (%)			91,84 - 92,54	92,54 - 93,24	93,24 - 93,94	93,94 - 94,64	79,21	97,54	93,24 - 93,94	93,94-94,64	
7	Presentase Rumah Layak Huni (%)			69,13	70	70,87	71,74	69,13	70	70,87	71,74	
8	Konsumsi listrik (Rasio Elektrifikasi)			55	60	61	62	55	60	61	62	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Kondisi infrastruktur Pekerjaan Umum saat ini menunjukkan tingkat yang beragam. Infrastruktur jalan dan jembatan, pengelolaan air minum dan sanitasi, peningkatan kualitas permukiman, serta pengelolaan jaringan irigasi sangat menunjang kinerja bidang ke PU an.

Total panjang Jalan di Kabupaten Tojo Una-Una adalah 1.168,139 Km, Panjang jalan dalam kondisi baik adalah 248,018 Km, panjang jalan dalam kondisi sedang adalah 456,717 Km, panjang jalan dalam kondisi rusak ringan 237,832 Km dan panjang jalan dalam kondisi rusak berat adalah 225,572 Km.

Kondisi Fisik Jalan di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	URAIAN	PANJANG (KM)	
		TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Jalan Baik	231,520	248,018
2	Jalan Sedang	454,702	456,717
3	Jalan Rusak Ringan	243,380	237,832
4	Jalan Rusak Berat	238,537	225,572
	Total	**1.168,139**	**1.168,139**

Sumber Data: Bidang Bina Marga

Total panjang Jembatan di Kabupaten Tojo Una-Una adalah 2.139,68 M, Panjang jembatan dalam kondisi baik adalah 840,23 M, Panjang jembatan dalam kondisi sedang 756,35 M, panjang jembatan dalam kondisi rusak adalah 329,40 M dan Panjang jembatan dalam kondisi rusak berat 213,70 M.

Kondisi Fisik Jembatan di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	URAIAN	PANJANG (M)	
		TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Jembatan Baik	1.162,74	840,23
3	Jembatan Sedang	558,95	756,35
4	Jembatan Rusak	308,25	329,40
5	Jembatan Rusak Berat	375,10	213,70
	Total	**2.405,04**	**2.139,68**

Sumber Data: Bidang Bina Marga

Luas Irigasi potensial Kabupaten Tojo Una-Una adalah 2377 Ha sedangkan luas irigasi fungsional adalah 847 Ha yang sudah dimanfaatkan dan akan mengalami peningkatan seiring dengan pelaksanaan program di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una.

Data Irigasi Kabupaten Tojo Una-Una

NO	DAERAH IRIGASI	PANJANG SALURAN (M)	KONDISI SALURAN (%)		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Sabo Uetoli	5.678,50	74,34	-	25,66
2	Borone	12.888,23	45,35	20,65	34
3	Tayawa	4.614,50	77,5	-	22,5
4	Lemoro	6.627,60	85	-	15
5	Mawomba	3.691,00	71,5	15,33	13,17
6	Betaua	2.350,10	-	-	-
7	Uekuli	6.364,40	74,98	10,11	14,91
8	Kabalo	3.600,90	80	5	15

9	Mpoa	8.040,7	31,97	-	68,03
10	Balingara	4.375	46,55	-	53,45
	Total	**58.230,93**			

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan adalah OPD yang memiliki *leading sector* dalam bidang penyelenggaraan kegiatan Bidang Infrastruktur di Kabupaten Tojo Una-Una, tidak terlepas dari berbagai permasalahan strategis terkait dengan karakteristik wilayah Kabupaten Tojo Una-Una antara lain:

1. Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Tojo Una-Una sebagian besar merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan, sehingga ketinggian wilayah pada umumnya berada di atas 500 meter dari permukaan laut. Keadaan kemiringan tanah (topografi) Kabupaten Tojo Una-Una rata-rata sekitar 40%. Kondisi wilayah sebagaimana di gambarkan di atas akan memberikan implikasi yang kurang menguntungkan dalam pengembangan wilayah Kabupaten Tojo Una-Una kedepan. Salah satu faktor yang sangat menentukan perkembangan suatu wilayah adalah letak dan kondisi geografis suatu wilayah serta ketersediaan prasarana dan sarana atau infrastruktur pendukung yang ada. Fakta yang ada menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Tojo Una-Una dari sisi topografi wilayah, kurang menguntungkan karena terdiri atas perbukitan. Selain itu, lokasinya terpencil/terisolir dengan tingkat aksesibilitas rendah, sehingga tingkat mobilitas kehidupan menjadi rendah. Kondisi ini makin dipersulit oleh luasnya jangkauan wilayah yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una.

2. Kondisi Sosiologis

Masyarakat Tojo Una-una secara sociocultiral merupakan masyarakat yang heterogen yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan budaya. Hal ini di satu sisi menjadi suatu potensi kekayaan Budaya Daerah, namun dikarenakan

tingkat aksesibilitas rendah, sehingga tingkat mobilitas kehidupan menjadi rendah, sehingga kurang interaksinya masyarakat antar kawasan permukiman satu dengan kawasan permukiman lainnya.

3. Kurangnya SDM

Secara Internal kendala yang dihadapi adalah kurangnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur pengelola kegiatan, sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi dismanagement dan capaian kinerja tidak maksimal

4. Minimnya Sumber Pembiayaan

Terbatasnya ketersediaan anggaran dalam pengelolaan program, sehingga beberapa program belum dapat dilaksanakan.

5. Belum Optimalnya Produk Perencanaan

Belum Memadainya Dokumen Perencanaan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan fisik menyebabkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan kurang maksimal.

6. Belum Optimalnya Fungsi Koordinasi Antar Unit Kerja

Belum optimalnya fungsi koordinasi lintas program antar unit kerja dan kurangnya kerjasama yang harmonis antar personil menyebabkan tidak terkoornirnya proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

7. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Secara Eksternal salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan partipasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar serta pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah.

A. Telahan Visi, Misi dan Program Bupati-Wakil Bupati

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsinya harus sanantiasa merujuk pada pencapaian Visi, Misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan dimana visi misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan ini mendukung pencapaian Visi Misi maupun Program Kerja Bupati-Wakil Bupati Periode 2021 - 2026 sebagaimana telah terdokumentasi dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021 - 2026 yaitu:

Visi Bupati-Wakil Bupati Tojo Una-Una :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN TOJO UNA-UNA TANGGUH, MAJU DAN SEJAHTERA (TAMARA)"

Pernyataan Visi tersebut dijabarkan lebih detai ke dalam 5 (lima) Misi yang hendak diwujudkan yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang terentaskan dari kemiskinan, tangguh bencana dan lingkungan berkelanjutan
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang maju dan keluar dari daerah tertinggal
3. Memantapkan trisula pembangunan ekonomi bertumpu pada sector pertanian, perikanan-kelautan dan pariwisata yang berkelanjutan
4. Meningkatkan sumber daya manusia berdaya saing bertumpu pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan
5. Mewujudkan aparatur dan system pemerintah daerah yang professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan public berbasis *Smart Governance*

Berdasarkan identifikasi secara tekstual, Secara eksplisit Pembangunan Infrastruktur yang menjadi leading sector Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan menjadi salah satu prioritas pembangunan dari pada perwujudan Visi, Misi dan Program Bupati – Wakil Bupati Tojo Una-Una tahun 2021-2026 yang menitik beratkan pembangunan disektor:

1. Pendidikan
2. Pertanian
3. Pariwisata
4. Kemaritiman
5. Pembangunan Infrastruktur
6. Usaha Kecil dan Menengah

Sebagai Unsur pelaksana pemerintah daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan memiliki peran yang strategis dalam mendukung perwujudan Visi-Misi Bupati yang telah ditetapkan.

Hakekat yang ingin dicapai dalam perencanaan strategis adalah mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah. Dalam hal ini Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan adalah bagaimana membangun prasarana dan sarana secara merata sesuai dengan kondisi karakteristik wilayah, serta tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga segala aktifitas dan interaksi masyarakat Kabupaten Tojo Una-una bisa terus berjalan normal tanpa hambatan.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Salah satu faktor yang sangat menentukan perkembangan suatu wilayah adalah letak dan kondisi geografis suatu wilayah serta ketersediaan prasarana dan sarana atau infrastruktur pendukung yang ada. Fakta yang ada menunjukkan bahwa dengan kondisi wilayah yang kurang menunguntungkan karena terdiri atas perbukitan dan pulau-pulau kecil yang saling berjauhan sehingga menyebabkan sulitnya pencapaian. Selain itu, lokasinya terpencil/terisolir dengan tingkat aksesibilitas rendah, sehingga tingkat mobilitas kehidupan menjadi rendah. Kondisi ini makin dipersulit oleh luasnya jangkauan wilayah yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini menjadi penyebab utama kurang berinteraksinya masyarakat antar kawasan permukiman satu dengan kawasan permukiman lainnya.

Selain itu ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab kesenjangan yang terjadi diantara masyarakat, antara lain adalah ketersediaan infrastruktur dasar yang kurang memadai pada beberapa kawasan permukiman, sehingga menjadi penghambat lajunya pembangunan masyarakat, menuju Masyarakat yang Madaniah

1. **Isu Strategis Kabupaten Tojo Una-Una yang terkait Fungsi OPD**
   a) Kualitas Pelayanan Publik
      Pelayanan administrasi publik yang belum optimal dalam dalam bidang pelayanan melalui tata laksanana administrasi yang baik.
   b) Kurangnya infrastruktur
      Belum tersedianya infrastruktur yang memadai bagi kepentingan masyarakat, terutama pada kawasan yang sulit dijangkau.
   c) Kualitas sumber Daya Manusia
      Masih rendahnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan mempengaruhi produk yang dihasilkan.
   d) Kesenjangan Pembangunan Wilayah
      Kondisi geografis Kabupaten Tojo Una-Una yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, menyebabkan proses

pembangunan tidak merata, Kondisi Wilayah yang kurang menguntungkan, menyebabkan aksesibilitas antar kawasan menjadi rendah. Jarak antar kawasan yang jauh dan sulit dijangkau, ditambah medan yang sulit ditempuh

2. Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan

a) Pembangunan infrastruktur dasar dapat mengatasi kesenjangan antara kawasan, antara wilayah daratan dan kepulauan, antara dataran dan pegunungan.
b) Peningkatan kondisi jalan kabupaten, dimana dari 1.168,139 km jalan kabupaten, 237,832 Km dalam kondisi rusak ringan, dan 225,572 km dalam kondisi rusak berat sehingga sulit dilalui.
c) Peningkatan kondisi jembatan kabupaten, dimana dari 2.139,68 M jembatan kabupaten, 329,40 M dalam kondisi rusak dan 213,70 M dalam kondisi rusak berat.
d) Presentase rumah tinggal bersanitasi masih rendah, yaitu 70%.
e) Panjang saluran irigasi dibanding luas lahan budidaya pertanian masih rendah.
f) Jumlah Rumah Tangga pengguna air bersih diwilayah yang tidak memiliki mata air masih sangat rendah.
g) Persentase rumah layak huni masih rendah yaitu 70%.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
Kabupaten Tojo Una-Una

No.	Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	***DPUPR***	***Nilai Sakip OPD***		***11.967.135.507***	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	***DPUPR***	***Nilai Sakip OPD***		***11.967.135.507***	
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPUPR	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		20.000.000	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPUPR	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		20.000.000	
	Sub. Kegiatan					Sub. Kegiatan					

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPUPR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPUPR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	20.000.000	
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPUPR	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.601.246.233	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPUPR	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.601.246.233	
	Sub. Kegiatan					Sub. Kegiatan						Sub. Kegiatan	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPUPR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75	Orang/Bulan	5.601.246.233	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPUPR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75	Orang/ Bulan	5.601.246.233	
	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPUPR	Terlaksananya administrasi barang milik daerah			20.000.000	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPUPR	Terlaksananya administrasi barang milik daerah			20.000.000	
	Sub. Kegiatan						Sub. Kegiatan						

	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	DPUPR	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	20.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	DPUPR	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000	
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPUPR	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah			50.000.000	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPUPR	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		50.000.000	
	Sub. Kegiatan						Sub. Kegiatan					
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DPUPR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DPUPR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPUPR	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	40.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPUPR	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	40.000.000	
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPUPR	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			421.770.000	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPUPR	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		421.770.000	
	Sub. Kegiatan						Sub. Kegiatan					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	DPUPR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17	Paket	1.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	DPUPR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	1.500.000	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPUPR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPUPR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPUPR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	Paket	60.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPUPR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	Paket	60.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPUPR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPUPR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPUPR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Laporan	300.270.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPUPR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Laporan	300.270.000	

	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPUPR	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah		138.900.000	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPUPR	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah		138.900.000	
	Sub. Kegiatan					Sub. Kegiatan					
	Pengadaan Alat Besar	DPUPR	Jumlah Unit Alat Besar Yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	Pengadaan Alat Besar	DPUPR	Jumlah Unit Alat Besar Yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	
	Pengadaan Mebel	DPUPR	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	5 Unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	DPUPR	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	5 Unit	10.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPUPR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPUPR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	DPUPR	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	98.900.000	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	DPUPR	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	98.900.000	

	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPUPR	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		5.045.219.274	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPUPR	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		5.045.219.274	
	Sub. Kegiatan					Sub. Kegiatan					
	Penyediaan Surat Menyurat	DPUPR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	6.600.000	Penyediaan Surat Menyurat	DPUPR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	6.600.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPUPR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.018.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPUPR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.018.000.000	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPUPR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1	Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPUPR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1	Laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPUPR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	4.018.619.274	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPUPR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	4.018.619.274	
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPUPR	Terpeliharanya barang milik daerah			670.000.000	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPUPR	Terpeliharanya barang milik daerah			670.000.000	
	Sub. Kegiatan						Sub. Kegiatan						

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPUPR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40	Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPUPR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DPUPR	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6	Unit	500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DPUPR	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6 Unit	500.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPUPR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPUPR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	20.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPUPR	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	50.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPUPR	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	

2	*Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)*	*Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una*	*Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota*		*3.100.513.000*	*Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)*	*Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una*	*Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota*		*3.100.513.000*	
		Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	*Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota*				*Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una*	*Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota*			

	Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Terselenggaranya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		40.000.000	Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Terselenggaranya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		40.000.000	
	Sub. Kegiatan					Sub. Kegiatan					
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Yang Disusun	2 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Yang Disusun	2 Dokumen	10.000.000	

	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Yang Dibangun	1	Unit	0,00	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Yang Dibangun	1	Unit	0,00	
	Pembangunan Tanggul Sungai	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,013	KM	10.000.000	Pembangunan Tanggul Sungai	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,013	KM	10.000.000	
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,013	KM	10.000.000	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,013	KM	10.000.000	
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	15	KM	10.000.000	Normalisasi/Restorasi Sungai	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	15	KM	10.000.000	

	Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		3.060.513.000	Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		3.060.513.000	
	Sub. Kegiatan					Sub. Kegiatan					
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Yang Tersusun	2 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Yang Tersusun	2 Dokumen	10.000.000	

	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,23	KM	2.350.513.000	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,23 KM	2.350.513.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	58.23	KM	700.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	58.23 KM	700.000.000	
3	***Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***	***Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air minum layak***			***20.000.000***	***Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***	***Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air minum layak***		***20.000.000***	

	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota		20.000.000	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		20.000.000	
	Sub. Kegiatan					Sub. Kegiatan					
	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Yang Disusun	2 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Yang Disusun	2 Dokumen	10.000.000	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	846 SR	10.000.000	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	846 SR	10.000.000	

4	***Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***	***Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik***		***50.000.000***	***Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***	***Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik***		***50.000.000***	
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten		50.000.000	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten		50.000.000	
	Sub. Kegiatan					Sub. Kegiatan					
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam daerah Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Yang Disusun	2 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam daerah Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD Dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Disusun	2 Dokumen	10.000.000	

	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	500	Rumah Tangga	10.000.000	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	500	Rumah Tangga	10.000.000	
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlha Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1	Unit	10.000.000	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlha Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1	Unit	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	180	Rumah Tangga	10.000.000	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	180	Rumah Tangga	10.000.000	
	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Kapasitas IPLT Terbangun	2	M3/Hari	10.000.000	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Kapasitas IPLT Terbangun	2	M3/Hari	10.000.000	

5	***Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***	***Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)***		***10.000.000***	***Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***	***Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)***		***10.000.000***	
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota		10.000.000	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		10.000.000	
	Sub. Kegiatan					Sub. Kegiatan					

	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1300	M	10.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1300 M	10.000.000	
6	***Program Penataan Bangunan dan Lingkunganya***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***	***Persentase bangunan gedung pemerintah/ fasilitas umum dalam kondisi baik***			***10.000.000***	***Program Penataan Bangunan dan Lingkunganya***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***	***Persentase bangunan gedung pemerintah/ fasilitas umum dalam kondisi baik***		***10.000.000***	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya di Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Tersedianya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya di Daerah Kabupaten/ Kota			10.000.000	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Tersedianya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya di Daerah Kabupaten/Kota		10.000.000	
	Sub. Kegiatan						Sub. Kegiatan					

	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	10.000.000	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	10.000.000	
7	***Program Penataan Bangunan Gedung***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***	***Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/ Kota***		***50.000.000***	***Program Penataan Bangunan Gedung***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***	***Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota***		***50.000.000***	

	Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Tersedianya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		50.000.000	Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Tersedianya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		50.000.000	
	Sub. Kegiatan					Sub. Kegiatan					

	Penyelenggaran Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaran Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Penyelenggaran Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	50.000.000	
8	***Program Penyelenggaraan Jalan***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***	***Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota***		***79.705.493.000***	***Program Penyelenggaraan Jalan***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***	***Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota***		***79.705.493.000***	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Tersedianya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota		79.705.493.000	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Tersedianya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		79.705.493.000	
	Sub. Kegiatan					Sub. Kegiatan					

	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5	Dokumen	10.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5	Dokumen	10.000.000	
	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	2000	M2	50.000.000	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	2000	M2	50.000.000	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2	Dokumen	50.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2	Dokumen	50.000.000	
	Pembangunan Jalan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jalan yang Dibangun	35	KM	34.000.000.000	Pembangunan Jalan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jalan yang Dibangun	35	KM	34.000.000.000	

	Rekonstruksi Jalan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi	7	KM	45.375.493.000	Rekonstruksi Jalan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi	7	KM	45.375.493.000	
	Rehabilitasi Jalan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,375	KM	20.000.000	Rehabilitasi Jalan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,375	KM	20.000.000	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	2,134	KM	50.000.000	Pemeliharaan Berkala Jalan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	2,134	KM	50.000.000	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0.389	KM	50.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0.389	KM	50.000.000	
	Pembangunan Jembatan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jembatan yang Dibangun	25	M	50.000.000	Pembangunan Jembatan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jembatan yang Dibangun	25	M	50.000.000	
	Rehabilitasi Jembatan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	65	M	50.000.000	Rehabilitasi Jembatan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	65	M	50.000.000	

9	***Program Pengembangan Jasa Konstruksi***	***DPUPR***	***Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi***		**90.000.000**	***Program Pengembangan Jasa Konstruksi***	***DPUPR***	***Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi***		**90.000.000**	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	DPUPR	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		40.000.000	Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	DPUPR	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		40.000.000	
	Sub. Kegiatan					Sub. Kegiatan					
	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	DPUPR	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen	10.000.000	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	DPUPR	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen	10.000.000	

	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	DPUPR	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi Atau Analis Yang Mengikuti Pelatihan	30	Orang	10.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	DPUPR	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi Atau Analis Yang Mengikuti Pelatihan	30 Orang	10.000.000	
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	DPUPR	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi Atau Analis Yang Tersertifikasi	30	Orang	10.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	DPUPR	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi Atau Analis Yang Tersertifikasi	30 Orang	10.000.000	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	DPUPR	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	30	Orang	10.000.000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	DPUPR	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	30 Orang	10.000.000	

	Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		30.000.000	Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		30.000.000	
	Sub. Kegiatan					Sub. Kegiatan					
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	DPUPR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	10.000.000	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	DPUPR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	10.000.000	
	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	DPUPR	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	2 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	DPUPR	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	2 Dokumen	10.000.000	

	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	DPUPR	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan /Penggunaan Material Peralatan	1	Dokumen	10.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	DPUPR	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material Peralatan	1	Dokumen	10.000.000	
	Kegiatan : Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			20.000.000	Kegiatan : Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			20.000.000	
	Sub. Kegiatan						Sub. Kegiatan						

	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	DPUPR	Jumlah Perserta Yang Mengiuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30	Orang	10.000.000	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	DPUPR	Jumlah Perserta Yang Mengiuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30	Orang	10.000.000	
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	Laporan	10.000.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	Laporan	10.000.000	
10	***Program Penyelenggaraan Penataan Ruang***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***	***Persentase Ketaatan Terhadap RTRW***			***30.000.000***	***Program Penyelenggaraan Penataan Ruang***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***	***Persentase Ketaatan Terhadap RTRW***			***30.000.000***	

	Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota		20.000.000	Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		20.000.000	
	Sub. Kegiatan					Sub. Kegiatan					
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	

	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	10.000.000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	10.000.000	
	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota		10.000.000	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		10.000.000	
	Sub. Kegiatan					Sub. Kegiatan					
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	10.000.000	

			Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Persentase warga					Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Persentase warga negara korban bencana			
11	***Program Pengembangan Perumahan***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***			***80.000.000***	***Program Pengembangan Perumahan***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***			***80.000.000***	

	Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Hasil pendataan penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana atau Relokasi program Kabupatin/Kota		20.000.000	Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Hasil pendataan penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana atau Relokasi program Kabupatin/Kota		20.000.000	
	Sub. Kegiatan					Sub. Kegiatan					
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota Atau Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota Yang Terverifikasi	15 Dokumen	10.000.000	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Atau Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Yang Terverifikasi	15 Dokumen	10.000.000	

	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	5	Dokumen	10.000.000	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	5	Dokumen	10.000.000	
	Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota			60.000.000	Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			60.000.000	
	Sub. Kegiatan						Sub. Kegiatan						
	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota Yang Terehabilitasi	40	Unit Rumah	50.000.000	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Terehabilitasi	40	Unit Rumah	50.000.000	

	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota Yang Terbangun	10 Unit Rumah	10.000.000	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Terbangun	10 Unit Rumah	10.000.000	
12	***Program Kawasan Permukiman***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***	Presentase Pengurangan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha Presentase Pengurangan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha [deleted]		***20.000.000***	***Program Kawasan Permukiman***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***	Presentase Pengurangan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha Presentase Pengurangan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha [deleted]		***20.000.000***	
	Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una			10.000.000	Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una			10.000.000	
	Sub. Kegiatan					Sub. Kegiatan					

	Penyusunan dan/atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Yang Tersusun dan/atau Tereview Serta Terlegalisasi	4	Dokumen	10.000.000	Penyusunan dan/atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Yang Tersusun dan/atau Tereview Serta Terlegalisasi	4	Dokumen	10.000.000	
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang DiPerbaiki			10.000.000	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang DiPerbaiki			10.000.000	
	Sub. Kegiatan						Sub. Kegiatan						

	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	100	Unit Rumah	10.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	100	Unit Rumah	10.000.000	
13	***Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***	**Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) [deleted] Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**			***60.000.000***	***Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***	**Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) [deleted] Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**			***60.000.000***	

	Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		60.000.000	Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		60.000.000	
	Sub. Kegiatan					Sub. Kegiatan					
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Lokasi Perumahan Yang Disediakan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi	50.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Lokasi Perumahan Yang Disediakan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi	50.000.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	20 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	20 Laporan	10.000.000	
14	***Program Penatagunaan Tanah***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***	***Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum***		***10.000.000***	***Program Penatagunaan Tanah***	***Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una***	***Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum***		***10.000.000***	

	Kegiatan : Penatagunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya		10.000.000	Kegiatan : Penatagunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya		10.000.000	
	Sub. Kegiatan					Sub. Kegiatan					

	Koordinasi Penetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah Sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	15	Dokumen	10.000.000	Koordinasi Penetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah Sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	15	Dokumen	10.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
Kabupaten Tojo Una-Una

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**DPUPR**	**Nilai Sakip OPD**		
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*DPUPR*	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*		
	Sub. Kegiatan				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPUPR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*DPUPR*	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		
	Sub. Kegiatan				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPUPR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/Bulan	
	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*DPUPR*	*Terlaksananya administrasi barang milik daerah*		
	Sub. Kegiatan				

	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	DPUPR	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*DPUPR*	*Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah*			
	Sub. Kegiatan					
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DPUPR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPUPR	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	*DPUPR*	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*			
	Sub. Kegiatan					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	DPUPR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17	Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPUPR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPUPR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	Paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPUPR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPUPR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Laporan	
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*DPUPR*	*Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*			
	Sub. Kegiatan					
	Pengadaan Alat Besar	DPUPR	Jumlah Unit Alat Besar Yang Disediakan	1	Unit	
	Pengadaan Mebel	DPUPR	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	5	Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPUPR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	
	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	DPUPR	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*DPUPR*	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*			
	Sub. Kegiatan					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPUPR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPUPR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPUPR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1	Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPUPR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	

	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*DPUPR*	*Terpeliharanya barang milik daerah*			
	Sub. Kegiatan					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPUPR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40	Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	DPUPR	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6	Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPUPR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	Unit	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPUPR	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	
2	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una**	**Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota**			
		Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	**Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota**			

	Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una*	*Terselenggaranya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*			
	Sub. Kegiatan					
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Yang Disusun	2	Dokumen	
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Yang Dibangun	1	Unit	
	Pembangunan Tanggul Sungai	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,013	Km	
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,013	Km	
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	15	Km	
	Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una*	*Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*			
	Sub. Kegiatan					

	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Yang Tersusun	2	Dokumen	
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,23	Km	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	58,23	Km	
3	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air minum layak**			
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una*	*Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*			
	Sub. Kegiatan					
	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Yang Disusun	0	Dokumen	

	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	846	SR	
4	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una**	**Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik**			
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una*	*Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten*			
	Sub. Kegiatan					
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam daerah Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD Dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Disusun	2	Dokumen	
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	500	Rumah Tangga	
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1	Unit	
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	180	Rumah Tangga	

	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Kapasitas IPLT Terbangun	2 M3/Hari	
5	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una**	**Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)**		
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una*	*Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*		
	Sub. Kegiatan				
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1300 M	
6	**Program Penataan Bangunan dan Lingkunganya**	**Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una**	**Persentase bangunan gedung pemerintah/ fasilitas umum dalam kondisi baik**		
	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una*	*Tersedianya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota*		
	Sub. Kegiatan				

	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	
7	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una**	**Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota**		
	Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una*	*Tersedianya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*		
	Sub. Kegiatan				
	Penyelenggaran Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	
8	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una**	**Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota**		
	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una*	*Tersedianya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*		

	Sub. Kegiatan					
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5	Dokumen	
	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	2000	M2	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2	Dokumen	
	Pembangunan Jalan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jalan yang Dibangun	35	Km	
	Rekonstruksi Jalan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi	7	Km	
	Rehabilitasi Jalan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,375	Km	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	2,134	Km	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0,389	Km	

	Pembangunan Jembatan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jembatan yang Dibangun	25	M	
	Rehabilitasi Jembatan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	65	M	
9	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**DPUPR**	**Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**			
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*DPUPR*	*Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*			
	Sub. Kegiatan					
	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	DPUPR	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1	Dokumen	
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	DPUPR	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi Atau Analis Yang Mengikuti Pelatihan	30	Orang	
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	DPUPR	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi Atau Analis Yang Mengikuti Pelatihan	30	Orang	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	DPUPR	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	30	Orang	

	Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*DPUPR*	*Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*			
	Sub. Kegiatan					
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	DPUPR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1	Laporan	
	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	DPUPR	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	2	Dokumen	
	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	DPUPR	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material Peralatan	1	Dokumen	
	Kegiatan : Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una*	*Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*			
	Sub. Kegiatan					
	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	DPUPR	Jumlah Perserta Yang Mengiuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30	Orang	
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	Laporan	

10	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una**	**Persentase Ketaatan Terhadap RTRW**		
	Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una*	*Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*		
	Sub. Kegiatan				
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1	Dokumen
	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una*	*Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*		
	Sub. Kegiatan				
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Dokumen

11	**Program Penatagunaan Tanah**	**Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una**	**Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum**		
	Kegiatan : Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	*Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah Sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah Dan Pelayanan Pertanahan Lainnya*		
	Sub. Kegiatan				
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	
12	**Program Pengembangan Perumahan**	**Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una**	**Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni** **Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni** **Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni** **Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni**		

	Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una*	*Jumlah Hasil pendataan penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota*		
	Sub. Kegiatan				
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	
	Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una*	*Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*		
	Sub. Kegiatan				
	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	
	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	

13	**Program Kawasan Permukiman**	**Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una**	**Presentase Pengurangan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha Presentase Pengurangan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha**		
	Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	*Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una*			
	Sub. Kegiatan				
	Penyusunan dan/atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Yang Tersusum dan/atau Tereview Serta Terlegalisasi	4 Dokumen	
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una*	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki*		
	Sub. Kegiatan				
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	100 Unit Rumah	
14	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una**	**Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**		

	Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una*	*Jumlah Lokasi Perumahan Yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Yang Menunjang Fungsi Hunian*		
	Sub. Kegiatan				
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Lokasi Perumahan Yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan	Tersebar Wilayah Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu untuk tahun 2021–2026 yang dimulai tahun 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una yang mencakup tujuan, sasaran, program dan kegiatan di Tahun 2024, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan yang dikenal dengan empat (4) pilar RPJMN IV tahun 2020-2024 yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Selain pilar diatas, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Beberapa program kebijakan nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Tojo Una-Una, dan berada dalam lingkup kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan adalah pemenuhan kebutuhan air minum, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. Program Nasional ini merupakan program pengelolaan infrastruktur daerah yang langsung melibatkan peran masyarakat dalam proses pelaksanaannya dengan kegiatan pemberdayaan.

Tabel 3.1
PRIORITAS DAN SASARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NO.	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nila Sakip DPUPRPKPP
2	Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap
					Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk (M)
3	Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah	Persentase Kesesuaian RTRW Dengan Tata Ruang Wilayah	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian RTRW Dengan Tata Ruang Wilayah
4	Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Layanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	Meningkatnya Layanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni
5	Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sumber Daya Air	Luas Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Daerah Yang Dibangun	Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

6	Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Ketersedian Air Bersih	Persentase Ketersedian Air Minum Layak	Meningkatnya Ketersedian Air Bersih	Persentase Penduduk Berakses Air Minum
			Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	Meningkatnya Ketersedian Air Bersih	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak
7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Akses Listrik Terhadap Rumah Tangga	Konsumsi Listrik (Rasio Elektrifikasi)	Meningkatnya Akses Listrik Terhadap Rumah Tangga	Konsumsi Listrik (Rasio Elektrifikasi)

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan selama lima tahun.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una, maka perlu perumusan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah. Hal ini diselaraskan dengan foktor-faktor kunci keberhasilan yang diharapkan akan mendukung pencapaian visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una adalah hasil akhir yang ingin dicapai dengan tugas dan fungsi dinas secara kolektif. Tujuan organisasi menggambarkan arah strategi Dinas dan perbaikan-perbaikan yang ingin di ciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Tujuan organisasi mewakili tujuan umum seluruh Bidang di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una, yaitu menggambarkan isu-isu strategis yang merupakan keprihatinan yang ingin diatasi oleh seluruh unsur Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan melalui sinergi antar Bidang di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una.

Tabel 3.2

TUJUAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN TAHUN 2024
1	Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart Governance	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	B
2	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Maju dan Keluar dari Daerah Tertinggal	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	45-50

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2021-2026). Sasaran ini harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mancapai tujuan, sehingga dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sifatnya spesifik, terinci dan dapat diukur.

Sasaran organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah
b. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah
c. Meningkatnya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air
d. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
e. Meningkatnya ketersedian air bersih
f. Meningkatnya akses listrik terhadap rumah tangga

Sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3

SASARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2024
1	Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Daerah	BB
2	Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	56,00-57,00
		Rasio Panjang Jalan (m) dengan Jumlah penduduk	700-900
3	Meningkatnya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	45-50
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Presentase Rumah Layak Huni (%)	71,74
5	Meningkatnya ketersedian air bersih	Presentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	93,94-94,64
		Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak (%)	60,00-70,00
6	Meningkatnya Akses Listrik Terhadap Rumah Tangga	Konsumsi listrik (Rasio Elektrifikasi)	62

Tabel 3.4

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai SAKIP Daerah	BB
2	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	56,00-57,00
		Rasio Panjang Jalan Dengan Julmah Penduduk (M)	700-900
		Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak (%)	60,00-70,00
		Presentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	45-50
		Presentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	93,94-94,64
		Presentase Kesesuaian RTRW Dengan Tata Ruang Wilayah (%)	100
		Persentase Rumah Layak Huni (%)	71,74
		Konsumsi Listrik (Rasio Elektrifikasi)	62

BAB IV
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN

Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
2. Pengentasan kemiskinan
3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Pengembangan daerah terisolir maupun yang tidak terisolir.

Dalam usaha pencapaian faktor-faktor tersebut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan merumuskan 14 Program, 27 Kegiatan dan 71 Sub Kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
SASARAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
		Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Sub. Kegiatan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Sub. Kegiatan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Sub. Kegiatan
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
		Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Sub. Kegiatan
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Sub. Kegiatan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

		Sub. Kegiatan
		Pengadaan Alat Besar
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
		Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub. Kegiatan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub. Kegiatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Meningkatnya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**
		Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Sub. Kegiatan
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
		Pembangunan Tanggul Sungai
		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
		Normalisasi/Restorasi Sungai
		Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

		Sub. Kegiatan
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
3	Meningkatnya ketersedian air bersih	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		Sub. Kegiatan
		Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Sub. Kegiatan
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam daerah Kabupaten/Kota
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
		Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
4	Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Sub. Kegiatan
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
		Program Penataan Bangunan dan Lingkunganya
		Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
		Sub. Kegiatan
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
		Program Penataan Bangunan Gedung

		Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		Sub. Kegiatan
		Penyelenggaran Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		Sub. Kegiatan
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
		Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan
		Pembangunan Jalan
		Rekonstruksi Jalan
		Rehabilitasi Jalan
		Pemeliharaan Berkala Jalan
		Pemeliharaan Rutin Jalan
		Pembangunan Jembatan
		Rehabilitasi Jembatan
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
		Sub. Kegiatan
		Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
		Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Sub. Kegiatan
		Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi

		Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
		Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
		Kegiatan : Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
		Sub. Kegiatan
		Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
		Sub. Kegiatan
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
		Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Sub. Kegiatan
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
		Program Penatagunaan Tanah
		Kegiatan : Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
		Sub. Kegiatan
		Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
5	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	**Program Pengembangan Perumahan**
		Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Sub. Kegiatan
		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus

		Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Sub. Kegiatan
		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana
		Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana
		Program Kawasan Permukiman
		Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
		Sub. Kegiatan
		Penyusunan dan/atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
		Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Sub. Kegiatan
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
6	Meningkatnya Akses Listrik Terhadap Rumah Tangga	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**
		Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		Sub. Kegiatan
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian
		Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN						**95.203.141.507,00**							**102.435.031.233,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**95.193.141.507,00**							**101.235.031.233,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**95.033.141.507,00**							**91.192.026.233,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**	**BB Nilai**		**BB Nilai**	**BB Nilai**	**11.967.135.507,00**						**BB Nilai**	**15.586.818.233,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.601.246.233,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN	75 Orang/bulan	5.601.246.233,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan		75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	5.601.246.233,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN	75 Orang/bulan	5.601.246.233,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (SPM)	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah*	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 3. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Toju Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 3. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 3. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Toju Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 3. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	40.000.000,00	- Kab. Toju Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN	2 Orang	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	421.770.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 3. Penunjang Program Prioritas	ASN	17 Paket	522.069.999,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket		17 Paket	17 Paket	1.500.000,00	- Kab. Toju Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	17 Paket	1.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	- Kab. Toju Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	10 Paket	10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	60.000.000,00	- Kab. Toju Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	40 Paket	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	- Kab. Toju Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Paket	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	300.270.000,00	- Kab. Toju Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	120 Laporan	400.569.999,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	7 Unit		7 Unit	7 Unit	138.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Unit	220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Unit	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	5 Unit	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Unit	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	98.900.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	ASN	1 Unit	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	5.045.219.274,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	2 Laporan	8.912.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.600.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	2 Laporan	6.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.018.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	4 Laporan	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Laporan	6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.018.819.274,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Laporan	5.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*	82 Unit		82 Unit	82 Unit	670.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	40 Unit	230.900.021,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	40 Unit	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat														
			Jumlah Alat Berat yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	500.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	6 Unit	70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	35 Unit	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Perunjang Program prioritas 5 Perunjang Program Prioritas	ASN	35 Unit	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	ASN	1 Unit	40.900.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi*** ***Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota*** ***Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota***	**98,15 Persen** **22,50 Persen** **17,50 Persen**		**98,15 Persen** **22,50 Persen** **17,50 Persen**	**98,15 Persen** **22,50 Persen** **17,50 Persen**	**3.100.513.000,00**						**98,15 Persen** **22,50 Persen** **17,50 Persen**	**3.645.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	15,52 KM		15,52 KM	15,52 KM	40.000.000,00			Mempertahankan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan OPD	2 Dokumen	2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan OPSA	2 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.01.08	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Suiteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan OPSA	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,013 KM		0,013 KM	0,013 KM	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan OPSA	0,013 KM	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,013 KM		0,013 KM	0,013 KM	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan OPSA	0,013 KM	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	15 KM		15 KM	15 KM	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan OPSA	15 KM	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	58,46 KM		58,46 KM	58,46 KM	3.080.513.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan OPSA	2 Dokumen	1.145.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una-Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GPSA	2 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,23 KM		0,23 KM	0,23 KM	2.350.513.000,00	- Kab. Tojo Una-Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GPSA	0,23 KM	95.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	58,23 KM		58,23 KM	58,23 KM	700.000.000,00	- Kab. Tojo Una-Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GPSA	58,23 KM	850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air minum layak***	**42,69 Persen**		**42,69 Persen**	**42,69 Persen**	**20.000.000,00**						**42,69 Persen**	**4.574.120.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*	846 SR		846 SR	846 SR	20.000.000,00			-	-	Masyarakat	1 Dokumen	4.574.120.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM														
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	-	-	-	Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	846 SR		846 SR	846 SR	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	846 SR	4.474.120.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik***	**3,20 Persen**		**3,20 Persen**	**3,20 Persen**	**50.000.000,00**						**3,20 Persen**	**11.600.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten*	500 Unit		500 Unit	500 Unit	50.000.000,00			Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	2 Dokumen	11.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	2 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	500 Rumah Tangga		500 Rumah Tangga	500 Rumah Tangga	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	500 Rumah Tangga	11.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Perunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Unit	0,50	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	180 Rumah Tangga		180 Rumah Tangga	180 Rumah Tangga	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Perunjang Program Prioritas	Masyarakat	180 Rumah Tangga	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT														
			Kapasitas IPLT Terbangun	2 M³/Hari		2 M³/Hari	2 M³/Hari	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Perunjang Program Prioritas	Masyarakat	2 M³/Hari	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)***	**12,50 Persen**		**12,50 Persen**	**12,50 Persen**	**10.000.000,00**						**12,50 Persen**	**2.000.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota*	1300 M		1300 M	1300 M	10.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	1300 M	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1300 M		1300 M	1300 M	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	1300 M	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota***	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**50.000.000,00**						**100 Persen**	**500.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota; Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Tersedianya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota; Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Banguna Gedung*	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG														
			Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***Persentase bangunan gedung pemerintah/ fasilitas umum dalam kondisi baik***	**94,50 Persen**		**94,50 Persen**	**94,50 Persen**	**10.000.000,00**						**94,50 Persen**	**2.000.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota*	1 Kawasan		1 Kawasan	1 Kawasan	10.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	1 Kawasan	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan														
			Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Berkearah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan		1 Kawasan	1 Kawasan	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	1 Kawasan	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota***	**30,25 Persen**		**30,25 Persen**	**30,25 Persen**	**79.705.493.000,00**						**30,25 Persen**	**49.318.740.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya *Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*	46.99 KM		46.99 KM	46.99 KM	79.705.493.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	5 Dokumen	49.318.740.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	5 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan														
			Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	2000 M²		2000 M²	2000 M²	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	2000 M²	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	2 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun	35 KM		35 KM	35 KM	34.000.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	35 KM	35.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.06	Rekonstruksi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	7 KM		7 KM	7 KM	45.375.493.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	7 KM	10.218.740.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,375 KM		0,375 KM	0,375 KM	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah ibu kota negara (IKN) baru 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	0,375 KM	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	2.134 KM		2.134 KM	2.134 KM	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	2.134 KM	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0,389 KM		0,389 KM	0,389 KM	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	0,389 KM	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jembatan yang Dibangun	25 M		25 M	25 M	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	25 M	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	65 M		65 M	65 M	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	65 M	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
6	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi***	**100,00 Persen**		**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**90.000.000,00**						**100,00 Persen**	**190.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*	30 Orang		30 Orang	30 Orang	40.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	1 Dokumen	90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.01.01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	30 Orang	35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	30 Orang		30 Orang	30 Orang	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una-Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	30 Orang	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi														
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	30 Orang		30 Orang	30 Orang	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una-Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	30 Orang	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Laporan	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una-Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha														
			Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una-Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan														
			Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una-Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	30 Orang	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi														
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30 Orang		30 Orang	30 Orang	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	30 Orang	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi														
			Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Presentase Ketaatan terhadap RTRW (%)***	**32,50 Persen**		**32,50 Persen**	**32,50 Persen**	**30.000.000,00**						**32,50 Persen**	**1.767.350.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Terlaksanannya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	1.267.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	1.167.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**160.000.000,00**							**10.053.000.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni*** ***Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni*** ***Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni*** ***Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni***	**70 Persen** **100 persen** **70 persen** **100,00 Persen**		**70 Persen** **100 persen** **70 persen** **100,00 Persen**	**70 Persen** **100 persen** **70 persen** **100,00 Persen**	**80.000.000,00**						**70 Persen** **100 persen** **70 persen** **100,00 Persen**	**3.000.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Hasil pendataan penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana atau Relokasi program Kabupatin/Kota*	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000,00			-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	1 Dokumen	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	1 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus														
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	1 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50 Unit		50 Unit	50 Unit	60.000.000,00			-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	5 Unit Rumah	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah		5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	5 Unit Rumah	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit Rumah		2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	2 Unit Rumah	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Presentase Pengurangan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha*** ***Presentase Pengurangan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha [deleted]***	**21,00 Persen 21,00 Persen**		**21,00 Persen 21,00 Persen**	**21,00 Persen 21,00 Persen**	**20.000.000,00**						**21,00 Persen 21,00 Persen**	**6.103.005.000,00**	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penyusunan Dan/Atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00			-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	4 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Terreviu serta Teritegalisasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una-Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	4 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang DiPerbaiki*	100 Unit		100 Unit	100 Unit	10.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	100 Unit Rumah	4.703.005.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100 Unit Rumah		100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una-Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	100 Unit Rumah	4.703.005.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
3.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	***Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (deleted) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)***	**3,75 Persen 3,75 Persen**		**3,75 Persen 3,75 Persen**	**3,75 Persen 3,75 Persen**	**60.000.000,00**						**3,75 Persen 3,75 Persen**	**1.150.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian*	10 Lokasi		10 Lokasi	10 Lokasi	60.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	10 Lokasi	1.150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi		10 Lokasi	10 Lokasi	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una-Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	10 Lokasi	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**10.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
1	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	***Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum***	**12.5 Persen**		**12.5 Persen**	**12.5 Persen**	**10.000.000,00**						**12.5 Persen**	**1.200.000.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hampanannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya*	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	10.000.000,00			-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	1 Dokumen	1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.02	Koordinasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	1 Dokumen	1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	JUMLAH							**95.203.141.507,00**							**102.435.031.333,00**	

BAB V
PENUTUP

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Berdasarkan hal di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una.

Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan merupakan dokumen perencanaan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan untuk periode 1 (satu) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una dibuat dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf dan masukan untuk perkembangan yang lebih baik.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN						**95.203.141.507,00**							**102.435.031.233,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**95.193.141.507,00**							**101.235.031.233,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**95.033.141.507,00**							**91.182.026.233,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**BB Nilai**		**BB Nilai**	**BB Nilai**	**11.967.135.507,00**						**BB Nilai**	**15.586.816.233,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.601.246.233,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN	75 Orang/bulan	5.601.246.233,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan		75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	5.601.246.233,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN	75 Orang/bulan	5.601.246.233,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah*	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	40.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN	2 Orang	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Adminitrasi Umum Peragkat Daerah*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	421.770.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	17 Paket	522.069.999,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket		17 Paket	17 Paket	1.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	17 Paket	1.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	10 Paket	10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	60.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	40 Paket	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Paket	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	300.270.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	120 Laporan	400.569.999,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	7 Unit		7 Unit	7 Unit	138.900.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Unit	220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Unit	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	5 Unit	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Unit	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	98.900.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	ASN	1 Unit	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	5.045.219.274,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	2 Laporan	8.912.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.600.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	2 Laporan	6.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.018.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	4 Laporan	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Laporan	6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.018.619.274,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Laporan	5.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*	82 Unit		82 Unit	82 Unit	670.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	40 Unit	230.900.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	40 Unit	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	500.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	6 Unit	70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	35 Unit	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	35 Unit	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	ASN	1 Unit	40.900.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi*** ***Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota*** ***Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota***	**56,15 Persen 22,50 Persen 17,50 Persen**		**56,15 Persen 22,50 Persen 17,50 Persen**	**56,15 Persen 22,50 Persen 17,50 Persen**	**3.100.513.000,00**						**56,15 Persen 22,50 Persen 17,50 Persen**	**3.645.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	15.52 KM		15.52 KM	15.52 KM	40.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GP3A	2 Dokumen	2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GP3A	2 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GP3A	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,013 KM		0,013 KM	0,013 KM	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GP3A	0,013 KM	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,013 KM		0,013 KM	0,013 KM	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GP3A	0,013 KM	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	15 KM		15 KM	15 KM	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GP3A	15 KM	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	58.46 KM		58.46 KM	58.46 KM	3.060.513.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GP3A	2 Dokumen	1.145.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GP3A	2 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,23 KM		0,23 KM	0,23 KM	2.350.513.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GP3A	0,23 KM	95.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	58,23 KM		58,23 KM	58,23 KM	700.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GP3A	58,23 KM	650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air minum layak***	**42,69 Persen**		**42,69 Persen**	**42,69 Persen**	**20.000.000,00**						**42,69 Persen**	**4.574.120.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*	846 SR		846 SR	846 SR	20.000.000,00			-	-	Masyarakat	1 Dokumen	4.574.120.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM														
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	-	-	-	Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	846 SR		846 SR	846 SR	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	846 SR	4.474.120.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik***	**3,20 Persen**		**3,20 Persen**	**3,20 Persen**	**50.000.000,00**						**3,20 Persen**	**11.600.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten*	500 Unit		500 Unit	500 Unit	50.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	2 Dokumen	11.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	2 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	500 Rumah Tangga		500 Rumah Tangga	500 Rumah Tangga	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	500 Rumah Tangga	11.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Unit	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	180 Rumah Tangga		180 Rumah Tangga	180 Rumah Tangga	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	180 Rumah Tangga	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT														
			Kapasitas IPLT Terbangun	2 M³/Hari		2 M³/Hari	2 M³/Hari	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	2 M³/Hari	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)***	**12,50 Persen**		**12,50 Persen**	**12,50 Persen**	**10.000.000,00**						**12,50 Persen**	**2.000.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota*	1300 M		1300 M	1300 M	10.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	1300 M	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1300 M		1300 M	1300 M	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	1300 M	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota***	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**50.000.000,00**						**100 Persen**	**500.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Tersedianya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Banguna Gedung*	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG														
			Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***Persentase bangunan gedung pemerintah/ fasilitas umum dalam kondisi baik***	**94.50 Persen**		**94.50 Persen**	**94.50 Persen**	**10.000.000,00**						**94.50 Persen**	**2.000.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota*	1 Kawasan		1 Kawasan	1 Kawasan	10.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	1 Kawasan	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan														
			Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan		1 Kawasan	1 Kawasan	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	1 Kawasan	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota***	**30,25 Persen**		**30,25 Persen**	**30,25 Persen**	**79.705.493.000,00**						**30,25 Persen**	**49.318.740.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*	46.99 KM		46.99 KM	46.99 KM	79.705.493.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	5 Dokumen	49.318.740.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	5 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan														
			Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	2000 M²		2000 M²	2000 M²	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	2000 M²	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	2 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun	35 KM		35 KM	35 KM	34.000.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	35 KM	35.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	7 KM		7 KM	7 KM	45.375.493.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	7 KM	10.218.740.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,375 KM		0,375 KM	0,375 KM	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	0,375 KM	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	2.134 KM		2.134 KM	2.134 KM	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	2.134 KM	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0,389 KM		0,389 KM	0,389 KM	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	0,389 KM	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jembatan yang Dibangun	25 M		25 M	25 M	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	25 M	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	65 M		65 M	65 M	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	65 M	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Setifikat Kompetensi***	**100,00 Persen**		**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**90.000.000,00**						**100,00 Persen**	**190.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*	30 Orang		30 Orang	30 Orang	40.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	1 Dokumen	90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.01.01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	30 Orang	35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	30 Orang		30 Orang	30 Orang	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	30 Orang	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi														
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	30 Orang		30 Orang	30 Orang	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	30 Orang	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Laporan	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha														
			Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan														
			Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	30 Orang	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi														
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30 Orang		30 Orang	30 Orang	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	30 Orang	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi														
			Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Presentase Ketaatan terhadap RTRW (%)***	**32,50 Persen**		**32,50 Persen**	**32,50 Persen**	**30.000.000,00**						**32,50 Persen**	**1.767.350.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	1.267.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	1.167.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**160.000.000,00**							**10.053.005.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni*** ***Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni*** ***Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni*** ***Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni***	**70 Persen** **100 persen** **70 persen** **100,00 Persen**		**70 Persen** **100 persen** **70 persen** **100,00 Persen**	**70 Persen** **100 persen** **70 persen** **100,00 Persen**	**80.000.000,00**						**70 Persen** **100 persen** **70 persen** **100,00 Persen**	**3.800.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Hasil pendataan penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana atau Relokasi program Kabupatin/Kota*	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000,00			-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	1 Dokumen	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	1 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus														
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	1 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	50 Unit		50 Unit	50 Unit	60.000.000,00			-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	5 Unit Rumah	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah		5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	5 Unit Rumah	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit Rumah		2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	2 Unit Rumah	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Presentase Pengurangan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha*** ***Presentase Pengurangan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha [deleted]***	**21,00 Persen** **21,00 Persen**		**21,00 Persen** **21,00 Persen**	**21,00 Persen** **21,00 Persen**	**20.000.000,00**						**21,00 Persen** **21,00 Persen**	**5.103.005.000,00**	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	*Terlaksananya Penyusunan Dan/Atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh*	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00			-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	4 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	4 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang DiPerbaiki*	100 Unit		100 Unit	100 Unit	10.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	100 Unit Rumah	4.703.005.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100 Unit Rumah		100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	100 Unit Rumah	4.703.005.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
3.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	***Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) [deleted] Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)***	**3,75 Persen 3,75 Persen**		**3,75 Persen 3,75 Persen**	**3,75 Persen 3,75 Persen**	**60.000.000,00**						**3,75 Persen 3,75 Persen**	**1.150.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian*	10 Lokasi		10 Lokasi	10 Lokasi	60.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	10 Lokasi	1.150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi		10 Lokasi	10 Lokasi	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	10 Lokasi	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**10.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
1.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	***Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum***	**12.5 Persen**		**12.5 Persen**	**12.5 Persen**	**10.000.000,00**						**12.5 Persen**	**1.200.000.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya*	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	10.000.000,00			-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	1 Dokumen	1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	1 Dokumen	1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	J U M L A H							**95.203.141.507,00**							**102.435.031.233,00**	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TOJO UNA UNA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum yang mendasari Penyusunan Renja 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PKSANAAN RENJA SATPOLPP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SatpolPP Tahun lalu dan Capaian Renstra..... 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 11
2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan PD..... 13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una Una..... 21
3.3 Program dan Kegiatan 25

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun sebagai salah satu sumber informasi dalam upaya menentukan perencanaan dan kebijakan Perangkat Daerah pada masa kini maupun dimasa datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan perlindungan kepada kita semua, dan kami mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) Kami ini.

Ampana, April 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

IKSAN BADWI, S.Ag.M.A.P
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770712 200012 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam NegerI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2024.

Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah, Dalam kerangka legislasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2024 dalam penyusunannya mengacu pada RKPD Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2024. Dalam rangka pencapaian target pembangunan tahunan akan ditempuh melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una Una dijadikan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2024 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Tojo Una Una khususnya dan Nasional pada umumnya.

Selanjutnya Renja akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rencana Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
10. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dengan harapan dapat mendorong pasirtisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas dan indikator kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (RKA-PD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024;
3. Sebagai bahan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Maksud dan Tujuan ;
1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB lll TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2021- 2026 yang memuat target dan indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una Una berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi, yang meliputi indikator program dan kegiatan serta target kinerja capaian program, kegiatan dan realisasi.

1. Pada Bab ini program yang telah memenuhi target adalah program ketentraman dan ketertiban Umum yaitu telah dilaksanakan penyelesaian kasus sebanyak 97 kasus,dari penyelesaian kasus yang ada ,hampir Rata-rata kasus yang diselesaikan adalah Kasus Pedagang Penjual ikan yang dalam hal ini terlalu banyak didapatkan masyarakat yang belum memahami penertiban Perda Yang ditegakkan,untuk program ini dicapai 100%.
2. Untuk penjelasan Program yang melebihi target kinerja

adalah program pencegahan,penanggulangan ,penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non kebakaran dalam program ini melebihi target kinerja yang direncanakan,dikarenakan program ini mencakup penyelesaian penyelamatan non kebakaran dan kebakaran,capaiannya melebihi 100% dari 40 Kasus yang direncanakan .

3. Faktor penyebab tidak tercapainya,terpenuhinya target kinerja program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran baik pos jaga,hydran maupun APAR;
    b. Kurangnya Peningkatan kapasitas SDM anggota yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan dasar;
    c. Kurangnya kordinasi dengan instansi terkait ;
    d. Personil yang berkompetensi masih rendah;
4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan an penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi/factor tersebut;
    a. Mengembangkan Potensi sumber daya aparatur satuan Polisi pamong melalui Pendidikan dan pelatihan;
    b. Membuat suatu rancangan anggaran entang PPNS untuk menjadi biaya operasional pelaksanaan penertiban Perda dilapangan;
    c. Perlunya adanya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur terutama Gedung kantor Satpolpp;
    d. Perlu adanya penambahan anggaran kegiatan karena anggaran yang ada lebih besar hanya terfokuskan pada gaji Non PNS;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam konteks ketentraman dan ketertiban umum walaupun telah melaksanakan tugas dan fungsinya masih perlu ditingkatkan karena berdasarkan realitas peranan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut masih diperhadapkan dengan kendala dan hambatan diantaranya keterbatasan sarana dan prasarana seperti belum adanya gedung kantor, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagian besar adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) hal-hal tersebut yang menyebabkan sehinga personil (anggota) Satuan Polisi Pamong Praja dikategorikan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Keadaan Topografis Kabupaten yang sebagian besar adalah kepulauan juga mempengaruhi tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan yang mana dalam hal pemantauan ganguan Kententraman dan Ketertiban cukup sulit serta kurangnya peran serta masyarakat dibidang ketentraman dan Ketertiban Umum.Adapun kendala lain yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu keterbatasan dana operasional kegiatan Keamanan dan Ketertiban Umum,Minimnya skill tentang manajemen konflik para personal Satuan polisi Pamong praja. Walaupun tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una sudah ada, namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lapangan masih kurang efektif dan perlu ditingkatkan, sehingga tercipta suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib dan teratur. Karena pada hakekatnya jika suatu kondisi daerah yang kondusif, maka perkembangan perekonomian akan maju dengan pesat dan mengundang para investor-investor untuk membuka peluang usaha di

kabupatenTojoUna-Una, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan OPD

2.3.1 Dalam hal pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam bidang Keamanan dan Ketertiban di Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang optimal, ini dikarenakan masih sebagian besar anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang belum mengetahui tatacara memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat,Sehingga banyak masyarakat beranggapan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja hanya sebagai penindas bukan sebagai aparatur yang memberikan perlindungan serta pemberi rasa aman terhadap masyarakat. Selain itu, masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses pelayanan, diantara dari segi sarana dan prasarana yang notabene sebagai pendukung utama dalam proses pelayanan terhadap masyarakat.

2.3.2 Secara Umum bebarapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan polisi pamomg praja kabupaten Tojo Una-unadalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum antara lain:

1. Standar SDM masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamongb praja.
2. Belum adanya Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS).
3. Masih rendahnya ketaatan Sebagian masyarakat dalam melaksanakan Perda.
4. Sikap dan Prilaku Sebagian masyarakat yang cenderung ingin bebas tanpa batas sehingga mengabaikan aturan.

2.3.3 Isu strategis atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam pembangunan,karena dampak yang signifikan bagi daerah dimasa dating.Suatu kejadian/kondisi

yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi,akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka Panjang.

Penelaahan Visi,misi dan Program Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan .Oleh sebab itu pada periode 2024 ini, kami merencanakan akan memberikan pembekalan terhadap personil-personil Satuan Polisi Pamong Praja tentang tatacara memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat melalui kegiatan bimbingan-bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan pemantapan kinerja pelayanan, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera serta mengembalikan citra Satuan Polisi Pamong Praja yang telah rusak dimata masyarakat selama ini. Selain itu juga kami berencana menambah sarana dan prasarana pendukung pelayanan, dengan cara menyeleksi sarana dan prasarana yang belum ada akan tetapi sangat dibutuhkan dalam proses pemberian pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban.

2.3.4 Pada periode ini kami juga akan lebih meningkatkan capaian-capaian melalui Perda Nomor 6 tahun 2022 tentang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan Masyarakat serta menetapkan sanksi-sanksi hukum yang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku kepada siapa saja yang melanggar Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan maksud agar masyarakat yang acap kali melanggar Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang sudah di berlakukan mempunyai efek jerah dan tidak akan melanggar lagi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini :

BAB III
TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah yang mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tetap mempertahankan kedudukan Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, dengan mempertahankan azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian Otonomi berarti Daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Daerah berhak untuk membuat Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian PERDA merupakan salah satu instrument bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawabnya. Perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain atau tidak melampaui batas-batas kewenangan yang telah ditentukan.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una- Una

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Satuan Polisi pamong Praja pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2024 dan prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan pada Rencana Kerja Satua Polisi Pamong Praja kabupaten Tojo Una Una Tahun 2024 yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta prognosisnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan;

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

   Untuk mewujudkan Visi dan misi satpolpp menetapkan peningkatan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman,ketertiban umum,serta meningkatkan mutu dan disiplin sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjsng kinerja Satpolpp.

b. Pencapaian SDGs

   Untuk pencapaian ini,satpolpp belum memiliki data yang secara akurat yang bisa dijadikan data SDGs.

c. Pengentasan Kemiskinan

d. Pencapain Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

   Untuk pencapaian ini, Satpolpp merupakan salah satu OPD pemangku SPM ,tetapi hal ini tidak pernah didukung oleh anggaran SPM itu sendiri, sehingga untuk melakukan kegiatan SPM ini akan berbenturan dengan anggaran APBD yang ada,

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 memuat program kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik diintern Satuan Polisi Pamong Praja maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2021-2026.

Ampana, April 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

IKSAN BADWI, S.Ag.M.A.P
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770712 200012 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jln. Merdeka No. 01 Kota Bumi Mas Ampana Telp Kode Pos 94683

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TOJO UNA – UNA
NOMOR : 331.1 / /POL – PP /2023

T E N T A N G

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOJO UNA-UNA
(RENJA-PD)
TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TOJO UNA – UNA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan Kepala Perangkat Daerah (PD) perlu menyusun Rencana Kerja PD tahun 2021 ;
b. bahwa Rencana Kerja (Renja) PD memuat arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanankan pembangunan daerah yang berkesinambungan ;
c. bahwa Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2021 memuat program / Kegiatan pembangunan PD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat

Keputusan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021;

M E M U T U S K A N

Memperhatikan : Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2023, yang selanjutnya disebut (RENJA-PD Sat Pol - PP) Tahun 2023, adalah Dokumen Program / kegiatan periode 1 (satu) tahun.

Menetapkan : RENJA Sat Pol - PP Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

KESATU :

a. Bab 1 PENDAHULUAN.
b. Bab 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA.
c. Bab 3 TELAAHAN KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.
d. Bab 4 PENUTUP.

KEDUA : RENJA Sat Pol - PP Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Perangka Daerah Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor Tahun 2022 yang memuat Program/kegiatan, Indikator kinerja, lokasi kegiatan, target pencapaian kinerja dan pagu indikatif.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampana
Pada Tanggal : 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tojo Una-Una

IKSAN BADWI, S.Ag.,M.A.P
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19770712 200012 1 002

PEMERINTAH

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA(RENJA)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TAHUN ANGGARAN 2024

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TAHUN 2021 - 2026



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA – UNA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat. Jalan Merdeka No. Kota Bumi Mas Ampana Kode Pos 94683
Website : www.tojounaunakab.go.id Email : bpbdtouna@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR :188.45/ 09 /BPBD/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA(RENJA)
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPALA PELAKSANA BPBD,

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una perlumenetapkan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di BPBD Kabupaten Tojo Una-Una.
b. Bahwamereka yang nama dan / atau jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una tentangpenetapan Pejabat Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 32 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten tojouna-una di Propinsi Sulawesi Tengah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2003 nomor 147, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4342).
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4846).
3. Undang-undang nomor25 tahun 2009 tentang pelayanan public (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5038).
4. Undang-undangnomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2009 nomor 152, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5071).
5. Undang-undangnomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 224, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5587). Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan

kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5679.

6. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 keterbukaan informasi public (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5149,
7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PALAKSANA BPBD TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA – UNA ;

KESATU : Menetapkan pejabat Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Pelaksana BPBDini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten tojo una-una masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat ;

KETIGA : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini ;

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal : 03 Maret 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

MOHAMAD ASRAR M.ALI.,S.Ag.,M.Pd.I
Pembina Utama Muda,IV/c
NIP.19710406 199702 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 188.45 / 09 / BPBD / 2024
TANGGAL : 03 Maret 2023
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA – UNA TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEGIATAN
1.	MOHAMAD ASRAR M. ALI.,S.Ag.,M.Pd.I NIP. 19710406 197702 1 007	Penanggung Jawab	Program
2.	RUSDIN,SKM NIP. 19650405 198802 1 005	Koordinator	Program
3.	SUPARNO AMBOTANG,SKM,M.Kes NIP. 19780918 200502 1 004	K e t u a	Program
4.	RIDWAN M. AMIN NIP. 19721005 2003021 001	Anggota	Program

Ampana, 03 Maret 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

MOHAMAD ASRAR M. ALI,S.Ag.,M.Pd.I
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip.19710406 199702 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 188.45 / / BPBD / 2024
TANGGAL : 03 Maret 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIMPENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA – UNA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA – UNA

Ketua Tim : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una

Sekretaris Tim : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una

Kelompok Kerja :

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
   Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
   Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda

2. Bidang Kedaruratan dan Logistik
   Koordinator : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
   Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda

3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
   Koordinator : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
   Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda

4. Bagian Sekretariat
   Koordinator : Kasubag Perencanaan dan Program
   Anggota : Staf Perencanaan dan Program

Ditetapkan di Ampana
Pada Tanggal : 03 Maret 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

MOHAMAD ASRAR M. ALI,S.Ag.,M.Pd.I
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip.19710406 199702 1 007

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tojo Una – Una Tahun Anggaran 2024 telah berhasil disusun. Untuk menyusun Renja yang memuat Visi, Misi dan kebijakan serta program pembangunan dalam waktu 1 (satu) tahun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una telah menyusun Renja tahun 2024. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (Performance Indicator) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ***" Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana "*** pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebagai perwujudan komitmen organisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia diperlukan integritas dan kapabilitas serta akuntabilitas yang tinggi, dengan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una ini diharapkan dapat memberikan informasi penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan di Kabupaten Tojo Una – Una di tahun yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renja yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renja yang sesuai dengan harapan dan cita – cita pembangunan dalam mewujudkan Ketangguhan Bangsa dalam menghadapi Bencana.

Demikian, semoga RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una ini bermanfaat, Terima kasih.

Ampana, Maret 2023

KepalaPelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tojo Una – Una

MOH. ASRAR M. ALI,S.Ag.,M.Pd.I
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19710406 199702 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1.3.2 Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penalaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Propinsi

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Propinsi

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.3. Program Dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Kabupaten Tojo Una - Una untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una adalah dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Unauntuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Penyusunan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo una – Una yang memiliki leading sector dalam bidang Pencegahan, Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tojo Una – Una tidak terlepas dari berbagai permasalahan strategis terkait dengan karakteristik Wilayah Kabupaten Tojo Una – Una. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una – Una dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsinya harus senantiasa merujuk pada pencapaian Visi, Misi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una,maka disusunlah RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan RenjaTahun 2022Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Unasebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una – Una di Propinsi Sulawesi Tengah;

3. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ((Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 11);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Tahun 2005 -2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja, Tugas, Fungsi serta Struktur Organisasi Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Tahun 2022 – 2026.

20. Peraturan Bupati Tojo Una - Una Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una - Una Tahun Anggaran 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan dari penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una tahun 2024 Kabupaten Tojo Una - Una.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renjaini dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renjaini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una tahun lalu dan capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una), analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncakan di dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun-tahun sebelumnya

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Evaluasi pelaksanaan renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. T-II.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerahdan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Tojo Una – Una

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Tojo Una-Una .Keberhasilan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat di lihat dari pencapaian indicator dan yang telah di tetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dapat di lihat pada table berikut ini:

Tabel. T-II.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenTojo Una – Una

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		CatatanAnalisis
				Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terselenggaranya Urusan Pemerintah Bidang Penanggulangan Bencana					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
2	Meningkatnya SDM Aparatur Pengelola yang TerdidikdanTerlatih					5 org	11 org	10 org	11 org	8 org	34 org	
3	Persentase Menurunnya Waktu Tindakan Reaksi Cepat Tanggap Darurat					45 Org	80 org	60 org	80 org	80 org	240 0rg	
4	Rasio Antara Korban Jiwa Dengan Jumlah Korban Bencana					800 kk	900 kk	910 kk	900 kk	1000 KK	2.210 kk	
5	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fisik Terhadap Pelayanan Yang Diberikan					-	-	6 unit	10 unit	20 Unit	31 unit	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN BADANPENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

1. Belum adanya keterkaitan dan konsistensi kebijakan perencanaan daerah dengan penganggaran daerah.
2. Belum terintegrasinya dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan KabupatenTojo Una - Una;
3. Belum terintegritasnya perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu kepada dokumen perencanaan;
4. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Penaggulangan Bencana.
5. Pelayanan Kepada Masyarakat terhadap Kejadian Bencana khsusunya pada daerah rawan bencana serta daerah terpencil dan terisolasi.
6. Kurangnya kapasitas Apartur pemerintah dan masyarakat dalam Usaha mitigasi resiko bencana.
7. Belum tersedianya sistem penyelenggaraan penaggulangan bencana yang handal.
8. Belum tersedianya Data dan Peta Daerah Rawan Bencana Daerah Rawan Bencana.
9. Terbatasnya Penyediaan Bantuan Bahan – Bahan Bangunan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Tabel. T-II.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Tojo Una – Una

Nama : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Lembar.....dari.....

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CatatanPenting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penanggulangan Bencana	Kec. Ampana	Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana			Program Penanggulangan Bencana	Kec. Ampana	Terwujudnya Pemenuhan Kedaruratan Bencana			

2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat untuk BPBD tidak disajikan dalam tabel karena usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 sudah dalam tahap awal Rehabilitasi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana termasuk bangunan pengaman pengamanan sungai.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2024 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan packa konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selaian prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

a. Program pro rakyat;

b. Program keadilan untuk semua; dan

c. Program pencapaian tujuan pembangunan millinium (MDG's).

Selain itu, pemerintah pusat juga baru saja menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendeatan *not business as usual*, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunannasional.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertunbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasarat serta berbagai strategi

pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi kaberhasilan pelaksanaan MP3EI. Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang *multiplier effect*-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air

Sebagai lembaga yang terkoordinasi dari tingkat pusat hingga daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una memiliki kewajiban sekaligus kepentingan untuk menyelaraskan visi pembangunan khususnya di bidang Penanggulangan Bencana dengan Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB), agar tercipta sinergi yang baik dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Badan PenanggulanganBencana Daerah,yaitu :

"TerwujudnyaTojo Una-Una yang tangguh dalam menghadapi Bencana menuju masyarakatyang Hebat dalam Penanggulangan Bencana"

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan Misi, yaitu :

1. **Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasidanMenyeluruh;**
2. **Melindungi Masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resi kobencana.**

Adapun ***Tujuan, Sasaran serta Program Utama*** yang telah di tetapkan oleh BNPB sebagai berikut:

a. TujuanStratejikBadan Nasional PenanggulanganBencana :

1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana; dan
2. Mewujudkan system penyelenggaraan penanggulanganbencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

b. Sasaran Stratejik Badan Nasional Penanggulangan Bencana

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah;
2. Terwujudnya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan system logistic dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;

3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik disbanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasii dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengaruh utama pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

c. Program dan Kegiatan Pokok Badan Nasional Penanggulangan Bencana

a. ***Deputi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, dengan kegiatan pokok yang meliputi***:

1) Kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana;
2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
3) Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

b. ***Deputi Bidang Penanganan Darurat, dengan kegiatan pokok yang meliputi***:

1) Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana;
2) Kegiatan pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana;
3) Kegiatan perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana.

c. Deputi Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, dengan kegiatan pokok yang meliputi:

1) Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana;
2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana;
3) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidangsosial ekonomi di wilayah pasca bencana;
4) Kegiatan penanganan pengungsi akibat bencana.

d. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, dengan kegiatan pokok yang meliputi:

1) Kegiatan Pengelolaan Logistik dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2) Kegiatan Pengelolaan Peralatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

e. Pusdatinmas, dengankegiatanpokok yang meliputi :

1) Kegiatan Pengelolaan data;
2) Kegiatan Pengembangan system informasi;
3) kegiatan pelaksanaan hubungan masyarakat.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Propinsi Isu Internasional dan Nasional:

Isu Pemanasan Global (GlobalWarming) dan Perubahan Iklim yang penjadi isu internasional menyebabkan sebagian besar wilayah di permukaan bumi khususnya daerah khatulistiwa menjadi rawan bencana.

Isu Strategis Kabupaten Tojo Una-Una yang terkait Fungsi OPD:

1. Wilayah perbatasandanterpencilkondisinyamasihterbelakang;
2. KualitasSumberDayamanusia masih rendah;
3. Tingkat KesejahteraanmasyarakatMasihRendah.

Isu Strategis OPD

Berdasarkan Isu-Isu Strategis baik dari internasional, Nasional dan dalam Skup Kabupaten Tojo Una-Una, maka Isu Strategis yang akan dikembangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai Berikut:

1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
2. Pelayanan Kepada Masyarakat terhadap Kejadian Bencana khsusunya pada daerah rawan bencana serta daerah terpencil dan terisolasi;
3. Pengembangan kapasitas Aparatur pemerintah dan masyarakat dalam Usaha mitigasi resiko bencana;
4. Pengembangan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menentukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RenjaBadan Penanggulangan Bencana Daerahselama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2018 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. T-III.1.

Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2023	2024
1	3	4	5	6
Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana .		**Nilai SAKIP BPBD**	B	BB
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kebencanaan.	**Kepuasan Layanan Kebencanaan BPBD**	67,5	70
		Indeks Resiko Bencana Daerah	137,6-132,0	132,0-130
Terwujudnya Pelayanan Kebencanaan kepada Masyarakat Tojo Una – Una yang didukung oleh Kapasitas Aparatur dan Sarana Prasarana yang memadai	**Meningkatnya Desa yang tangguh dan mitigasi Bencana di wilayah seluruh Wilayah Tojo Una – Una.**	**Persentase Desa Tangguh Bencana**	10,0-12,5	12,5-15,00

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikanpermasalahan-permasalahanyang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta prognosisnya dapat dilihat pada **Lampiran III**

BAB. IV.

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan RKPD Kabupaten Tojo Una - Una Tahun 2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2022 - 2026 yaitu :

”Terwujudnya Kabupaten TojoUna –
Una Tangguh, Maju, dan Sejahtera
(TAMARA) ”

Ampana, Maret 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tojo Una - Una

MOHAMAD ASRAR M.ALI.,S.Ag.,M.Pd.I
Pembina Utama Mda, IV/c
NIP.19710406 199702 1 007

2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Kabupaten Tojo Una - Una untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una adalah dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Unauntuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Penyusunan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo una – Una yang memiliki leading sector dalam bidang Pencegahan, Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tojo Una – Una tidak terlepas dari berbagai permasalahan strategis terkait dengan karakteristik Wilayah Kabupaten Tojo Una – Una. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una – Una dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsinya harus senantiasa merujuk pada pencapaian Visi, Misi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una,maka disusunlah RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una tahunan

sebagai penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan RenjaTahun 2022Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Unasebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una – Una di Propinsi Sulawesi Tengah;

3. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ((Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 11);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Tahun 2005 -2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja, Tugas, Fungsi serta Struktur Organisasi Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Tahun 2022 – 2026.

20. Peraturan Bupati Tojo Una - Una Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una - Una Tahun Anggaran 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan dari penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una tahun 2024 Kabupaten Tojo Una - Una.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renjaini dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renjaini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una tahun lalu dan capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una), analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncakan di dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun-tahun sebelumnya

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Evaluasi pelaksanaan renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. T-II.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerahdan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Tojo Una – Una

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Tojo Una-Una .Keberhasilan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat di lihat dari pencapaian indicator dan yang telah di tetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dapat di lihat pada table berikut ini:

Tabel. T-II.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenTojo Una – Una

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		CatatanAnalisis
				Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terselenggaranya Urusan Pemerintah Bidang Penanggulangan Bencana					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
2	Meningkatnya SDM Aparatur Pengelola yang TerdidikdanTerlatih					5 org	11 org	10 org	11 org	8 org	34 org	
3	Persentase Menurunnya Waktu Tindakan Reaksi Cepat Tanggap Darurat					45 Org	80 org	60 org	80 org	80 org	240 0rg	
4	Rasio Antara Korban Jiwa Dengan Jumlah Korban Bencana					800 kk	900 kk	910 kk	900 kk	1000 KK	2.210 kk	
5	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fisik Terhadap Pelayanan Yang Diberikan					-	-	6 unit	10 unit	20 Unit	31 unit	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN BADANPENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

1. Belum adanya keterkaitan dan konsistensi kebijakan perencanaan daerah dengan penganggaran daerah.
2. Belum terintegrasinya dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan KabupatenTojo Una - Una;
3. Belum terintegritasnya perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu kepada dokumen perencanaan;
4. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Penaggulangan Bencana.
5. Pelayanan Kepada Masyarakat terhadap Kejadian Bencana khsusunya pada daerah rawan bencana serta daerah terpencil dan terisolasi.
6. Kurangnya kapasitas Apartur pemerintah dan masyarakat dalam Usaha mitigasi resiko bencana.
7. Belum tersedianya sistem penyelenggaraan penaggulangan bencana yang handal.
8. Belum tersedianya Data dan Peta Daerah Rawan Bencana Daerah Rawan Bencana.
9. Terbatasnya Penyediaan Bantuan Bahan – Bahan Bangunan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Tabel. T-II.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Tojo Una – Una

Nama : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Lembar.....dari.....

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CatatanPenting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penanggulangan Bencana	Kec. Ampana	Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana			Program Penanggulangan Bencana	Kec. Ampana	Terwujudnya Pemenuhan Kedaruratan Bencana			

2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat untuk BPBD tidak disajikan dalam tabel karena usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 sudah dalam tahap awal Rehabilitasi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana termasuk bangunan pengaman pengamanan sungai.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2024 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan packa konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selaian prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

a. Program pro rakyat;

b. Program keadilan untuk semua; dan

c. Program pencapaian tujuan pembangunan millinium (MDG's).

Selain itu, pemerintah pusat juga baru saja menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendeatan *not business as usual*, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunannasional.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertunbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasarat serta berbagai strategi

pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi kaberhasilan pelaksanaan MP3EI. Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang *multiplier effect*-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air

Sebagai lembaga yang terkoordinasi dari tingkat pusat hingga daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una memiliki kewajiban sekaligus kepentingan untuk menyelaraskan visi pembangunan khususnya di bidang Penanggulangan Bencana dengan Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB), agar tercipta sinergi yang baik dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Badan PenanggulanganBencana Daerah,yaitu :

"TerwujudnyaTojo Una-Una yang tangguh dalam menghadapi Bencana menuju masyarakatyang Hebat dalam Penanggulangan Bencana"

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan Misi, yaitu :

1. **Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasidanMenyeluruh;**
2. **Melindungi Masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resi kobencana.**

Adapun ***Tujuan, Sasaran serta Program Utama*** yang telah di tetapkan oleh BNPB sebagai berikut:

a. TujuanStratejikBadan Nasional PenanggulanganBencana :

1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana; dan
2. Mewujudkan system penyelenggaraan penanggulanganbencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

b. Sasaran Stratejik Badan Nasional Penanggulangan Bencana

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah;
2. Terwujudnya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan system logistic dan

peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;

3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik disbanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasii dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengaruh utama pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

c. Program dan Kegiatan Pokok Badan Nasional Penanggulangan Bencana

a. ***Deputi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, dengan kegiatan pokok yang meliputi***:

1) Kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana;
2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
3) Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

b. ***Deputi Bidang Penanganan Darurat, dengan kegiatan pokok yang meliputi***:

1) Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana;
2) Kegiatan pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana;
3) Kegiatan perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana.

c. Deputi Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, dengan kegiatan pokok yang meliputi:

1) Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana;
2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana;
3) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidangsosial ekonomi di wilayah pasca bencana;
4) Kegiatan penanganan pengungsi akibat bencana.

d. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, dengan kegiatan pokok yang meliputi:

1) Kegiatan Pengelolaan Logistik dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2) Kegiatan Pengelolaan Peralatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

e. Pusdatinmas, dengankegiatanpokok yang meliputi :

1) Kegiatan Pengelolaan data;
2) Kegiatan Pengembangan system informasi;
3) kegiatan pelaksanaan hubungan masyarakat.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Propinsi Isu Internasional dan Nasional:

Isu Pemanasan Global (GlobalWarming) dan Perubahan Iklim yang penjadi isu internasional menyebabkan sebagian besar wilayah di permukaan bumi khususnya daerah khatulistiwa menjadi rawan bencana.

Isu Strategis Kabupaten Tojo Una-Una yang terkait Fungsi OPD:

1. Wilayah perbatasandanterpencilkondisinyamasihterbelakang;
2. KualitasSumberDayamanusia masih rendah;
3. Tingkat KesejahteraanmasyarakatMasihRendah.

Isu Strategis OPD

Berdasarkan Isu-Isu Strategis baik dari internasional, Nasional dan dalam Skup Kabupaten Tojo Una-Una, maka Isu Strategis yang akan dikembangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai Berikut:

1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
2. Pelayanan Kepada Masyarakat terhadap Kejadian Bencana khsusunya pada daerah rawan bencana serta daerah terpencil dan terisolasi;
3. Pengembangan kapasitas Aparatur pemerintah dan masyarakat dalam Usaha mitigasi resiko bencana;
4. Pengembangan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menentukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RenjaBadan Penanggulangan Bencana Daerahselama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2018 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. T-III.1.

Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2023	2024
1	3	4	5	6
Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana .		**Nilai SAKIP BPBD**	B	BB
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kebencanaan.	**Kepuasan Layanan Kebencanaan BPBD**	67,5	70
		Indeks Resiko Bencana Daerah	137,6-132,0	132,0-130
Terwujudnya Pelayanan Kebencanaan kepada Masyarakat Tojo Una – Una yang didukung oleh Kapasitas Aparatur dan Sarana Prasarana yang memadai	**Meningkatnya Desa yang tangguh dan mitigasi Bencana di wilayah seluruh Wilayah Tojo Una – Una.**	**Persentase Desa Tangguh Bencana**	10,0-12,5	12,5-15,00

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikanpermasalahan-permasalahanyang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta prognosisnya dapat dilihat pada **Lampiran III**

2017

BAB. IV.

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan RKPD Kabupaten Tojo Una - Una Tahun 2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una - Una tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2022 - 2026 yaitu :

”Terwujudnya Kabupaten TojoUna –Una Tangguh,
Maju, dan Sejahtera (TAMARA) ”

Ampana, Maret 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tojo Una - Una

MOHAMAD ASRAR M.ALI.,S.Ag.,M.Pd.I
Pembina Utama Mda, IV/c
NIP.19710406 199702 1 007

2024

NA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
OPD) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
AERAH KAB. TOJO UNA UNATAHUN 2024

N JA N	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					NASIONAL	DAERAH				
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3.675.692.250,00							**0,00**	
		3.675.692.250,00							**0,00**	
		3.675.692.250,00							**0,00**	
	BB Nilai	**3.270.692.250,00**						**BB Nilai**	**0,00**	

		2.559.132.250,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	47 Orang/bulan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
ARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ang/bulan	2.559.132.250,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	47 Orang/bulan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Paket Jenis	177.097.250,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	8 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
ARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
aket	2.532.250,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	8 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

aket	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	4 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
ARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
aket	23.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	7 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

0000 ket	2.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	100000 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
ARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
okumen	1.800.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	3 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Laporan	137.765.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	45 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
ARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	433.201.250,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	10 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Laporan	1.065.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	10 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
ARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Laporan	16.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	12 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Laporan	11.416.250,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	31 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
ARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Laporan	404.720.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	12 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	101.261.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	16 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
as Jabatan									

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
ARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Unit	40.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	16 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
angan									

Unit	61.261.500,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	15 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
00 rsen	**405.000.000,00**						**64,00 Persen**	**0,00**	

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
ARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	150 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

0 Orang	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	150 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
ARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	55.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	9 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

rang	55.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	9 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
ARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	150.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	10 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	10 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
ARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0 Orang	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	1200 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	5 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	5 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	3.675.692.250,00							**0,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**3.675.692.250,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.675.692.250,00**							**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**3.675.692.250,00**							**0,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**BB Nilai**		**BB Nilai**	**BB Nilai**	**3.270.692.250,00**						**BB Nilai**	**0,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*	47 Orang		47 Orang	47 Orang	2.559.132.250,00			-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	47 Orang/bulan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan		47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	2.559.132.250,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	47 Orang/bulan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kabupaten / Kota*	8 Paket		8 Paket	8 Paket	177.097.250,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	8 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	2.532.250,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	8 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	4 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	23.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	7 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100000 Paket		100000 Paket	100000 Paket	2.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	100000 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.800.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	3 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan		45 Laporan	45 Laporan	137.765.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	45 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana*	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	433.201.250,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	10 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	1.065.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	10 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	16.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	12 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Laporan		31 Laporan	31 Laporan	11.416.250,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	31 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	404.720.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	12 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah*	16 Unit		16 Unit	16 Unit	101.261.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	16 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	40.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	16 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	61.261.500,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	15 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Persentase potensi bencana alam yang diantisipasi***	**64,00 Persen**		**64,00 Persen**	**64,00 Persen**	**405.000.000,00**						**64,00 Persen**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Informasi Daerah Rawan Bencana Kabupaten / Kota*	150 Orang		150 Orang	150 Orang	100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	150 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	150 Orang		150 Orang	150 Orang	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	150 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	9 Orang		9 Orang	9 Orang	55.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	9 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	9 Orang		9 Orang	9 Orang	55.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	9 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Terlaksananya Upaya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	150.000.000,00			-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	10 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	10 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1200 Orang		1200 Orang	1200 Orang	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	1200 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota*	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00			-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	5 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	5 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H							**3.675.692.250,00**							**0,00**	



RENCANA KERJA (RENJA) 2024

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-nya, tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) yang dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024.

Renja ini secara garis besar mengupas tentang Evaluasi pelaksanaan rencana kerja, Analisis kinerja pelayanan kantor, Review rancangan awal RKPD, Isu-isu penting, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Serta Indikator Kinerja dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan segala keterbatasan dan kesempurnaan penyusunan, penyusunan Renja dari perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu disini. Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya, oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna sempurnanya Renja ini. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 maupun tahun-tahun berikutnya yang akan dirumuskan dalam dokumen Renstra tahun 2021-2026 dalam melaksanakan tugasnya maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Ampana, 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN RENJA ..... **i**
SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUN RENJA ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.3.1 Maksud 4
1.3.2 Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II EVALUASI PELAKANAAN RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN TOJO UNA UNA TAHUN 2022 ..... **8**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Sosial 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial 25
2.3 Isu Isu Penting Penyeenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial 28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 29
2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan MAsyarakat 47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK **51**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 51
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 54
3.3. Program dan Kegiatan 55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **64**
BAB V PENUTUP **65**

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA /D TAHUN 2022 10

TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD DINAS SOSIAL TAHUN 2023 31

TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022 48

TABEL 3.1 PRIORITAS DAN SASARAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TOJO UNA UNA 53

TABEL 3.2 TUJUAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TOJO UNA-UNA 55

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una Una, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una Una adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una Una periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una Una mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai unit kerja yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang Kesejahteraan Sosial diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una Una yang handal dengan

dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 mempunyai arti strategis didalam mendukung penyelenggaraan/pelaksanaan pemerintahan/pembangunan tahunan di bidang sosial, sebagai berikut :

1. Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan yang secara substansial menerjemahkan visi dan misi Kabupaten Tojo Una-Una dalam bentuk program/kegiatan SKPD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan acuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS), melalui perencanaan program/kegiatan yang akan diimplementasikan di Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
3. Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan, serta untuk mengetahui tingkat capaian kinerja tahunan yang telah dicapai sebagai wujud keberhasilan antara target dan realisasi capaian kinerja SKPD.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una Una, maka disusunlah Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una Una tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una Una tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una Una yang akan ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una Una sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nmegara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-una 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Tojo Una-una cNomor Tahun tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-una Tahun

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una Una tahun 2024.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini sebagai media untuk menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una Una untuk secara konsekuen dan konsisten

menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

Dan adapun maksud di susunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Staf Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una Una dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin di capai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una Una dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una Una.
2. Terwujudnya keselarasan rencana strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una Una dengan perencanaan tahunan.
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tojo Una Una dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan konsitensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una Una tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, proses penyusunan Renja, keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja Kementrian/Lembaga, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan dengan RAPBD, landasan hukum, maksud dan tujuan Renja, dan sistematika penulisan sebagai berikut.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TOJO UNA UNA TAHUN 2022

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun lalu tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2023 (tahun n-1), target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program/kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun

lalu, realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD/atau realisasi APBD, sebagai berikuit :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, tujuan dan sasaran SKPD serta program dan kegiatan, sebagai berikut :

3.1. Telaahan terhadap Kebjakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN TOJO UNA UNA TAHUN 2022

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una Tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 (Tiga Puluh Empat) urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 (Dua Puluh Enam) urusan wajib dan 8 (Delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN TOJO UNA UNA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN TOJO UNA UNA

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terbentuk pada Tahun 2023 yang sebelumnya bernama Dinas Sosial yang kemudian di lakukan penyederhanaan OPD melalui merger dengan penambahan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Renja Dinas Sosial (tahun 2022) dan perkiraan capaian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan dibidang sosial dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program dan

kegiatan didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 setelah Perubahan APBD Tahun 2022 (P-APBD 2022) Kabupaten Tojo Una-Una, diimplementasikan pada 6 (enam) program dan 15 (lima belas) kegiatan. Program/kegiatan tersebut dialokasikan anggaran melalui belanja operasi sebesar Rp. 7.306.540.796,- (***Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Empat puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah***) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DPA P-APBD Tahun Anggaran 2022. Secara umum hasil capaian kinerja Tahun Anggaran 2022 dalam melaksanakan pembangunan bidang sosial terutama dalam penanganan dan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pada umumnya telah memenuhi target, sasaran dan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2022, antara lain realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Kemudian dianalisa faktor-faktor penyebab dari tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan tersebut.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD

DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2023

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Perangkat Daerah : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Progrsm Renstra OPD sd Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan sd Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
		Bidang Urusan Sosial									
1	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**			
	1.06.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*	*Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah*	*8 Dok*	*Dok*	*Dok*	*Dok*	*#DIV/0!*	*4 Dok*	*4*	*50*

	Perangkat Daerah											
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	Dok	Dok	Dok	*#DIV/0!*	4	Dok	*4*	*200*
1.06.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Tersedianya gaji dan tunjangan ASN*	*31*	*Org*	*Org*	*Org*	*Org*	*#DIV/0!*	*31*	*Org*	*31*	*100*
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31	Org	Org	Org	Org	*#DIV/0!*	31	Org	*31*	*100*
1.06.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	*5*	*Keg*	*Keg*	*Keg*	*Keg*	*#DIV/0!*	*5*	*Keg*	*5*	*100*
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	Paket	Paket	Paket	*#DIV/0!*	1	Paket	*1*	*17*
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	56	Paket	Paket	Paket	Paket	*#DIV/0!*	6	Paket	*6*	*11*
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	Paket	Paket	Paket	*#DIV/0!*	3	Paket	*3*	*150*

1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dok	dok	dok	dok	#DIV/0!	12	dok	*12*	*100*
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	Lap	Lap	Lap	Lap	#DIV/0!	17	Lap	*17*	*100*
1.06.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan perangkat daerah*	*0*	*Unit*	*Unit*	*Unit*	*Unit*	#DIV/0!	*2*	*Unit*	*2*	*#DIV/0!*
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	unit	unit	unit	unit	#DIV/0!	2	unit	*2*	*#DIV/0!*
1.06.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	*410*	*Lap*	*Lap*	*Lap*	*Lap*	#DIV/0!	*401*	*Lap*	*401*	*98*
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350	Lap	Lap	Lap	Lap	#DIV/0!	360	Lap	*360*	*103*
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Lap	Lap	Lap	Lap	#DIV/0!	2	Lap	*2*	*8*

		Listrik										
	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Lap	Lap	Lap	Lap	*#DIV/0!*	39 Lap	*39*	*108*
	1.06.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*	*73 unit*	*unit*	*unit*	*unit*	*#DIV/0!*	*69 unit*	*69*	*95*
	1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	Unit	Unit	Unit	*#DIV/0!*	23 Unit	*23*	*100*
	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Unit	Unit	Unit	*#DIV/0!*	3 Unit	*3*	*100*

		Atau Lapangan													
	1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47	Unit		Unit		Unit		Unit	*#DIV/0!*	43	Unit	*43*	*91*
02	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase kelompok diberdayakan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	***100***	**100**	**%**	*300*	*300*
	1.06.02.2.01	*Pemberdayaan Sosial Komunitas adat Terpencil (KAT)*	*Terlaksananya pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)*	*100*	*Kel*		*Kel*		*Kel*		*Kel*	*#DIV/0!*	*40*	*Kel*	*40*	*40*
	1.06.02.2.01.01	Fasilitasi pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Kel		Kel		Kel		Kel	*#DIV/0!*	20	Kel	*20*	*40*
	1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Kel		Kel		Kel		Kel	*#DIV/0!*	20	Kel	*20*	*40*
	1.06.02.2.03	*Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Kota*	*Meningkatnya kapasitas PSKS kabupaten/kota*	*12*	*Org*		*Org*		*Org*		*Org*	*#DIV/0!*	*12*	*Org*	*12*	*100*
	1.06.02.2.02	Peningkatan kemampuan Potens	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	12	Org		Org		Org		Org	*#DIV/0!*	12	Org	*12*	*100*

			i Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota										
	1.06.02.2.04		Peningkatan Kemampuan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13	Lembaga	Lembaga	Lembaga	Lembaga	*#DIV/0!*	13	Lembaga	*13*	*100*
	1.06.02.2.05		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	*#DIV/0!*	3	Sertifikat	*3*	*38*

03	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penyandang disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	***100***	**100**	**%**	*300*	***300***			
	1.06.04.2.01	*Rehabilitasi sosial Dasar Penyandang disabilitas Terlantar, anak terlantar, Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*	*Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis diluar panti*	*160*	*Org*		*Org*		*Org*		*Org*	*#DIV/0!*	*168*	*Org*	*168*	*105*			
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	90	Org		Org		Org		Org	*#DIV/0!*	50	Org	*50*	*56*			
	1.06.04.2.01.02	Penyediaan sandang	umlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Org		Org		Org		Org	*#DIV/0!*	37	Org	*37*	*62*			
	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu	10	Org		Org		Org		Org	*#DIV/0!*	7	Org	*7*	*70*			

			Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota								
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	Org	Org	Org	*#DIV/0!*	2 Org	*2*	*#DIV/0!*
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	Org	Org	Org	*#DIV/0!*	60 Org	*60*	*#DIV/0!*
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	Org	Org	Org	*#DIV/0!*	2 Org	*2*	*#DIV/0!*
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	Org	Org	Org	*#DIV/0!*	10 Org	*10*	*#DIV/0!*

1.06.04.2.02	*Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*	*Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti*	*68*	*Org*	*Org*	*Org*	*Org*	*#DIV/0!*	*36*	*Org*	*36*	*53*
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	18	Org	Org	Org	Org	*#DIV/0!*	12	Org	*12*	*67*
1.06.04.2.02.03	Penyedian Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Org	Org	Org	Org	*#DIV/0!*	12	Org	*12*	*40*
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Org	Org	Org	Org	*#DIV/0!*	12	Org	*12*	*60*
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi		Dok	Dok	Dok	Dok	*#DIV/0!*	0	Dok	-	*#DIV/0!*

		Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Sosial Kabupaten/Kota								
04	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase penurunan anak terlantar dan fakir miskin (rumah tangga miskin)**	**30 %**	**0,5 %**	**%**	**0,5 %**	***#DIV/0!***	***0,5 %***	***0,5***	***2***
	1.06.05.2.01	*Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar*	*Terpeliharanya anak anak terlantar*	*0 Org*	*Org*	*Org*	*Org*	*#DIV/0!*	*2 Org*	*2*	*#DIV/0!*
	1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 org	org	org	org	*#DIV/0!*	2 org	*2*	*#DIV/0!*
	1.06.05.2.02	*Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota*	*Tersedianya data fakir miskin kabupaten kota*	*107.059 Org*	*Org*	*Org*	*Org*	*#DIV/0!*	*35.580 Org*	*35.580*	*33*
	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah	105.689 Org	Org	Org	Org	*#DIV/0!*	4.500 Org	*4.500*	*4*
	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	24.000 Kel	Kel	Kel	Kel	*#DIV/0!*	22.000 Kel	*22.000*	*92*

	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9000	Kel	Kel		Kel		Kel		*#DIV/0!*	9000	Kel	*9.000*	*100*			
	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Org	Org		Org		Org		*#DIV/0!*	80	Org	*80*	*160*			
05	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**40,2**	**%**	**40,2**	**%**	**40,2**	**%**	**40,2**	**%**	**100**	**43,7**	**%**	**43,7**	**109**			
	1.06.06.2.01	*Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota*	*Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial*	*116*	*Org*	*Org*		*116*	*Org*	*Org*		*0*	*116*	*Org*	*116*	*100*			
	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	75	Org	Org		Org		Org		*#DIV/0!*	100	Org	*100*	*133*			

			Kewenangan Kabupaten/Kota									
	1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Org	Org	Org	Org	*#DIV/0!*	10 Org	*10*	*13*	
	1.06.06.2.01.03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	0 unit	unit	unit	unit	*#DIV/0!*	1 unit	*1*	*#DIV/0!*	
	1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus Bagi kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Org	org	Org	Org	*#DIV/0!*	3 Org	*3*	*60*	
	1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Org	org	Org	Org	*#DIV/0!*	3 Org	*3*	*#DIV/0!*	
	1.06.06.2.02	*Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana*	*Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana*	*50 Org*	*Org*	*Org*	*Org*	*#DIV/0!*	*50 Org*	*50*	*100*	

		Kabupaten Kota															
	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Kampung		kampung		Kampung		Kampung	*#DIV/0!*	1	Kampung	*1*	*100*	
	1.06.06.02.2.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Org		Org		Org		Org	*#DIV/0!*	50	Org	*50*	*100*	
06	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase taman makam pahlawan nasional kab/kota yang dipelihara**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**100**	**%**	**300**	**300**	
	1.06.07.2.01	*Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota*	*Terpeliharanya tman makam pahlawan*	*1*	*Makam*		*makam*	*1*	*Makam*	*1*	*Makam*	*100*	*1*	*Makam*	*2*	*200*	
	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	0	Makam		makam	1	Makam	1	Makam	*100*	1	Makam	*2*	*#DIV/0!*	
		Urusan pemerintahan Wajib Yang															

		Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
		Bidang Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak									

Dari tabel tersebut dapat dilihat evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una, secara umum pelaksanaan program/kegiatan telah mencapai atau sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditetapkan didalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2022, yaitu capaian kinerja 100 %, namun apabila dibandingkan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 memang terjadi fluktuasi pencapaian kinerja, terutama dengan digunakannya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mana terjadi perubahan terhadap Program dan Kegiatan khususnya terkait pembangunan kesejahteraan social. Untuk lebih jelasnya evaluasi kondisi target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari Realisasi 6 (enam) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 36 sub kegiatan yang direncanakan terdapat 1 sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil kegiatan yaitu pada Program Rehabilitasi social, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Pemberian Layanan kedaruratan.
2. Realisasi capaian kinerja program/kegiatan Tahun 2022 yang memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan secara umum yaitu Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, Program Pemberdayaan social, Program Perlindungan dan Jaminan social, Program Penanganan Bencana dan Program pengelolaan Taman Makam pahlawan dan Program Perlindungan Perempuan
3. Faktor-faktor tidak terpenuhinya target kinerja program/kegiatan salah satunya disebabkan oleh kurangnya koordinasi lintas sector, dan belum

optimalnya penggunaan petunjuk teknis dan SOP dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

d. Terpenuhinya target Renstra Dinas Sosial menunjukkan kinerja capaian program/kegiatan telah berjalan sesuai mekanisme alur tahapan penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TOJO UNA UNA

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una di bidang sosial secara umum berdasarkan pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta program-program nasional, provinsi dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap IKK/IKU. Jenis indikator kinerja program/kegiatan yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una. Untuk pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten yaitu terdiri atas 5 jenis layanan dasar, yaitu

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;

b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti;

c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;

d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti;

e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

Analisis keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una dapat dilihat pada table berikut ini :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Nama OPD : Dinas Sosial

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahu n n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13
1	Persentase Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam Dan Sosial Saat dan Pasca Tanggap Darurat Yang Terpenuhi	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Diluar Panti	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOJO UNA UNA

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Dinas Sosial Tojo Una-Una didasarkan pada kewenangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una yaitu unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang sosial.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 - 2026 melalui program dan kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang social atas dasar Misi ;

Misi (1) Touna Tangguh, Mewujudkan masyarakat yang terentaskan dari kemiskinan, Tangguh bencana dan lingkungan berkelanjutan;

Pembangunan sosial yang dilakukan merupakan bagian integral dari pembangunan manusia seutuhnya dilaksanakan sesuai amanat konstitusi UUD 1945 dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Tantangan pembangunan bidang sosial ke depan akan semakin berat seiring dengan timbulnya permasalahan-permasalahan sosial yang sangat komplek serta dinamika permasalahan dibidang sosial yang terjadi terutama Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selaras dengan perkembangan dan perubahan kondisi sosial masyarakat, sehingga penguatan kebijakan pelayanan bagi PMKS secara terpadu dan lintas sektoral untuk meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS perlu ditingkatkan.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala

daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat penghasilan masyarakat, minimnya lapangan pekerjaan dan rendahnya keterampilan kerja masyarakat miskin yang berdampak pada peningkatan angka penduduk miskin di Kabupaten Tojo Una Una.
2. Belum maksimalnya pengoperasian system data PMKS dan verifikasi dan validasi pemutakhiran data kesejahteraan social.
3. Belum optimalnya jangkauan pelayanan social bagi PMKS.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sosial serta sistem Jaminan dan Perlindungan Sosial.
5. Program-program sosial belum sepenuhnya mengcover sasaran pemerlu layanan pembangunan kesejahteraan social.
6. Lemah dan rendahnya SDM aparatur dan pendamping program-program social serta SDM Kesejahteraan Social berbasis masyarakat.
7. Kurang optimalnya Partisipasi dan kerjasama lintas sektor terkait program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Nama SKPD: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Kegiatan :					**Kegiatan :**					
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan :					**Sub Kegiatan :**					
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Ampana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	12.230.000	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Ampana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	12.230.000	
	Kegiatan :					**Kegiatan :**					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ampana	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Org	3.426.517.546	01 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Ampana	Jumlah Orang yang menerima gaji dan	34 Org	3.426.517.546	

								tunjangan ASN			
	Kegiatan :					**Kegiatan :**					
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	01 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Ampana	1	Org	34.305.000	01 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Ampana	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	1	Org	34.305.000
	Kegiatan :					**Kegiatan :**					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan :					**Sub Kegiatana :**					
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ampana Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.233.000	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ampana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.233.000
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ampana Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	73.914.500	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ampana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	73.914.500
	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ampana Jumlah Paket Barang Cetakan dan	3	Paket	10.437.649	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ampana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	3	Paket	10.437.649

				Pengganda an yang Disediakan						Pengga ndaan yang Disedia kan			
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Ampana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dok	1.800.000	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Ampana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	1.800.000
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar daerah dan Dalam daerah Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	Lap	197.734.000	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar daerah dan Dalam daerah Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Lap	197.734.000
	Kegiatan :							**Kegiatan :**					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Sub Kegiatan :							**Sub Kegiatan :**					
	05	Pengadaan Mebel	Ampana	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	05	Pengadaan Mebel	Ampana	Jumlah Unit Mebel yang Disedia kan	0 Unit	-

	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ampana	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan	2	Unit	9.508.000	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ampana	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan	2	Unit	9.508.000	
	Kegiatan :							**Kegiatan :**							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urisan Pemerintah Daerah							Penyediaan Jasa Penunjang Urisan Pemerintah Daerah							
	Sub Kegiatan :							**Sub Kegiatan :**							
	01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Ampana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	180	Lap	1.800.000	01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Ampana	Jumlah surat/ dokumen bermaterai yang dikirim	180	Lap	1.800.000	
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Ampana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Lap	70.934.205	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Ampana	Jenis dan jumlah rekening sumber daya yang dibayar tiap bulan	3	Lap	70.934.205	
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Ampana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39	Lap	571.963.926	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Ampana	Jumlah SDM PNS dan Non PNS/ jenis administrasi keuangan tiap bulan	39	Lap	571.963.926	
	Kegiatan :							**Kegiatan :**							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urisan Pemerintah Daerah							Penyediaan Jasa Penunjang Urisan Pemerintah Daerah							

Sub Kegiatan :							**Sub Kegiatan :**							
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ampana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23	Unit	77.000.000	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ampana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23	Unit	77.000.000	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Ampana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	25.800.000	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Ampana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	25.800.000	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ampana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	Unit	24.960.000	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ampana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelih	35	Unit	24.960.000	

										ara				
	07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ampana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	11.256.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ampana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	11.256.000	
02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**								**02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**					
	Kegiatan :								**Kegiatan :**						
	Pemberdayaan Sosial Komunitas adat Terpencil (KAT)								Pemberdayaan Sosial Komunitas adat Terpencil (KAT)						
	Sub Kegiatan :								**Sub Kegiatan :**						
	01	Fasilitasi pemberdayaan Sosial KAT	Tersebar Kab Tojo Un-Una	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten /Kota	20	Klrg	7.420.000		01	Fasilitasi pemberdayaan Sosial KAT	Tersebar Kab Tojo Un-Una	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Klrg	7.420.000	

	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Tersebar Kab Tojo Un-Una	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota	20	Klrg	6.660.000	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Tersebar Kab Tojo Un-Una	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Klrg	6.660.000	
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Kota							**Kegiatan :** Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Kota							
	Sub Kegiatan :							**Sub Kegiatan :**							
	02	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten Kota	12 Kec	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota	12	Org	82.340.000	02	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Org	82.340.000	

	04	Peningkatan Kemampuan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakatb Kewenangan Kabupaten/ Kota	6 Kec	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota	13	Lembaga	8.197.250	04	Peningkatan Kemampuan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan MasyarakatbKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13	Lembaga	8.197.250	
	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan pengutan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Ampana	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten /Kota	2	Sertifikat	10.000.000	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan pengutan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Sertifikat	10.000.000	
04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**							**04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**					
	Kegiatan :							**Kegiatan :**						
	Rehabilitasi sosial Dasar Penyandang disabilitas Terlantar, anak terlantar,							Rehabilitasi sosial Dasar Penyandang disabilitas Terlantar, anak terlantar,						

Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
Sub Kegiatan :						**Sub Kegiatan :**						
01	Penyediaan Permakanan	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten /Kota	90 Jiwa	15.040.000	01	Penyediaan Permakanan	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Jiwa	15.040.000	
02	Penyediaan sandang	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten /Kota	60 Jiwa	12.500.000	02	Penyediaan sandang	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Jiwa	12.500.000	

	03	Penyediaan Alat Bantu	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten /Kota	10	Jiwa	7.630.000	03	Penyediaan Alat Bantu	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Jiwa	7.630.000	
	Kegiatan : Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							**Kegiatan :** Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						
	Sub Kegiatan :							**Sub Kegiatan :**						
	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten /Kota	5	Jiwa	3.000.000	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Jiwa	3.000.000	
	03	Penyedian Permakanan	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai	5	Jiwa	7.010.000	03	Penyedian Permakanan	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan	5	Jiwa	7.010.000	

				dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten /Kota						Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			
	04	Penyediaan Sandang	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten /Kota	14 Jiwa	5.000.000	04	Penyediaan Sandang	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Jiwa	5.000.000	
05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**					
	Kegiatan :						**Kegiatan :**						
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan :						**Sub Kegiatan :**						
	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Tojo Una-Una	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah	5000 Org	22.169.000	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Tojo Una-Una	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah	5000 Org	22.169.000	

	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupatem/ Kota	Kab Tojo Una-Una	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten /Kota	22.620	Klrg	12.825.000	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupatem/Kota	Kab Tojo Una-Una	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	22.620	Klrg	12.825.000	
	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota	9.000	Klrg	151.520.000	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.000	Klrg	151.520.000	
	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	20	Org	125.130.000	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekono	20	Org	125.130.000	

			Kewenangan Kabupaten /Kota				mi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
6	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**					**06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			
	Kegiatan :					**Kegiatan :**				
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota				
	Sub Kegiatan :					**Sub Kegiatan :**				
	01 Penyediaan Makanan	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten /Kota	50 Org	23.680.000	01 Penyediaan Makanan	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Org	23.680.000

	02	Penyediaan Sandang	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	40	Org	6.010.000	02	Penyediaan Sandang	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Org	6.010.000	
	03	Penyediaan Tempat penampungan pengungsi	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten /Kota	1	Unit	3.519.250	03	Penyediaan Tempat penampungan pengungsi	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	3.519.250	

	04	Penanganan Khusus Bagi kelompok Rentan	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten /Kota	10	Org	4.210.000	04	Penanganan Khusus Bagi kelompok Rentan	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Org	4.210.000	
	Kegiatan :							**Kegiatan :**							
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Kota							Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Kota							
	Sub Kegiatan :							**Sub Kegiatan :**							
	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kec Tojo	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	1	Kmpung	2.020.000	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kec Tojo	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Kmpung	2.020.000	

	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Ampana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	25	Org	3.750.000	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Ampana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Org	3.750.000	
7	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**							**07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**							
	Kegiatan :							**Kegiatan :**								
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota							Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota								
	Sub Kegiatan :							**Sub Kegiatan :**								
	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Ampana	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten /Kota	1	Makam	8.000.000	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Ampana	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	Makam	8.000.000		
							5.064.249.076								**5.064.249.076**	

Berdasarkan tabel review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dapat dilihat bahwa antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan telah sesuai baik program dan kegiatan dan besaran nilai anggaran yang dibutuhkan.

2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi, konsultasi dan pengajuan usulan, penelaahan serta penelitian dari bidang-bidang dan sekretariat di Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una. Bidang-bidang memperoleh input/masukan program/kegiatan atas dasar kebutuhan prioritas program/kegiatan dan usulan dari bawah/masyarakat/stakeholder maupun koordinasi dengan Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tengah, sedangkan untuk sekretariat didasarkan atas kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una. Selanjutnya usulan dari bidang-bidang dan sekretariat tersebut harus diketahui dan disetujui pimpinan/Kepala Dinas Sosial selaku pemangku kebijakan di Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian diverifikasi dan diklarifikasi dengan BAPPEDA Kabupaten Tojo Una-Una sebagai bahan usulan program dan kegiatan yang akan di input melalui Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Adapun usulan yang ditujukan untuk Dinas Sosial secara keseluruhan sudah sesuai dengan isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan social yang merupakan tugas pokok dari Dinas Sosial. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang di emban oleh Dinas Sosial Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Kabupaten Tojo Una-Una**	**Persentase penurunan anak terlantar dan fakir miskin (rumah tangga miskin)**		
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		***Persentase masyarakat dalam data kesejahteraan sosial/Fakir miskin kabupaten/kota yang memperoleh bantuan***		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		***Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota***		
	Usaha Ekonomi Produktif perorangan (UEP)				
1	UEP Meubel an. ABD RAHMAN MOHAMAD	Kel Muara Toba Kec Ratolindo		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)
2	UEP Pertukangan an. ABRAM GOU	Desa Labuan Kec Ratolindo		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)
3	UEP Pertukangan an. AGUS BILALE	Kel. Bailo Baru Kec Ampana Kota		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)
4	UEP Pertukangan an. ARDI AR. SARU	Desa Bahari Kec Tojo		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)
5	UEP Pertukangan an. ARIFIN BANDU	Kel Dondo Barat Kec Ratolindo		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)
6	UEP Pertukangan an. ARMIN ABDULAH	Kel. Dondo Kec Ratolindo		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)

7	UEP Pembuatan Kue an. ELSI M. BOKINGS	Kel Dondo Kec Ratolindo		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)
8	UEP Pembuatan Pot an. FADLI RAPULELA	Desa Sansarino Kec Ampana Kota		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)
9	UEP Usaha Salon an. HADIJAH B	Desa Uekuli Kec Tojo		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)
10	UEP Perlengkapan Pesta an. MARIANI A. LAPARIGI	Desa Uekuli Kec Tojo		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)
11	UEP Pertukangan an. KAMRIN LABUKA	Desa Kadoda kec Talatako		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)
12	UEP Pembuatan Kripik an. ARUMI	Desa Labuan Kec Ratolindo		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)
13	UEP Perbengkelan an. MOH. SYAHRIL S.B	Kel. Bailo Kec Ampana Kota		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)
14	UEP Usaha Menjahit an. NURNANINGSIH	Desa Lebiti Kec Togean		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)
15	UEP Pertukangan an. RAHMAN JIDAR	Desa Labuan Kec Ratolindo		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)
16	UEP Penangkapan Ikan an. RAMLAN K. WUMU	Desa Dolong B Kec Wakep		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)
17	UEP Perbengkelan an. RIZAL A	Kel Malotong Kec Ampana Kota		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)
18	UEP Pertukangan an. SAHARUDIN MUSTARI	Desa Benteng Kec Togean		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)
19	UEP Warung Makan an. SITI NURAINI LABERO	Desa Tombiano Kec Tojo Barat		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)
20	UEP Pertukangan an. SUDIRMAN	Kel. Dondo Kec Ratolindo		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)
21	UEP Pertukangan an. SYARIFUDIN D. SAHRAN	Kel Dondo Kec Ratolindo		1 Orang	Usulan langsung (aspirasi)
	Kelompok Uaha Bersama (KUBE)				
1	KUBE Togean Jaya (Usaha Las)	Kel Uentanaga A Kec Ratolindo		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)
2	KUBE Adzan Bengkel (Usaha Perbengkelan)	Desa Marowo Kec Ulubongka		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)
3	KUBE Mekar Jaya (Usaha Pertukangan)	Desa Podi Kec Tojo		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)

4	KUBE Tanjung Lawaka (Usaha Pembuatan Kripik)	Desa Labuan Kec Ratolindo		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)
5	KUBE Pandelengi Membangun (Usaha Pertukangan	Kel Ampana Kec Ampana Kota		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)
6	KUBE Mahkota Motor (Usaha Perbengkelan)	Kel Muara Toba Kec Ratolindo		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)
7	KUBE Aren Matao (Usaha Aren)	Desa Sampobae Kec Togean		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)
8	KUBE Depot Air Minum Bambalo (Usaha Depot Air Minum)	Desa Bambalo Kec Tojo Barat		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)
9	KUBE Melati (Usaha Tata Boga)	Kel labiabae Kec Ampana Kota		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)
10	KUBE Bengkel Usaha Baru (Usaha Perbengkelan)	Desa Sabo Kec Ampana Tete		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)
11	KUBE Backery (Usaha Tata Boga	Kel Ampana Kec Ampana Kota		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)
12	KUBE Berkah (Usaha Pembuatan Kue)	Desa Pusungi Kec Ampana Tete		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)
13	KUBE Sederhana (Usaha Sayur Masak)	Kel Dondo Kec Ratolindo		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)
14	KUBE Meubel Longge (Usaha Meubel)	Desa Longge Kec Ampana Tete		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)
15	KUBE Catering Selera Nusantara (Usaha Catering)	Desa Uekuli Kec Tojo		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)
16	KUBE Harapan (Usaha Pertukangan)	Kel Dondo Kec Ratolindo		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)
17	KUBE Sila Loundry (Usaha Loundry)	Kel Dondo Kec Ratolindo		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)
18	KUBE UD. Rappang (Usaha Meubel)	Desa Malei Kec Tojo Barat		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)
19	KUBE Karya Bersama (Usaha Pertukangan)	Kel Dondo Kec Ratolindo		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)
20	KUBE Cina Sejahtera (Usaha Perbengkelan)	Desa Wakai Kec Una Una		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)
21	KUBE Fathir (Usaha Perbengkelan)	Kel Dondo Barat Kec Ratolindo		1 Kelompok	Usulan langsung (aspirasi)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan pada bagian kesatu klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari atas urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang menjadi urusan kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaiatan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar termasuk didalamnya bidang sosial. Sesuai dengan Tugas Pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una yaitu unsur pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang sosial, dalam Misi 1 dan Misi 4, program-program didalam pembangunan bidang sosial dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak meliputi :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana

5. Program Pengelolaan Tamn Makam Pahlawan

6. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

7. Program Perlindungan Perempuan

8. Program Pemenuhan Hak Anak

9. Program Perlindungan Khusus Anak

Program pembangunan bidang sosial dancpemberdayaan perempuan serta perlindungan anak tersebut merupakan upaya mewujudkan perbaikan atas kondisi tata kehidupan dan sosial yang lebih baik dan meningkat kesejahteraan sosialnya. Nilai-nilai sosial lebih diarahkan dalam menumbuhkembangkan nilai tanggung jawab, rasa kepedulian sosial dan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial kelompok-kelompok marginal seperti diantaranya kelompok masyarakat yang kurang beruntung, rentan dan kelompok masyarakat yang karena kondisi fisik dan mentalnya masih belum mampu untuk melakukan peran-peran sosialnya, serta kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Disadari bahwa hal ini merupakan tantangan ke depan yang semakin berat, jika tidak dilakukan penanganan secara tepat dan terpadu akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas, melebar dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat yang lebih komplek. Kondisi ini merupakan isu aktual khususnya di bidang sosial yang membutuhkan penanganan segera.

Prioritas dan Sasaran dinas social di sajikan dalam tabel berikut

TABEL 3.1
PRIORITAS DAN SASARAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TOJO UNA-UNA

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Menurunkan Angka kemiskinan	Terbangunnya sinergitas dan ketangguhan sosial di semua komponen masyarakat	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Tersedianya Data fakir Miskin	Persentase Data Terpadu Kemiskinan Yang Handal
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam Dan Sosial Saat dan Pasca Tanggap Darurat Daerah	Persentase Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam Dan Sosial Saat dan Pasca Tanggap Darurat Yang Terpenuhi
				Pelaksanaan Perlindungan Sosial dan Pemenuhan kebutuhan dasar Bidang Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Diluar Panti
					Persentase Masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan pendampingan kewirausahaan sosial
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Partisipasi perempuan dalam Pembagunan Daerah	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Cakupan partisipasi perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

				Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat Layanan Bantuan hukum	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapat Layanan Bantuan Hukum

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun serta memberikan manfaat dalam meningkatkan prioritas pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023 berorientasi pada RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una, Renstra, visi, misi maupun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una. Isu strategis bidang sosial sesuai RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 adalah Penguatan kebijakan pelayanan bagi PMKS secara terpadu dan lintas sektoral, untuk meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS.

Selanjutnya hubungan antara tujuan dinas social dan sasaran daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3.2
TUJUAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024
1	2	3	4
1	Menurunkan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani	47%
2	Meningkatnya Partisipasi perempuan dalam Pembagunan Daerah	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	94,02%
3	Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una Layak Anak	Kota Layak Anak	58,33%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan program dan kegiatan yang merupakan penunjang pembangunan kesejahteraan sosial yang didasarkan pada RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-20216. Salah satu factor yang menjadi bahan pertimbangan dilaksanakannya program dan kegiatan yaitu pengentasan kemiskinan, yang mana program dan kegiatan yang mencakup pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial adalah program utama dalam pengentasan kemiskinan.

Program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 terdiri dari 6 Program dan 15 Kegiatan. Lokasi sasaran Program dan kegiatan tersebar di kabupaten tojo una-una dengan focus kegiatan Pemberdayaan Sosial dikhusukan pada masyarakat Komunitas adat Terpencil (KAT),

rehabilitasi sosial dengan sasaran penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan anak terlantar, dan untuk perlindungan dan jaminan mencakup sasaran penerima bantuan KUBE dan UEP serta penerima program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dan untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan , perlindungan perempuan dan anak, di fokuskan pada pelayanan bagi korban tindak kekerasan bagi perempuan dan anak. Adapun rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**6.369.042.738,00**							**7.274.486.227,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.840.242.738,00**							**6.666.366.227,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**5.840.242.738,00**							**6.666.366.227,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**BB Nilai**		**BB Nilai**	**BB Nilai**	**4.848.734.415,00**						**BB Nilai**	**5.576.234.227,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja*	100 %		100 %	100 %	20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Dokumen	25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Dokumen	25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN*	100 %		100 %	100 %	3.291.968.635,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara	40 Orang/bulan	3.785.763.930,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.291.968.635,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara	40 Orang/bulan	3.785.763.930,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan*	100 %		100 %	100 %	10.000.000,00			-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara	1 Orang	11.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Sumoli	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara	1 Orang	11.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	100 %		100 %	100 %	379.083.173,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	435.945.649,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	5.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	104.502.886,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara	7 Paket	120.178.319,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.780.287,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara	3 Paket	12.397.330,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara	12 Dokumen	2.070.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	257.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara	17 Laporan	295.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya sarana prasarana penunjang urusan pemerintah*	5 Unit		5 Unit	5 Unit	83.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara	5 Unit	95.450.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	83.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara	5 Unit	95.450.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %		100 %	100 %	755.282.607,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	180 Laporan	868.564.648,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	180 Laporan		180 Laporan	180 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	180 Laporan	3.450.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	90.009.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Laporan	103.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan		39 Laporan	39 Laporan	662.273.607,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	39 Laporan	761.614.648,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang milik daerah*	73 Unit		73 Unit	73 Unit	309.400.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Barang Milik Daerah (BMD)	33 Unit	354.010.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit		33 Unit	33 Unit	78.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Barang Milik Daerah (BMD)	33 Unit	87.900.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	141.400.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Barang Milik Daerah (BMD)	4 Unit	162.610.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	35 Unit	40.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Barang Milik Daerah (BMD)	35 Unit	46.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Barang Milik Daerah (BMD)	1 Unit	57.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase Kelompok di berdayakan***	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	**221.030.000,00**						**100 persen**	**239.677.000,00**	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	*Persentase terlaksananya pemberdayaan sosial bagi komunitas adat terpencil (KAT)*	100 %		100 %	100 %	1.480.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	20 Keluarga	1.702.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga		20 Keluarga	20 Keluarga	1.480.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	20 Keluarga	1.702.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan kapasitas PSKS Kabupaten/Kota*	100 %		100 %	100 %	219.550.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Orang	237.975.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang		12 Orang	12 Orang	82.300.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Orang	87.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Lembaga		13 Lembaga	13 Lembaga	137.250.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	-	13 Lembaga	150.975.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)***	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	**54.000.000,00**						**100 persen**	**62.100.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti*	100 %		100 %	100 %	51.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	-	90 Orang	58.650.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang		90 Orang	90 Orang	30.830.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	-	90 Orang	35.454.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	20.170.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	-	10 Orang	23.195.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti*	100 %		100 %	100 %	3.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	-	18 Orang	3.450.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang		18 Orang	18 Orang	1.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	-	18 Orang	1.725.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		30 Orang	30 Orang	1.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	-	30 Orang	1.725.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase penurunan anak terlantar dan fakir miskin (rumah tangga miskin)***	**0,5 persen**		**0,5 persen**	**0,5 persen**	**679.553.323,00**						**0,5 persen**	**745.891.250,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase masyarakat dalam data kesejahteraan sosial/Fakir miskin kabupaten/kota yang memperoleh bantuan*	100 %		100 %	100 %	679.553.323,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	-	5000 Orang	745.891.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5000 Orang		5000 Orang	5000 Orang	6.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	-	5000 Orang	6.900.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	22000 Keluarga		22000 Keluarga	22000 Keluarga	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	-	22000 Keluarga	17.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9000 Keluarga		9000 Keluarga	9000 Keluarga	265.075.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	-	9000 Keluarga	304.836.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang		60 Orang	60 Orang	393.478.323,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	-	60 Orang	416.905.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota***	**50,7 persen**		**50,7 persen**	**50,7 persen**	**26.925.000,00**						**50,7 persen**	**30.963.750,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial*	70 %		70 %	70 %	16.925.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	-	80 Orang	19.463.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang		80 Orang	80 Orang	8.420.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	-	80 Orang	9.683.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang		75 Orang	75 Orang	3.270.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	75 Orang	3.760.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit		1 Unit	1 Unit	4.175.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Unit	4.801.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		5 Orang	5 Orang	1.060.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Orang	1.219.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya kegiatan kesiapsiagaan bencana*	100 %		100 %	100 %	10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	50 Orang	11.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	50 Orang	11.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara***	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**10.000.000,00**						**100 Persen**	**11.500.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Terpeliharanya taman makam pahlawan kabupaten kota*	1 Makam		1 Makam	1 Makam	10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Makam	11.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam		1 Makam	1 Makam	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Makam	11.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**528.800.000,00**							**608.120.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**528.800.000,00**							**608.120.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Indeks Pembangunan Gender***	**93,22 Persen**		**93,22 Persen**	**93,22 Persen**	**45.000.000,00**						**93,22 Persen**	**51.750.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Volume pelembagaan yang dilaksanakan oleh Pemda dalam mendukung PUG*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	45.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Perangkat Daerah	51.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah		1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	45.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Perangkat Daerah	51.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)***	**2,67 Poin**		**2,67 Poin**	**2,67 Poin**	**234.400.000,00**						**2,67 Poin**	**269.560.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	46.074.000,00			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	20 Dokumen	52.985.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	46.074.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	20 Dokumen	52.985.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang dilayani*	20 Orang		20 Orang	20 Orang	142.252.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	20 Orang	163.589.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	20 Orang	17.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Layanan		40 Layanan	40 Layanan	127.252.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	40 Layanan	146.339.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten yang dikembangkan*	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	46.074.000,00			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	30 Orang	52.985.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang		30 Orang	30 Orang	46.074.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	30 Orang	52.985.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Persentase pemberdayaan lembaga perempuan dan anak***	**73,00 Persen**		**73,00 Persen**	**73,00 Persen**	**30.000.000,00**						**73,00 Persen**	**34.500.000,00**	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten yang dikembangkan*	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	30.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	6 Dokumen	34.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	6 Dokumen	34.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**	**-**		**-**	**-**	**219.400.000,00**						**-**	**252.310.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	46.074.000,00			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	20 Dokumen	52.985.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	46.074.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	20 Dokumen	52.985.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	127.252.000,00			-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	20 Layanan	146.339.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan		20 Layanan	20 Layanan	127.252.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	20 Layanan	146.339.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah lembaga*	2 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	46.074.000,00			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	20 Dokumen	52.985.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	46.074.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	20 Dokumen	52.985.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	J U M L A H							**6.369.042.738,00**							**7.274.486.227,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan didalam Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una, yang diimplementasikan pada program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di bidang sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar dibidang sosial bagi masyakat Kabupaten Tojo Una-Una terutama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteran Sosial (PSKS).

Adapun rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam rencana kerja dinas social Kabupaten tojo Una-Una diantaranya didasarkan kepada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dimana, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu peran Dinas social yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan yang ada dengan memberikan pelayanan yang optimal melalui program dan kegiatan yang telah disusun.

Anggaran untuk tahun 2024 dengan pagu indikatif sebesar Rp**.** 5.883.005.415,00 (***Lima miliar Delapan ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ribu Empat Ratus Lima Belas rupiah***).

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten TojoUna-Una.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi Bupati Tojo UnaUna.

Ampana, 2023

Penyusun

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN TOJO UNA – UNA 2024



OLEH :

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN TOJO UNA – UNA

JALAN TADULAKO NOMOR 13 AMPANA TELP DAN FAKS

E-Mail : nakertrans_touna@yahoo.co.id

No. Telp (0464) 21640 - 22223

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-nya, tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) yang dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024.

Renja ini secara garis besar mengupas tentang Evaluasi pelaksanaan rencana kerja, Analisis kinerja pelayanan kantor, Review rancangan awal RKPD, Isu-isu penting, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Serta Indikator Kinerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan segala keterbatasan dan kesempurnaan penyusunan. Penyusunan Renja dari perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu disini. Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya, oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna sempurnanya Renja ini. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 maupun tahun-tahun berikutnya yang akan dirumuskan dalam dokumen Renstra tahun 2021-2026 dalam melaksanakan tugasnya maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Ampana, 2023

Tim Penyusun

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Alamat : Jalan Tadulako No. 13 Ampana, Kode Pos 94683

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TOJO UNA – UNA
NOMOR : / /NAKERTRANS/2023

T E N T A N G
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TOJO UNAUNA

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2014;
b. Bahwa Rencana Kerja(Renja) SKPD memuat arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksananankan pembangunan daerah yang berkesinambungan ;
c. bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2016 memuat program / Kegiatanpembangunan SKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)tahun 2016;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c,perlu Menetapkan Surat Keputusan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah(RENJA SKPD) Dinas Sosial Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

Memperhatikan :

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganan ara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-una 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Tojo Una-una Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten TojoUna-una Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 26).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas

KESATU : Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024, yang selanjutnya disebut (RENJA SKPD Dinas Sosial) Tahun 2024,adalah Dokumen Program / kegiatan periode 1 (satu) tahun.

KEDUA : RENJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Bab I. PENDAHULUAN.
b. Bab II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
c. Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

d. Ban IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KETIGA : e. Bab IV.PENUTUP.

RENJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Nomor Tahun yang memuat Program / kegiatan, Indikator kinerja, lokasi kegiatan, Target pencapaian kinerja dan pagu indikatif.

Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampana
Pada Tanggal : Maret 2023
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TOJO UNA UNA

Ir. MUHAMMAD NUR RAHMAT, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681001 199103 1 004

Tembusan Yth :
1. Bupati Tojo Una Una di Ampana (Sebagai Laporan)

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Alamat : Jalan Tadulako No. 13 Kelurahan Ampana, Kode Pos 94683

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TOJO UNA – UNA
NOMOR : 188.45/ /NAKERTRANS /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 PADA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 125 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, maka seluruh OPD segera membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 dan;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Penyusun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD Kabupaten Tojo Una-Una;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tojo Una-una di Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

KETIGA : a. Menyiapkan data penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 Pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una;

b. Menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una;

Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024 melalui DPA OPD.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal Maret 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ir. MUHAMMAD NUR RAHMAT, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19641001 199103 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Nomor : 188.45/ /NAKERTRANS/2023
Tanggal : Maret 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Penyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ketua Tim : KEPALA DINAS
Sekretaris Tim : SEKRETARIS
Kelompok Kerja :

1. Bidang Penempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja
   Koordinator : Kepala Bidang Penempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja
   Anggota : Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
2. Bidang Hubungan Industrial
   Koordinator : Kepala Bidang Hubungan Industrial
   Anggota : Jabatan Fungsional Mediator Ketenagakerjaa
3. Bidang Ketransmigrasian
   Koordinator : Kepala ketransmigrasian
   Anggota : Jabatan Fungsional Pengelola Swadaya Masyarakat
4. Koordinator : Kasubbag Penyusunan Program
   Anggota : Staf

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal Maret 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ir. MUHAMMAD NUR RAHMAT, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19641001 199103 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una adalah dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai unit kerja yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una yang handal dengan dukungan

aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 mempunyai arti strategis didalam mendukung penyelenggaraan/pelaksanaan pemerintahan/pembangunan tahunan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, sebagai berikut :

1. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan dokumen perencanaan yang secara substansial menerjemahkan visi dan misi Kabupaten Tojo Una-Una dalam bentuk program/kegiatan SKPD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditetapkan didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan acuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi didalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS), melalui perencanaan program/kegiatan yang akan diimplementasikan di Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
3. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan, serta untuk mengetahui tingkat capaian kinerja tahunan yang telah dicapai sebagai wujud keberhasilan antara target dan realisasi capaian kinerja SKPD.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una, maka disusunlah Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una tahunan sebagai penjabaran dari

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una yang akan ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nmegara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-una 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Tojo Una-una Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-una Tahun

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una tahun 2024.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini sebagai media untuk menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

Dan adapun maksud di susunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Staf Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin di capai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una.

2. Terwujudnya keselarasan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una dengan perencanaan tahunan.
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan konsitensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, proses penyusunan Renja, keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja Kementrian/Lembaga, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan dengan RAPBD, landasan hukum, maksud dan tujuan Renja, dan sistematika penulisan sebagai berikut.

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TOJO UNA UNA TAHUN 2022

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun lalu tahun 2022

(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2023 (tahun n-1), target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program/kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD/atau realisasi APBD, sebagai berikut :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, tujuan dan sasaran SKPD serta program dan kegiatan, sebagai berikut :

3.1. Telaahan terhadap Kebjakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TOJO UNA UNA TAHUN 2022

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una Tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 (Tiga Puluh Empat) urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 (Dua Puluh Enam) urusan wajib dan 8 (Delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una Tahun-Tahun sebelumnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TOJO UNA UNA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TOJO UNA UNA

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023) dalam rangka penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang sosial dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 setelah Perubahan APBD Tahun 2022 (P-APBD 2021) Kabupaten Tojo Una-Una, diimplementasikan pada 5 (Lima) program dan 9 (Sembilan) kegiatan. Program/kegiatan tersebut dialokasikan anggaran melalui belanja operasi sebesar Rp. 4.655.972.406 (***Empat Milyar Enam ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rinu Empat Ratus Enam Rupiah***) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DPA P-APBD Tahun Anggaran 2022. Secara umum hasil capaian kinerja Tahun Anggaran 2022 dalam melaksanakan pembangunan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada umumnya telah memenuhi target, sasaran dan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan ketransmigrasian Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2022, antara lain realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Kemudian dianalisa faktor-faktor penyebab dari tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan tersebut.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2022 KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD sd Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan sd Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
		Bidang Urusan Sosial									
1	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**			
	1.06.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Tersedianya gaji dan tunjangan ASN*	*34 Org*	*34 Org*	*34 Org*	*34 Org*	*100*	*34 Org*	*102*	*300*
	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Org	34 Org	34 Org	34 Org	*100*	34 Org	*102*	*300*
	1.06.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	*6 Keg*	*6 Keg*	*6 Keg*	*6 Keg*	*100*	*6 Keg*	*18*	*300*
	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	7 Paket	11 Paket	3 Paket	3 Paket	*100*	0 Paket	*14*	*200*

		Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan														
	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	*100*	10	Paket	*40*	*200*
	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	2	Paket	2	Paket	*100*	0	Paket	*4*	*200*
	1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dok	24	Dok	24	dok	24	dok	*100*	12	dok	*60*	*2.50*
	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Lap	30	Lap	30	Lap	30	Lap	*100*	30	Lap	*90*	*300*
	1.06.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	*388*	*Lap*	*388*	*Lap*	*388*	*Lap*	*388*	*Lap*	*100*	*401*	*Lap*	*1.177*	*303*
	1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	101	Lap	101	Lap	101	Lap	101	Lap	*100*	50	Lap	*252*	*2.49*
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Lap	3	Lap	3	Lap	3	Lap	*100*	3	Lap	*6*	*200*
	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Lap	36	Lap	36	Lap	36	Lap	*100*	39	Lap	*111*	*308*
	1.06.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*	*11*	*Unit*	*11*	*Unit*	*11*	*unit*	*11*	*unit*	*100*	*11*	*unit*	*330*	*300*
	1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	*100*	2	Unit	*200*	*100*

		Dinas Jabatan									
	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	9 Unit	11 Unit	*100*	11 Unit	*100*	*110*
	1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	*100*	30 Unit	*900*	*300*
02	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	***100***	**100 %**	*300*	*300*
	2.07.03.201	*Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*	*Terlaksananya pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100*	*100 %*	*100*	*300*
	2.07.03.201.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	16 Orang	160	100
	2.07.03.201.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	*100*	0 Unit	*200*	*100*
	2.07.03.205	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terukurnya Produktifitas Tenaga Kerja Tingkat Daerah Kabuapten / Kota								
	2.07.03.205.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing	1 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	*0*	0 Dok	*0 Dok*	*0 Dok*

			Tenaga Kerja di Tingkat Daerah								
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	100 %	100 %	100 %	100 %	*100*	100 %	*300*	*300*
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya Informasi Pasar Kerja								
	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online yang di lakukan	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 kDok	*1 Dok*	0 Dok	*200*	*0,66*
	2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Layanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota								
	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 Orang	0 Orang	20 Orang	20 Orang	*100*	20 Orang	*400*	*200*
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersedianya Dikumen RTK Makro dan Mikro								
	2.07.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Dokumen RTKD Makro dan Mikro								
	2.07.02.201	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	*0 Dok*	1 Dok	*100*	*100*

03	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	***100***	**100**	**%**	*300*	***300***
	2.07.05.2.02	*Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota*	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	***100***	**100**	**%**	*300*	***300***
	2.07.05.2.02	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25	Perkara	5	Perkara	8	Perkara	8	Perkara	*100*	5	Perkara	*180*	*700*
	2.07.05.2.02	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga	1	Lemb	1	Lemb	1	Lemb	*100*	1	Lemb	*300*	*100*
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peraturan dan Pengesahan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota													

	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	0 Lap	0 Lap	0 Lap	*0*	1 Lap	*100*	*100*
	3.32.02	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase penempatan transmigrasi baru yang direncanakan**								
		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Lokasi Transmigrasi								
		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 Dok	1 Dok	0 Dok	0 Dok	*0 Dok*	0 Dok	*100*	*100*
	3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Nilai Rata - rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang di revitalisasi**								
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu Daerah Kabupaten / Kota								
	3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Lap	0 Lap	10 Lap	10 Lap	*100*	0 Lap	*100*	*100*

	3.32.03.2.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	3	Dok	0	Dok	1	Dok	1	Dok	*100*	1	Dok	*200*	*0,66*
	3.32.03.2.01.06	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	18	KK	0	KK	18	KK	18	KK	*100*	0	KK	*180*	*100*
	3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**ilai Rata - rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang di revitalisasi**													
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Berkembangnya Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian													
	3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	18	KK	0	KK	18	KK	18	KK	*100*	18	KK	*360*	*200*

Dari tabel tersebut dapat dilihat evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una, secara umum pelaksanaan program/kegiatan telah mencapai atau sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditetapkan didalam Renja Dinas Tenaga Kerja dann Tansigrasi Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2022, yaitu capaian kinerja 100 %, namun apabila dibandingkan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 memang terjadi fluktuasi pencapaian kinerja, terutama dengan digunakannya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mana terjadi perubahan terhadap Program dan Kegiatan. Untuk lebih jelasnya evaluasi kondisi target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi capaian kinerja program/kegiatan Tahun 2022 yang memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan secara umum yaitu Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Produktifitas Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial.
2. Terpenuhinya target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan kinerja capaian program/kegiatan telah berjalan sesuai mekanisme alur tahapan penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TOJO UNA UNA

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una di bidang sosial secara umum berdasarkan pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta program-program nasional,

provinsi dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap IKK/IKU. Jenis indikator kinerja program/kegiatan yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una. Untuk pelayanan Bukan Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 83 Tahun 2022.

Analisis keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una dapat dilihat pada table berikut ini :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahu n n-1)	Tahun 2024 (Tahu n n)	Tahun 2025 (Tahu n n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13
1	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		100 %	20	10	30	40	20	10	30	40	
2	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		100 %	0	20	40	40	0	20	40	40	
3	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial		100 %	0	50	25	25	0	50	25	25	

	(PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan											
4	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 %	20	10	50	20	20	10	50	20	
5	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		100 %	20	20	20	20	20	20	20	20	

6	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 %	50	0	20	30	50	0	20	30	
7	Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang Telah Disiapkan		100 %	100	0	0	0	100	0	0	0	
8	Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi		100 %	100	0	0	0	100	0	0	0	
9	Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		100 %	0	40	20	20	20	20	20	20	
10	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan		100 %	20	20	20	20	20	20	20	20	

	bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi											

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TOJO UNA UNA

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una didasarkan pada kewenangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una yaitu unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 - 2026 melalui program dan kegiatan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Atas dasar Misi 1 (satu) Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una Una yaitu Touna Tangguh Mewujudkan masyarakat yang terentaskan dari kemiskinan, Tangguh bencana dan lingkungan berkelanjutan.

Pembangunan Ketenagakerjaan yang dilakukan merupakan bagian integral dari pembangunan manusia seutuhnya dilaksanakan sesuai amanat konstitusi UUD 1945 dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Revisi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tantangan pembangunan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ke depan akan semakin berat seiring dengan timbulnya permasalahan-permasalahan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang sangat komplek serta dinamika permasalahan dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang terjadi terutama Masalah Pengangguran Terbuka, Informasi Pasar Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan Keahlian Tenaga Kerja, Masalah – masalah Hubungan Industrial serta masalah peningkatan kemandirian Ketransmigrasian dan Aksesibilitas menuju Satuan Permukiman Transmigrasi.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una sebagai berikut:

1. Pengangguran Terbuka
2. Kesempatan Kerja yang terbatas dan Minimnya Informasi Pasar Kerja
3. Masalah – Masalah Hubungan Industrial
4. Aksesibilitas menuju Satuan Permukiman Transmigrasi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una Una berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Nama SKPD: Dinas Sosial

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah **Sub Kegiatan :**					**Kegiatan :** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :					
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ampana	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Org		01 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Ampana	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Org		
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah **Sub Kegiatan :**					**Kegiatan :** Administrasi Umum Perangkat Daerah **Sub Kegiatana :**					
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ampana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Pkt	1.450.000	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ampana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Pkt	1.451.250	
	02 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Pkt	2.657.500	02 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ampana	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Pkt	2.657.500	

	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ampana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Pkt	95.949.313	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ampana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Pkt	95.949.313	
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ampana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Pkt	44.718.750	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ampana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Pkt	44.718.750	
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Ampana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dok	3.600.000	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Ampana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	3.600.000	
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar daerah dan Dalam daerah Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Lap	252.812.000	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar daerah dan Dalam daerah Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Lap	252.812.000	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urisan Pemerintah Daerah **Sub Kegiatan :**							**Kegiatan :** Penyediaan Jasa Penunjang Urisan Pemerintah Daerah **Sub Kegiatan :**						
	01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Ampana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50	Lap	4.020.000	01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Ampana	Jumlah surat/dokumen bermaterai yang dikirim	30 Lap	4.020.000	
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Ampana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	39	Lap	109.086.940	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Ampana	Jenis dan jumlah rekening sumberdaya yang dibayar tiap bulan	39 Lap	109.086.940	
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Ampana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Lap	463.455.195	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Ampana	Jumlah SDM PNS dan Non PNS/ jenis administrasi keuangan tiap bulan	36 Lap	463.455.195	

	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urisan Pemerintah Daerah **Sub Kegiatan :**						**Kegiatan :** Penyediaan Jasa Penunjang Urisan Pemerintah Daerah **Sub Kegiatan :**					
	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ampana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	60.000.000	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ampana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	60.000.000
	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Ampana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	29.500.000	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Ampana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	29.500.000
	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Ampana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	18.390.000	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ampana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	18.390.000
02	**PROGRAM PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**02 PROGRAM PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**					
	Kegiatan : PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI **Sub Kegiatan :**						**Kegiatan :** PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI **Sub Kegiatan :**					
	01 Pengadaan Saran Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kec. Ampana Tete (BLK)	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1	Pkt	67.879.987	01 Pengadaan Saran Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kec. Ampana Tete (BLK)	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1	Pkt	67.879.987
03	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**03 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**					
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja **Sub Kegiatan :**						**Kegiatan :** Pengelolaan Informasi Pasar Kerja **Sub Kegiatan :**					

	01	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000	Org	71.287.000	01	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tersebar di Kab Tojo Una-Una	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000	Org	71.287.000	
	Kegiatan : Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :**							**Kegiatan :** Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :**							
	01	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Wilayah Kepulauan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20	Org	56.175.250	01	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Wilayah Kepulauan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20	Org	56.175.250	
04	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**							**04**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						
	Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :**							**Kegiatan :** Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :**							
	01	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada Kepentingan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab Tojo Una-Una	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5	Perkara	109.608.750	01	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada Kepentingan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab Tojo Una-Una	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5	Perkara	109.608.750	
	02	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit	Kab Tojo Una-Una	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga		

	Daerah Kabupaten/Kota				Kabupaten/Kota					
5	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**				**5**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**				
	Kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				**Kegiatan :** Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan :				**Sub Kegiatan :**					
	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jakarta, Surabaya, Jogjakarta, Palu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 lap	58.761.500	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jakarta, Surabaya, Jogjakarta, Palu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Lap	58.761.500	
	02 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Kec. Ulubongka (Lokasi Transmigrasi Uetangko)	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dok	85.100.000	02 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Kec. Ulubongka (Lokasi Transmigrasi Uetangko)	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dok	85.100.000	
	04 Penyuluhan Transmigrasi	Kec. Ulubongka (Lokasi Transmigrasi Uetangko)	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	10 KK	121.858.750	04 Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kec. Ulubongka (Lokasi Transmigrasi Uetangko)	Penyuluhan Transmigrasi	10 KK	121.858.750	

Berdasarkan tabel review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dapat dilihat bahwa antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan telah sesuai baik program dan kegiatan dan besaran nilai anggaran yang dibutuhkan.

2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi, konsultasi dan pengajuan usulan, penelaahan serta penelitian dari bidang-bidang dan sekretariat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una. Bidang-bidang memperoleh input/masukan program/kegiatan atas dasar kebutuhan prioritas program/kegiatan sedangkan usulan dari bawah/masyarakat/stakeholder tidak ada dan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan untuk sekretariat didasarkan atas kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una. Selanjutnya usulan dari bidang-bidang dan sekretariat tersebut harus diketahui dan disetujui pimpinan/Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku pemangku kebijakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian diverifikasi dan diklarifikasi dengan BAPPEDA Kabupaten Tojo Una-Una sebagai bahan usulan program dan kegiatan yang akan di input melalui Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Adapun usulan yang ditujukan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara keseluruhan sudah sesuai dengan isu strategis dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang merupakan tugas pokok dari Dinas Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sesuai dengan uraian tugas

dan fungsi yang di emban oleh Dinas Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian Kabupaten Tojo Una Una adalah sebagai berikut :

❖ **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Tujuan : Terlaksananya administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah

Sasaran : Kurun waktu terlaksananya urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Sub Kegiatan : a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Sub Kegiatan : a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Sub Kegiatan : a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Sub Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

❖ **Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja**

Tujuan : Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Sasaran : 1. Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja

Kegiatan terdiri dari :

1. Pelaksanaan Peatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Sub Kegiatan : a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

2. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

❖ **Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Tujuan : Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro

Sasaran : Tersedianya Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Kabupaten

Kegiatan terdiri dari :

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Sub Kegiatan : a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

❖ **Program Penempatan Tenaga Kerja**

Tujuan : Tersedianya Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota

Sasaran : Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan terdiri dari :

1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan : a. Pelayanan Antar Kerja
   b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja
   c. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

2. Pengelolaan Informasi Pasarn Kerja

   Sub Kegiatan : a. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

3. Pelindungan PMI (Para dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

   Sub. Kegiatan : a. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)

❖ **Program Hubungan Industrial**

Tujuan : Tersedianya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

Sasaran : Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

Kegiatan terdiri dari :

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota

   Sub Kegiatan : a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
   b. Pendaftaran Perjanjian Kersama bagi Perusahaan

c. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industria, mogok kerja dan penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota

b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industria, mogok kerja dan penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota

c. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota

❖ **Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**

Tujuan : Terlaksanakannya Penempatan Transmigrasi Baru yang di Rencanakan

Sasaran: Meningkatnya Penempatan Transmigrasi Baru yang di rencanakan

Kegiatan Terdiri Dari:

1. Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi

Sub Kegiatan : a. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi

❖ **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

Tujuan : Terlaksananya Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu Daerah Kabupaten / Kota

Sasaran :Meningkatnya Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan Terdiri Dari:

1. Penetaan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota

b. Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi

❖ **Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**

Tujuan : Berkembangnya Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

Sasaran: Meningatnya Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

Kegiatan Terdiri Dari:

1. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

Sub Kegiatan : a. Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

b. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Tahun Anggaran 2024 tidak ada.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan pada bagian kesatu klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari atas urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang menjadi urusan kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaiatan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Sesuai dengan Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una yaitu unsur pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, dalam Misi 1 yaitu Mewujudkan Masyarakat terentaskan dari kemiskinan tangguh bencana dan lingkungan berkelanjutan.

Program-program didalam pembangunan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial

4. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program Ketanagakerjaan dan Ketransmigrasian tersebut merupakan upaya mewujudkan perbaikan atas kondisi tata kehidupan dan sosial yang lebih baik dan meningkat kesejahteraan sosialnya. Nilai-nilai sosial lebih diarahkan dalam menumbuhkembangkan nilai tanggung jawab, rasa kepedulian sosial dan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial kelompok-kelompok marginal seperti diantaranya kelompok masyarakat yang kurang beruntung, rentan dan kelompok masyarakat yang karena kondisi fisik dan mentalnya masih belum mampu untuk melakukan peran-peran sosialnya, serta kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Prioritas dan Sasaran dinas social di sajikan dalam tabel berikut:

TABEL 3.1

TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TOJO UNA-UNA

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Menurunkan Angka kemiskinan	Terbangunnya sinergitas dan ketangguhan sosial di semua komponen masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja
					Besaran Pencarai Kerja yang terdaftar yang ditempatkan
				Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja
					Besaran Kasus yang di Selesaikan dengan Perjanjian Bersama
					Keselamatan dan Perlindungan
					Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek
					Besaran Pemeriksaan Perusahaan
				Meningkatnya Kesejahteraan Penduduk Setempat Dalam Satuan Permukiman Transmigrasi	Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi yang di kembangkan

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Untuk mewujudkan Visi, Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan tujuan yang akan capai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan yaitu:

1. Terselenggarakan Pelayanan Publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada Inovasi
2. Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja

Tujuan tersebut diatas selaras dengan tujuan yang melekat dan di tetapkan pada Misi 1 dan Misi 5 RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 yang berbunyi:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana dan Lingkungan Berkelanjutan;
2. Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart Governance.

Untuk mencapai tujuan yang telah diuraikan diatas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una menetapkan sasaran jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
2. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja
3. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja

Meningkatnya Kesejahteraan Transmigran dan Penduduk Setempat Dalam Satuan Permukiman Transmigrasi.

TABEL 3.2.1
TUJUAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2023
1	2	3	4
1	Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	2.88%

Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini didasarkan pada rumusan isu isu strategis tentang tingginya Pengangguran Terbuka Kesempatan Kerja yang terbatas dan Minimnya Informasi Pasar Kerja Masalah – Masalah Hubungan IndustrialAksesibilitas menuju Satuan Permukiman Transmigrasi.

TABEL 3.2.2
SASARAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024
1	3	4	5
1	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	74.54 %
		Besaran Pencarai Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	43 %
	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun	10 %

		Besaran Kasus yang di Selesaikan dengan Perjanjian Bersama	35.40 %
		Keselamatan dan Perlindungan	24 %
		Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek	100 %
		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	24 %
	Meningkatnya Kesejahteraan Penduduk Setempat Dalam Satuan Permukiman Transmigrasi	Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi yang di kembangkan	1 SP

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan didalam Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una, yang diimplementasikan pada program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian merupakan urusan wajib Non pelayanan dasar dibidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian bagi masyakat Kabupaten Tojo Una-Una.

Adapun rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam rencana kerja dinas social Kabupaten tojo Una-Una diantaranya didasarkan kepada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dimana, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan yang ada dengan memberikan pelayanan yang optimal melalui program dan kegiatan yang telah disusun.

TABEL 4.1
SASARAN DAN PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

No	Sasaran Program	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	**2**	**3**
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik serta penyediaan data dan informasi yang efektif. Efisien dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota**
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *Sub Kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah *Sub kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor*
		Sub Keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Sub kegiatan Penyelenggraaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan aparatur	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota**
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Sub kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi sumberrdaya air dan listrik
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
		Sub kegiatan Penyediaan jasa pemelharaan, biaya pemelharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
		Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
		Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
3	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**
		Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
4	Meningatnya Kualitas, Produktifitas dan Penempatan Serta Perlindungan Tenaga Kerja	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota *Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja*
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja *Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online* *Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota* *Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)*
		Program Hubungan Industrial
		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota *Sub kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan* *Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan*
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota *Sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* *Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*

		Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
5	Meningkatnya Kesejahteraan Transmigran dan Penduduk Setempat Dalam Satuan Permukiman Transmigrasi	**Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**
		Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi *Sub kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi*
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
		Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota *Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* *Sub kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran* *Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi*
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
		Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian *Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman* *Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman*

Berdasarkan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan usulan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari jumlah Program 8 dan jumlah kegiatan 16 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Program yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

<u>Program Utama (Wajib)</u>

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan

2. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan
4. Program Hubungana Industrial dengan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan

Program Pilihan

1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan 1 sub kegiatan dan 3 sub kegiatan
3. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

Program Penunjang

1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota dengan 5 kegiatan dan 10 sub kegiatan

Anggaran untuk tahun 2024 dengan pagu indikatif sebesar Rp**.** 4.661.651.020 (***Empat milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu dua puluh rupiah***).

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una – Una Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tojo Una – Una Nomor ..... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una - Una tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah**.**

Ampana, Mei 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Kabupaten Tojo Una Una

Ir. MUHAMMAD NUR RAHMAD, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19641001 199103 1 004

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						**4.661.651.020,00**							**5.360.548.673,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.511.651.020,00**							**5.188.298.673,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**4.511.651.020,00**							**5.188.298.673,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**BB-A Nilai**			**BB Nilai**	**4.219.651.020,00**						**BB Nilai**	**4.852.498.673,00**	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan*				100 Persen	3.291.553.387,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah	100 Persen	3.785.286.395,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	3.291.553.387,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Ampana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah	34 Orang/bulan	3.785.286.395,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah*				100 %	296.871.407,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah	100 %	341.402.118,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah	1 Paket	3.450.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah	1 Paket	3.450.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	87.271.407,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah	2 Paket	100.362.118,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.600.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.140.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	200.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah	2 Laporan	230.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				5 Unit / Tahun	70.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur ASN	5 Unit / Tahun	80.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	70.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur ASN	7 Unit	80.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah*				100 %	457.226.226,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	100 %	525.810.160,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Laporan	3.450.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	104.226.226,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Laporan	119.860.160,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	350.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Laporan	402.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah* *Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				100 %	104.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah	100 %	119.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	90.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah	11 Unit	103.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	14.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah	30 Unit	16.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	***Tersedianya Dokumen RTKD Kabupaten***				**1 %**	**50.000.000,00**						**1 %**	**57.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Tersusunnya Dokumen RTKD Makro Kabupaten*				1 Dokumen	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pemda dan Masyarakat	1 Dokumen	57.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pemda dan Masyarakat	1 Dokumen	57.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta)***	**4,84 Persen**			**3,60 persen 4,74 Persen**	**32.000.000,00**						**3,60 persen 4,74 Persen**	**36.800.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta)*				100 %	22.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	100 %	25.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				16 Orang	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	16 Orang	23.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1 Unit	2.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	1 Unit	2.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terukurnya Produktifitas Tenaga Kerja Tingkat Daerah Kabuapten / Kota*				100 %	10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	100 %	11.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	1 Dokumen	11.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota***	**36,00 persen**			**33,00 persen**	**65.000.000,00**						**33,00 persen**	**74.750.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota*				100 %	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	100 %	57.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				500 Orang	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	500 Orang	23.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				20 Orang	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	20 Orang	11.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				10 Orang	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	10 Orang	23.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Tersedianya Informasi Pasar Kerja*				100 %	10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	100 %	11.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				500 Orang	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	500 Orang	11.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlindunginya Para Pekerja Migran (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota*				0 %	5.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	0 %	5.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				3 Orang	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	3 Orang	5.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).***	**32,05 persen**			**28,05 persen**	**145.000.000,00**						**28,05 persen**	**166.750.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Peraturan dan Pengesahan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota*				100 %	75.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	100 %	86.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				10 Perusahaan	45.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	10 Perusahaan	51.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				5 Perusahaan	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	5 Perusahaan	11.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	1 Laporan	23.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota*				100 %	70.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	100 %	80.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				5 Perkara	30.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	5 Perkara	34.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				5 Perkara	25.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	5 Perkara	28.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	1 Lembaga	17.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**150.000.000,00**							**172.250.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**150.000.000,00**							**172.250.000,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Persentase penempatan transmigrasi baru yang direncanakan***	**41,50 persen**			**35,50 persen**	**20.000.000,00**						**35,50 persen**	**23.000.000,00**	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*Tersedianya Dokumen Perencanaan Lokasi Transmigrasi*				100 %	20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah	100 %	23.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.2.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah	1 Dokumen	23.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Nilai rata- rata indeks perekembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang di revitalisasi***	**27,75 persen**			**26,75 persen**	**55.000.000,00**						**26,75 persen**	**63.000.000,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai Rata - rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang di revitalisasi*				100 %	55.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	100 %	63.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	1 Laporan	17.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran														
			Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				1 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Uematopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	1 Dokumen	34.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.20	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi														
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				1 Lokasi	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	1 Lokasi	11.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementrian yang di revitalisasi***	**27,75 persen**			**26,75 persen**	**75.000.000,00**						**26,75 persen**	**86.250.000,00**	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*Nilai Rata - rata indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang di revitalisasi*				100 %	75.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	100 %	86.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				18 Kepala Keluarga	40.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Uematopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	18 Kepala Keluarga	46.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan Permukiman	35.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Uematopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	1 Satuan Permukiman	40.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	J U M L A H							**4.661.651.020,00**							**5.360.548.673,00**	

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN 2024

AMPANA, MARET 2023

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, dibuat untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya baik sejak Penyusunan Renstra Perubahan, pengumpulan data, pengolahan data sampai pada penyusunan naskah Rencana Kerja ini selesai, atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat untuk pembangunan Pelayanan masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una.

Ampana, Maret 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

SURIYANI H. TALONO, S.Pi, M.AP
Pembina Tkt. I
NIP. 19760923 200003 2 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Peerangkat Daerah) untuk periode Tahunan yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sebagai unit kerja yang memiliki tugas pokok merumuskan Kebijakan Operasional di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam rangka pengurusan Dokumen-Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Tahunan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 sampai 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah No.10
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No.4 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 sampai 2016 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 No.24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una Una No. 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2010 No.4);

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una secara konsekuen dan konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan rencana, tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
2. Menentukan prioritas program dan kegiatan.
3. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan
4. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya rencana kegiatan prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tojo Una-Una dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta Pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Terwujudnya keselarasan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan perencanaan tahunan dan,
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan konsitensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD), analisis *kinerja pelayanan OPD*, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta Program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan Tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan program dan kegiatannya. serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja OPD Tahun-Tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra OPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini.

Tabel format evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra seperti contoh sebagai berikut :

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una. Keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilihat pada table berikut ini :

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara OPD provinsi dengan OPD Kabupeten/Kota serta dengan Kementerian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmenet Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda ; dan
4. Lampirkan tabel berikut;

2.5 Penalaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Sehubungan dengan surat dari Sekretariat Daerah Nomor: ..... Perihal Penyampaian Hasil Musrembang, tidak mendapatkan Lampiran usulan Musrembang Kecamatan, maka penyusunan Renja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama Tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada kertas kerja bagian C.1.10 (telaahan terhadap kebijakan nasional).

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada kertas kerja bagian C.1.6 (perumusan tujuan dan sasaran Renja OPD).

3.3 Program Dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
b. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
c. Tabel rencana program dan kegiatan beserta tabel Indikator sebagai berikut :

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir Tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di interen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode Tahun 2021-2026 yaitu: **” Terwujudkan Kabupaten Tojo Una-Una Tangguh, Maju dan Sejahtera (TAMARA)” dengan mewujudkan kelembagaan birokrasi yang bersih efesien, efektif dan akuntabel guna terlaksananya pelayanan publik yang prima.**

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**3.636.189.641,00**							**3.907.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.636.189.641,00**							**3.907.000.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**3.636.189.641,00**							**3.907.000.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**BB Nilai**		**BB Nilai**	**BB Nilai**	**3.028.008.447,00**						**BB Nilai**	**3.090.000.000,00**	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	1.797.788.464,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	18 Orang/bulan	1.800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.797.788.464,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	18 Orang/bulan	1.800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Komponen Instalasi Listrik, Bahan Logistik serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD yang dilaksanakan*	33 Laporan/Paket		33 Laporan/Paket	33 Laporan/Paket	269.164.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	1 Paket	283.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	1 Paket	3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	75.780.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	8 Paket	80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	191.384.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	24 Laporan	200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Alat Mebel dan Perlatan Mesin Lainnya yang diadakan*	6 Unit		6 Unit	6 Unit	20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	4 Unit	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	4 Unit	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	2 Unit	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik serta Honorarium Aparatur*	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	836.055.983,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	12 Laporan	850.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	12 Laporan	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	78.850.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	12 Laporan	80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	739.205.983,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	12 Laporan	750.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Peralataan, Gedung Kantor, Kendaraan Dinas yang terpelihara*	58 Unit		58 Unit	58 Unit	105.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	13 Unit	117.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	85.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	13 Unit	90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	22 Unit		22 Unit	22 Unit	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	22 Unit	7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		22 Unit	22 Unit	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	22 Unit	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Perekaman KTP elektronik Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA***	**94,17 Persen 54,53 Persen**		**94,17 Persen 54,53 Persen**	**94,17 Persen 54,53 Persen**	**474.431.194,00**						**94,17 Persen 54,53 Persen**	**547.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan*	48700 Dokumen/Orang		48700 Dokumen/Orang	48700 Dokumen/Orang	424.431.194,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1500 Dokumen	490.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1500 Dokumen		1500 Dokumen	1500 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1500 Dokumen	70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	46000 Dokumen		46000 Dokumen	46000 Dokumen	371.931.194,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	46000 Dokumen	390.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	523 Orang		523 Orang	523 Orang	2.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	523 Orang	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Penataan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan*	55000 Dokumen		55000 Dokumen	55000 Dokumen	35.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	55000 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	55000 Dokumen		55000 Dokumen	55000 Dokumen	35.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	55000 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan*	15000 Dokumen		15000 Dokumen	15000 Dokumen	15.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	12 Dokumen	17.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	12 Dokumen	17.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang percerainnya dilaporkan*** ***Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya di laporkan*** ***Persentase Kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun*** ***Presentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan***	**79,50 Persen** **89,50 Persen** **99,61 Persen** **91,50 Persen**		**79,50 Persen** **89,50 Persen** **99,61 Persen** **91,50 Persen**	**79,50 Persen** **89,50 Persen** **99,61 Persen** **91,50 Persen**	**60.000.000,00**						**79,50 Persen** **89,50 Persen** **99,61 Persen** **91,50 Persen**	**80.000.000,00**	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan*	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00			-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil														

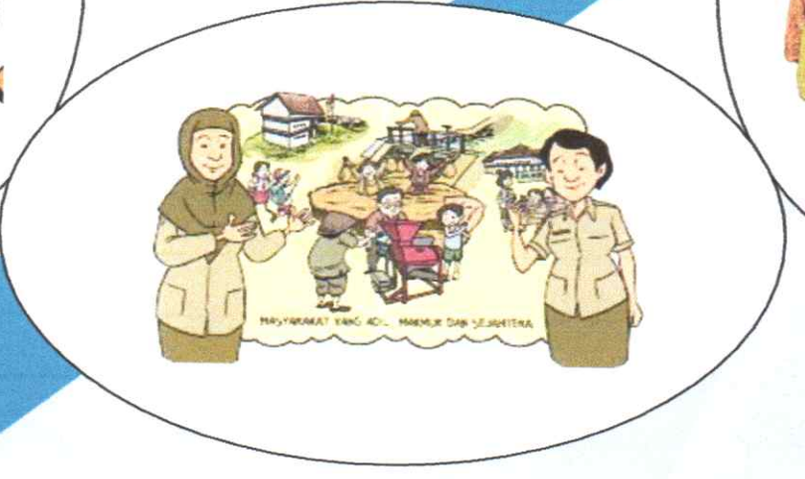
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Presentase Pemanfaatan Data***	**58,72 Persen**		**58,72 Persen**	**58,72 Persen**	**70.750.000,00**						**58,72 Persen**	**90.000.000,00**	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	21 Dokumen/ Laporan		21 Dokumen/Laporan	21 Dokumen/ Laporan	45.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Laporan	60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Laporan	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	25.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	20 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan*	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.250.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	1 Laporan	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.250.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	1 Laporan	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Persentase penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun***	**100,00 Persen**		**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**3.000.000,00**						**100,00 Persen**	**100.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Jumlah Penyusunan Profil Kependudukan yang dibuat*	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	3.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	15 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	15 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H							**3.636.189.641,00**							**3.907.000.000,00**	

RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA







KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Merdeka Kota Bumi Mas Ampana, Kode Pos: 94683

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR: 188.45/ 10 /DPMD/2023

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan Kepala Perangkat Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;

c. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program/kegiatan pembangunan Perangkat Daerah yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2019-2024.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 319).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RENJA DPMD Tahun 2024 adalah Dokumen Program/Kegiatan 1 (satu) tahun.

KEDUA : RENJA DPMD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Bab I Pendahuluan
b. Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu
c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
e. Bab V Penutup

KETIGA : Keputusan RENJA DPMD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Ampana
Pada Tanggal : 10 Maret 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Dr. ALIMUDIN MUHAMMAD, SE., M.Si
NIP. 19711221 200212 1 003
Pembina Utama Muda, IV/c

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 memuat Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mempertimbangkan RPJMN 2019-2024, RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah dan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una serta bersifat indikatif.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Kami sadari adanya kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Ampana, Maret 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Dr. ALIMUDIN MUHAMMAD, SE., M.Si
NIP. 19711221 200212 1 003
Pembina Utama Muda, IV/c

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Gambar iii
Daftar Tabel iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 23
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas PMD 25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMD
BAB IV PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.1 Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... 2

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra S/D Tahun 2023 Kabupaten Tojo Una-Una 8

2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una..... 14

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Tojo Una-Una 16

2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Tojo Una-Una..... 22

3.1 Prioritas dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una 24

3.2 Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una 25

3.3 Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una 25

3.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten tojo Una-Una..... 26

4.1 Sasaran dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 30

4.2 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tojo Una-Una Tahun 2024 33

BAB I

PENDAHULUAN

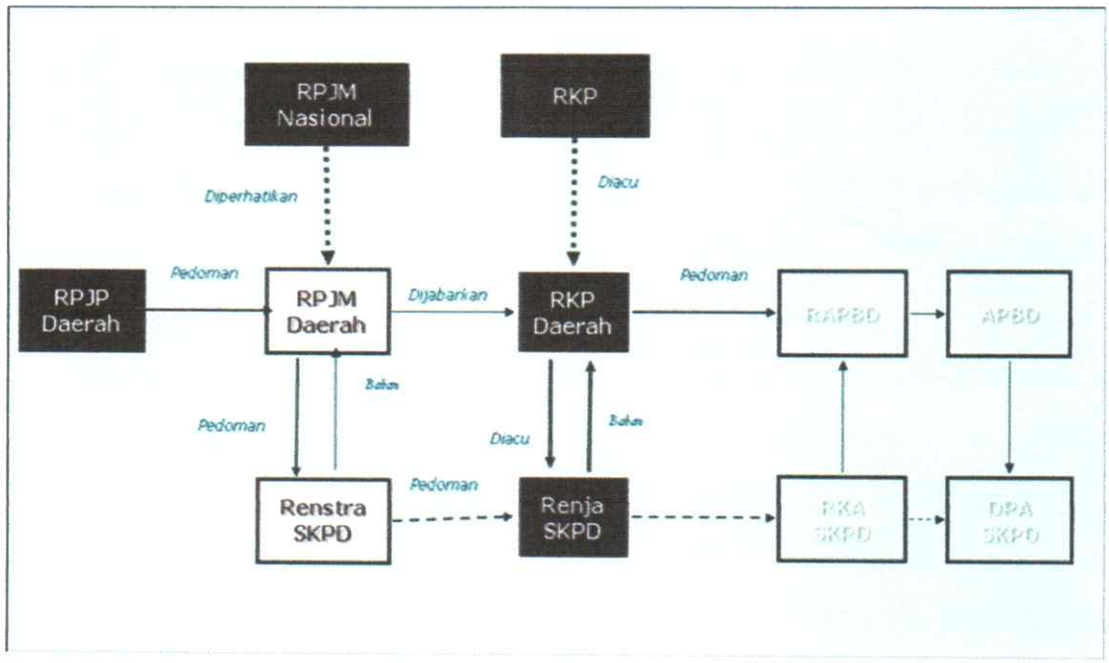
1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) Tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Keterkaitan antara dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Sumber: Lampiran Permendagri No 54 Tahun 2010

Gambar 1.1
Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran Rencana Strategis dan bahan masukan untuk finalisasi RKPD, dan setiap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kerja sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan bahan penyempurnaan RKPD Kabupaten/Kota. Penyusunan berbagai dokumen rencana tahunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

1.2. Landasan Hukum

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran RI Nomor 4438);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2019-2024;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

10) Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 10);
11) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
12) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026;
13) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor 77);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 319).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini adalah untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

Sedangkan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD. Selain itu, tujuan penting lainnya dari penyusunan Renja ini adalah:

1) Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta pengorganisasian program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2) Terwujudnya keselarasan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan perencanaan tahunan;

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, Penjelasan jika rumusan

program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baikjenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan yaitu tahun 2023 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan RENJA Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una tahun lalu dan realisasi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2023 KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)*
2	13	01			**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	**Nilai Sakip OPD**								
2	13	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
2	13	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	9 dokumen	50%
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	24 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	12 laporan	50%
2	13	01	2.02		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
2	13	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah SDM PNS yang menerima gaji dan tunjangan	162 orang	27 Orang	27 orang	27 orang	100%	27 orang	81 orang	50%
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	50%
2	13	01	2.05		**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)*
2	13	01	2.05	04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0 dokumen	1 dokumen	50%
2	13	01	2.06		**Administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
2	13	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	50%
2	13	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	50%
2	13	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	50%
2	13	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	100%	24 dokumen	72 dokumen	50%
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	50%
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	100%	50 laporan	150 laporan	50%
2	13	01	2.07		**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**								
2	13	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	0 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	6 unit	30%
2	13	01	2.08		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
2	13	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	50%
2	13	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)*
2	13	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	50%
2	13	01	2.09		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
2	13	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90 unit	15 unit	15 unit	15 unit	100%	15 unit	45 unit	50%
2	13	01	2.09	06	Pemeliaraan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100%	12 unit	36 unit	50%
2	13	01	2.09	09	Pemeliaraan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit	50%
2	13	03			**Program peningkatan kerjasama desa**	**Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Antar Desa**								
2	13	03	2.01		**Fasilitasi kerjasama antar desa**	**Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa**								
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	50%
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0 dokumen	1 dokumen	100%
2	13	04			**Program administrasi pemerintahan desa**	**Persentase Desa yang tertib administrasi**								
2	13	04	2.01		**Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa**	**Persentase Desa yang dibina penyelenggaraan administrasi**								
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	15 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	5 dokumen	7 dokumen	47%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)*
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	804 dokumen	134 dokumen	134 dokumen	134 dokumen	100%	134 dokumen	402 dokumen	50%
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	804 dokumen	134 dokumen	134 dokumen	134 dokumen	100%	134 dokumen	402 dokumen	50%
2	13	04	2.01	05	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	134 orang	0 Orang	0 orang	0 orang	0%	134 orang	134 orang	100%
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	134 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	33 laporan	33 laporan	25%
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	804 dokumen	134 dokumen	134 dokumen	134 dokumen	100%	134 dokumen	402 dokumen	50%
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	804 dokumen	134 dokumen	134 dokumen	134 dokumen	100%	134 dokumen	402 dokumen	50%
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	50%
2	13	05			**Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa yang diberdayakan/dibina**								
2	13	05	2.01		**Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**								
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)*
2	13	05	2.01	03	Peningkatan kapastas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan karang taruna)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	300 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	100%	50 Lembaga	150 Lembaga	50%
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam menigkatkan pendapatan asli desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan	6 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	50%
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	50%
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	50%
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehateraan Keluarga	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	50%

Ampana, Maret 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dr. ALIMUDIN MUHAMMAD, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711221 200212 1 003

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuannya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas hidup, dan mengembangkan potensi sumber daya manusia dan alam

Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una mencakup berbagai kegiatan yang ditujukan untuk memberikan dukungan, bantuan dan layanan kepada masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Berikut Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tojo Una-Una

NO	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022 (tahun n-2)	2023 (Tahun n-1)	2024 (tahun n)	2025 (tahun n+1)	2022 (tahun n-2)	2023 (Tahun n-1)	2024 (tahun n)	2025 (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Desa Maju			8,21%	8,96%	9,70%	10,45 %	10,45%	11,20%	12,00%	13,00%	
2	Persentase BUMDes Aktif			20%	25%	30%	35%	43,28%	45,00%	47,50%	50,00%	
3	Persentase BUMDes Berbadan Hukum			0%	5%	10%	15%	0%	0,75%	0,75%	5,00%	
4	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			B	B	BB	BB	B	B	BB	BB	

Sumber: DPMD Kabupaten Tojo Una-Una 2023, data diolah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tojo Una-Una awalnya memiliki 8 kecamatan yang membawahi 6 kelurahan, 94 desa definitif 16 desa persiapan dan 2 desa yang berstatus UPT. Sejak tahun 2005 terjadi pemekaran kecamatan sehingga kecamatan keseluruhan menjadi 9 dengan 6 kelurahan serta 111 desa dan 2 UPT. Tahun 2010 menjadi 6 kelurahan dan 113 desa dan 2 UPT. Sampai tahun 2015 menjadi 12 Kecamatan 12 Kelurahan dan 134 Desa.

Desa, sebuah entitas sosial-politik yang memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan negara Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menjadi muara guna perwujudan kemandirian atau otonomi pemerintahannya. Otonomi yang bukan asal otonomi, namun harus membuahkan demokrasi yang bersifat partisipatif dalam pembangunan ekonomi desa secara menyeluruh. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, diharapkan dapat mengatasi persoalan yang ada di desa, mulai dari sosial, budaya dan ekonomi.

Permasalahan yang ditemukan di pedesaan adalah masih lemahnya keberdayaan masyarakat, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, masih lemahnya kegiatan ekonomi desa, dan masih lemahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dan aparat desa dalam merencanakan pembangunan. Untuk lebih jelasnya, gambaran umum permasalahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diuraikan sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur kelurahan maupun desa, masih rendahnya partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa, masih adanya desa-desa tertinggal yang sulit mempunyai akses keluar, belum terencananya program pembangunan di desa secara baik, kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar SKPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan terutama BUM Desa, masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha, belum bersinerginya antar kelembagaanyang ada di perdesaan serta masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat.
3. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa, dan masih banyaknya desa yang mempunyai potensi yang masih rendah.
4. Masih banyaknya kantor desa yang sarana prasarananya kurang memadai, serta masih banyaknya desa yang mempunyai PADes (Pendapatan Asli Desa) yang rendah.

Berdasarkan isu-isu strategis yang telah disebutkan di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- ✓ Menentukan skala prioritas dalam rangka penyusunan program dan kegiatan.
- ✓ Program dan kegiatan disusun berdasarkan ketersediaan dan dukungan dana.
- ✓ Seluruh isu-isu strategis akan dijadikan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan selama lima tahun.

Selanjutnya program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-una dan diharapkan akan selesai sampai dengan Tahun 2026.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses koordinasi antara instansi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024. Selanjutnya proses penyusunan RKPD Tahun 2024 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Kepala Daerah. Seperti yang tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Riview terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Tojo Una-Una

Nama SKPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)						
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Sakip OPD**	**BB Nilai**	**5.043.845.425**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Nilai Sakip OPD		**5.043.845.425**	
a	**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**8.795.000**					**8.795.000**	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2.075.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2.075.000	
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan	6.720.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan	6.720.000	
b	**Administrasi keuangan perangkat daerah**		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**2.659.954.868**					**2.659.954.868**	
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah SDM PNS yang menerima gaji dan tunjangan	27 Orang/ Bulan	2.657.734.868	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah SDM PNS yang menerima gaji dan tunjangan		2.657.734.868	
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.220.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.220.000	
c	**Administrasi umum perangkat daerah**		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**169.373.219**					**169.373.219**	
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.150.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.150.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)						
2	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.223.219	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.223.219	
3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	4.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	4.000.000	
4	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000	
5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	120.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	120.000.000	
d	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		Persentase peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		**33.000.000**					**33.000.000**	
1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Ampana	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	33.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Ampana	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	33.000.000	
e	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2.107.797.338**	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**		**Cakupan peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**		**2.107.797.338**	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	60.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	60.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.047.797.338	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.047.797.338	
f	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**		**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**64.925.000**			**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**		**64.925.000**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	49.125.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	49.125.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)						
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	10.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	10.800.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	
B	**PROGRAM PENATAAN DESA**		**Persentase Peningkatan Status Desa Maju (%)**	**20 Persen**	**500.000**	**PROGRAM PENATAAN DESA**		**Persentase Peningkatan Status Desa Maju (%)**	**20 Persen**	**500.000**	
a	**Penyelenggaraan Penataan Desa**		**Persentase Penataan Desa**		**500.000**	**Penyelenggaraan Penataan Desa**				**500.000**	
1	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	500.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	500.000	
C	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**		Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Desa	**32,5 Persen**	**10.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**		Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Desa	**33 Persen**	**10.000.000**	
a	**Fasilitasi kerjasama antar desa**		**Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa**		**10.000.000**	**Fasilitasi kerjasama antar desa**				**10.000.000**	
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	
D	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Desa yang tertib administrasi**	**96 Persen**	**78.000.000**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Desa yang tertib administrasi**		**78.000.000**	
a	**Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa**		**Persentase Desa yang Dibina Penyelenggaraan Administrasi**		**78.000.000**	**Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa**				**78.000.000**	
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	500.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	500.000	
2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	134 Dokumen	25.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	134 Dokumen	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)						
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	134 Dokumen	25.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	134 Dokumen	25.000.000	
4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan	134 Orang	500.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan	134 Orang	500.000	
5	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan	25 Laporan	500.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan	25 Laporan	500.000	
6	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	134 dokumen	500.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	134 dokumen	500.000	
7	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	134 Dokumen	25.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	134 Dokumen	25.000.000	
8	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	134 Desa	500.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	134 Desa	500.000	
9	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	500.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	500.000	
E	**Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat**		**Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa yang diberdayakan/dibina**	**100 Persen**	**481.500.000**	**Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat**		Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa yang diberdayakan/dibina	**100 Persen**	**481.500.000**	
a	**Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota**		**Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**		**481.500.000**	**Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota**				**481.500.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)						
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	16 Dokumen	30.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	16 Dokumen	30.000.000	
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	34 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	34 Dokumen	50.000.000	
3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	500.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	500.000	
4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	500.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	500.000	
5	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	134 Dokumen	500.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	134 Dokumen	500.000	
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Dokumen	400.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Dokumen	400.000.000	
Indikatif					**5.613.845.425**					**5.613.845.425**	

Sumber: DPMD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2023, data diolah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan tabel berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Tojo Una-Una

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020-2024, RKP Tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target-target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP pada 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dan dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas pelayan pendidikan dan kesehatan.
3. Penguatan daya saing usaha.
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tojo Una-Una

NO	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH
1	Terselenggarakan Pelayanan Publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada Inovasi	Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tojo Una-Una	Meningkatnya Kemajuan Desa	Persentase Desa Maju
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Memperkuat Ketangguhan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja dan Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Perekonomian Desa	Persentase BUM Desa Aktiv dan Berbadan Hukum

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sebagai penjabaran dan penerapan misi tersebut di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una, menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tojo Una-Una

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024
1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tojo Una-Una	0,6424
2	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja dan Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	3-2
3	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Daerah	BB

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tojo Una-Una

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024
1	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	15%
2	Meningkatnya Perekonomian Desa	Persentase BUM Desa Aktiv	30%
		Persentase BUM Desa Berbadan Hukum	10%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BB

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tojo Una-Una

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
1	Persentase Desa Maju dan Mandiri	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	96%
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa yang Diberdayakan/Dibina	100%
2	Persentase BUM Desa Aktiv dan BUM Desa Berbadan Hukum	Persentase BUM Desa yang Dibina	30%
		Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa	10%
4	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	BB
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100%
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%
		Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah OPD	100%
		Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang	100%
		Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rancangan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disusun berdasarkan pedoman yang ada dan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dokumen Perencanaan, baik dari tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten Tojo Una-Una yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Sekretariat. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.

   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

   a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

   a. Koordinasi dan Pelakasanaan Sistem Informasi Kepegawaian.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
e. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Penataan Desa

Dengan kegiatan sebagai berikut:

9. Penyelenggaraan Penataan Desa.
   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa;
   b. Fasilitasi Tata Wilayah Desa;
   c. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa;
   d. Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa;
   e. Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah;
   f. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa;
   g. Penyediaan dana Operasional, Penghasilan Tetap, dan Tunjangan Lainnya bagi Perangkat Pemerintahan Desa.

C. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Dengan kegiatan sebagai berikut:

10. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa.

    Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

    a. Fasilitasi Kerja sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota;
    b. Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;
    c. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

D. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Dengan kegiatan sebagai berikut:

11. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

    Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

    a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
    b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
    c. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
    d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
    e. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD;
    f. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
    g. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa;
    h. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;
    i. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
    j. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

E. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Dengan kegiatan sebagai berikut:

12. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;

b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;

c. Fasilitasi Pemerintah dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

d. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

e. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Sesuai dengan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka kelompok Sasaran yang menjadi fokus pelayanan adalah:

- Masyarakat di lingkup Desa dan Kelurahan;
- Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- Lembaga/Organisasi kemasyarakatan di lingkup Desa dan Kelurahan.

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya Kemajuan Desa	Program administrasi pemerintahan desa
		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
		- Fasilitasi Produk Hukum Desa
		- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
		- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

		- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
		- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
		- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
		- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
		- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masayarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		- Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
		- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
		- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

2	Meningkatnya Perekonomian Desa	Program peningkatan kerjasama desa
		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
		- Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
		- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Rincian rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran Dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**5.613.845.425,00**							**6.455.922.239,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.613.845.425,00**							**6.455.922.239,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**5.613.845.425,00**							**6.455.922.239,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**BB Nilai**		**BB Nilai**	**BB Nilai**	**5.043.845.425,00**						**BB Nilai**	**5.800.422.239,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	8.795.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Dokumen	10.114.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	2.075.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Dokumen	2.386.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.720.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	4 Laporan	7.728.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	2.659.954.868,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	27 Orang/bulan	3.058.948.098,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan		27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.657.734.868,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 6. Penunjang Program Prioritas	-	27 Orang/bulan	3.056.395.098,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.220.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 6. Penunjang Program Prioritas	-	1 Laporan	2.553.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	169.373.219,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 6. Penunjang Program Prioritas	-	1 Paket	194.779.202,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.150.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 6. Penunjang Program Prioritas	-	1 Paket	3.622.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	37.223.219,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 6. Penunjang Program Prioritas	-	1 Paket	42.806.702,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	4.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 6. Penunjang Program Prioritas	-	24 Dokumen	4.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Laporan	5.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	120.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 6. Penunjang Program Prioritas	-	30 Laporan	138.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah OPD*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	33.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Unit	37.950.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	33.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Unit	37.950.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	2.107.797.338,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	4 Laporan	2.423.966.939,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	60.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	4 Laporan	69.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.047.797.338,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 6. Penunjang Program Prioritas	-	1 Laporan	2.354.966.939,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	64.926.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 6. Penunjang Program Prioritas	-	16 Unit	74.663.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	46.126.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 6. Penunjang Program Prioritas	-	16 Unit	56.493.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	10.800.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 6. Penunjang Program Prioritas	-	12 Unit	12.420.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 6. Penunjang Program Prioritas	-	1 Unit	6.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	***Persentase Peningkatan Status Desa Maju (%)***	**20,00 Persen**		**20,00 Persen**	**20,00 Persen**	**500.000,00**						**20,00 Persen**	**575.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Persentase Penataan Desa*	20.00 Persen		20.00 Persen	20.00 Persen	500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	1 Unit	575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	1 Unit	575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	***Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa (%)*** ***Presentase Bumdes yang Dibina (%)***	**32,50 Persen 30,00 Persen**		**32,50 Persen 30,00 Persen**	**32,50 Persen 30,00 Persen**	**10.000.000,00**						**32,50 Persen 30,00 Persen**	**11.500.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Persentase Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa*	71 Persen		71 Persen	71 Persen	10.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	1 Dokumen	11.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	1 Dokumen	11.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Desa yang tertib administrasi (%)***	**96,00 Persen**		**96,00 Persen**	**96,00 Persen**	**78.000.000,00**						**96,00 Persen**	**89.700.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yang Dibina Penyelenggaraan Administrasi*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	78.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Dokumen	89.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Dokumen	575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	134 Dokumen		134 Dokumen	134 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	-	134 Dokumen	28.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	134 Dokumen		134 Dokumen	134 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	-	134 Dokumen	28.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	134 Orang		134 Orang	134 Orang	500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	134 Orang	575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	25 Laporan	575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	134 Dokumen		134 Dokumen	134 Dokumen	500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	134 Dokumen	575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	134 Dokumen		134 Dokumen	134 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	134 Dokumen	28.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	134 Desa		134 Desa	134 Desa	500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	134 Desa	575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Dokumen	575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa yang diberdayakan/dibina (%)***	**100,00 Persen**		**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**481.500.000,00**						**100,00 Persen**	**553.725.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan*	71 Persen		71 Persen	71 Persen	481.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	16 Dokumen	553.725.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	16 Dokumen	34.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	34 Dokumen	57.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Laporan	575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Laporan	575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	134 Dokumen		134 Dokumen	134 Dokumen	500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	134 Dokumen	575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	400.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	10 Dokumen	460.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	J U M L A H							**5.613.845.425,00**							**6.455.922.239,00**	

BAB V

PENUTUP

Dilihat dari segi pendanaan untuk melaksanakan program dan kegiatan, masih sangat jauh dari harapan. Meskipun demikian dengan memaksimalkan ketersediaan dana yang ada, pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Pentingnya kolaborasi dan sinergi antar Dinas PMD dan semua pemangku kepentingan terkait, sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan landasan penting dalam membangun keberlanjutan dan kemajuan daerah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk terus mendorong inisiatif yang memperkuat partisipasi aktiv masyarakat dalam proses pembangunan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una disusun agar Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dapat dicapai dengan baik sesuai target Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Tojo Una-Una Tangguh, Maju dan Sejahtera (TAMARA).

Ampana, Maret 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Dr. ALIMUDIN MUHAMMAD, SE., M.Si
NIP. 19711221 200212 1 003
Pembina Utama Muda, IV/c

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN ..... I -1

1.1 Latar Belakang ..... I -1

1.2 Landasan Hukum 1-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-4

1.3.1. Maksud I-4

1.3.2. Tujuan I-4

1.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dishub II-8

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Dishub II-13

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan II-14

2.3.2 Tantangan dan Peluangan Pengembangan pelayanan Dishub II-15

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-17

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN III-1

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan nasional dan Provinsi III-1

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi III-2

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD III-4

3.3 Program dan Kegiatan III-5

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1

BAB V PENUTUP V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode jangka pendek disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai tupoksinya.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2024, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-una tahun 2024 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi pada skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Landasan idiil Pancasila;
b. Landasan konstitusional Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang sudah diamandemen;
c. Landasan Operasional, terdiri dari:
   1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
   2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah;

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahub 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahu 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Pemutakhiran dan Validasi Klarifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;

16) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025;
17) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011 – 2031;
18) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
19) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
20) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dalam Renja ini adalah menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una.

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-una adalah sebagai dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-una untuk periode 1 (satu) tahun dan sebagai alat bantu dalam menyelenggarakan program dan kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD. Selain itu, tujuan penting lainnya dari penyusunan Renja ini adalah:

1) Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta pengorganisasian program dan kegiatan Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup;
2) Terwujudnya keselarasan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup dengan perencanaan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renstra Kementerian/Lembaga serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPB, landasan hukum, maksed dan tujuan Renja serta sistematika penulisan sebagai berikut :

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistem Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2023 (tahun n-1), target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program/kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD/atau realisasi APBD, sebagai berikut :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, tujuan dan sasaran SKPD serta program dan kegiatan, sebagai berikut :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup tahun lalu adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program dan kegaiatnnya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya, yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA), serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2022 (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2023 (n-

1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup tahun sebelumnya.

Realisasi hasil review evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Dan lingkungan Hidup tahun 2022 dan realisasi Renstra Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PE

LAKSANAAN RENJA OPD

DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2022

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Perangkat Daerah : Dina Perhubungan Dan Lingkungan Hidup

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Progrsm Renstra OPD sd Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan sd Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
		Bidang Urusan Perhubungan									
1	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**	**CC**	**CC**	**CC**	**CC**	**CC**			
	1.06.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah*	*35 Dok*	*28 Dok*	*7 Dok*	*7 Dok*	*100*	*7 Dok*	*42 Dok*	*120*

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dok	12	Dok	3	Dok	3	Dok	100	3	Dok	18	Dok	120
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Dok	16	Dok	4	Dok	4	Dok	100	4	Dok	24	Dok	120
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	43	Orang/Bulan	43	Orang/Bulan	43	Orang/Bulan	43	Orang/Bulan	100	43	Orang/Bulan	43	Org/bln	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43	Orang/Bulan	43	Orang/Bulan	43	Orang/Bulan	43	Orang/Bulan	100	43	Orang/Bulan	43	Org/bln	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah*	*5*	*Keg*			*5*	*Keg*	*5*	*Keg*	*100 %*	*5*	*Keg*	*15*	*Keg*	*300*
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	Paket	4	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	7	Paket	35
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30	Paket	24	Paket	6	Paket	6	Paket	100	6	Paket	36	Paket	120
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10	Paket	8	Paket	2	Paket	2	Paket	100 %	2	Paket	12	Paket	120
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	15	Laporan	15	aporan	15	Laporan	15	Laporan	100 %	25	Laporan	55	Laporan	366

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33	Laporan	33	Laporan	33	Laporan	33	Laporan	100 %	35	Laporan	101	Laporan	106
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*6*	*Unit*	*6*	*Unit*	*6*	*Unit*	*6*	*Unit*	*100 %*	*32*	*Unit*	*44*	*Unit*	*733*
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	100 %	32	Unit	44	Unit	733
		Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*72*	Laporan	*72*	*Laporan*	*72*	Laporan	*72*	Laporan	*100 %*	*72*	Laporan	*78*	Laporan	*108*
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100 %	3	Laporan	9	Laporan	300 %
		Pemyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69	Laporan	69	Laporan	69	Laporan	69	Laporan	100 %	69	Laporan	69	Laporan	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*	*76*	*Unit*			*76*	*Unit*	*76*	*Unit*	*100 %*	*76*	*Unit*	*76*	*Unit*	*100*
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	23	Unit	23	Unit	23	Unit	23	Unit	100 %	23	Unit	23	Unit	100

| | | |

		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Ja;an Kabupaten/ Kota	*Terlaksananya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Ja;an Kabupaten/ Kota*	*4*	*Laporan*	*4*	*Laporan*	*4*	*Laporan*	*4*	*Laporan*	*100*	*4*	*Laporan*	*12*	*Laporan*	*300*
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100	4	Laporan	12	Laporan	300
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	*Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Kabupaten/ Kota*	*16*	*Laporan*	*16*	*Laporan*	*16*	*Laporan*	*16*	*Laporan*	*100*	*16*	*Laporan*	*48*	*Laporan*	*300*
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi ANDALALIN	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi ANDALALIN	16	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	100	16	Laporan	48	Laporan	300
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan*	*9*	*Laporan*	*9*	*Laporan*	*9*	*Laporan*	*9*	*Laporan*	*100 %*	*9*	*Laporan*	*27*	*Laporan*	*300*
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100 %	4	Laporan	12	Laporan	300
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100 %	1	Laporan	3	Laporan	300
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100 %	4	Laporan	12	Laporan	300

		Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan	Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan								
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	100	100	100	100	100	100	100	100
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100 %	6 Unit	18 Unit	300
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	6 Laporan	300
3		**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Pesentase Sarana, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100**
		Pembangunan, Penerbitan Izin dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal*	*6 Paket*	*6 Paket*	*6 Paket*	*6 Paket*	*100 %*	*6 Paket*	*18 Paket*	*300*

		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun	6	Paket	6	Paket	6	Paket	6	Paket	100 %	6	Paket	18	Paket	300
		Pembangunan, Penerbitan Izin dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau*	*1*	*Paket*	*1*	*Paket*	*1*	*Paket*	*1*	*Paket*		*1*	*Paket*	*3*	*Paket*	*300*
		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket		1	Paket	3	Paket	300
4		**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**100**	**%**	**20**	**%**	**20**	**%**	**20**	**%**	**80,00 %**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100 %**
		Peningkatan sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan	145	Paket	93	Unit	116	Unit	116	Unit	100 %	0	Unit	209	Unit	100 %
5		**Program Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan**	**Peningkatan Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan**	**100**	**%**	**20**	**%**	**20**	**%**	**20**	**%**	**80,00 %**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100 %**
		Pemantauan kualitas lingkungan	Peningkatan Pemantauan kualitas lingkungan	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	100 %	6	Unit	6	Unit	100 %
		Pengawasan pelaksanaan kebijakan	Peningkatan Pengawasan pelaksanaan								Kec	100 %	4	Kec	4	Kec	100 %

		bidang lingkungan hidup	kebijakan bidang lingkungan hidup	0 Kec	0 Kec	4 Kec	4				
		Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	100 %
6		**Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam**	**Peningkatan Perlindungan dan konservasi sumber daya alam**	**100** %	**20** **%**	**20** %	**60** **%**	**80,00 %**	**100** %	**100 %**	**100 %**
		Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber air	Peningkatan Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber air	16 Paket	14.000 Pohon	25.000 Pohon	25.000 Pohon	100 %	39.000 Pohon	39.000 Pohon	100 %
		Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	Peningkatan Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	8 Kec	8 Kec	0 Kec	0 Kec	100 %	8 %	100 %	100 %
7		**Program Rehabilitasi dan pemulihan**	**Peningkatan Rehabilitasi dan pemulihan**	**80**	**80** **%**	**100** **%**	**100** **%**	**100 %**	**100** **%**	**100 %**	**100 %**

		cadangan sumber daya alam	**cadangan sumber daya alam**	**%**							
		Rehabilitasi hutan dan lahan	Peningkatan Rehabilitasi hutan dan lahan	0 Pohon	0 Pohon	0 Pohon	0 Pohon	100 %	7.000 Pohon	7.000 Pohon	100 %
8		**Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam**	**Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam**	**0**	**20 %**	**20 %**	**60 %**	**80 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
		Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang Lingkungan Hidup	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang Lingkungan Hidup	0	0 Keg	1 Keg	1 Keg	100 %	1 Keg	1 Keg	100 %
		Penguatan jaringan informasi lingkungan pusat dan daerah	Penguatan jaringan informasi lingkungan pusat dan daerah	0	0 Kec	4 Keg	4 Keg	100 %	4 Keg	4 Keg	100 %
		Pemeran pembangunan	Partisipasi Pemeran pembangunan	0	0 Keg	1 Keg	1 Keg	100 %	1 Keg	1 Keg	100 %

9		**Program Peningkatan pengendalian polusi**	**Peningkatan pengendalian polusi**	**0**	**20 %**	**20 %**	**60 %**	**80.00%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
		Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Peningkatan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	0	0	0 Unit	0 Unit	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %
		Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium	Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium	0	0	0 Unit	0 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %
10		**Program Pengendalian kebakaran hutan**	**Peningkatan Pengendalian kebakaran hutan**	**0**	**20 %**	**20 %**	**60**	**80.00%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
		Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	0	0 Kec	4 Kec	4 Kec	100 %	4 Kec	4 Kec	100 %
11		**Program Pengendalian tingkat kerusakan lingkungan hidup**	**Peningkatan Pengendalian tingkat kerusakan lingkungan hidup**	**0**	**20 %**	**20 %**	**60**	**80.00%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
		Penyusunan status lingkungan	Penyusunan status lingkungan		1 Dok	0 Dok	0 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	100 %

		hidup daerah	hidup daerah	0							

Dari tabel tersebut dapat dilihat evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una, secara umum pelaksanaan program/kegiatan telah mencapai atau sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditetapkan didalam Renja Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2022, yaitu capaian kinerja 100 %, namun apabila dibandingkan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 memang terjadi fluktuasi pencapaian kinerja, terutama dengan digunakannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mana terjadi perubahan terhadap Program dan Kegiatan khususnya terkait pembangunan di bidang perhubungan. Untuk lebih jelasnya evaluasi kondisi target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Faktor-faktor tidak terpenuhinya target kinerja program/kegiatan salah satunya disebabkan minimnya anggaran akibat refocusing anggaran penanggulangan pandemic covid 19 sehingga target dalam RENSTRA yang direncanakan tidak dapat terpenuhi.

b. Terpenuhinya target Renstra Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup menunjukkan kinerja capaian program/kegiatan telah berjalan sesuai mekanisme alur tahapan penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup

Pelayanan Transportasi di Kabupaten Tojo Una-una masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi proses, pelaksanaan dan pengawasannya. Hal ini disebabkan masih kurangnya aparatur pada Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-una, dari segi kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya legalitas yang mendukung pelaksanaan pekerjaan lapangan dan belum optimalnya pelaksanaan pelayanan pada bidang transportasi. Namun demikian, pelayanan transportasi yang dilakukan selama ini telah memberikan hasil yang positif antara lain :

a. semakin baiknya prasarana lalulintas;
b. semakin meningkatnya komitmen untuk tertib berlalulintas;
c. berubahnya pola pikir aparatur pemerintah Kabupaten Tojo Una-una dalam mendukung tertib berlalulintas.

Untuk melaksanakan fungsi dan memberikan hasil yang positif kepada masyarakat Kabupaten Tojo Una-una, Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-una mempunyai wewenang :

a. Menyusun program kerja tahunan dan lima tahunan;
b. Menyusun program dan kebijakan teknis di Bidang Lalulintas dan Angkutan, Bidang Prasarana dan Keselamatan, Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, dan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran;
c. Pemberian rekomendasi dan perizinan dalam pelaksanaan pelayanan di Bidang Lalulintas dan Angkutan, Bidang Prasarana dan Keselamatan, Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, dan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran;
d. Pengawasan dan pengendalian di Bidang Lalulintas dan Angkutan, Bidang Prasarana dan Keselamatan, Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, dan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran;
e. Pelaksanaan uji layak jalan kendaraan bermotor;
f. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi.

Secara detail Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel berikut ini .

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tojo Una-Una

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2021 (tahun n-2)	2022 (Tahun n-1)	2023 (tahun n)	2024 (tahun n+1)	2021 (tahun n-2)	2022 (Tahun n-1)	2024 (tahun n+1)	2025 (tahun n+2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP OPD (Predikat)			CC	B	B	B	CC	B	B	B	
2	Jumlah penumpang melalui bandara/pelabuhan:											
	Bandara Tanjung Api :											
	- Datang (Orang)			3000 - 4000	3000 - 4000	3000 - 4000	3000 - 4000	792	306	3000 - 4000	3000 - 4000	
	- Berangkat (Orang)			2000 - 3000	2000 – 3000	2000 - 3000	2000 - 3000	801	307	3000 - 4000	3000 - 4000	

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2021 (tahun n-2)	2022 (Tahun n-1)	2023 (tahun n)	2024 (tahun n+1)	2021 (tahun n-2)	2022 (Tahun n-1)	2024 (tahun n+1)	2025 (tahun n+2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pelabuhan Ampana, Labuan dan Wakai :											
	- Datang (Orang)			59000 - 60000	59000 - 60000	59000 - 60000	59000 - 60000	56796	54022	59000 - 60000	59000 - 60000	
	- Berangkat (Orang)			57000 - 58000	57000 - 58000	57000 - 58000	57000 - 58000	58354	62385	57000 - 58000	57000 – 58000	
3	Jumlah barang melalui bandara/pelabuhan:											
	Bandara Tanjung Api :											
	- Bongkar (Ton)			1000-1100	1000-1100	1000-1100	1000-1100	1052	2084	1000-1100	1000-1100	
	- Muat (Ton)			700-	700-	700-	700-	812	1467	700-	700-	

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2021 (tahun n-2)	2022 (Tahun n-1)	2023 (tahun n)	2024 (tahun n+1)	2021 (tahun n-2)	2022 (Tahun n-1)	2024 (tahun n+1)	2025 (tahun n+2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				800	800	800	800			800	800	
	Pelabuhan Ampana, Labuan dan Wakai :											
	- Bongkar (Ton)			5500-6000	5500-6000	5500-6000	5500-6000	478368	38205,81	5500-6000	5500-6000	
	- Muat (Ton)			85000 - 100000	85000 - 100000	85000 - 100000	85000 – 100000	147860	209112,16	85000 – 100000	85000 – 100000	
4	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus (Buah)			10	10	10	10	10	10	10	10	
5	Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)			80 - 85	80 - 85	80 - 85	80 - 85	268	56	80 - 85	80 - 85	

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2021 (tahun n-2)	2022 (Tahun n-1)	2023 (tahun n)	2024 (tahun n+1)	2021 (tahun n-2)	2022 (Tahun n-1)	2024 (tahun n+1)	2025 (tahun n+2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	Persentase layanan angkutan darat			2 - 3	2 - 3	2 – 3	2 - 3	2	0,36	2 - 3	2 - 3	
7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan			37 - 38	37 - 38	37 - 38	37 - 38	37,38	47,18	37 - 38	37 - 38	
8	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum			7 - 8	7 - 8	7 – 8	7 - 8	7 - 8	7 - 8	7 - 8	7 – 8	
9	Pemasangan rambu-rambu (%)			10	15	15	20	0	2,35	20	20	
10	Indeks Kualitas LingkunganHidup (IKLH)				81.83	82.05	82.27			82.27	82.49	
11	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan,				55	60	65			65		

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2021 (tahun n-2)	2022 (Tahun n-1)	2023 (tahun n)	2024 (tahun n+1)	2021 (tahun n-2)	2022 (Tahun n-1)	2024 (tahun n+1)	2025 (tahun n+2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	IzinPPLH yang terawasi											
12	Cakupan Pelayanan Persampahan				63	66	69			69		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena memiliki dampak yang signifikan bagi OPD di masa datang. Analisis isu-isu strategis di identifikasi atau dihasilkan dari berbagai pemasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun permasalahan antara lain :

1. Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia serta sebaran tenaga yang memiliki kemampuan professional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam memiliki bidang tugas;
2. Fasilitas perlengkapan jalan belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan, sehingga masih menjadi kecelakaan lalu lintas;
3. Kondisi terminal yang merupak hibah dari Kabupaten Poso tidak lagi memenuhi persyaratan pelayanan angkutan, sehingga diperlukan percpatan pembangunan terminal yang memadai;
4. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum terlaksana diindikasikandengan belum tersedianya sarana tempat pengujian kendaraan bermotor beserta peralatannya;
5. Minimnya dukungan anggaran dalam rangka peningkatan pelayanan maupun peningkatan keselamatan di bidang transportasi;
6. Belum adanya Rencana Induk Transportasi Jalan Kabupaten (RITJK) sebagai pedoman perencanaan pembangunan;
7. Masih kurangnya minat investor menanamkan modalnya di bidang transportasi.
8. Rusaknya ekosistem baik ekosistem darat maupun ekosistem perairan (laut) sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang melebihi daya dukung lingkungan seperti kegiatan *illegal loging, illegal fishing* serta kegiatan penambangan batu karang untuk kebutuhan pembangunan.
9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, pencemaran lingkungan akibat meningkatnya volume sampah yang berasal dari rumah tangga maupun non rumah tangga yang dibuang ke sungai, kanal dan tempat-tempat lain yang tidak seharusnya digunakan sebagai tempat pembuangan sampah.

10. Masih rendahnya dukungan pemerintah, khususnya dalam mengalokasikan pembiayaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dengan berbagai keterbatasan yang ada baik dana maupun personil serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada bidang perhubungan dan lingkungan hidup, maka Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut :

a. Fasilitas perlengkapan jalan belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan, sehingga masih menjadi kecelakaan lalu lintas;
b. Kondisi terminal kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan yang diindikasikan dengan kurang tersedianya lahan sesuai pelayanan dan adanya aksesibiltas dari dan ke terminal yang masih terhambat oleh aktivitas lain;
c. Sumber Daya Manusia yang mempunyai nasic pengetahuan dibidang transportasi, kelalulintasan jumlah dan kualitasnya belum mencukupi;
d. Kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Lalu Lintas belum membudaya, sehingga masih harus selalu dikembangkan dan diawasi;
e. Kurangnya sarana mobilitas aparat Dinas Perhubungan;
f. Masih rendahnya kualitas keselamatan angkutan;
g. Belum optimalnya pelayanan dan peralatan uji laik jalan pada pengujian kendaraan bermotor;
h. Sering terjadinya kecelakaan akbiat kurang disiplinnya pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada, rambu dan fasilitas keselamatan di jalan;
i. Belum adanya Rencana Induk Transportasi Jalan Kabupaten (RITJK) yang mendukung kelancaran arus lalu lintas;
j. Belum maksimalnya seluruh kegiatan OPD akibat keterbatasan anggaran;
k. Luas wilayah kerja yang ditangani.
l. Rusaknya Ekosistem baik ekosistem darat maupun ekosistem perairan (laut) sebagai akibat dari ekspoilasi sumber daya alam (SDA) yang melebihi daya dukung lingkungan seperti kegiatan elegal loging, elegal fising, serta penambangan batu karang untuk kebutuhan pembangunan.

m. Degradasi Lingkungan yang terus berlangsung akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhitungkankeseimbangan antara sumber daya alam yang tersedia dengan sumber daya yang dapat dieksploitasi.
n. Tingginya angka kemiskinan, sehingga memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia tanpa terkendali.
o. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, pencemaran lingkungan akibat meningkatnya volume sampah yang berasal dari rumah tangga maupun non rumah tangga yang dibuang ke sungai, kanal dan tempat-tempat lain yang tidak seharusnya digunakan sebagai tempat pembuangan sampah menjadi permasalahan yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.
p. Belum optimalnya dukungan pendanaan untuk pelestarian lingkungan hidup baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten Tojo Una una.

2.3.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Tojo Una-Una yang mana membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi, maka hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik bagi Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una maupun bagi stakeholder lainnya.

Faktor tantangan yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah :

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi bidang perhubungan dan Lingkungan Hidup;
b. Belum memadainya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una;
c. Kondisi terminal belum memenuhi persyaratan pelayanan angkutan yang diindikasikan dengan belum terpenuhinya tahapan perencanaan teknis pelaksanaan pembangunan terminal;
d. Kondisi geografis Kabupaten Tojo Una-Una yang terdiri wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Kondisi ini harus didukung dengan infrastruktur (aksesibilitas) yang memadai untuk mewujudkan transportasi yang efektif

dan efisien, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap laju pemerataan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una;

e. Sebagai daerah yang memiliki potensi unggulan di bidang kepariwisataan, maka Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup berperan dalam upaya pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi untuk menjangkau ke setiap kawasan destinasi wisata;
f. Keterbatasan kewenangan kabupaten. Berdasarkan Surat Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.502/33/DRJD/2020, Tanggal 17 November 2020, Perihal Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, yang mengatakan bahwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor hanya dapat di operasionalkan bagi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang terakreditasi dan telah mengimplementsikan penertiban Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) berupa Kartu Uji dan Tanda Uji, dan Bagi daerah yang masih memiliki Bukti Lulus Uji berupa Buku Uji Tanda Uji (plat/peneng) dan Tanda Samping agar segera dimusnahkan atau tidak dipergunakan kembali dengan pengawasan dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) kemudian dilaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat (BPTD) wilayah setempat. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup untuk pengadaan balai uji dan alat uji dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah atau Kementerian Perhubungan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia;
g. Belum adanya dokumen Rencana Induk Transportasi Jalan Kabupaten Tojo Una-Una (RITJK) yang tentunya tidak terlepas dari Rencana Induk Transportasi Jalan Nasional (RITJN) dan Rencana Induk Transportasi Jalan Provinsi Sulawesi Tengah (RITJP) yang menjadi acuan utama dalam menyusun, merancang dan menata sistem jaringan transportasi untuk mendukung pengembangan wilayah sebagai akibat dari tingkat keterhubungan antar wilayah baik itu antar desa, antar kecamatan maupun antar pulau dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una atau bahkan antara Kabupaten Tojo Una-Una dengan kabupaten lainnya sehingga terwujud pemerataan aksesibilitas dan mobilitas bagi segenap kepentingan masyarakat di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Tojo Una-Una;
h. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Tojo Una-Una dalam hal pembiayaan pembangunan di sektor perhubungan dan lingkungan hidup, sehingga dibutuhkan alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tengah, Pemerintah Pusat, maupun pihak swasta yang mau berinvestasi di sektor perhubungan dan lingkungan hidup Kabupaten Tojo Una-Una.

Faktor peluang yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah :

a. Letak geografis Kabupaten Tojo Una-Una memiliki posisi strategis untuk wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Poso. Sementara wilayah kepulauan berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Kabupaten Tojo Una-Una dapat menjadi daerah transit bagi sarana transportasi darat dan laut;
b. Beroperasi dan berkembangnya Bandara Tanjung Api Ampana, Pelabuhan Penyeberangan Uebone dan Pelabuhan laut lainnya yang menjadi pintu gerbang Kabupaten Tojo Una-Una dari jalur transportasi udara, transportasi darat dan transportasi laut.
c. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Tojo Una-Una di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan potensi pariwisata yang tentunya membutuhkan peran penting sektor perhubungan untuk dapat mengeksplor dan mendistribusikan semua potensi tersebut sehingga memiliki nilai guna bagi kesejahteraan masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari pemerintah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Nama SKPD : Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup **renja 2019**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah **Sub Kegiatan :**					**Kegiatan :** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah **Sub Kegiatan :**					
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ampana	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43 Org	3.447.375.503	01 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Ampana	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 Org	3.447.375.503	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah **Sub Kegiatan :**					**Kegiatan :** Administrasi Umum Perangkat Daerah **Sub Kegiatan :**					
	01 Penyediaan Komponen Inslatasi	Ampana	Jumlah Paket Komponen Inslatasi	1 Paket	3.901.000	01 Penyediaan Komponen Inslatasi	Ampana	Jumlah Paket Komponen	1 Paket	3.901.000	

		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inslatasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
	02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ampana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	6 Paket	56.744.750	02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Ampana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	6 Paket	56.744.750
	03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ampana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	16.314.125	03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Ampana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	16.314.125
	04	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ampana	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	20 Laporan	5.575.000	04	Fasilitasi Kunjungan Tamu Ampana	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	20 Laporan	5.575.000
	05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ampana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	280.339.120	05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Ampana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	280.339.120
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah **Sub Kegiatan :**						**Kegiatan :** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah **Sub Kegiatan :**				
	01	Pengadaan Mebel	Ampana	Jumlah Unit Mebel yang diadakan	14 Unit	18.350.000	01	Pengadaan Mebel Ampana	Jumlah Unit Mebel yang diadakan	14 Unit	18.350.000
	02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ampana	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	32 Unit	221.540.000	02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Ampana	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	32 Unit	221.540.000

		Lainnya yang diadakan				Lainnya yang diadakan			
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **Sub Kegiatan :**				**Kegiatan :** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **Sub Kegiatan :**				
	01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ampana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	77.441.985	01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ampana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	77.441.985	
	02 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ampana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69 Laporan	2.909.287.981	02 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ampana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69 Laporan	2.909.287.981	
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **Sub Kegiatan :**					**Kegiatan :** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **Sub Kegiatan :**					
	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ampana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	23 Unit	74.560.000	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ampana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	23 Unit	74.560.000	

						pajaknya			
	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ampana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit	290.453.000	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ampana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit	290.453.000	
	03 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ampana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 Unit	7.400.000	03 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ampana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 Unit	7.400.000	
	04 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ampana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	3 Unit	146.212.230	04 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ampana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	3 Unit	146.212.230	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**					**02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**				
	Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :**					**Kegiatan :** Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :**					
	01 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tersebar	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan	34 Unit	196.500.000	01 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tersebar	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan	34 Unit	196.500.000	

		Terpelihara				Terpelihara			
	Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :**				**Kegiatan :** Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :**				
	01 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Ampana	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	12.450.000	01 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Ampana	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	4 Laporan	12.450.000	
	Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :**					**Kegiatan :** Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :**					
	01 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi ANDALALIN	Ampana	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi ANDALALIN	1 Laporan	72.200.000	01 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi ANDALALIN	Ampana	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi ANDALALIN	1 Laporan	72.200.000	
	Kegiatan : Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan **Sub Kegiatan :**					**Kegiatan :** Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan **Sub Kegiatan :**					
	01 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	Ampana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi,	4 Laporan	42.600.000	01 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	Ampana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi,	4 Laporan	42.600.000	

	Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			
	Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :**				**Kegiatan :** Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :**				
	01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ampana	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	3 Unit	1.359.985.250	01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ampana	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	3 Unit	1.359.985.250	
03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**					**03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**				
	Kegiatan : Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal					**Kegiatan :** Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal					

	Sub Kegiatan :					**Sub Kegiatan :**				
	01 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersebar	Jumlah Pelabuhan Penguumpan Lokal yang dibangun	3 Unit	1.359.985.250	01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ampana	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang tersedia	3 Unit	1.359.985.250
	02 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersebar	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		56.960.000	02 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersebar	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		56.960.000
03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**					**03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			
	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab./Kota					**Kegiatan :** Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab./Kota				
	Sub Kegiatan :					**Sub Kegiatan :**				
	01 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	DPLH	Tersediaanya Penigkatan Kapsitas SDM	4 Kegiatan	234.141.000	01 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	DPLH	Tersediaanya Penigkatan Kapsitas SDM	4 Kegiatan	234.141.000

	Kab/Kota	Pengelola Laboratorium			Kab/Kota	Pengelola Laboratorium			
	Kegiatan : Penangangulangan pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Kab./Kota **Sub Kegiatan :**				**Kegiatan :** Penangangulangan pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Kab./Kota **Sub Kegiatan :**				
	01 Pemberian Informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	DPLH	Tersedianya Informasi Peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup	1 Kegiatan	70.232.000	01 Pemberian Informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	DPLH	Tersedianya Informasi Peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup	1 Kegiatan	70.232.000	
	Kegiatan : Pemulihahan pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup Kab./Kota **Sub Kegiatan :**				**Kegiatan :** Pemulihahan pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup Kab./Kota **Sub Kegiatan :**				
	01 Koordinasi dan Singkronisasi Penghentian Sumber	DPLH	Tersedianya Koordinasi dan Singkronisasi pembersiha	4 Lokasi	51.830.000	01 Koordinasi dan Singkronisasi Penghentian Sumber	DPLH	Tersedianya Koordinasi dan Singkronisasi	4 Lokasi	51.830.000	

	Pencemaran	n unsur pencemaran dan pengelolaan Prokasi dan Superkasi			Pencemaran	pembersihan unsur pencemaran dan pengelolaan Prokasi dan Superkasi			
03	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHAPAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**				03 **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHAPAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**				
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha atau kegiatan Izin lingkungan dan izin PPLH di terbitkan oleh pemerintah Daerah Kab./Kota **Sub Kegiatan :**				**Kegiatan :** Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha atau kegiatan Izin lingkungan dan izin PPLH di terbitkan oleh pemerintah Daerah Kab./Kota **Sub Kegiatan :**				
	01 Fasilitas Pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin lingkungan dan atau izin PPLH	DPLH Tersedianya Fasilitas Pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin lingkungan dan atau	1 Kegiatan	70.590.000	01 Fasilitas Pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin lingkungan dan atau izin PPLH	DPLH Tersediany a Fasilitas Pemenuha n ketentuan dan kewajiban Izin lingkungan dan atau	1 Kegiat an	70.590.000	

		Izin PPLH				Izin PPLH			
03	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIAHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				03	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIAHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			
	Kegiatan : Penyelenggaraan pendidikan, peltihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembanga kemasyarakatan tingkat daerah kab./kota **Sub Kegiatan :**					**Kegiatan :** Penyelenggaraan pendidikan, peltihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembanga kemasyarakatan tingkat daerah kab./kota **Sub Kegiatan :**			
	01 Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	DPLH	Terselenggaranya penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	1 Kegiatan	53.915.000	01 Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	DPLH	Terselenggaranya penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	1 Kegiatan	53.915.000	
03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**					03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**				
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah **Sub Kegiatan :**					**Kegiatan :** Pengelolaan Sampah **Sub Kegiatan :**					
	01 Penyediaan sarana dan Prasarana pengelolaan	DPLH	Tersedianya Penyusunan Kebijakan Kerjasama	1 Kegiatan	3.324.886.290	01 Penyediaan sarana dan Prasarana pengelolaan	DPLH	Tersedianya Penyusunan Kebijakan	1 Kegiatan	3.324.886.290	

	persampahan di TPA/TPS/TPA Kab/ Kota	Pengelolaan Persampahan			persampahan di TPA/TPS/TPA Kab/ Kota	Kerjasama Pengelolaan Persampahan			

Berdasarkan tabel review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat bahwa antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan telah sesuai baik program dan kegiatan dan besaran nilai anggaran yang dibutuhkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan di Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi, konsultasi dan pengajuan usulan, penelaahan serta penelitian dari bidang-bidang dan sekretariat di Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una. Bidang-bidang memperoleh input/masukan program/kegiatan atas dasar kebutuhan prioritas program/kegiatan dan usulan dari bawah/masyarakat/stakeholder maupun koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan untuk sekretariat didasarkan atas kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una. Selanjutnya usulan dari bidang-bidang dan sekretariat tersebut harus diketahui dan disetujui pimpinan/Kepala Dinas selaku pemangku kebijakan di Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian diverifikasi dan diklarifikasi dengan BAPPERIDA Kabupaten Tojo Una-Una sebagai bahan usulan program dan kegiatan yang akan di input melalui Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Adapun usulan yang ditujukan untuk Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup secara keseluruhan sudah sesuai dengan isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas pokok dari Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan teknis bidang perhubungan dan bidang lingkungan hidup yang sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang di emban oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una Una adalah sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

  Indikator : Nilai SAKIP OPD

  Kegiatan terdiri dari :

  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

     Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
b. Penyediaan bahan logistik kantor
c. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

- **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ)**

Indikator : - Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota

- Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota
- Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 10 Ribu Keberangkatan

Kegiatan terdiri dari :

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan :
   a. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan :
   a. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi ANDALALIN
5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan :
   a. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

- **Program Pengelolaan Pelayaran**

Indikator : - Persentase sarana, informasi, koordinasi dan disiplin angkutan penyeberangan

Kegiatan terdiri dari :

1. Pembangunan, Penerbitan Izin dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
   Sub Kegiatan :
   a. Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal
   b. Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan local
2. Pembangunan, Penerbitan Izin dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
   Sub Kegiatan :
   a. Pembangunan pelabuhan sungai dan danau

- **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Indikator : - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kegiatan terdiri dari :

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan :
   a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

- **Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

  Indikator : - Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

  Kegiatan terdiri dari :

  1. Pencegahan Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota
     Sub Kegiatan :
     a. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab. /kota
  2. Penanggulangan pencemaran dan atau/ kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/kota
     Sub Kegiatan :
     a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat

- **Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

  Indikator : - Persentase Pelaku Usaha yang memiliki Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

  Kegiatan terdiri dari :

  1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan dan Izin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab./ kota
     Sub Kegiatan :
     a. Fasilitas Pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH

- **Program Pengelolaan Persampahan**

  Indikator : - Persentase Sampah yang dikelola

Kegiatan terdiri dari :

1. Pengelolaan Sampah

   Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab. /Kota

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan yang termasuk terlalu banyak melebihi kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan dan perangkingan terhadap usulan yang lebih prioritas.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kabupaten Tojo Una-Una

No	Usulan Kegiatan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	
			Kecamatan Tojo Barat		
			Tidak Ada Usulan		
			Kecamatan Tojo		
			Tidak Ada Usulan		
			Kecamatan Ulubongka		
			Tidak Ada Usulan		
			Kecamatan Ampana Kota		
			Tidak Ada Usulan		
			Kecamatan Ratolindo		
			Tidak Ada Usulan		
			Kecamatan Ampana Tete		
			Tidak Ada Usulan		
			Kecamatan Batudaka		
1.	Pembangunan Dermaga	Karena kondisi dermaga yang sekarang sudah rusak	Desa Bomba	Batudaka	
2.	Pengadaan Bus Sekolah	Karena jumlah siswa/siswi Desa Kulingkinari sudah sangat banyak	Desa Kulingkinari	Batudaka	
3.	Rehabilitasi Tambatan Perahu	Karena kondisinya rusak berat	Desa Siatu	Batudaka	

			Kecamatan Una-Una		
1.	Pembangunan Dermaga	-	Desa Cendana	Una-Una	
			Kecamatan Togean		
1.	Pengadaan Transportasi siswa (perahu)	Karena siswa siswi tingkat SMP/SMA Kololio yang bersekolah yang bersekolah di Wakai setiap hari pergi-pulang melalui jalur laut menggunakan perahu	Desa Kololio	Togean	
			Kecamatan Togean		
1.	Pengadaan Transportasi siswa (perahu)	Karena siswa siswi tingkat SMP/SMA Kololio yang bersekolah yang bersekolah di Wakai setiap hari pergi-pulang melalui jalur laut menggunakan perahu	Desa Kololio	Togean	
2.	Rehabilitasi Tambatan Perahu	Tanggul jalan menuju pelabuhan yang ada sekarang tidak layak untuk digunakan karena kondisinya rusak berat dan ketika air laut pasang seluruh jalan tergenang	Dusun 1 Desa Bangkagi	Togean	
3.	Rehabilitasi Tambatan	Tambatan perahu yang ada	Desa Bungayo	Togean	

	Perahu	sekarang tidak layak lagi digunakan karena rusak berat dan apabila air pasang digenangi air laut			
4.	Rehabilitasi Tambatan Perahu	1. Saat ini tambatan perahu tidak layak lagi digunakan 2. Bila air laut pasang, tambatan perahu tenggelam 3. Kesusahan masyarakat pada saat kapal masuk untuk melintasi tambatan perahu	Desa Bungayo	Togean	
5.	Pembangunan Tambatan Perahu	Pembangunan tanbatan perahu di dusun 1 merupakan alternative untuk menghubungkan rumah warga desa Sampobae sekaligus tempat penyimpanan perahu	Dusun 1 Desa Sampobae	Togean	
6.	Rehabilitasi Tambatan Perahu	Kondisi tambatan perahu yang rusak menyebabkan keresahan pada masyarakat	Desa Baulu	Togean	
			Kecamatan Talatako		
			Tidak Ada Usulan		
			Kecamatan Walea Kepulauan		
			Tidak Ada Usulan		

Kecamatan Walea Besar

Tidak Ada Usulan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai Rencana Stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu untuk tahun 2021-2026 yang dimulai tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una yang mencakup tujuan, sasaran, program dan kegiatan di tahun 2024, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk mempedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, maka sasaran pembangunan transportasi dijabarkan dalam 4 fokus, yaitu :

1. Konektivitas poros maritim.
2. Konektivitas multimoda
3. Keselamatan transportasi
4. Transportasi perkotaan

Adapun sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Infrastruktur Transportasi tahun 2020-2024 dapat diuraikan, yaitu :

1. Konektivitas poros maritim
   Meliputi peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi.
2. Konektivitas multimoda
   Meliputi perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukng pekonomian wilayah
3. Keselamatan transportasi

Meliputi integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan

4. Transportasi perkotaan

   Meliputi memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan

3.1.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Telaahan kebijakan provinsi untuk menganalisis kebijakan provinsi yang akan dilaksanakan di daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026.

RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai periode waktu pelaksanaan selama lima tahun yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan daerah dalam pelaksanaannya membutuhkan penyesuaian apabila terdapat hal-hal yang sangat mendasar yang harus diakomodir dalam rangka rasionalisasi dan optimasi tercapainya visi pembangunan daerah terutama indikator yang menegaskan capaian yang riil dari masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2026, dimana sinergitas pembangunan jangka menengah Kabupaten Tojo Una-Una dan Provinsi Sulawesi Tengah dicapai dengan sinkronisasi program, kebutuhan dan permasalahan serta prioritas pembangunan.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2026. Program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah adalah penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah sesuai tugas pokok dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tojo Una-Una

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	Mempercepat pemerataan infrastruktur unutuk mengurangi kesenjangan wilayah untuk keluar kabupaten tertinggal	Meningkatnya Kinerja Layanan Perhubungan dan keselamatan transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	Meningkatnya keselamatan transportasi	Pesentase Pemasangan Rambu-Rambu
					Jumlah uji KIR angkutan umum
					Persentase layanan angkutan darat
					Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
					Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
				Meningkatnya ketersediaan Prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah pelabuhan laut/terminal bus/bandara
					Jumlah penumpang/ barang melalui Pelabuhan
				Meningkatnya layanan transportasi udara	Jumlah penumpang/ barang melalui bandara
2	Terciptanya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terlaksanaanya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengembangan Keinerja pengelolaan persampahan	Tercapainya pelayanan Kebersihan Lingkungan Dan Pengelolaan sampahsecara optimal	100 % Tercapainya pelayanan Kebersihan Lingkungan Dan Pengelolaan sampahsecara optimal
3	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Terlaksananya pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan	Persentase Pengendalian pencemaran dan pengrusakan	Terciptanyaa pengendalian pncemaran dan pengrusakan lingkungan	100 % Terciptanya pengendalian pncemaran dan pengrusakan lingkungan

		hidup	lingkungan hidup		
4	Peningkatan Kualitas dan Akses informasi SDA dan LH	Terlaksananya peningkatan kualitas dan akses informasi SDA	Terwujudnya organisasi yang hebat dengan SDM yang handal dalam pencapaian tujuan dan sasaran	Terciptanya peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH	100 % Terciptanya peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Sebagai penjabaran dan penerapan misi tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una, menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026, sebagai berikut :

1. ***Tujuan***
   a) Terselenggarakan pelayanan publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada inovasi.
   b) Mempercepat pemerataan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah untuk ke luar dari daerah tertinggal.
   c) Mewujudkan pelayanan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah secara optimal peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan
   d) Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penegakan hokum dibidang lingkungan, guna mencegah kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan
2. ***Sasaran***
   a) Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah.
   b) Meningkatnya kinerja layanan perhubungan dan keselamatan transportasi
   c) Tercapainya pelayanan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah secara optimal peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan
   d) Tercapainya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan, guna mencegah kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan

Untuk mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una, maka Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup menetapkan program prioritas yang mendukung visi dan misi dari Bupati Tojo Una-Una, khusunya misi 2, yaitu :

Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Maju dan Keluar dari Daerah Tertinggal.

Misi 5 : Mewujudkan aparatur dan sistem pemerintahan daerah yang profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan public berbasis smart governance.

Program yang dimaksud adalah :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2. Program Pengelolaan Pelayaran.
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Selanjutnya hubungan antara tujuan perangkat daerah dengan sasaran daerah dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Sasaran Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1	Meningkatnya keselamatan transportasi	Pesentase Pemasangan Rambu-Rambu	15%
		Jumlah uji KIR angkutan umum	80-85
		Persentase layanan angkutan darat	2-3
		Rasio panjang jalan pe jumlah kendaraan	37-38
		Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	7-8
2	Meningkatnya ketersediaan Prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah pelabuhan laut	10
		Jumlah penumpang/barang melalui pelabuhan ;	
		- Datang	59.000 – 60.000
		- Berangkat	57.000 – 58.000
		- Bongkar	5.500 – 6.000
		- Muat	85.000 – 100.000
3	Meningkatnya layanan transportasi udara	Jumlah penumpang / barang melalui	

		bandara ;	
		- Datang	3.000 – 4.000
		- Berangkat	2.000 – 3.000
		- Bongkar	1.000 – 1.100
		- Muat	700 – 800
4	Tercapainya pelayanan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah secara optimal peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan	Persentase peningkatan kebersihan dan pengelolaan persampahan	100%
5	Tercapainya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan, guna mencegah kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan	Persentase peningkatan penegakan hukum pembangunan	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Rancangan program dan kegiatan Dinas Pehubungan dan Lingkungan Hidup, disusun berdasarkan pedoman yang ada dan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dokumen Perencanaan, baik dari tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten Tojo Una-Una yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Sekretariat. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 1 (satu) tahun kedepan terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

     Sub Kegiatan :

     a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
     b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
   - Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

     Sub Kegiatan :

     a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   - Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya
b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan.
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- Kegiatan : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

- Kegiatan : Penyedian Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

- Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan :

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
b. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji.

- Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas untuk Jaringan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

- Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi ANDALALIN

- Kegiatan : Audit dan Inspeksi LLAJ di Jalan

Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota.
b. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

- Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan.atau dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Pelayaran

- Kegiatan : Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

a. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
b. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal

- Kegiatan : Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

  Sub Kegiatan :

  a. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau

4. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   - Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

     Sub Kegiatan :

     a. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   - Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

     Sub Kegiatan :

     a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
   - Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

     Sub Kegiatan :

     a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
   - Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

     Sub Kegiatan :

     a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
   - Kegiatan : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

     Sub Kegiatan :

     a. Penanganan Kasus Aduan Lingkungan

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
   - Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

     Sub Kegiatan :

     a. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
     b. Magang/Bimtek Pengambilan Contoh Uji Parameter Lingkungan
     c. Magang/Bimtek Analis Laboratorium
     d. Diklat/Bimtek Pengendalian Manajemen Mutu Laboratorium
     e. Diklat/Bimtek Pengendalian Manajemen Teknis Laboratorium
     f. Diklat AMDAL
     g. Diklat Penyuluh Lingkungan Hidup

8. Program Pengelolaan Persampahan
   - Kegiatan : Pengelolaan Sampah

     Sub Kegiatan :

     a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
     b. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. TOJO UNA UNATAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						**33.947.767.176,00**							**42.409.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**22.914.388.000,00**							**30.369.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHANBIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**2.705.000.000,00**							**7.700.000.000,00**	
1.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**	**-**		**-**	**-**	**30.000.000,00**						**-**	**150.000.000,00**	

	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	-	-		-	-	30.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
	2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota														
			Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Indeks Kualitas Air Indeks Tutupan Lahan Indeks Kualitas Udara***	**persen persen persen**		**persen persen persen**	**77,50 persen 57,50 persen 72,50 persen**	**145.000.000,00**						**77,50 persen 57,50 persen 72,50 persen**	**3.400.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengambilan ContohUji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang*	Dokumen		Dokumen	130 Dokumen	100.000.000,00						-	3.000.000.000,00	

			Dilaksanakan													
	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota														
			-	-		-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	Masyarakat	-	3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hiduppada masyarakat di kabupaten/Kota yang Dilaksanakan*	Laporan		Laporan	8 Laporan	45.000.000,00						3 Laporan	400.000.000,00	
	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hiduppada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan		Laporan	3 Laporan	45.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	3 Laporan	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN**	***Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi***	**persen**		**persen**	**28,00 persen**	**30.000.000,00**						**28,00 persen**	**150.000.000,00**	

		PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan*	Dokumen		Dokumen	50 Dokumen	30.000.000,00						122 Dokumen	150.000.000,00	
	2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, danSurat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen		Dokumen	122 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun LingkunganHidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelaku Usaha	122 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

4.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Persentase jumlah sampah yang tertangani di Wilayahkota Persentase jumlah sampah yang tertangani di Wilayah kota [deleted]***	**Persen Persen**		**Persen Persen**	**67,45 Persen 67,45 Persen**	**2.500.000.000,00**					**67,45 Persen 67,45 Persen**	**4.000.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota*	Ton		Ton	3810 Ton	2.500.000.000,00					37 Unit	4.000.000.000,00	
	2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan,	Unit		Unit	37 Unit	2.500.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun LingkunganHidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat	37 Unit	4.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

			dan Pemrosesan Akhir												

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPDTAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PERHUBUNGAN**						**20.209.388.000,00**							**22.669.000.000,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota (%) Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan Rasio konekvitas kabupaten / kota***	**Persen Persen Persen**		**Persen Persen Persen**	**8.00 Persen 0.67 Persen 82.60 Persen**	**12.215.000.000,00**						**8.00 Persen 0.67 Persen 82.60 Persen**	**12.669.000.000,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penetapan rencana IndukJaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
	2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														

			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana IndukJaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	*Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*	Unit		Unit	14 Unit	100.000.000,00						4 Unit	104.000.000,00	
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalandi Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit		Unit	4 Unit	56.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	4 Unit	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														

			Jumlah Perlengkapan Jalanyang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit		Unit	110 Unit	44.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	110 Unit	44.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	*Terlaksanaya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*	Laporan		Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	25.000.000,00	
	2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPDTAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	4 Laporan	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Kabupaten/Kota*	Laporan		Laporan	2 Laporan	60.000.000,00						3 Laporan	290.000.000,00	
	2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin														

			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan		Laporan	3 Laporan	60.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	3 Laporan	290.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk JasaAngkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	%		%	100 %	12.000.000.000,00						1 Unit	12.100.000.000,00	
	2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kotadalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit		Unit	1 Unit	12.000.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Unit	12.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	***Meningkatnya Sarana, Informasi, Koordinasi danDisiplin Angkutan Penyebrangan***	**Persen**		**Persen**	**80.00 Persen**	**7.994.388.000,00**						**80.00 Persen**	**10.000.000.000,00**	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal*	Paket		Paket	1 Paket	7.694.388.000,00						1 Unit	8.500.000.000,00	
	2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPDTAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit		Unit	1 Unit	900.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Unit	1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit		Unit	1 Unit	6.794.388.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Unit	7.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau*	Paket		Paket	0 Paket	300.000.000,00						1 Unit	1.500.000.000,00	
	2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau														
			Jumlah Pelabuhan Sungaidan Danau yang Dibangun	Unit		Unit	1 Unit	300.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS -DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Unit	1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	X	**-**						**11.033.379.176,00**							**12.040.000.000,00**	
	X.XX	**-**						**11.033.379.176,00**							**12.040.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**Nilai**		**Nilai**	**BB Nilai**	**11.033.379.176,00**						**BB Nilai**	**12.040.000.000,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi*	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	15.000.000,00						9 Dokumen	15.000.000,00	

		Daerah	*Kinerja*													
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	9 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Orang/Bulan		Orang/Bulan	43 Orang/Bulan	7.515.879.176,00						56 Orang/bulan	7.515.000.000,00	
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPDTAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan	56 Orang/bulan	7.515.879.176,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	56 Orang/bulan	7.515.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah*	%		%	100 %	373.500.000,00						1 Paket	440.000.000,00	
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	4.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunja	Aparatur	1 Paket	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

												ng Program Prioritas				
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	6 Paket	63.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	6 Paket	65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	Paket		Paket	2 Paket	6.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	2 Paket	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	50 Laporan	300.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	50 Laporan	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Laporan		Laporan	72 Laporan	2.966.000.000,00						13 Laporan	3.680.000.000,00	
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPDTAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	13 Laporan	162.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	13 Laporan	180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	71 Laporan	2.804.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	71 Laporan	3.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*	Unit		Unit	60 Unit	163.000.000,00						15 Unit	390.000.000,00	

		Urusan Pemerintahan Daerah														
	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	15 Unit	75.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	15 Unit	80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	5 Unit	80.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	5 Unit	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	12 Unit	8.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	12 Unit	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	J U M L A H							**33.947.767.176,00**							**42.409.000.000,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan didalam Renja Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una, yang di implementasikan pada program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan dan lingkungan hidup merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang perhubungan dan lingkungan hidup. Adapun rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una diantaranya didasarkan kepada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

TABEL 4.1

SASARAN DAN PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

No	Sasaran Program	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	**2**	**3**
1	**Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota**
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Sub Kegiatan :* - *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *Sub Kegiatan :* - *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah *Sub kegiatan* - *Penyediaan Komponen*

		instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - *Penyediaan Bahan Logistik Kantor* - *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* - *Penyelenggraaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - *Penyediaan Jasa komunikasi sumberrdaya air dan listrik* - *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
		Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah *Sub kegiatan* - *Penyediaan jasa pemelharaan, biaya pemelharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan* - *penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan* - *Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya*
2	**Meningkatnya Kinerja Layanan Perhubungan dan Keselamatan Transportasi**	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**
		Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota *Sub Kegiatan* - *Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

		Sub Kegiatan - *Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota* - *Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan*
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota *Sub kegiatan* - *Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota*
		Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota *Sub kegiatan* - *Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin*
		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Umum dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota *Sub kegiatan* - *Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Umum dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota*
		Program Pengelolaan Pelayaran
		Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal *Sub Kegiatan* - *Pembangunan pelabuhan pengumpan local* - *Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan local*

		Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau *Sub kegiatan* - *Pembangunan pelabuhan sungai dan danau*
	Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**
		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota *Sub Kegiatan* - *Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota*
	Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota *Sub Kegiatan* - *Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota *Sub kegiatan* - *Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat*
	Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah

		Daerah Kabupaten/Kota *Sub Kegiatan* - *Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH*
	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	**Program Pengelolaan Persampahan**
		Kegiatan Pengelolaan Sampah *Sub kegiatan* - *Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota*

Berdasarkan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan usulan Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup terdiri dari jumlah Program 8 dan jumlah kegiatan 22 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Program yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Program Utama

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri dari 5 kegiatan dan 6 sub kegiatan.
2. Program Pengelolaan Pelayaran terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan.
3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan
4. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan
6. Program Pengelolaan Persampahan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan

Program Penunjang

1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota terdiri dari 5 kegiatan dan 11 sub kegiatan.

Rencana Anggaran untuk tahun 2024 dengan pagu indikatif sebesar **Rp.32.947.767.176**,- (***Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah***).

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una yang didalamnya mencakup tujuan, sasaran, program dan kegiatan dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang perhubungan dan lingkungan hidup.

Renja ini menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Keberhasilan program-program pembangunan ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi bidang transportasi yang aman, nyaman, tertib dan lancar.

Ampana, 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ir. MUH. IDRUS., M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19671227 199603 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Alamat : Jalan Pulau Papan No. 65 94683 Email : kominfo@tojounauna.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : / /Diskominfo/2023

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2023;
b. Bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD memuat arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanankan pembangunan daerah yang berkesinambungan ;
c. bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2023 memuat program/Kegiatan pembangunan SKPD yang telah di sinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Menetapkan Surat Keputusan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023;

Mengingat :

Memperhatikan :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una di Provinsi

Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah

:

Tahun 2011-2016. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 24);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-una 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Tojo Una-una Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 26).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RENJA Dinas Komunikasi dan informatika Tahun 2024, adalah Dokumen Program/kegiatan periode 1 (satu) tahun.

KEDUA

RENJA Dinas Kominfo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Bab I. PENDAHULUAN.
b. Bab II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
c. Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
d. Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
e. Bab IV. PENUTUP.

KETIGA

RENJA Dinas Sosial Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Nomor Tahun yang memuat Program/kegiatan, Indikator kinerja, lokasi kegiatan, Target pencapaian kinerja dan pagu indikatif.

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal Maret 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Drs. ASTON U. MADILAU, M.Si
Pembina UtamaMuda. IV/c
Nip. 19630709 199302 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Alamat : Jalan Pulau Papan No. 65 94683 Email : kominfo@tojounauna.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : / /Diskominfo/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 125 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, maka seluruh OPD segera membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Penyusun;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menrngah Daera, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024.

KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan data penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una;
b. Menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una.

Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Perangkat Daerah.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal April 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Drs. ASTON U. MADILAU, M.Si
Pembina UtamaMuda. IV/c
Nip. 19630709 199302 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Nomor : / /Diskominfo/ 2023
Tanggal : April 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

Ketua Tim : Kepala Dinas
Sekretaris Tim : Sekretaris
Kelompok Kerja :

1. Pokja I
   Koordinator : Kasubag Penyusun Program, Keuangan dan Aset
   Anggota : - Kasubag Kepegawaian dan Umum
   - Staf

2. Pokja II
   Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik
   Anggota : - Jabatan Fungsional Pranata Humas
   - Staf

3. Pokja III
   Koordinator : Kepala Bidang Penyelenggaraan e-government
   Anggota : - Jabatan Fungsional Pranata Komputer
   - Staf

4. Pokja IV
   Koordinator : Kepala Bidang Persandian dan Statistik
   Anggota : - Jabatan Fungsional Sandiman
   - Jabatan Fungsional Statistisi
   - Staf

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal April 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Drs. ASTON U. MADILAU, M.Si
Pembina UtamaMuda. IV/c
Nip. 19630709 199302 1 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa Karena Dengan Ridho-Nya sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 ini mengacu pada Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 - 2026.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya baik sejak pengumpulan data, pengolahan data sampai pada penyusunan naskah Rencana Kerja (RENJA) ini disampaikan ucapan terima kasih dan apabila ada terjadi kesalahan atau perubahan maka akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) ini dapat bermanfaat untuk pembangunan daerah khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tojo Una-Una.

Ampana, April 2023
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tojo Una-Una

Drs. ASTON U. MADILAU, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630709 199302 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistimatika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan CapaianRenstra Dinas Komunikasi dan Informatika 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan SKPD 15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 16

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 21
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika 25
3.3 Indikator Kinerja Utama 22
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan 28
BAB IV PENUTUP 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unit kerja perencanaan yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan Dinas Komunikasi dan Informatika yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika, maka disusunlah Rancangan Akhir Renja

Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Tahunan sebagai penjabaran dari Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nmegara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-una 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Tojo Una-una Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 Kabupaten Tojo Una-Una.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Rancangan Akhir Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD), analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Rancangan Akhir Renja Dinas, Komunikasi dan Informatika terkait dengan kewenangan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026. Arah kebijakan dan langkah strategi serta program Organisasi Perangkat Daerah yang disusun secara berjangka memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan dan kebijakan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika

Evaluasi pelaksanaan renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatannya.Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Tojo Una-Una

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (tahun lalu /n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)*	11 = (10/4)*	12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										

2	**16**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**														
2	16	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135	Orang	27	Orang	27	Orang	27	Orang	100%	27	Orang	81	Orang	60%	
2	**16**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**															
2	16	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	3	Paket	60%	
2	16	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	3	Paket	60%	
2	16	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125	Laporan	25	Laporan	25	Laporan	25	Laporan	100%	25	Laporan	75	Laporan	60%	
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**															
2	16	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	175	Unit	35	Unit	35	Unit	35	Unit	100%	35	Unit	105	Unit	60%	
2	**16**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**															
2	16	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1350	Laporan	270	Laporan	270	Laporan	270	Laporan	100%	270	Laporan	810	Laporan	60%	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	60%	
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	60%	

2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55	Unit	11	Unit	11	Unit	11	Unit	100%	11	Unit	33	Unit	60%	
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115	Unit	23	Unit	23	Unit	23	Unit	100%	23	Unit	69	Unit	60%	
2	**16**	**02**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**																
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**																
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	60	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	60%	
2	**16**	**03**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**																
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**																
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	70	Dokumen	14	Dokumen	14	Dokumen	14	Dokumen	100%	14	Dokumen	42	Dokumen	60%	
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**																
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**																

2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah**															
					Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	15	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	9	Dokumen	60%	
					Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	205	OPD	41	OPD	41	OPD	41	OPD	100%	41	OPD	123	OPD	60%	
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**															
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**															
2	**21**	**02**	**2.01**	**03**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**															
3	21	02	2.02		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	60%	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una. Keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dari pencapaian indicator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	100%	cc	B	B	BB	A	B				
2	Persentase Layanan Informasi Publik Berbasis Online Yang Meningkat	-	100%	30%	30%	30%	30%	30%	100%				
3	Persentase Keamanan Informasi Publik Yang Meningkat	-	100%	82,50%	82,50%	82,50%	82,50%	82,50%	100%				

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

- Keterbatasan sarana dan prasarana pada bidang komunikasi dan informasi dan penyelenggaraan e-Government yang jadi kendala tersendiri.
- Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai kompetensi dan kebutuhan.
- Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Teknologi untuk pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan e-Government bagi Pemerintahan di KabupatenTojo Una-Una.

Berdasarkan beberapa hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika akan melakukan beberapa upaya berikut :

a. Menentukan skala prioritas dalam rangka penyusunan program dan kegiatan;
b. Program dan kegiatan disusun dengan ketersediaan dan dukungan dana;
c. Seluruh isu-isu strategis akan dijadikan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan hasil identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilakukan reviu dengan melakukan reviu sebagai berikut:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
4. Tabel Reviu RKPD,

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Tojo Una-Una

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Tojo Una Una**			**3.554.926.830**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab.Tojo Una Una**			**4.359.241.668**	
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Presentase administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**2.714.191.668**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Presentase administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**2.714.191.668**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 Org/ Bulan	2.714.191.668	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 Org/ Bulan	2.714.191.668	
2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Presentase administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**363.500.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Presentase administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**365.600.000**	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	24.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	24.000.000	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	49.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	49.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 Laporan	290.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 Laporan	290.000.000	
3	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**36.401.802**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**297.000.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35 Unit	36.401.802	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35 Unit	297.000.000	
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**363.333.360**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**904.700.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	270 Laporan	2.060.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	270 Laporan	2.060.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	58.273.360	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	58.273.360	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	303.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	820.000.000	
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**77.500.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**77.750.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 Unit	52.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 Unit	57.750.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 Unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 Unit	25.000.000	
II	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Kab. Tojo Una Una**			**400.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Kab.Tojo Una Una**			**600.000.000**	
1	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase layanan publik yang dilaksanakan secara online**	**100%**	**400.000.000**	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase layanan publik yang dilaksanakan secara online**	**100%**	**600.000.000**	

	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	5 Dokumen	50.000.000	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	5 Dokumen	75.000.000	
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	5 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	5 Dokumen	100.000.000	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	5 Orang	250.000.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	5 Orang	250.000.000	
III	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Kab. Tojo Una Una**			**1.962.420.000**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Kab.Tojo Una Una**			**1.271.613.700**	
1	**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan/ replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan**	**100%**	**150.000.000**	**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan/ replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan**	**100%**	**1.271.613.700**	

	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	5 Dokumen	50.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	5 Dokumen	50.000.000	
	Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik		Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	5 Dokumen	50.000.000	Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik		Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	5 Dokumen	50.000.000	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang di kelola	5 Unit	50.000.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah pusat data pemerintahan daerah	5 Unit	75.000.000	
2	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang di implementasikan**	**100%**	**1.812.420.000**	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang di implementasikan**	**100%**	**1.271.613.700**	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5 Dokumen	1.812.420.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	5 Dokumen	1.600.000.000	

								Daerah			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK				**150.000.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK**				**225.000.000**	
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Kab. Tojo Una Una**			**50.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Kab.Tojo Una Una**			**75.000.000**	
1	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**		**Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**100%**	**50.000.000**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**100%**	**75.000.000**	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	5 Laporan	50.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	5 Laporan	75.000.000	
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Kab. Tojo Una**			**100.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Kab.Tojo Una**			**150.000.000**	

		Una					**Una**				
1	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah**		**Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah**	**100%**	**100.000.000**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah**		**Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah**	**100%**	**150.000.000**	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral		Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	5 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral		Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	5 Dokumen	75.000.000	
	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral		Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	41 PD	50.000.000	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral		Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	41 PD	75.000.000	
TOTAL					**6.067.346.830**					**6.305.855.368**	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan pada bagian kesatu klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari atas urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang menjadi urusan kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaiatan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar termasuk didalamnya bidang sosial. Sesuai dengan Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una yaitu unsur pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang sosial, dalam Misi 3 adalah Membangun keberdayaan rakyat serta penataan wilayah perdesaan secara

merata, mandiri dan berkelanjutan yang berbasis ekonomi, pertanian, pariwisata dan kemaritiman.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2019-2024, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang dikenal dengan tiga (3) dimensi pembangunan yaitu :

1. Dimensi Pembangunan manusia (Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, dan mental / karakter).
2. Dimensi Pembangunan sector unggulan (Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Ketenagakerjaan, Kemaritiman, Pariwisata dan Industri).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan (Antar Kelompok Pendapatan, Antar wilayah).

Selain dimensi di atas, terdapat Sembilan (9) agenda prioritas nasional dalam RPJMN 2019-2024 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokrasi dan tercepat;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system, dan penegakan hokum bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestic;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia.

Dinas Komunikasi dan Informatika di bawah naungan lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung agenda ke-2 prioritas nasional dalam RPJMN 2019-2024, yang diprioritaskan dalam Prioritas dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tojo Una-Una

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
I	Terselenggarakan Pelayanan Publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada Inovasi	Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi Dan Informatika
				Meningkatnya Terselenggaranya Layanan Publik	Persentase Layanan Informasi Publik Berbasis Online Yang Meningkat
				Meningkatnya Keamanan Informasi Publik	Persentase Keamanan Informasi Publik Yang Meningkat

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada setiap misi yang dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana table berikut :

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024
1	2	3	4
1.	Terselenggarakan Pelayanan Publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada Inovasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah
2.	Mempercepat Pemerataan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah untuk Keluar dari Kabupaten Tertinggal	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Menurunnya Desa Blankspot koneksi internet

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024
1	2	3	4
1.	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B
2.	Meningkatnya Terselenggaranya Layanan Publik	Persentase Layanan Informasi Publik Berbasis Online Yang Meningkat	30%
3.	Meningkatnya Keamanan Informasi Publik	Persentase Keamanan Informasi Publik Yang Meningkat	82,50%

3.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan informatika berdasarkan RPJMD Kabubaten Tojo Una Una 2021-2026, sesuai tabel berikut :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

No	**Indikator Kinerja Utama**	**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**	**Target Kinerja Indikator Kinerja Perangkat Daerah**
1	**2**	**3**	**4**
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi Dan Informatika	B
		Persentase Layanan Informasi Publik Berbasis Online Yang Meningkat	30%
		Persentase Keamanan Informasi Publik Yang Meningkat	82,50%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan di dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una, yang di implementasikan pada program/ kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di bidang Komunikasi informatika, Persandian dan Statistik merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Adapun rumusan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten tojo Una-Una diantaranya didasarkan kepada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dimana, dalam mewujudkan visi Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una Tangguh, Maju dan Sejahtera (TAMARA) dan Misi ke-2 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal, serta misi ke-5 Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui program dan kegiatan yang telah disusun.

Sasaran, Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3
1.	**Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.	**Meningkatnya terselenggaranya layanan publik**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
		Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
		Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral
3	**Meningkatnya Keamanan Informasi Publik**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN 2024

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	Pagu Prakiraan Maju Tahun 2024 (Rp.)	Ket
						Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP OPD**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**Kabupaten Tojo Una Una**	Nilai SAKIP OPD	**BB**					**3.667.947.588**	**3.554.926.830**	
1.	**2.16.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	**2.647.991.871**	**2.714.191.668**	
	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Org/ Bln			2.647.991.871	2.714.191.668	
2.	**2.16.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								Presentase administrasi umum perangkat daerah	100%	**187.940.500**	**363.500.000**	

	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			32.606.000	24.000.000	
	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			21.950.500	49.500.000	
	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan			133.384.000	290.000.000	
3.	**2.16.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	100%	**20.000.000**	**36.401.802**	
	2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit			20.000.000	36.401.802	

4.	**2.16.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100%	**749.515.217**	**363.333.360**	
	2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	270 Laporan			2.060.000	2.060.000	
	2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			58.273.360	58.273.360	
	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			689.181.857	303.000.000	

5.	**2.16.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	100%	**62.500.000**	**77.500.000**	
	2.16.01.2.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit			52.500.000	52.500.000	
	2.16.01.2.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit			10.000.000	25.000.000	
II	**2.16.02**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik (G2B) yang diselenggarakan**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**Kabupaten Tojo Una Una**							**252.000.000**	**400.000.000**	

			secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan											
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**Kabupaten Tojo Una Una**									
1.	**2.16.02.2.01**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**Persentase layanan publik yang dilaksanakan secara online**	100%	**252.000.000**	**400.000.000**	

		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah						Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	5 Dokumen			0	50.000.000	
	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik						Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	5 Dokumen			252.000.000	100.000.000	
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik						Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	5 Orang			0	250.000.000	
III	2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplem**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**Kabupaten Tojo Una Una**							**1.600.000.000**	**1.962.420.000**	

			entasikan											
			Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**Kabupaten Tojo Una Una**									
1.	**2.16.03.2.02**	**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan/ replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan**	100%	**0**	**150.000.000**	

		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	5 Dokumen			0	50.000.000	
		Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik						Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	5 Dokumen			0	50.000.000	
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah						Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang di kelola	5 Unit			0	50.000.000	

2.	**2.16.03.2.02**	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang di implementasikan**	100%	**1.600.000.000**	**1.812.420.000**	
	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5 Dokumen			1.600.000.000	1.812.420.000	
IV		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**Kabupaten Tojo Una Una**							**0**	**100.000.000**	

			perencanaan pembangunan daerah											
1.		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah**								**Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah**	100%	**0**	**100.000.000**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral							5 Dokumen			**0**	50.000.000	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral							41 PD			**0**	50.000.000	
V		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**Kabupaten Tojo Una Una**							**0**	**50.000.000**	

1.		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	100%	**0**	**50.000.000**	
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elaktronik	5 Laporan			0	50.000.000	
	Total											**5.519.947.588**	**6.067.346.830**	

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika dan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rancangan Akhir Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika, penyusunan Rancangan Akhir Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Komunikasi dan Informatika maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran aparatur pada lingkungan Dinas Komunikasi dan Informtika untuk bersama-sama melaksanakan program sesuai dengan visi-misi yang telah dirumuskan dalam Rancangan Akhir Renja ini. Pencapaian kinerja bukan hal yang mudah, untuk itu diperlukan tekad, usaha, dan perjuangan terus menerus untuk menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informtika mampu memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una.

Demikian Rancangan RENJA Dinas Komunikasi Dan Informatika ini di susun sebagai syarat dalam penetapan belanja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una, olehnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua unsur yang terkait sehingga RENJA ini dapat disusun dengan baik.

Ampana, April 2023
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tojo Una-Una

Drs. ASTON U. MADILAU, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19630709 199302 1 002

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**6.067.346.830,00**							**6.204.111.668,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.067.346.830,00**							**6.204.111.668,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**5.917.346.830,00**							**6.054.111.668,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**BB Nilai**		**BB Nilai**	**BB Nilai**	**3.554.926.830,00**						**BB Nilai**	**3.691.691.668,00**	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Gaji Pegawai ASN*	100 %		100 %	100 %	2.714.191.668,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas	-	27 Orang/bulan	2.714.191.668,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan		27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.714.191.668,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas	-	27 Orang/bulan	2.714.191.668,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %		100 %	100 %	363.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Paket	435.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	24.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Paket	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	49.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Paket	55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	290.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	25 Laporan	350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %		100 %	100 %	36.401.802,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	35 Unit	45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit		35 Unit	35 Unit	36.401.802,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	35 Unit	45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %		100 %	100 %	363.333.360,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	270 Laporan	415.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	270 Laporan		270 Laporan	270 Laporan	2.060.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	270 Laporan	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	58.273.360,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	303.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %		100 %	100 %	77.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	11 Unit	82.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	52.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	11 Unit	52.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit		23 Unit	23 Unit	25.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	23 Unit	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Persentase Layanan Publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah***	**35,00 Persen 73,66 Persen**		**35,00 Persen 73,66 Persen**	**35,00 Persen 73,66 Persen**	**400.000.000,00**						**35,00 Persen 73,66 Persen**	**400.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase layanan publik yang dilaksanakan secara online*	100 %		100 %	100 %	400.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Dokumen	400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik														
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	5 Orang		5 Orang	5 Orang	250.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	5 Orang	250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan***	**35,00 Persen 12,32 Persen**		**35,00 Persen 12,32 Persen**	**35,00 Persen 12,32 Persen**	**1.962.420.000,00**						**35,00 Persen 12,32 Persen**	**1.962.420.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Nama Domain dan Sub Domain yang dikelola lingkup Pemerintah Daerah*	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo*	100 %		100 %	100 %	1.912.420.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Dokumen	1.912.420.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	5 Unit		5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Unit	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.812.420.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Dokumen	1.812.420.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah***	**63,42 Persen**		**63,42 Persen**	**63,42 Persen**	**100.000.000,00**						**63,42 Persen**	**100.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah*	100 %		100 %	100 %	100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	41 Orang		41 Orang	41 Orang	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	41 Orang	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**50.000.000,00**							**50.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	***Tingkat keamanan informasi pemerintah***	**87,50 Persen**		**87,50 Persen**	**87,50 Persen**	**50.000.000,00**						**87,50 Persen**	**50.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah*	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Laporan	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Laporan	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H							**6.067.346.830,00**							**6.204.111.668,00**	

RENCANA KERJA
(RENJA)
2024

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN TOJO UNA UNA



OLEH :
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN TOJO UNA UNA

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TOJO UNA - UNA
Alamat : Jalan Merdeka Kota Bumi Mas Kec. Ratolindo, Kode Pos : 94683
Telp. (0464) 21294 Fax. (0464) 21294

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TOJO UNA – UNA
NOMOR : / /DPMPTSP/2023

T E N T A N G
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TOJO UNA – UNA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menyusun Rencana Kerja OPD tahun 2024 ;
b. bahwa Rencana Kerja (Renja) OPD memuat arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanankan pembangunan daerah yang berkesinambungan ;
c. bahwa Rencana Kerja (Renja) OPD tahun 2024 memuat program / Kegiatan pembangunan OPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengendalian Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJM) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4)
14. Peraturan Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2016;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una – Una Tahun 2024

KESATU : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024, adalah Dokumen Program / kegiatan periode 1 (satu) tahun.

KEDUA : RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Bab 1 PENDAHULUAN.
b. Bab 2 EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
c. Bab 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.
d. Bab 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.
e. Bab 5 PENUTUP.

KETIGA : Keputusan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 26 Tahun 2015 yang memuat Program / kegiatan, Indikator Kinerja, Lokasi Kegiatan, Target Pencapaian kinerja dan pagu indikatif.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampana
Pada tanggal : Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

VIYAYANTISYAH LATJUBA,ST.,M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19710318 200012 2 003

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-NYA, team telah dapat menyelesaikan tugas Penyusun Rencana Strategis (Renstra) yang dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una-Una dan menuliskan semua hasilnya yang berjudul :

"Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024"

Renja ini secara garis besar mengupas tentang Evaluasi pelaksanaan rencana kerja, Analisis kinerja pelayanan, Review rancangan awal RKPD, Isu-isu penting, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Serta Indikator Kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan segala keterbatasan dan kesempurnaan penyusunan. Penyusunan Renja dari perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu disini. Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya, oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna sempurnanya Renja ini. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 maupun tahun-tahun berikutnya yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra tahun 2021-2026 dalam melaksanakan tugasnya maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Ampana, Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

VIYAYANTISYAH LATJUBA, ST., M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19710318 200012 2 003

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 6
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ... 9
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....
BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 12
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP 13
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DARAH 15
BAB V PENUTUP 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una - Una sebagai unit kerja yang menyangkut Pelayanan yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dan Bidang Penanaman Modal diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka disusunlah Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan OPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra OPD yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una-Una sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengendalian Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Percanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4)
15. Peraturan Daerah Kab.Tojo Una-Una No.10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Menjelaskan Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 Kabupaten Tojo Una – Una.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una - Una untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

Dan adapun maksud di susunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una - Una Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una - Una dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin di capai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Alternatif lain pernyataan maksud :

Memberikan pedoman kerja tahun 2024 bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una - Una, sesuai dengan Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Penanam Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una - Una dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una – Una

2. Terwujudnya keselarasan rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan perencanaan tahunan dan,
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan konsitensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini berisikan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan DPMPTSP

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2023

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una – Una tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una - Una dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una - Una, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncakan di dalam Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una – Una berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas

pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una - Una. Keberhasilan kinerja OPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una – Una dapat dilihat pada tabel berikut ini:

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPMPTSP
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NO	Indikator *) Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	Tahun 2022 (tahun n-2)	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**Kesesuaian waktu penerbitan izin dengan SOP yang ditetapkan**											
1	Surat Izin Usaha jasa Konstruksi (SIUJK)	5 Hari	100 %	15 Izin	35 Izin	35 Izin	25 Izin	9 Izin	-	35 Izin	25 Izin	
2	PAUD	3 Hari	100 %	25 Izin	25 Izin	25 Izin	25 Izin	49 Izin	5 Izin	25 Izin	25 Izin	
3	Siup Perorangan / TDP Perorangan	3 Hari	100 %	300 Izin	300 Izin	300 Izin	300 Izin	-		300 Izin	300 Izin	
4	SKPD	3 Hari	100 %	5 Iz in	5 Izin	5 Izin	5 Izin	-		5 Izin	5 Izin	
5	SIUP	3 Hari	100 %	250 Izin	250 Izin	250 Izin	250 Izin	214 Izin	45 Izin	250 Izin	250 Izin	
6	Izin TDG / TDR	5 Hari	100 %	11 Izin	8 Izin	8 Izin	10 Izin	4 Izin	8 Izin	8 Izin	10 Izin	
7	Izin TDI	3 Hari	100 %	147 Izin	147 Izin	147 Izin	150 Izin	59 Izin	10 Izin	147 Izin	150 Izin	
8	Izin TDUP	3 Hari	100 %	10 Izin	3 Izin	3 Izin	7 Izin	-		3 Izin	7 Izin	
9	NIB	3 Hari	100 %	200 Izin	250 Izin	400 Izin	560 Izin	535 Izin	114 Izin	400 Izin	560 Izin	
10	Pangkalan Minyak Tanah (PMT)	3 Hari	100 %	-	-	-	-	-		-	-	
11	Izin Usaha Perikanan (IUP)	6 Hari	100 %	10 Izin	10 Izin	10 Izin	10 Izin	-		10 Izin	10 Izin	

12	Izin Usaha Industri (IUI)	3 Hari	100 %	5 Izin	4 Izin	4 Izin	5 Izin	-		4 Izin	5 Izin	
13	Izin Trayek	5 Hari	100 %	5 Izin	3 Izin	3 Izin	4 Izin	-		3 Izin	4 Izin	
14	Izin Apotik	5 Hari	100 %	6 Izin	5 Izin	5 Izin	6 Izin	13 Izin	5 Izin	5 Izin	6 Izin	
15	Izin Toko Obat	7 Hari	100 %	1 Izin	1 Izin	1 Izin	2 Izin	2 Izin		1 Izin	2 Izin	
16	Izin Industri Rumah Tangga Pangan	20 Hari	100 %	10 Izin	20 Izin	20 Izin	15 Izin	14 Izin	9 Izin	20 Izin	15 Izin	
17	Izin Praktek Dokter	5 Hari	100 %	45 Izin	47 Izin	47 Izin	50 Izin	60 Izin	25 Izin	47 Izin	50 Izin	
18	Izin Praktek Apoteker	7 Hari	100 %	15 Izin	17 Izin	17 Izin	20 Izin	15 Izin	13 Izin	17 Izin	20 Izin	
19	Izin Praktek Perawat	7 Hari	100 %	20 Izin	20 Izin	20 Izin	35 Izin	110 Izin	78 Izin	20 Izin	35 Izin	
20	Izin Praktek Analis Kesehatan	7 Hari	100 %	10 Izin	7 Izin	7 Izin	6 Izin	-	-	7 Izin	6 Izin	
21	Izin Praktek Bidan	7 Hari	100 %	95 Izin	195 Izin	195 Izin	200 Izin	162 Izin	63 Izin	195 Izin	200 Izin	
22	Izin Praktek Fisioterapi	7 Hari	100 %	1 Izin	3 Izin	3 Izin	1 Izin	2 Izin	-	3 Izin	1 Izin	
23	Izin Praktek Asisten Apoteker	7 Hari	100 %	3 Izin	3 Izin	3 Izin	3 Izin	-	-	3 Izin	3 Izin	
24	Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	5 Hari	100 %	3 Izin	3 Izin	3 Izin	3 Izin	-	-	3 Izin	3 Izin	
25	Izin Lingkungan	7 Hari	100 %	15 Izin	15 Izin	15 Izin	15 Izin	12 Izin	-	15 Izin	15 Izin	
26	Izin Lokasi	14 Hari	100 %	5 Izin	5 Izin	5 Izin	7 Izin	3 Izin	-	5 Izin	7 Izin	
27	Izin Operasional Rumah Sakit	20 Hari	100 %	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	-	1 Izin	1 Izin	
28	Izin Operasional Klinik	20 Hari	100 %	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	-	1 Izin	1 Izin	
29	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/PBG	21 Hari	100 %	375 Izin	400 Izin	400 Izin	450 Izin	155 Izin	1 Izin	400 Izin	450 Izin	
30	Rekomendasi Permintaan Sumbangan	3 Hari	100 %	1 Izin	1 Izin	1 Izin	1 Izin	-	-	1 Izin	1 Izin	

31	Rekomendasi RT/RW (PKKPR)	3 Hari	100 %	10 Izin	10 Izin	10 Izin	10 Izin	75 Izin	5 Izin	10 Izin	10 Izin	
32	Izin Pemotongan Hewan	6 Hari	100 %	2 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin	8 Izin	-	2 Izin	2 Izin	
33	Izin Prinsip	3 Hari	100 %	3 Izin	3 Izin	3 Izin	3 Izin	-	-	3 Izin	3 Izin	
34	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	3 Hari	100 %	5 Izin	5 Izin	5 Izin	5 Izin	3 Izin	1 Izin	5 Izin	5 Izin	
35	Izin Kerja Perawat (SIKP)	7 Hari	100 %	250 Izin	320 Izin	320 Izin	350 Izin	76 Izin	-	320 Izin	350 Izin	
36	Izin Kerja Tenaga Tehnis Kefarmasian (IKTTK)	7 Hari	100 %	25 Izin	25 Izin	25 Izin	25 Izin	10 Izin	-	25 Izin	25 Izin	
37	Izin Kerja Tenaga Epidemiologi (IKTEPID)	7 Hari	100 %	2 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin	-	1 Izin	2 Izin	2 Izin	
38	Izin Kerja Tenaga Gizi (IKTGz)	7 Hari	100 %	7 Izin	10 Izin	10 Izin	10 Izin	5 Izin	4 Izin	10 Izin	10 Izin	
39	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	7 Hari	100 %	10 Izin	10 Izin	10 Izin	10 Izin	23 Izin	5 Izin	10 Izin	10 Izin	
40	Izin Praktek Penata Anastesi (IPPA)	7 Hari	100 %	5 Izin	5 Izin	5 Izin	5 Izin	1 Izin	-	5 Izin	5 Izin	
41	Izin Praktek Radiografer (IPRAD)	7 Hari	100 %	5 Izin	5 Izin	5 Izin	5 Izin	1 Izin	-	5 Izin	5 Izin	
42`	Izin Operasional Optik (IO)	10 Hari	100 %	2 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin	1 Izin	-	2 Izin	2 Izin	
43	Izin Refraksionis Optisien (IPRO)	10 Hari	100 %	3 Izin	3 Izin	3 Izin	3 Izin	1 Izin	-	3 Izin	3 Izin	
44	Izin Tenaga Kerja Sanitasi (SIKTS)	7 Hari	100%	5 Izin	4 Izin	4 Izin	3 Izin	1 Izin	5 Izin	4 Izin	3 Izin	
45	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	7 Hari	100 %	3 Izin	4 Izin	4 Izin	5 Izin	3 Izin	-	4 Izin	5 Izin	
II	Realisasi Investasi PMDN	(Rp. Milyar)	-	94,17	96,67	99,17	101,67	95,864		99,17	101,67	
	Realisasi Investasi PMA	(Rp. Milyar)	-					17,922				

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN OPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una-Una merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan sasaran strategis meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan

perizinan dan non perizinan dan terciptanya iklim investasi yang menarik dan kondusif serta kemudahan berusaha di Kabupaten Tojo Una-Una.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan aspek-aspek terkait dengan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan. Dalam upaya peningkatan investasi di daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasikan kepada segenap lapisan pegawai dan stakeholder.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Tersusunnya data potensi investasi daerah yang informatif bagi para calon investor.
2. Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Menciptakan iklim investasi yang baik dan memberikan kemudahan berusaha kepada investor.
4. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.
5. Meningkatnya pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.
7. Mendirikan mall pelayanan publik (MPP) dengan tujuan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, kenyamanan, dan keamanan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam mendapatkan pelayanan untuk berusaha di daerah.
8. Memaksimalkan penanganan pengaduan masyarakat; dan
9. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur di bidang penanaman modal dan perizinan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis

kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel terlampir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DPMPTSP KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una - Una selama tahun 2023 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah Sesuai dengan arahan presiden terpilih periode 2020-2024, dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: “BKMP yang Andal, Provesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dan Tujuan BKPM maka sasaran strategis yang ingin dicapai BKPM periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
2. Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal.
3. Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Efektif dan Melayani.

Adapun Prioritas dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una-Una guna mendukung kebijakan nasional tertuang dalam tabel berikut.

Tabel III.I
Prioritas dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH
1	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Survey Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Memajukan Daerah	Realisasi Investasi Daerah Sektor Unggulan	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menujukan tingkat prioritas tertinggi dalam hal pelayanan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2023 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. III.2
Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
1	Meningkatkan Kualitas dan kemudahan Layanan Investasi Daerah	Pelayanan berbasis sistem informasi pelayanan perizinan online	100 %
2	Meningkatnya nilai investasi pada sektor unggulan daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	2,59%

Tabel. III.3

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Survey Kepuasan Masyarakat	90
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	99,17 Milyar

Tabel. III.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
1	Realisasi Investasi Daerah Sektor Unggulan	Survey Kepuasan Masyarakat	90
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.Miliar)	99,17
		Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BB

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DPMPTS Kab. Tojo Una-Una

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una una yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta prognosisnya dapat dilihat pada Lampiran IV.2.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una - Una dan RKPD Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir Tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una Una.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2021-2026 yaitu: ***"Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una Tangguh, Maju dan Sejahtera"***

Ampana, Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

VIYAYANTISYAH LATJUBA, ST., M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19710318 200012 2 003

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD
DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2023
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD sd Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan sd Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Capaian Ta Perangkat Da 20
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)
1	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**	**B**	**CC**	**B**	**B**	**100**	**B**	
	2.18.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100*	*100 %*	*300*
	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	2 Dok	0 Dok	*0*	2 Dok	*4*
	2.18.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Tersedianya gaji dan tunjangan ASN*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100*	*100 %*	*300*
	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 Org	24 Org	24 Org	24 Org	*100*	24 Org	*72*
	1.06.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Guna Menunjang Kinerja Aparatur*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100*	*100 %*	*300*
	2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	*100*	4 Paket	*12*
	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	*100*	15 Paket	*45*
	2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	35 Paket	35 Paket	*100*	35 Paket	*105*
	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	*100*	2 Paket	*6*

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD sd Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan sd Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraa Capaian Ta Perangkat Da 2(
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)
	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Lap	30 Lap	40 Lap	40 Lap	*100*	50 Lap	*120*
	2.18.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Tersedianya Barang Yang Dibutuhkan Untuk Pelayanan*	*18 Unit*	*2 Unit*	*18 Unit*	*18 Unit*	*100*	*15 Unit*	*35*
	2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	2 unit	4 unit	*200*	3 unit	*9*
	2.18.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor Untuk Menunjang Kinerja Aparatur*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100*	*100 %*	*300*
	2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	*100*	2 Lap	*6*
	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	*100*	2 Lap	*6*
	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	*100*	1 Lap	*3*
	2.18.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*	*Tepeliharaanya Barang/Aset Daerah Dengan Baik*	*23 unit*	*23 unit*	*23 unit*	*23 unit*	*100*	*23 unit*	*69*
	2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	*100*	8 Unit	*24*
	2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	*100*	14 Unit	*42*
	1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	*100*	1 Unit	*3*

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD sd Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan sd Tahun n-3 (2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Perkiraa Capaian Ta Perangkat Da 2
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)
02	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (Investor)**	**20**	**Perusahaan**	**20**	**Perusahaan**	**20**	**Perusahaan**	**20**	**Perusahaan**	***100***	**23**	**Perusahaan**	*63*
	2.18.02.2.01	*Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Perentase Terlaksananya Kegiatan Pemberian/Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*100*	*100*	*%*	*300*
	2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1	Keg. Usaha	0	Keg. Usaha	1	Keg. Usaha	1	*0*	2	Keg. Usaha	*3*
	2.18.02.2.02	*Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*	*Persentase Tersedianya Peta Potensi Daerah*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*100*	*100*	*%*	*300*
	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	Dok	0	Dok	1	Dok	1	*100*	1	Dok	*2*
03	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota**	**2.73**	**%**	**2**	**%**	**2.73**	**%**	**2.73**	***100***	**2.65**	**%**	*7*
	2.18.03.2.01	*Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*100*	*100*	*%*	*300*
	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	Dok	2	Dok	2	Dok	0	*0*	1	Dok	*3*
04	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan**	**85**	**SKM**	**64**	**SKM**	**85**	**SKM**	**85**	***100***	***87***	***SKM***	*236*

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD sd Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan sd Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraa Capaian Ta Perangkat Da 2(
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)
	2.18.04.2.01	*Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*	*Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100*	*100 %*	*300*
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha	1625 Pelaku Usaha	*108.3333333*	250 Pelaku Usaha	*3,375*
	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	200 Keg. Usaha	200 Keg. Usaha	200 Keg. Usaha	200 Keg. Usaha	*100*	175 Keg. Usaha	*575*
	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25 Orang	20 Orang	25 Orang	- Orang	*0*	25 Orang	*45*
05	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Tercapainya realisasi penanaman modal Rp Miliar)**	**94.17 Milyar**	**91.67 Milyar**	**94.17 Milyar**	**91.67 Milyar**	**97.34522672**	**96.67 Milyar**	*280*
	2.18.05.2.01	*Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Terealisasinya Nilai Investasi PMA/PMDN*	*65.00 %*	*59.3 %*	*65.00 %*	*65 %*	*100*	*75.00 %*	*199*

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD sd Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan sd Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraa Capaian Ta Perangkat Da 2(
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)
	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	20 Keg. Usaha	20 Keg. Usaha	20 Keg. Usaha	38 Keg. Usaha	*190*	23 Keg. Usaha	*81*
06	**2.18.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP (%)**	**50 %**	**45 %**	**50 %**	**50 %**	**100**	**55 %**	**150**
	2.18.05.2.01	*Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Tersedianya Data Informasi Perusahaan Yang Berinvestasi dan Mengurus Perizinan dan Non Perizinan*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100*	*100 %*	*300*
	2.18.05.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	*100*	3 Dok	*9*

Ampana, Maret 2023
KEPALA DINAS DPMPTSP

VIYAYANTISYAH LATJUBA, ST., M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19710318 200012 2 003

n Realisasi ırget Renstra ıerah s/d tahun 022
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11=(10/4)
300
200
300
300
300
300
300
300
300
300

n Realisasi rget Renstra erah s/d tahun 022
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11=(10/4)
300
194
450
300
300
300
300
300
300
300
300
300

n Realisasi rget Renstra erah s/d tahun 022
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11=(10/4)
315
300
-
300
200
270
300
150
278

n Realisasi rget Renstra erah s/d tahun 022
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11=(10/4)
300
225
288
180
297
307

n Realisasi rget Renstra erah s/d tahun 022
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11=(10/4)
405
300
300
300

Tabel III.I

Prioritas dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelay

NO	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH
1	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Daerah
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Memajukan Daerah	Realisasi Investasi Daerah Sektor Unggulan

anan Terpadu Satu Pintu

SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Survey Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional

Tabel. III.2

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH
1	Meningkatkan Kualitas dan kemudahan Layanan Investasi Daerah	Pelayanan berbasis sistem informasi pelayanan perizinan online
2	Meningkatnya nilai investasi pada sektor unggulan daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah

Satu Pintu

TARGET KINERJA TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
100%
2.59%

Tabel. III.3

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Survey Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional

Satu Pintu

TARGET KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
90
99,17 Milyar

Tabel. III.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan T

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
1	Realisasi Investasi Daerah Sektor Unggulan	Survey Kepuasan Masyarakat
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.Miliar)
		Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

erpadu Satu Pintu

TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
90
99.17
BB

Tabel II.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

KABUPATEN TOJO UNA - UNA

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**DPMPTSP**	**Nilai SAKIP OPD**		**3,317,369,168**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**DPMPTSP**	**Nilai SAKIP OPD**		**3,317,369,168**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**DPMPTSP**	*Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD*		**3,523,680**	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	**DPMPTSP**	*Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD*		**3,523,680**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	3,523,680	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	3,523,680
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**DPMPTSP**	*Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*		**2,597,845,488**	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	**DPMPTSP**	*Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*		**2,597,845,488**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Org	2,597,845,488	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Org	2,597,845,488
	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	**DPMPTSP**	*Persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Kesejahteraan Pegawai DPMPTSP*		**-**	*Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah*	**DPMPTSP**	*Persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Kesejahteraan*		**-**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Org	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Org	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**DPMPTSP**	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Guna Menunjang Kinerja*		**167,500,000**	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	**DPMPTSP**	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Guna Menunjang Kinerja*		**167,500,000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1,500,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	2,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	2,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	34,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	34,000,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	120,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	120,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**DPMPTSP**	*Tersedianya Barang Yang Dibutuhkan Untuk Pelayanan*		**3,000,000**	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	**DPMPTSP**	*Tersedianya Barang Yang Dibutuhkan Untuk Pelayanan*		**3,000,000**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3,000,000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**DPMPTSP**	*Persentase Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor Untuk Menunjang Kinerja*		**502,000,000**	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	**DPMPTSP**	*Persentase Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor Untuk Menunjang*		**502,000,000**
	Penyediaan Jasa surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3,000,000	Penyediaan Jasa surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	39,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	39,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	460,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	460,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**DPMPTSP**	*Tepeliharaanya Barang/Aset Daerah Dengan Baik*		**43,500,000**	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	**DPMPTSP**	*Tepeliharaanya Barang/Aset Daerah Dengan Baik*		**43,500,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	29,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	29,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	9,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	9,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,500,000
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**KAB. TOJO UNA-UNA**	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (Investor)**		**40,000,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**KAB. TOJO UNA-UNA**	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (Investor)**		**40,000,000**
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberian/Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*		**20,000,000**	*Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*		*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberian/Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*		**20,000,000**
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dok	-	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dok	-
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2 Keg. Usaha	20,000,000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2 Keg. Usaha	20,000,000

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		*Persentase Tersedianya Peta Potensi Daerah*		**20,000,000**	*Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*		*Persentase Tersedianya Peta Potensi Daerah*		**20,000,000**
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dok	20,000,000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dok	20,000,000
3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**SULTENG**	**Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota**		**10,000,000**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**SULTENG**	**Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota**		**10,000,000**
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal*		**10,000,000**	*Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*		*Persentase Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal*		**10,000,000**
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dok	10,000,000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 Dok	10,000,000
4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**KAB. TOJO UNA-UNA**	**Persentase Perijinan yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP (%)**		**80,000,000**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**KAB. TOJO UNA-UNA**	**Persentase Perijinan yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP**		**80,000,000**
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		*Persentase Terlaksananya Kegiatan Perizinan dan Non Perizinan*		**80,000,000**	*Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*		*Persentase Terlaksananya Kegiatan Perizinan dan Non Perizinan*		**80,000,000**
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	250 Pelaku Usaha	20,000,000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	250 Pelaku Usaha	20,000,000
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	175 Keg. Usaha	50,000,000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	175 Keg. Usaha	50,000,000
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25 Org	10,000,000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25 Org	10,000,000
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**KAB. TOJO UNA-UNA**	**Tercapainya realisasi penanaman modal Rp Miliar)**		**379,175,000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**KAB. TOJO UNA-UNA**	**Tercapainya realisasi penanaman modal Rp Miliar)**		**379,175,000**
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase Terealisasinya Nilai Investasi PMA/PMDN*		**379,175,000**	*Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*		*Persentase Terealisasinya Nilai Investasi PMA/PMDN*		**379,175,000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	23 Keg. Usaha	379,175,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	23 Keg. Usaha	379,175,000
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP**	**Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP (%)**		**25,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP**	**Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP (%)**		**25,000,000**
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase Tersedianya Data Informasi Perusahaan Yang Berinvestasi dan Mengurus Perizinan dan Non Perizinan*		**25,000,000**	*Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		*Persentase Tersedianya Data Informasi Perusahaan Yang Berinvestasi dan Mengurus Perizinan*		**25,000,000**
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dok	25,000,000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dok	25,000,000
					3,851,544,168					3,851,544,168

Ampana, Maret 2023
KEPALA DINAS DPMPTSP

VIYAYANTISYAH LATJUBA, ST.
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19710318 200012 2 0(

CATATAN PENTING
12
DAU **Tidak Terlaksana**
Tidak Terlaksana
Tidak Terlaksana **Tidak Terlaksana** **Tidak Terlaksana**
DAU **Tidak Terlaksana**

CATATAN PENTING
DAU
Tidak Terlaksana
DAU
Tidak Terlaksana
Tidak Terlaksana
DAU
DAU
Tidak Terlaksana

, M.Si

03

Tabel IV.I
Sasaran dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	***PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL***
		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan
3.	Meningkatnya Investasi Daerah	***PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL***
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		Evaluasi Pelaksaan Pemberiaan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Periznan dan Non Perizinan Berbasis Sitem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun 2024

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2024	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 (Rp.)
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN			
						TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	2.18.01	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	B					**3,437,835,899**	**3,515,312,267**
I.1	2.18.01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD	100%	**513,680**	**565,048**
I.1.1	2.18.01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			513,680	565,048
	2.05	**Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								Persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Kesejahteraan Pegawai DPMPTSP	100%	**25,000,000**	**27,500,000**
	2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang			25,000,000	27,500,000
I.2	2.18.01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**2,663,072,219**	**2,663,072,219**
I.2.1	2.18.01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang			2,663,072,219	2,663,072,219

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2024	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 (Rp.)
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN			
						TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET		
I.3	2.18.01 2.06	**Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**								Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Guna Menunjang Kinerja Aparatur	100%	**174,000,000**	**191,400,000**
I.3.1	2.18.01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1,000,000	1,100,000
I.3.2	2.18.01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket			1,000,000	1,100,000
I.3.3	2.18.01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket			40,000,000	44,000,000
I.3.4	2.18.01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			7,000,000	7,700,000
I.3.5	2.18.01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan			125,000,000	137,500,000
I.4	2.18.01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								Tersedianya Barang Yang Dibutuhkan Untuk Pelayanan	16 Unit	**500,000**	**550,000**

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2024	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 (Rp.)
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN			
						TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET		
I.4.2	2.18.01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit			500,000	550,000
I.5	2.18.01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								Persentase Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor Untuk Menunjang Kinerja Aparatur	100%	**530,500,000**	**583,550,000**
I.5.1	2.18.01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			1,500,000	1,650,000
I.5.2	2.18.01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			55,000,000	60,500,000
I.5.3	2.18.01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			474,000,000	521,400,000
I.6	2.18.01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								Tepeliharaanya Barang/Aset Daerah Dengan Baik	23 Unit	**44,250,000**	**48,675,000**

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2024	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 (Rp.)
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN			
						TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET		
I.6.1	2.18.01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit			29,250,000	32,175,000
I.6.2	2.18.01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit			9,500,000	10,450,000
I.6.3	2.18.01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			5,500,000	6,050,000
II	2.18.02	***PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL***		Meningkatnya Investasi Daerah	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (Perusahaan)	26 Perusahaan					**17,500,000**	**19,250,000**
II.1	2.18.02 2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberian/Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100%	**15,000,000**	**16,500,000**

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2024	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 (Rp.)
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN			
						TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET		
II.1.2	2.18.02 2.01 02	Evaluasi Pelaksaan Pemberiaan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2 Keg. Usaha			15,000,000	16,500,000
II.2	2.18.02 2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**								Persentase Tersedianya Peta Potensi Daerah	100%	**2,500,000**	**2,750,000**
II.2.1	2.18.02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota						Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen			2,500,000	2,750,000
III	2.18.03	***PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL***		Meningkatnya Investasi Daerah	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	2.59%					**10,000,000**	**11,000,000**
III.1	2.18.03 2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								Persentase Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	100%	**10,000,000**	**11,000,000**
III.1.1	2.18.03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen			10,000,000	11,000,000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2024	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 (Rp.)
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN			
						TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET		
IV	2.18.04	***PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL***		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	90					**55,000,000**	**60,500,000**
IV.1	2.18.04 2.01	**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	100%	**55,000,000**	**60,500,000**
IV.1.1	2.18.04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200 Pelaku Usaha			35,000,000	38,500,000
IV.1.2	2.18.04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	200 Keg. Usaha			15,000,000	16,500,000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2024	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 (Rp.)
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN			
						TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET		
IV.1.3	2.18.04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan						Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20 Orang			5,000,000	5,500,000
V	2.18.05	***PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL***		Meningkatnya Investasi Daerah	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tercapainya realisasi penanaman modal Rp Miliar)	99,17 Milyar					**465,100,000**	**511,610,000**
V.I	2.18.05 2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								Persentase Terealisasinya Nilai Investasi PMA/PMDN	85.00%	**465,100,000**	**511,610,000**
V.I.1	2.18.05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	26 Keg. Usaha			465,100,000	511,610,000
VI	2.18.06	***PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL***		Meningkatnya Investasi Daerah	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP (%)	60%					**25,000,000**	**27,500,000**

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2024	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 (Rp.)
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN			
						TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET		
VI.1	2.18.06 2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								Persentase Tersedianya Data Informasi Perusahaan Yang Berinvestasi dan Mengurus Perizinan dan Non Perizinan	100%	**25,000,000**	**27,500,000**
VI.1	2.18.06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Periznan dan Non Perizinan Berbasis Sitem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen			25,000,000	27,500,000
												4,010,435,899	**4,145,172,267**

KET Prioritas Pembangunan Nasional
15

KET Prioritas Pembangunan Nasional

KET Prioritas Pembangunan Nasional

KET Prioritas Pembangunan Nasional

KET Prioritas Pembangunan Nasional

KET Prioritas Pembangunan Nasional

KET Prioritas Pembangunan Nasional

KET Prioritas Pembangunan Nasional

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**4.010.435.899,00**							**4.128.672.267,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.010.435.899,00**							**4.128.672.267,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**4.010.435.899,00**							**4.128.672.267,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**BB Nilai**		**BB Nilai**	**BB Nilai**	**3.437.835.899,00**						**BB Nilai**	**3.515.312.267,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD*	100 %		100 %	100 %	513.680,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	2 Dokumen	565.048,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	513.680,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	2 Dokumen	565.048,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*	100 %		100 %	100 %	2.663.072.219,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	24 Orang/bulan	2.663.072.219,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan		24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.663.072.219,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	24 Orang/bulan	2.663.072.219,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Kesejahteraan Pegawai DPMPTSP*	100 %		100 %	100 %	25.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	1 Orang	27.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	25.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	1 Orang	27.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Guna Menunjang Kinerja Aparatur*	100 %		100 %	100 %	174.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	4 Paket	191.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	4 Paket	1.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	1.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	15 Paket	1.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	35 Paket	40.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	35 Paket	44.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	2 Paket	7.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	125.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	40 Laporan	137.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Yang Dibutuhkan Untuk Pelayanan*	16 Unit		16 Unit	16 Unit	500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	2 Unit	550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	2 Unit	550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor Untuk Menunjang Kinerja Aparatur*	100 %		100 %	100 %	530.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	2 Laporan	583.550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	2 Laporan	1.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	55.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	2 Laporan	60.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	474.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	1 Laporan	521.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tepeliharaanya Barang/Aset Daerah Dengan Baik*	23 Unit		23 Unit	23 Unit	44.250.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	8 Unit	48.675.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	29.250.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	8 Unit	32.175.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	14 Unit	9.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	14 Unit	10.450.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	1 Unit	6.050.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (Perusahaan)***	**26,00 Perusahaan**		**26,00 Perusahaan**	**26,00 Perusahaan**	**17.500.000,00**						**26,00 Perusahaan**	**2.750.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberian/Evaluasi pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	100 %		100 %	100 %	15.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	2 Kegiatan Usaha	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2 Kegiatan Usaha		2 Kegiatan Usaha	2 Kegiatan Usaha	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	2 Kegiatan Usaha	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Persentase Tersedianya Peta Potensi Daerah*	100 %		100 %	100 %	2.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	1 Dokumen	2.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	1 Dokumen	2.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota***	**2,59 Persen**		**2,59 Persen**	**2,59 Persen**	**10.000.000,00**						**2,59 Persen**	**11.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal*	100 %		100 %	100 %	10.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	1 Dokumen	11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	1 Dokumen	11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan***	**90 SKM**		**90 SKM**	**90 SKM**	**55.000.000,00**						**90 SKM**	**60.500.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan*	100 %		100 %	100 %	55.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	200 Pelaku Usaha	60.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200 Pelaku Usaha		200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	35.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	200 Pelaku Usaha	38.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	200 Kegiatan Usaha		200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	200 Kegiatan Usaha	16.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	20 Orang	5.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Tercapainya realisasi penanaman modal Rp Miliar)***	**99,17 Miliar**		**99,17 Miliar**	**99,17 Miliar**	**465.100.000,00**						**99,17 Miliar**	**511.610.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terealisasinya Nilai Investasi PMA/PMDN*	85 %		85 %	85 %	465.100.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	195 Pelaku Usaha	511.610.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	195 Pelaku Usaha		195 Pelaku Usaha	195 Pelaku Usaha	355.414.500,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	195 Pelaku Usaha	390.955.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	26 Kegiatan Usaha		26 Kegiatan Usaha	26 Kegiatan Usaha	109.685.500,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	26 Kegiatan Usaha	120.654.050,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP (%)***	**60,00 Persen**		**60,00 Persen**	**60,00 Persen**	**25.000.000,00**						**60,00 Persen**	**27.500.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tersedianya Data Informasi Perusahaan Yang Berinvestasi dan Mengurus Perizinan dan Non Perizinan*	100 %		100 %	100 %	25.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	3 Dokumen	27.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	3 Dokumen	27.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H							**4.010.435.899,00**							**4.128.672.267,00**	

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN 2024

1. **Perpustakaan**

    a. Sarana dan prasarana bidang perpustakaan masih terbatas;
    b. Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pengelola Perpustakaan;
    c. Belum tersedianya tenaga fungsional perpustakaan;
    d. Masih rendahnya kesadaran OPD menatakelola dokumen yang bernilai strategis dari sisi hukum dan nilai historis;
    e. Masih minimnya Koleksi judul buku/disiplin ilmu.

2. **Kearsipan**

    a. Sarana dan prasarana kearsipan masih terbatas;
    b. Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola kearsipan;
    c. Belum tersedianya tenaga fungsional kearsipan.

Sampai dengan tahun 2020, berbagai pengembangan pepustakaan dan peningkatan pemanfaatan arsip telah menunjukan kemajuan secara umum kondisi pembangunan Perpustakaan dan pemanfaatan arsip dapat diurai sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan kreatifitas Perpustakaan di 12 Kecamatan
2. Terbentuknya Perpustakaan desa/kelurahan sebanyak pad 12 Kecamtan
3. Meningkatnya koleksi Perpustakaan umum
4. Meningkatnya apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap peran perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat
5. Tersedianya Gedung Kearsipan Untuk pengarsipan arsip arsip penting
6. Tertatanya arsip pada Dinas melalui sosialisasi dan supervisi

7. Meningkatnya kualitas Kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KabupatenTojo Una-Una mempunyai 2 (dua) urusn yaitu urusan perpustakaan dan urusan Kearsipan, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, Perpustakaan sebagai wadah belajar sepanjang hayat berperan penting dalam wilayah banyak potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cekat, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelengaraan Pendidikan Nasional.

Berdasarkan amanat UU RI No. 43 Tahun 2007, Tentang Perpustakaan, Perpustakaan diselenggaran berdasarkan asaa pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, keprofesional, kerukunan dan kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatakan kecerdasan dan kebudayaan bangsa (pasal 2 dan 3). Sementara itu, pembanguna perpustakaan bertujuan meberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memberikan wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (pasal 4).

Sampai dengan tahun 2023, berbagai pengembangan pepustakaan dan peningkatan pemanfaatan arsip telah menunjukan kemajuan secara umum kondisi pembangunan Perpustakaan dan pemanfaatan arsip dapat diurai sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan kreatifitas Perpustakaan di 12 Kecamatan
2. Terbentuknya Perpustakaan desa/kelurahan sebanyak pad 12 Kecamtan
3. Meningkatnya koleksi Perpustakaan umum
4. Meningkatnya apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap peran perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat
5. Tersedianya layanan Perpustakaan melalui perputskaan berbasis digital
6. Tertatanya arsip pada Dinas melalui sosialisasi dan supervisi
7. Meningkatnya kualitas Kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selain melaksanakan dibidang Perpustakaan juga melaksankan urusan kearsipan. Berdasrkan UU RI No. 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori,.... dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, harus dikelola dan diselamatakan. Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, diperlukan pertanggungjawaban kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dengan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan Nasional yang handal.

Upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan, membutuhkan perencanaan strategis Dinas Perpustakaan dan Kerasipan yang memuat visi, misi, tujuan, kebijkan program dan kegiatan. Sesuai dengan pasal 27 ayat 2 PP RI No. 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, tatacara penyusuna, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renja SKPD dengan mengacu pada Renstra SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DaerahTahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerahuntuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tojo Una Una sebagai unit kerja perencanaan yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tojo Una Una yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun

kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tojo Una Una, maka di susunlah Renja Dinas Perpustakaan dan KearsipanTahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipantahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hokum dalam penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipansebagaiberikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KabupatenTojo Una-Una Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor4);

16. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 KabupatenTojoUna-Una.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

Dan adapun maksud di susunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam..... mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Sebagai acuan untuk mengukur dan melakukan evaluas ikinerja tahunan.
3. Untuk memberikan arahan serta..... bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam tercapainya sasaran dan tujuan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tojo Una Una dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Terwujudnya keselarasan rencana strategisDinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan perencanaan tahunan dan,
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan dan Kea rsipan dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan konsitensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KabupatenTojo Una-Una tahun2023 mengacu pada permendagri nomor. 54 tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sitematika Penulisan Dokumen

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi PelaksanaanRenja Dinas Perpustakaan Dan PerpustakaanTahun 2023 Dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.3 Isu-isu Penting PenyelenggaraanTugas Dan Fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpsutakaan dan Kearsipan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Berisikan pejelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan subkegiatan, pejelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya,

serta tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TOJO UNA UNA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tojo Una-Una merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan rencana statregis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tojo Una-Una selama tahun 2023 (n-2) dan perkiraan target tahun 2024 (n-1).

Akuntabiltas merupakan suatu bentuk..... kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksankan secara periodik, terkiat dengan hal tersebut Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tojo Una-Una ini menjadikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tojo Una-Una selama tahun 2023 dan diperkirakan target Tahun 2024.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tojo Una Una tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuanDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabuapten Tojo Una Una dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tojo Una Una serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncakan di dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan *terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 (TigaPuluhEmpat) urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 (Dua Puluh Enam) urusan wajib dan 8 (Delapan) urusan pilihan. Review tersebut*

didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun-tahun sebelumnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TOJO UNA UNA TAHUN 2022DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Evaluasi pelaksanaan renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tojo Una Una tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tojo Una Una dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tojo Una Una berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANANDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1. Kedudukan

   BerdasarkanPerda No. 10 Tahun 2016 TentangPembentukan dan susunanperangkat Daerah KabupatenTojo Una-Una, kedudukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur…….

2. TugasPokok

   Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perencanaan, pembinaan tekniS, pengawasan dan mengendalikan serta merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas desentralisasi di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

3. Fungsi

   Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Penyelenggaraan Fungsi :

   a. Perumusan program kerja dan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan;

b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan pelaksanaan tugas dibidang perpustakaan dan kearsipan;

c. Membina bawahan di lingkungan kerja dinas perpustakaan dan kearsipan dan membimbing secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan kerja dinas perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan standarisasi dan kompetensi jabatan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

f. Melaksanakan sosialisasi pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan standarisasi dan kompetensi jabatan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terdapat kesamaan persepsi dan komitmen;

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan kerja dinas perpustakaan dan kearsipan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan dating;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan di bidang perpustakaan dan kearsipan baik secara lisan maupun tertulis; dan

i. Menyiapkanbahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelasanaan tugas dinas perpustakaan dan kearsipan.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi nya dinas perpustakaan dan kearsipan di dukung oleh 39 Pegawai yang terdiridari Pegawai Negeri Sipil 20 orang dan Non PNS 19 Orang dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

I. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

II. Sekretaris, terdiriatas :

   a. Sub. Bagian Penyusun,ProgramKeuangan dan Aset

   b. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

III. BidangPembinaan dan PengembanganPerpustakaan, terdiriatas :

a. SeksiPembinaan dan PengelahanBahan Pustaka
b. SeksiLayananSirkulasi, Otomasi dan Alih Media
c. Seksi Deposit dan Konservasi

IV. BidangPembinaan dan PengembanganKearsipan, Terdiridari :
a. SeksiPengelolaanArsipDinamis
b. SeksiAkusisi, Pengelolahan dan PreservasiArsip
c. SeksiLayananPemanfaatanArsipStati

V. Kelompokokjabatanfungsional (Pustakawan dan Arsiparis)

4. JumlahPegawai (SDM)

Tabel I
JumlahPegawai dan Klasifikasi Pendidikan Dinas Perpustakaandan Kearsipan
Tahun 2024

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	S2	4 Orang	
2.	S1	21 Orang	
3.	D3	2 Orang	
4.	D2	0 Orang	
5.	D1	0 Orang	
6.	SMA	1 Orang	

TabelII
JumlahPegawaiDinas Perpustakaan danKearsipan
MenurutGolongan
Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	IV/c	1 Orang	
2.	IV/b	1 Orang	
3.	IV/a	5 Orang	
4.	III/d	11 Orang	
5.	III/c	2 Orang	
6.	III/b	1 Orang	
7.	III/a	3 Orang	
8.	II/b	1 Orang	
9.	II/c	1 Orang	
10.	II/d	1 Orang	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagai berikut:

1. **Kondisi Geografis**
   Kondisi geografis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang merupakan wilayah kota yang baruberkembang, menjadi kendala dalam memantau secara intens setiap detail wilayah, karena setiap wilayah khususnya ancaman keamanan.

2. **Kondisi Sosiologis**
   Masyarakat Tojo Una-una secara sociocultiral merupakan masyarakat yang heterogen yang terdiri dari berbagai macam suku, agama,ras dan budaya. Hal ini di satu sisi menjadi suatu potensi kekayaan Budaya Daerah, namun disisi lain menyimpan potensi konflik yang dapat pecah apabila tidak dikelola dengan baik. Terlebih lagi Kabupaten Tojo Una-Una berbatasan langsung dengan daerah ex konflik Poso.

3. **Kurangnya SDM**
   Secara Internal kendala yang dihadapi adalah kurangnya SDM apartur pengelola kegiatan, sehingga dalam pelaksanaanya sering terjadi dismanagement dan capaian kinerja tidak maksimal

4. **Minimnya Sumber Pembiayaan**.
   Minimnya APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun anggaran 2023 menyebabkan minimnya kegiatan khususnya pemantauan dan monitoring situasi kantrantibmas di seluruh wilayah.

5. **Adanya *"Discontinue"*** proses perencanaan anggaran antara DPRD dan TAPD menyebabkan beberapa kegiatan penting tidak terakomodir

6. **Belum Memadainya Dokumen Renstra** sebagai master Perencanaan SKPD menyebabkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan kurang maksimal

7. **Kurangnyalapangankerjadan Pengganguran**

Kurangnya lapangan kerja, menyebabkan banyak masyarakat terutama warga pendatang yang mencari nafkah serabutan, seperti tukang batu, buruh dan menjadi ojek. Yang merupakan profesi sambilan karena kurangnya pendapatan dan lapangan kerjas erta modal usaha didalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

Mudahnya para remaja terpengaruh oleh orang lain, disebabkan karena mereka menganggur, tidak memiliki kegiatan positif, sehingga waktu luang yang adadiisi oleh hal-hal yang sering kali menimbulkan masalah perbuatan yang merusak linkungan.

8. **Kenakalan remaja dan tingkat pendidikan**

Meningkatnya angka kenakalan remaja, juga disebabkan oleh gaya hidup yang berubah. Kenakalan remaja terutama banyak terjadi ketika ada keramaian tertentu, misalnya ketika ada pentas olahraga, pentas musik, perayaan perkawinan, dan sebagainya. Jenis kenakalan remaja yang terjadi biasanya dalam bentuk perkelahian dan tawuran antar warga. Minimimnya pendidikan masyarakat juga sebagai penyebab timbulnya kenakalan remaja. Rendahnya tingkat pendidikkan menjadi pangkal dari kemungkinan terjadinya masalah di Kecamatan Dengan tingkat pendidikkan yang rendah, banyak masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk hidup layak sehingga dapat memicu melakukan apapun untuk dapat bertahan hidup misalnya pencurian.

9. **Ketidakadilan**

Terbatasnya sarana ibadah untuk non muslim menyebabkan agama tertentu menyelenggarakan ibadah keagamaan di rumahwarga. Kegiatan ini seringkali dicurigai sebagai upaya menyebarkan agama tertentu sehingga memicu ketidak harmonisan antar warga.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Rancangan Awal RKPD.Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tojo Una Una.

Kajian usulan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

Berdasarkan pemukiman yang berkembang di Kabupaten TojoUna-Una terbagi atas kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan serta kawasan pemukiman nelayan. Kawasan permukiman di perkotaan terdapat di Kecamatan Ampana Kota pada kelerengan yang datar. Hal ini mendukung fungsi dari Kecamatan Ampana Kota sebagai Ibu Kota Kabupaten, serta menjadi hasil review usulan program dan kegiatan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang akan di laksanakan terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang di emban oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah adalah sebagai berikut :

(1) Program pelayanan administrasi Perkantoran:

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. Koordinasi dan pembinaan dalam daerah
3. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
4. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran

(2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur:

1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5. Pengadaan Kendaraan Dinas

6. Pengadaan Gedung Bangunan Kantor

(3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur:

1. Pendidikan dan pelatihan formal

(4) Program PengembanganBudaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan:

1. Pengembangan minat baca dan budaya baca
2. Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
3. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah
4. Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
5. Peningkatan Layanan Perpustakaan,Dokumentasi dan Informasi
6. Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam
7. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
8. Pelestarian dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno
9. Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan
10. eningkatan Kapasitas Pengembangan Tenaga Fungsional.

(5) Program Perbaikan Sistem Administarsi Kearsipan

1. Penyusunan Sistem Indeks Katalog Arsip
2. Pengadaan Sarana Penyimpan Arsip
3. Penarikan Arsip Statis yang Bernilai Tinggi

(6) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Kearsipan:

1. Reproduksi dan Restorasi Dokumentasi Arsip Daerah
2. Reproduksi dan Restorasi Arsip Daerah
3. Fumigasi dan Konservasi Arsip Daerah

(7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Penyediaan Sarana layanan Informasi Arsip
2. Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Pemda
3. Pelatihan petugas Pengelola Arsip Pemda
4. Pelatihan Jadwal Retensi Arsip (JRA)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2020 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan packa konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Berdasarkan identifikasi secara tekstual, memang secara eksplisit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una menjadi prioritas pembangunan dari pada perwujudan Visi, Misi dan Program Bupati–Wakil Bupati Tojo Una-Una tahun 2021-2026; yang menitik beratkan pembangunan disektor:

- Pertanian
- kelautan
- Pariwisata

Sebagai Unsur pemerintah (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sejak tahun 2009 yang melaksanakanUrusanRumahTangga Daerah, dibidang pelayanan masyarakat yang memiliki *leading sector* dalam bidang penyelenggaraan pelayanan publik, bersama masyarakat memelihara Keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan kemasyarakatan, khususnya di wilayah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerahmaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah memiliki peran yang strategis dalam mendukung perwujudan Visi-Misi Bupati yang telah ditetapkan.

Berdasarkan RT RW Kawasan pemukiman yang berkembang di Kabupaten TojoUna-Una terbagi atas kawasan permukiman pedesaan danperkotaan serta kawasan pemukiman nelayan. Kawasan permukiman

Perkotaan terdapatdi Kecamatan Ampana Kota pada kelerengan yang datar. Hal ini mendukung fungsi dari Kecamatan Ampana Kota sebagai Ibu Kota Kabupaten.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertunbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasarat serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi kaberhasilan pelaksanaan MP3EI. Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang *multiplier effect*-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah darah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah selama lima tahun serta memberikan manfaat dalam meningkatkan prioritas pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerahpada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2018beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. T.III-I
Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan DaerahKabupatenTojo Una-Una

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2020	2021
MeningkatnyaKualitasPelayananKepada Masyarakat	TerwujudnyaPelayanan Prima Kepada Masyarakat	MeningkatnyaKualitasPelayanan Kepada Masyarakat	100%	90%
Meningkatnya Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Sarana dan Prasaran yang LayakBagiAparatur	Meningkatnyasarana dan Prasarana yangLayakbagiaparatur	100%	90%
MeningkatnyaKualitasAparatur	TerwujudnyaKualitas AparaturPemerintah Yang BerdayaSaing	TersedianyaPelatihan dan Pengembangan	100%	90%
MeningkatnyaPengembanganBudaya Baca	TerwujudnyaGemar Membaca pada Usia Dini	TerlaksananyaGemarMembaca Dan PengembaganPerpustakaan	100%	90%
MeningkatnyaPerbaikanSistem AdministrasiKearsipan	TerwujudnyaAdministrasi YangBaik dan Sempurna	TerlaksananyaSistemAdministrasi yang Baik	100%	90%
Penyelamatan dan PelestarianDokumen / Arsip Daerah	TerwujudnyaPelestarianDukumenArsip Daerah di Setiap SKPD	TerlaksananyaPenyelamatan dan PelestarianArsip	100%	90%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2020	2021
PeningkatanKualitasPelayananInformasi	Terwujudnya Program PeningkatanKualitasPelayananInformasi	Terlaksananya Pelayanan Informas Secara Baik Dan Benar	100%	90%

4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikanpermasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KabupatenTojoUna-Una yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel Berikut.**

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tojo Una-Una merupakan dokumen rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategi. Rencana kerja merupakan kondisi yang realistis dari perencanaan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KabupatenTojo Una-Una secara menyeluruh yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Keseimbangan gerak pembangunan mengisyaratkan bahwa aktivitas perencanaan harus bergulir dan mengalami perbaikan – perbaikan untuk peningkatan kualitasnya. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalam Rencana Kerja ini, namun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tojo Una-Una telah memiliki visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang dapat di jadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Sesuai dengan visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yaitu *"Terwujudnya Masyarakat Tojo Una-Una yang Cerdas dan Berdaya Saing Melalui Perkembangan Perpustkaan Serta Menjadikan Arsip Sebagai Bukti Akuntabilitas Kinerja Organisasi"* maka dengan visi ini diharapkan dapat memberikan motivasi tersendiri bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tojo Una-Una agar dapat menjadi motivator atau penggerak dalam Pembangunan Daerah di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan sehingga dapat merumuskan suatu Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Aspiratif, Normatif, Terukur, Akurat, Profesional yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh karyawan/karyawati Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tojo Una-Una untuk menjadikan Rencana Kerja ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tiap bidang lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KabupatenTojo Una-Una sehingga diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang lebih baik guna mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berdayasaing.

Ampana, 20 April 2023

Kepala Dinas Perpustakaan
Dan Kearsipan
Kabupaten Tojo Una-Una

Haerulwillah. S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630911 198603 1 012

No	Rancangan Awal RKPD			
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
1	2	3	4	5
	wajib			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Tojo Una Una	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pekantoran	100 %
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Terlksananya Perjalanan dinas luar daerah	12 Bln
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		Terlaksanya evaluasi perpustakaan dan arsip di kecamatan dan kelurahan	12 Bln
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran		Terlaksananya Ppenyediaan administrasi perkantoran	12 Bln
	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran		Terlaksananya pelayanan dengan baik dan benar	12 Bln
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Tojo Una Una	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor		Jumlah peralatan yang diadakan	2 unit
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah dan jenis barang yang dipelihara	1 unit
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional		jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	7 unt
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah dan jenis barang yang dipelihara	17 unt
	Pengadaan kendaraan dinas operasional		jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 unit
	pengadaan gedung/bangunan kantor		jumlah dan jenis gedung/bangunan yang diadakan	1 unit
3	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Tojo Una Una	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%
	Pendidikan Dan Pelatihan Formal Perpustakaan / Kearsipan		Jumlah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	12 Bln
4	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Kab. Tojo Una Una	Terlaksananya Gemar Mebaca Dan Pengembagan Perpustakaan	100%

	Pengembangan Minat dan Budaya Baca		Terlaksananya minat baca di tingkat usia dini	1 keg
	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca		Terlaksananya Sosialisasi budaya baca	1 keg
	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan Umum, Khusus, Sekolah dan Masyarakat		Terlaksananya Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan Umum, Khusus, Sekolah dan Masyarakat	12 bulan
	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca didaerah		Terlaksanya bantuan perpustakaan	1 keg
	Layanan Perpustakaan Dokumentasi dan Informasi		Terlaksana Layanan Perpustakaan Dokumentasi dan Informasi	12 bulan
	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam		Terlaksana Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	1 keg
	Penyediaan Bahan Pusta Daerah		Tersedianya bahan bacaan	1 keg
	Pelestarian dan Kandungan Bahan Pustaka termasud Naska Kuno		Terlaksana Pelestarian dan Kandungan Bahan Pustaka termasud Naska Kuno	1 keg
	Monitering evaluasi dan pelaporan		Terlaksana Monitering evaluasi dan pelaporan	1 keg

	Kapasitas Pengembangan Tenaga Fungsional		TerlaksananyaKapasitas Pengembangan Tenaga Fungsional	12 bulan
5	Program Perbaikan Sistim Administrasi Kearsipan	Kab. Tojo Una Una	Terlaksananya Program Perbaikan sistem Administrasi kearsipan	100%
	Penyusunan sistem katalok data		Terlaksananya sistem katalok data kearsipan	-
	Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip		Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan	-
	Penarikan Arsip Statis yag Bernilai Tinggi		Terlaksananya Penarikan Arsip Statis yag Bernilai Tinggi	1 Keg
6	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Kab. Tojo Una Una	Terlaksananya program penyelamatan dan pelestarian dokumen	100%
	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika		Terlaksananya penduplikatan dalam bentuk informatika	1 keg
	Reproduksi dan Restorasi Arsip Daerah		Terlaksananya Reproduksi dan Restorasi Arsip Daerah	-

	Fumigasi dan Konservasi Arsip Daerah		Terlaksananya Reproduksi dan Restorasi Arsip Daerah	1 keg
7	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Kab. Tojo Una Una	Terlaksanaya Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	-
	Penyediaan Sarana Layanan Informasi		Terlaksananya Penyediaan Sarana Layanan Informasi	1 keg
	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)		Terlaksananya Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	1 keg
	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkup pemerintah dan swasta		TerlaksananyaSosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkup pemerintah dan swasta	1 keg
	Pelatihan Petugas Pengelolaan Arsip PEMDA		Tersedianya Petugas Pengelolaan Arsip PEMDA	1 keg
JUMLAH				

w terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Tojo Una-Una

	Hasil Analisis Kebutuhan			
Pagu Indikatif (Rp.000)	Program kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian
?	7	8	9	10
	wajib			
810,000,000.00	Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Kab. Tojo Una Una	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
250,000,000.00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Terlksananya Perjalanan dinas luar daerah	12 Bln
100,000,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		Terlaksanya evaluasi perpustakaan dan arsip di kecamatan dan kelurahan	12 Bln
50,000,000	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran		Terlaksananya Ppenyediaan administrasi perkantoran	12 Bln
410,000,000	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran		Terlaksananya pelayanan dengan baik dan benar	12 Bln
390,000,000.00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Tojo Una Una	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%

10,000,000	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor		Jumlah peralatan yang diadakan	-
15,000,000.00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah dan jenis barang yang dipelihara	1 Unit
45,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional		jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	7 unt
10,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah dan jenis barang yang dipelihara	17 unt
60,000,000	Pengadaan kendaraan dinas operasional		jumlah kendaraan dinas yang diadakan	-
250,000,000	pengadaan gedung/bangunan kantor		jumlah dan jenis gedung/bangunan yang diadakan	-
50,000,000.00	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Tojo Una Una	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%
50,000,000.00	Pendidikan Dan Pelatihan Formal Perpustakaan / Kearsipan		Jumlah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	12 Bln
686,500,000.00	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Kab. Tojo Una Una	Terlaksananya Gemar Mebaca Dan Pengembagan Perpustakaan	100%

250,000,000.00	Pengembangan Minat dan Budaya Baca		Terlaksananya minat baca di tingkat usia dini	1 keg
20,000,000	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca		Terlaksananya Sosialisasi budaya baca	1 keg
150,000,000	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan Umum, Khusus, Sekolah dan Masyarakat		Terlaksananya Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan Umum, Khusus, Sekolah dan Masyarakat	1 bulan
150,000,000	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca didaerah		Terlaksanya bantuan perpustakaan	-
15,000,000	Layanan Perpustakaan Dokumentasi dan Informasi		Terlaksana Layanan Perpustakaan Dokumentasi dan Informasi	12 bulan
20,000,000	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam		Terlaksana Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	-
25,000,000	Pengadaan koloksi buku perpustakaan		Tersedianya bahan bacaan	-
20,000,000	Pelestarian dan Kandungan Bahan Pustaka termasud Naska Kuno		Terlaksana Pelestarian dan Kandungan Bahan Pustaka termasud Naska Kuno	1 keg
16,500,000	Monitering evaluasi dan pelaporan		Terlaksana Monitering evaluasi dan pelaporan	1 keg

20,000,000	Kapasitas Pengembangan Tenaga Fungsional		Terlaksananya Kapasitas Pengembangan Tenaga Fungsional	-
25,000,000.00	Program Perbaikan Sistim Administrasi Kearsipan	Kab. Tojo Una Una	Terlaksananya Program Perbaikan sistem Administrasi kearsipan	100%
-	Penyusunan sistem katalok data		Terlaksananya sistem katalok data kearsipan	-
-	Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip		Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan	-
25,000,000.00	Penarikan Arsip Statis yag Bernilai Tinggi		Terlaksananya Penarikan Arsip Statis yag Bernilai Tinggi	1 keg
90,000,000.00	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Kab. Tojo Una Una	Terlaksananya program penyelamatan dan pelestarian dokumen	100%
50,000,000.00	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika		Terlaksananya penduplikatan dalam bentuk informatika	1 keg
-	Pengadaan sarana pengolahan kearsipan		Terlaksananya sarana pengolahan kearsipan	-

40,000,000	Reproduksi dan Restorasi Arsip Daerah		Terlaksananya Reproduksi dan Restorasi Arsip Daerah	1 keg
140,500,000.00	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Kab. Tojo Una Una	Terlaksanaya Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	-
15,500,000	Penyediaan Sarana Layanan Informasi		Terlaksananya Penyediaan Sarana Layanan Informasi	-
50,000,000	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)		Terlaksananya Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	-
25,000,000	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkup pemerintah dan swasta		TerlaksananyaSosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkup pemerintah dan swasta	-
50,000,000	Pelatihan Petugas Pengelolaan Arsip PEMDA		Tersedianya Petugas Pengelolaan Arsip PEMDA	-
2,192,000,000.00				

Kebutuhan Dana (RP.000)	Catatan Penting
Rp 11	12
810,000,000.00	
250,000,000.00	
100,000,000	
50,000,000	
410,000,000	
390,000,000.00	

10,000,000	
15,000,000.00	
45,000,000	
10,000,000	
60,000,000	
250,000,000	
50,000,000.00	
50,000,000.00	
686,500,000.00	

250,000,000.00	
20,000,000	
150,000,000	
150,000,000	
15,000,000	
20,000,000	
25,000,000	
20,000,000	
16,500,000	

20,000,000	
25,000,000.00	
-	
-	
25,000,000.00	
90,000,000.00	
50,000,000.00	
-	

40,000,000	
140,500,000.00	
15,500,000	
50,000,000	
25,000,000	
50,000,000	
2,192,000,000.00	

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Tojo Una-Una

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	?	7	8	9	10	Rp 11	12
	wajib					wajib					
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tojo Una Una	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 41,130,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tojo Una Una	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 41,130,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersidianya Bahan Logistik Kantor	12 Bln	Rp 25,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersidianya Bahan Logistik Kantor	12 Bln	Rp 25,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakkan Dan Penggandaan		Tersediannya Barang Cetakan Dan Penggandaan	1 Keg	Rp 2,000,000	Penyediaan Barang Cetakkan Dan Penggandaan		Tersediannya Barang Cetakan Dan Penggandaan	1 Keg	Rp 2,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Dan Keluar Daerah	7 Keg	Rp 14,130,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Dan Keluar Daerah	7 Keg	Rp 14,130,000	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tojo Una Una	Tercapainya Jumlah Pendidikan Dan Pelatihan	100%	Rp 20,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tojo Una Una	Tercapainya Jumlah Pendidikan Dan Pelatihan	100%	Rp 20,000,000	
	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi		Jumlah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	12 Bln	Rp 20,000,000	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi		Jumlah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	12 Bln	Rp 20,000,000	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tojo Una Una	Tercapainya pengadaan Untuk Kantor	100%	Rp 29,135,250	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tojo Una Una	Tercapainya pengadaan Untuk Kantor	100%	Rp 29,135,250	
	Pengadaan Dan Peralatan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Unit	Rp 29,135,250	Pengadaan Dan Peralatan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Unit	Rp 29,135,250	

4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tojo Una Una	Tersidianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 521,438,547	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tojo Una Una	Tersidianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 521,438,547	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Surat Menyurat Kedinasa Dan Umum	12 Bln	Rp 1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Surat Menyurat Kedinasa Dan Umum	12 Bln	Rp 1,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air Dan Listrik		Terbayarkan Jasa Air Dan Listrik Perbulan	12 Bln	Rp 30,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air Dan Listrik		Terbayarkan Jasa Air Dan Listrik Perbulan	12 Bln	Rp 30,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersediannya Pembayaran Honor Non PNS Dan Jenis Administrasi Lainnya	12 Bln	Rp 489,938,547	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersediannya Pembayaran Honor Non PNS Dan Jenis Administrasi Lainnya	12 Bln	Rp 489,938,547	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tojo Una Una	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	Rp 10,085,297,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tojo Una Una	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	Rp 10,085,297,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4 Dan Roda 2	1 Unit	Rp 15,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4 Dan Roda 2	1 Unit	Rp 15,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Unit	Rp 6,570,000	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Unit	Rp 6,570,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bngunan Lainnya		Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Keg	Rp 9,912,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bngunan Lainnya		Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Keg	Rp 9,912,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Srana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Perlenkapan Gedung Kantor	1 keg	Rp 10,053,815,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Srana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Perlenkapan Gedung Kantor	1 keg	Rp 10,053,815,000	
6	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tojo Una Una	Terlaksananya Program Bidang Perpustakaan	-	Rp 54,250,000	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tojo Una Una	Terlaksananya Program Bidang Perpustakaan	-	Rp 54,250,000	

	Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Pustaka		Terlaksananya Pelestarian Dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno	3 Keg	Rp	22,580,000	Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Pustaka		Terlaksananya Pelestarian Dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno	3 Keg	Rp	22,580,000
	Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terkasananya Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Pustakawan Tingkat Daerah	1 Keg	Rp	26,670,000	Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1 Keg	Rp	26,670,000
	Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Perpustakaan Yang Di Kembangkan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		Rp	5,000,000	Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Perpustakaan Yang Di Kembangkan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Keg	Rp	5,000,000
7	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tojo Una Una	Terlaksananya Gemar Membaca Dan Pengembangan Perpustakaan	-	Rp	100,000,000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tojo Una Una	Terlaksananya Gemar Membaca Dan Pengembangan Perpustakaan	-	Rp	100,000,000
	Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat		Terlaksananya Pembinaan Dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	7 Keg	Rp	100,000,000	Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat		Terlaksananya Pembinaan Dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	7 Keg	Rp	100,000,000
8	Pengelolaan Asrip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tojo Una Una	Terlaksanaya Program Pengelolaan Arsip	-	Rp	50,000,000	Pengelolaan Asrip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tojo Una Una	Terlaksanaya Program Pengelolaan Arsip	-	Rp	50,000,000
	Pemilharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis		Terlaksananya Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Arsip	1 Keg	Rp	50,000,000	Pemilharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis		Terlaksananya Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Arsip	1 Keg	Rp	50,000,000
9	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tojo Una Una	Terlaksanaya Program Pengelolaan Arsip Statis		Rp	50,000,000	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tojo Una Una	Terlaksanaya Program Pengelolaan Arsip Statis		Rp	50,000,000
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, Dan Akses Arsip Statis		Terlaksananya Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Arsip	1 Keg	Rp	50,000,000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, Dan Akses Arsip Statis		Terlaksananya Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Arsip	1 Keg	Rp	50,000,000

10	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tojo Una Una	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasni Kearsipan		Rp 50,000,000	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tojo Una Una	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasni Kearsipan		Rp 50,000,000	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Pengolahan Arsip Melalui Informas Dan Jaringan	1 Keg	Rp 50,000,000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Pengolahan Arsip Melalui Informas Dan Jaringan	1 Keg	Rp 50,000,000	
11	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) Tahun		Terlaksananya Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	-	Rp 50,000,000	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) Tahun		Terlaksananya Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	-	Rp 50,000,000	
	Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Terlaksananya Pengolahan Arsip Yang Baik	2 Keg	Rp 50,000,000	Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Terlaksananya Pengolahan Arsip Yang Baik	2 Keg	Rp 50,000,000	
JUMLAH					Rp 11,051,250,797					Rp 11,051,250,797	

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelak
Dan Pencapaian Renstra Dina
Kab

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan Dan Kersipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Krgiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (*sub output*)	Target Kinerja Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022
1	*2*	*3*	*4*
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Admnistrasi Yang Baik	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Dan Pelayanan Administrasi Yang baik	60 Bulan
	Penyediaan Barang Cetakkan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan Dan Penggandaan Guna Menunjang Kegiatan Kantor	60 Bulan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Terlaksana Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Kedalam Dan Keluar Daerah	60 Bulan
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100%
	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Terlaksananya Pelatihan Pegawai	4 Orang
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Peralatan Kantor	100%

	Pengadaan Dan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Yang Disediakan	20 Buah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Kantor	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengelolah Administrasi Surat Bermaterai	2490 Lembar
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air Dan Listrik	Tersediannya Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Untuk Aktivitas Pelayanan Kantor Yang Baik	60 Bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Pelayanan Kantor	24 Orang
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	20 Buah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bngunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor Dan Bangunan Lain	5 Gedung
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Srana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor	5 Gedung
6	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Peprustakaan Tingkat Daerah	100%

	Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Pustaka	Berkembangnya Bahan Pustaka Daerah	60 Bulan
	Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Data Dan Informasi Peprustakaan, Dan Tenaga Pustakawan	60 Bulan
	Pengembangan Perpustakaan Di Tngkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Yang Di Kembangkan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	61 Bulan
7	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkanya Budaya Baca	100%
	Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Terlaksannya Sosialisai Budaya Baca Dan Literisasi Pada satuan Pendidikan	60 Bulan
8	Pengelolaan Asrip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Arsip Dinamis	100%
	Pemilharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terpeliharinya Penyusunan Arsip Dinamis	60 Bulan
9	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Arsip Statis	100%
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, Dan Akses Arsip Statis	Terkelolanya Akusisi Arsip Statis	60 Bulan
10	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terkelolanya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasioanal Tingkat Kabupaten/Kota	100%

	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan	60 Bulan
11	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah	100%
	Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Terlaksannya Penilaian, Penetapan, Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip	60 Bulan

Tabel. T-II.1

ɪsanaan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
ıs Perpustakaan Dan Kearsipan s/d Tahun 2023
upaten Tojo Una Una

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2020	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program Dan Kegiatan (Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Renstra Dinas Per Kearsipan s/d
	Target Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2020	Realisasi Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2021
5	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*
20 %	20 %	20 %	100	20 %	60 %
41 Jenis	41 Jenis	41 Jenis	80	41 Jenis	36 bulan
2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis	36 bulan
10 Orang	10 Orang	10 Orang	100	10 Orang	36 bulan
20 %	20 %	20 %	100	20 %	60 %
1 Orang	4 Orang	1 Orang	50	4 Orang	2 Orang
20 %	20 %	20 %	100	20 %	60 %

2 Buah	2 Buah	2 Buah	100	2 Buah	8 Buah
20%	20%	20%	100	20%	60%
400 Lembar	500 Lembar	400 Lembar	100	400 Lembar	1.200 Lembar
12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 bulan
24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang
20%	20%	20%	100	20%	60%
1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit
2 Buah	2 Buah	2 Buah	100	2 Buah	2 Buah
1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100	1 Gedung	1 Gedung
1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100	1 Gedung	1 Gedung
20%	20%	20%	100	20%	60%

3 Keg	3 Keg	3 Keg	100	3 Keg	3 Keg
1 Keg	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	1 Keg
1 Keg	1 Keg	1 Keg	101	1 Keg	1 Keg
20%	20%	20%	100	20%	60%
7 Keg	7 Keg	7 Keg	100	7 Keg	7 Keg
20%	20%	20%	100	20%	60%
1 Keg	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	1 Keg
20%	20%	20%	100	20%	60%
1 Keg	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	1 Keg
20%	20%	20%	100	20%	60%

1 Keg	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	1 Keg
20%	20%	20%	100	20%	60%
2 Keg	2 Keg	2 Keg	100	2 Keg	2 Keg

i Capaian Target pustakaan Dan Tahun 2021
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2021 (%)
11=(10/4)
60.00
48.19
60.00
93.10
60.00
50.00
60.00

40.00
60.00
48.19
60.00
93.10
60.00
40.00
75.00
48.19
48.19
60.00

60.00
48.19
49.19
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00

60.00
60.00
60.00

Program Dan Kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Tojo Una Una
Tahun 2024

Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan Dan Kaeripan

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2024	PAGU PRAKIRAAN MAJU 2025 (RP.)	KET Prioritas Pembangunan Nasional
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
						TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Dispusip			Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp 139,000,000	Rp 156,000,000	
	2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Dispusip			Tersidianya Bahan Logistik Kantor	4 Pkt	Tersidianya Bahan Logistik Kantor	4 Pkt	Rp 50,000,000	Rp 60,000,000	
	2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakkan Dan Penggandaan			Dispusip			Tersediannya Barang Cetakan Dan Penggandaan	3 Pkt	Tersediannya Barang Cetakan Dan Penggandaan	3 Pkt	Rp 9,000,000	Rp 10,000,000	
	2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD			Kedalam Dan Luar Daerah			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	10 laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	10 Lpran	Rp 60,000,000	Rp 65,000,000	
2	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
	2.23.01.2.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi												
3	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Dispusip			Tercapainya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Tercapainya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 9,000,000	Rp 10,000,000	
	2 23 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
	2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya			Dispusip			Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	Rp 9,000,000	Rp 10,000,000	
4	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Dispusip			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 486,000,000	Rp 498,000,000	
	2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Dispusip			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 laporan	Rp 9,000,000	Rp 10,000,000	
	2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air Dan Listrik			Dispusip			jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Rp 150,000,000	Rp 160,000,000	
	2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Dispusip			jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	Rp 327,000,000	Rp 328,000,000	
5	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Dispusip			terpeliharaannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	100%	terpeliharaannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	100%	Rp 18,000,000	Rp 20,000,000	
	2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan			Dispusip			jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 unit	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	Rp 9,000,000	Rp 10,000,000	
	2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya			Dispusip									

	2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bngunan Lainnya													
	2.23.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Srana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya			Dispusip			Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	Terpeliharanya Perlenkapan Gedung Kantor	1 Unit	Rp	9,000,000	Rp	10,000,000	
6	2.23.02	Program Pembianaan Perpustakaan			Dispusip			Rasio Ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	5,00%	Rasio Ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	4,96 %	Rp	40,000,000	Rp	42,000,000	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Dispusip			Jumlah perpustakaan yang di kelola dan dikembangkan	100%	Jumlah perpustakaan yang di kelola dan dikembangkan	100%	Rp	20,000,000	Rp	21,000,000	
	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Pustaka			Kab. Tojo Una Una			Terlaksananya Pelestarian Dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno	2 Keg	Terlaksananya Pelestarian Dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno	2 Keg	Rp	22,580,000	Rp	500,000,000	
	2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Tojo Una Una			Terkasananya Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Pustakawan Tingkat Daerah	1 Keg	Terkasananya Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Pustakawan Tingkat Daerah	1 Keg	Rp	26,670,000	Rp	50,000,000	
	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Tojo Una Una			Jumlah Perpustakaan Yang Di Kembangkan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	4 Perpustakaan	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Perpustakaan	Rp	20,000,000	Rp	21,000,000	
7	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota			Dispusip			Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	100%	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	100%	Rp	20,000,000	Rp	21,000,000	
	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat			Kab. Tojo Una Una			Jumlah Lokus Pembudayaan Gemar Membaca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan	2 Lokus	Terlaksananya Pembinaan Dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	2 Lokus	Rp	20,000,000	Rp	21,000,000	
8	2.24.02	Program Pengelolaan Arsip			Dispusip			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah pertanggung jawaban nasional (pasal 40 dan pasal 59 UU no.43 thn 2009 tentang kearsipan	Ada	Terlaksananya pengelolaan arsip	Ada	Rp	20,000,000	Rp	21,000,000	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Asrip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			Dispusip			Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	100%	Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	100%	Rp	20,000,000	Rp	21,000,000	
	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis			Dispusip			Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	12 berkas	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	12 berkas	Rp	20,000,000	Rp	21,000,000	
9	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota														
	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, Dan Akses Arsip Statis														
10	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota														

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Tojo Una Una

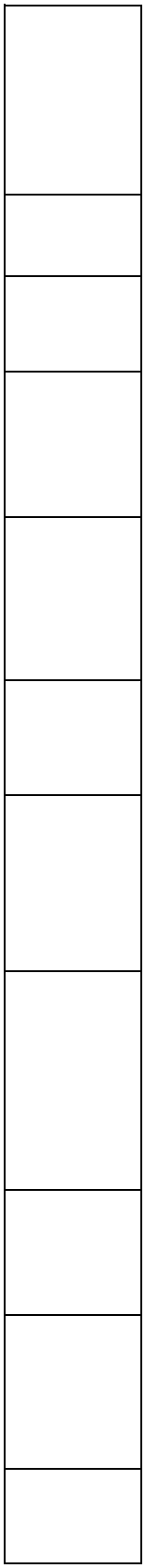
Nama Perangkat Daerah : Dinas Peprustakaan Dan Kearsipan

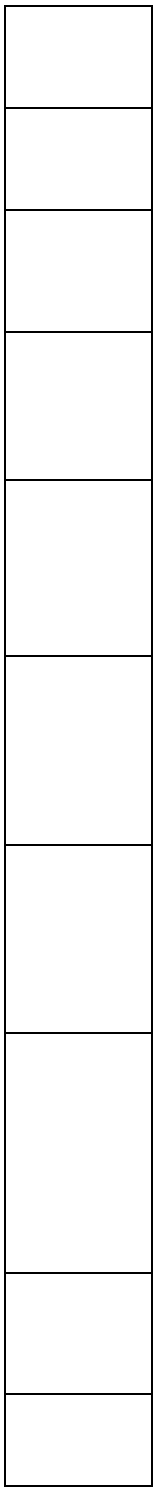
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume
1	2	3	4	5
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispusip	Tersidianya Bahan Logistik Kantor	4 paket
	Penyediaan Barang Cetakkan Dan Penggandaan		Tersediannya Barang Cetakan Dan Penggandaan	3 paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Dan Keluar Daerah	10 laporan
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tercapainya Jumlah Pendidikan Dan Pelatihan	0%
	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Dispusip	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas	0
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tercapainya pengadaan Untuk Kantor	100%
	Pengadaan Dan Peralatan Mesin Lainnya	Dispusip	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 unit
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersidianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispusip	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air Dan Listrik		Terbayarkan Jasa Air Dan Listrik Perbulan	12 laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispusip	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 unit
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	2 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bngunan Lainnya		Terpeliharanya Gedung Kantor	o
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Srana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Perlenkapan Gedung Kantor	1 unit
6	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Program Bidang Perpustakaan	100%
	Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dispusip	Terlaksananya Pelestarian Dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno	2 Keg
	Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terkasananya Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Pustakawan Tingkat Daerah	1 Keg
	Pengembangan Perpustakaan Dan Kearsipan Di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Perpustakaan Yang Di Kembangkan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	4 perpustakaan
7	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota		Terlaksananya Gemar Membaca Dan Pengembangan Perpustakaan	100%
	Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Dispusip	Terlaksananya Pembinaan Dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	2 lokus
8	Pengelolaan Asrip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksanaya Program Pengelolaan Arsip	100%

	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Dispusip	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	12 berkas
9	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksanaya Program Pengelolaan Arsip Statis	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, Dan Akses Arsip Statis	Dispusip	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Arsip	
10	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasni Kearsipan	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Dispusip	Pengolahan Arsip Melalui Informas Dan Jaringan	
11	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) Tahun		Terlaksananya Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	
	Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Dispusip	Terlaksananya Pengolahan Arsip Yang Baik	
12	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		Terselamatkannya Arsip Penting Daerah	
	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Dispusip	Terselamatkannya Arsip Penting	
	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan		Terselamatkannya Arsip Penting	

Catatan
6





Tabel. T-III.1

Prioritas Dan Sasaran Dinas Perpustakaan D

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah
1	2	3	4
	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Tercapainya Pelayanan Masyarakat Yang Baik	Menigkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
	Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Tercapainya Sarana Dan Prasarana Yang Layak	Menigkatnya Sarana Dan Prasarana
	Peningkatan Sarana Aparatur	Tecapainya Sarana Aparatur Yang Baik	Meningkatnya Sarana Aparatur
	Mengembangkan Minat Baca	Berkembangnya Minat Baca Pada Usia Dini	Meningkatnya Pengembangan Budaya Baca
	Memperbaiki Sistem Administrasi Kearsipan	Berkembangnya Sistem Administrasi Kearsipan Yang Baik	Meningkatnya Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
	Peningkatan Penyelamatan Dokumen/Arsip Daerah	Terselamatkannya Dokumen/Arsip Daerah Yang Penting	Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
	Mengembangkan Kualitas Pelayanan Informasi	Tercapainya Kualitas Pelayanan Informasi Yang Baik	Penigkatan Kualitas Pelayanan Informasi

an Kearsipan

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
5	6
Persentase Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	100%
Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Layak	100%
Sarana Aparatur Yang Memadai	100%
Persentase Peningkatan Gemar Membaca	100%
Tingkat Persentase Sistem Administrasi Kearsipan	100%
Tercapainya Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	100%
Persentase Kualitas Pelayanan Informasi Informasi	100%

Tabel. T-III.2

Tujuan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2022
1	Menigkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	100%
2	Menigkatnya Sarana Dan Prasarana	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Layak	100%
3	Meningkatnya Sarana Aparatur	Sarana Aparatur Yang Memadai	100%
4	Meningkatnya Pengembangan Budaya Baca	Persentase Peningkatan Gemar Membaca	100%
5	Meningkatnya Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Tingkat Persentase Sistem Administrasi Kearsipan	100%
6	Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Tercapainya Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	100%
7	Penigkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase Kualitas Pelayanan Informasi	100%

Tabel. T-III.3

Sasaran Dinas Perpustakaan Dan Kearsip

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Tercapainya Pelayanan Prima
2	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Yang Layak Bagi Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Layak
3	Terwujudnya Kualitas Aparatur Pemerintah Yang Berdaya Saing	Presentase Kualitas Sarana Aparatur
4	Terwujudnya Gemar Membaca Pada Usia Dini	Persentase Peningkatan Gemar Membaca
5	Tewujudnya Administrasi Yang Baik Dan Sempurna	Tingkat Persentase Sistem Administrasi Kearsipan
6	Terwujudnya Pelestarian Dokumen Arsip Daerah Di Setiap SKPD	Tercapainya Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
7	Terwujudnya Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Persentase Kualitas Pelayanan Informasi

Tabel. T-III.4

an Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan I

Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022	No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kenerja Perangkat Daerah
100%	1	Meningkatnya Kualitas Pelyanan Kepada Masyarakat	Tercapainya Pelayanan Prima
100%	2	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Yang Layak Bagi Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Layak
100%	3	Tersedianya Pelatihan Dan Pengembangan	Presentase Kualitas Sarana Aparatur
100%	4	Terlaksananya Gemar Membaca Dan Pengembangan Peprustakaan	Persentase Peningkatan Gemar Membaca
100%	5	Terlaksananya Sistem Administrasi Yang Baik	Tingkat Persentase Sistem Administrasi Kearsipan
100%	6	Terlaksananya Penyelamatan Dan Pelestarian Arsip	Tercapainya Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
100%	7	Terlaksananya pelayanan Informasi Secara Baik Dan	Persentase Kualitas Pelayanan Informasi

Dan Kearsipan

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Sasaran Dan Program / Kegiatan Dan Sub Kegiatan

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Tercapainya Pelayanan Masyarakat Yang Baik	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	Tercapainya Sarana Dan Prasarana Yang Layak	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3	Tecapainya Sarana Aparatur Yang Baik	Program Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4	Berkembangnya Minat Baca Pada Usia Dini	Program Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5	Berkembangnya Sistem Administrasi Kearsipan Yang Baik	Program Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
6	Terselamatkannya Dokumen/Arsip Daerah Yang Penting	Program Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/kota
7	Tercapainya Kualitas Pelayanan Informasi Yang Baik	Program Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi JIKN Tingkat Kabupaten/Kota

Pencapaian Kinerja Pelayanan D
Kabupaten

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Perp	
				Tahun 2017 (*thn n-2*)	Tahun 2018 (*thn n-1)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
0	Tingkat Layanan Admnistrasi Yang Baik			100%	100%
	Tersedianya Alat Tulis Dan Pelayanan Administrasi Yang baik			41 Jenis	41 Jenis
	Tersedianya Barang cetakan Dan Penggandaan Guna Menunjang Kegiatan Kantor			2 Jenis	2 Jenis
	Terlaksana Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Kedalam Dan Keluar Daerah			10 Orang	10 Orang
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian			50%	50%
	Terlaksananya Pelatihan Pegawai			4 Orang	4 Orang
	Tersediannya Peralatan Kantor			50%	50%
	Jumlah Peralatan Yang Disediakan			20 Buah	20 Buah
	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Kantor			50%	50%

	Terlaksananya Pengelolah Administrasi Surat Bermaterai			2490 Lembar	2490 Lembar
	Tersediannya Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Untuk Aktivitas Pelayanan Kantor Yang Baik			12 Bulan	12 Bulan
	Tersediannya Jasa Pelayanan Kantor			24 Orang	24 Orang
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah			60%	60%
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan			1 Unit	1 Unit
	Terpeliharanya Peralatan Kantor			20 Buah	20 Buah
	Terpeliharanya Gedung Kantor Dan Bangunan Lain			5 Gedung	5 Gedung
	Terpeliharanya Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor			5 Gedung	5 Gedung
	Terkelolanya Peprustakaan Tingkat Daerah			100%	100%
	Berkembangnya Bahan Pustaka Daerah				
	Tersusunnya Data Dan Informasi Peprustakaan, Dan Tenaga Pustakawan				

	Jumlah Perpustakaan Yang Di Kembangkan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				
	Meningkanya Budaya Baca			100%	100%
	Terlaksannya Sosialisai Budaya Baca Dan Literisasi Pada satuan Pendidikan				
	Terkelolanya Arsip Dinamis			100%	100%
	Terpeliharinya Penyusunan Arsip Dinamis				
	Terkelolanya Arsip Statis			100%	100%
	Terkelolanya Akusisi Arsip Statis				
	Terkelolanya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasioanal Tingkat Kabupaten/Kota			100%	100%
	Terlaksannya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan				
	Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah			100%	100%
	Terlaksannya Penilaian, Penetapan, Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip				

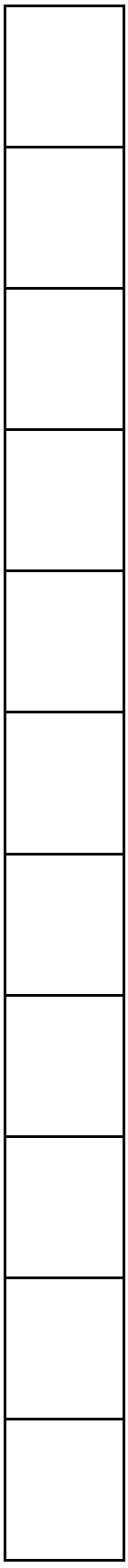
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Tojo Una Una

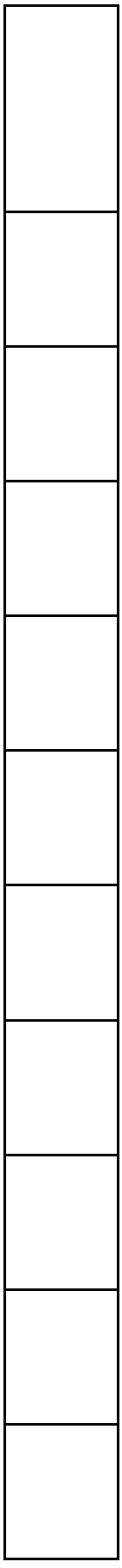
ustakaan Dan Kearsipan		Realisasi Capaian		Proyeksi	
Tahun 2019(*thn n*)	**Tahun 2020 (*thn n+ 1)***	**Tahun 2017 (*thn n-2*)**	**Tahun 2018 (*thn n-1*)**	**Tahun 2019 (*thn n*)**	**Tahun 2020 (*thn n+1*)**
7	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
41 Jenis	41 Jenis	41 Jenis	41 Jenis	41 Jenis	41 Jenis
2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	20 Orang	20 Orang
50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
4 Orang	4 Orang	-	1 Orang	-	1 Orang
50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
20 Buah	20 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	-
50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

2490 Lembar	2490 Lembar	400 Lembar	500 Lembar	400 Lembar	500 Lembar
12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang
60%	60%	60%	60%	60%	60%
1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit
20 Buah	20 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah
5 Gedung	5 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung
5 Gedung	5 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung
100%	100%	100%	100%	100%	100%

100%	100%	100%	100%	100%	100%
100%	100%	100%	100%	100%	100%
100%	100%	100%	100%	100%	100%
100%	100%	100%	100%	100%	100%
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Catatan Analisis
13





RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**3.439.886.907,00**							**3.682.832.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.439.886.907,00**							**3.682.832.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**3.419.886.907,00**							**3.661.832.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**CC Nilai**			**BB Nilai**	**3.379.886.907,00**						**BB Nilai**	**3.619.832.000,00**	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	2.727.886.907,00			-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	100 Persen	2.935.832.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	2.727.886.907,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	27 Orang/bulan	2.935.832.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksnayanya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	139.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	100 Persen	156.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	4 Paket	60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	9.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Paket	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	60.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	10 Laporan	65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Dokumen	21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	9.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	100 Persen	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	9.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Unit	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	486.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	100 Persen	498.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	327.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	328.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerhah*				100 Persen	18.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	100 Persen	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	9.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	6 Unit	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Unit	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk***	**5,00 Persen**			**4,96 Persen**	**40.000.000,00**						**4,96 Persen**	**42.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan*				100 Persen	20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	100 Persen	21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				4 Perpustakaan	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	4 Perpustakaan	21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat*				100 Persen	20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	100 Persen	21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				2 Lokus	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Lokus	21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**20.000.000,00**							**21.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan***	**Ada**			**Ada**	**20.000.000,00**						**Ada**	**21.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerha Kabupaten/Kota*				100 Persen	20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	100 Persen	21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				12 Berkas	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Berkas	21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	J U M L A H							**3.439.886.907,00**							**3.682.832.000,00**	

DOKUMEN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TOJO UNA UNA



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA UNA
DINAS PERIKANAN
JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA
Email : kelautanperikanan_touna@yahoo.com

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS PERIKANAN
Alamat : Jalan Merdeka, kompleks perkantoran Kode Pos : 94683
Telp. (0464) 21137 Fax. (0464) 21137

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TOJO UNA UNA

NOMOR : 500.5/66.4/DISKAN /2023 .

T E N T A N G

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERIKANAN KABUPATEN TOJO UNA UNA

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TOJO UNA UNA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah sebagai acuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2024 ;
b. bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD memuat arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan ;
c. bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2024 memuat program / Kegiatan pembangunan SKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2024

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tojo Una Una Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024

:

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Tahun 2024, yang selanjutnya disebut (RENJA SKPD Dinas Perikanan) Tahun 2024, adalah Dokumen Program / kegiatan periode 1 (satu) tahun.

KEDUA RENJA Dinas Perikanan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Bab I PENDAHULUAN.
b. Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN TAHUN LALU.
c. Bab III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN
d. Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
e. Bab V PENUTUP.

KETIGA

RENJA Dinas Perikanan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Nomor Tahun 2023 yang memuat Program / kegiatan, Indikator kinerja, lokasi kegiatan, Target pencapaian kinerja dan pagu indikatif.

Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampana
Pada Tanggal : 31 Maret 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TOJO UNA UNA

RAHMAT BASRI, S.Pi., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c
Nip.19690902 199903 1 007

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintahan diwajibkan membuat rencana kerja (RENJA) yang merupakan penjabaran dari rencana strategis SKPD dan disusun setiap tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una berkomitmen untuk membangun Prestasi Aksi dan Prestasi Hasil melalui tugas pokok dan fungsinya yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Tojo Una Una Nomor 9 tahun 2021 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026, berhasil menyusun Rencana Kerja yang fokus pada optimalisasi dan Pelestarian Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, serta mensejahterakan masyarakat perikanan. Prestasi hasil tersebut diharapkan akan dicapai melalui upaya pengelolaan sumberdaya perikanan dengan lokus pada pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan janji dan komitmen kepada rakyat yang harus ditunaikan sebagai wujud tanggung jawab antara Pemerintah dan Masyarakat oleh karena tugas membangun sektor perikanan adalah tugas bersama, bukan merupakan tugas pemerintah semata. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dan sinergi dari masyarakat luas dan kerja keras tanpa pamrih.

Atas jerih payah dari semua pihak yang memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran sehingga berhasil membuahkan dokumen Rencana Kerja ini, saya sampaikan terimakasih dan penghargaan. Semoga rencana kerja ini bermanfaat bagi kemajuan serta perkembangan sektor perikanan khususnya mensejahterahkan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Tojo Una Una.

Ampana, 31 Maret 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TOJO UNA UNA

RAHMAT BASRI, S.Pi., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690902 199903 1 007

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una sebagai unit kerja yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang pengelolaan potensi perikanan untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan Perencanaan yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una maka disusunlah Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Bupati Tojo Una Una Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

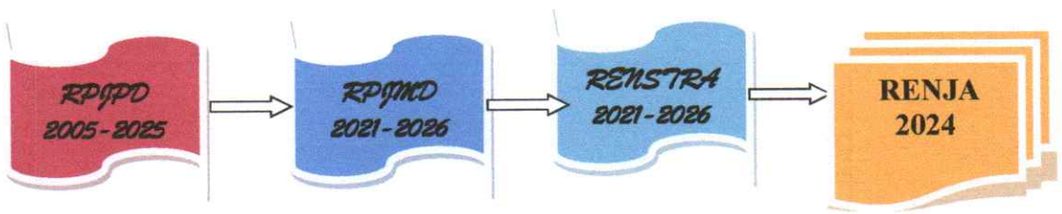
Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas pada Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Kerja 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una disusun merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 yang merupakan penjabaran terperinci dari RPJMD kabupaten Tojo Una-Una yang mengacu pada RPJPD Kabupaten yang merupakan suatu alur perencanaan yang tidak terpisahkan. Berdasarkan pola pikir tersebut diatas, maka sistimatika penyusunan Renja tahun 2024 dapat dilustrasikan dalam bagan sebagai berikut:



Sesuai alur pikir tersebut, Dokumen Rencana Kerja (Renja) akan disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan renja, keterkaitan antara renja dengan dokumen RKPD, renstra, dengan renja K/L dan renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD), analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta Program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai factor – factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel II.1 berikut ini:

TABEL II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan s.d Tahun 2022
KABUPATEN TOJO UNA UNA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintaan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / sub kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja perangkat daerah Tahun 2023 tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*	*(6)*	*(7)*	*8 = (7/6)*	*(9)*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	*(12)*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**NILAI SAKIP OPD**	**BB-A**									DINAS PERIKANAN
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		**14**	**Bulan**								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	14	Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 bulan	100	14 bulan	14 bulan	100	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		**12**	**Bulan**								
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penenrangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2	paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	3 paket	150	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1	paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	1 paket	5 paket	500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	1	paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	3 paket	300	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintaan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / sub kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja perangkat daerah Tahun 2023 tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*	*(6)*	*(7)*	*8 = (7/6)*	*(9)*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	*(12)*
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	45	jenis	45 jenis	45 jenis	45 jenis	100	1 jenis	45 jenis	100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	25	meter	32 meter	31.5 meter	31.5 meter	100	1 meter	64 meter	256	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	2	media	1 media	1 media	1 media	100	1 media	2 media	100	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	43	Kali	93 Kali	93 Kali	93 Kali	100	43 Kali	43 Kali	100	
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		**12**	**Bulan**								
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	tersedianya peralatan dan mesin	6	item	3 item	3 item	3 item	100	3 item	9 item	150	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		**12**	**Bulan**								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	25	paket	15 paket	15 paket	15 paket	100	15 paket	45 paket	180	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintaan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / sub kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja perangkat daerah Tahun 2023 tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*	*(6)*	*(7)*	*8 = (7/6)*	*(9)*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	*(12)*
	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan	106	orang	106 orang	106 orang	106 orang	100	106 orang	106 orang	100	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		**12**	**Bulan**								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jenis dan jumlah kendaraan yang dipelihara	35	unit	35 unit	35 unit	35 unit	100	35 unit	35 unit	100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4	unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	3 unit	75	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	35	unit	14 unit	14 unit	14 unit	100	35 unit	35 unit	100	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP**	**17655**	**Ton**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintaan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / sub kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja perangkat daerah Tahun 2023 tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*	*(6)*	*(7)*	*8 = (7/6)*	*(9)*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	*(12)*
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**12**	**Bulan**								
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	tersedianya prasarana usaha perikanan tangkap	20	paket	71 paket	71 paket	71 paket	100	20 Paket	162 Paket	810	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA**	9270.8	**Ton**								
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		12	**Bulan**								
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	300	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	paket	4 paket	4 paket	4 paket	100	2 paket	10 paket	500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintaan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / sub kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja perangkat daerah Tahun 2023 tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*	*(6)*	*(7)*	*8 = (7/6)*	*(9)*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	*(12)*
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	paket	6 paket	6 paket	6 paket	100	1 paket	13 paket	1300	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN**	2.67									
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		12	**Kecamatan**								
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	12	Kecamatan	12 Kecamata	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintaan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / sub kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja perangkat daerah Tahun 2023 tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*	*(6)*	*(7)*	*8 = (7/6)*	*(9)*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	*(12)*
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**PERSENTASE USAHA PENGOLAHAN YANG DIFASILITASI**	**0.3**									
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		**12**	**Bulan**								
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah wilayah Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	12	kecamatan	12 kecamata	12 kecamatan	12 kecamatan	100	12 kecamatan	12 kecamatan	100	
	Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		**12**	**Bulan**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintaan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / sub kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja perangkat daerah Tahun 2023 tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*	*(6)*	*(7)*	*8 = (7/6)*	*(9)*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	*(12)*
	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	1	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

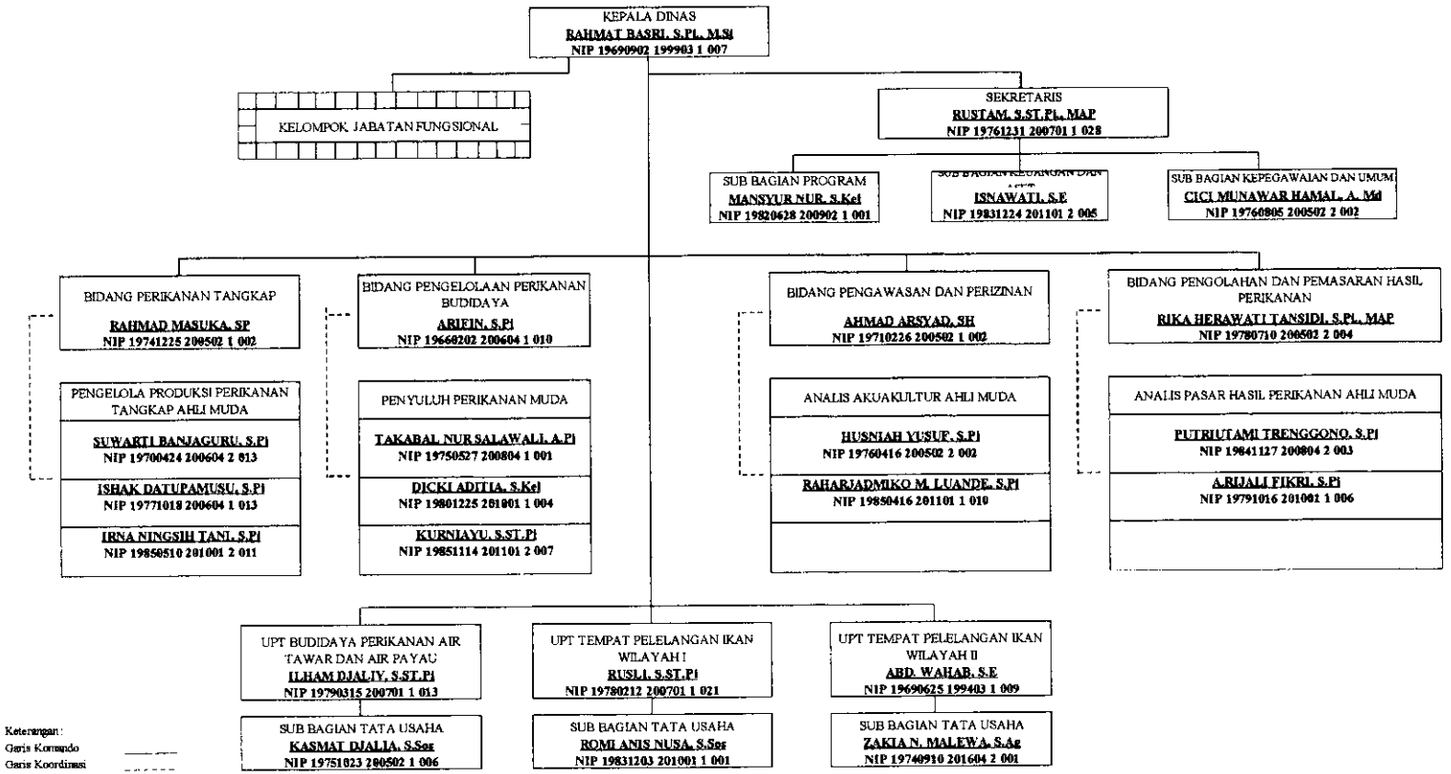
Berdasarkan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang kedudukan dan susunan organisasi Dinas Daerah. Dijelaskan secara struktur organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat sebagai berikut :

1) Dinas perikanan adalah merupakan Dinas Tipe A.
2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan tinggi pratama yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
3) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
   a. Sekretariat, terdiri atas :
      1. Subbagian Program;
      2. Subbagian Keuangan dan asset; dan
      3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
   b. Bidang Perikanan Tangkap ;
   c. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya ;
   d. Bidang Pengawasan dan perizinan ;
   e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan ;
   f. UPT Dinas; dan
   g. Kelompok jabatan fungsional
4) Bidang masing – masing membawahi kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
5) UPT Dinas terdiri UPT Dinas Kelas A dan UPT Dinas kelas B.
6) UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan betanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait.
7) Kepala UPT Dinas Kelas A merupakan jabatan structural IVa atau jabatan pengawas.
8) Kepala UPT Dinas Kelas B dan kepala subbagian tata usaha pada UPT Dinas Kelas A merupakan jabatan structural IVb atau jabatan pengawas.

9) Kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berada di bawah dan bertanggung jawab kepala UPT Dinas.

Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, sedangkan UPT Dinas dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang semuanya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TOJO UNA UNA



2. Tugas dan Fungsi

Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan. Dinas ini merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

a. Perumusan program kerja dan kebijakan teknis di bidang perikanan;
b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis Dinas;
c. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan;
d. Penyelenggaraan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hokum, penyelesaian administrasi, penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Dinas;
e. Pengendalian pemanfaatan dan pengelolaan keuangan dan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas – tugas Dinas kepada para kepala Bidang;
f. Penyelenggaraan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;
g. Pembinaan unit pelaksana teknis (UPT) Dinas dan kelompok jabatan fungsional;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan dibidang perikanan;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2.1 Sumberdaya SKPD

Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM) khususnya yang berkaitan dengan keadaan Pegawai pada Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una adalah sebagai berikut :

Kondisi Kepegawaian

Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM) khususnya yang berkaitan dengan keadaan Pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tojo Una Una adalah sebagai berikut :

Kondisi Kepegawaian

Jumlah Pegawai posisi Tahun 2023 sebanyak 128 orang yang terdiri dari : 42 orang Pegawai Organik dan 86 orang tenaga honorer/ sukarela, kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel II.2. Tingkat Pendidikan Pegawai

No.	Pendidikan	Organik	Non Organik		Jumlah
			Honorer	Sukarela	
1.	S2	3	-	-	3
2.	S1/D4	30	27	-	57
3.	D3	1	1	-	1
4.	D2	8	1	-	9
5.	D1	-	2	-	2
6.	SLTA	-	45	-	45
7.	SLTP	-	5	-	5
8.	SD	-	5	-	5
	T o t a l	**42**	**86**	**-**	**128**

Sumber : Dinas Perikanan 2023

- Kualifikasi Penjenjangan Struktural :
  - SPAMA / PIM II : 1 orang
  - SPAMA / PIM III : 5 orang
  - ADUM/ PIM IV : 9 orang
- Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan :

Tabel II.3. Kualifikasi Pegawai

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	IV	6	6
2.	III	24	24
3.	II	12	12
4.	I	-	-
	Jumlah	**42**	42

Sumber : Dinas Perikanan 2023

- Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural :

Tabel. II.4 Jabatan dan Jumlah Pegawai

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Dinas	1 Orang	Eselon II
2.	Sekertaris	1 Orang	Eselon III
3.	Kepala Bidang	4 Orang	Eselon III
4.	Kepala Sub Bagian	3 Orang	Eselon IV
5.	Kepala UPTD	3 Orang	Eselon IV
6.	Kasubag Tata Usaha UPTD	3 orang	Eselon IV
	Jumlah	**15**	

Sumber : Dinas Perikanan 2023

Kelengkapan

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-unamemiliki kelengkapan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel II.5. Keadaan Aset Dinas Perikanan Kab. Tojo Una Una

No	Jenis Barang	Jumlah
1.	Meja Kerja	65 unit
2.	Kursi Kerja	72 unit
3.	Kendaraan Roda Dua	26 unit
4.	Kendaraan Roda Tiga	2 unit
5.	Kendaraan Roda Empat	5 unit
6.	Laptop/Note Book	17 unit
7.	Komputer	12 unit
8.	Printer	17 unit
9.	Scanner	1 unit
10.	Lemari Arsip	16 unit
11.	AC	20 unit
12.	Televisi	2 unit
13.	Filling Kabinet	2 unit
14.	Brankas	1 unit
15.	Telepon	1 unit
16.	Faksimile	1 unit
17.	Infokus	3 unit
18.	Dispenser	7 buah
19.	Kamera Digital	5 buah
20	Kamera Underwater	1 unit
21.	All Band	1 unit
22.	Speed Boad	4 Unit

Sumber : Dinas Perikanan 2023

Sistem pelayanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una meliputi pelayanan dan pengembangan usaha perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Selain itu pelayanan yang dilakukan adalah berupa peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang kegiatan dibidang perikanan, upaya peningkatan konsumsi ikan per kapita pertahun, upaya peningkatan produksi hasil perikanan, dan pembinaan terhadap kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.

1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pada periode renstra sebelumnya, terdapat beberapa peluang dan kekuatan yang dimiliki dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain :

- Potensi sumberdaya yang cukup besar tersedia sehingga masih memungkinkan untuk pengembangan pelayanan yang lebih baik.
- Wilayah pengembangan usaha perikanan masih belum termanfaatkan secara maksimal.

Selain peluang dan kekuatan tersebut, terdapat pula kelemahan dalam rangka pengembangan pelayanan yaitu masih kurangnya dukungan dana dan sumberdaya manusia yang handal. Dalam menjalankan pelayanan tersebut banyak pula diperoleh tantangan yang dihadapi antara lain : cakupan wilayah yang cukup luas dan memerlukan waktu yang lama untuk mencapai suatu lokasi khususnya diwilayah kepulauan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada secara ramah lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya kegiatan *illegal fishing dan destructive fishing* (penggunaan bom dan bius dalam penangkapan ikan).

Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una dapat dilihat pada *Tabel II.6* berikut ini

Tabel II.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una

No	Indikator	Kondisi pada tahun awal perencanaan (2021)	Indikator Kinerja Utama					Capaian Akhir Periode	SATUAN
			2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	*Produksi Perikanan Budidaya*	7.271,37	7.870,8	8.220,8	8.570,8	8.920,8	9.270,8	9.270,8	Ton
2	*Produksi Perikanan Tangkap*	16.888	16.255	16.605	16.955	17.305	17.655	17.655	Ton
3	*Tingkat Konsumsi Ikan*	61,43	80 - 90	80 - 90	80 - 90	80 - 90	80 - 90	80 - 90	Kg/kapita/ Tahun
4	*Total Produksi (Produksi Perikanan Budidaya + Produksi Perikanan Tangkap)*	24.159,37	24.125,8	24.825,8	25.525,8	26.225,8	26.925,8	26.925,8	Ton
5	*Cakupan Bina Kelompok Nelayan*	13,3	11 - 12	11 - 12	11 - 12	11 - 12	11 - 12	11 - 12	%

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN OPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una sebagai berikut:

- Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan yang masih didominasi usaha penangkapan sehingga perlu diimbangi dengan peningkatan usaha budidaya
- Belum adanya zonasi yang jelas bagi kawasan budidaya serta zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Produk Perikanan yang dihasilkan baik oleh nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan masih dibawah standar mutu yang dipersyaratkan
- Teknologi pemanfaatan sumberdaya perikanan masih sederhana sehingga perlu dikembangkan guna peningkatan produksi perikanan
- Dukungan anggaran yang terbatas dalam upaya pemberdayaan masyarakat perikanan serta kegiatan pendampingan dan pembinanaan kelompok nelayan, pembudidaya, serta kelompok pengolah hasil perikanan
- Terbatasnya dukungan permodalan perbankan bagi kelompok pemanfaat sumberdaya perikanan
- Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui usaha pengembangan perikanan tangkap, pengembangan usaha budidaya dan hasil olahan seperti PPI/TPI, BBIP, dan Sarana Mesin pengolah hasil perikanan
- Masih tingginya kegiatan ilegal fishing yang mengakibatkan kerusakan ekosistim terumbu karang dan mangrove dan berdampak pada produksi hasil tangkapan nelayan
- Minimnya Infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Ketersediaan data statistik perikanan yang belum akurat dalam penyajian informasi potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una , dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada ***Lampiran I***:

2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi

masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel II.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024
Kabupaten Tojo Una Una

Nama SKPD : Dinas Perikanan

USULAN POKIR DPRD
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI OPD
1	HUSAIN, SE	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	dengan adanya katinting 5,5 PK membantu kebutuhan ekonomi para Nelayan yang ada di Desa Bangkagi	Desa Bangkagi Kec. Togean , Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
2	HUSAIN, SE	pengadaan bagan	dengan adanya bagan membantu per ekonomian Masyarakat	Desa Malenge Kec. Talatako , Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
3	HUSAIN, SE	Pengadaan rumpon	dengan adanya rumpon sangant membantu untuk para nelayan mencari ikan sangat membantu ekonomi nelayan	Desa Bangkagi Kec. Togean, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
4	HUSAIN, SE	pengadaan bagan	dengan adanya bagan sangat membantu para nelayan mencari ikan sehingga membantu ekonomi nelayan yang ada di desa bangkagi	Desa Bangkagi Kec. Togean, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
5	ISKANDAR H KAMARU	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	karna belum ada pengadaan perahu viber	Desa Tiga Pulau Kec. Walea Kepulauan, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
6	ISKANDAR H KAMARU	Pengadaan Mesin Tempel	mempermudah bagi nelayan mencari ikan untuk meningkatkan perekonomian mesin tempel 15 PK	Desa Tiga Pulau kec.Walea Kepulauan, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
7	ISKANDAR H KAMARU	Pengadaan Pukat	mempermudah para nelayan mencari ikan	Desa Tiga Pulau Kec. Walea Kepulauan, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
8	ISKANDAR H KAMARU	pengadaan bagan	untuk mempermudah nelayan menangkap ikan	Desa Tongkabo Kec. Togean, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
9	ISKANDAR H KAMARU	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	dengan adanya mesin katinting mempermudah para nelayan mencari ikan	Desa Kulingkinari Kec. Batudaka, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI OPD
10	ISKANDAR H KAMARU	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	dengan adanya mesin katinting mempermudah para nelayan mencari ikan	Desa Kambutu Kec. Batudaka, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
11	JAFAR M AMIN, SE	Pengadaan Empang Ikan	karna perlu pengadaan empang mebantu ekonomi masyarakat	Desa Kambutu Kec. Batudaka, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
12	ROBY A. KUKA	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	(MESIN HONDA 9 PK UNTUK 2 KELOMPOK NELAYAN) Karena Minimnya Fasilitas Nelayan Untuk Mencari Nafkah.	Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
13	ROBY A. KUKA	Pengadaan Mesin Tempel	Fasilitas Nelayan dalam Mencari Ikan tidak memadai	Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
14	ANDRI PURWANTO	pengadaan bagan	Kurangnya Fasilitas alat tangkap nelayan	Desa Nggawia Kecamatan Tojo barat, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
15	ANDRI PURWANTO	Pengadaan Benih Ikan Lele, Pakan dan Perlengkapan Budidaya	Pengadaan Benih Ikan Lele	Desa Nggawia Kecamatan Tojo Barat, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
16	ANDRI PURWANTO	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	Pengadaan Katinting/Rumpon	Desa Sandada, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
17	HUSAIN, SE	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	bertujuan untuk meningkatkan per ekonomian masyarakat	Desa Malenge Kec. Tolatako, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
18	HUSAIN, SE	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	bertujuan untuk meningkatkan per ekonomian masyarakat	Desa Tongkabo Kec. Togean, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
19	HUSAIN, SE	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	bertujuan untuk meningkatkan per ekonomian masyarakat	Desa Wakai Kec. Una-Una, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI OPD
20	HUSAIN, SE	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	bertujuan untuk meningkatkan per ekonomian masyarakat	Desa Binanguna Kec. Una-Una, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
21	HUSAIN, SE	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	bertujuan untuk meningkatkan per ekonomian masyarakat	Desa Kololio Kec. Togean, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
22	HUSAIN, SE	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	bertujuan untuk meningkatkan per ekonomian masyarakat	Desa Tobil Kec. Togean, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
23	HUSAIN, SE	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	bertujuan untuk meningkatkan per ekonomian masyarakat	Desa Tutung Kec. Walea Kepulauan , Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
24	HUSAIN, SE	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	bertujuan untuk meningkatkan per ekonomian masyarakat	Desa Bungayo Kec. Togean, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
25	HUSAIN, SE	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	bertujuan untuk meningkatkan per ekonomian masyarakat	Desa Matobiai Kec. Togean , Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
26	HUSAIN, SE	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	bertujuan untuk meningkatkan per ekonomian masyarakat	Desa Tumbulawa Kec. Batudaka, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
27	HUSAIN, SE	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	bertujuan untuk meningkatkan per ekonomian masyarakat	Desa Molowagu Kec. Batudaka, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
28	ZAINAL MULUK LAPANGANDONG	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	Pengadaan Mesin Katinting 6,5 PK	Kec. Ampana Kota (Tersebar), Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
29	ANDRI PURWANTO	Pengadaan Benih udang vaname, Pakan dan Perlengkapan Budidaya	pembangunan Tambang udang bahwa udang memiliki peranan besar terhadap kinerja ekonomi perikanan	Desa Tayawa, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI OPD
30	ANDRI PURWANTO	Pengadaan Benih udang vaname, Pakan dan Perlengkapan Budidaya	pengadaan sarana dan prasarana tambak udang bahwa udang memiliki peranan besar terhadap kinerja ekonomi perikanan	Desa Tayawa, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
31	ANDRI PURWANTO	Pengadaan Benih udang vaname, Pakan dan Perlengkapan Budidaya	pengadaan bibit induk udang vaname bahwa udang memiliki peranan besar terhadap kinerja ekonomi perikanan	Desa Tayawa, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
32	ANDRI PURWANTO	Pengadaan Benih udang vaname, Pakan dan Perlengkapan Budidaya	pengadaan pakan udang vaname bahwa udang memiliki peranan besar terhadap kinerja ekonomi perikanan	Desa Tayawa, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
33	ANDRI PURWANTO	Pengadaan rumpon	pengadaan rumpon dan katinting meningkatkan hasil tangkapan ikan, meningkatkan penghasilan nelayan dan meminimalisir biaya produksi nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan.	Desa Ujung Tibu, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
34	ANDRI PURWANTO	Pengadaan Benih Ikan Mas , Pakan dan Perlengkapan Budidaya	Pengadaan Benih Ikan Nila	Kecamatan Tojo Barat, Tojo dan Ulubongka, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
35	ANDRI PURWANTO	Pengadaan Benih Ikan Lele, Pakan dan Perlengkapan Budidaya	Pengadaan Benih Ikan Lele	Kec. Tojo Barat, Tojo dan Ulubongka, Kab. Tojo Una Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II

AMPANA, MARET 2023
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TOJO UNA UNA

RAHMAT BASRI, S.Pi.,M.Si
NIP. 19690902 199903 1 007

USULAN MUSRENBANG DESA/KECAMATAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI SKPD
1	Pengadaan Mesin Tempel	Kurangnya Sarana yang ada di kelompok Nelayan Rumpon dalam melakukan aktifitas	Desa Tanjung Pude Dusun I dan II, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Tanjung Pude	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
2	pengadaan bagan	untuk meningkatkan ekonomi masyarakat	Desa Lindo, Kab. Tojo Una Una	Batudaka	Lindo	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
3	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	tidak memiliki alat transportasi (kebutuhan perahu fiber)	Desa Kabalutan Dusun 1,2,3 dan 4, Kab. Tojo Una Una	Talatako	Kabalutan	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
4	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	masih adanya nelayan yang perahu dan mesin katinting yang tidak alayak Pakai (Rusak)	Desa Tanjung Pude Dusun I dan II, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Tanjung Pude	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
5	Pengadaan Kapal Pukat Cincinn	Kurangnya fasilitas alat tangkap Nelayan Rumpon	Desa Tanjung Pude Dusun I, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Tanjung Pude	Dinas Perikanan	Terakomodir akan diusulkan di APBN/APBD I
6	pengadaan cool box	Kurangnya sarana bagi nelayan untuk menyimpan hasil tangkapan	Desa Tanjung Pude Dusun I dan II, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Tanjung Pude	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
7	Pengadaan Mesin Tempel	untuk kepentingan kebutuhan masyarakat desa patoyan	Desa Patoyan, Kab. Tojo Una Una	Batudaka	Patoyan	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
8	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	banyaknya perahu yang sudah tidak layak digunakan (pemeliharaan perahu)	Desa Kabalutan Dusun 1 2 3 dan 4, Kab. Tojo Una Una	Talatako	Kabalutan	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
9	peningkatan kapasitas SDM perikanan	kurangnya SDM dalam sektor perikanan	Desa Tanjungpude, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Tanjung Pude	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
10	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	sangat membutuhkan (perahu fibber Glass dan masin)	Desa Kulingkinari, Kab. Tojo Una Una	Batudaka	Kulingkinari	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI SKPD
11	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	banyaknya nelayan yang belum memiliki perahu (Fiber)	Desa Malenge Dusun 1 2 dan 3, Kab. Tojo Una Una	Talatako	Malenge	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
12	Pembangunan cool stoorage / Pabrik Es	sulitnya masyarakat nelayan mendapatkan es untuk mengawetkan hasil tangkapan	desa binanguna, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Binanguna	Dinas Perikanan	Belum terakomodir, perlu kajian status lahan belum clean and clear
13	Pengadaan Pukat	Banyaknya Nelayan di Desa Balanggala	Desa Balanggala, Kab. Tojo Una Una	Ampana Tete	Balanggala	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
14	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	minimya sarana nelayan	binanguna dusun 1,2,3, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Binanguna	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
15	Pengadaan Mesin Tempel	belum adanya sarana pendukung bagi nelayan untuk melakukan penangkapan	binanguna, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Binanguna	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
16	pengadaan rumpon	sulitnya masyarakat nelayan untuk mengadakan rumpon /biaya besar	binanguna, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Binanguna	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
17	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	Banyaknya masyarakat yang belum memiliki perahu (Fiber)	Desa Kadoda, Kab. Tojo Una Una	Talatako	Kadoda	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
18	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	Belum adanya perahu (trip)	Desa Kadoda, Kab. Tojo Una Una	Talatako	Kadoda	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
19	Pengadaan Mesin Tempel	masyarakat Belum memiliki mesin yang dimaksud	Desa kadoda, Kab. Tojo Una Una	Talatako	Kadoda	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
20	Pengadaan Mesin Tempel	penunjang operasional pemerintah desa	Cendana, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Cendana	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
21	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	minimnya sarana penunjang masyarakat nelayan	Cendana, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Cendana	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI SKPD
22	Pembangunan cool stoorage / Pabrik Es	Penunjang pengawetan hasil tangkap nelayan	Cendana, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Cendana	Dinas Perikanan	Belum terakomodir, perlu kajian status lahan belum clean and clear
23	pengadaan cool box	minimnya wadah penyimpanan hasil tangkap nelayan / penjual ikan	Cendana, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Cendana	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
24	pengadaan rumpon	besarnya biaya	Cendana, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Cendana	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
25	Pengadaan karamba jaring apung	Banyaknya masyarakat yang belum memiliki karamba (bibit ikan/lopster)	Desa Kadoda, Kab. Tojo Una Una	Talatako	Kadoda	Dinas Perikanan	Terakomodir akan diusulkan di APBN/APBD I
26	pengadaan bagan	bagan yang ada sudah tidak layak digunakan	Desa kadoda, Kab. Tojo Una Una	Talatako	Kadoda	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
27	Pengadaan kapal tangkap ikan	menciptakan lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan masyarakat desa	Desa Pancuma, Kab. Tojo Una Una	Tojo	Pancuma	Dinas Perikanan	Terakomodir akan diusulkan di APBN/APBD I
28	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	masih banyak masyarakat yang belum memiliki Mesin Kantinting	Desa Pautu, Kab. Tojo Una Una	Talatako	Pautu	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
29	pengadaan bagan	untuk memudahkan nelayan mencai ikan	Desa Malapo, Kab. Tojo Una Una	Walea Besar	Malapo	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
30	pengadaan bagan	nelayan membutuhkan bagan/belum memiliki	Desa Pautu, Kab. Tojo Una Una	Talatako	Pautu	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
31	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	Banyaknya masyarakat yang membutuhkan(perahu fiber)	Desa Pautu, Kab. Tojo Una Una	Talatako	Pautu	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
32	peningkatan kapasitas SDM perikanan	agar para SDM di bidang perikanan lebih berkembang dan maju	Desa Uedele, Kab. Tojo Una Una	Tojo	Uedele	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI SKPD
33	Pengadaan Benih kerapu, Pakan dan Perlengkapan Budidaya	Membantu meningkatkan perekonomian masyarakat	Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Kab. Tojo Una Una	Togean	Tongkabo	Dinas Perikanan	Terakomodir akan diusulkan di APBN/APBD I
34	pengadaan cool box	sebagai penyimpanan ikan	Desa Kondongan, Kab. Tojo Una Una	Walea Besar	Kondongan	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
35	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	untuk kepentingan nelayan	Desa Kondongan, Kab. Tojo Una Una	Walea Besar	Kondongan	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
36	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	sarana penunjang nelayan	kavetan, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Kavetan	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
37	pengadaan rumpon	untuk mempermudah penangkapan ikan	Desa Kondongan, Kab. Tojo Una Una	Walea Besar	Kondongan	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
38	Pengadaan Mesin Tempel	Untuk kepentingan masyarakat saat berurusan	Desa Sampobae, Kab. Tojo Una Una	Togean	Sampobae	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
39	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	Masih kurang Perahu/mesin katinting di desa sampobae	Desa Sampobae, Kab. Tojo Una Una	Togean	Sampobae	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
40	Pengadaan Pukat	Masih kurangnya pukat untuk penangkapan ikan di laut	Desa Sampobae, Kab. Tojo Una Una	Togean	Sampobae	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
41	Pengadaan karamba jaring apung	Masih kurangnya karamba untuk masyarakat sampobae	Desa Sampobae, Kab. Tojo Una Una	Togean	Sampobae	Dinas Perikanan	Terakomodir akan diusulkan di APBN/APBD I
42	Pengadaan Mesin Tempel	rata rata mesin pendorong yang d pakai kapasitas kecil	wakai, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Wakai	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
43	pengadaan bagan	Masih kurangnya bagan untuk masyarakat sampobae	Desa Sampobae, Kab. Tojo Una Una	Togean	Sampobae	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI SKPD
44	Pengadaan Benih kerapu, Pakan dan Perlengkapan Budidaya	pemberdayaan	wakai, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Wakai	Dinas Perikanan	Terakomodir akan diusulkan di APBN/APBD I
45	Pengadaan Benih kepiting bakau, Pakan dan Perlengkapan Budidaya	pemberdayaan	wakai, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Wakai	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
46	Pengadaan Benih Ikan Bandeng, Pakan dan Perlengkapan Budidaya	banyak empang yg tidak terkelola maksimal	wakai, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Wakai	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
47	Pengadaan Benih Ikan Mas , Pakan dan Perlengkapan Budidaya	kolam	wakai, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Wakai	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
48	pengadaan rumpon	peningkatan pendapatan	wakai, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Wakai	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
49	pengadaan cool box	minimnya sarana penyimpanan hasil laut	wakai, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Wakai	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
50	pengadaan bagan	pengadaan bagan	Dusun I & II, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Una-Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
51	Pengadaan Mesin Tempel	Pengadaan Mesin Tempel	Dusun I & II, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Una-Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
52	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	Dusun I & II, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Una-Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
53	Pengadaan Pukat	Pengadaan Pukat	Dusun I & II, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Una-Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
54	Pengadaan kapal tangkap ikan	Pengadaan kapal tangkap ikan	Dusun I & II, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Una-Una	Dinas Perikanan	Terakomodir akan diusulkan di APBN/APBD I

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI SKPD
55	Pengadaan Benih Ikan Mas , Pakan dan Perlengkapan Budidaya	Pengadaan Benih Ikan Mas , Pakan dan Perlengkapan Budidaya	Dusun I & II, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Una-Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
56	Pengadaan Benih kepiting bakau, Pakan dan Perlengkapan Budidaya	Pengadaan Benih kepiting bakau, Pakan dan Perlengkapan Budidaya	Dusun I & II, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Una-Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
57	pengadaan cool box	pengadaan cool box	Dusun I dan II, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Una-Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
58	pengadaan rumpon	pengadaan rumpon	Dusun I & II, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Una-Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
59	peningkatan kapasitas SDM perikanan	peningkatan kapasitas SDM perikanan	Dusun I & II, Kab. Tojo Una Una	Una Una	Una-Una	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
60	Pengadaan Mesin Tempel	Untuk kepentingan masyarakat kololio saat berurusan	Desa Kololio, Kab. Tojo Una Una	Togean	Kololio	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
61	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	Masih kurang perahu dan mesin katinting untuk masyarakat kololio	Desa Kololio, Kab. Tojo Una Una	Togean	Kololio	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
62	pengadaan bagan	meningkatkan hasil nelayan	Desa Lembanato, Kab. Tojo Una Una	Togean	Lembanato	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
63	Pengadaan Pukat	meningkatkan hasil nelayan	Desa Lembanato, Kab. Tojo Una Una	Togean	Lembanato	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
64	Pengadaan karamba jaring apung	meningkatkan hasil nelayan	Desa Lembanato, Kab. Tojo Una Una	Togean	Lembanato	Dinas Perikanan	Terakomodir akan diusulkan di APBN/APBD I
65	Pengadaan Benih lobster, Pakan dan Perlengkapan Budidaya	meningkatkan hasil nelayan	Desa Lembanato, Kab. Tojo Una Una	Togean	Lembanato	Dinas Perikanan	Terakomodir akan diusulkan di APBN/APBD I

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI SKPD
66	pengadaan rumpon	meningkatkan hasil nelayan	Desa Lembanato, Kab. Tojo Una Una	Togean	Lembanato	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
67	peningkatan kapasitas SDM perikanan	masih kurangnya pengetahuan	Desa Lembanato, Kab. Tojo Una Una	Togean	Lembanato	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
68	Pengadaan Benih udang vaname, Pakan dan Perlengkapan Budidaya	Karena selain sebagai petani masyarakat juga memiliki lahan tambak yang luas sehingga, perlu adanya bantuan pakan udang.	Desa Mawomba, Kab. Tojo Una Una	Tojo Barat	Mawomba	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
69	pengadaan cool box	Perlu adanya pemberian fasilitasi kepada nelayan	Kolami, Kab. Tojo Una Una	Walea Kepulauan	Kolami	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
70	pengadaan rumpon	belum adanya rumpon yang dimiliki nelayan	Kolami, Kab. Tojo Una Una	Walea Kepulauan	Kolami	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
71	Pengadaan Pukat	perlu adanya bantuan kepada nelayan untuk meningkatkan pendapatan nelayan	Kolami, Kab. Tojo Una Una	Walea Kepulauan	Kolami	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
72	Pengadaan Pukat	Belum Adanya Alat Tangkap Pukat Bagi Kelompok Nelayan	Desa Bambalo, Kab. Tojo Una Una	Tojo Barat	Bambalo	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
73	pengadaan rumpon	Belum Adanya Rumpon Bagi Kelompok Nelayan	Desa Bambalo, Kab. Tojo Una Una	Tojo Barat	Bambalo	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
74	pengadaan cool box	Permintaan Kelompok Nelayan/Perikanan Desa Katupat	Desa Katupat, Kab. Tojo Una Una	Togean	Katupat	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
75	Pengadaan Benih udang vaname, Pakan dan Perlengkapan Budidaya	Permintaan Kelompok Nelayan/Perikanan Desa Katupat	Desa Katupat, Kab. Tojo Una Una	Togean	Katupat	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI SKPD
76	Pengadaan Benih lobster, Pakan dan Perlengkapan Budidaya	Permintaan Kelompok Nelayan/Perikanan Desa Katupat	Desa Katupat, Kab. Tojo Una Una	Togean	Katupat	Dinas Perikanan	Terakomodir akan diusulkan di APBN/APBD I
77	Pengadaan Benih kepiting bakau, Pakan dan Perlengkapan Budidaya	Permintaan Kelompok Nelayan/Perikanan Desa Katupat	Desa Katupat, Kab. Tojo Una Una	Togean	Katupat	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
78	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	Perlu adanya tambahan fasilitas bagi masyarakat yang mayoritas pekerjaan nelayan	Tiga Pulau, Kab. Tojo Una Una	Walea Kepulauan	Tiga Pulau	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
79	Pengadaan Benih Ikan Mas , Pakan dan Perlengkapan Budidaya	pemilik kolam tidak mampu dalam mengadaan bibit yang banyak	Dusun 1 dan 2, Kab. Tojo Una Una	Tojo Barat	Malewa	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
80	pengadaan cool box	sebagai penyimpanan ikan agar tetap awet	Pasokan, Kab. Tojo Una Una	Walea Besar	Pasokan	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
81	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	untuk alat mencari ikan	Pasokan, Kab. Tojo Una Una	Walea Besar	Pasokan	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
82	pengadaan rumpon	mempermudah mendapatkan ikan	Pasokan, Kab. Tojo Una Una	Walea Besar	Pasokan	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
83	pengadaan cool box	sebagai penyimpanan ikan	tingki, Kab. Tojo Una Una	Walea Besar	Tingki	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
84	pengadaan rumpon	memudahkan penangkapan ikan	tingki, Kab. Tojo Una Una	Walea Besar	Tingki	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
85	Pengadaan Benih Ikan Bandeng, Pakan dan Perlengkapan Budidaya	Tambak yang ada perlu diperbaiki/rehabilitasi	Desa Kadoda, Kab. Tojo Una Una	Talatako	Kadoda	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
86	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	Banyaknya masyarakat yang belum memiliki mesin katinting	Desa Kadoda, Kab. Tojo Una Una	Talatako	Kadoda	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI SKPD
87	Pembangunan cool stoorage / Pabrik Es	untuk kebutuhan para nelayan	dusun 2 tumpang, Kab. Tojo Una Una	Walea Besar	Salinggoha	Dinas Perikanan	Belum terakomodir, perlu kajian status lahan belum clean and clear
88	Pengadaan perahu / Mesin Katinting	untuk meningkatkan ekonomi masyarakat	dusun 1,2,3 katogop, Kab. Tojo Una Una	Walea Besar	Katogop	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
89	pengadaan cool box	untuk penyimpanan ikan	dusun 1,2,3 katogop, Kab. Tojo Una Una	Walea Besar	Katogop	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II
90	pengadaan rumpon	memudahkan nelayan menagkap ikan	dusun 1,2,3 katogop, Kab. Tojo Una Una	Walea Besar	Katogop	Dinas Perikanan	akan diakomodir sesuai ketersediaan anggaran pada APBD II

AMPANA, 31 MARET 2023
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TOJO UNA UNA

RAHMAT BASRI, S.Pi.,M.Si
NIP. 19690902 199903 1 007

LAMPIRAN I
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN TOJO UNA UNA

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
NO		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Cakupan Layanan Penunjang urusan pemerintahan daerah**	12 Bulan	**6,030,423,872**	A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Cakupan Layanan Penunjang urusan pemerintahan daerah**	12 Bulan	**6,030,423,872**	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja					**800,000**	**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja**					**800,000**	
	1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas perikanan	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	400,000	1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas perikanan	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	400,000	
	2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Dinas perikanan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	4 laporan	400,000	1	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Dinas perikanan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	4 laporan	400,000	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**4,026,841,738**	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**4,026,841,738**	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas perikanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/bulan	4,026,841,738	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas perikanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/bulan	4,026,841,738	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**800,000**	**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**800,000**	
	1	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dinas perikanan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	800,000	1	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dinas perikanan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	800,000	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah					**469,041,694**	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**469,041,694**	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas perikanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	984,000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas perikanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	984,000	
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas perikanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	2,825,000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas perikanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	2,825,000	
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas perikanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1,980,250	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas perikanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1,980,250	
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas perikanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	107,326,125	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas perikanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	107,326,125	
	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas perikanan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,600,000	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas perikanan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,600,000	
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2,400,000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2,400,000	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
NO		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Palu, Jakarta, 12 Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43 Laporan	351,926,319	7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Palu, Jakarta, 12 Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43 Laporan	351,926,319	
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah					**33,635,000**	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**					**33,635,000**	
	1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas perikanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	33,235,000	1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas perikanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	33,235,000	
	2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas perikanan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	400,000	2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas perikanan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	400,000	
	Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					**1,374,105,440**	**Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**					**1,374,105,440**	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	500,000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	500,000	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	125,157,193	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	125,157,193	
	3	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Dinas perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,248,448,247	3	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Dinas perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,248,448,247	
	Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					**125,200,000**	**Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**					**125,200,000**	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dinas Perikanan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 unit	69,200,000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dinas Perikanan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 unit	69,200,000	
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas perikanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	11,000,000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas perikanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	11,000,000	
	3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas perikanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	45,000,000	3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas perikanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	45,000,000	
	B.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**				**60,000,000**	**B.**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**				**60,000,000**	
	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					**47,000,000**	**Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**					**47,000,000**	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
NO		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas perikanan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	2,000,000	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas perikanan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	2,000,000	
	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	12 Kecamatan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	20 unit	45,000,000	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	12 Kecamatan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	20 unit	45,000,000	
	Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota					**9,000,000**	**Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota**					**9,000,000**	
	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	12 Kecamatan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 orang	7,000,000	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	12 Kecamatan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 orang	7,000,000	
	2	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	12 Kecamatan	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	1 unit usaha	2,000,000	2	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	12 Kecamatan	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	1 unit usaha	2,000,000	
	Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					**4,000,000**	**Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**					**4,000,000**	
	1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa Labuan, Bahari, malenge	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 dokumen	2,000,000	1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa Labuan, Bahari, malenge	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 dokumen	2,000,000	
	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa Labuan, Bahari, malenge	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 layanan	2,000,000	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa Labuan, Bahari, malenge	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 layanan	2,000,000	
	C.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**				**45,000,000**	**C.**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**				**45,000,000**	
	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					**1,500,000**	**Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**					**1,500,000**	
	1	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Dinas perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	5 rekomendasi	1,500,000	1	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Dinas perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	5 rekomendasi	1,500,000	
	Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					**1,500,000**	**Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**					**1,500,000**	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
NO		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	1	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	12 Kecamatan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 kelompok	1,500,000	1	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	12 Kecamatan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 kelompok	1,500,000	
	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota					**1,500,000**	**Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**					**1,500,000**	
	1	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 rekomendasi	1,500,000	1	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 rekomendasi	1,500,000	
	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					**40,500,000**	**Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**					**40,500,000**	
	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas perikanan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	5,000,000	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas perikanan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	5,000,000	
	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 unit	20,000,000	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 unit	20,000,000	
	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	10,000,000	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	10,000,000	
	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 dokumen	1,500,000	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 dokumen	1,500,000	
	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	6 Kecamatan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	10 orang	1,500,000	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	6 Kecamatan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	10 orang	1,500,000	
	6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas perikanan	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	5 Ha	2,500,000	6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas perikanan	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	5 Ha	2,500,000	
	D	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**30,000,000**	**D**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**30,000,000**	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				**30,000,000**	**Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**				**30,000,000**	
	1 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,000,000	1 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,000,000	
	E PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				**30,000,000**	**E PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**				**30,000,000**	
	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil				**1,500,000**	**Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil**				**1,500,000**	
	1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 dokumen	1,500,000	1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 dokumen	1,500,000	
	Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				**23,000,000**	**Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**				**23,000,000**	
	1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	12 Kecamatan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 unit usaha	23,000,000	1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	12 Kecamatan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 unit usaha	23,000,000	
	Kegiatan : Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				**5,500,000**	**Kegiatan : Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**				**5,500,000**	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Ton	1,500,000	1 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Ton	1,500,000	
2	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 pelaku usaha	4,000,000	2 Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 pelaku usaha	4,000,000	
TOTAL ANGGARAN					**6,195,423,872.00**	**TOTAL ANGGARAN**				**6,195,423,872.00**	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una selama tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk mempedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2024 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selain prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

a. Program pro rakyat;

b. Program keadilan untuk semua; dan

c. Program pencapaian tujuan pembangunan millinium (MDG's)

Selain itu, pemerintah pusat juga baru saja menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendekatan *not business as usual*, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertunbuhan di dalam koridor

ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasarat serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi kaberhasilan pelaksanaan MP3EI.Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang *multiplier effect*-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERIKANAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah darah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Perikanan selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2024 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan
Kabupaten Tojo Una Una

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2024	2025
Meningkatkan kualitas pengelolaan Administrasi, Pelayanan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Nilai Sakip OPD	BB	BB
	Meningkatnya kualitas Perancanaan dan Penganggaran SKPD	Persentasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan	95	97,5
Meningkatkan derajat hidup pelaku usaha		Nilai Tukar Nelayan	103,00	104,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2024	2025
perikanan				
	Meningkatkan kontribusi sektor perikanan dalam memajukan perekonomian daerah	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	11,35-11,39	11,39-11,43
	Meningkatnya produksi sektor perikanan	Persentase peningkatan produksi sektor perikanan	0,20-0,50	0,20-0,50

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta prognosisnya dapat dilihat pada ***Lampiran II.***

LAMPIRAN II
RUMUSAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN TOJO UNA UNA
TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

NAMA SKPD : DINAS PERIKANAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Cakupan Layanan Penunjang urusan pemerintahan daerah**		12 Bulan	**6,030,423,872**			12 Bulan	**6,934,987,454**
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja				**800,000**				**920,000**
	1 Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas perikanan	2 dokumen	400,000	DAU		2 dokumen	460,000
	2 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Dinas perikanan	4 laporan	400,000	DAU		4 laporan	460,000
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**4,026,841,738**				**4,630,867,999**
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas perikanan	42 orang/bulan	4,026,841,738	DAU		42 orang/bulan	4,630,867,999
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**800,000**				**920,000**
	1 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dinas perikanan	1 orang	800,000	DAU		1 orang	920,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah					**469,041,694**				**539,397,949**
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas perikanan	1 paket	984,000	DAU		1 paket	1,131,600
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas perikanan	1 paket	2,825,000	DAU		1 paket	3,248,750
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas perikanan	1 Paket	1,980,250	DAU		1 Paket	2,277,288
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas perikanan	1 Paket	107,326,125	DAU		1 Paket	123,425,044
	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas perikanan	1 Paket	1,600,000	DAU		1 Paket	1,840,000
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Dinas Perikanan	12 Dokumen	2,400,000	DAU		12 Dokumen	2,760,000
	7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu, Jakarta, 12 Kecamatan	43 Laporan	351,926,319	DAU		43 Laporan	404,715,267
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah					**33,635,000**				**38,680,250**
	1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas perikanan	3 unit	33,235,000	DAU		3 unit	38,220,250

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
	2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas perikanan	1 unit	400,000	DAU		1 unit	460,000
	Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					**1,374,105,440**				**1,580,221,256**
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas perikanan	15 Laporan	500,000	DAU		15 Laporan	575,000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas perikanan	12 Laporan	125,157,193	DAU		12 Laporan	143,930,772
	3	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas perikanan	12 Laporan	1,248,448,247	DAU		12 Laporan	1,435,715,484
	Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					**125,200,000**				**143,980,000**
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Dinas Perikanan	35 unit	69,200,000	DAU		35 unit	79,580,000
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Dinas perikanan	1 unit	11,000,000	DAU		1 unit	12,650,000
	3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas perikanan	35 unit	45,000,000	DAU		35 unit	51,750,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
	B. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				**60,000,000**				**69,000,000**
	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				**47,000,000**				**54,050,000**
	1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dinas perikanan	1 dokumen	2,000,000	DAU		1 dokumen	2,300,000
	2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	12 Kecamatan	20 unit	45,000,000	DAU		20 unit	51,750,000
	Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota				**9,000,000**				**10,350,000**
	1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	12 Kecamatan	50 orang	7,000,000	DAU		50 orang	8,050,000
	2 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	12 Kecamatan	1 unit usaha	2,000,000	DAK/DAU		1 unit usaha	2,300,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
	Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					**4,000,000**				**4,600,000**
	1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa Labuan, Bahari, malenge	1 dokumen	2,000,000	DAU		1 dokumen	2,300,000
	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa Labuan, Bahari, malenge	5 layanan	2,000,000	DAU		5 layanan	2,300,000
	C.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**				**45,000,000**				**51,750,000**
	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					**1,500,000**				**1,725,000**
	1	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Dinas perikanan	5 rekomendasi	1,500,000	DAU		5 rekomendasi	1,725,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
	Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				**1,500,000**				**1,725,000**
	1 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan	12 Kecamatan	1 kelompok	1,500,000			1 kelompok	1,725,000
	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota				**1,500,000**				**1,725,000**
	1 Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan	12 Kecamatan	5 rekomendasi	1,500,000	DAU		5 rekomendasi	1,725,000
	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				**40,500,000**				**46,575,000**
	1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas perikanan	1 dokumen	5,000,000	DAU		1 dokumen	5,750,000
	2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	2 unit	20,000,000	DAK/DAU		2 unit	23,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	1 unit	10,000,000	DAU		1 unit	11,500,000
	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji	12 Kecamatan	1 dokumen	1,500,000	DAU		1 dokumen	1,725,000
	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan	6 Kecamatan	10 orang	1,500,000	DAU		10 orang	1,725,000
	6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Dinas perikanan	5 Ha	2,500,000	DAU		5 Ha	2,875,000
	D	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**30,000,000**				**34,500,000**
	Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					**30,000,000**				**34,500,000**
	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam	12 Kecamatan	1 Dokumen	30,000,000	DAU		1 Dokumen	34,500,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
	E PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				**30,000,000**				**34,500,000**
	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil				**1,500,000**				**1,725,000**
	1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dinas perikanan	1 dokumen	1,500,000	DAU		1 dokumen	1,725,000
	Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				**23,000,000**				**26,450,000**
	1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha	12 Kecamatan	3 unit usaha	23,000,000	DAU		3 unit usaha	26,450,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
	Kegiatan : Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					**5,500,000**				**6,325,000**
	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	10 Ton	1,500,000	DAU		10 Ton	1,725,000
	2	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12 Kecamatan	2 pelaku usaha	4,000,000	DAU		2 pelaku usaha	4,600,000
TOTAL ANGGARAN						**6,195,423,872.00**				**7,124,737,454.00**

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NAMA SKPD : DINAS PERIKANAN

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2024	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 (Rp.)	KET. (PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL)
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Nilai Sakip OPD**	**BB**					**6,030,423,872**	**6,934,987,454**	
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah					Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	6 Dokumen	**800,000**	**920,000**	
		1 Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah			Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen			400,000	460,000	
		2 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	4 laporan			400,000	460,000	
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Jumlah bulan gaji dan tunjangan	14 bulan	**4,026,841,738**	**4,630,867,999**	
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/bulan			4,026,841,738	4,630,867,999	
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**800,000**	**920,000**	
		1 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi			Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang			800,000	920,000	
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Jumlah bulan layanan administrasi**	**12 Bulan**	**469,041,694**	**539,397,949**	
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket			984,000	1,131,600	
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket			2,825,000	3,248,750	

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2024	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 (Rp.)	KET. (PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL)
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1,980,250	2,277,288	
		4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			107,326,125	123,425,044	
		5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1,600,000	1,840,000	
		6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			2,400,000	2,760,000	
		7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43 Laporan			351,926,319	404,715,267	
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah					**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**3 Jenis**	**33,635,000**	**38,680,250**	
		1 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit			33,235,000	38,220,250	
		2 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit			400,000	460,000	
		Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**12 bulan**	**1,374,105,440**	**1,580,221,256**	
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan			500,000	575,000	
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			125,157,193	143,930,772	
		3 Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			1,248,448,247	1,435,715,484	
		Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					**tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**12 Bulan**	**125,200,000**	**143,980,000**	

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2024	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 (Rp.)	KET. (PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL)
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 unit			69,200,000	79,580,000	
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit			11,000,000	12,650,000	
		3 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit			45,000,000	51,750,000	
		B. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Meningkatnya produksi perikanan tangkap**	**16.955 Ton**					**60,000,000**	**69,000,000**	
		Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					tersedianya layanan pengelolaan penangkapan ikan	12 bulan	**47,000,000**	**54,050,000**	
		1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen			2,000,000	2,300,000	
		2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	20 unit			45,000,000	51,750,000	
		Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota					tersedianya layanan pemberdayaan nelayan kecil	12 bulan	**9,000,000**	**10,350,000**	
		1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 orang			7,000,000	8,050,000	
		2 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	1 unit usaha			2,000,000	2,300,000	

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2024	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 (Rp.)	KET. (PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL)
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
		Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					tersedianya layanan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	12 bulan	**4,000,000**	**4,600,000**	
		1 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 dokumen			2,000,000	2,300,000	
		2 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 layanan			2,000,000	2,300,000	
		C. **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	**8.570,8 Ton**					**45,000,000**	**51,750,000**	
		Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Tersedianya layanan penerbitan izin usaha perikanan	12 Bulan	**1,500,000**	**1,725,000**	
		1 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	5 rekomendasi			1,500,000	1,725,000	
		Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					Tersedianya layanan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	12 bulan	**1,500,000**	**1,725,000**	
		1 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 kelompok			1,500,000	1,725,000	

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2024	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 (Rp.)	KET. (PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL)
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
		Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota					Tersedianya layanan penerbitan TDPIK	12 bulan	**1,500,000**	**1,725,000**	
		1 Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 rekomendasi			1,500,000	1,725,000	
		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					Tersedianya layanan pengelolaan pembudidayaan ikan	12 bulan	**40,500,000**	**46,575,000**	
		1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen			5,000,000	5,750,000	
		2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 unit			20,000,000	23,000,000	
		3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit			10,000,000	11,500,000	
		4 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 dokumen			1,500,000	1,725,000	
		5 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	10 orang			1,500,000	1,725,000	
		6 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	5 Ha			2,500,000	2,875,000	

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2024	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 (Rp.)	KET. (PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL)
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
		D PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi perikanan	**2,82 persen**					**30,000,000**	**34,500,000**	
		Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					tersedianya pengawasan sumberdaya perikanan	12 Kecamatan	**30,000,000**	**34,500,000**	
		1 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen			30,000,000	34,500,000	
		E PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase usaha pengolahan yang difasilitasi	**20 persen**					**30,000,000**	**34,500,000**	
		Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil					Tersedianya layanan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	12 Bulan	**1,500,000**	**1,725,000**	
		1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 dokumen			1,500,000	1,725,000	
		Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					Tersedianya layanan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	12 Bulan	**23,000,000**	**26,450,000**	

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2024	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 (Rp.)	KET. (PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL)
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
		1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 unit usaha			23,000,000	26,450,000	
		Kegiatan : Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					Tersedianya layanan penyediaan bahan baku industri pengolahan ikan	12 Bulan	**5,500,000**	**6,325,000**	
		1 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Ton			1,500,000	1,725,000	
		2 Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 pelaku usaha			4,000,000	4,600,000	
	TOTAL ANGGARAN								**6,195,423,872.00**	**7,124,737,454.00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan RKPD Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2021 s/d 2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki , Dinas Perikanan penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Perikanan maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD

yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2021-2026 yaitu: **" TERWUJUDNYA KABUPATEN TOJO UNA UNA TANGGUH, MAJU, DAN SEJAHTERA (TAMARA)".**

Ampana, 31 Maret 2023
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Tojo Una Una



RAHMAT BASRI, S.Pi., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690902 199903 1 007

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Tojo Una Una
Tahun 2024

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Dinas Perikanan								6.195.423.872,00					7.124.737.454,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								6.195.423.872,00					7.124.737.454,00
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								6.195.423.872,00					7.124.737.454,00
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6.030.423.872,00					6.934.987.454,00
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								800.000,00					920.000,00
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan,	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan,	BB Nilai	2 Dokumen	6 Dokumen	400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	460.000,00
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Tersedianya Dokumen Perencanaan,	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan,	BB Nilai	4 Laporan	6 Dokumen	400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Laporan	460.000,00
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.026.841.738,00					4.630.867.999,00
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Nilai	42 Orang/bulan	14 Bulan	4.026.841.738,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	4.630.867.999,00
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								800.000,00					920.000,00
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Nilai	1 Orang	100 persen	800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	920.000,00
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								469.041.694,00					539.397.949,00
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan layanan administrasi	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Nilai	1 Paket	12 Bulan	984.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.131.600,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan layanan administrasi	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88 Nilai	1 Paket	12 Bulan	2.825.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.248.750,00
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah bulan layanan administrasi	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88 Nilai	1 Paket	12 Bulan	1.980.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.277.288,00
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan layanan administrasi	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88 Nilai	1 Paket	12 Bulan	107.326.125,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	123.425.044,00
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah bulan layanan administrasi	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88 Nilai	1 Paket	12 Bulan	1.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.840.000,00
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah bulan layanan administrasi	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88 Nilai	12 Dokumen	12 Bulan	2.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.760.000,00
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan layanan administrasi	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88 Nilai	43 Laporan	12 Bulan	351.926.319,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43 Laporan	404.715.267,00
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								33.635.000,00					38.680.250,00
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88 Nilai	3 Unit	3 Jenis	33.235.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	38.220.250,00
3	25	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88 Nilai	1 Unit	3 Jenis	400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	460.000,00
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.374.105.440,00					1.580.221.256,00
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88 Nilai	15 Laporan	12 Bulan	500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	575.000,00
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88 Nilai	12 Laporan	12 Bulan	125.157.193,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	143.930.772,00
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88 Nilai	12 Laporan	12 Bulan	1.248.448.247,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.435.715.484,00
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								125.200.000,00					143.980.000,00
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88 Nilai	35 Unit	12 Bulan	69.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	79.580.000,00
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88 Nilai	1 Unit	12 Bulan	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	12.650.000,00
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88 Nilai	35 Unit	12 Bulan	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	51.750.000,00
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								60.000.000,00					69.000.000,00
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								47.000.000,00					54.050.000,00
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan													
						Produksi perikanan Tangkap (Ton)	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersedianya layanan pengelolaan penangkapan ikan	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.955,00 ton	1 Dokumen	12 Bulan	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	2.300.000,00
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap													
						Produksi perikanan Tangkap (Ton)	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Tersedianya layanan pengelolaan penangkapan ikan	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.955,00 ton	20 Unit	12 Bulan	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	20 Unit	51.750.000,00
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								9.000.000,00					10.350.000,00
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Produksi perikanan Tangkap (Ton)	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Tersedianya layanan pemberdayaan nelayan kecil	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.955,00 ton	50 Orang	12 Bulan	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	8.050.000,00
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha													
						Produksi perikanan Tangkap (Ton)	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Tersedianya layanan pemberdayaan nelayan kecil	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.955,00 ton	1 Unit Usaha	12 Bulan	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1 Unit Usaha	2.300.000,00
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								4.000.000,00					4.600.000,00
3	25	03	2.03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)													
						Produksi perikanan Tangkap (Ton)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya layanan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.955,00 ton	1 Dokumen	12 Bulan	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Dokumen	2.300.000,00
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)													
						Produksi perikanan Tangkap (Ton)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya layanan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.955,00 ton	5 Layanan	12 Bulan	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 Layanan	2.300.000,00
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								45.000.000,00					51.750.000,00
3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								1.500.000,00					1.725.000,00
3	25	04	2.01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Produksi perikananBudidaya (Ton)	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Tersedianya layanan penerbitan izin usaha perikanan	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.570,80 Ton	5 Rekomendasi	12 Bulan	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	1.725.000,00
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								1.500.000,00					1.725.000,00
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan													
						Produksi perikananBudidaya (Ton)	-	Tersedianya layanan pemberdayaan pembudidaya ikan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.570,80 Ton	-	12 Bulan	1.500.000,00	-		-	-	1.725.000,00
3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								1.500.000,00					1.725.000,00
3	25	04	2.03	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Produksi perikananBudidaya (Ton)	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan penerbitan TDPIK	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.570,80 Ton	5 Rekomendasi	12 Bulan	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Rekomendasi	1.725.000,00
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								40.500.000,00					46.575.000,00
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Produksi perikananBudidaya (Ton)	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pengelolaan pembudidayaan ikan	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.570,80 Ton	1 Dokumen	12 Bulan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.750.000,00
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Produksi perikananBudidaya (Ton)	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pengelolaan pembudidayaan ikan	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.570,80 Ton	2 Unit	12 Bulan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	23.000.000,00
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Produksi perikananBudidaya (Ton)	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pengelolaan pembudidayaan ikan	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.570,80 Ton	1 Unit	12 Bulan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	11.500.000,00
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Produksi perikananBudidaya (Ton)	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Tersedianya layanan pengelolaan pembudidayaan ikan	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.570,80 Ton	1 Dokumen	12 Bulan	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	1.725.000,00
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat													
						Produksi perikananBudidaya (Ton)	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Tersedianya layanan pengelolaan pembudidayaan ikan	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.570,80 Ton	10 Orang	12 Bulan	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	10 Orang	1.725.000,00
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat													
						Produksi perikananBudidaya (Ton)	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Tersedianya layanan pengelolaan pembudidayaan ikan	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.570,80 Ton	5 Ha	12 Bulan	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	5 Ha	2.875.000,00
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								30.000.000,00					34.500.000,00
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota								30.000.000,00					34.500.000,00
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Tersedianya pengawasan sumberdaya perikanan	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,82 Persen	1 Dokumen	12 Kecamatan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	34.500.000,00
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								30.000.000,00					34.500.000,00
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil								1.500.000,00					1.725.000,00
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentase Usaha Pengolahan yang difasilitasi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Tersedianya layanan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20,00 Persen	1 Dokumen	12 Bulan	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	1.725.000,00
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								23.000.000,00					26.450.000,00
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil													
						Persentase Usaha Pengolahan yang difasilitasi	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Tersedianya layanan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20,00 Persen	3 Unit Usaha	12 Bulan	23.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 Unit Usaha	26.450.000,00
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								5.500.000,00					6.325.000,00
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentase Usaha Pengolahan yang difasilitasi	-	Tersedianya layanan penyediaan bahan baku industri	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20,00 Persen	-	12 Bulan	1.500.000,00	-		-	-	1.725.000,00
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Usaha Pengolahan yang difasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Tersedianya layanan penyediaan bahan baku industri pengolahan ikan	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20,00 Persen	2 Pelaku Usaha	12 Bulan	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku Usaha	4.600.000,00
												TOTAL	6.195.423.872,00					7.124.737.454,00

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERIKANAN KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERIKANAN														
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**6.196.423.872,00**							**7.124.737.454,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**6.196.423.872,00**							**7.124.737.454,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**Nilai**		**Nilai**	**BB Nilai**	**6.030.423.872,00**						**BB Nilai**	**6.934.987.454,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja*	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	800.000,00						2 Dokumen	920.000,00	
	3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	400.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Dokumen	460.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	4 Laporan	400.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	4 Laporan	460.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bulan gaji dan tunjangan*	Bulan		Bulan	14 Bulan	4.026.841.738,00						42 Orang/bulan	4.630.867.999,00	
	3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan	42 Orang/bulan	4.026.841.738,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	42 Orang/bulan	4.630.867.999,00	DINAS PERIKANAN
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah*	persen		persen	100 persen	800.000,00						1 Orang	920.000,00	
	3.26.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	1 Orang	800.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Orang	920.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bulan layanan administrasi*	Bulan		Bulan	12 Bulan	469.041.694,00						1 Paket	539.397.948,00	
	3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	984.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Paket	1.131.600,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	2.825.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Paket	3.248.750,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	1.980.250,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Paket	2.277.288,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	107.326.125,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Paket	123.425.044,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	1.600.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Paket	1.840.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Dokumen	2.760.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	43 Laporan	351.926.319,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	43 Laporan	404.715.267,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	Jenis		Jenis	3 Jenis	33.635.000,00						3 Unit	38.680.250,00	
	3.25.01.2.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	3 Unit	33.235.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Unit	38.220.250,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	400.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Unit	460.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	Bulan		Bulan	12 Bulan	1.374.105.440,00						15 Laporan	1.580.221.256,00	
	3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	15 Laporan	500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	15 Laporan	575.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	125.157.193,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	143.930.772,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	1.248.448.247,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	1.435.715.484,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	Bulan		Bulan	12 Bulan	125.200.000,00						35 Unit	143.980.000,00	
	3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	35 Unit	69.200.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	35 Unit	79.580.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	1 Unit	11.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Unit	12.650.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	35 Unit	45.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	35 Unit	51.750.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Produksi perikanan Tangkap (Ton)***	ton		ton	**16,955,00 ton**	**60.000.000,00**						**16,955,00 ton**	**69.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Tersedianya layanan pengelolaan penangkapan ikan*	Bulan		Bulan	12 Bulan	47.000.000,00						1 Dokumen	54.050.000,00	
	3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	1 Dokumen	2.300.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit		Unit	20 Unit	45.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	20 Unit	51.750.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya layanan pemberdayaan nelayan kecil*	Bulan		Bulan	12 Bulan	9.000.000,00						50 Orang	10.350.000,00	
	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang		Orang	50 Orang	7.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	50 Orang	8.050.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha		Unit Usaha	1 Unit Usaha	2.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	1 Unit Usaha	2.300.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Tersedianya layanan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI*	Bulan		Bulan	12 Bulan	4.000.000,00						1 Dokumen	4.600.000,00	
	3.25.03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
			Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	1 Dokumen	2.300.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan		Layanan	5 Layanan	2.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	5 Layanan	2.300.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Produksi perikananBudidaya (Ton)***	**Ton**		**Ton**	**9.570,80 Ton**	**46.000.000,00**						**9.570,80 Ton**	**51.750.000,00**	
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya layanan penerbitan izin usaha perikanan*	Bulan		Bulan	12 Bulan	1.500.000,00						5 Rekomendasi	1.725.000,00	
	3.25.04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Rekomendasi		Rekomendasi	5 Rekomendasi	1.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	5 Rekomendasi	1.725.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Tersedianya layanan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil*	Bulan		Bulan	12 Bulan	1.500.000,00						-	1.725.000,00	
	3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			-	-		-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	1.725.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya layanan penerbitan TDPIK*	Bulan		Bulan	12 Bulan	1.500.000,00						5 Rekomendasi	1.725.000,00	
	3.25.04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi		Rekomendasi	5 Rekomendasi	1.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	5 Rekomendasi	1.725.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Tersedianya layanan pengelolaan pembudidayaan ikan*	Bulan		Bulan	12 Bulan	40.500.000,00						1 Dokumen	46.575.000,00	
	3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	1 Dokumen	5.750.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit		Unit	2 Unit	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	2 Unit	23.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit		Unit	1 Unit	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	1 Unit	11.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	1 Dokumen	1.725.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang		Orang	10 Orang	1.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	10 Orang	1.725.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha		Ha	5 Ha	2.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	5 Ha	2.875.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	***Persentase Peningkatan Produksi Perikanan***	**Persen**		**Persen**	**2,82 Persen**	**30.000.000,00**						**2,82 Persen**	**34.500.000,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Tersedianya pengawasan sumberdaya perikanan*	Kecamatan		Kecamatan	12 Kecamatan	30.000.000,00						1 Dokumen	34.500.000,00	
	3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	1 Dokumen	34.500.000,00	DINAS PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Persentase Usaha Pengolahan yang difasilitasi***	**Persen**		**Persen**	**20,00 Persen**	**30.000.000,00**						**20,00 Persen**	**34.500.000,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Tersedianya layanan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil*	Bulan		Bulan	12 Bulan	1.500.000,00						1 Dokumen	1.725.000,00	
	3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	1 Dokumen	1.725.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Tersedianya layanan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan*	Bulan		Bulan	12 Bulan	23.000.000,00						3 Unit Usaha	26.450.000,00	
	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha		Unit Usaha	3 Unit Usaha	23.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	3 Unit Usaha	26.450.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Tersedianya layanan penyediaan bahan baku industri pengolahan ikan*	Bulan		Bulan	12 Bulan	5.500.000,00						-	6.325.000,00	
	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			-	-		-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	1.725.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	4.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	2 Pelaku Usaha	4.600.000,00	DINAS PERIKANAN
	J U M L A H							**5.196.423.872,00**							**7.124.737.464,00**	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOJO



DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Daftar isi ii

Kata Pengantar iii

Bab I PENDAHULUAN ..... **I**

1.1 Latar Belakang..... I-3

1.2 Landasan Hukum..... 4

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan..... 5-6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... **II**

2.1 Evaluasi Pelakssanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 10

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 10-15

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 16-18

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... **III**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 20

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 21

3.3 Sasaran Perangkat Daerah..... 22

3.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 22

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... **IV**

4.1 Foktor –faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan adalah Tupoksi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una dan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah 23

4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan 24-25

4.3 Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2023 26

BAB V PENUTUP ..... **V**

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja..... 27

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan..... 28

5.3. Rencana Tindak Lanjut..... 28

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,Tuhan yang Maha Esa, karena atas Izinnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 telah selesai disusun.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana kerja (Renja) setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan penyusunan RAPBD maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una perlu menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RKT-OPD) Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.

Usulan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024, disusun dengan mempertimbangkan sasaran strategis PD dan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD tahun 2024.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una untuk masa yang akan datang, masukan dan saran konstruktif sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di masa berikutnya.

Ampana, 23 Mei 2023
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

MUHAMAD ARSYAD, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda,/IV.c
NIP.19711018 200212 1 004

PENDAHULUAN

Bab 1

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, antara lain mengamanatkan untuk setiap Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota wajib melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra SKPD).

Penyusunan Renja SKPD Kabupaten Tojo Una-Una diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten Tojo Una-Una untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan paradigma penyusunan Renja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

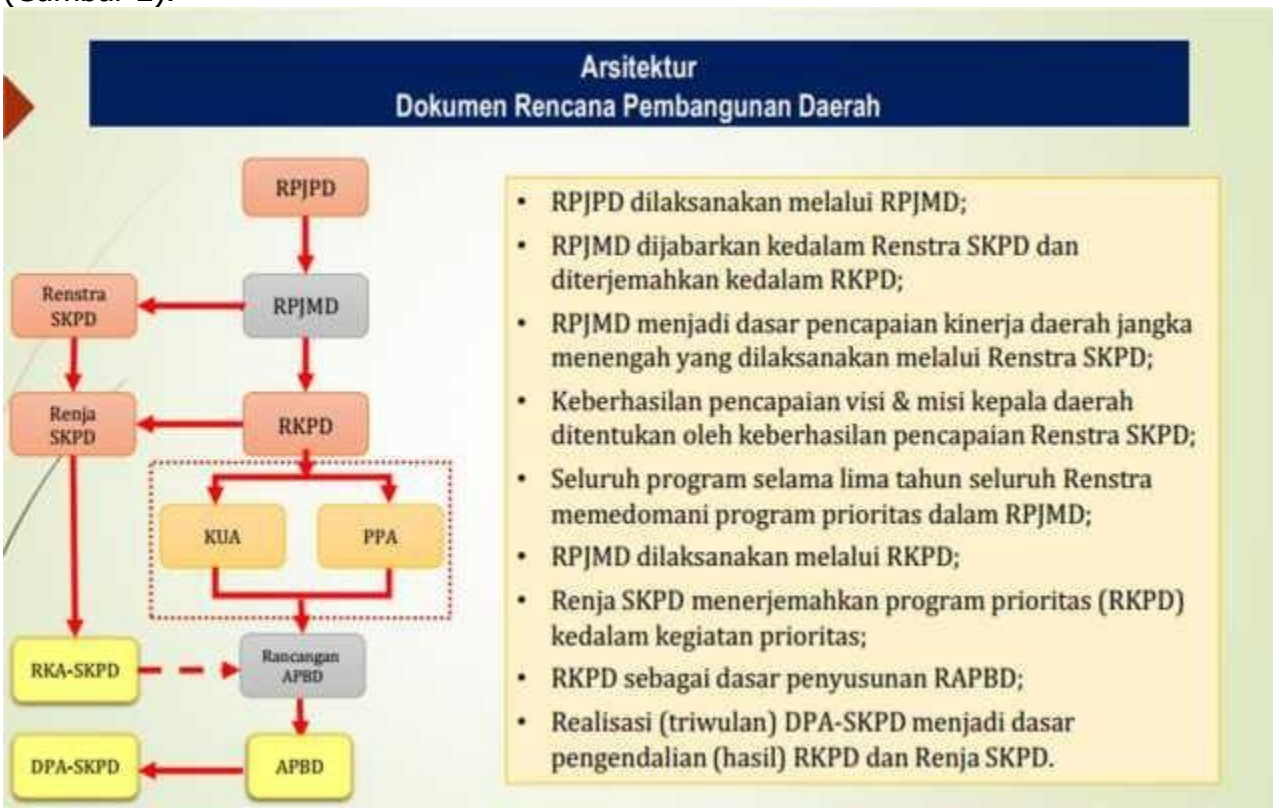
Adapun penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Kelima pendekatan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

(Gambar 1).



Berdasarkan Bagan Alur tersebut penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005 – 2025 (Tahun Ketiga 2017-2021). Selain itu Proses penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una merupakan dokumen yang tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni diawali dengan mereview Rensta, Reviu SAKIP OPD, Penyusunan Rancangan Renja dan Penetapan Renja. Ketiga tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk menghasilkan dokumen penganggaran yaitu RKA/DPA dan dituangkan dalam dokumen APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun berikutnya.

(Gambar 2).



(Gambar 3).



1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara RI nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan dan menjadi acuan bagi konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun, tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya acuan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024;
2. Sebagai arahan bagi aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat diuraian dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Maksud dan Tujuan;
1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Lalu.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una;
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una;
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024;
3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.

Bab IV Rencana Kerja (RENJA) dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab. V Penutup

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja;
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan;
5.3. Rencana Tindak Lanjut.

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN LALU



2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu dalam proses penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan melakukan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) tahun sebelumnya dan review capaian Rencana Strategis (RENSTRA) yang ditujukan untuk mengidentifikasi capaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam pencapaian target kinerja yang bersifat outcome dan output. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Lalu Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilihat sebagai berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Tojo Una-Una

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PD DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROG DAN KELUARAN KEG s/d TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2023)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	**Urusan**														
3. 26.	**Urusan Bidang Pariwisata**														
3. 26. 01.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Sakip													
3. 26. 01. 06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelenggaraan administrasi umum yang dilaksanakan										100%			
3. 26. 01. 06. 04.	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah alat tulis kantor dan makan minum yang dilaksanakan	5.000	Item	900	Item	1.000	Item	990	Item	19,80	1.000	Item	2.890	57,80
09.	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Dalam/Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Dalam/Luar Daerah	600	Kali	120	Kali	120	Kali	120	Kali	20,00	120	Kali	360	60,00
07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Penunjang Barang Milik Daerah yang dibutuhkan										100%			
07. 06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20	Unit	6	Unit	4	Unit	4	Unit	20,00	4	Unit	14	70,00
08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Jasa Penunjang Perkantoran yang Dilaksanakan										100%			
08. 01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln	20,00	12	Bln	36	60,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapinya Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln	20,00	12	Bln	36	60,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya Jasa Administrasi Keuangan	60	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln	20,00	12	Bln	36	60,00
09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara										100%			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bnagunan Lainnya	Terpeliharanya berkala peralatan gedung kantor	5	Paket	1	Paket	1 paket	Paket	1	Paket	20,00	1	Paket	3	60,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya berkala gedung kantor	5	Paket	1	Paket	1	Paket	Rp 1	Paket	20,00	1	Paket	3	60,00
09. 06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor serta Kendaraan Dinas/Operasional secara berkala	40	Unit	8	Unit	8	Unit	8	Unit	100,00	8	Unit	24	60,00
2.	**Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan**														
2. 22.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**														

2.	22.	02.				**Program Pengembangan Kebudayaan**	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan									100%				
2.	22.	02.	2	2		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah**	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan													
			2	02.	03.	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Tercapainya prestasi dan kontribusi dalam pemajuan kebudadayaan	20	Keg	4	Keg	4	Keg	4	Keg	20,00	4	Keg	12	60,00
2.	22.	03.				**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	Persentase Peningkatan SDM Kesenian Tradisonal													
2.	22.	03.	2.	01.		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah**	Tercapainya Pemusik Tradisonal yang Handal									100%				
		03.	2.	01.	01.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal	Terlaksananya Pembinaan tradisional di 6 kec	60	Tampilan Budaya	12	Tampilan Budaya	12	Tampilan Budaya	12	Tampilan Budaya	20,00	12	Tampilan Budaya	36	60,00
2.	22.	05.				**Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan									100%				
2.	22.	05.	2.	02.		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Teridentifikasinya cagar budaya kabupaten Tojo una-una	12	Cagar Budaya	1	Cagar Budaya	1	Cagar Budaya	Rp 1	Cagar Budaya	8,33	1	Cagar Budaya	3	25,00
3.	26.	02.				**Program Peningkatan Daya Tarik Detinasi Pariwisata**	Jumlah ODTW Yang didestinasi									100%				
3.	26.	02.	2.	3		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten	Terlaksananya perencanan destinasi pariwisata	100	ODTW	20	ODTW	20	ODTW	20	ODTW	20,00	20	ODTW	60	60,00
		02.	2.	3	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana Destinasi Pariwisata	25	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	20,00	5	Paket	15	60,00
3.	26.	03.				**Program Pemasaran Pariwisata**	Meningkatnya Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD									100%				
		03.	2.	01.		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata**	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Meningkatnya Kontribusi pada Sektor PAD													
				01.	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata	Terpenuhinya kegiatan promosi pariwisata dan event	30	Keg	6	Keg	6	Keg	Rp 6	Keg	20,00	7	Keg	19	63,33
3.	26.	05.				**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	persentase Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Kopetensi									100%				
		05.	2.	01.		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kraetif Tingkat Dasar	Meningkatnya jumlah SDM Pelaku pariwisata	200	Orang	40	Orang	40	Orang	40	Orang	20,00	40	Orang	120	60,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kab. Tojo Una-Una.

Perencanaan akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu capaian program kegiatan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan program hendaknya diperhatikan indikator kinerja sebagai acuan pelaksanaan program dalam pencapaian perencanaan yang dimaksud.

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja.

Hal-hal yang direncanakan dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan menjadi kinerja yang akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah *entitas*. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una.

2.3.1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia khususnya disekitar objek-objek wisata saat ini masih perlu ditingkatkan, untuk dapat mengurangi beberapa permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, antara lain sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran pada masyarakat yang ada disekitar objek wisata sehingga keberadaan objek wisata tersebut tidak terawat dengan baik dan hanya menunggu penanganan dari pemerintah atau dinas terkait.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan objek wisata sehingga tidak begitu memanfaatkan keberadaan objek wisata dalam cakupan ekonomi kreatif.
3. Belum terciptanya multiple efek dari keberadaan objek wisata terhadap kesejahteraan masyarakat dan belum sepenuhnya terlaksana Atraksi, Amenitas dan Daya Tarik Wisata pada objek wisata.

2.3.2. Permasalahan Dalam Lingkup SKPD

Berdasarkan fungsi pelayanan SKPD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una saat ini dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Arah kebijakan penganggaran dalam skala prioritas urusan pariwisata masih dalam tahap penyesuaian dengan konsep SAKIP;
2. Kesamaan dan ruang lingkup destinasi objek wisata dengan daerah lain membutuhkan penanganan pada konsep pengembangan pariwisata yang akurat agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata;
3. Status kawasan objek wisata membutuhkan membutuhkan penetapan dari pemerintah;
4. Kualitas produk kepariwisataan yang belum begitu maksimal dan masih memerlukan banyak pembenahan;
5. Masih kurangnya pengembangan kesenian daerah dan Promosi kepariwisataan dalam mewujudkan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya pada lingkup kepariwisataan;
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana publik dan pengunjung, serta belum adanya management pengelolaan objek wisata;
7. Belum intensnya koordinasi antar stakeholders dan lembaga pemerintah dalam urusan kepariwisataan daerah;
8. Belum tercapainya secara maksimal promosi pariwisata daerah baik event, exibhisi, metting dan pameran;
9. Belum adanya kesamaan Visi tentang pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Tojo Una-Una;
10. Belum optimalnya dukungan pemerintah pada objek wisata yang masih terkendala dalam status kepemilikan tanah warga sehingga kesulitan dalam pengembangan objek wisata tersebut;
11. Belum tercapainya secara maksimal promosi dan pemasaran pariwisata baik didalam negeri maupun di luar negeri;
12. Perlu manajemen pengelolaan objek wisata guna mencapai target pendapatan asli daerah (PAD).

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan fungsi pelayanan SKPD terhadap Visi dan Misi kepala daerah Kabupaten Tojo Una-Una 2021-2026 yaitu :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN TOJO UNA-UNA TANGGUH, MAJU, DAN SEJAHTERA (TAMARA)"

yang di jabarkan pada Misi ke-III (Tiga) yaitu :

"*Touna Sejahtera Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan-Kelautan dan Pariwisata yang Berkelanjutan*" Sejak tahun 2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai upaya melaksanakan Misi Kabupaten Tojo Una-Una. Kepala Daerah sesuai tugas pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una sebagai ukuran kinerja sebagai berikut :

1. Kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi Industri Pariwisata;
2. Kegiatan Bidang Pengembangan SDM Dan Ekraf;
3. Kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata;
4. Kegiatan Bidang Kebudayaan.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah dapat dipetakan dengan menelaah Kelebihan, Kekurangan, Peluang dan Hambatan yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan Visi dan Misi serta Strategi Instansi Pemerintah.

1. Kelebihan *(Strength)*
   (a) Potensi Objek Wisata yang tersedia;
   (b) Karakteristik daerah;
   (c) Peranan Satuan Kerja dalam memfasilitasi kepariwisataan;
   (d) Peranan Kelompok Sadar Wisata.

2. Kekurangan (Weakneses)
   (a) Alokasi Anggaran yang terbatas;
   (b) Sember Daya Manusia;
   (c) Respon dari masyarakat disekitar objek wisata;
   (d) Kurangnya Tim Pengelola objek wisata;
   (e) Sarana penunjang pada objek wisata;
   (f) Legalitas lahan dan lokasi objek wisata;
   (g) Pembinaan pada usaha pariwisata;
   (h) Perlunya SOP sebagai penertiban Rekomendasi usaha;
   (i) Perlunya PERDA untuk usaha pariwisata;
   (j) Informasi kepariwisataan Kab. Tojo unauna yang belum maksimal;
   (k) Pengaruh Nomenklatur.

3. Peluang *(Opportunities)*

(a) Potensi keanekaragaman dan kekayaan pariwisata yang dimiliki cukup beragam;
(b) Posisi strategis kewilayahan yang berada di zona industry dan persinggahan;
(c) Terbukanya peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan pariwisata;
(d) Perkembangan trend pasar wisatawan dan tanggapan positif masyarakat;
(e) Peningkatan investasi pariwisata melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
(f) Bonus demografi (kondisi saat jumlah penduduk usia non produktif lebih sedikit daripada jumlah penduduk produktif). Pada kondisi itu, ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk produktif berada pada titik rendah sehingga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian suatu daerah;
(g) Keseriusan dan minat Pemda dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai sektor penyumbang devisa daerah.

4. Hambatan *(Threats)*

(a) Persaingan kepariwisataan daerah lain yang sejenis;
(b) Investasi belum berorientasi pada pemberdayaan sumber daya local dan penciptaan sumber devisa unggulan;
(c) Masuknya pengaruh negative pariwisata asing yang dapat mengikis budaya dan kearifan lokal;
(d) Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku pariwisata, ekonomi kreatif serta dunia usaha dalam usaha pariwisata;
(e) Isu keamanan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan bencana alam;
(f) Kesadaran masyarakat belum dalam taraf action dan menunggu peran serta pemerintah;
(g) Penganggaran belum memadai sehingga diperlukan sinergitas eksekutif dan legislatif.

5. Strategi *(Stategic*)

1. Penetapan Zona Wisata sebagai upaya meningkatkan daya saing kepariwisataan, payung hukum dan legitimasi program;
2. Membangun sarana dan prasaran objek wisata unggulan Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Menumbuh kembangkan sektor industri kreatif kepariwisataan;
4. Peningkatan dan pengembangan sumber daya kepariwisataan daerah;

5. Menumbuh kembangkan kreatifitas seni dan kearifan lokal di Kabupaten Tojo Una-Una;
6. Meningkatkan Promosi dan pertunjukan seni budaya daerah dalam rangka memperkenalkan dan melestarikan seni budaya daerah.

2.3.5 Formulasi Isu-isu Strategis

Pembangunan pariwisata skala Kabupaten tidak terlepas dari kebijakan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pariwisata. Demikian pula halnya dengan kebijakan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan harus memperhatikan pula sasaran prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai bentuk sinergitas antara Pemerintah Pusat – Pemerintah Provinsi – Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat otonomi daerah yang dilaksanakan berada pada pemerintah kabupaten/kota. Keterkaitan antara sasaran jangka menengah Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Visi, Misi, Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2026, terdapat beberapa hal yang akan menjadi konsentrasi dan prioritas khususnya yang berkaitan dengan urusan Kepariwisataan, yakni :

1. Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas terhadap keragaman seni budaya daerah;
2. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing;
3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan nusantara;
4. Mendukung peningkatan kontribusi pariwisata bagi perekonomian terhadap PAD, lapangan kerja, dan investasi;
5. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur/industri dan masyarakat bidang pariwisata dan Kebudayaan serta ekonomi kreatif;
6. Meningkatnya kapasitas untuk penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata dan Kebudayaan serta ekonomi kreatif;
7. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata;
8. Meningkatnya citra kepariwisataan daerah;
9. Terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata;
10. Terciptanya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien;
11. Meningkatnya unit usaha sektor ekonomi kreatif;
12. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kreatif;
13. Terciptanya ruang publik bagi masyarakat;
14. Meningkatnya kualitas konten dan jejaring pelaku di sektor ekonomi kreatif.

Dari hasil analisis terhadap isu-isu dalam pembangunan pariwisata dan Kebudayaan selanjutnya dikelompokan ke dalam 6 (enam) isu strategis sebagai berikut :

1. **BELUM OPTIMALNYA PROMOSI PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DAERAH**

   Pengembangan jejaring pemasaran pariwisata dan Kebudayaan dalam maupun luar negeri, pengembangan Website dan sarana promosi lainnya.

2. **BELUM OPTIMALNYA PENATAAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI (OBJEK WISATA)**

   Pengembangan sumber daya pariwisata menjadi destinasi wisata yang berdaya saing, memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan investor untuk pengelolaan oyek wisata.

3. **TINGKAT SADAR WISATA MASYARAKAT MASIH RENDAH**

   Perlindungan terhadap sumber daya pariwisata alam dan budaya; kesadaran masyarakat akan industri pariwisata, penguatan kelembagaan masyarakat yang berdaya dan berkelanjutan (sustainable).

4. **BELUM OPTIMALNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PARIWISATA**

   Peningkatan Infrastuktur obyek daya tarik wisata, peningkatan dan pengadaan sarana dan prasarana kepariwisataan dan pengembangan dan pelestarian seni dan budaya asli daerah.

5. **BELUM OPTIMALNYA KETERSEDIAAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA**

   Peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan, dan peningkatan mutu kepariwisataan daerah dengan inovasi dan kreasi seni dan budaya.

6. **BELUM OPTIMALNYA DUKUNGAN PEMERINTAH, MASYARAKAT, ORGANISASI PROFESI, PELAKU PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DAN EKONOMI KREATIF SERTA DUNIA USAHA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF DAERAH**

   Pengembangan kelembagaan masyarakat sebagai pengelola pariwisata dan Usaha kreatif, peningkatan pengelolaan dan manajemen usaha pariwisata yang dikelola pemerintah,masyarakat dan investor Khususnya penetapan Zona Wisata dan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang telah ditetapkan sebagai payung hukum pembangunan Kepariwisataan dan Kebudayaan di Kabupaten Tojo Una-Una.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Kepala Daerah.

Sehubungan dengan itu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan perlu dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022. Dan setelah melalui koordinasi dan konsultasi hal tersebut baru dapat disesuaikan dengan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2022 yang telah ditetapkan. Sedangkan mengenai besaran anggaran juga telah disesuai dengan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023, hal ini disesuaikan atas kemampuan keuangan daerah yang dalam hai ini APBD Pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una untuk Rancangan

Awal Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2023 membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan daiam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019 s.d. 2024 Dari Rumusan dan Program dimaksud sebagaimana disajikan padaTabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagaimana terlampir pada tabel berikut :

Proses perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari bentuk pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi ritme yang strategis dalam keberhasilan seluruh program pelaksanaan kegiatan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan daerah.

Dalam kaitan itu, terdapat beberapa permasalahan yang sedang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mendorong pertumbuhan pariwisata yang berasal dari internal faktor yaitu;

1. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan kepariwisataan meliputi masalah pada sarana dan prasarana transportasi darat dan laut, telekomunikasi, ketenaga listrikan, sumber daya air, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan serta fasilitas infrastruktur penunjang pada objek-objek wisata tertentu;
2. Pembangunan Manusia, yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepariwisataan sehingga membentuk SDM yang berkompeten dan dapat berinovasi melaksanakan perencanaan dan pengembangan yang terarah pada sektor kepariwisataan;
3. Pembangunan Sektor Unggulan, yang berorientasi pada upaya dukungan dibeberapa objek wisata unggulan yang memberikan peluang pada masyarakat sekitar untuk mengembangkan perekonomian;
4. Kurangnya pembenahan yang konsisten terhadap sektor kepariwisataan sehingga progres pengembangan kepariwisataan hanya berskala pada bentuk alternatif;
5. Perlunya tata kelola dan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja dan profesionalisme aparatur dalam penataan kelembagaan pemerintah daerah yang bertujuan memberikan terapan personal aparatur sesuai kompetensi.

Pengembangan pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Tojo Una-Una tergantung pula pada sejauh mana partisipasi masyarakat setempat bersama aparatur pemerintahan daerah dalam hal tersebut, sehingga masyarakat diperankan untuk berpartisipasi dalam inovasi rencana pengembangan dalam lingkup kepariwisataan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan hal ini dapat mewujudkan kearifan lokal serta bentuk pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dan memanfaatkan potensi pariwisata dan budaya sebagai sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Pengembangan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak lepas dari arah visi dan misi pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam menerapkan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui program kegiatan serta perencanaan yang sangat berpeluang meningkatkan sumber daya diberbagai aspek maka pelaksanaan program kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una diharapkan bisa tersealisasi agar mempunyai bobot yang bisa menyentuh langsung pada masyarakat.

Sehubungan dengan itu, untuk penyempurnaan proses perencanaan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 terdapat beberapa inovasi perencanaan kedepan yaitu :

(a) Optimalisasi pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,
(b) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una sebagai lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel,
(c) Kemampuan dalam menghadapi multi dimensi kedepan dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan,
(d) Pemantapan komunikasi publik dan Stakeholders tentang produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian stratejik pembangunan,
(e) Pemantapan peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan selaku Motivator, Koordinator, Administrator serta Agen Perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Infrastruktur Pariwisata	Tombiano, Kab. Tojo Una-Una	Kurangnya Minat Wisatawan Karena Sarana dan Prasarana Belum Memenuhi Syarat	1	Rekomendasi : Merupakan usulan yang sangat Prioritas, mengingat Infrastruktur dikawasan Wisata Desa Tombiano masih sangat kurang, Sehingga berdampak pada kurangnya minat pengunjung Koefisien : 00 Anggaran : 0
2	Pembangunan Infrastruktur Pariwisata	Desa Tampanombo, Kab.Tojo Una-Una	-	1	Rekomendasi : Prioritas 24 Koefisien : 00 Anggaran : 0
3	Pembangunan Sanggar Seni Budaya	Desa Dolong A,Kab.Tojo Una-Una	Belum ada Sanggar Seni didesa sehingga diperlukan untuk meningkat kreatifitas warga serta berfungsi ganda sebagai tempat/balai pertemuan umum	1	Rekomendasi : Diteruskan dengan pertimbangan ketersediaan lahan untuk lokasi pembangunan dan akan disurvey. Koefisien : 00 Anggaran : 0

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN



3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Tabel 3.1

PRIORITAS DAN SASARAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NO	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah yang Berkualitas yang Bertumpu Pada Trisula Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP
				2. Mewujudkan Kabupaten Tojo Una-Una sebagai prioritas Destinasi wisata sulawesi tengah	1. Pengembangan SDM Kepariwisataan 2. Meningkatnya KualitaS dan Kuantitas Destinasi Wisata 3. Promosi Wisata Berbasis Pemanfaatan Teknologi dan Kerjasama
				3.Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam pelestarian kebudayaan daerah	1. Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dan akan dicapai atau SASARAN, adalah sebagai berikut :

"*Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Tojo Una-Una*"

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024
1	Mewujudkan Aparatur dan Sistem Pemerintahan Daerah yang Profesional untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Public Berbasis Smart Govermance	Nilai Sakip Daerah	A
2	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah Bertumpuh Pada Peningkatan kualitas Pariwisata,Ekonomi Kreatif Dan Kebudayaan	1. Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	5 Kali
		2. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	34,61 %
		3. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi & inventarisasi	7 Buah
		4. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	11- 12%
		5. Jumlah Cagar Budaya Yang diKelola Secara Terpadu	2 Buah
		6. Persentase Capaian Kunjungan Wisatawan	90 – 100 %
		7. Jumlah Kunjungan Wisatawan	13000-15000 Org

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024
1	Meningkatnya Kualitas Dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Daerah	A
2	Mewujudkan Kabupaten Tojo Una-Una sebagai prioritas destinasi wisata sulawesi tengah	Pergub/Perda	ADA
		Kontribusi Kunjungan Wisatawan Mancanegara Terhadap Propinsi Sulawesi Tengah	45
		Perentase Desa Wisata Rintisan berbasis potensi unggulan	4,47%
3	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam pelestarian kebudayaan daerah	Persentase Seni Budaya yang di lestarikan	85%

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
1	Layanan Urusan Wajib Non Dasar	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2 Kali
		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	34,61%
		Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	7 Buah
		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	2 Buah
2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	11-12 %
3	Layanan Urusan Pilihan	Persentase Capaian Kunjungan Wisatawan	90-100%
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	13000-15000 Org

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



4.1 Foktor –faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan adalah Tupoksi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una dan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Kebudayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Penyusunan perencanaan bidang Pariwisata dan Kebudayaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Pelaksanaan 53 Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 kegiatan penatausahaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sejalan dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2021 -2026.

"TERWUJUDNYA KABUPATEN TOJO UNA-UNA TANGGUH, MAJU, DAN SEJAHTERA (TAMARA)"

4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :

Tabel 4.2

Sasaran dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan /Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Kualitas Dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ➢ Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub : Penyediaan Bahan Logistik ➢ Kegiatan :Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub : Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya ➢ Kegiatan : Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintah Daerah ➢ Sub : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ➢ Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ➢ Sub : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	Mewujudkan Kabupaten Tojo Una-Una sebagai prioritas Destinasi wisata sulawesi tengah	2. Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata ➢ Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota ➢ Sub : Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota ➢ Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota ➢ Sub : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota ➢ Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota ➢ Sub : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3. Program Pemasaran Pariwisata ➢ Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota ➢ Sub : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 4. Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

		➢ Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf ➢ Sub : - Pengembangan Kopetensi SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat,Guru dan Pelajar (Maasiswa/Siswa)
3	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam pelestarian kebudayaan daerah	5. Program : Pengembangan Kebudayaan ➢ Kegiatan : Pelestarian Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ➢ Sub : Pemberian Penghargaan kepada Pihak Yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 6. Program : Pengembangan Kesenian Tradisional ➢ Kegiatan : Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ➢ Sub : Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesenian Tradisional 7. Program : Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya ➢ Kegiatan : Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota ➢ Sub : Pengembangan Cagar Budaya

4.3 Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum Perencanaan,rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program

pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

PENUTUP



Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan Perencanaan Pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (Stakeholder) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merebes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

5.1 CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Dalam rangka meningkatkan kualitas suatu perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una harus ada
keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam suatu program agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD tetap memperhatikan / mempedomani dokumen-dokumen perencanaaan yang diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Propinsi, RPJMD Propinsi, RKPD Propinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Tojo Una-Una dan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una). Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Perlunya peningkatan kapasitas SDM pada perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penganggarannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2024 mendatang.

Ampana, 23 Mei 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

MUHAMAD ARSYAD, S.E.,M.Si
Pembina Utama Muda,/IV.c
NIP.19711018 200212 1 004

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Tojo Una-Una

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una

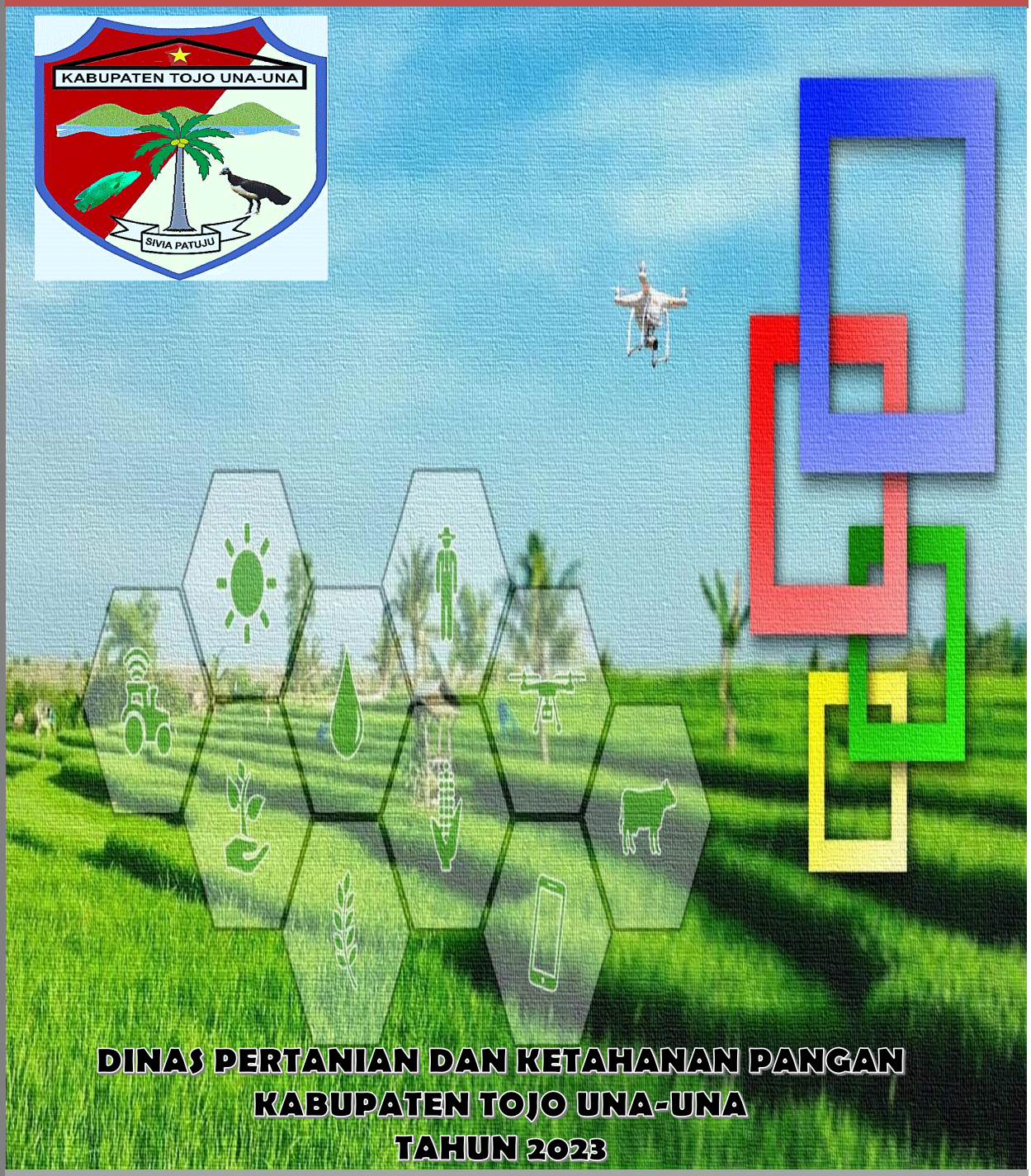
KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PD DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROG DAN KELUARAN KEG s/d TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2023)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN	
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
3						**Urusan**												
3.	26.					**Urusan Bidang Pariwisata**												
3.	26.	01.				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Sakip											
3.	26.	01.	06.			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelenggaraan administrasi umum yang dilaksanakan								100%			
3.	26.	01.	06.	04.		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah alat tulis kantor dan makan minum yang dilaksanakan	5.000	Item	900	Item	1.000	Item	990 Item	19,80	1.000	Item	2.890	57,80
				09.		Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Dalam/Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Dalam/Luar Daerah	600	Kali	120	Kali	120	Kali	120 Kali	20,00	120	Kali	360	60,00
			07.			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Penunjang Barang Milik Daerah yang dibutuhkan								100%			
			07.	06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20	Unit	6	Unit	4	Unit	4 Unit	20,00	4	Unit	14	70,00
			08.			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Jasa Penunjang Perkantoran yang Dilaksanakan								100%			
				08.	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	Bln	12	Bln	12	Bln	12 Bln	20,00	12	Bln	36	60,00
					02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapinya Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bln	12	Bln	12	Bln	12 Bln	20,00	12	Bln	36	60,00
					4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya Jasa Administrasi Keuangan	60	Bln	12	Bln	12	Bln	12 Bln	20,00	12	Bln	36	60,00
			09.			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara								100%			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bnagunan Lainnya	Terpeliharanya berkala peralatan gedung kantor	5	Paket	1	Paket	1 paket	Paket	1 Paket	20,00	1	Paket	3	60,00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya berkala gedung kantor	5	Paket	1	Paket	1	Paket	Rp 1 Paket	20,00	1	Paket	3	60,00
			09.	06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor serta Kendaraan Dinas/Operasional secara berkala	40	Unit	8	Unit	8	Unit	8 Unit	100,00	8	Unit	24	60,00
2.						**Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**												
2.	22.					**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**												

8

2.	22.	02.				**Program Pengembangan Kebudayaan**	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan									100%			
2.	22.	02.	2	2		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan												
			2	02.	03.	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Tercapainya prestasi dan kontribusi dalam pemajuan kebudadayaan	20	Keg	4	Keg	4	Keg	Rp 4	Keg	20,00	4	Keg	12	60,00
2.	22.	03.				**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	Persentase Peningkatan SDM Kesenian Tradisonal												
2.	22.	03.	2.	01.		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabuaten/Kota**	Tercapainya Pemusik Tradisonal yang Handal									100%			
		03.	2.	01.	01.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal	Terlaksananya Pembinaan tradisional di 6 kec	60	Tampilan Budaya	12	Tampilan Budaya	12	Tampilan Budaya	12	Tampilan Budaya	20,00	12	Tampilan Budaya	36	60,00
2.	22.	05.				**Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan									100%			
2.	22.	05.	2.	02.		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Teridentifikasinya cagar budaya kabupaten Tojo una-una	12	Cagar Budaya	1	Cagar Budaya	1	Cagar Budaya	Rp 1	Cagar Budaya	8,33	1	Cagar Budaya	3	25,00
3.	26.	02.				**Program Peningkatan Daya Tarik Detinasi Pariwisata**	Jumlah ODTW Yang didestinasi									100%			
3.	26.	02.	2.	3		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya perencanan destinasi pariwisata	100	ODTW	20	ODTW	20	ODTW	20	ODTW	20,00	20	ODTW	60	60,00
		02.	2.	3	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana Destinasi Pariwisata	25	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	20,00	5	Paket	15	60,00
3.	26.	03.				**Program Pemasaran Pariwisata**	Meningkatnya Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD									100%			
		03.	2.	01.		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Meningkatnya Kontribusi pada Sektor PAD												
				01.	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kegiatan promosi pariwisata dan event	30	Keg	6	Keg	6	Keg	Rp 6	Keg	20,00	7	Keg	19	63,33
3.	26.	05.				**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	persentase Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Kopetensi									100%			
		05.	2.	01.		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kraetif Tingkat Dasar	Meningkatnya jumlah SDM Pelaku pariwisata	200	Orang	40	Orang	40	Orang	40	Orang	20,00	40	Orang	120	60,00
		05.	2.	01.	01.	Pengembangan Kopetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingktat Dasar	Adanya Kelompok Kepariwisataan yang Bergerak dibidang Pengembangan Kuliner dan Souvenir (Pelatihan Kopi)	10	Klmpok	2	Klmpok	2	Klmpok	Rp 2	Klmpok	20,00	2	Klmpok	6	60,00
		05.	2.	01.	3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwistaan bagi Masyarakat,Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Adanya SDM Kepariwisataan yang Handal dan Profesional (Pelatihan Guide)	200	Orang	40	Orang	40	Orang	Rp 40	Orang	20,00	40	Orang	120	60,00

RENCANA KERJA
(RENJA)

TAHUN 2024



DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Alamat : Jalan Bumi Bhakti No. 7 Kode Pos : 9468, Website *:https://dpkp-tojounauna.id*

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR : 900.1 / 155.b /DPKP/2023

TENTANG

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
(RENJA OPD-DPKP)
KABUPATEN TOJO UNA - UNA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menyusun Rencana Kerja OPD tahun 2024 ;

b. bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD memuat arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanankan pembangunan daerah yang berkesinambungan;

c. bahwa Rencana Kerja (Renja) OPD tahun 2024 memuat program / Kegiatan pembangunan OPD yang akan disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) *(RENJA)* tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tojo Una-una di Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang (RENJA) Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peratuan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil pemuktahiran dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una 2005–2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tojo Una-Una 2011–2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024, yang selanjutnya disebut (Renja OPD-DPKP) Tahun 2024 adalah Dokumen Program / kegiatan periode 1 (satu) tahun.

KEDUA : Renja OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

Bab 1. PENDAHULUAN.
Bab 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA.
Bab 3. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.
Bab 4. PENUTUP.

KETIGA : Renja OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Nomor Tahun 2017 yang memuat Program / kegiatan, Indikator kinerja, lokasi kegiatan, Target pencapaian kinerja dan pagu indikatif.

KEEMPAT : Putusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampana
Pada Tanggal : 02 Maret 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



MAHDI, SP.,M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19671109 198903 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Alamat : Jalan Bumi Bhakti No. 7 Kode Pos : 9468, Website :*https://dpkp-tojounauna.id*

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAANAN PANGAN
KABUPATEN TOJO UNA – UNA
NOMOR : 900.1 / 155.a /DPKP /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 125 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta meningkatkan efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk tim penyusun Rencana Kerja (RENJA) agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tojo Una-una di Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peratuan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan

rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil pemuktahiran dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una 2005–2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tojo Una-Una 2011–2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Menetapkan :

M E M U T U S K A N

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Terhadap Tim sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;

KELIMA :

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023;

Bilamana ada ketentuan tambahan, akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Ampana
pada tanggal : 02 Maret 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

MAHDI, SP.,M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19671109 198903 1 005

LAMPIRAN 1 :

Nomor : 900.1 / 155.a /DPKP/2023
Tanggal : 02 Maret 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una

SUSUNAN PERSONALIA
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2023

Pengarah : KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Ketua : SEKRETARIS DINAS

Kelompok Kerja :

1. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Kepala Bidang Perkebunan;
3. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan;
5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Kesekretariatan : 1. Kepala Subbagian Penyusun Program;
2. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset;
3. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum;
4. Penyusun Bahan, Rencana dan Program Kerja;
5. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

MAHDI, SP.,M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19671109 198903 1 005

Lampiran 2

Nomor : 900.1 / 155.a /DPKP/2023
Tanggal : 02 Maret 2023
Tentang : Rincian Tugas dan Fungsi Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

1. Tugas dan Fungsi Pengarah, yaitu :
   a. Memberikan arahan, masukkan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, baik dalam hal persiapan, mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024;
   b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim kelompok kerja Rencana Kerja (RENJA) 2024;

2. Tugas dan Fungsi Ketua, yaitu :
   a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyusun Rencana Kerja (RENJA) 2024;
   b. Membantu Pengarah dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024'
   c. Mengoreksi dan melaporkan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una.

3. Tugas dan Fungsi Kesekretariatan, yaitu :
   a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Kerja (RENJA) 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una;

b. Membantu ketua dalam memberikan arahan dan petunjuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Tahun 2024 Kepada Seluruh Tim yang terlibat dalam kegiatan;
c. Mengoreksi dan melakukan pembetulan terhadap hasil koreksi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024.

4. Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja, Yaitu :
   a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Sebelumnya (tahun lalu);
   b. Melakukan analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una;
   c. Melakukan Telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, sesuai dengan bidang masing-masing;
   d. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD sesuai dengan bidang masing-masing;
   e. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing;
   f. Merumuskan kegiatan prioritas Tahun 2024 sesuai dengan bidang masing-masing.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



MAHDI, SP.,M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19671109 198903 1 005

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini belum sempurna, olehnya saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan Rencana Kerja di masa yang akan datang.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Akhirnya, kami berharap semoga Dokumen Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi pembangunan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tojo Una-Una.

Ampana, 02 Maret 2023
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Tojo Una – Una



MAHDI, SP.,M.Si
Pembina Tkt.
NIP. 19671109 198903 1 005

DAFTAR ISI

SK KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. TOJO UNA-UNA
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 dan 2022 Serta Capaian Renstra OPD 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan OPD 23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 23
2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 25

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 29
3.3. Program dan Kegiatan 30

IV. PENUTUP 32

LAMPIRAN

Lampiran. III Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 dan Prakiraan MajuTahun 2025 Kabupaten Tojo Una-Una

DAFTAR TABEL

Tabel. 01	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2022 Kabupaten Tojo Una- Una ……..	6
Tabel. 02	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una ……	19
Tabel. 03	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tojo Una-Una……	24
Tabel. 04	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 ……	26

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang–Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai unit kerja yang memiliki tugas pokok merumuskan kebijakan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, maka disusunlah Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan OPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tojo Una-una di Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

RENJA PERTANIAN

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una 2005–2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tojo Una-Una 2011–2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016

RENJA PERTANIAN

tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 Kabupaten Tojo Una – Una adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit – unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

1.3.2 Tujuan

Secara umum penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD. Adapun tujuan penyusunan Renja secara khusus adalah sebagai berikut :

1) Tersusunnya Tujuan, sasaran Peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian Program dan Kegiatan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2) Terwujudnya keselarasan Rencana Strategis DinasPertanian dan Ketahanan Pangan dengan perencanaan Tahunan;
3) Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan dokumen perencanaan tahunan Daerah (RKPD);
4) Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 . SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja DinasPertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

RENJA PERTANIAN

BAB. I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat : 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah; 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; 3. isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah: 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKT DAERAH

Bab ini berisikan penjelasan mengenaai : a. faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan ; b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; c. Penjelasanan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/Kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel.

BAB. V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

RENJA PERTANIAN

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 11 urusan pemerintah, yang terdiri dari 2 (dua) urusan wajib dan 9 (sembilan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD.

Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap dokumen harus dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya. Adapun proses evaluasi yang dapat dilakukan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : (1). Kebijakan Perencanaan Program dan Kegiatan; (2). Pelaksanaan rencana program dan kegiatan; dan (3). Hasil rencana program dan kegiatan.

Rekapitulasi hasil Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (menurut lampiran VI Permendagri 54 Tahun 2010), diiuraikan pada lampiran tabel Berikut :

RENJA PERTANIAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2021 - 2026 Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun Lalu 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Perangkat Daerah s/d dengan tahun berjalan 2023 (tahun n-1)	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)
1					**PILIHAN**									
2	**09**	**0.1**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Presentase peningkatan penganekaragaman Ketahanan pangan masyarakat								
2	09	0.3	2.02		***Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota***	*Meningkatnya Jumlah cadangan pangan yang Tersedia*								
2	09	0.3	2.02	0.3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten	200 Ton	15 Ton	0 Ton	0 Ton	0	0 Ton	15 Ton	7,5

RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN

2	09	0.3	2.04		***Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi***	*Meningkatnya Angka Kecukupan Gizi di Masyarakat*								
2	09	0.3	2.04	0.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Pemanfaatan Pekarangan Masyarakat	60 KWT	12 KWT	12 KWT	11 KWT	91,66	0	23	38,33
3	**27**	**0.1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatkan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Kinerja Pemerintah Daerah**								
3	**27**	**01**	**2.01**		***Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***								
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	8 Dokumen	40

RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN

3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi serta tersusunya Dokumen Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	8 Dokumen	40
3	**27**	**01**	**2.03**		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Darah pada Perangkat Daerah***								
3	27	01	2.01	06	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	100
3	**27**	**01**	**2.05**		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Meningkatnya Sistem Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***								
3	27	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian	35 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	0 Dokumen	5 Dokumen	14,28

PERTANIAN

3	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	55 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	8 Dokumen	20 Dokumen	36,36
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	15 Orang	0 Orang	1 Orang	1 Orang	100	0 Orang	1 Orang	6.66
3	**27**	**01**	**2.06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Meningkatnya Sistem Administrasi Umum Perangkat Daerah***								
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	20
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	20
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	20
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	20

RANCANGAN

3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345 Laporan	25 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100	25 Laporan	80 Laporan	23,2
3	**27**	**01**	**2.08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***									
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Media	2 media	2 Media	2 Media	100	2 Media	6 Media	50
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35 Rekening	7 Rekening	7 Rekening	7 Rekening	100	7 Rekening	21 Rekening	60
3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	100	19 Unit	57 Unit	58
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	675 Orang	155 Orang	155 Orang	155 Orang	100	147 Orang	457 Orang	67
3	**27**	**01**	**2.09**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***								

RENCANA KERJA

3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terdianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	390 Unit	78 Unit	78 Unit	78 Unit	100	78 Unit	Unit	60
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Meningkatkan Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan**								
3	27	02	2.01		***Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian***	*Meningkatnya Sistem Bercocok Tanam Secara Modern*								
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Tercapainya penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat petani sesuai dengan e-RDKK	727 Unit	125 Unit	243 Unit	243 Unit	100	0 Unit	368 Unit	50
3	27	02	2.02		***Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota***	*Terlaksananya percepatan Peningkatan Mutu Genetik Ternak*								

PERTANIAN

3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya kualitas sumber daya genetik	72 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100	0 Dokumen	26 Dokumen	36
3	27	02	2.06		*Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain*	*Peningkatan Populasi Ternak dan Tersedianya HPT yang cukup secara Kualitas dan Kuantitas*								
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Bertambahnya Populasi Ternak dan peningkatan kesejahteraan peternak	4936 Ekor	1362 Ekor	1602 Ekor	1602 Ekor	100	0 Ekor	2964 Ekor	60
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DANPENGEMBANGAN PRASARANAPERTANIAN**	**1. Peningkatan Hasil Produksi Pertanian;2. Meningkatkan Penyediaan prasarana RPH, Sumber bibit ternak dan Rumpun/galur ternak serta padang pengembalaan umum**								

RENCANA PERTANIAN

3	27	03	2.01		***Pengembangan Prasarana Pertanian***	*1. Tersedianya Sarana Pendukung Para Petani Untuk mendukung hasil produksi petani 2.*								
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi PrasaranaPendukung Pertanian lainnya	Mengsingkronkan Kegiatan DalamDaerah Dan Luar Daerah DinasKabupaten, Dinas Propinsi danKementrian	61 Laporan	25 Laporan	20 Laporan	18 Laporan	90	18 Laporan	18 Laporan	100
3	27	03	2.02		***Pembangunan Prasarana Pertanian***	*Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pertanian, Perkebunan dan Peternakan*								
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terjaminnya ketersediaan daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	1 unit	1 Unit	100
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Meningkatkan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**								

INSTANSI PERTANIAN

3	27	04	2.01		*Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Jaminan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner*								
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terpeliharanya dan terjalinnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat	2 Laporan	2 Laporam	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	6 Laporan	60
3	27	04	2.03		*Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten*								
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Terjaminnya pelayanan jasa medik yang berkompetensi untuk Penanganan ternak milik masyarakat	1850 Laporan	400 Laporan	500 Laporan	500 Ekot	100	400 Laporan	1300 Lapora	70
3	27	04	2.05		*Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner*	*Terlaksananya Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner*								

ERTANIAN

3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya penerapan standar dan pedoman kesejahteraan hewan secara berkesinambungan dan terkoordinasi	1900 Laporan	600 Ekor	400 Ekor	400 Ekor	100	0 Laporan	1000 Laporan	53
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**									
3	27	05	2.01		*Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota*	*Meningkatkan Tindakan Cepat Tanggap Terhadap Bencana Sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan*								
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Sarana untuk Penanganan Pengendalian OPT Pangan (Hand Sprayers)	200 Ha	0 Orang	40 Ha	40 Ha	100	20 Ha	60 Ha	30
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Penanganan Dampak Perubahan Iklim Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	400 Ha	100 Ha	80 Ha	80 Ha	100	0 Ha	Ha	45

PERTANIAN

3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Peningkatan Pelayanan Perizinan dari usaha pertanian dan peternakan untuk Kepastian Usahanya**								
3	27	06	2.01		*Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Terbitnya Dokumen Izin Usaha Pertanian di Kabupaten*								
3	27	06	2.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Identifikasi, Pembinaan dan Petugas Pengawas Izin Usaha Pertanian	100 Dokumen	30 Dokumen	20 Dokumen	17 Dokumen	85	20 Dokumen	67 Dokumen	100
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Meningkatnya Kemampuan Penyuluh Dalam Pendampingan Terhadap Kelompok Tani**								
3	27	07	2.01		*Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*	*Terlaksananya penyusunan programa penyuluhan pertanian tingkat WKPP, Kecamatan dan Kabupaten*								

RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN

3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Penumbuhan kelompok tani, peningkatan kelas kelompok tani dan GAPOKTAN, tercapainya petani, kelompok tani, GAPOKTAN berpresetasi, Terlaksananya KOMISI PENYULUHAN, Terlaksananya Jambore Penyuluhan dan PENAS KTNA Tingkat Propinsi dan Nasional.	14 Unit	3 Unit	3 Unit	1 Unit	33	2 Unit	6 Unit	60
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan	120 Unit	5 Unit	2 Unit	1 Unit	50	12 Unit	120 Unit	15

RENJA PERTANIAN

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Keberhasilan kinerja OPD dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan.

Sesuai Tugas dan fungsinya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah menyelenggarakan pelayanan khususnya dalam Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan. Dengan tetap berkoordinasi pada dinas-dinas yang terkait dengan program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan guna membentuk suatu kerja sama yang harmonis menciptakan optimisme guna membangun daerah Kabupaten Tojo Una-Una ke depan.

Secara detail Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel. 02 berikut :

RENJA PERTANIAN

Tabel. 02

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Tojo Una-Una

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**SPM Ketahanan Pangan**											
A	Ketersediaan dan cadangan Pangan											
	a) Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita	90%		34 %				18%				
	b) Penguatan Cadangan Pangan	60%		28%				12%				
B	Ditribusi dan Akses Pangan											
	a) Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan dan Daerah	90%		34 %				18%				
	b) Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90%		34 %				18%				
C	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan											

RENJA PERTANIAN

	a) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90%		82,5%				80%				
	b) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%		80%				70%				
D	Penanganan Kerawanan Pangan											
	a) Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%		12%				12%				
2	**IKK Urusan Wajib (Ketahanan Pangan)**											
	49 Regulasi Ketahanan Pangan		Ada	1	0	0	0	0	0	0	0	
	50 Ketersediaan Pangan Utama (kg/1000 Penduduk)		60,9	57				39,4				
3	**IKK Urusan Pilhan(Pertanian)**											
	3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar			447,81	451,04	452,97	456,5	14,15	451,04	452,97	456,5	
	4 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2015											

RENJA PERTANIAN

1	Jumlah produksi tanaman padi (kw/ha)			7.902	8.366	8.886	9.320	8.353	8.366	8.886	9.320	
2	Jumlah Produksi jagung (kw/ha)			60.973	62.322	63.684	74.589	48.523	62.322	63.684	74.589	
3	Jumlah produksi kedelai (kw/ha)			53.581	771	885	1.153	435	771	885	1.153	
4	Produksi hortikultura- cabe (ton)			910	100	100	100	31,57	100	100	100	
5	Jumlah produksi hortikultura – bawang merah (ton)			92	100	100	100	5,54	100	100	100	
6	Produksi hasil perkebunan (Ton/ha)			34.929	36.108	37.288	38.467	27.938	36.108	37.288	38.467	
7	Persentase peningkatan produksi daging			5%	5%	5%	5%	6,9%	5%	5%	5%	
	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (ton)			20	35	0	40	10	35	0	40	
	Prosentase penanganan daerah rawan pangan			15%	15%	15%	15%	0	15%	15%	15%	
	Skor PPH Konsumsi (%)			76	82	86	90	70	82	86	90	
	Persentase			5%	5%	5%	5%	5,5%	5%	5%	5%	

RENJA PERTANIAN

	kelompok tani yang meningkat status kelas kelompok											
	Rasio penyuluh pertanian terhadap jumlah desa			92%	95%	98%	100%	79,45%	95%	98%	100%	

RENJA PERTANIAN

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan pangan secara berkelanjutan;
2. Peningkatan produksi, produktifitas dan pengolahan hasil pertanian/perkebunan dan peternakan;
3. Terbatasnya kemampuan permodalan petani;
4. Peningkatan daya dukung lahan, infrastruktur dan sarana prasarana serta pembibitan dan perbenihan;
5. Alih teknologi pertanian masih rendah;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha menuju kemandirian petani;
7. Upaya Penanggulangan Penyakit Menular Pada Hewan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program dan kegiatan serta pagu indikatif yang telah dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan. Adapun review tentang rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel 03 berikut ini :

RENJA PERTANIAN

Tabel. 03
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Tojo Una-Una

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Touna	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan	12 Bln	3.915.174.292	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Touna	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan	12 Bln	3.915.174.292	
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kab. Touna	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	12 KWt	118.500.000,-	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kab. Touna	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	12 KWt	118.500.000,-	
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kab. Touna	Tersedianya Akses Sarana Pertanian	2 Laporan	130.540.000,-	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kab. Touna	Tersedianya Akses Sarana Pertanian	2 Laporan	130.540.000,-	
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Touna	Tersedianya Akses Prasarana Pertanian	7 Paket	12.000.000,-	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Touna	Tersedianya Akses Prasarana Pertanian	7 Paket	12.000.000,-	
5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Touna	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3 Kegiatan	78.100.000,-	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Touna	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3 Kegiatan	78.100.000,-	
6	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kab. Touna	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	2 Kegiatan	260.000.000,-	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kab. Touna	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	2 Kegiatan	260.000.000,-	
7	Program Perizinan Usaha Pertanian	Kab. Touna	Meningkatnya Akses Perizinan Usaha Pertanian	5 izin Usaha	60.000.000,-	Program Perizinan Usaha Pertanian	Kab. Touna	Meningkatnya Akses Perizinan Usaha Pertanian	5 izin Usaha	60.000.000,-	
8	Program Penyuluhan Pertanian	Kab. Touna	Tercapainya Penyuluhan Pertanian	12 BPP	76.750.000,-	Program Penyuluhan Pertanian	Kab. Touna	Tercapainya Penyuluhan Pertanian	12 BPP	76.750.000,-	

Sumber : DPKP Kabupaten Tojo Una-Una, 2023. (Data diolah)

REVIU PERENCANAAN

Dari tabel di atas terdapat begitu banyak program dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Program dan kegiatan ini diusulkan guna untuk lebih memaksimalkan kinerja dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Selain itu program dan kegiatan tersebut dipandang mampu untuk lebih menjabarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Program dan kegiatan tersebut setelah dilakukan analisis terhadap hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan kinerja pencapaian target oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Namun setelah dilakukan penyesuaian antara program dan kegiatan yang ada dengan pagu indikatif yang tersedia, ternyata perlu dilakukan identifikasi kembali terhadap program dan kegiatan yang ada. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan pagu indikatif yang tersedia untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang menyebabkan tidak semua target kinerja dari program dan kegiatan yang ada dapat dilaksanakan. Selain itu juga perlu dilakukan pengurangan volume atau pengurangan pagu terhadap program dan kegiatan yang dianggap penting untuk dilakukan.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini :

RENJA PERTANIAN

Tabel. 04
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Tojo Una - Una

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		**Tercapainya Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Pertanian/Perkebunan**		
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Tersedianya Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan		
1	Pengadaan Bibit Pala dan Pupuk	Desa Wakai, Urulepe, Sampobae, Kolami, Biga, Pasokan, Tingki dan Kondongan		8 Paket	- Musrenbang
2	Pengadaan Bibit Kelapa dan Pupuk	Desa Balanggala, Sandada, Ujung Tibu, Binanguna, Lembanya, Tanimpo, Wakai, Una-Una, Matobiai, Sampobae, Malenge, Kolami, Pasokan, Kondongan dan Tingki		15 Paket	- Musrenbang
3	Pengadaan Bibit Cengkeh dan Pupuk	Desa Una-una dan Wakai		2 Paket	- Musrenbang
4	Pengadaan Bibit Coklat dan Pupuk	Desa Una-una kololio, Bambalo, Malewa, tanamawau, Nggawia, Ujung Tibu dan Kabalo		8 Paket	- Musrenbang

RENJA PERTANIAN

5.	Pengadaan Bibit Jagung dan Pupuk	Tersebar di 21 Desa dan 9 Kecamatan		21 Kelompok	Musrembang
6.	Pengadaan Bibit Padi dan Pupuk	Desa Binanguna, Lembanya, Tanimpo, Una-Una Uedele, Lembanato, Tanamawau dan Popolii		8 Kelompok	Musrembang
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		**Tercapainya Pengelolaan Prasarana Pertanian**		
	Pembangunan Prasarana Pertanian		Tersedianya Akses Prasarana Pertanian		
1.	Pembangunan Jalan Kantong Produksi	Tersebar di 78 Desa di 12 Kecamatan		78 Unit	- Musrenbang
2.	Pembangunan Embung	Desa Awo, Lemoro, Malewa, Tanamawau, Toliba, Tanimpo, Una-Una, Pasokan, Tingki, Kondongan dan Tongidon		11 Unit	Musrenbang
3.	Pembangunan Damparit	Desa Lemoro		1 Unit	Musrembang
4.	Pembangunan Cetak Sawah Baru	Desa Lebiti dan Urulepe		2 Unit	Musrembang
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		**Tercapainya Pengelolaan Prasarana Pertanian**		

RENJA PERTANIAN

	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Tersedianya Akses Sarana Pertanian		
1.	Pengadaan Hand Traktor	Desa Labiabae, Tayawa, Dataran Bugi, Tatari, Kabalo, Binanguna, Taningkola, Tanimpo, Una-Una, Wakai, Biga dan Pasokan		12 Unit	Musrembang
2.	Pengadaan Jonder	Desa Labiabae, Bonerato, Tampabatu, Lembanato, Kololio, Sandada, Pancuma, Lemoro, Malewa, Ujung Tibu, Taningkola dan Wakai		12 Unit	Musrembang
3.	Pengadaan Mesin Perontok Padi	Desa Titrii, Kabalo, Tanimpo, Una-Una, Wakai, Biga, Kondongan dan Pasokan		8 Unit	Musrembang
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				
1.	Pengadaan Ternak Sapi	Desa Pautu, Lembanato, Titiri'i, Katupat, Dataran Bugi, Malewa, Binanguna, Taningkola, Kavetan, Una-Una, Wakai, Tanimpo dan Popolii		13 Unit	Musrembang

RENJA PERTANIAN

2.	Pengadaan Ternak Kambing	Desa Tongkabo, Sampobae, Lembanato, Matobiai, Katupat, Binanguna, Una-Una dan Wakai		8 Unit	Musrembang
3.	Pengadaan Ternak Ayam	Desa Pautu, Katupat, Malewa, Nggawia, Toliba, Tanjung Pude, Binanguna, LembanyaUna-Una dan Wakai		10 Kelompok	Musrembang
4.	Pengadaan Ternak Itik	Desa Una-Una, Wakai, dan Binanguna		3 Kelompok	Musrembang

RENJA PERTANIAN

BAB. III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama Tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk mempedomani kebijakan – kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2024 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selain prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

a. Program pro rakyat;

b. Program keadilan untuk semua; dan

c. Program pencapaian tujuan pembangunan Sustainable Development Goals tahun 2015-2030 (SDG's)

Selain itu, pemerintah pusat juga baru saja menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendekatan *not business as usual*, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan

RENJA PERTANIAN

terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunannasional.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasyarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasarat serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi kaberhasilan pelaksanaan MP3EI. Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang *multiplier effect*nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama lima tahun. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemerintahan Daerah di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2024 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RENJA PERTANIAN

Tabel. T-III.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Tojo Una – Una

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-	
					2024 (III)	2025 (IV)
1	Terselenggarakan Pelayanan Publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada Inovasi	Meningkatnya kualitas dan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.	Nilai Sakip OPD	Nilai	B	BB
2.	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah Yang Berkualitas Bertumpu Pada Sektor Pertanian	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap Perekonomian Daerah	Nilai Kontribusi Sektor Pertanian Dalam PDRB	Persen	39 - 40	39 - 40
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	'76,5-77,5	'76,5-77,5
			Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan	Persen	4,88	4,88
		Meningkatnya produksi peternakan	Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan	Persen	5	5

Sumber: DPKP Kabupaten Tojo Una-Una, 2023 (Data diolah)

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikanpermasalahan – permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una – Una yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta prognosisnya dapat dilihat pada **Lampiran III.1**

RENJA PERTANIAN

BAB. IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una – Una Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan RKPD Kabupaten Tojo Una – Una Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una – Una.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis di intern Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una – Una Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2021–2026 yaitu:
"Terwujudnya Kabupaten Tojo Una–Una Tangguh, Maju dan Sejahtera (TAMARA)

Ampana, 2 Maret 2023
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Tojo Una – Una

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

MAHDI, SP.,M.Si
Pembina Tkt. I
NIP. 19671109 198903 1 005

RENJA PERTANIAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Tojo Una Una

Tahun 2024

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan							23.124.667.736,00					28.141.668.444,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.284.092.736,00					15.008.668.444,00
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							13.284.092.736,00					15.008.668.444,00
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							13.221.092.736,00					13.483.368.444,00
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							77.752.500,00					80.000.000,00
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Nilai	4 Laporan 4 Laporan	23.012.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.000.000,00
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Nilai	4 Laporan 4 Laporan	54.740.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	55.000.000,00
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							9.554.468.444,00					9.554.468.444,00
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Nilai	1 Dokumen 104 Orang	9.554.468.444,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan	9.554.468.444,00
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							14.200.000,00					15.000.000,00
2	09	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD												
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Nilai	1 Laporan	14.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	15.000.000,00

2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							34.500.000,00					100.000.000,00
2	09	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
						Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Diklat	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Nilai BB Nilai	3 Orang	14.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9 Dokumen	15.000.000,00
2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
						Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP OPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Diklat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Nilai BB Nilai	3 Orang	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	85.000.000,00
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							460.000.000,00					501.500.000,00
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi												
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi umum perkantoran	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Nilai	80 Unit	13.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	14.500.000,00
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi umum perkantoran	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Nilai	80 Unit	27.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	30.000.000,00
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi umum perkantoran	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Nilai	80 Unit	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	57.000.000,00
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi umum perkantoran	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Nilai	80 Unit	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Administrasi umum perkantoran	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Nilai	80 Unit	350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	380.000.000,00

2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.820.810.792,00					2.832.400.000,00
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Orang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan Jumlah Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Nilai	3 Media 162 Orang 28 Rekening	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	5.400.000,00
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Orang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan Jumlah Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Nilai	3 Media 162 Orang 28 Rekening	110.220.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	115.000.000,00
2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Orang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan Jumlah Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Nilai	3 Media 162 Orang 28 Rekening	31.090.792,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Laporan	37.000.000,00
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Orang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan Jumlah Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Nilai	3 Media 162 Orang 28 Rekening	2.675.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.675.000.000,00
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							259.361.000,00					400.000.000,00
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpenuhnya Jasa Pemeliharaan inventaris kendaraan dinas	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Nilai	80 Unit	246.361.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	79 Unit	250.000.000,00
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhnya Jasa Pemeliharaan inventaris kendaraan dinas	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Nilai	80 Unit	13.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00

2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							28.000.000,00					1.455.300.000,00
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota							5.000.000,00					1.400.000.000,00
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota												
						Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi serta sosialisasi yang dilaksanakan Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5-10 Persen	35 Kali 40 Ton	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Ton	1.400.000.000,00
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							23.000.000,00					55.300.000,00
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal												
						Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5-10 Persen	12 KWT	23.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12 Laporan	55.300.000,00
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							35.000.000,00					70.000.000,00
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							15.000.000,00					45.000.000,00
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan												
						Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di mutahirkan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5-3 Persen	1 Peta	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	45.000.000,00
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota							20.000.000,00					25.000.000,00
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												
						Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan,Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5-3 Persen	1 Kali	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00

3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							9.840.575.000,00					13.133.000.000,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							9.840.575.000,00					13.133.000.000,00
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							25.000.000,00					115.000.000,00
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							4.000.000,00					35.000.000,00
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi												
						Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan (2. Kambing) Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan (3. Babi) Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (5. Cengkeh) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (1. Bawang Merah) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (2. Cabe) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (3. Tomat Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik llokasi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.416, 00 persen 11.008, 00 persen 3,78 persen 35.38 Persen 20.45 Persen 145.73 Persen - persen 0 persen 3.78 Persen 5,88 persen 5.88 Persen 44,36 persen 4.42 Persen 14.10 Persen 0.13 Persen 4,42 persen 15,94 persen 35,38 persen 0 persen 0,13 persen 145,73 persen 14,10 persen 0 Persen 41.124, 00 persen	12 Laporan	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	35.000.000,00
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							19.000.000,00					45.000.000,00
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman												
						Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (3. Kakao) Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (2. Kelapa) Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (4. Kopi) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (1. Padi) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (3. Tomat Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (2. Cabe) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (1. Bawang	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan pelestarian dan Pemurnian	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,42 persen 14,10 persen 0 Persen 5.88 Persen 44,36 persen - persen 145.73 Persen 20.45 Persen 35.38 Persen 11.008, 00 persen 41.416, 00 persen 41.124, 00 persen 35,38 persen 0,13 persen 15,94 persen 4.42 Persen 5,88 persen 145,73 persen 20,45 persen 0 persen 3.78 Persen 14.10 Persen 3,78 persen 0 persen	10 Ekor	19.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	10 VUB	45.000.000,00
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain							2.000.000,00					35.000.000,00
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain												

						Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (2. Kelapa) Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (6. Pala) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (1. Bawang Merah) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (3. Kakao) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (4. Kopi) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (5. Cengkeh) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (6. Pala) Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura (3. Tomat) Persentase Peningkatan	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14,10 persen 0,10 persen 35.38 Persen 4.42 Persen 5.88 Persen 3.78 Persen 0.10 Persen 145,73 persen 20,45 persen 11.008, 00 persen 20.45 Persen 35,38 persen 44,36 persen 4,42 persen 5,88 persen 3,78 persen 15,94 persen 0 persen - persen 0 persen 14.10 Persen 0 Persen 0.13 Persen 41.124, 00 persen 41.416, 00	100 Ekor	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	10 Ekor	35.000.000,00
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						9.338.000.000,00					12.165.000.000,00
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian						21.000.000,00					35.000.000,00
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya											
						Persentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11,00 Persen	8	21.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	8 Laporan	35.000.000,00
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian						9.317.000.000,00					12.130.000.000,00
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani											
						Persentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Jumlah Balai Penyuluhan di kecamatan serta sarana pendukungnya yang di bangun, direhablitasi dan dipelihara Jumlah DAM Parit yang dibangun, direhablitasi dan di pelihara Jumlah Embung Pertanian yang dibangun, direhablitasi dan dipelihara Jumlah Jalan Usaha Tani yang di bangun, di rehablitasi dan di pelihara Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11,00 Persen	1 Unit 4 Unit 3 Unit 44 Unit 2 Unit	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	2 Unit	50.000.000,00

3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian												
						Persentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Balai Penyuluhan di kecamatan serta sarana pendukungnya yang di bangun, direhablitasi dan dipelihara Jumlah DAM Parit yang dibangun, direhablitasi dan di pelihara Jumlah Embung Pertanian yang dibangun, direhablitasi dan dipelihara Jumlah Jalan Usaha Tani yang di bangun, di rehablitasi dan di pelihara Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11,00 Persen	1 Unit 4 Unit 3 Unit 44 Unit 2 Unit	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	35.000.000,00
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani												
						Persentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian/ Perkebunan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Balai Penyuluhan di kecamatan serta sarana pendukungnya yang di bangun, direhablitasi dan dipelihara Jumlah DAM Parit yang dibangun, direhablitasi dan di pelihara Jumlah Embung Pertanian yang dibangun, direhablitasi dan dipelihara Jumlah Jalan Usaha Tani yang di bangun, di rehablitasi dan di pelihara Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11,00 Persen	1 Unit 4 Unit 3 Unit 44 Unit 2 Unit	9.300.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	44 Unit	12.000.000.000,00
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit												
						Persentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian/ Perkebunan	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Balai Penyuluhan di kecamatan serta sarana pendukungnya yang di bangun, direhablitasi dan dipelihara Jumlah DAM Parit yang dibangun, direhablitasi dan di pelihara Jumlah Embung Pertanian yang dibangun, direhablitasi dan dipelihara Jumlah Jalan Usaha Tani yang di bangun, di rehablitasi dan di pelihara Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11,00 Persen	1 Unit 4 Unit 3 Unit 44 Unit 2 Unit	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	40.000.000,00

3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya													
						Persentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Balai Penyuluhan di kecamatan serta sarana pendukungnya yang di bangun, direhablitasi dan dipelihara Jumlah DAM Parit yang dibangun, direhablitasi dan di pelihara Jumlah Embung Pertanian yang dibangun, direhablitasi dan dipelihara Jumlah Jalan Usaha Tani yang di bangun, di rehablitasi dan di pelihara Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11,00 Persen	1 Unit 4 Unit 3 Unit 44 Unit 2 Unit	4.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	5.000.000,00
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							192.575.000,00					259.000.000,00
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota							21.000.000,00					45.000.000,00
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis													
						Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54,62 persen	12 Desa/Kecamatan	21.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan	45.000.000,00
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota							150.575.000,00					180.000.000,00
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner													
						Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54,62 persen	1500 Ekor	150.575.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	180.000.000,00
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan							21.000.000,00					34.000.000,00
3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan													
						Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan unit kesejahteraan Hewan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54,62 persen	200 Ekor	21.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	12 Laporan	34.000.000,00

3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							84.000.000,00					275.000.000,00
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							84.000.000,00					275.000.000,00
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan												
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN ((Persentase Luas Areal pengendalian dan penaggulangan Bencana OPT)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah bibit tanaman padi yang diserahkan pada masyarakat Jumlah bibit tanaman Nilam yang diserahkan pada masyarakat Jumlah bibit tanaman kelapa yang diserahkan pada masyarakat Jumlah Luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang di kendalikan Jumlah Area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani Jumlah bibit tanaman Tomat yang diserahkan pada masyarakat Jumlah bibit tanaman Serewangi yang diserahkan pada masyarakat Jumlah bibit tanaman	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79,50 persen	250 Hektar 50000 Pohon 15000 Pohon 2 Kegiatan 8 Kegiatan 0 Bungkus 20000 Rumpun 0 Hektar 30000 Hektar 0 Pohon 0 Pohon 0 Kilogram 0 Pohon 200 Bungkus	42.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	45 Ha	140.000.000,00
3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan												
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN ((Persentase Luas Areal pengendalian dan penaggulangan Bencana OPT)	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah bibit tanaman padi yang diserahkan pada masyarakat Jumlah bibit tanaman Nilam yang diserahkan pada masyarakat Jumlah bibit tanaman kelapa yang diserahkan pada masyarakat Jumlah Luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang di kendalikan Jumlah Area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani Jumlah bibit tanaman Tomat yang diserahkan pada masyarakat Jumlah bibit tanaman Serewangi yang diserahkan pada masyarakat Jumlah bibit tanaman	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79,50 persen	250 Hektar 50000 Pohon 15000 Pohon 2 Kegiatan 8 Kegiatan 0 Bungkus 20000 Rumpun 0 Hektar 30000 Hektar 0 Pohon 0 Pohon 0 Kilogram 0 Pohon 200 Bungkus	42.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	6 Laporan	135.000.000,00

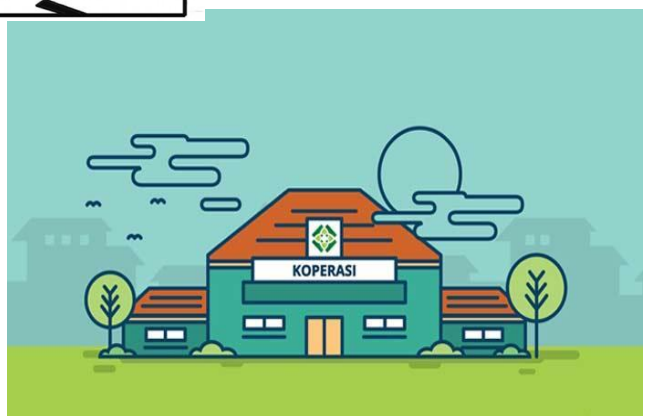
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN							42.000.000,00					130.000.000,00
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							42.000.000,00					130.000.000,00
3	27	06	2.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian												
						Persentase Rekomendasi teknis usaha pertanian/jumlah usaha pertanian dalam arti luas Pertanian Persentase Rekomendasi teknis usaha pertanian/jumlah usaha pertanian dalam arti luas Perkebunan Persentase Rekomendasi teknis	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70,00 Persen 62,50 Persen 52,50 Persen	20 Dokumen	42.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	20 Dokumen	130.000.000,00
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							159.000.000,00					189.000.000,00
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							159.000.000,00					189.000.000,00
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa												
						Persentase Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa di tingkatkan kapasitanya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1-2 persen	7 Unit 12 Kelompok	138.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	150.000.000,00
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian												
						Persentase Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa di	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1-2 persen	7 Unit 12 Kelompok	21.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7 Unit	39.000.000,00
											TOTAL	**23.124.667.736,00**					**28.141.668.444,00**

RENCANA KERJA
DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Tahun 2024

JLN. MERDEKA KOMPLEKS BUMI MAS UEMALINGKU







BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

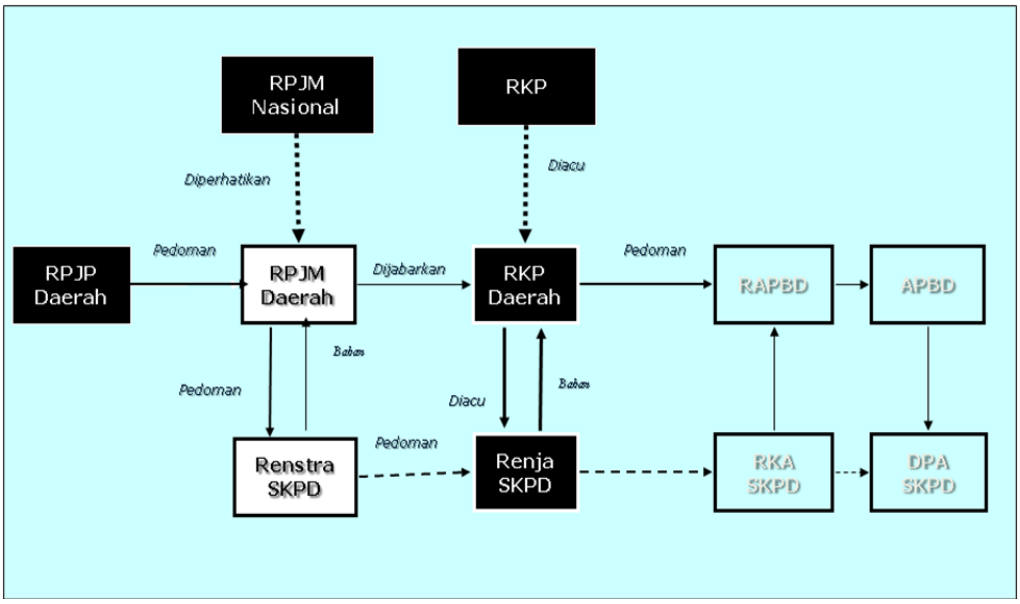
Sebagai pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan, Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Keterkaitan antara dokumen Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1.1
Keterkaitan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Kerja OPD sebagai penjabaran Rencana Strategis OPD dan bahan masukan untuk finalisasi RKPD dan setiap OPD Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kerja OPD sebagai penjabaran Rencana Strategis OPD Kabupaten/Kota dan bahan penyempurnaan RKPD Kabupaten/Kota. Penyusunan berbagai dokumen rencana tahunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4. 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
14. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2020 TentangTentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794);
28. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Pemutahiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ/2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020;
30. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 8 Tahun 2021Tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah

2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);

33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;
34. Peraturan Daerah KabupatenTojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 2);

    Surat Keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja BKPSDMD Kabupaten Tojo Una-Una.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una adalah menjelaskan pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan selama tahun anggaran 2023 dan sebagai penjabaran dari renstra 2021-2026 Dinas

Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

Alternatif lain pernyataan tujuan :

1) Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2) Terwujudnya keselarasan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan perencanaan yang berjenjang sehingga tercapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah itu sendiri;
3) Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan OPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD);
4) Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target

Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini II.1.

Tabel T-II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPKUKM dan Pencapaian Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah s/d Tahun 2023 Kabupaten Tojo Una-Una

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Program/Kegiatan Renstra OPD sampai dengan tahun berjalan 2022		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7 / 6)*	*9*	*10 = (5 + 7 + 9)**	*11**	*12*
	URUSAN WAJIB										
	Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	138 Kali	23 Kali	19 Kali	23 Kali	121.05	36 Kali	82 Kali	59.42	DPPKUKM
	Koordinasi dan Pembinaan dalam daerah	jumlah Koordinasi dan Pembinaan dalam daerah	170 Kali	36 Kali	36 Kali	24 Kali	66.67	30 Kali	90 Kali	52.94	DPPKUKM
	Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	50.00	DPPKUKM
	Penyediaan jasa pelayanan Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pealayanan perkantoran	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	50.00	DPPKUKM
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang	- Paket	- Paket	- Paket	- Paket	-	- Paket	- -	-	DPPKUKM

					dibangun												
				Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3	Unit	3	Unit	-	Unit	-	unit	-	-	unit	3	Unit	100.00	DPPKUKM
				Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	12	Unit	9	Unit	-	Unit	-	Unit	-	31	unit	40	Unit	333.33	DPPKUKM
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	28	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	100	3	unit	35	Unit	125.00	DPPKUKM
				Pengadaan Mobileur	Jumlah Mobileur yang diadakan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	unit	-	-	unit	-	Unit	-	DPPKUKM
				Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	126	unit	21	Unit	21	Unit	21	Unit	100	21	unit	63	Unit	50.00	DPPKUKM
				Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	1	unit	1	unit	-	Unit	-	Unit	-	-	unit	1	Unit	100.00	DPPKUKM
				Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	151	unit	42	unit	27	Unit	27	Unit	100	37	unit	106	Unit	70.20	DPPKUKM
				Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	91	unit	15	Unit	16	Unit	16	Unit	100	16	unit	47	Unit	51.65	DPPKUKM
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Pendidikn dan Pelatihan Formal	5	Org	1	Org	-	Org	-	Org	-	-	Org	-	Org	-	DPPKUKM
				Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif																
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang terfasilitasi	500	UMKM	100	UMKM	200	UMKM	200	UMKM	100	50	UMKM	350	UMKM	70.00	DPPKUKM
				Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang mendapatkan fasilitas produksi	100	UMKM	100	UMKM	-	UMKM	-	UMKM	-	-	UMKM	100	UMKM	100.00	DPPKUKM

				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah															
				Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	115	UMKM	40	Orang	-	Orang	-	Orang	-	15	Orang	55	Orang	47.83	DPPKUKM
				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi															
				Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	275	Koperasi	30	Koperasi	75	Koperasi	75	Koperasi	100	50	Koperasi	155	Koperasi	56.36	DPPKUKM
				Pengembangan SDM Manajemen Koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang mendapatkan perlatihan	40	Anggota/ Pengurus	20	Anggota/ Pengurus	20	Anggota/ Pengurus	20	Anggota/ Pengurus	100	-	Anggota/ Pengurus	40	Anggota/ Pengurus	100.00	DPPKUKM
				Penilaian Kesehatan KSP Koperasi	Jumlah KSP Koperasi yang dinilai	30	koperasi	30	koperasi	-	koperasi	-	koperasi	-	-	koperasi	30	koperasi	100.00	DPPKUKM
				Revitalisasi Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang di Revitalisasi	30	koperasi	30	koperasi	-	koperasi	-	koperasi	-	-	koperasi	30	koperasi	100.00	DPPKUKM
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah															
				Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah IKM yang terfasilitasi	29	IKM	15	IKM	10	IKM	10	IKM	100	27	IKM	52	IKM	179.31	DPPKUKM
				Pembinaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah	Jumlah IKM yang di Bina Dewan Kerajinan Nasional Daerah	95	IKM	20	IKM	20	IKM	20	IKM	100	5	IKM	45	kali	47.37	DPPKUKM
				Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Peningkatan Produk Unggulan	Jumlah IKM yang dibina dalam rangka peningkatan produk unggulan	8	IKM	-	IKM	-	IKM	-	IKM	-	-	IKM	-	IKM	-	DPPKUKM
				Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang dibina	52	IKM	-	IKM	-	IKM	-	IKM	-	-	IKM	-	IKM	-	DPPKUKM

				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri													
				Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang dibina	15	Org	15	IKM	-	IKM	-	IKM	-	-	IKM	15	IKM	100.00	DPPKUKM
				Pelatihan Kerajinan	Jumlah peserta pelatihan kerajinan	20	Org	20	IKM	-	IKM	-	IKM	-	-	IKM	20	IKM	100.00	DPPKUKM
				Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial													
				Pembangunan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra industri potensial yang dibangun	6	Sentra	1	Unit	1	Sentra	1	Sentra	100	1	Sentra	3	IKM	50.00	DPPKUKM
				Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan													
				Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah laporan barang kadaluarsa dan bahan berbaha lainnya	12	laporan	12	lap	-	lap	-	lap	-	-	lap	12	lap	100.00	DPPKUKM
				Tera/tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	4,600	UTTP	1,000	UTTP	1,000	UTTP	1,000	UTTP	100	500	UTTP	2,500	UTTP	54.35	DPPKUKM
				Operasionalisasi dan Pengembangan UPT kemetrologian daerah	Jumlah pengembangan UPT kemetrologian daerah yang dibentuk	-	UPT	-	UPT	-	UPT	-	UTTP	-	1	UPT	1	UTTP	-	DPPKUKM
				Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor													
				Sosialisasi Pengembangan Komoditi Eksport Daerah	Jumlah peserta sosialisasi pengambangan komoditi eksport daerah	80	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	50	Orang	50	Orang	62.50	DPPKUKM

				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri												
				Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Jumlah Lokasi Kegiatan Pasar lelang/Bersubsidi	92	Lokasi	15	Lokasi	17	Lokasi	17	Lokasi	100.00	27 Lokasi	59 Lokasi	64.13	DPPKUKM
				Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan												
				Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah pedagang kakilima dan asongan yang dibina	11	Pasar	-	Pasar	-	Pasar	-	Pasar	-	- Pasar	- Pasar	-	DPPKUKM
				Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan.	Jumlah Pasar yang akan di bangun / Rehab	27	Pasar	12	Pasar	3	Pasar	3	Pasar	100	4 Pasar	19 Pasar	70.37	DPPKUKM

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Tojo Una-Una

Drs. MOH. KUSNO A.R. ATILU
Pembina Utama Muda
NIP. 19630423 199803 1 004

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una, maka jenis pelayanan di bidang Pengembangan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM meliputi :

- Pemberdayaan, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM dalam pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
- Pengembangan Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM dalam Peningkatan Perekonomian Daerah;
- Pembinaan Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM serta Penumbuhan Wirausaha baru di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM ;
- Meningkatkan stabilitas perdagangan lokal dan menjaga keseimbangan stok kebutuhan masyarakat yang menjamin stabilitas harga pasar;
- Peningkatan Pemantauan harga sembilan bahan pokok dan bahan strategis serta meningkatkan perlindungan konsumen dan produsen.

Sesuai uraian jenis pelayanan di bidang Pemberdayaan Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM diatas, maka kelompok sasaran yang menjadi focus pelayanan adalah:

- Industri Kecil, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- Pelaku Usaha Industri Kecil, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- Pasar Desa, Pasar Modern, swalayan, pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
- Konsumen dan Produsen;
- Lembaga/Organisasi Koperasi, Perdagangan dan Industri.

Secara detail Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel II.2.

Tabel. T-II.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Tojo Una-Una

NO	Indikator *)	SPM	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
		Standar Nasional	(PP-6/'08)	Tahun 2016 (tahun n-2)	Tahun 2017 (tahun n-1)	Tahun 2018 (tahun n)	Tahun 2019 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n+2)	Tahun 2021 (tahun n+2)	Tahun 2016 (tahun n-2)	Tahun 2017 (tahun n-1)	Tahun 2018 (tahun n)	Tahun 2019 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n+2)	Tahun 2021 (tahun n+2)	
1	2	3	4	5	6	7	8		8	9	10	11	12		13	14
1	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan perjalanan ke luar daerah		138 Kali	23 Kali	19 Kali	19 Kali	36 Kali	22 Kali	19 Kali	23 Kali	19 Kali					
2	Jumlah koordinasi dan pembinaan dalam daerah		170 Kali	36 Kali	36 Kali	26 Kali	30 Kali	26 Kali	28 Kali	36 Kali	24 Kali					
3	Jumlah penyediaan jasa admiistrasi perkantoran		72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan					
4	Jumlah penyediaan jasa pelayanan perkantoran		72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan					
5	jumlah gedung kantor yang dibangun		2 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit					
6	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		3 Unit	3 unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	3 unit	- Unit					
7	Jumlah Perlengkapan gedung/kantor yang diadakan		12 Unit	9 Unit	- Unit	3 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	9 Unit	16 Unit					
8	Jumlah Peralatan Gedung/Kantor yang adakan		28 Unit	16 Unit	16 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	3 Unit	16 Unit	16 Unit					
9	Jumlah Mobileur yang diadakan		- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit					
10	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara		126 unit	21 Unit	21 Unit	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit	21 Unit	21 Unit					
11	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara		1 unit	1 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	1 Unit	0 Unit					
12	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara		151 unit	42 Unit	27 Unit	27 Unit	27 Unit	27 Unit	27 Unit	42 Unit	27 Unit					
13	Jumlah Perlengkapan Kantor yangdipelihara		91 Unit	15 Unit	16 Unit	16 Unit	14 Unit	14 Unit	16 Unit	15 Unit	16 Unit					

| | | |

32	Jumlah peserta sosialisasi pengembangan komoditi eksport daerah		80	Orang	-	Orang	-	org	20	org	20	org	20	Org	20	org	-	Orang	0	Orang					
33	Jumlah lokasi kegiatan pasar lelang/bersubsidi		92	Lokasi	15	Lokasi	17	Lokasi	15	Lokasi	15	Lokasi	15	Lokasi	15	Lokasi	15	Lokasi	17	Lokasi					
34	Jumlah pedagang kakilima dan asongan yang dibina		11	Pasar	-	Pasar	-	Pasar	5	Pasar	2	Pasar	2	Pasar	2	Pasar	-	Pasar	0	Pasar					
36	Jumlah pasar yang akan dibangun/rehab		27	Pasar	12	Pasar	3	Pasar	3	Pasar	3	Pasar	3	Pasar	3	Pasar	12	Pasar	3	Pasar					

Kepala Dinas,
Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Drs. MOH. KUSNO A.R. ATILU
Pembina Utama Muda
NIP. 19630423 199803 1 004

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN OPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang, maka ditentukan isu strategis.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una yang mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan dibidang Pembinaan tekhnis, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas desentralisasi di Bidang Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah kurangnya sarana prasarana, profesionalitas aparat pelaksana dan masih rendahnya SDM dan sarana prasarana penunjang bagi pelaku usaha. Selain masalah yang telah dikemukakan pada analisis kinerja di atas berikut ini akan digambarkan permasalahan dan hambatan secara umum yang mempengaruhi kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai berikut :

a. Permasalahan administratif

1. Keberhasilan kinerja bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, instrumennya berada pada sektor lain yang masih merupakan hambatan seperti : iklim usaha, kualitas dan kuantitas infrastruktur ke lokasi sumber

produksi/sentra produksi IKM, biaya energi, tingkat bunga kredit, biaya distribusi/logistik, kontinuitas bahan baku dan perkembangan harganya/stabilitas, sarana penunjang/pelabuhan laut dan udara, dll.

2. Kurangnya SDM Aparat yang berkualitas.
3. Masih kurangnya beberapa sarana dan prasarana Pendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Hal – hal lain yang bersifat administratif dan teknis.

b. Permasalahan Teknis

1. Sektor Industri

a. Belum maksimalnya pembinaan pengembangan industri yang berbasis pada komoditi unggulan daerah.
b. Pengembangan Industri komoditi potensial Kabupaten Tojo Una – Una seperti jagung, kelapa, ikan, cacao, rotan dan lain-lain belum dikelola secara baik.
c. Belum terlaksananya pemanfaatan Sentra IKM.
d. Masih sangat rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah.

2. Sektor Perdagangan

a. Permintaan masyarakat terhadap komoditi kebutuhan bahan pokok, barang penting dan barang strategis lainnya pada saat tertentu seperti hari-hari besar nasional cenderung melonjak yang tidak diimbangi oleh persediaan stok barang yang cukup sehingga menyebabkan kenaikan harga.
b. Stabilitas harga komoditas hasil pertanian, perkebunan tidak stabil.
c. Perlidungan Konsumen dan Pemantauan Barang dalam Keadaan Terbungkus belum optimal;
d. Tidak tersedianya SDM tenaga ahli penera dan sarana prasarana tera/tera ulang;

3. Sektor Koperasi dan UKM

a. Kwalitas SDM Pengelola Koperasi masih sangat rendah.
b. Kemampuan untuk mengakses modal utamanya pada perbankan masih lemah.
c. Kemampuan mengakses pasar masih rendah.
d. Partisipasi anggota pada koperasi masih rendah utamanya kesadaran anggota koperasi untuk menabung dan meminjam pada koperasi.
e. Partisipasi angggota pada koperasi sangat rendah.

2.3.2 Tantangan dan Peluang dalam peningkatan Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Adapun tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

a. Kerjasama antar bidang masih lemah didalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
b. Kondisi Geografis Kabupaten Tojo Una-Una di mana sebagian wilayah Kabupaten Tojo Una-Una sulit dijangkau dalam upaya pembinaan pengembangan usaha perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.
c. Anggaran yang sangat minim dalam pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan.

Peluang dalam meningkatkan Pelayanan antara lain :

a. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan lokomotif utama pencapaian Visi dan Misi Bupati;
b. Adanya political will antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM khususnya Program Pembangunan 5000 pasar dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun serta Pembangunan sentra-sentra Industri Potensial.

c. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemasaran produk lokal.

2.3.3 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang di rencanakan

Pemberdayaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tojo Una-Una merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak *(affirmative policy)* terhadap Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini pemberdayaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia *(propoor).* Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional *(progrowth).* Keberadaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subjek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran *(pro job).* Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya

pada Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kokoh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan leader perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Disisi lain teknologi, berdampak sangat ketatnya persaingan dan cepatnya terjadi perubahan lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri saat ini begitu keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar, pemerintah daerah dan dunia usaha pun harus menerima kenyataan bahwa pesatnya perkembangan teknologi harus diikuti dengan pengembangan industri lokal yang berbasis keunggulan daerah yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Dalam melaksanakan proses pembangunan industri, keadaan tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta harus menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan, sekaligus merupakan paradigma baru yang harus dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi negaranya.

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Peningkatan investasi melalui pengembangan Industri yang berbasis komoditi unggulan dibidang pertanian, pariwisata dan kemaritiman;
2. Menjaga Stabilitas harga bahan pokok, Ketersediaan stok barang kebutuhan pokok maupun bahan strategis.
3. Stabilitas harga komoditi hasil pertanian, perkebunan dan kemaritiman
4. Peningkatan daya saing produk melalui pembinaan dan bantuan sarana produksi bagi pelaku usaha IKM.
5. Pengembangan Pasar Tradisional dan Pembangunan Sentra Industri Potensial.
6. Memperkuat kelembagaan koperasi dan organisasi koperasi guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang dapat menjamin koperasi dan anggotanya dari praktek persaingan usaha yang tidak sehat dan meningkatkan kemandirian koperasi.
7. Pengembangan UMKM melalui Pemberdayaan Usaha Mikro dan Pengembangan kapasitas UKM.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perindutrian dan Perdagangan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukannya itu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil análisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan - temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada lampiran tabel II.3

Tabel. T-II.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Kabupaten Tojo Una-Una

OPD : DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**					**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**					
	Rapat Koordinasi Luar Daerah	Palu, Jakarta dan Kota lainnya	Jumlah Rapat Koordinasi dan Perjalanan Ke Luar daerah	19 Kali	Rp 279,540,000	Rapat Koordinasi Luar Daerah	Palu, Jakarta dan Kota lainnya	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah	26 Kali	Rp 350,000,000	
	Koordinasi Pembinaan Dalam daerah	12 Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	24 Kali	Rp 107,198,000	Koordinasi Pembinaan Dalam daerah	12 Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah	30 Kali	Rp 170,000,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Ampana	Jumlah Penyediaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Rp 39,726,250	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Ampana	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Rp 50,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Ampana	Jumlah Jasa Pelayanan Pelayanan Perkantoran	12 Bulan	Rp 982,080,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Ampana	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Rp 1,100,000,000	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**					**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**					
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Ampana	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang di adakan	3 unit	Rp 12,400,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Ampana	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang di adakan	3 unit	Rp 100,000,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Ampana	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang di adakan	0 unit	Rp -	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Ampana	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang di adakan	2 unit	Rp 30,000,000	
	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Ampana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang di pelihara	21 Unit	Rp 53,800,000	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Ampana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	21 Unit	Rp 60,000,000	

									yang di pelihara			
	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Ampana	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	16	Unit	Rp 7,200,000	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Ampana	Jumlah Perlengkapan Kantor yang terpelihara	16	Unit	Rp 12,000,000
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Ampana	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	27	Unit	Rp 20,250,000	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Ampana	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	27	Unit	Rp 30,000,000
	Bidang Koperasi dan UMKM											
3	**Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**						**Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**					
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	3 Kecamatan	Jumlah UKM yang terfasilitasi	112	UMKM	74,483,200	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	3 Kecamatan	Jumlah UKM yang terfasilitasi	112	UMKM	Rp 150,000,000
4	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**						**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**					
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Kec. Ulubongka	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	40	org	Rp 50,000,000	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Kec. Ulubongka	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	40	org	Rp 75,000,000
5	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**						**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**					
	Pembinaan, Pengawasan Koperasi dan Penghargaan Koperasi	12 Kecamatan	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	75	koperasi	97,950,000	Pembinaan, Pengawasan Koperasi	12 Kecamatan	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	40	koperasi	Rp 150,000,000
	Bidang Perindustrian						***Bidang Perindustrian***					
6	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**						**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**					
	Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah IKM yang terfasilitasi	0	IKM	-	Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah IKM yang terfasilitasi	10	IKM	200,000,000

	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam peningkatan Produk Unggulan daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Pembinaan Industri Kecil dan Menengah yang di kembangkan untuk menjadi produk unggulan Daerah	1	IKM	278,394,500	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam peningkatan Produk Unggulan daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Pembinaan Industri Kecil dan Menengah yang di kembangkan untuk menjadi produk unggulan Daerah	5	IKM	300,000,000	
	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah IKM yang dibina	0	IKM	-	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah IKM yang dibina	10	IKM	200,000,000	
7	**Program Pengembangan Sentra sentra Industri Potensial**		Program Pengembangan Sentra -sentra industri Potensial				**Program Pengembangan Sentra sentra Industri Potensial**		Program Pengembangan Sentra -sentra industri Potensial				
	Pembangunan Sentra Industri Potensial ***Bidang Perdagangan***	Kec. Ampana Tete	Jumlah sentra Industri yang akan di bangun	1	sentra	4,021,735,000	Pembangunan Sentra Industri Potensial ***Bidang Perdagangan***	Kec. Ampana Tete	Jumlah sentra Industri yang akan di bangun	1	sentra	Rp 4,500,000,000	
8	**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**						**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**						
	Tera/tera Ulang	12 Kecamatan	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	1000	alat UTTP	148,309,000	Tera/tera Ulang	12 Kecamatan	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	1000	alat UTTP	178,000,000	
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Export						Program Peningkatan dan Pengembangan Export						
	Sosialisasi Pengembangan Komoditi Ekspor Daerah	Kec. Ratolindo	Jumlah Peserta sosialisasi Komoditi Eksport Daerah	20	orang	50,000,000	Sosialisasi Pengembangan Komoditi Ekspor Daerah	Kec. Ratolindo	Jumlah Peserta sosialisasi Komoditi Eksport Daerah	20	orang	Rp 75,000,000	
10	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**						**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**						
	Pembinaan Pengembangan Usah	12 Kecamatan	Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang mendapatkan pembinaan	100	Pelaku usaha	100,000,000	Pembinaan Pelaku usaha perdagangan	12 Kecamatan	Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang mendapatkan pembinaan	50	Pelaku usaha	150,000,000	
	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	12 Kecamatan	Jumlah Lokasi Kegiatan Pasar Bersubsidi	15	Lokasi	120,000,000	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	12 Kecamatan	Jumlah Lokasi Kegiatan Pasar Bersubsidi	27	Lokasi	180,000,000	
11	**Program**						**Program**						

	pembinaan pedagang kaki lima dan asongan					**pembinaan pedagang kaki lima dan asongan**					
	Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan asongan	Kec. Ampana Kota, Una-Una Tojo	Jumlah Organisasi Pedagang Kaki Lima Yang di Bina	3	Pasar	Rp 100,000,000	Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan asongan	Kec. Ampana Kota, Una-Una Tojo	Jumlah Organisasi Pedagang Kaki Lima Yang di Bina	3	Pasar	150,000,000	
	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan.	Kec. Tojo ., Kec. Walea Besar Kec. Ampana Tete	Jumlah Pasar dan gudang yang akan di bangun / Rehab	3	Pasar	Rp 3,000,000,000	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan.	Kec. Tojo ., Kec. Walea Besar Kec. Ampana Tete	Jumlah Pasar dan gudang yang akan di bangun / Rehab	3	Pasar	5,000,000,000	
JUMLAH :						**Rp 9,543,065,950**						**Rp 13,210,000,000**	

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Tojo Una-Una

Drs. MOH. KUSNO A.R. ATILU
Pembina Utama Muda
NIP. 19630423 199803 1 004

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Penyusunan Rencana Kerja OPD (RENJA OPD) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una berpedoman pada Rencana Strategis OPD (RENSTRA OPD) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari Pelaku usaha, yaitu guna memudahkan dan membantu pelaku usaha dalam peningkatan daya saing UKM, IKM, sarana Perdagangandan perlindungan konsumen .

a. Usulan Program dan kegiatan masyarakat tersebut sebagian besar diperoleh pada saat musrenbang tingkat kecamatan yang di laksanakan di 12 (dua belas) Kecamatan wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
b. Salah satu fungsi penyelenggaraan tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah pengembangan dan pembinaan usaha perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM sehingga usulan masyarakat berupa pendidikan dan pelatihan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM sangat sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Usulan program kegiatan yang tidak terakomodir dalam renja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan di usulkan untuk dibiayai melalui APBD I pada Dinas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Sulawesi Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan RI.

Tabel 2.4
Usulan Kegiatan dari Para Pemangku KepentinganTahun 2023
Kabupaten Tojo Una-Una

DAFTAR URUTAN KEGIATAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Nama OPD :Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sasaran Kegiatan	Volume	Ket
1	Meja Inplaner	Kondongan	Terpenuhinya alat pendukung pertukangan	1 Unit	
2	Pengadaan Belanga Gula Aren	Malapo	Tersedianya sarana pendukung peningkatan ekonomi masyarakat	6 Buah	
3	Pembinaan Industri Rumah Tangga Pembuatan Manisan Pala	Katogop	Peningkatan Ekonomi masyarakat	1 KLP	
4	Pembinaan industri rumah tangga pembuatan Ikan Roa	Katogop	Peningkatan Ekonomi masyarakat	1 KLP	
5	Pasar Ikan / sayur	Desa Kabalutan Dusun 2		16 m x 30 m	
6	Pembangunan Pasar Desa katupat	Desa Katupat		1 LS	
7	Usaha Kerajinan Tangan Pembuatan Acesoris dari tempurung kelapa	Desa Baulu		1 KLP	
8	Pengadaan printer sablon	Desa Katupat		1 LS	
9	Pembangunan Los Pasar Ikan	Desa Una-Una Dusun 2	Pembangunan Sentra Ekonomi Warga	1 Unit	
10	Pelatihan Pengolahan Pangan	Desa Una-una Dusun 1 dan 2	Kelompok ibu-ibu	5 KLP	
11	Pelatihan Pengolahan Pangan	Desa Wakai dusun 1,2,3,4	Kelompok Ibu-ibu	5 KLP	
12	Pembangunan pasar desa Patoyan	Desa Patoyan		1 Unit	
13	Pelatihan Pengolahan Makanan	Desa Lindo		-	
14	Rehab Pasar Desa	Desa Bomba		-	
15	Modal Usaha Koperasi	Desa Tombiano	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	1 Kali	
16			Meningkatkan		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sasaran Kegiatan	Volume	Ket
	Pembangunan Pasar Desa	Desa Toliba	perekonomian masyarakat	1 Unit	
17	Pembinaan dan pelatihan program keterampilan Kader PKK	Kecamatan Tojo Barat		-	
18	Fasilitas PIRT dan sertifikasi halal bagi IKM olahan Pangan	Desa Betaua	Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	1 Paket	
19	Rehap Pasar Desa	Desa Betaua	Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	1 Unit	
20	Pelatihan Kelompok Mebel	Desa Tongku		3 KLP	
21	Rumah industry pembuatan stik nike	Desa Cempa		1 Unit	
22	Pasar desa	Desa Tampanombo		1 Unit	
23	Pasar Desa	Desa Borneang		1 Unit	
24	Pembangunan Pasar	Desa Suka Maju		5 unit	
25	Pelatihan olahan pangan	Desa sumoli		10 orang	
26	Pelatihan olahan pangan	Kelurahan uentanaga bawah		10 orang	
DAFTAR PROGRAM KEGIATAN HASIL RESES DPRD KABUPATEN TOJO UNA – UNA BERDASARKAN DAERAH PEMILIHAN					
1	Penambahan Lokasi Pasar	Desa tiga Pulau (Dapil III)		-	
2	Pasar Desa	Desa Binaguna (Dapil III)		1 Lokal	
3	Pasar Desa	Desa Bomba (Dapil III)		1 Lokal	
4	Pasar Desa	Desa Patoyan (Dapil III)		30 x 10 m	
5	Pembangun Kantor Desa	Desa Kulingkinari (Dapil III)		1 Unit	
6	Pembangunan rumah industry untuk kelompok pembuatan kue	(Dapil II)		1 Lokal	
7	Pembangunan pasar desa	Desa Tampapanombo (Dapil I)		25 x 10 m	
8	Pengadaan alat-alat usaha untuk ibu rumah tangga seperti mesin jahit	Desa bantuga (Dapil II)		1 Unit	
9	Pengadaan alat-alat usaha untuk ibu rumah tangga seperti mesin jahit	Desa Girimulyo (Dapil II)		1 Unit	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sasaran Kegiatan	Volume	Ket
10	Permintaan Pembebasan untuk penambahan pembangunan pasar balanggala	Desa Balanggala (Dapil II)		1 Hektar	
11	Pengadaan alat-alat pembuatan kue di dusun 1	Desa Sumoli (Dapil II)		10 set	
12	Pengadaan alat-alat kripik pisang untuk ibu rumah tangga 1 kelompok terdiri dari 5 orang	Desa Sansarino (Dapil II)		1 Set	
13	Pengadaan koperasi nelayan yang ada di kelurahan muara toba 1 unit	Kelurahan muara toba (Dapil II)		1 Unit	
14	Bantuan kelompok UEP (usaha ekonomi produktif)	Kelurahan Ampana (Dapil II)		-	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mengemban amanah mandat Undang-Undang, Visi BKN Tahun 2020-2024 adalah melaksanakan Visi Presiden Nomor 8 (delapan) yaitu "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih Efektif, dan terpercaya" melaksanakan arahan presiden nomor 4 (empat) yaitu Penyederhanaan Birokrasi dan Agenda pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu "Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan "***Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."***

Terdapat dua nilai yang menjadi tujuan utama pembentukan karakter pegawai ASN, Yaitu : Profesional dan Bermartabat

3.1.2 Telaahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 20219-2024 yaitu :

"***Mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi untuk mencapai pemerintahan yang berkelas dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden :" Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong "***

Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tojo Una-Una telah sejalan dengan Visi Institusi Pusat tersebut.

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1.	Program penunjang pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- Nilai Sakip Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	1. Persentase PNS yang disesuikan dengan ANJAB 2. Persentase Pejabat Struktural/Fungsional yang sudah mengikuti diklat 3. Persentase penurunan Pelanggaran Disiplin ASN

3.1. Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah . Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2023
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Koperasi Dan UMKM	Persentase Koperasi yang berkualitas	65-70%
		Persentase Jumlah Usaha Kecil yang diberikan pendampingan	1,46%
2.	Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	8-9%
	Meningkatkan Kinerja Sektor Industri Dalam Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri	9-10%

Tabel 3.3
Sasaran

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2022
	Meningkatnya	1. Persentase PNS yang	78,50

	Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	disesuikan dengan ANJAB 2. Persentase Pejabat Struktural/Fungsional yang sudah mengikuti diklat 3. Persentase penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	51,08 70%

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	B
2	Meningkatnya Pelayanan Admnistrasi Kepegawaian dan Kualitas SDM Aparatur	Persentase PNS yang disesuikan dengan ANJAB	78,50%
		Persentase Pejabat Struktural/Fungsional yang sudah mengikuti diklat	51,08%
		Persentase penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	70%

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una 2021-2026, ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una ***adalah "TERWUJUDNYA KABUPATEN TOJO UNA-UNA TANGGUH, MAJU, DAN SEJAHTERA (TAMARA)"*** dan dari visi kabupaten Tojo Una-Una tersebut dijabarkan ke dalam 5 (Lima) misi Pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang terentaskan dari kemiskinan, tangguh bencana, dan lingkungan berkelanjutan.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang maju dan keluar dari daerah tertinggal.
3. Memantapkan trisula pembangunan ekonomi bertumpu pada sektor pertanian, perikanan-kelautan dan pariwisata yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan sumber daya manusia berdaya saing bertumpu pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan.
5. Mewujudkan aparatur dan sistem pemerintahan daerah yang profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis smart governance.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una mendukung pencapaian target pembangunan dari :

Misi III

"**Memantapkan trisula pembangunan ekonomi bertumpu pada sektor pertanian, perikanan-kelautan dan pariwisata yang berkelanjutan**".

Dalam tabel berikut disajikan faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD terhadap pencapaian visi dan program Kabupaten Tojo Una-Una pada Dinas

Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una.

Misi **"TERWUJUDNYA *KABUPATEN TOJO UNA-UNA TANGGUH, MAJU, DAN SEJAHTERA (TAMARA)*"**				
No	**Misi dan Program kepala daerah**	**Permasalahan Pelayanan SKPD**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
1	**Misi I** **"Memantapkan trisula pembangunan ekonomi bertumpu pada sektor pertanian, perikanan-kelautan dan pariwisata yang berkelanjutan"**			
	Pembentukan serta pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah	- Banyak koperasi belum melaksanakan administrasi usaha sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku	- Adanya ego sektoral dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UKM	- Tingginya komitmen Pemerintah kabupaten Tojo Una-Una terkait pemberdayaan koperasi dan UKM
		- Kurangnya minat masyarakat terhadap koperasi sebagai lembaga keuangan berbasis ekonomi kerakyatan	- Kurangya pemahaman masyarakat berkoperasi sebagai usaha bersama	- Dukungan pemerintah pusat, propinsi dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM cukup tinggi
		- Banyak koperasi sekunder yang berasal dari daerah lain membuka cabang yang tidak mamtuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku		
		- Sumber daya manusia pengelola koperasi masih rendah	- SDM aparatur pembina Koperasi dan UKM secara kwalitas dan kwantitas masih rendah	
		- Jangkauan pemasaran produk UKM masih terbatas		
		- Sulitnya KUMKM dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan		

3.2. TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

3.2.1 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 2020 – 2024, upaya pemberdayaan KUMKM secara Nasional di arahkan melalui pada tujuan Kementerian Koparasi UMKM tahun 2020 – 2024 adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"**.

Dengan mewujudkan visinya, maka Kementerian Koperasi dan UKM perlu menjalankan misi yang tepat melalui 2 misi pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan Koperasi Generasi Baru Yang Maju dan Modern.
2. Mewujudkan UMKM yang mampu bersaing di Pasar Domestik dan Global

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Koperasi dan UKM tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa rumusan tujuan strategis *(strategic goals)* organisasi. Rumusan tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang maju dan Modern

   Upaya yang dilakukan dengan Modernisasi Koperasi dan Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterprenuer).
2. Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan Global.

   Upaya yang dilakukan dengan mendorong peningkatkan Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC) serta peningkatan UMKN Naik Kelas.
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang profesional dan berkinerja tinggi.

3.2.2 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Sesuai dengan Renstra Kementerian Perindustrian RI 2020 – 2024, upaya pembangunan Industri secara Nasional di arahkan melalui Visi Pembangunan

Industri Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".**

Mengacu visi diatas maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan **Misi Kementerian Perindustrian** yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan industri Kementerian perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu **"Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional"**. untuk mencapai tujuan tersebut sasaran strategis pembanguanan industri adalah :

1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri
4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri
5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Meningkatnya Persebaran Industri
7. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif
8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian
11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
13. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

3.2.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Untuk menjembatani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020 -2024 dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional, Kementerian Perdagangan Memiliki Visi ***"Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***. Maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 – 2024, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa; untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas; melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020- 2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Dalam mendukung dan mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi dalam Agenda Pembangunan, Kementerian Perdagangan memiliki 12 arah kebijakan yang dijabarkan ke dalam pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor.
2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional.
3. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok.
4. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok.
5. Peningkatan pemberdayaan konsumen.
6. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur.
7. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri.
8. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).
9. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

10. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima.
11. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian.
12. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

1.3 VISI MISI DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

3.3.1 Visi

Dari telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una serta visi misi pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una periode 2021-2025, Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian serta isu-isu strategis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Tojo Una-Una, maka visi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una 2021-2025 adalah :

"SEJAHTERA BERSAMA PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM YANG HEBAT BERBASIS KOMODITI UNGGULAN"

Visi diatas diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta stakeholders terkait.

3.3.2 MISI

Sebagai upaya mewujudkan visi diatas, maka diperlukan misi sebagai arah dan memberikan batasan bagi tujuan pencapaian pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tojo Una-Una 2021 -2025 adalah:

1. **Membentuk dan mewujudkan koperasi dan UKM yang sehat dan berkualitas**

   Misi ini diarahkan pada kebijakan yang sistematis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kwalitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi.

2. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Penglola Koperasi dan UMKM Yang Kompeten**

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dari pengurus/pengelola KUMKM yang kompoten serta profesional. Afirmatif dari misi ini melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia KUMKM.

3. **Mengembangkan produk unggulan daerah Kabupaten Tojo Una- Una yang berdaya saing**.

Misi ini adalah pengembangan produk unggulan daerah kabupaten Tojo Una-Una melalui pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan akses permodalan bagi Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM, perluasan jaringan pemasaran dan distribusi usaha, peningkatan kualitas SDm Industri perdagangan, Koperasi dan UKM.

4. **Meningkatkan Kelancaran Distribusi, Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.**

Kelancaran distribusi barang di pasar merupakan sasaran yang hendak dicapai, efektifitas dan efisiensi distribusi produk-produk IKM, perlindungan dan pengembangan pasar tradisional, meningkatnya peran kemetrologian untuk meningkatkan produk IKM dalam perdagangan dalam negeri.

1.4 Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sebagai penjabaran dan penerapan misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una, maka diterapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. **Membentuk dan mewujudkan Koperasi dan UKM yang sehat dan berkualitas**

Tujuan :

Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian di Kabupaten Tojo Una-Una

Sasaran :

Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian di Kabupaten Tojo Una-Una

2. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang Kompeten**

   Tujuan :

   Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi UMKM

   Sasaran :

   Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi UMKM

3. **Mengembangkan produk Unggulan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang Berdaya Saing.**

   Tujuan :

   Meningkatkan jumlah Produk One Village One Produk (OVOP) berbasis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten Tojo Una-Una.

   Sasaran :

   Bertambahnya jumlah Produk One Villge One Produk (OVOP) berbasis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten Tojo Una-Una.

4. **Meningkatkan kelancaran distribusi, pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen**

   Tujuan :

   Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen

   Sasaran :

   a. Meningkatnya ketersedian sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan
   b. Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat

Berikut Tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una :

Tabel. T-III.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tojo Una-Una

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2019	2020
Terciptanya Administrasi Perkantoran yang baik	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	16,78%	15,62%
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Tercapainya sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,01%	6,15%
Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	23,35%	23,92%
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Tercapainya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Cakupan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	12,59%	12,90%
Terwujudnya iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Tercapainya iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Cakupan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	11,05%	11,32%
Terwujudnya Pengembangan Kewirausahaan yang Unggul bagi UMKM	Tercapainya Pengembangan Kewirausahaan yang Unggul bagi UMKM	Cakupan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	9,10%	9%
Meningkatnya Perkembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Tercapainya Perkembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Cakupan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0%	0%
Terciptanya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pedagang	Terciptanya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pedagang	Cakupan Perlindugan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	12,12%	12,41%
Meningkatnya dan Berkembangnya Eksport	Terciptanya Peningkatan dan Pengembangan Eksport'	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Eksport	23,35%	23,92%
Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terciptanya Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	14,94%	15,30%
Terwujudnya Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Terwujudnya Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Cakupan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	13,42%	13,74%

Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah	Tercapainya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Penembangan Industri Kecil dan Menengah	10,94%	11,20%
Berkembangnya Sentra-sentra Industri Potensial	Tercapainya Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Cakupan Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	17,02%	17,63%

1.5 Strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Strategi dan kebijakan umum masyarakat merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dari perubahan Renstra Dinaas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una. Berikut disajikan strategi dan kebijakan umum untuk tiap misi Pembangunan.

1. **Membentuk dan mewujudkan Koperasi dan UKM yang sehat dan berkwalitas**

   Strategi :

   a. Mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi.
   b. Penanganan koperasi tidak aktif.
   c. Meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   d. Meningkatkan pemahaman dan semangat masyarakat untuk berkoperasi.

   Kebijakan :

   a. Fasilitas pelayanan pendirian koperasi, perubahan badan hukum/ anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi.
   b. Peningkatan pembinaan pengawasan dan penyehatan koperasi.
   c. Peningkatan dan penilaian kesehatan koperasi.
   d. Pengembangan gerakan masyarakat sadar koperasi.

2. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi Dan UMKM Yang Kompeten**

   Strategi :

   Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengururs / pengelola KUMKM

   Kebijakan :

   Peningkatan keahlian dan keterampilan pengurus / pengelola koperasi dan UMKM melalui berbasis meanjerial, vokasial serta kompetensi.

3. **Mengembangkan produk unggulan daerah Kabupaten Tojo Una-Una Yang berdaya Saing**

   Strategi :

   a. Pengembangan program OVOP di kabupaten Tojo Una-Una melalui pengembangan Dsa Mandiri OVOP serta peningkatan sarana produksi OVOP dan Pengembangan Keterampilan Teknis melalui magang dan Bimbingan Teknis.

b. Peningkatan permodalan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melalui fasilitas temu pembiayaan, pendampingan penyusunan studi kelayakan usaha.

c. Peningkatan jaringan pemasaran dan distribusi produk Perindustrian, Perdagangan, Kopereasi dan UKM melalui pameran dan promosi serta peningkatan kwalitas desain produk.

Kebijakan :

a. Meningkatkan koordinasi dengan kecamatan dalam pengembangan Produk OVOP melalui fasilitas sarana produksi OVOP, serta pengembangan keterampilan teknis melalui magang dan bibingan teknis.

b. Peningkatan akses permodalan koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan melalui Fasilitas Temu Pembiayaan, Pendampingan Penyusuna Study Kelayakan Usaha.

c. Peningkatan jarinagan pemaasaran dan usaha produk koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan melaui pameran dan promosi serta peningkatan kwalitas desain produk.

d. Pembangunan pasar tadisional sebagai pusat penjualan produk koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

4. Meningkatkan kelancaran distribusi, pengamanan peerdagangan dan perlindungan konsumen

Strategi :

a. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat barang strategis serta system distribusi barang yang efektif dan efisien.

b. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen

c. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) sserta tertib barang dalam keadaan terbungkus.

Kebijakan :

a. Mewujudkan pasar tradisional yang sehat dan bersih melalui pembangunan atau revitalisasi pasar.

b. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien.

c. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen dan produsen.

d. Peningkatan tertib usaha dan tertin ukur/takar/timbang dan perlengkapanya.

1.6 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rancangan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disusun berdasarkan pedoman yang ada dan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dokumen Perencanaan, baik dari tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan sekretariat. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 1 (satu) tahun kedepan terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang di emban oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

   Dengan kegiatan sebagai berikut:

   a. Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah
   b. Koordinasi dan Pembinaan dalam daerah.
   c. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
   d. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

   Dengan kegiatan sebagai berikut:

   a. Pembangunan Gedung Kantor
   b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
   c. Pengadaan perlengkapan gedung/kantor.
   d. Pengadaan Peralatan gedung/kantor
   e. Pengadaan Meubelair
   f. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional.
   g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
   h. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor
   i. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor.

3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

   Dengan kegiatan sebagai berikut:

   a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. **Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif**

   Dengan kegiatan sebagai berikut:

   a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

   b. Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil dan Menengah

5. **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah**

   Dengan kegiatan sebagai berikut:

   a. Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Kewirausahaan

6. **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**

   Dengan kegiatan sebagai berikut:

   a. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi

   b. Pendataan Perkembangan Usaha Koperasi

   c. Pengembangan SDM Manajemen Koperasi

   d. Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi

7. **Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**

   Dengan kegiatan sebagai berikut:

   a. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

   b. Pembinaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah

   c. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam rangka peningkatan produk unggulan

   d. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah

8. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

b. Pelatihan Kerajinan

9. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan Sentra Industri Potensial

10. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

b. Tera/tera ulang

11. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Sosialisasi Pengembangan Komoditi Ekspor Daerah

12. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengembangan Pasar Lelang Daerah

13. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

Dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima dan Asongan

b. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

Tabel rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel- III. 2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perd
Dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Tojo Una-Una

OPD : DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	2	3	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pelayanan Perkantoran**			**1,868,950,400**	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Perjalanan Ke Luar Daerah	Palu, Jakarta dan Kota lainnya	51 Kali	Rp 347,350,000	DAU
	Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	12 Kecamatan	93 Kali	Rp 221,725,000	DAU
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah dan Jenis ATK disediakan	Ampana	12 Bulan	Rp 47,232,900	DAU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Perkantoran disediakan	Ampana	12 Bulan	Rp 1,252,642,500	DAU
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Rp 165,360,000**	
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	Ampana	Unit	Rp -	DAU
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional diadakan	Ampana	Unit	Rp -	DAU
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Ampana	Unit	Rp -	DAU
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan	Ampana	35 Unit	Rp 32,750,000	DAU
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Ampana	Unit	Rp -	DAU
	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Ampana	23 Unit	Rp 63,060,000	DAU
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Ampana	1 Unit	Rp 50,000,000	DAU
	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Ampana	16 Unit	Rp 5,000,000	DAU
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Kantor yang dipelihara	Ampana	37 Unit	Rp 14,550,000	DAU

3				**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Jumlah Peserta Pendidikan Formal**				**Rp**	**42,930,000**	
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Ampana	1	Org	Rp	42,930,000	DAU
				BIDANG KOPERASI DAN UMKM							
4				**Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**	**Cakupan Fasilitasi Pengembangan UKM untuk kemudahaan pelayanan bagi KUMKM**				**Rp**	**118,362,000**	
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang terfasilitasi	Kab. Tojo Una-Una	50	UMKM		118,362,000	DAU
				Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah UKM yang mendapatkan fasilitasi produksi	Kab. Tojo Una-Una		UMKM		-	DAU
5				**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**Cakupan SDM KUMKM dalam pengembangan kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan**				**Rp**	**125,242,000**	
				Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	Kab. Tojo Una-Una	30	org	Rp	125,242,000	DAU
6				**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**Cakupan peningkatan dan pemahaman tentang pengelolaan dan pengawasan koperasi**				**Rp**	**394,077,000**	
				Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	12 Kecamatan	40	koperasi	Rp	358,353,000	DAU
				Pendataan perkembangan usaha koperasi	Jumlah koperasi yang didata	12 Kecamatan		koperasi	Rp	-	DAU
				Pengembangan SDM Manajemen Koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan	12 Kecamatan	30	Pengurus / Anggota Koperasi	Rp	35,724,000	DAU
				Fasilitasi pengembangan usaha koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi	12 Kecamatan		koperasi	Rp	-	DAU
				BIDANG PERINDUSTRIAN							
7				**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	**Cakupan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**				**Rp**	**462,144,000**	
				Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Jumlah IKM yang terfasilitasi	Kab. Tojo Una-Una	15	IKM	Rp	237,857,000	DAU
				Pembinaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah	Jumlah IKM yang dibina Dewan Kerajinan Nasional Daerah	Kab. Tojo Una-Una	3	IKM	Rp	224,287,000	DAU
				Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam rangka peningkatan produk unggulan daerah	Jumlah IKM yang dibina dalam rangka peningkatan produk unggulan	Kab. Tojo Una-Una		IKM	Rp	-	DAU

				Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang dibina	Kab. Tojo Una-Una		IKM	Rp	-	DAU
7				**Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**	**Cakupan Peningkatan Kemampuan Teknologi**				**Rp**	**535,170,000**	
				Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang ditingkatkan kemampuan teknologinya	Kab. Tojo Una-Una	15	IKM	Rp	535,170,000	DAU
				Pelatihan Kerajinan	Jumlah Peserta Pelatihan Kerajinan	Kab. Tojo Una-Una		IKM	Rp	-	DAU
8				**Program Pengembangan Sentra sentra Industri Potensial**	**Cakupan Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial**				**Rp**	**-**	
				Pembangunan Sentra Industri Potensial	Jumlah Fasilitas Sentra Industri yang dibangun	Kec. Ampana Tete		Sentra	Rp	-	DAK/DAU
				BIDANG PERDAGANGAN							
9				**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	**Cakupan Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan**				**Rp**	**2,957,739,800**	
				Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah	Jumlah UPT Kemetrologiam yang dikembangkan	Kab. Tojo Una-Una	1	UPT	Rp	2,760,128,800	DAK/DAU
				Tera/tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	12 Kecamatan	500	UTTP	Rp	197,611,000	DAU
10				**Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**	**Cakupan Peningkatan Pengembangan Ekspor**				**Rp**	**83,674,200**	
				Sosialisasi Pengembangan Komoditi Ekspor Daerah	Jumlah Peserta sosialisasi Komoditi Eksport Daerah	Kec. Ratolindo	70	orang	Rp	83,674,200	
11				**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**	**Cakupan Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**				**Rp**	**90,117,000**	
				Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Jumlah Lokasi Kegiatan Pasar Lelang/Bersubsidi	12 Kecamatan	13	Lokasi	Rp	90,117,000	DAU
12				**Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan**	**Cakupan Pembinaan Pedagang Kakilima dan asongan**				**Rp**	**5,158,305,000**	
				Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan asongan	Jumlah Organisasi Pedagang Kakilima dan Asongan yang dibina	Kab. Tojo Una-Una		Pasar	Rp	-	DAU
				Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan.	Jumlah Pasar yang di bangun / Rehab	Kec. Togean, Kec. Batudaka, Kec. Ampana Tete dan Kec. Borneang	4	Pasar	Rp	5,158,305,000	DAU/DAK
									Rp	**12,002,071,400**	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan RKPD Kabupaten TojoUna-Una Tahun 2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una, penyusunan Perubahan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi Kepala Daerah periode 2021-2026 yaitu: " **TERWUJUDNYA KABUPATEN TOJO UNA-UNA TANGGUH, MAJU, DAN SEJAHTERA (TAMARA)**

LAMPIRAN – LAMPIRAN

RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

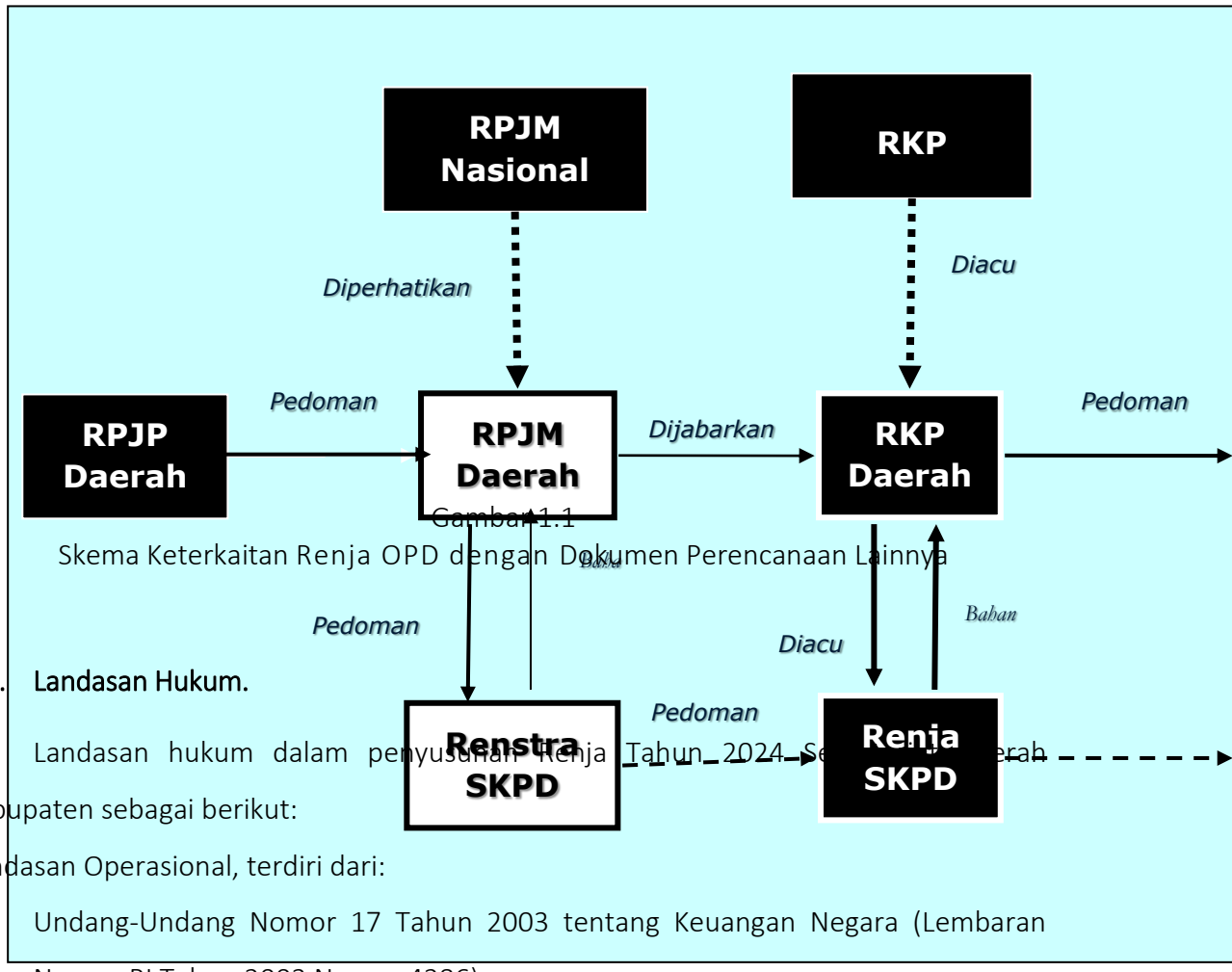
Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una–Una Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah sekretariat daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una–Una merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Penyusunan rancangan Renja sekretariat daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai unit kerja yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi dalam menunjang tugas pemerintahan secara umum, termasuk dalam urusan perencanaan pembangunan daerah, maka Sekretriat daerah memiliki kapasitas sebagai *quality cotroll* dalam tahapan proses perencanaan pembangunan, mulai dari tahapan penyusunan formulasi kebijakan sampai dengan evaluasi implementasi kebijakan. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan sekretariat daerah yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) sekretariat daerah Tahun 2024 sebagai dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan fisik dan non fisik Sekretariat Daerah Tahunan, sebagai penjabaran Renstra Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan.

Keterkaitan antara dokumen Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1.1
Skema Keterkaitan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum.

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai berikut:

Landasan Operasional, terdiri dari:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran RI Nomor 4438);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019.
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
11) Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 24);

12) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 9).
14) Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 23 Tahun 2019 tentang tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat daerah (berita daerah kabupaten tojo una-una tahun 2019 nomor 23).
15) Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor . . . . tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 20. . . .

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Tahun 2024 sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja (bagian-bagian) yang ada pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD yang mendorong prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja.

1) Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten;
2) Terwujudnya keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten dengan perencanaan tahunan; dan
3) Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan

dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD);

4) Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD), analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD Sekretariat Daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB 2
Evaluasi Renja Tahun Lalu

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya, yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA), serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.

Dalam penyusunan Renja tahun anggaran berikutnya, memerlukan data dan informasi bersumber dari evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan penganggaran pada tahun anggaran sebelumnya untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian target capian dan indikator. Kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Sekretariat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 dan perkiraan capaian pada Rencana Kerja Tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat daerah tahun 2022, dan realisasi Renstra Sekretariat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Sekretariat Daerah disajikan dalam bab ini. Adapun tabel evaluasi pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
2021 s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerinahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program/Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra sd. Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah**	100 %	84 %	100 %	97,5 %	97,5%	100 %	100 %	100%
	Administrasi Tata Pemerintahan - Penataan Administrasi Pemerintahan - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	- Jumlah kecamatan yang Melakukan Tertib Administrasi Kecamatan	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	100%	12 Kec	12 Kec	100%
		- Persentase penyelesaian konflik pertanahan dan perbatasan	100 %	70 %	100 %	50 %	50%	100 %	60%	60%
		- Tingkat tertib pengelolaan barang /asset daerah	100 %	95 %	100 %	95 %	95%	100 %	95%	90%

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerinahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program/Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra sd. Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Terlaksananya Pengadaan Barang /jasa sesuai Peraturan Perundanng-undangan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Electronik - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase OPD dan Instansi lainnya dalam Pelayanan Pengadaan barang/Jasa	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemda	100 %	86,17 %	100 %	94,1 %	94%	100 %	100%	95%
	Penataan Organisasi - Peningkatan Kerja Dan Reformasi Birokrasi	- Persentase SKPD yang menyusun dan menyampaikan	90 %	82 %	90 %	85 %	94,4%	90 %	90%	100%

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerinahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program/Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra sd. Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	- Koordinas dan Penyusunan Laporan Kenerja Pemerintah Daerah	LAKIP tepat waktu - Nilai Evaluasi SAKIP Pemda 2021 - Persentase penyerapan anggaran pembangunan	>60 Nilai	55,2 Nilai	>60 Nilai	57,61 Nilai	96%	>60 Nilai	>60 Nilai	100%
	Program Perekonomian Dan Pembangunan				100 %	92 %	92%	100 %	100%	100%
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Fasilitas Penyususnan Program Pembangunan - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	**Rata-rata nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik**	85 Rata2	80 Rata2	85 Rata2	81.65 Rata2	96%	85 Rata2	85	100%

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerinahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program/Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra sd. Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
	Penataan Organisasi - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana									

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerinahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program/Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra sd. Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Tertatanya organisasi perangkat daerah beserta produk-produk hukum sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemda dan masyarakat	100 %	88,3 %	100 %	83,3 %	83,3%	100 %	100%	100%
	Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum - Fasilitasi Bantuan Hukum - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	- Jumlah Produk Hukum Daerah yang dihasilkan a. Perda b. Perbub c. Kepbub - Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang disosialisasikan	5 Perda 10 Perbub 35 Kepbub 10 Perda	7 Perda 13 Perbub 261 Kepbub 2 Perda	5 Perda 10 Perbub 35 Kepbub 10 Perda	9 Perda 42 Perbub 390 Kepbub 0 Perda %	180% 420% 111% 0	7 Perda 15 Perbup 105 Kepbup 5 Perda	7 Perda 15 Perbup 105 Kepbup 5 Perda	100% 100% 100% 100%
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerinahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program/Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra sd. Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kabupaten									
	Penataan Organisasi - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	- Persentase informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang disebarluaskan - Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi	75 % 100 %	56,2 % 100 %	75 % 100 %	35 % 100 %	46,6% 100%	75 % 100 %	75% 100%	100% 100%
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Terwujudnya sinergitas dalam pembangunan daerah	100 %	92 %	100 %	50 %	50 %	100 %	100%	100%
	Pelaksaaan Kebijakan Perekonomian - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil - Koordinasi,Sinkronis	- Rasio Kesesuaian Pembangunan daerah dengan perencanaan yang telah ditetapkan - Jumlah Dokumen Potensi SDA - Persentase	100 % 3 7,9 Dok	100 % 0 Dok	100 % 3 Dok	100 % 0 Dok	100 % 0 %	100 % 0	100% 0	100% 0

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerinahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program/Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra sd. Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	asi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Pertanian,Kehutanan dan Perikanan - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Energi dan Air	Masyarakat dibawah Garis Kemiskinan	%	0 %	0 %	0 %	0%	0	0	0
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Optimalnya pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	10 %	100%	100%
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Jumlah kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati	125 Kali	120 Kali	125 Kali	125 Kali	100%	48 Keg	48 Keg	100%

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerinahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program/Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra sd. Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah									
	Fasilitas KerumahTanggaan Sekretaris Daerah - Penyediaaan Kebutuhan Rumah Tngga Kepala	Capaian pemenuhan kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - Jumlah kebutuhan yang	100 % 27 Keg	100 % 18 Keg	100 % 27 Keg	100 % 27 Keg	100% 100%	100 % 7 Paket	100% 7 Paket	100% 100%

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerinahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program/Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra sd. Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tngga Wakil Kepala Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	dipenuhi								
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Fasilitasi Keprotokolan - Fasilitas Komunikasi Pimpinan - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Capaian pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Jumlah kegiatan keprotokolan yang difasilitasi - jumlah kegiatan pimpinan yang dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan - Jumlah tugas-tugas pimpinan yang dikomunikasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 % 48 Keg 24 Keg 48 Keg	100% 48 Keg 24 Keg 48 Keg	100% 100% 100% 100%

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerinahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program/Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra sd. Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Meningkatnya kompetensi aparatur								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapanny a - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - Bimbingan Teknis Implementasi	- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural - Persentase PNS yang melanggar aturan semakin berkurang	2 Org 0,6 %	0 Org 0,6 %	2 Org 0,6 %	0 Org 100 %	0%	5 Org	5 org	100%

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerinahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program/Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra sd. Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan									
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Tradisi Kehidupan Masyarakat Yang Beretika	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%
	Pelaksanaan Kebijakan Dan Kesejatraan Rakyat - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat - Pelaksanaan	Terwujudnya kerukunan antar umat beragama - Jumlah pembinaan keagamaan - Jumlah rumah ibadah yang diberikan bantuan pembangunan - Jumlah petugas rumah ibadah	100 % 25 Kali 50 Uni 1230 org	100 % 20 Kali 10 Unit 246 org	100 % 5 Kali 10 Unit 246 org	100 % 5 Kali 23 Unit 229 org	100% 100% 100% 93%	100 %	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerinahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program/Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra sd. Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kebijakan Evaluasi, dan capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	yang diberikan insentif								

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM Sekretariat Daerah maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas pokok fungsi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Sekretariat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Adapun indikator yang akan diuji dalam kajian ini adalah meliputi indicator kinerja yang mengacu pada pencapaian sasaran, yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta norma standar pelayanan yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, dan mengacu pada RKPD dan RPJMD.

Keberhasilan Kinerja SKPD dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Tabel pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Umum disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kabupaten Tojo Una-Una

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD (2026)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisai		Realisai capaian	Tingkat capian (%)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		SEKRETARIAT DAERAH									
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**									
1,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	***Indeks Reformasi Borokrasi***	**A Kategori**		B	B	100			**BB Kategori**
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*capaian pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah*	100 %							100 %
	4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan*	119 Orang/bulan		101	404	400	101		119 Orang/bulan
	4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi*	12 Dokumen					332		12 Dokumen
	4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Laporan		9	9	100	9		5 Laporan
	4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi*	12 Dokumen		10	10		10		12 Dokumen
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian pengelolaan adminsitrasi kepegawaian*	100 %					100		100 %

SKPD
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD (2026)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisai		Realisai capaian	Tingkat capian (%)
	4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang*	13 Paket		15	31	206,67	2500		13 Paket
	4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang*	25 Paket		25	25	100	4500		25 Paket
	4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang*	16 Paket		16	16	100	21		16 Paket
	4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang*	5 Paket		16	32	200	5		5 Paket
	4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan		150	150	100	16		12 Laporan
	4.01.01.2.06.	Penyelenggaraan Rapat	*Jumlah Laporan*	-					150		-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD (2026)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisai		Realisai capaian	Tingkat capian (%)
	4.01.01.2.07.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-		10	10	100	10		-
	4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan*	1 Unit					3		1 Unit
	4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	*Jumlah Unit Kendaraan*	1 Unit					1		1 Unit
	4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung*	3 Unit		5	5	100	5		3 Unit
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai*	98 %					98		98 %
	4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat*	4 Laporan		12	12	100	12		4 Laporan
	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa*	3 Laporan		3	6		36		3 Laporan
	4.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa	-	-		114	110	96,49	8		-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD (2026)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisai		Realisai capaian	Tingkat capian (%)
	4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	15 Unit		15	15	100	55		15 Unit
	4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	149 Unit		-	-		249		149 Unit
	4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	67 Unit		67	66	98,51	397		67 Unit
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor*			9	9	100			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD (2026)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisai		Realisai capaian	Tingkat capian (%)
	4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	2 Orang/Bulan		2	2	100	2		2 Orang/Bulan
	4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	4 Orang		4	4	100	8		4 Orang
	4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	2 Orang/Bulan		48	100	208	48		2 Orang/Bulan
	4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	4 Paket		4	4	100	4		4 Paket
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Capaian pemenuhan kebutuhan Kerumahtanggaan*	100 %					100		100 %

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD (2026)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisai		Realisai capaian	Tingkat capian (%)
	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				26	26	100			
	4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				13	13	100			
	4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				26	26	100			
	04.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan									
	4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan*	21	Dokumen	21	21	100	25		21 Dokumen
	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*	21	Dokumen	48	48	100			
	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	6	Dokumen	6	6	100	6		6 Dokumen
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	*Persentase Dukungan Strategis Bidang Pemerintahan dan*	100	Persen						100 Persen
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Capaian kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang*	100 %							100 %

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD (2026)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisai		Realisai capaian	Tingkat capian (%)
	4.01.02.2.02.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah*	28 Keluarga					0		28 Keluarga
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Capaiann produk hukum daerah yang difasilitasi dan dikoordinasikan*	100 %					100		100 %
	4.01.02.2.03.	Fasilitasi Penyusunan	*Jumlah Produk Hukum*	50 Dokumen		36	322	894.44	49		50 Dokumen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD (2026)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisai		Realisai capaian	Tingkat capian (%)
	4.01.02.2.04.03	Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama*	5 Laporan					6		5 Laporan
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama	*Persentase kerjasama*	100 %					100		100 %
3,	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Persentase Kebijakan Strategis Di Bidang Perekonomian dan Pembangunan***	**100 Persen**							**100 Persen**
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan	*Capaian pelaksanaan dan*	100 %					100		100 %

Informasi Hukum yang Didokumentasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD (2026)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisai		Realisai capaian	Tingkat capian (%)
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Capaian penyusunan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan*	100 %							100 %
	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah*	4 Dokumen		4	4	100	4		4 Dokumen
	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*	6 Laporan		6	6	100	6		6 Laporan
	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan*	5 Laporan		5	5	100	5		5 Laporan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD (2026)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd. Tahun 2021	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun berjalan 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisai		Realisai capaian	Tingkat capian (%)
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Persentase kebijakan pengelolaan sumber daya alam*	100 %		-	-		100		100 %
	4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi Pengadaan Secara	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan*	3 Dokumen		119	1.208	1015	2	119	3 Dokumen

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Sekretariat daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Sekretariat Daerah berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Tojo Una-Una

PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Lokasi	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	target	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
SEKRETARIAT DAERAH KA BUPATEN TOJO UNA-UNA				**31.458.501.680**				**41.322.908.950**
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Strategis Di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	100 %	3.188.527.997	DAU		100 %	3.279.863.497
Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian kebijakan daerah bidang tata pemerintahan yang diimplementasikan	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	100 %	198.936.491	DAU		100 %	198.936.491
Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	12 Dok	123.385.517	DAU		12 Dok	123.385.517,00
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	21 Dok	34.650.164	DAU		21 Dok	34.650.164,00
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible] Dok	40.900.810	DAU		[illegible] Dok	40.900.810,00
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	100 %	2.754.304.579	DAU		100 %	2.745.640.079
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible] Dok	450.604.579	DAU		[illegible] Dok	450.604.579,00
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible] Dok	1.000.000.000	DAU		[illegible] Dok	1.000.000.000,00

PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Lokasi	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	target	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	6 Dok	1.303.700.000	DAU		6 Dok	1.203.700.000,00
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								41.335.500,00
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing								50.000.000,00
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Capaian produk hukum daerah yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	00 %	183.208.467	DAU		00 %	183.208.467
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	2	30.963.931	DAU		2,00	30.963.931,00
Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	1	121.526.743	DAU		1	121.526.743,00
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	8	30.717.793	DAU		8	30.717.793,00
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persenatse kerjasama sesuai kebutuhan yang dilaksanakan	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	100 %	52.078.460	DAU		100 %	152.078.460
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	4 Dok	35.413.353	DAU		4 Dok	35.413.353,00
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Se-Kabupaten Tojo Una-Una		0	DAU			100.000.000,00

PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Lokasi	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	target	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible] Dok	16.665.107	DAU		[illegible] Dok	16.665.107,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Strategis Di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	100 %	983.732.442	DAU		100 %	958.139.712
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perekonomian	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible]00 %	127.850.181	DAU		[illegible]00 %	127850181
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya [illegible] Koordinasi, [illegible] Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible] Dok	28.127.040	DAU		[illegible] Dok	28.127.040,00
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya [illegible] Pengendalian [illegible] dan [illegible] Distribusi Perekonomian	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible] Dok	40.912.058	DAU		[illegible] Dok	40.912.058,00
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya [illegible] Perencanaan [illegible] dan [illegible] Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible] Dok	19.177.527	DAU		[illegible] Dok	19.177.527,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Terlaksananya [illegible] Koordinasi, [illegible] Sinkronisasi [illegible] dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible] Dok	19.177.527	DAU		[illegible] Dok	19.177.527,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Terlaksananya [illegible] Koordinasi, [illegible] Sinkronisasi [illegible] dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible] Dok	20.456.029	DAU		[illegible] Dok	20.456.029,00
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan pengelolaan sumber daya alam	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible]00 %	20.774.440	DAU		[illegible]00 %	50774440
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pangan	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible] Dok	1.755.586	DAU		[illegible] Dok	21.755.586,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Energi Lingkungan Hidup Kehutanan	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible] Dok	11.703.910	DAU		[illegible] Dok	11.703.910,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible] Dok	7.314.944	DAU		[illegible] Dok	17.314.944,00

PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Lokasi	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	target	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible] Dok	16.665.107	DAU		[illegible] Dok	16.665.107,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Strategis Di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	100 %	983.732.442	DAU		100 %	958.139.712
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perekonomian	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible]00 %	127.850.181	DAU		[illegible]00 %	127850181
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian penyusunan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible]00 %	280.867.037	DAU		[illegible]00 %	225.274.307
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible] Dok	107.690.856	DAU		[illegible] Dok	57.690.856,00
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible]6 Dok	173.176.181	DAU		[illegible]6 Dok	103.176.181,00
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible]5 Dok		DAU		[illegible]5 Dok	64.407.270,00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan Jasa	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible]00 %	554.240.784	DAU		[illegible]00 %	554.240.784
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible]32 Dok	513.480.121	DAU		[illegible]32 Dok	513.480.121,00
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible]19 Dok	17.930.522	DAU		[illegible]19 Dok	17.930.522,00
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan AdvokasiPengadaan Barang dan Jasa	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	[illegible],00 Dok	22.830.141	DAU		[illegible]2,00 Dok	22.830.141,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	CC	27.286.241.241	DAU		CC	37.084.905.741
Penataan Organisasi	Capaian PD yang menyusun LKJ tepat waktu	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	100 %	145.752.290	DAU		100 %	-

PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Lokasi	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	target	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	26	59.571.431	DAU		26	-
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	15	7.287.614	DAU		15	-
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	26	23.014.457	DAU		26	-
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	13	27.297.173	DAU		13	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	26	28.581.615	DAU		26	-
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Capaian pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	%	124.294.682	DAU		%	-
Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	48	58.654.265	DAU		48	-
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	24	25.532.108	DAU		24	-
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	48	40.108.309	DAU		48	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Program Sesuai Target yang telah ditetapkan	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	%	119.685.476	DAU		%	109.685.476
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Se- Kabupaten Tojo Una-Una		59.437.180	DAU			49.437.180,00

PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Lokasi	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	target	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Se-Kabupaten Tojo Una-Una		22.267.407	DAU			22.267.407,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Se-Kabupaten Tojo Una-Una		37.980.889	DAU			37.980.889,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	%	11.695.710.160	DAU		%	11.705.710.160
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Se-Kabupaten Tojo Una-Una		11.675.033.720	DAU			11.675.033.720,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Se-Kabupaten Tojo Una-Una		-	DAU			10.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Se-Kabupaten Tojo Una-Una		20.676.440	DAU			20.676.440,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian pengelolaan adminsitrasi kepegawaian	Se-Kabupaten Tojo Una-Una	100 %	72.017.161	DAU		100 %	72.017.161
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Se-Kabupaten Tojo Una-Una		7.921.887	DAU			7.921.887,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Se-Kabupaten Tojo Una-Una		64.095.274	DAU			64.095.274,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian pengelolaan administrasi umum PD	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	%	2.433.522.287	DAU		%	5.906.522.287
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	13	53.673.477	DAU		13	53.673.477,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	17	95.775.143	DAU		17	95.775.143,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	15	25.473.742	DAU		15	25.473.742,00

PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Lokasi	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	target	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	25	592.627.622	DAU		25	3.592.627.622,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	16	114.141.175	DAU		16	114.141.175,00
Penyediaan Bahan/Material							6 Paket	20.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	16	303.840.128	DAU		16	803.840.128,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	150	1.247.991.000	DAU		150	1.200.991.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	%	204.099.919	DAU		%	2.240.945.372
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	1	12.245.995	DAU		1	24.350.500,00

PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Lokasi	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	target	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	% 92	6.971.993.734	DAU		% 92	11.971.993.734
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	12	12.261.788	DAU		12	12.261.788,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	3	106.383.129	DAU		3	2.106.383.129,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Se- Kabupaten Tojo Una-Una		1.406.868.123	DAU			1.406.868.123,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	5	54.150.412	DAU		5	54.150.412,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Se- Kabupaten Tojo Una-Una		872.968.218	DAU			872.968.218,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Se- Kabupaten Tojo Una-Una		4.679.895.605	DAU			9.679.895.605,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pemeliharaan barang milik daerah	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	100 %	821.320.253	DAU		100 %	445.275.733
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	59	246.609.089	DAU		59	246.609.089,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	15	127.114.895	DAU		15	127.114.895,00

PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Lokasi	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	target	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KD/WKD	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	100 %	3.624.913.043	DAU		100 %	3.604.913.043
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	2	572.103.043	DAU		2	572.103.043,00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	4	150.000.000	DAU		4	150.000.000,00
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	4	140.000.000	DAU		4	120.000.000,00
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	48	2.762.810.000	DAU		48	2.762.810.000,00
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Capaian pemenuhan kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	100 %	1.072.932.236	DAU		100 %	1.027.842.775
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	7	446.104.401	DAU		7	446.104.401,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	7	357.973.257	DAU		7	357.973.257,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Se- Kabupaten Tojo Una-Una	7	268.854.578	DAU		7	223.765.117,00

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Sebagai instansi induk dalam sebuah wilayah kabupaten, Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una masih perlu meningkatkan kapasitas baik dari segi kelembagaan maupun sumberdaya manusia. Sejak dibentuk pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005, hingga saat ini Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-una terus melakukan pembenahan agar dalam melaksanakan keseluruhan tugas pokok dan fungsi akan semakin optimal. Peningkatan kemampuan baik secara kelembagaan maupun sumberdaya manusia tentu saja harus didukung oleh ketersediaan sumberdaya lain yang memadai, sehingga *grand strategy* perangkat daerah yang telah disusun dalam melasanakan tugas dan fungsi dapat terlaksanan sesuai harapan.

2.5. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka menindaklanjuti Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan umum dan akan dilaksanakan secara nyata dan berkelanjutan. Untuk itu Sekretariat Daerah Kabupaten akan mendukung Visidan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu Visi Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una.

Visi Kabupaten Tojo Una-Una yang akan diwujudkan pada akhir periode perencanaan tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una pada umumnya, sehingga diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Sehingga kebijakan Visi pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

TERWUJUDNYA KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TANGGUH, MAJU, DAN SEJAHTERA (TAMARA)

Adapun penjelasan maknanya adalah adalah terwujudnya sebuah tatanan masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang tangguh dalam menghadapi krisis, peluang dan tantangan baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun bencana yang dapat menjadi modal dasar untuk menuju wilayah yang berkembang maju dan meninggalkan ketertinggalan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan serta terwujudnya pembangunan wilayah yang berkelanjutan dalam mewujudkan Visi tersebut, maka motto yang dipilih sebagai ikon semangat adalah, GAPAI TAMARA.

TAMARA adalah seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan kebaikan bersama di semua komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una secara utuh, bersinergi dan saling melengkapi. Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan.

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan untuk mewujudkan Visi. Dalam implementasinya sebuah pernyataan misi merupakan hasil kompromi intepretasi Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk di tuju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta memberikan arah bagaimana cara bekerja, sehingga berisi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Melalau PD, selanjutnya Visi dan Misi pemerintah daerah dapat dijabarkan ke dalam program kegiatan teknis dengan memerhatikan sasaran, tujuan, serta strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan dalam RPJMD. Adapaun Misi yang menjadi tugas PD sekretariat daerah terdapat dalam Misi 5 (lima) yaitu "**Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart Governance**".

Misi 5 (lima) dengn konsep *Smart Governance* dipilih sebagai strategi pelayanan yang lebih ditekankan pada peningkatan peran pemerintah sebagai pengayom dan pemberi pelayanan kepada masyarakat, disamping itu juga terdapat peran masyarakat sebagai partisipan dan objek pembangunan *(Konsep Kota/Kabupaten Madani)*. Pemerintahan yang cerdas adalah pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Kearifan lokal juga mengindentifikasikan seberapa *smart* pemerintah dalam pengelolaan pemerintahannya.

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. *Smart governance* sebagai salah satu indikator penting bagi Kabupaten pintar untuk mewujudkan aparatur dan sistem pemerintahan daerah yang profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik meng-haruskan adanya beberapa aspek penting dalam pemerintahan. Tiga aspek utama dalam *smart governance* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan, mewujudkan transparansi dan keterbukaan data, serta merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga melalui optimalisasi penggunaan teknologi dan adanya Inovasi pembangunan yang diinisiasi oleh Perangkat daerah dan Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una.

Dalam mencapai apa yang menjadi maksud utama misi ke-lima dalam RPJMD 2021 – 2026, PD Sekretariat daerah Kabupaten Tojo Una-Una memiliki peran strategis dengan melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitator, dan dinamisator dalam system pemerintahan daerah, sehingga dengan kapasitas dimaksud, Sekretariat Daerah menjaga stabilitas kerja seluruh perangkat daerah dalam mensinergikan kegiatan unutk tercapainya program pembagunan serta peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat merupakan prasyarat utama untuk mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata sesuai dengan harapan seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang berorientasi kepada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan publik prima. Dalam penjabarannya maka perlu pengembangan melalui pendekatan :

1. Tertib Administrasi

   Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya. Tertib administrasia adalah proses administrasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

2. Pelayanan Masyarakat

   Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa negara berkewajiban melayani setiap negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan pendudukan atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam konteks pelayanan pemerintahan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah KabupatenTojoUna-Una, ada dua sasaran pelayanan yang diberikan meliputi :

1) **Pelayanan internal**; yaitu pelayanan terhadap **unsur aparatur** penyelenggara pemerintahan daerah;
2) **Pelayanan eksternal**; yaitu pelayanan kepada **masyarakat** dan kepada **mitra kerja** pemerintah daerah.

3. Efisien

   Kemampuan untuk bekerja dengan baik dan menghasilkan hasil yang maksimal dengan menggunakan waktu, uang dan hal lainnya secara minimal.

4. Efektif

   Perbandingan input dan output dalam berbagai aktivitas kegiatan sampai dengan pencapaian tujuan *(goal)* terpenuhi yang bias dari berapa banyaknya kuantitas dan kualitas hasil kerja maupun batas waktu yang sudah ditetapkan/ditargetkan sebelumnya.

5. Akuntabel Capaian sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawab-kan secara luas.

6. Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart Governance menjadi tujuan akhir (*last goal*) dari seluruh rangkaian kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

2.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis merupakan sebuah kondisi/ perkembangan/ peristiwa/ trend yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi-strategi organisasi. Isu Strategis tidak harus identik dengan masalah, karena kondisi yang digambarkan dalam Isu Strategis tersebut tidak selalu bermuatan/bernuansa negatif. Isu Strategis akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat dari organisasi.

Dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2021 – 2026 telah mengemukakan secara umum temuan-temuan masalah pokok pada pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, selanjutnya menjadi tugas semua unsur pemerintah dan masyarakat kembali menyusun strategi dengan memperhitungkan peluang dan sumber daya yang ada, sehingga masalah penyebab gap dalam pencapaian tujuan bisa diperkecil atau

bahkan dieliminir. Kesimpulan umum masalah yang harus menjadi perhatian semua pihak yaitu:

a. Tingginya angka kemiskinan di wilayah kepulauan dan di wilayah Komunitas Adat Terpencil (KAT);
b. Aksesibilitas masih sulit dan timpangnya infrastruktur antara wilayah daratan dan kepulauan
c. Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah
d. Pemanfaatan trisula pembangunan belum optimal (pariwisata, perikanan-kelautan, dan pertanian)
e. Kemampuan fiskal yang rendah dalam membiayai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una
f. Degradasi lingkungan hidup dan meningkatnya resiko bencana alam dan non alam
g. Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik.

Temuan masalah pokok pelaksanaan program pembangunan tersebut sangat dipengaruhi oleh banyak fakor, termasuk kinerja Perangkat Daerah masih kurang optimal yang pada ujungnya memengaruhi kinerja pemerintah secara keseluruhan. Selain uraian masalah, isu strategis yang diangkat dalam RPJMD 2021 – 2026 yang menjadi perhatian semua pihak implementor program pembangunan di tingkat daerah di antaranya isu kebijakan pembangunan nasional yang diarahkan kepada 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dan 7 (tujuh) agenda pembangunan.

Sebagai bagian dari subsistem negara, Selanjutnya program pembangunan Kabupten Tojo Una-Una ikut mendorong rencana pembangunan wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024 dengan tema pembangunan wilayah yaitu ***"****Pusat lumbung pangan (padi dan jagung) nasional, perkebunan kakao, serta pengembangan industri pengolahan****",*** dimana sektor utama pendukung pembangunan wilayah difokuskan pada pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil, dan konstruksi. Dan untuk spesifik Wilayah Sulawesi Tengah khususnya Kawasan Tojo Una-Una dititik beratkan pada sektor pertambangan, perkebunan, perikanan peternakan, pariwisata dan pertambangan yang selanjutnya difokuskan pada kegiatan pertanian, perikanan, Pariwisata, perkebunan dan industry, sehingga sinkron dengan Trisula

pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una yaitu pariwisata, Kelautan perikanan, dan pertanian.

Trisula pembangunan merupakan sector yang diyakini memiliki potensi yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan kesehateraan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga memerlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan dan pengembangannya. PD yang menjadi penanggung jawab terhadapa pengelolaan dan pengembangan masing-masing sector menyusun satrategi teknis dengan mengelolah sumber daya secara efektif dan efisien. PD Sekretaris Daerah Kabupaten memiliki peran untuk dan memberikan pelayanan yang sifatnya administrative, mengoordinasikannya dengan sector pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan, serta pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program untuk menjaga konsistensi kinerja dalam pelaksanaannya sesuai target capaian yang telah dirumuskan.

Adapun isu global yang menjadi perhatian utama mencakup perekonomian global, Pandemik yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan dan social kemasyarakatan, pencapaian 6 (enam) aspek yang menjadi konsern SDG's, isu lingkungan hidup, arus globalisasi informasi dan dan ekonomi digital, ketahanan pangan, ancaman krisis energi dunia, serta ancaman bencana alam global.

Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program pembangunan sebagaimana telah dianalisis dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una secara umum dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok menurut sumber masalah, yaitu dari unit pelaksana program pembangunan dan dari kelompok sasaran pembangunan. Dari Unit pelaksana program sendiri, masalah yang ada berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, baik manusia, anggaran dan sarana dan prasarana, serta konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan program pembangunan. Adapun permasalah yang muncul dari sasaran pelaksanaan program pembangunan mencakup masyarakat dan kelompok sasaran tertentu lainnya, di antaranya berakitan dengan pola pikir dan rendahnya pemahaman terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memerhatikan permasalahan dan potensi yang dimiliki, dalam RPJMD Kabupaten telah menyusun sasaran dan starategi dalam pelaksanaan pembangunan yang disesuikan dengan bidang penanggung jawab program pembangunan, diuraikan dalam bentuk rekomendasi program dan isu strategis RPJMD 2021-2026. Terdapat 17 isu strategis yang telah diidentifikasi yang mana salah stau isu strategis memiliki

relevansi kuat dengan tugas Perangkat Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten untuk diinterfensi langsung, yaitu " *Kualitas Pelayanan Publik Belum Maksimal* ". Isu ini diangat karena sangat memengaruhi banyak aspek terhadap pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam mewujudkan Misi ke 5 (lima) dalam RPJMD sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk penanganannya.

Adapun kondisi capaian kinerja Sekretariat Daerah Kab. Tojo Una-Una tergambar bahwa kualitas penerapan akuntabilitas kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini tampak dengan peningkatan nilai SAKIP dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah berupaya memperbaiki rumusan tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil diikuti dengan indikator kinerja,baik pada Pemerintah Daerah dan beberapa Perangkat Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaran pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan (kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Adapun dari sisi realisasi anggaran, Pada tahun anggaran 2022, Alokasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebesar Rp. 46.519.126.306,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.591.827.882,- atau dengan persentase 96%. Pengelolaan anggaran belanja yang dikelola oleh Sekretariat Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja tidak langsung baik yang diperuntukkan untuk KDH/WKDH dan belanja tidak langsung PNS di Kelola langsung oleh Bendahara Sekretariat Daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah, sedangkan anggaran belanja langsung merupakan anggaran pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 10 Bagian di lingkup Sekretariat Daerah.

BAB 3
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai rencana strategis perubahan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan, yaitu untuk tahun 2021 - 2026 yang dimulai tahun anggaran 2022 pada penetapan RKPD, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten TojoUna-Una yang mencakup tujuan, sasaran, program dan kegiatan ditahun 2023, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan

tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional Berdasarkan hasil evaluasi RKP 2021, bahwa Prioritas Nasional diarahkan kepada upaya Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya sehingga perlu terus ditingkatkan kinerjanya. Maka, RKP 2021 mengusung tema **"***Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas***"**. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT). Oleh karena itu, di 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju.

Agar RKP 2021 memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, maka untuk pertama kalinya, Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP. Beberapa *Major Projects* yang mendukung langsung Tema RKP 2021 akan diprioritaskan, antara lain :

1) 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai;
2) 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter;
3) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas :
    a. Makanan dan Minuman,
    b. Tekstil dan Pakaian Jadi,
    c. Otomotif,
    d. Elektronik,
    e. Kimia, dan
    f. Farmasi;
4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; dan

5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu.

RPJMN 2020-2024 dengan visi "*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*", diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu :

1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,
4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan
7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah juga akan ditargetkan akan dicapai pada 2024, antara lain :

i. Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,0 – 7,0 persen;
ii. Pertumbuhan ekonomi 6,0 persen;
iii. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54;
iv. Gini rasio mencapai 0,360 – 0,374;
v. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,6 – 4,3 persen; dan
vi. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29 persen di 2030 *(Paris Agreement).*

Memerhatikan isu pembangunan yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dalam target periode waktu yang telah direncanakan, maka pemerintah daerah melakukan langkah-langkah strategis sesuai dengan kapasitasnya, serta mempertimbangkan kebutuhan dan masalah lokal, serta ketersediaan sumber daya yang ada sehingga formulasi kebijakan yang dirumuskan mampu mendorong kebijakan pembangunan pemerintah pusat dalam skala nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Sekretariat Daerah selama lima tahun.

Dalam rangka pencapaian Visi pemerintah daerah melalui organ Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, maka perlu disusun strategi dalam bentuk program kegiatan yang menjadi tugas fungsi pernagkat daerah, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada sehingga dapat digunkan secara efektif dan efisien, merumuskan sasaran yang ingin dicapai, serta indikator-indikaror penting yang diselaraskan dengan foktor-faktor kunci keberhasilan yang diharapkan akan mendukung pencapaian visi dan misi.

3.2.1. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una adalah hasil akhir yang ingin dicapai dengan tugas dan fungsi organisasi secara kolektif. Tujuan organisasi menggambarkan arah strategi Sekretariat dan perbaikan-perbaikan yang ingin di ciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Tujuan organisasi menjadi tujuan kolektif seluruh sub-sistem di lingkup Sekretariat Kabupaten Tojo Una-Una, yang mana tujuan tersebut sebagai hasil akhir dari seluruh upaya pembangunan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh seluruh sub-sistem dalam sistem besar organisasi.

Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una adalah “Meningkatkan kualitas dan kinerja pemerintah daerah, dengan menetapkan sasaran dan indikatonya sebagai berikut :

Sasaran :

1) Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah
2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Adapun Indikator yang akan diukur sebagai capian Tujuan Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra adalah Nilai SAKIP Daerah Kategori BB bahkan A, sementara untuk mengukur capaian kedua saran Perangkat Daerah adalah Nilai evaluasi LPPD pada

tahun 2023 dengan target 3.41 - 4.20, dan capaian untuk Indek Kepuasan Pelayanan Publik rata-rata semua unsur yang dinilai 62.51 – 81.25.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Pernagkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan/ sub kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Untuk mengidentifikasi kebutuhan program, kegiatan, dan sub kgiatan, penalaan Misi pemerintah daerah dilakukan dengan menyusun pohon kinerja atau penjenjangan kinerja, sehingga penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.

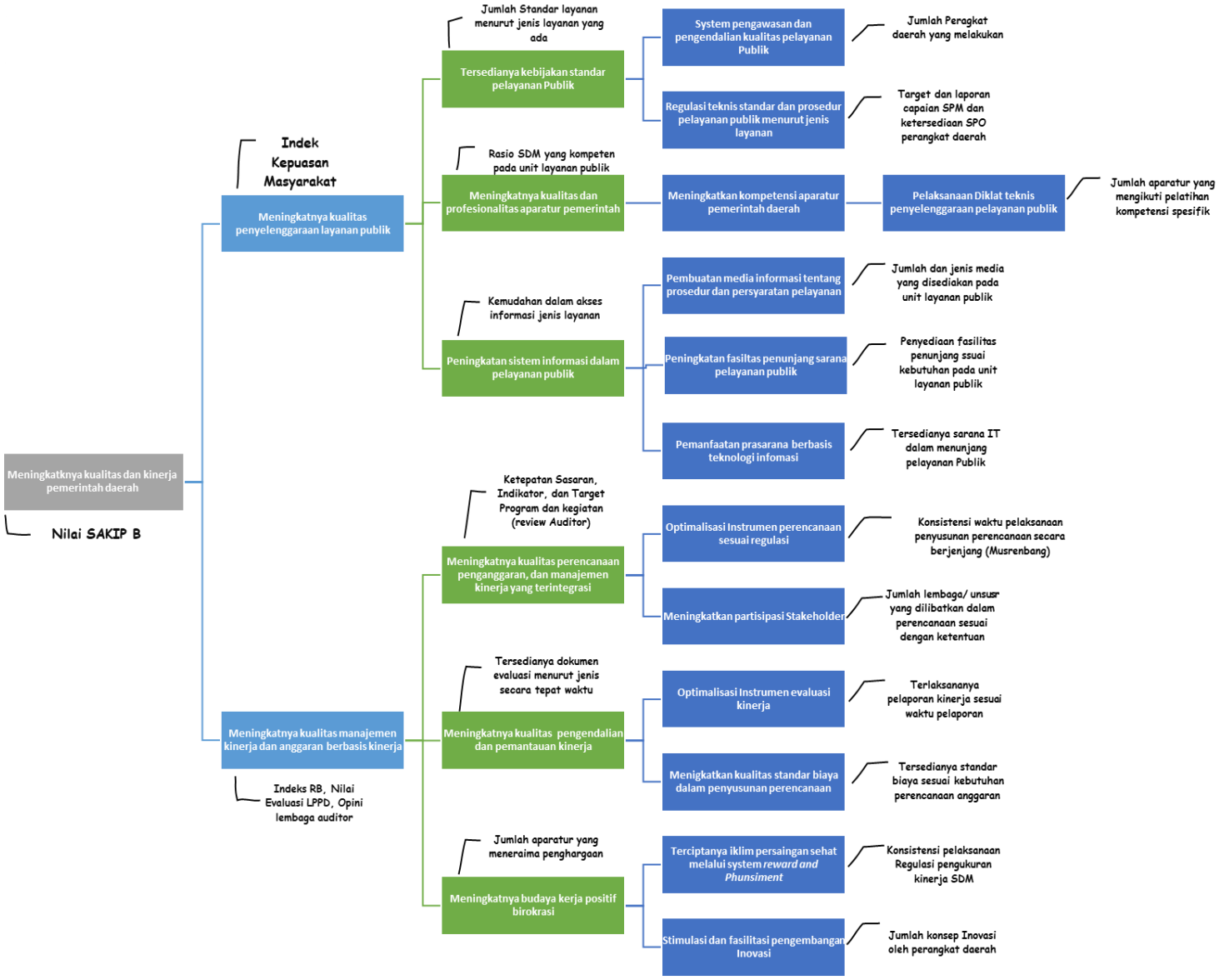
Dalam melaksanakan Misi pemerintah daerah yan menjadi tugas sekretariat daerah dalam menjalankan fungsi oragnisasi maka penjenjangan kinerja diuraikan berikut :



Gambar 2.1

Penjenjangan Kinerja sasaran strategis

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah bagaimana telah muskan dalam RPJMD tahun 2021-2026 maka sesuai dengan tugas dan fungsinya sekretariat daerah Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan Misi 5 dengan sasaran strategis ”Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pemerintah Daerah, Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Publik, serta Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja ”. Dalam melaksanakan Misi 5 dimaksud, serta untuk terpenuhinya sasaran strategis yang telah ditentukan, selanjutnya untuk mengidentifikasi komponen kinerja semua unsur pelaksana sesuai jabatan, serta komponenperencanaan, maka perlu diuraikan lagi ke dalam penjenjangan kinerja yang dapat menggambarkan Hasil serta untuk merumuskan indikator kinerja sebagaimana diuraikan berikut :



Gambar 2.2

Penjenjangan Kinerja jabatan

Berdasarkan uraian Pohon kinerja, selanjutnya untuk melaksanakan kinerja pada masing-masing sasaran ditetapkanlah Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan

Sub Kegiatan	:	a. Penataan Administrasi Pemerintahan
		b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Kegiatan	:	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan	:	a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.
Kegiatan	:	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Sub Kegiatan	:	a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
		b. Fasilitasi Bantuan Hukum
		c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Kegiatan	:	Fasilitasi Kerjasama Daerah
Sub Kegiatan	:	a. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
		b. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
		c. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

II. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Kegiatan	:	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Sub Kegiatan	:	a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
		b. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		c. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
		d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD
		e. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
Kegiatan	:	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Sub Kegiatan :
a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Sub Kegiatan :
a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
d. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
e. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
f. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

III. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Kegiatan : Penataan Organisasi

Sub Kegiatan :
a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
b. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
c. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
d. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
e. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sub Kegiatan :
a. Fasilitasi Keprotokolan
b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD"
		c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
		c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kegiatan	:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		c. Penyediaan Peralatan Rumah tangga
		d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
		g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan :
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
c. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
d. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
e. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
f. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
j. Pemeliharaan Mebel
k. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
c. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
d. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan : Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Tabel rumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun anggaran 2023 dan perkiraan maju tahun anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2024Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		SEKRETARIAT DAERAH						**41.322.908.950,00**					
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**41.322.908.950,00**					
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**41.322.908.950,00**					
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Reformasi Borokrasi***	**BB Nilai**		**BB Nilai**	**BB Nilai**	**37.084.905.741,00**					
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Program sesuai target yang telah ditetapkan*	100 %		100 %	100 %	109.685.476,00			-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-
	4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	49.437.180,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-
	4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	22.267.407,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-
	4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	37.980.889,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*capaian pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah*	100 %		100 %	100 %	11.705.710.160,00			-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-
	4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

BAB 4
PENUTUP

Pembangunan daerah merupakan kegiatan yang kompleks, dengan menggunakan metode analisis yang sistematis, serta melalui pendekatan yang Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial. Seiring dengan tingganya ekspektasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya maka daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan yang strategis, mampu menjawab masalah yang dihadapi serta memenuhi ekspektasi unsur-unsur penerima benefit, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu disusun Rencana KerjaSekretariat Daerah.

Renja Sekretariat Daerah merupakan dokumen perencanaan Lingkup Sekretariat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dibuat. Masukan yang dapat menambah informasi pada Renja Sekretariat Daerah tahun 2024 kami butuhkan. Semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi *stakeholder* dan masyarakat luas.

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JL. Merdeka kota bumi mas uemalingku



RENCANA KERJA (RENJA)
TA. 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2023 tidak terlepas dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD . Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan proyeksi Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD pada tahun mendatang.

Ampana, Januari 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

SURYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641222 198603 2 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud Dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kab. Tojo Una-Una Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 12

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Sekretariat DPRD 14

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 14

2.5. Penalaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 14

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 16

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi 16

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD 16

3.3. Program Dan Kegiatan 17

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 27

BAB V PENUTUP 31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ini mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta proyeksi pada tahun berikutnya berdasarkan program prioritas rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun ke dalam rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selaras dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif untuk tercapainya sasaran Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Rencana

Kerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dibahas pada forum Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian Rencana Kerja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai berikut:

a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif dan proyeksi pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Bab ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renstra Kementerian/Lembaga serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPB, landasan hukum, maksed dan tujuan Renja serta sistematika penulisan sebagai berikut :

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu tahun 2021 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2022 (tahun n-1), target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program/kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD/atau realisasi APBD, sebagai berikut :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, tujuan dan sasaran SKPD serta program dan kegiatan, sebagai berikut :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran apabila tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan dilingkup Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una harus mampu menjadi institusi pelayananan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Untuk itu evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat DPRD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Secara rinci Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra sampai dengan tahun berjalan (tahun 2023) dapat dilihat pada tabel berikut **Tabel. T-II.1** Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Sampai Dengan Tahun Berjalan (tahun 2023) berikut ini:

TABEL T-II.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

DAN PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD s/d 2023

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (*Sub output*)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2022 (n-2)			Target program / kegiatan Renja tahun berjalan 2023 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renja sampai dengan tahun berjalan 2023	
				Target Renja tahun 2022 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2022 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2023 (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 +7 + 9)*	11*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		B		B		B	BB		
Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi barang milik daerah	2 Jenis		2 Jenis		100%	2 Jenis		100%
Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah jenis BMD yang diasuransikan	2 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	4 Jenis	100%
Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	11 Orang		11 Orang		100%	11 Orang		100%

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	11 Orang		11 Orang	11 Orang	100%	11 Orang	22 Orang	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja pengelolaan Administrasi Umum**	**100 %**		**100 %**		**89.58%**	**100 %**		**94.79%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik yang Digunakan	18 Jenis		18 Jenis	18 Jenis	100%	18 Jenis	36 Jenis	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Digunakan	26 Jenis		26 Jenis	26 Jenis	100%	26 Jenis	52 Jenis	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Yang Digandakan dan Dicetak	300.000 Lembar		300.000 Lembar	299.300 Lembar	100%	300.000 Lembar	599.300 Lembar	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/ Surat Kabar yang Tersedia	8 Media		8 Media	3 Media	37.5%	8 Media	11 Media	68.75%
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Pimpinan DPRD Yang Di Fasilitasi	3.630 Orang		3.630 Orang	3625 Orang	100%	3.630 Orang	7.255 Orang	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	715 Kali		715 Kali	712 Kali	100%	715 Kali	1.427 Kali	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah**	**100 %**		**100 %**		**100%**	**100 %**		**100%**
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas Yang Dibeli/sewa	4 Unit		4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Gedung dan Perlengkapan penunjang Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Yang di adakan	9 Unit		9Unit	9Unit	100%	8 Unit	17 Unit	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian kinerja pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**		**100 %**		**100%**	**100 %**		**100%**
Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai dan Jumlah Dokumen Terkirim	9000 Lembar		9000 Lembar	9000 Lembar	100%	9000 Lembar	18.000 Lembar	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Tenaga Non PNS , dan Tenaga Kebersihan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PEMDA	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PEMDA**	**210 Unit**		**210 Unit**		**97,6%**	**210 Unit**		**100%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Disediakan Pemeliharaan rutin/ Berkala	46 Unit		46 Unit	46 Unit	100%	46 Unit	46 Unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Disediakan Pemeliharaan rutin/ Berkala	160 Unit		160 Unit	149 Unit	93%	160 Unit	160 Unit	100%

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Capaian Kinerja layanan keuangan dan kesejahteraan daerah**	**100 %**		**100 %**		**50%**	**100 %**		**100%**
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Yang Tersedia	1 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	2 Jenis	100%
Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah Pimpinan & Anggota DPRD yang menggunakan Jasa Medichal Ceck Up	25 Orang		25 Orang	0 Orang	0%	25 Orang	50 Orang	100%
Layanan Administrasi DPRD	**Capaian Kinerja Layanan Administrasi DPRD**	**12 Bulan**		**12 Bulan**		**100%**	**12 Bulan**		**100%**
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	100%
	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	**B**		**B**		**B**	**BB**		**BB**
	Persentase Perda yang ditetapkan	**100 %**		**100 %**		**100%**	**100 %**		**100%**
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan**	**100 %**		**100 %**		**100%**	**100 %**		**100%**
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Capaian Kinerja Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**100 %**		**100 %**		**100%**	**100 %**		**100%**

Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Perda Yang Disusun dan Dibahas	3 Perda		3 Perda	3 Perda	100%	3 Perda	6 Perda	100%
Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik Ranperda	3 Naskah		3 Naskah	3 Naskah	100%	3 Naskah	6 Naskah	100%
Peningkatan Kapasitas DPRD	**Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100 %**		**100 %**		**100%**	**100 %**		**100%**
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Honorarium Tenaga Ahli DPRD	12 Bulan		12 Bulan		100%	12 Bulan	24 Bulan	100%
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Capaian Kinerja Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**100 %**		**100 %**		**100%**	**100 %**		**100%**
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam daerah	900 Kali		900 Kali	900 Kali	100%	900 Kali	1.800 Kali	100%
Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Reses	3 Kali		3 Kali	3 Kali	100%	3 Kali	6 Kali	100%
Fasilitasi Tugas DPRD	**Capaian Kinerja Fasilitasi tugas DPRD**	**100 %**		**100 %**		**100%**	**100 %**		**100%**
Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna	25 Kali		25 Kali	25 Kali	100%	25 Kali	50 Kali	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una

Sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah *(bottom-up)* maupun dari tingkat atas *(top-down),* sehingga peran serta semua Aparatur yang ada pada Sekretariat DPRD sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu pada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Secara rinci keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilihat pada tabel T-II.2 berikut ini :

TABEL T-II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Tojo Una – Una

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra Sekretariat DPRD Kab. Tojo Una-Una				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP OPD			CC	B	B	BB	CC	B	BB	BB	
2	Persentase Rancangan PERDA yang Ditetapkan			100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kab. Tojo Una-Una, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan OPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut

1. Keterbatasan sumberdaya manusia di bidang perencanaan pembangunan, dimana kualitas SDM perencana belum sesuai dengan yang dibutuhkan
2. Disiplin aparatur yang belum optimal
3. Dinamika politik ikut mewarnai pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Sekretariat DPRD Kab. Tojo Una-Una, serta prioritas Program dan Kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Sekretariat DPRD Kab. Tojo Una-Una berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD 2020. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi di Sekretariat DPRD yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD yaitu memberikan Pelayanan secara administratif kepada Anggota DPRD, dengan demikian Sekretariat DPRD Kab. Tojo Una-Una tidak terdapat Program dan kegiatan yang bersumber dari usulan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kab. Tojo Una-Una Tahun 2024 telah mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kab. Tojo Una-Una

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menentukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kab. Tojo Una-Una selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kab. Tojo Una-Una pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2024 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan Dan Sasaran Sekretariat DPRD Kab. Tojo Una-Una

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2024	2025
1	2	3	4	5
Terselenggarakan Pelayanan Publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada Inovasi	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	100%	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2024	2025
Meningkatnya kinerja Pimpinan / anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas kinerja anggota DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100%	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kab. Tojo Una-Una guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Rancangan program dan kegiatan secretariat DPRD, disusun berdasarkan pedoman yang ada dan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dokumen Perencanaan, baik dari tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten Tojo Una-Una.

Adapun Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una - Una yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta prognosisnya dapat dilihat pada **Tabel T-III.1** sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DPRD KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD						**32.684.195.154,00**							**72.434.907.856,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**32.684.195.154,00**							**72.434.907.856,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**32.684.195.154,00**							**72.434.907.856,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**BB Nilai**		**BB Nilai**	**BB Nilai**	**24.236.780.904,00**						**BB Nilai**	**27.379.461.981,00**	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	12.759.467.810,00			-	-	-	50 Orang/bulan	14.673.387.981,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	12.759.467.810,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	50 Orang/bulan	14.673.387.981,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Jenis BMD Yang Diasuransikan*	2 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	35.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Jenis	35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Dokumen	35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	11 Orang 25 Orang / Kali		11 Orang 25 Orang / Kali	11 Orang 25 Orang / Kali	419.631.000,00			-	-	-	11 Orang 25 Orang / Kali	128.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11 Orang		11 Orang	11 Orang	419.631.000,00	-	-	-	-	-	11 Orang	128.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Bahan Bacaan/ Surat Kabar yang Tersedia* *Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Digunakan* *Jumlah Dokumen Yang Digandakan dan Dicetak* *Jumlah Jenis Alat Listrik yang Digunakan* *Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah* *Jumlah Tamu Pimpinan DPRD Yang Di Fasilitasi* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	8 Media 26 Jenis 300000 Lembar 18 Jenis 715 Kali 3630 Orang 18 Paket		8 Media 26 Jenis 300000 Lembar 18 Jenis 715 Kali 3630 Orang 18 Paket	8 Media 26 Jenis 300000 Lembar 18 Jenis 715 Kali 3630 Orang 18 Paket	6.679.996.358,00			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	8 Media 26 Jenis 300000 Lembar 18 Jenis 715 Kali 3630 Orang 18 Paket	7.701.785.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	115.020.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Paket	119.925.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.213.023.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Paket	1.938.710.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	397.009.500,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Paket	195.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	43.200.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	8 Dokumen	115.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	440.250.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	440.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	715 Laporan		715 Laporan	715 Laporan	3.471.493.858,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 6. Penunjang Program Prioritas	-	715 Laporan	4,892.410.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kendaraan dinas Yang Dibeli/sewa Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Yang DiBeli*	2 Unit 8		2 Unit 8	2 Unit 8	783.358.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Unit 8	415.018.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	778.358.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 6. Penunjang Program Prioritas	-	2 Unit	400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	8 Unit	15.018.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Tenaga Non PNS , dan Tenaga Kebersihan Jumlah Dokumen Bermaterai dan Jumlah Dokumen Terkirim*	12 Bulan 12 Bulan 9000 Lembar		12 Bulan 12 Bulan 9000 Lembar	12 Bulan 12 Bulan 9000 Lembar	2.577.029.736,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Bulan 12 Bulan 9000 Lembar	2.428.720.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9000 Laporan		9000 Laporan	9000 Laporan	210.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	9000 Laporan	90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	522.435.060,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 6. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	468.720.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.844.594.676,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	1.870.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Yang Dipelihara* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Disediakan* *Pemeliharaan rutin/ Berkala Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Disediakan* *Pemeliharaan rutin/ Berkala*	4 Unit 46 Unit 160 Unit		4 Unit 46 Unit 160 Unit	4 Unit 46 Unit 160 Unit	712.100.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	4 Unit 46 Unit 160 Unit	827.740.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	46 Unit		46 Unit	46 Unit	384.360.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 6. Penunjang Program Prioritas	-	46 Unit	480.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit		160 Unit	160 Unit	132.610.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 6. Penunjang Program Prioritas	-	160 Unit	132.610.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	15 Unit	215.130.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 6. Penunjang Program Prioritas	-	15 Unit	215.130.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Yang Tersedia Jumlah Pimpinan & Anggota DPRD yang menggunakan Jasa Medichal Cock Up*	1 Jenis 25 Orang		1 Jenis 25 Orang	1 Jenis 25 Orang	130.200.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 6, Penunjang Program Prioritas	-	1 Jenis 25 Orang	29.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.200.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5, Penunjang Program Prioritas	-	1 Paket	16.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang		25 Orang	25 Orang	125.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 6, Penunjang Program Prioritas	-	25 Orang	12.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Jumlah Kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD*	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	1.140.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5, Penunjang Program Prioritas	-	12 Bulan	1.140.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	1.140.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 6, Penunjang Program Prioritas	-	12 Paket	1.140.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	*Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan*	100,00 Persen		100,00 Persen	100,00 Persen	8.447.414.250,00						100,00 Persen	45.035.445.875,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah Naskah Akademik Ranperda* *Jumlah Perda Yang Disusun dan Dibahas*	3 Naskah 3 Perda		3 Naskah 3 Perda	3 Naskah 3 Perda	849.398.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 6. Penunjang Program Prioritas	-	3 Naskah 3 Perda	630.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	579.398.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 6. Penunjang Program Prioritas	-	3 Dokumen	450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	270.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Dokumen	180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Jumlah Honorarium Tenaga Ahli DPRD*	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	1.104.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Bulan	1.104.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	23 Orang		23 Orang	23 Orang	1.104.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	23 Orang	1.104.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Reses* *Jumlah Pelaksanaan Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam daerah*	3 Kali 900 Kali		3 Kali 900 Kali	3 Kali 900 Kali	5.971.916.250,00			-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Kali 900 Kali	42.789.345.875,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	900 Laporan		900 Laporan	900 Laporan	2.600.260.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	900 Laporan	2.875.299.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.471.656.250,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Dokumen	39.924.046.875,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna*	25 Kali		25 Kali	25 Kali	522.100.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	25 Kali	522.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	522.100.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	20 Dokumen	522.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	JUMLAH							32.884.195.154,00							72.434.907.656,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan didalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, yang diimplementasikan pada program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Adapun rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una didasarkan kepada pencapaian visi dan misi kepala daerah dan disajikan dalam **Tabel 4.1** Berikut ini :

TABEL 4.1

SASARAN DAN PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

No	Sasaran Program	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *Sub Kegiatan :* - *Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Sub Kegiatan :* *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan*
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

		Sub kegiatan - *Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor* - *Penyediaan Bahan Logistik Kantor* - *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* - *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan* - *Fasilitas Kunjungan Tamu* - *Penyelenggraaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah *Sub kegiatan* - *Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* - *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Sub kegiatan* - *Penyedia Jasa Surat Menyurat* - *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* - *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Sub kegiatan* - *Penyediaan Jasa Pemeliharaan,*

		Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* - *Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD *Sub kegiatan* - *Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD* - *Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD*
		Layanan Administrasi DPRD *Sub kegiatan* - *Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD*
2	Meningkatnya kualitas kinerja anggota DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD *Sub Kegiatan* - *Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah* - *Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik*
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

		Sub kegiatan : - *Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli*
		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat *Sub kegiatan* - *Kunjungan Kerja dalam Daerah* - *Pelaksanaan Reses*
		Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD *Sub kegiatan* - *Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah*

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2024 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Tojo Una-Una adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2024 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una maupun dengan Instansi terkait lainnya.

Ampana, Januari 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
SETWAN

SURYA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641222 198603 2 015

RENJA

RENCANA KERJA TAHUN 2024

PEMBANGUNAN,RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA UNA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,RISET DAN INOVASI DAERAH
Alamat : Jl. Merdeka Kota Bumi Mas No. Telp/Fax 0464 – 24491 KodePos 94683 Ampana

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 188.45/ /BAPPERIDA/2023

T E N T A N G

RENCANA KERJA ORG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,RISET DAN INOVASI DAERAHPERANGKAT DAERAH

(RENJA OPD-BAPPERIDA)
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN 2024

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan Kepala organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menyusun Rencana Kerja OPD tahun 2020;

b. BahwaRencana Kerja (Renja) OPD memuat arah kebijakan daerah1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerahuntuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanankan pembangunan daerah yang berkesinambungan;

c. Bahwa Rencana Kerja (Renja) OPD tahun 2024 memuat program/kegiatan pembangunan OPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,

e. Penelitian dan Pengembangan DaerahKabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 24)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Tojo Una-una Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Rencana Kerja organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerahKabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RENJA OPD-BAPPERIDATahun 2024, adalah dokumen Program/Kegiatan periode 1 (satu) Tahun.

Kedua : RENJA OPD-Bapperida Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1. Bab 1 PENDAHULUAN
2. Bab 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
3. Bab 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

4. Bab 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. Bab 4 PENUTUP

Ketiga : RENJA OPD-BAPPERIDATahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor Tahun yang memuat Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Lokasi Kegiatan, Target Pencapaian Kinerja dan Pagu Indikatif.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ampana, 30 Maret 2023
Kepala Badan Perencanan Pembangunan,Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una



Drs.Moh. Kusno A.R Atilu
Pembina Utama Muda,IV/c
NIP. 19630423 199803 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan nikmat kesehatan sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah dapat terselesaikan tepat waktu dalam bentuk dokumen RENJA Tahun 2024.

Secara garis besar Rencana Kerja ini memuat informasi mengenai program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tahun 2024.

Tersusunnya Rencana KerjaBadan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Tahun 2024 ini,disamping sebagai dokumen rencana kerja,juga diharapkan dapat dijadika nbahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arahyang jelas dari program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Semoga Renja Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah Kabupaten Tojo Una-Una ini dapat bermanfaat untuk pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una.

Ampana, 30 Maret 2023

KEPALA BADAN
PERENCANAANPEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



Drs. Moh. Kusno A.R Atilu
Pembina Utama Muda
Nip. 19630423 199803 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Kepala Badan Bapperida Kabupaten Tojo Una-Una i

Kata Pengantar v

Daftar Isi vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASIRENJA BADAN PERNCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BapperidaTahun 2024 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan..... 21

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 40

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.. 49

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Bapperida..... 50

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPELITABANGDA..... 65

BAB V PENUTUP 71

BAB1

PENDAHULUAN

1.1. *LATAR BELAKANG*

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun anggaran 2024, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2021 untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rancangan awal RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun anggaran 2024 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun anggaran 2024 yang disusun kedalam rancangan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah Tahun 2024. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadiacuan perumusan kegiatan alternatif dan atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan,sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah

dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah.

1.2. *LANDASAN HUKUM*

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Landasan Operasional, terdiri dari :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
k. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 24);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
m. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pada bagian ini akan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan pedoman kerja sepajang tahun 2024 bagi Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan Program/kegiatan sesuai dengan posisi dan kewenangan yang diemban yaitu membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam bidang percepatan pembangunan infrastruktur.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen OPD, dan terwujudnya keselarasan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerahdengan Perencanaan Tahunan, serta terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Rencana Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah, landasan hukum penyusunan Rencana Kerja, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja dan sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerahtahun lalu beserta capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal OPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA

Bab ini berisikan penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan , penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baikm jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasinya dan tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2024

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerahtahun lalu adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerahdalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya, yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA), serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan,Riset dan Inovasi Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1 *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA*

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerahtahun 2021(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2022(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan

inovasi daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerahtahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah tahun 2022, dan realisasi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerahatau realisasi APBD untuk Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerahdisajikan dalam bab ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah Pencapaian Renstra Bapperida s/d Tahun 2022
Kabupaten Tojo Una-Una

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja program (outcame) kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d tahun 2022 (n-3)		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2020 (n-2)						Target program/kegiatan Renja tahun berjalan 2022 (n-1)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s.d tahun 2022 (tahun berjalan n-1)		
							Target		Realisasi		Tingkat realisasi				realisasi capaian		tingkat capaian (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 =(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BAPPELITBANGDA															
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan															

	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelapoaran Dan Analisis Prognosisi Realisasi Anggran	2	Dok			2	Lap	2	Lap	100	Dok	2	Dok	4	Dok	200
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran															
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Tersdianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln	100	Bln	12	Bln	36	Bln	200
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Terpenuhinya Bahan Logistik**					12	Bulan	12	Bulan	100	Bulan	12	Bulan	36	bln	0
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Teresedianya Barang Penggandaan					12	Bulan	12	Bulan	100	Bulan	12	Bulan	36	Bln	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1	Kali	40	Kali	10	Kali	10	Kali	100	Kali	60	Kali	130	Kali	130
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan					12	Bulan	12	Bulan	100	Bulan	12	Bulan	36	Bln	0
	Prorgram Pelayanan Admiminstrasi Perkantoran																
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah															

	Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah															
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran															
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
	Penyediaan jasa Pemeliharaan,Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraaan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operaional	21	**Unit**			21	Unit	21	Unit	100	Unit	21	Unit	42	Unit	200
	Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor	**1**	**Gedung**			1	Gedung	1	Gedung	100	Gedung	1	Gedung	3		3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	**Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia**															
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	**200**	**Lembar**			2000	Lembar	200	Lembar	100	Lembar	200	Lembar	400	Lembar	200

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	12	Bulan			12	Bulan	12	Bulan	100	Bulan	12	Bulan	36	Bln	200
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan			12	Bln	12	Bln	100	Bulan	12	Bulan	36	Bln	200
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Tersusunya Laporan Renstra Dan Renja	2	Dok			10	Dok	10	Dok	100	Dok			10	Dok	500
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan			20	Unit									20	Unit	0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara			23	Unit									23	Unit	0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara			20	Unit									20	Unit	0
	Program Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemberdayaan																
	Koordinasi Perencanaan Dan Evaluasi Bidang	Jumlah Koordinasi Perencanaan Dan Evaluasi Bidang Sosial			1	keg									1	Keg	0

	Pemberdayaan	Pemberdayaan															
	Koordinasi Perencanaan Dan Bidang Evaluasi Bidang Ekonomi	Jumlah Koordinai Perencanaan Dan Evaluasi Sosial Bidang Ekonomi			1	keg									1	Keg	0
	Koordinasi Perencanaan Dan EvaluasiBIdang Sosial Budaya	Jumlah Koorinasi Perencanaan Dan Evaluasi Bidang Sosial Budaya			12	Kec									12	Kec	0
	Program Pengembangan Data &Informasi																
	Penyusunan & Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Data/informasi yang terkumpul dalam bentuk buku			4	Dok									4	Dok	0
	Penyusunan Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Dokumen Buku tentang Perencanaan Pembangunan			1	Dok									1	Dok	0
	Penyusunan Profil Kabupaten Tojo Una-una	Jumlah Buku dan Film Dokumenter			1	Dok									1	Dok	0
	Peningkatan Riset, Iptek, Sumber Daya dan Inovasi Daerah	Jumlah Pelaksanaan Lomba dan Upacara dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional			6	DOk									6	Dok	0
	Pembentukan Forum Data OPD	Jumlah Forum Data OPD			1	Dok									1	Dok	0
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah																
	Penyusunan Dokumen dan Instrumen Perencanaan	Jumlah Dokumen dan Instrumen Perencanaan (KUA, PPAS dan laporan tahunan)			3	DOk									3	Dok	0

	(KUA, PPAS dan laporan tahunan)																
	Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah MOU			1	Dok									1	Dok	0
	Penyusunan Laporan Capaian Pembangunan Daerah	Jumlah MOU			2	Dok									2	Dok	0
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																
	Koordinasi Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia															
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD	1	dok			6	dok	6	dok	100	Dok	6	Dok	12	Dok	1200
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	1	dok			2	dok	2	dok	100	Dok	6	Dok	8	Dok	800
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang	1	lap			6	lap	6	lap	100	Lap	2	Lap	8	Lap	800

	Perencanaan Daerah Pembangunan Manusia	pembangunan																
	Koordinasi Perancanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahaan	Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang Infrastruktur dan kewilayahan																
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahaan	Jumlah koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan pembangunan Kewilayahaan	1	Dok									1	Dok	1	Dok	100	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPMJD dan RKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembangunan					1	Dok					1	Dok	!	Dok	0	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tersusunnya Dokumen Perencanaan pembagubab infrastruktur					1	Dok					1	Dok	1	Dok	0	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Dokumen					1	Dok					1	Dok	1	Dok	01	
	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Terlaksanya Monitoring Dan Evaluasi Infrastruktur	1	Lap			1	Dok									0	

	Perencananaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
	Asistensi Peyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan pembagubab infrastruktur					4	Dok					4	Dok	4	Dok	0
	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring Dan Infrastruktur											1	Dok	1	Dok	0
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam																	
	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Prasarana Irigasi	umlah koordinasi Penyusunan Perencanaan Prasarana Irigasi			4	org									4	Org	0
	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Prasarana Air Minum	Jumlah koordinasi Penyusunan Perencanaan Prasarana Air Minum			4	Keg									4	Keg	0
	Perencanaan Prasarana Air Minum	Jumlah Perencanaan Prasarana Air Minum			4	keg									4	keg	0
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif	Jumlah Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			4	Keg									4	Keg	0

	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			1	DOk									1	Dok	0
	Pengendalian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Pengendalian Pembangunan Infrastruktur			4	Kali									4	Kali	0
	Pengendalian Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen KLHS			4	Kali									4	Kali	0
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengelolaan sumber Daya Alam			4	Koordinasi									4	Koordinasi	0
	Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan perencanaan Pembangunan daerah																
	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah															
	Program kerjasama Pembangunan																
	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah															
	Program Pengembangan Perumahan																
	Penyusunan Dokumen Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan															

		Perumahan															
	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengelolaan sumber Daya Alam	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan															
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan																
	Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah	Jumlah Koordinasi Penyelesaian Perbatasan															
	Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang ekonomi dan SDA															
	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	Lap			1	Lap	1	Lap	100	Lap	2	Lap	2	Lap	200
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	Dok			1	Dok	0	dok	100	DOk	1	Dok	1	DOk	100
	Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	1	lap			1	Lap	1	lap	100	Lap	2	Lap	2	Lap	200

	Pembangunan daerah Bidang SDA	Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah																
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Presentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan secara akuntabel dan tepat waktu																
	analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah											1	Dok	1	Dok	0	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah laporan hasil kesepakatan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											1	Lap	1	Lap	0	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas	Jumlah laporan kesepakatan hasil desk	1	Lap									1	Lap	1	Lap	100	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil kesepakatan musrenbang	1	Lap									1	Lap	1	Lap	100	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan											12	Lap	12	Lap	100	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD	1	Dok									2	Dok	2	Dok	200	

	Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	Terlaksananya Koordinasi dan Penelaahan Atas Dokumen Perencanaan																
	Koordinasi Pengendalian Dan Pelaksanaan Pembangunan daerah di kabupaten/kota	Jumlah laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan																
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	prsentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan secara akuntabel dan tepat waktu																
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah											1	Dok	1	Dok	0	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah laporan hasil kesepakatan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											1	Lap	1	Lap	0	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas	Jumlah laporan kesepakatan hasil desk	1	LAp									1	Lap	1	Lap	100	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kot	Jumlah laporan hasil kesepakatan musrenbang	1	Lap									1	Lap	1	Lap	100	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan											12	Lap	12	Lap	0	

	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD	1	Dok									2	Dok	2	Dok	200
	Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	Terlaksananya Koordinasi dan Penelaahan Atas Dokumen Perencanaan															0
	Koordinasi Pengendalian Dan Pelaksanaan Pembangunan daerah di kabupaten/kota	Jumlah laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan															0
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Tersedianya dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan															
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah											1	Dok	1	Dok	0
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah jenis informasi perencanaan yang termanfaatkan	1	Dok									2	Jenis	2	Jenis	200
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Profil											1	Dok	1	Dok	0
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Presentase Tersedianya dokumen pelaporan evaluasi Bidang Perencanaan															

	Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembangunan Daerah																
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	1	Dok									1	Dok	1	Dok	100
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala	1	Dok									1	DOk	1	DOk	100
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan															
	Penelitian, Pengembangan Dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi Dan Inovasi	Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dok													0
	Uji coba dan penerapan Rancang bangun / model replikasi dan inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan	Jumlah Ujicoba dan Penerapan RancangBangun / model Replikasi dan inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan															0
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan metode pennyelanggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat Inovatif	Jumlah Diseminasi dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif															0

	Sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi hasil Kelitbangan															0
	Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi hasil Kelitbangan															
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomidan Pembangunan																
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen dan Kajian Pariwisata															0
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen dan Kajian Kesehatan															0
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen dan Kajian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan															0
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen dan Kajian Pengembangan Kelautan dan Perikanan															0
	Penelitian dan Pengembangan Energi dan sumber daya Mineral	Jumlah Dokumen dan Kajian Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral															0
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen dan Kajian Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman															0
	Penelitian dan Pengembangan BUMD	Jumlah Penelitian dan Pengembangan BUMD															0
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen dan Kajian Lingkungan Hidup															0

	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Kegiatan BUMD Difasilitasi					1	Dok	1	Dok	100				1	Dok	0
	Fasilitasi pemberian Rekomendasi Penelitian bagi warga negara Asing untuk diterbitkannya izin Penelitian	Jumlah Rekomendasi Penelitian Bagi WNA yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang															
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan															
	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Perencanaan Litbang																
	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Rapat Koordinasi Penelitian dan Pengembangan			30	org									30	org	0
	Rapat Koordinasi Kelitbangan (Rakornas, FKPPD Regional, FKPPD Nasional, Rakorda)	JumlahRapat Koordinasi mengenai Kelitbangan			8	Kali									8	Kali	0
	Penelitian Dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen			1	Dok									1	Dok	0

	Daerah																
	Pengembangan Kerjasama Dan Pembangunan Daerah	Jumlah Mou			5	Dok									5	DOk	0
	Pengelolaan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah MOU			1	Dok									1	Dok	0
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																
	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			4	Triiwulan									4	Triwulan	0
	Peningkatkan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan SDM			1	Keg									1	Keg	0
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pameran Investasi yang diikuti			1	Kali									1	KAli	0
	Pengembangan Inovasi Dan Teknologi																
	Penelitian, Pengembangan Dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi Dan Inovasi	Jumlah Dokumen Inovasi daerah											1	Dok	1	Dok	0
	Ujicoba dan penerapan Rancang bangun / model replikasi	Jumlah Ujicoba dan Penerapan RancangBangun / model Replikasi dan inovasi di											1	Dok	1	Dok	0

	dan inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan																
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan metode pennyelanggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat Inovatif	Jumlah Diseminasi dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif											1	Dok	1	Dok	0
	Sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi hasil Kelitbangan											12	Kec	12	Kec	0
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomidan Pembangunan																	
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen dan Kajian Pariwisata											1	Dok	1	Dok	0
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen dan Kajian Kesehatan											1	Dok	1	Dok	0
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen dan Kajian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan											1	Dok	1	Dok	0
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen dan Kajian Pengembangan Kelautan dan Perikanan											1		1		0
	Penelitian dan Pengembangan Energi dan sumber daya Mineral	umlah Dokumen dan Kajian Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral											1	Dok	1	Dok	0
	umlah Dokumen dan Kajian Pengembangan Energi dan Sumber Daya	Jumlah Dokumen dan Kajian Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman											1	Dok	1	Dok	0

	Mineral																
	Penelitian dan Pengembangan BUMD	Jumlah Penelitian dan Pengembangan BUMD											1	Dok	1	Dok	0
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen dan Kajian Lingkungan Hidup											1	Dok	1	Dok	0
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Jumlah Kegiatan BUMD Difasilitasi											1	Dok	1	Dok	0
	Fasilitasi pemberian Rekomendasi Penelitian bagi warga negara Asing untuk diterbitkannya izin Penelitian dan instansi Yang berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian Bagi WNA yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang											1	Dok	1	Dok	0
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan											12	Kec	12	kec	0

2.2 *ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH*

1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, merupakan Lembaga TeknisDaerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerahdalamperencanaanpembangunan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan ditingkat daerah,sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada(potensilokal).Disisilain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkandengan bijaksana.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah selaku lembaga teknis dibidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut diatas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampai dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah- rubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusatakan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Melihat kondisi tersebut diatas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una selaku Institusi Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka,antara lain:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Penjamin terciptanya integrasi,sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah,antar

ruang, antar waktu,antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;

3. Penjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Secara detail Capaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

2. Isu-isu PenyelenggaraanTugasdan FungsiPerangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerahyang disingkat Bapperida dibentuk Berdasarkan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sesuaidengan. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 20 tahun 2021 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerjasebagai berikut :

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DANINOVASI DAERAH (BAPPERIDA)

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah merupakan unit organisasi perencanaan, dimana keberadaanya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi dibidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggungjawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor Tahun 2021,telah ditetapkan Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerahKabupaten Tojo Una-Una sebagai berikut:

KEPALA BADAN

1. Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
   a. perumusan program kerja dan kebijakan teknis dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
   b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis dan penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
   c. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
   d. penyelenggaraan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hokum, penyelesaian administrasi, penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan;
   e. pengendalian pemanfaatan dan pengelolaan keuangan dan sarana dan prasaranan penunjang pelaksanaan tugas-tugas Badan kepada para Kepala Bidang;
   f. penyelenggaraan hubungan kerja fungsional dengan perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
   g. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
   h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
   i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas fungsinya;

SEKRETARIS

1. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan dan asset serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
   a. Pengoordinasian dan perumusan terhadap penyusunan rencana, program, dan anggaran pada Badan;
   b. Pengordinasian dan perumusan terhadap penyusunan kerangka regulasi pada Badan;
   c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, protocol, dan keamanan Badan;
   d. Menyiapkan pembinaan organisasi melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur Badan;
   e. Pengordinasian terhadap penyusunan rancangan kebijakan penataan organisasi Badan;
   f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan; dan
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

   Sekretariat terdiri dari :
   a. Sub Bagian Program;
   b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
   c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

   Sub Bagian Program mempunyai tugas
      a. Menyusun rencana strategis (Renstra) Badan berdasarkan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Tahunan

(Renja), Rencanan Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);

b. Menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Alur Kinerja (cascading kinerja), dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan;
c. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Sistem PengendalianDaliann Pemerintah (SSIP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Dokumen lainnya yang menjadi tanggungjawab Badan dibidang perencanaan dan program; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tuga

a. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
b. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang serta penyusun rencana pengadaan barang atau perlengkapan kebutuhan unit kerja;
c. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
d. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
e. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
f. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan aset; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas

a. Menyiapkan bahan dan data penyusunan regulasi dan rancangan kebijakan penataan organisasi Badan;

b. Menyiapkan data dan melakukan koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, survey kepuasan masyarakat, dan dokumen lainnya yang menjadi tanggungjawab Badan di Bidang Kepegawaian dan umum;
c. Mengelola administrasi tambahan penghasilan pegawai (TPP);
d. Menyusun laporan rutin peremajaan pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan laporan kepegawaian lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
e. Mengadmistrasi usulan kenaikan pangkat, mutasi pegawai, gaji berkala, pemberhentian/pensiun pembuatan kartu suami/istri, tabungan asuransi pensiun (Taspen), asuransi kesehatan pegawai (BPJS), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat)/bimbingan teknis (Bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya sesuai prosedur yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
f. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan sesuai prosedur ditetapkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar;
g. mengoordinasikan kegiatan pengamanan dan kebersihan kantor berdasarkan standar yang telah ditetapkan agar tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapih dan nyaman; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris terkait tugas dan fungsinya.

BIDANG PERENCANAAN EKONOMI

1. Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan tugas membantu Kepala Badan dalam hal penyelenggaraan, pengordinasian, pengawasan, evaluasi dan pembinaan serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan pertanian,

perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan daerah, ketenaga kerjaan dan transmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal;

2. Dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
   a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan lingkup urusan perencanaan ekonomi;
   b. penyusunan data perencanaan lingkup urusan perencanaan ekonomi;
   c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan lingkup urusan perencanaan ekonomi;
   d. pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program lingkup urusan perencanaan ekonomi; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

   Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari :
   a. Sub Bidang Ekonomi I;
   b. Sub Bidang Ekonomi II;
   c. Sub Bidang Ekonomi III;

Sub Bidang Ekonomi I mempunyai tugas

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja lingkup urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Keuangan;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Keuangan;
c. Menyiapkan bahan penyusunan data perencanaan lingkup urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Keuangan;
d. Menyiapkan bahan pengordinasian, Pelaksanaan, dan Pembinaan perencanaan lingkup urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Keuangan;
e. Menyiapkan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan lingkup urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Keuangan;

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja lingkup urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Keuangan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Ekonomi II Mempunyai Tugas

a. Menyiapkan Bahan Penyusunan Rencana Kerja LIngkup Urusan Penanaman Modal, Pariwisata, Kehutanan dan Transmigrasi;
b. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Lingkup Urusan Penanaman Modal, Pariwisata, Kehutanan dan Transmigrasi;
c. Menyiapkan Bahan Penyusunan Data Perencanaan Lingkup Urusan Penanaman Modal, Pariwisata, Kehutanan dan Transmigrasi;
d. Menyiapkan Bahan Pengoordinasian, Pelaksanaan, dan Pembinaan Perencanaan Lingkup Urusan Penanaman Modal, Pariwisata, Kehutanan dan Transmigrasi;
e. Menyiapkan Bahan Evaluasi Kebijakan Teknis Perencanaan Lingkup Urusan Penanaman Modal, Pariwisata, Kehutanan dan Transmigrasi;
f. Menyiapkan Bahan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kerja Lingkup Urusan Penanaman Modal, Pariwisata, Kehutanan dan Transmigrasi;
g. Melaksanakan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Terkait Tugas dan Fungsinya.

Sub Bidang Ekonomi III Mempunyai Tugas

a. Menyiapkan Bahan Penyusunan Rencana Kerja Lingkup Urusan Pertanian, Kelautan, dan Perikanan;
b. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Lingkup Urusan Pertanian, Kelautan, dan Perikanan;
c. Menyiapkan Bahan Penyusunan Data Perencanaan Lingkup Urusan Pertanian, Kelautan, dan Perikanan;

d. Menyiapkan Bahan Pengoordinasian, Pelaksanaan, dan Pembinaan Perencanaan Lingkup Urusan Pertanian, Kelautan, dan Perikanan;
e. Menyiapkan Bahan Evaluasi Kebijakan Teknis Perencanaan Lingkup Urusan Pertanian, Kelautan, dan Perikanan;
f. Menyiapkan Bahan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kerja Lingkup Urusan Pertanian, Kelautan, dan Perikanan; dan
g. Melaksanakan Tugas Lain Yang diberikan Oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Terkait Tugas dan Fungsinya

BIDANG PERENCANAAN SOSIAL

1. Bidang Perencanaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam hal penyelenggaraan, pengoordinasian, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan Pendidikan, Kesehatan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kecamatan, Kesatuan Bangsa dan politik
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan Sosial menyelenggrakan fungsi :
    a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan lingkup urusan perencanaan sosial;
    b. Pengoordinasiaan, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan terhadap penyelenggaraan tugas lingkup urusan perencanaan sosial;
    c. Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program lingkup urusan perencanaan sosial; dan
    d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Sosial terdiri dari :

d. Sub Bidang Sosial I;
e. Sub Bidang Sosial II;dan
f. Sub Bidang Sosial III.

Sub Bidang Sosial I Mempunyai Tugas

a. Menyiapkan bahan dan data untuk menyusun perencanaan lingkup urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan;
c. Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan lingkup urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan;
d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan pembangunan lingkup urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Sosial II Mempunyai Tugas

a. Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan perencanaan lingkup urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

c. Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan lingkup urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan pembangunan lingkup urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Sosial III Mempunyai Tugas

a. Menyiapkan bahan dan data untuk meyusun perencanaan lingkup urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, sekertariat daerah, Sekertariat DPRD, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan, kecamatan, kesatuam bangsa dan politik;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, sekertariat daerah, Sekertariat DPRD, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan, kecamatan, kesatuam bangsa dan politik;
c. Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan lingkup urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, sekertariat daerah, Sekertariat DPRD, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan, kecamatan, kesatuam bangsa dan politik;
d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan pembangunan lingkup urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, sekertariat daerah, Sekertariat DPRD, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan, kecamatan, kesatuam bangsa dan politik; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial terkait tugas dan fungsinya.

BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Bidang Perencanaan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam terdiri dari :

a. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
b. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
c. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;

Sub Bidang infrastruktur dan kewilayahan I mempunyai tugas

a. menyiapkan bahan dan data untuk menyusun perencanaan lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pengelolaan perbatasan daerah;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pengelolaan perbatasan daerah;
c. menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pengelolaan perbatasan daerah;
d. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan sebagai bahan pertimbangn dalam rangka peningkatan pembangunan lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pengelolaan perbatasan daerah; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bidang infrastruktur dan kewilayahan II mempunyai tugas

a. menyiapkan bahan dan data untuk meyusun perencanaan lingkup urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, energy dan sumber daya mineral;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, energy dan sumber daya mineral;
c. menyipkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan lingkup urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, energy dan sumber daya mineral;
d. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan pembangunan lingkup urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, energy dan sumber daya mineral; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bidang infrastruktur dan kewilayahan III mempunyai tugas

a. menyiapkan bahan dan data untuk menyusun perencanaan lingkup urusan perhubungan, komunikasi dan informatika;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup urusan perhubungan, komunikasi dan informatika;
c. menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan lingkup urusan perhubungan, komunikasi dan informatika;
d. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan pembangunan lingkup urusan perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan terkait tugas dan fungsinya.

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluai mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam hal penyelenggaraan, pengoordinasian, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan serta menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan daerah
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
   a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang perencanaan daerah;
   b. Penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi berdasarkan program kerja badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   c. Pengoordinasian tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
   d. Pengoordinasian penyusunan prioritas dan kebijakan pembangunan daerah;
   e. Pengoordinasian dan penyelenggaraan prioritas dan kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah kebupaten secara holistik-tematik, integrative dan spasial;
   f. Pelaksanaan harmonisasi program pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
   g. Pelaksanaan pengendalian penyusunan terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
   h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pencapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah; dan
   i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluai terdiri dari :

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
b. SubBidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
c. Sub Bidang Data dan Informasi.

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas

a. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, indicator kinerja utama daerah dan perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja perangkat daerah, rencana dan perjanjian kinerja tahunan, dan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara;
b. Menyelenggarakan tahapan/siklus perencanaan dan merumuskan penyusunan rencana pendanaan pembangunan daerah;
c. Melaksanakan integrasi, harmonisasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi maupun pusat; dan;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terkait tugas dan fungsinya.

Fungsional Perencanamenpunyai tugas

a. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Indikator Kinerja Untama Daerah dan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana dan Perjanjian Kinerja Tahunan, dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
b. Menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap rumusan kebijakan perencanaan dan pendanaan, pelaksanaan dan hasil pembangunan daerah;
c. Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan menyusun laporan hasil evaluasi kinerja terhadap perencanan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah;
d. Melaksanakan rapat koordinasi terhadap hasil evaluasi dengan seluruh perangkat daerah; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas

a. Melaksanakan pelayanan data dan informasi kepada perangkat daerah dan masyarakat dengan cara menyajikan data dan informasi hasil perencanaan pembangunan daerah ;
b. Mengendalikan system data dan informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi;
c. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan secara berkala; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terkait tugas dan fungsinya.

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tugas membantu Kepal Badan dalam hal pelaksanaan Penyelenggaraan, Pengoordinasian, Pengawasan, Evaluasi, dan pembinaan serta menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
2. Dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
   a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan serta penerapan inovasi dan teknologi;
   b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi ;
   c. pelaksanaan pengkajian kebijakan pemerintah kabupaten;
   d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penerapan inovasi dan teknolgi;
   e. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan serta penerapan inovasi dan teknologi;

f. menyebarluaskan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta penerapan inovasi dan teknologi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

a. Sub Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
b. Sub Bidang Ekonomi, Sosial dan Pembangunan; dan
c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Sub Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan penelitian dan pengembangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, meliputi aspek-aspek ekonomi daerah, pemerintah umum, kelembagaan aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
b. Melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan pemerintah kabupaten di Subbidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
c. Melakukan penyusunan hasil kajian sebagai bahan/data penyusunan rencana pengembangan di Subbidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
d. Melakukan koordinasi, kerjasama dan sinkronisasi pelaksanaan serta pembinaan penelitian dan pengembangan di Subbidang Pemerintahan dan Pengkajian peraturan;
e. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
f. Melakukan pengelolaan data Kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Ekonomi, Sosial dan Pembangunan mempunyai tugas

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan di Subbidang Ekonomi, Sosial dan Pembangunan;
b. Melakukan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan di Subbidang Ekonomi, Sosial dan Pembangunan;
c. Melakukan penyusunan hasil penelitian dan pengembangan serta hasil kajian sebagai bahan/data penyusunan rencana pengembanga di Subbidang Ekonomi, Sosial dan Pembangunan;
d. Melakukan koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi pelaksanaan serta pembinaan penelitian dan pengembangan di Subbidang Ekonomi, Sosial dan Pembangunan; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di Subbidang inovasi dan teknologi;
b. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan mengkaji kebijakan pemerintah kabupaten dan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
d. Melakukan penyusunan hasil kajian sebagai bahan/data penyusunan rencana pengembangan di Subbidang inovasi dan teknologi;
e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di Subbidang inovasi dan teknologi;

f. Melakukan koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di Subbidang inovasi dan teknologi;
g. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan
h. Memfasilitasi hak kekayaan intelektual; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepal Bidang Penelitian dan Pengembangan terkait tugas dan fungsinya.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPERIDA kabupaten Tojo Una-una

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Capaian Nilai Sakip			CC	B	B	BB	BB	BB	BB	BB-A	
2	**Meningkatkan Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah**			100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	
3	**Meningkatkan Hasil Penelitian Dan Inovasi Daerah Yang Berkualitas**			100%	100%	100 %	100%	10%	10%	100%	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGRAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dasar penentuan isu-isu strategis adalah berbagai permasalahan pelayanan Bapperida yang telah diidentifikasi melalui gambaran pelayanan Bapperida, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra OPD provinsi, implikasi RTRW, dan implikasi KLHS. Penanganan isu strategis tetap harus sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida. Adapun hasil telaan dalam rangka penentuan isu strategis yang akan ditangani oleh Bapperida Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa telaan dalam rangkapenentuan isu strategis dalam perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi daerah di Kabupaten Tojo Una-Una dapat diidentifikasi menjadi beberapa aspek dan isu strategis sebagai berikut :

1. Aspek Koordinasi dan Kualitas Perencanaan, Riset dan Inovasi, mempunyai isu strategis berikut:

    - Belum optimalnya koordinasi antara
      Bapperida dengan Perangkat Daerah terkait informasi perencanaan, pelaksanaan input program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan dokumen perencanaan yang tepat waktu.
    - Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran dalam upaya menjaga konsistensi dan atau kontinuitas perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran.
    - Masih ditemukan ketidakselarasan antara program dan kegiatan dengan indikator kinerjanya, sehingga pencapaian kinerja sulit terukur dan dicapai.
2. Kualitas Sumber Daya, mempunyai Isu strategis berikut:
    - Ketersediaan dan pemerataan kualitas SDM ASN Bapperida yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- Masih kurangnya kemampuan dan sarana prasarana pendukung pemanfaatan teknologi penunjang kinerja Bapperida

3. Sistem Pengelolaan Data dan Informasi,mempunyai isu berikut:
   - Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi yang dapat menghimpun seluruh produk Bapperida secara terintegrasi agar informasi mengenai hasil kajian maupun dokumen perencanaan mudah didapatkan.
   - Beragamnya sumber data perencanaan sehingga memerlukan perhatian khusus terkait aktualisasi dan tingkat akurasi data yang disajikan.
4. Riset dan Inovasi
   - Belum optimalnya hasil litbang yang dijadikan acuan/dasar baik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah maupundalam proses pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tojo una-Una

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerahberdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Tojo Una-Una

NO	RENCANA AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CAPAIAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TAREGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TAREGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	Rp 89,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	Rp 97,900,000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***						
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	Rp 104,979,308	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	Rp 115,477,239	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						
	Penyediaan Komponen Instalasi		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 2,696,500	Penyediaan Komponen Instalasi		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 2,966,150	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 3,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 3,300,000	
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Rp 5,000,000	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Rp 5,500,000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	Rp 3,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	Rp 3,300,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	Rp 250,096,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	Rp 275,105,600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Rp 6,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Rp 7,150,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	Rp 69,540,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	Rp 76,494,000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp 627,964,118	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp 690,760,530	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						***Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan***						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 motor	3 mobil	Rp 112,548,854	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 motor	3 mobil	Rp 123,803,739	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Rp 4,796,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Rp 5,275,600	

	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						***Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan***					-	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2	Berita Acara	Rp 89,084,305	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2	Berita Acara	Rp 97,992,736	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	13	Berita Acara	Rp 151,650,000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	13	Berita Acara	Rp 166,815,000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1	Dokumen	Rp 200,576,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1	Dokumen	Rp 220,633,600	

	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						***Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***					-	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah					Rp 85,534,000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah					Rp 94,087,400	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaaan Pembangunan Daerah						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaaan Pembangunan Daerah					-	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	Laporan	Rp 95,185,000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	Laporan	Rp 104,703,500	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1	Laporan	Rp 209,916,420	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1	Laporan	Rp 230,908,062	

	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**					-	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**						
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	Rp 188,576,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	Rp 207,433,600	

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Dokumen	Rp 52,698,956	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Dokumen	Rp 57,968,852	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	Dokumen	Rp 208,844,649	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	Dokumen	Rp 229,729,114	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**					Rp -	

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	Dokumen	Rp 95,825,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	Dokumen	Rp 105,407,500	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	Laporan	Rp 163,042,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	Laporan	Rp 179,346,200	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	Laporan	Rp 125,521,500	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	Laporan	Rp 138,073,650	

	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**					Rp -	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	Rp 105,162,500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	Rp 115,678,750	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	Laporan	Rp 50,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	Laporan	Rp 55,000,000	

	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur	1	Dokumen	Rp 95,500,000	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur	1	Dokumen	Rp 105,050,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	Laporan	Rp 65,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	Laporan	Rp 71,500,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	Laporan	Rp 105,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang			Rp 115,500,000	

									Kewilayahan				
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**					Rp -	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						***Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***			-	0	Rp -	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1	Dokumen	Rp 50,000,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa			Rp 55,000,000	

	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						***Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan***			-	0	Rp -	
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	Dokumen	Rp 25,000,000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			Rp 27,500,000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						***Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan***						
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	Dokumen	Rp 80,000,000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	Dokumen	Rp 88,000,000	
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	Dokumen	Rp 30,000,000	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	Dokumen	Rp 33,000,000	

	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						***Pengembangan Inovasi dan Teknologi***						
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dokumen	Rp 187,725,390	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dokumen	Rp 187,725,390	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Tojo Una-Una

NO	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan Penting

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerahKabupaten Tojo Una-Unamempunyai rencana stratejik perubahan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu untuk tahun 2021–2026 yang dimulai tahun 2021 dengan RPJMD Perubahan, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana KinerjaBadan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerahKabupaten Tojo Una-Una yang mencakup tujuan, sasaran, program dan kegiatan di Tahun 2021, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD,RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun 2024 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022.

Sejalan dengan hal tersebut maka Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah Tahun 2022 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan

secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Tabel 3.1

Prioritas dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan,Riset Dan inovasi daerah Kabupaten Toho Una-una

NO	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
	Mengoptimalkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Melaksanakan perencanaan, pengendalian dan penganggaran daerah yang terintegrasi berbasis IT.	Nilai SAKIP Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antar dokumen Perencanaan
	Meningkatkan dan mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Pengintensifkan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi daerah yang berkualitas	Persentase Hasil penelitian dan Pengembangan serta inovasi daerah yang dimanfaatkan dan berkelanjutan
		Peningkatan Kinerja pembangunan daerah dan Optimalisasi monitoring, evaluasi dan pengawasan pembangunan		Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

3.2. *Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah*

Dalam rangka mewujudkan Misi Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah Kabupaten Tojo Una-Una,maka Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah Kabupaten Tojo Una-Una menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerahKabupaten Tojo Una-Una

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2023
1.	Terselenggarakan kualitas dan kinerja perencanaan Pembangunan dan pengembangan daerah	Persentase Keselarasan antar dokumen Perencanaan	**100%**
2.	Terselenggarakan Pelayanan Publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada Inovasi	Persentase Hasil penelitian dan Pengembangan serta inovasi daerah yang dimanfaatkan dan berkelanjutan	**10%**
3.	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	BB

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwuju dan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024,prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme OPD Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, pelaksanaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan OPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib (Program),dengan ruang lingkup kegiatannya.

Selanjutnya, dalam menunjang perwujudan Visi MisiBadan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah tahun 2024 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan**

   Dengan kegiatan sebagai berikut :

   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyusunan Pelaporan Dan analisis Progrnosis

   b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Komponen Instalasi
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

- Penyelenggaraan Rapat Kordinasi Dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan

c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/rehabilitas Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

d. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Lisrik
-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

2. Program Perencanaan Pengendalaian Dan Evaluasi

Dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat daerah

Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah

b. Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan
- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

c. Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan daerah
- Pembinaan Dan pemanfaatan data dan Informasi perencanaan pembangunan Perangkat daerah

d. Pengendalian Evaluasi Dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan daerah
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan daerah di Kabupaten/Kota
- Monitoring , Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan

Pembangunan daerah

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Koordinasi Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencnaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan

c. Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)

- Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

a. Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan

- Fasilitasi,Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Badan usaha milik desa.

b. Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan

- Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

c. Penelitian danPengembangan Bidang Dan Pembangunan

- Penelitian Dan Pengembnagan pertanian, perkebunan dan pangan
- Penelitian dan pengembangan kelautan dan pangan

d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi

Tujuan dan sasaran rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dibawahdapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.3

Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah

Kabupaten Tojo Una-Una

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antar dokumen Perencanaan	100%
2.	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi daerah yang berkualitas	Persentase Hasil penelitian dan Pengembangan serta inovasi daerah yang dimanfaatkan dan berkelanjutan	10%
3.	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	BB

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah Kabupaten Tojo Una-Una

NO	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antar dokumen Perencanaan	100%
2.	Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi daerah yang berkualitas	Persentase Hasil Riset dan inovasi daerah yang dimanfaatkan dan berkelanjutan	10%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	BB

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAEARAH

4.1 Telaan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

4.1.1 Visi Bupati dan Wakil Bupati

Visi merupakan suatu pernyataan komprehensif tentang segala sesuatu yang diharapkan pada masa yang akan datang dan dibuat sebagai pedoman atau arah tujuan jangka menengah Pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang *(clarity of direction)*. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Adapun Visi Kabupaten Tojo Una-Una dalam RPJMD tahun 2021 – 2026 yaitu :

TERWUJUDNYA KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TANGGUH, MAJU, DAN SEJAHTERA(TAMARA)

Makna dari Visi tersebut adalah terwujudnya sebuah tatanan masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang tangguh dalam menghadapi krisis,peluang dan tantangan baik dalam aspek sosial,ekonomi maupun bencana yang dapat menjadi modal dasar untuk menuju wilayah yang berkembang maju dan meninggalkan ketertinggalan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan serta terwujudnya pembangunan

wilayah yang berkelanjutan dalam mewujudkan Visi tersebut,maka motto yang dipilih sebagai ikon semangat adalah,**GAPAI TAMARA.**

TAMARA adalah seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan kebaikan bersama disemua komponen masyarakat dana paratur Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una secara utuh,bersinergi dan saling melengkapi. Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut :

TANGGUH

- Mempersiapkan masyarakat Tojo Una-Una yang **Tangguh** dimana masyarakat berpikir positif dan optimisme meraih masa depan dan secara utuh,bersinergi dan saling melengkapi, sehingga dapat terwujud kehidupan masyarakat Tojo Una-Una yang TAMARA.
- Kemajuan di semua bidang itu harus dibarengi dengan kemampuan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia, sehingga Kabupaten Tojo Una-Una tidak sekedar Maju tetapi juga **Tangguh** menghadapi hambatan dan tantangan, menyiasati peluang dan menggerakan potensi yang dimiliki secara Bersama, meningkatnya Ketahanan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi krisis Bencana alam dan Non-Alam termasuk Covid-19 serta Perubahan Iklim yang sulit diprediksi namun dapat di antisipasi dampaknya oleh masayarakat, mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) baik dari tingkat Desa sampai Kabupaten.
- Secara umum **ketangguhan berkelanjutan** juga dimaksudkan bagi kehidupan yang berlangsung secara terus-menerus atau adanya Pemerintahan berkesinambungan dan melanjutkan apa yang sudah

diraih saat ini, dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang kuat dan tangguh dalam menghadapi krisis pembangunan daerah sehingga tetap teguh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Masyarakat Tojo Una-Una sebagai makhluk sosial. Akar budaya masyarakatnya berada dalam ikatan social *(social-capital)*. Keterhubungan dan sifat saling membantu, Kerjasama melahirkan ketangguhan masyarakat *(social-resilience)*. Ketangguhan masyarakat merupakan suatu kapasitas yang berkelanjutan dalam suatu masyarakat untuk menyelesaikan masalah daerah serta cepat dalam pemulihan menghadapi bencana alam dan non-alam. Membangun ketangguhan masyarakat sebagai stra-tegi dalam program kesiapsiagaan guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu perspektif, ketangguhan masyarakat memiliki potensi untuk mengatasi masalah umum dan spesifik seperti mengantisipasi penyebaran covid-19. Perspektif ini membingkai kegiatan sebagai sebuah kegiatan yang berkelanjutan. Ketangguhan masyarakat menyedia-kan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menyelaraskan kesiapsiagaan darurat dan upaya pemulihan secara cepat baik dari sisi Kesehatan, Pendidikan maupun pembangunan ekonomi daerah.
- **Tangguh** juga memiliki makna bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan pembangunan Bersama masyarakat secara berkelanjutan menciptakan dan membangun dengan **Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan dan Kabupaten tertinggal**, Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah sejalan dengan tiga pilar dasar pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi *(economic development)*, pembangunan sosial *(social development),* dan perlindungan

lingkungan *(environmental protection)*.

MAJU

- **Maju** mengarah pada pengertian terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik atau lebih berkualitas dari sebelumnya dalam semua sektor kehidupan. Keadaan itu dicapai melalui upaya memanfaatkan potensi dan sumber daya daerah, baik manusia, alam maupun buatan. Kemajuan juga menjelaskan sebuah transformasi pengelolaan kehidupan bersama yang diarahkan untuk mencapai keadaan yang lebih baik, melalui upaya-upaya ter-organisir dan sistematis. Keadaan baru yang dikehendaki dan ingin dicapai adalah Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una yang lebih Maju dalam semua bidang sehingga terantaskan dari posisi salah satu Kabupaten tertinggal di Sulawesi Tengah dan Berkurangnya angka kemiskinan secara signifikan.
- Secara umum **Maju** memiliki arti, menjadi lebih baik, telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi. visi ini ditargetkan untuk diraih Kabupaten Tojo Una-Una dengan standar hidup *(living standard)* yang lebih baik (tingkat kesejahteraan) dibanding kondisi sebelumnya baik diwilayah Daratan maupun Kepulauan secara merata. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar sebagai dasar kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- **Maju** juga ditandai pelayanan Publik yang maju dan mampu melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una.
- **Maju** sebagai upaya mewujudkan pembangunan wilayah yang berkembang dan maju untuk keluar dari ketertinggalan daerah (status kabupaten tertinggal).

SEJAHTERA

) Bahwa pembangunan daerah yang berorientasi pada

kemandirian ekonomi bertujuan untuk meningkatkan ***kesejahteraan masyarakat*** yang harus dinikmatioleh masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una.

- Pengembangan Trisula sektor unggulan daerah sehingga berdampak pada peningkatan ***Kesejahteraan Masyarakat***.
- Mewujudkan Tojo Una-Unak hususnya Pulau Togean sebagai salah satu destinasipariwisata nasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan **kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui** Mengembangkan inovasi teknologi dan sistem kelembagaan untuk peningkatan produksi,ketahanan pangan.
- Kata **Sejahtera** menekankan peningkatan pertumbuhandan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang meningkatdan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia,peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dankesejateraan sosial, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, peningkatan partisipasi pemudadan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan.Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan social dasar bagiseluruh warganya,sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

4.1.2 Misi Bupati dan Wakil Bupati

Misi dan visi merupakan sebuah rangkaian filosofi atau tujuan yang

ditetapkan suatu organisasi sebagai arah tujuan kemana organisasi atau perusahaan akan dibawa. Misi merupakan rumusan umum dan tindakan strategis untuk mencapai Visi. Dalam RPJMD Kabupaten Tojo

Una-Una terdapat lima rumusan misi yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Misi 1 : TOUNA TANGGUH

Mewujudkan Masyarakat yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bendana, dan Lingkungan Berkelanjutan.

Misi 2 : TOUNA MAJU

Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Maju dan Keluar Dari Daerah Tertinggal.

Misi 3 : TOUNA SEJAHTERA

Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan Kelautan, dan Pariwisata Berkelanjutan.

Misi 4 : TOUNA BERDAYA SAING

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang Berkeadilan.

Misi 5 : TOUNA *SMART*

Mewujudkan Aparatur dan Sistem Pemerintahan Daerah yang Profesional Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis *Smart Governance.*

4.1.3 Penjabaran Misi Touna Smart

Dalam mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati, Bapperida dipriotitaskan dalam pencapaian misi ke lima pada RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam penjabarannya, konsep *Smart Governance* dipilih sebagai strategi pelayananyang lebih ditekankan pada peningkatan peran pemerintah sebagai pengayom dan pemberi pelayanan kepada masyarakat, disamping itu juga terdapat peran masyarakat sebagai

partisipan dan objek pembangunan *(Konsep Kota/Kabupaten Madani).*Pemerintahan yang cerdas adalah pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi.Kearifan lokal juga mengindentifikasikan seberapa *smart* pemerintah dalam pengelolaan pemerintahannya.

Adanya prakarsa dan kreativitas Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat dan swasta untuk menciptakan kerjasama yang harmonis untuk membangun Kelembagaan pemerintah daerah yang handal, profesional, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada Pelayanan Publik dari Pemerintah Kabupaten hingga Desa. Pemerintah, dunia usaha, institusi Pendidikan, masyarakat dan Lembaga Masyarakat, serta media massa, adalah lima pilar utama *(Pentahelix)* dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang baik *"Smart Governance".* Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan atau wewenang didalam mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik yang memuaskan.

Smart governance sebagai salah satu indikator penting bagi Kabupaten pintar untuk mewujudkanaparaturdansystempemerintahan daerah yang professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan public mengharuskan adanya beberapa aspek penting dalam pemerintahan. Tiga aspek utama dalam *smart governance* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan, mewujudkan transparansi dan keterbukaan data, serta merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga melalui optimalisasi penggunaan teknologi dan adanya Inovasi pembangunan yang diinisiasi oleh Perangkat daerah dan Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una.

a) Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari rumusan misi Touna *Smart*sebagai upaya Mewujudkan Aparatur dan Sistem Pemerintahan Daerah yang Profesional Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis *Smart Governance*yaitu Terselenggarakan Pelayanan Publik berbasis *Smart Governance* yang berorientasi pada Inovasi.

b) Sasaran

Dalam rangka mewujudkan misi Touna *Smart* di atas, Bapperida memiliki dua sasaran pembangunan yakni :

1. Meningkatnya kualitas dan kinerja Pemerintah Daerah

   Adapun yang menjadi indikator gambaran pencapaian kinerja terkait peningkatan kualitas dan kinerja Pemerintah Daerah yaitu : telah di tetapkan PERDA terkait dokumen perencanaan RPJPD, telah di tetapkan PERDA/PERKADA terkait dokumen perencanaan RPJMD, telah di tetapkan PERKADA dokumen perencanaan RKPD. Telah ditetapkan PERDA terkait dokumen RTRW, Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD presentase 100 %, Konsistensi Program RKPD kedalam APBD presentase 100 %.
2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan

   Adapun indikator yang menjadi pencapaian kinerja terkait peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu : Presentase 80-90 % tindak lanjut temuan, dan Jumlah temuan BPK 30-40 Kasus.

4.2 Telaan Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi

4.2.1 Renstra Bappenas 2020 – 2024

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah:

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas : 1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;

2) produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan

Kredibel : 3) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatifdan berorientasi ke depan.

Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Misi 1 **:** Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi 2 **:** Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.

a. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

- Tujuan satu,mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
- Tujuan dua,Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
- Tujuan tiga, mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

b. Sasaran

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu:

- Sasaran strategis satu, terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
- Sasaran strategis dua, terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
- Sasaran strategis tiga, terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
- Sasaran strategis empat, terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenasyang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

4.3 Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

4.3.1 Tujuan dan Arah Kebijakan

Adapun tujuan dari penataan ruang wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, adalah mewujudkanKabupaten Tojo Una-Una sebagai pusat kegiatan perikanan, pertanian, pariwisata di bagian Timur Provinsi Sulawesi Tengah yang didukung oleh industri, dan perhubungan dengan

mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam.

A. Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang Wilayah Kabupaten TojoUna-Una

Kebijakan dan strategi struktur ruang wilayah kabupaten Tojo Una-Una terdiri atas pengembangan sistem permukiman dan sistem prasarana wilayah.

Kebijakan 1 :

Pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pengembangan perikanan, pertanian dan pariwisata yang didukung oleh industri untuk pertumbuhan wilayah disertai pemerataan secara seimbang;

Kebijakan 2 :

Penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif perikanan, pertanian dan pariwisata yang didukung oleh industri sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan.

B. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una

Kebijakan pola ruang di wilayah kabupaten Tojo Una-Una mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, dimana kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya dan kawasan budidaya akan dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimum.

Kebijakan 1 :

Pemantapan fungsi kawasan lindung untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup, serta kelestarian

pemanfaatan potensi sumber daya alam sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kebijakan 2 :

Pengembangan kawasan budidaya dalam mendorong pengembangan perikanan, pertanian dan pariwisata yang didukung oleh industri dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan 3 :

Pelestarian sumberdaya zona pesisir dan laut dan mendorong perkembangan fungsi budidaya zona pesisir dan laut untuk perikanan, permukiman, pariwisata, dan prasarana perhubungan

Kebijakan 4 :

Peningkatan Fungsi Kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara

4.3.2 Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan :

2. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
3. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
4. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; serta
5. Mendayagunakan produk tata ruang sebagai alat penataan, penyusunan program pembangunan dan pengendalian secara optimal.

Adapun tujuan dari penataan ruang wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, adalah mewujudkan Kabupaten Tojo Una-Una sebagai "pusat kegiatan perikanan, pertanian, pariwisata di bagian Timur Provinsi Sulawesi Tengah yang didukung oleh industri, dan perhubungan dengan mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam".

A. Kawasan Strategis Kabupaten Tojo Una-Una

Rencana Pengembangan Kawasan Strategis di Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari kawasan strategis nasional, kawasan strategis Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kawasan Strategis Kabupaten. Adapun yang berpotensi menjadi kawasan strategis Kabupaten Tojo Una-Una yaitu :

1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
   a. Kawasan Perkotaan Ampana
   b. Kawasan Minapolitan
   c. Kawasan Angropolitan
2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
3. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam
4. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup
5. Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan Perbatasan)

B. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang di Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari kawasan hutan lindung, pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, industri Berikut akan dijelaskan megenai potensi sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una :

1. Kabupaten Tojo Una-Una memiliki kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan suaka alam dan wisata, serta hutan yang dikonversi.
2. Kawasan pertanian terdiri atas tanaman pangan (padi sawah dan padi ladang), hortikultura, perkebunan dan peternakan
3. Kawasan perikanan terdiri atas perikanan tangkap dan budidaya
4. Kawasan peruntukan pertambangan dan energi
5. Kawasan Industri
6. Kawasan Wisata Alam

C. Kawasan Rawan Bencana

Bencana alam yang dimaksud adalah longsor, banjir, abrasi pantai, gunung api, dan tsunami gempa.

4.4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Tojo Una-Una merupakan salah satu daerah tertinggal sehingga memerlukan perencanaan pembangunan yang dapat mempercepat pengembangan wilayah.Kabupaten ini mempunyai keterbatasan ruang untuk pembangunan karena faktor geografis.Sebagian besar wilayah Tojo Una-Una merupakan kawasan lindung, yang mana terbatas bahkan dilarang untuk pembangunan bersifat masal. Sisi lain, sektor ekonomi wilayah membutuhkan ruang untuk berkembang. Kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan perlu diakomodasi sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jangan sampai pembangunan tidak memperhatikan aspek lingkungan sehingga akan menimbulkan kerusakan dan bencana. Dokumen KLHS merupakan salah satu usaha untuk mengakomodasi pembangunan berkelanjutan dalam proses perencanaan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui:

a. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul
b. Mempertimbangkan alternatif-alternatif praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik
c. Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan
d. Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul
e. Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Hasil penjaringan isu, telaan dokumen, dan sumber lain menunjukkan bahwa banyak isu terkait pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una. Masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan perizinan. Terdapat 19 isu strategis di Tojo Una-Una yang akan menjadi perhatian dalam analisis tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Adapun isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una :

1. Tingkat Pendidikan Rendah
2. Banyak Kasus Gizi buruk dan *stunting*
3. Tingkat Kesehatan Rendah

4. Rawan Pangan
5. Kemiskinan yang tinggi
6. Produksi pertanian belum optimal
7. Iklim investasi dan penanaman modal belum kondusif
8. Pengelolaan Pariwisata belum optimal
9. Tingkat Pengangguran tinggi
10. Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah rendah
11. Daerah Tertinggal
12. Tingkat Alih Fungsi Lahan Tinggi
13. Degradasi Lingkungan Tinggi
14. Pengelolaan sampah belum maksimal
15. Rawan Bencana
16. Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan terbatas
17. Belum lengkapnya regulasi sebagai dasar bagi para pelaku bisnis
18. Kualitas Pelayanan Publik belum maksimal
19. Rawan Konflik Sosial

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan Dan Sub Kegiatan

No	SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN
	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

		Pengendalian,Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi daerah yang berkualitas	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
		Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Infrastruktur
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi

		dan Inovasi
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pekerjaan tabel sebagai berikut:

Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN 2024	PAGU PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025 (Rp)	KET PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
					TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen		2	Dokumen	2	Dokumen	Rp 89,000,000	Rp 97,900,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													

	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen	Rp 104,979,308	Rp 115,477,239	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah														Rp -	
	Penyediaan Komponen Instalasi					1	Paket		1	Paket		1	Paket	Rp 2,696,500	Rp 2,966,150	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1	Paket		1	Paket		1	Paket	Rp 3,000,000	Rp 3,300,000	
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan					1	Paket		1	Paket		1	Paket	Rp 5,000,000	Rp 5,500,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen	Rp 3,000,000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD					1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan	Rp 250,096,000	Rp 275,105,600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														Rp -	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan	Rp 6,500,000	Rp 7,150,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan	Rp 69,540,000	Rp 76,494,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan	Rp 627,964,118	Rp 690,760,530	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					21 motor	3 mobil		21 motor	3 mobil		21 motor	3 mobil	Rp 112,548,854		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1	Unit		1	Unit		1	Unit	Rp 4,796,000	Rp 5,275,600	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH															
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan															
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					2	Berita Acara		2	Berita Acara		2	Berita Acara	Rp 89,084,305	Rp 97,992,736	

	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					13	Berita Acara		13	Berita Acara		13	Berita Acara	Rp 151,650,000	Rp 166,815,000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen	Rp 200,576,000	Rp 220,633,600	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah															
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah													Rp 85,534,000	Rp 85,534,000	
	Pengendalian,Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaaan Pembangunan Daerah															
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota					1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan	Rp 95,185,000	Rp 104,703,500	

	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan	Rp 209,916,420	Rp 230,908,062	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia															
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen	Rp 188,576,000	Rp 207,433,600	

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen	Rp 52,698,956	Rp 57,968,852	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen	Rp 208,844,649	Rp 229,729,114	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)															
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen	Rp 95,825,000	Rp 105,407,500	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan	Rp 163,042,000	Rp 179,346,200	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan	Rp 125,521,500	Rp 138,073,650	

	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan														Rp -	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen	Rp 105,162,500	Rp 115,678,750	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan	Rp 50,000,000	Rp 55,000,000	
	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Infrastruktur					1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen	Rp 95,500,000	Rp 105,050,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan	Rp 65,000,000	Rp 71,500,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan	Rp 105,000,000	Rp 115,500,000	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan															

	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa					1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen	Rp 50,000,000	Rp 55,000,000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan														Rp -	
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata					1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen	Rp 25,000,000	Rp 27,500,000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan														Rp -	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan					1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen	Rp 80,000,000	Rp 88,000,000	
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan					1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen	Rp 30,000,000	Rp 33,000,000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi														Rp -	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen	Rp 187,725,390	Rp 206,497,929	

BAB V

PENUTUP

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Berdasarkan hal di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu disusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah Kapaten Tojo Una-Una.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah merupakan dokumen perencanaan Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah untuk periode 1 (satu) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan,Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Demikian Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dibuat dengan harapan dapat

bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf dan masukan untuk perkembangan yang lebih baik.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAPPERIDA KABUPATENTOJO UNA-UNA

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	RGET RENSTRA PERANGKAT DAER				ealisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Capaian Nilai Sakip			CC	B	B	BB	BB	BB	BB	BB-A	
2	**Meningkatkan Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	**Meningkatkan Hasil Penelitian Dan Inovasi Daerah Yang Berkualitas**			100%	100%	100%	100%	10%	10%	100%	100%	

Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun

NO	RENCANA AWAL RKPD			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	IDIKATOR KINER.	TAREGET CAPAIAN
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket

	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 motor 3 mobil
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			

	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	13 Berita Acara
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			
	Pengendalian,Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaaan Pembangunan Daerah			
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			

	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan

	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Dokumen
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			

	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen

		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PAGU INDIKATIF (Rp)		**PROGRAM/KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TAREGET CAPAIAN**	
6		7	8	9	10	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Rp	89,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Rp	104,979,308	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Rp	2,696,500	Penyediaan Komponen Instalasi		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket
Rp	3,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket

Rp	5,000,000	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket
Rp	3,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen
Rp	250,096,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Rp	6,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan
Rp	69,540,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan
Rp	627,964,118	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Rp	112,548,854	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 motor	3 mobil
Rp	4,796,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				

Rp	89,084,305	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2	Berita Acara
Rp	151,650,000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	13	Berita Acara
Rp	200,576,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1	Dokumen
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
Rp	85,534,000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				
		Pengendalian,Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaaan Pembangunan Daerah				
Rp	95,185,000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	Laporan
Rp	209,916,420	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1	Laporan
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				

		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
Rp	188,576,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen
Rp	52,698,956	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Dokumen
Rp	208,844,649	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	Dokumen
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
Rp	95,825,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	Dokumen
Rp	163,042,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	Laporan
Rp	125,521,500	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	Laporan

		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
Rp	105,162,500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen
Rp	50,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	Laporan
Rp	95,500,000	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur	1	Dokumen
Rp	65,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	Laporan
Rp	105,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			-	0
Rp	50,000,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			-	0

Rp	25,000,000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			-	0
Rp	80,000,000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	Dokumen
Rp	30,000,000	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	Dokumen
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				
Rp	187,725,390	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dokumen

KEBUTUHAN DANA (Rp)	CAPAIAN PENTING
11	12
Rp 97,900,000	
Rp -	
Rp 115,477,239	
Rp -	
Rp 2,966,150	
Rp 3,300,000	

8,900,000

-

10,497,931

-

269,650

300,000

Rp	5,500,000		500,000
Rp	3,300,000		300,000
Rp	275,105,600		25,009,600
Rp	-		-
Rp	7,150,000		650,000
Rp	76,494,000		6,954,000
Rp	690,760,530		62,796,412
Rp	-		-
Rp	123,803,739		11,254,885
Rp	5,275,600		479,600
Rp	-		-
Rp	-		-

Rp	97,992,736		8,908,431
Rp	166,815,000		15,165,000
Rp	220,633,600		20,057,600
Rp	-		-
Rp	94,087,400		8,553,400
Rp	-		
Rp	104,703,500		9,518,500
Rp	230,908,062		20,991,642
Rp	-		-

Rp	-		-
Rp	207,433,600		18,857,600
Rp	57,968,852		5,269,896
Rp	229,729,114		20,884,465
Rp	-		-
Rp	105,407,500		9,582,500
Rp	179,346,200		16,304,200
Rp	138,073,650		12,552,150

Rp	-		-
Rp	115,678,750		10,516,250
Rp	55,000,000		5,000,000
Rp	105,050,000		9,550,000
Rp	71,500,000		6,500,000
Rp	115,500,000		10,500,000
Rp	-		-
Rp	-		-
Rp	55,000,000		5,000,000
Rp	-		-

Rp	27,500,000		
			2,500,000
Rp	-		
			-
Rp	88,000,000		
			8,000,000
Rp	33,000,000		
			3,000,000
			-
Rp	187,725,390		

Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku Kepentingan Tahun
Kabupaten Tojo Una-Una
Badan Perencanaan Pengembangan,Riset Dan Inovasi Daerah Kabupa

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran / Volume
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi	Tojo Una-Una	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tojo Una-Una	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tojo Una-Una	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1 Dokumen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	1 Laporan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Tojo Una-Una	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	21 motor 3 mobil
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tojo Una-Una	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Tojo Una-Una	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tojo Una-Una	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	13 Berita Acara
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Tojo Una-Una		
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Infrastruktur	Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Dokumen
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan

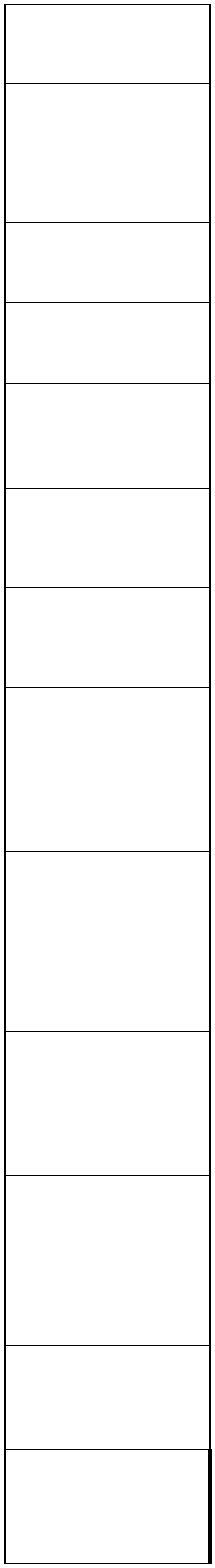
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tojo Una-Una		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Dokumen
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tojo Una-Una		
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tojo Una-Una		
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tojo Una-Una		
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokume
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Laporan

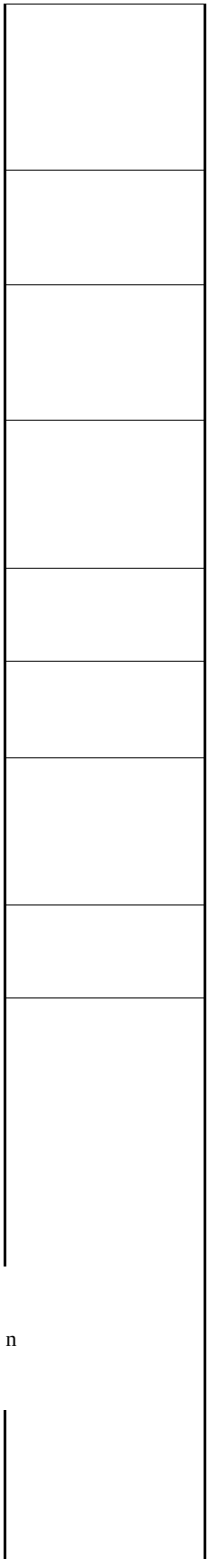
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	1 Dokumen
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen
Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang	1 Dokum

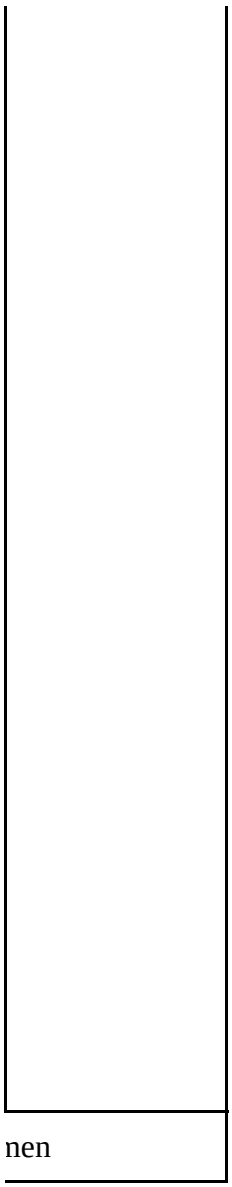
Anggaran 2024

ıten Tojo Una-Una

Catatan Penting




n



nen

TABEL 3.1
Prioritas dan Sasaran
Badan Perencanaan Pengembangan,Riset Dan Inovasi Daerah

NO	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
	Mengoptimalkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Melaksanakan perencanaan, pengendalian dan penganggaran daerah yang terintegrasi berbasis IT.	Nilai SAKIP Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antar dokumen Perencana
	Meningkatkan dan mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Pengintensifkan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi daerah yang berkualitas	Persentase Hasil penelitian dan Pengembangan serta inovasi
		Peningkatan Kinerja pembangunan daerah dan Optimalisasi monitoring, evaluasi dan pengawasan pembangunan		Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan

TABEL 3.2
TUJUAN

Badan Perencanaan Pengembangan,Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2023
	Terselenggarakan kualitas dan kinerja perencanaan Pembangunan dan pengembangan daerah	Persentase Keselarasan antar dokumen Perencanaan	**100%**
	Terselenggarakan Pelayanan Publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada Inovasi	Persentase Hasil penelitian dan Pengembangan serta inovasi daerah yang dimanfaatkan dan berkelanjutan	**10%**
	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	BB

TABEL 3.3
SASARAN
Badan Perencanaan

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan	100%
	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi daerah yang berkualitas	Persentase Hasil penelitian dan Pengembangan serta inovasi daerah yang dimanfaatkan	10%
	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan	BB

TABEL 3.3
Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pengembangan,Penelitian Dan

NO	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antar dokumen Perencanaan	100%
	Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi daerah yang berkualitas	Persentase Hasil Riset dan inovasi daerah yang dimanfaatkan dan berkelanjutan	10%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	BB

TABEL 4,1

Sasasarn dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Perencanaan Pengembangan,Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

No	SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN
	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
		Pengendalian,Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Infrastruktur
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi daerah yang berkualitas	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi

		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

PROGRAM]

PERANGKAT DAERAH : BAPPERIDA

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Penyediaan Komponen Instalasi			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan			

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			

		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			
		Pengendalian,Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaaan Pembangunan Daerah			
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			

		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			

		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
		Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Infrastruktur			
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			

		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan			
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			
					JUMLAI

DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA				
CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL
TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR
7	8	9	10	11
	2 Dokumen		2 Dokumen	
	2 Dokumen		2 Dokumen	
	1 Paket		1 Paket	
	1 Paket		1 Paket	
	1 Paket		1 Paket	

	1 Dokumen		1 Dokumen	
	1 Laporan		1 Laporan	
	1 Laporan		1 Laporan	
	1 Laporan		1 Laporan	
	1 Laporan		1 Laporan	
	21 motor 3 mobil		21 motor 3 mobil	
	1 Unit		1 Unit	
	2 Berita Acara		2 Berita Acara	
	13 Berita Acara		13 Berita Acara	

	1 Dokumen		1 Dokumen	
	1 Laporan		1 Laporan	
	1 Laporan		1 Laporan	

	1 Dokumen		1 Dokumen	
	1 Dokumen		1 Dokumen	
	1 Dokumen		1 Dokumen	

	1 Dokumen		1 Dokumen	
	1 Laporan		1 Laporan	
	1 Laporan		1 Laporan	
	1 Dokumen		1 Dokumen	
	1 Laporan		1 Laporan	
	1 Dokumen		1 Dokumen	
	1 Laporan		1 Laporan	
	1 Laporan		1 Laporan	

	1 Dokumen		1 Dokumen	
	1 Dokumen		1 Dokumen	
	1 Dokumen		1 Dokumen	
	1 Dokumen		1 Dokumen	
	1 Dokumen		1 Dokumen	

H

KEGIATAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN 2024	PAGU PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025 (Rp)
12		13	
		Rp 1,279,120,780	
	2 Dokumen	Rp 89,000,000	Rp 97,900,000
	2 Dokumen	Rp 104,979,308	Rp 115,477,239
			Rp -
	1 Paket	Rp 2,696,500	Rp 2,966,150
	1 Paket	Rp 3,000,000	Rp 3,300,000
	1 Paket	Rp 5,000,000	Rp 5,500,000

1 Dokumen	Rp	3,000,000		
1 Laporan	Rp	250,096,000	Rp	275,105,600
			Rp	-
1 Laporan	Rp	6,500,000	Rp	7,150,000
1 Laporan	Rp	69,540,000	Rp	76,494,000
1 Laporan	Rp	627,964,118	Rp	690,760,530
21 motor 3 mobil	Rp	112,548,854		
1 Unit	Rp	4,796,000	Rp	5,275,600
2 Berita Acara	Rp	89,084,305	Rp	97,992,736
13 Berita Acara	Rp	151,650,000	Rp	166,815,000

1 Dokumen	Rp 200,576,000	Rp 220,633,600
	Rp 85,534,000	Rp 85,534,000
1 Laporan	Rp 95,185,000	Rp 104,703,500
1 Laporan	Rp 209,916,420	Rp 230,908,062

1 Dokumen	Rp	188,576,000	Rp	207,433,600
1 Dokumen	Rp	52,698,956	Rp	57,968,852
1 Dokumen	Rp	208,844,649	Rp	229,729,114

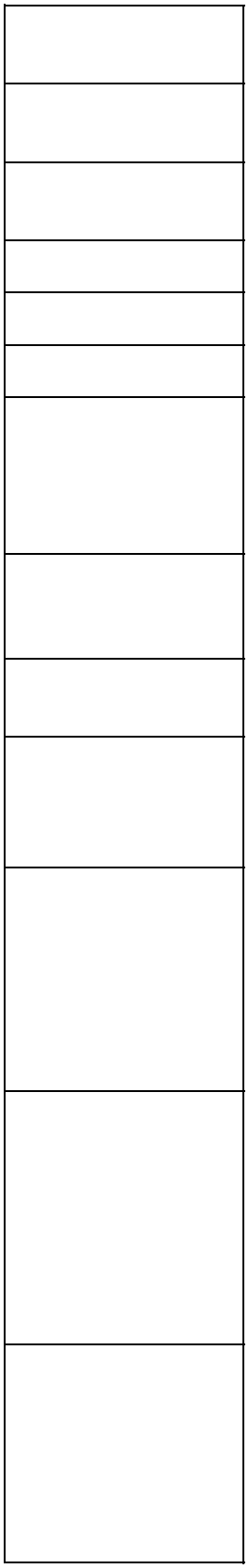
1 Dokumen	Rp	95,825,000	Rp	105,407,500
1 Laporan	Rp	163,042,000	Rp	179,346,200
1 Laporan	Rp	125,521,500	Rp	138,073,650
			Rp	-
1 Dokumen	Rp	105,162,500	Rp	115,678,750
1 Laporan	Rp	50,000,000	Rp	55,000,000
1 Dokumen	Rp	95,500,000	Rp	105,050,000
1 Laporan	Rp	65,000,000	Rp	71,500,000
1 Laporan	Rp	105,000,000	Rp	115,500,000

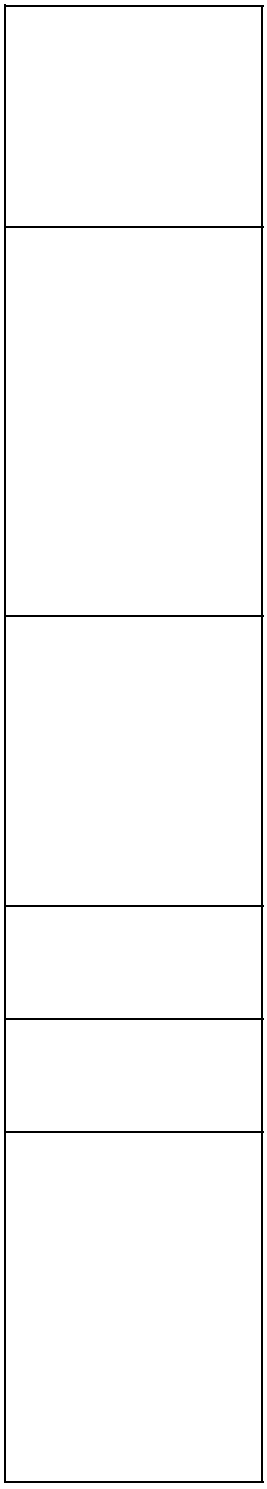
1	Dokumen	Rp	50,000,000	Rp	55,000,000
				Rp	-
1	Dokumen	Rp	25,000,000	Rp	27,500,000
				Rp	-
1	Dokumen	Rp	80,000,000	Rp	88,000,000
1	Dokumen	Rp	30,000,000	Rp	33,000,000
				Rp	-
1	Dokumen	Rp	187,725,390	Rp	206,497,929
		Rp	**5,018,083,280**	**Rp**	**3,977,201,611**

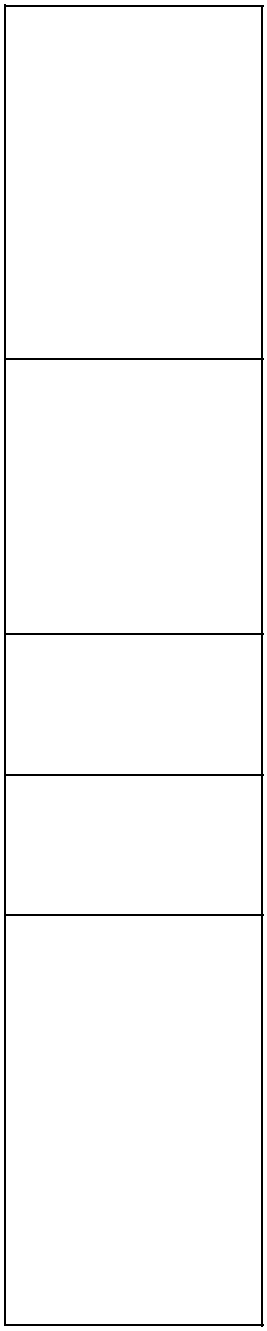
Rp 8,805,837,324.00

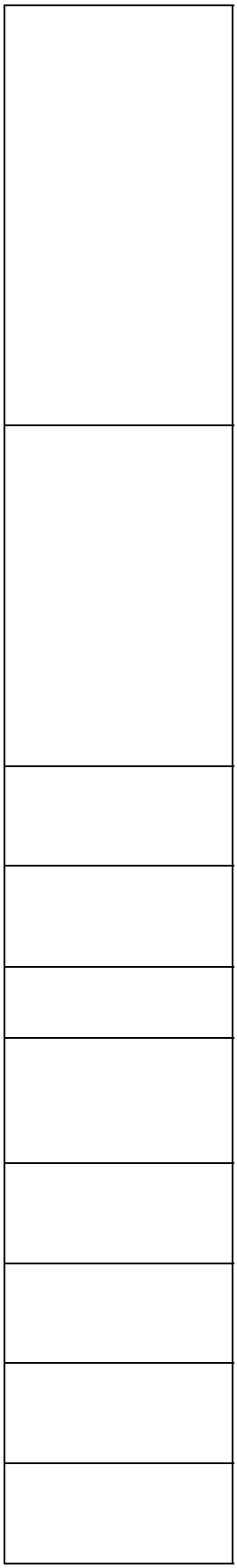
3,787,754,044.00

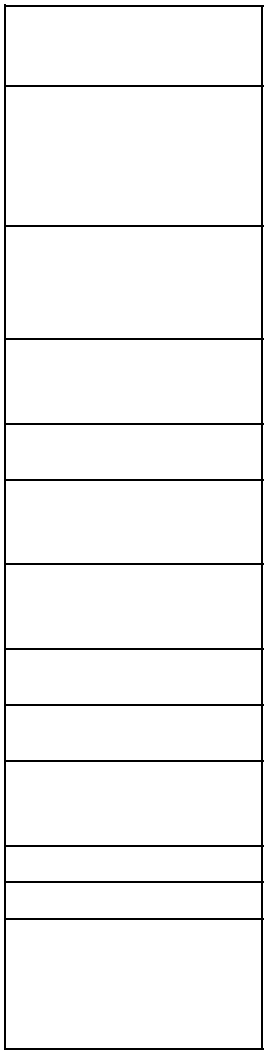
KET PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
15











REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN TAHUN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BAPPERIDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu (n-2)					Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2022		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8= (7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**Nilai SAKIP BAPPELITBANGDA**														
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Nilai Sakip Bapperida**														
	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terpenuhinya Laporan Prognosis	2	Dok			2	lap	2	lap	100	2	Dokumen	4	Dokumen	200.0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhnya Jasa Administrasi Perkantoran														.
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Tersdianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bln			12	bln	12	bln	100	12	Bln	24	Bln	200
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Bahan Logistik					12	bln	12	bln	100	12	Bln	24	Bln	
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Teresedianya Barang Penggandaan					12	Bln	12	Bln	100	12	Bln	24	Bln	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1	Lap	60	Kali	10	Kali	10	Kali	100	60	Kali	130	Kali	130

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan					12	bln	12	bln	100	12	Bln	24	Bln	#DIV/0!
Prorgram Pelayanan Adminstrasi Perkantoran													0		#DIV/0!
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			60	KALI								60		#DIV/0!
Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah			22	KALI								22		#DIV/0!
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran			**12**	Bln								12		#DIV/0!
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													0		#DIV/0!
Penyediaan jasa Pemeliharaan,Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraaan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operaional	21	unit			21	Unit	21	Unit	100	21	Unit	42	Unit	200
Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor	1	unit			1	Gedung	1	Gedung	100	1	Gedung	2	Gedung	2
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia												0		#DIV/0!
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	200	lembar			200	Lembar	200	Lembar	100	200	Lembar	400	Lembar	200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	12	bln			12	Bln	12	Bln	100	12	Bln	24	Bln	200
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Jasa Kebersihan Kantor	12	bln			12	Bln	12	Bln	100	12	Bln	24	Bln	200
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0		#DIV/0!
Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Tersusunya Laporan Renstra Dan Renja	2	Dok			10	Dok	10	Dok	100			10	Dok	500

	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur													0		0
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan			20	Unit								20		0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara			23	unit								23		0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara			**20**	**unit**								20		0
	Program Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemberdayaan															
	Koordinasi Perencanaan Dan Evaluasi Bidang Pemberdayaan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Dan Evaluasi Bidang Sosial Pemberdayaan			1	Keg								1		0
	Koordinasi Perencanaan Dan Bidang Evaluasi Bidang Ekonomi	Jumlah Koordinai Perencanaan Dan Evaluasi Sosial Bidang Ekonomi			1	Keg								1		0
	Koordinasi Perencanaan Dan EvaluasiBIdang Sosial Budaya	Jumlah Koorinasi Perencanaan Dan Evaluasi Bidang Sosial Budaya			12	Kec								12		0
	Program Pengembangan Data &Informasi															
	Penyusunan & Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan	Jumlah Data/informasi yang terkumpul dalam bentuk buku			4	Dok								4	Dok	0
	Penyusunan Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Dokumen Buku tentang Perencanaan Pembangunan			1	Dok								1	Dok	0
	Penyusunan Profil Kabupaten Tojo Una-una	Jumlah Buku dan Film Dokumenter			1	Dok								1	Dok	0
	Peningkatan Riset, Iptek, Sumber Daya dan Inovasi Daerah	Jumlah Pelaksanaan Lomba dan Upacara dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional			6	Dok								6	Dok	0
	Pembentukan Forum Data OPD	Jumlah Forum Data OPD			1	Dok								1	Dok	0
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah															

Penyusunan Dokumen dan Instrumen Perencanaan (KUA, PPAS dan laporan	Jumlah Dokumen dan Instrumen Perencanaan (KUA, PPAS dan laporan tahunan)			3	Dok								3	Dok	0
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah MOU			1	Dok								1	Dok	0
Penyusunan Laporan Capaian Pembangunan Daerah	Jumlah MOU			2	Dok								2	Dok	0
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang														
Koordinasi Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	**Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**												0		#DIV/0!
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur(RPJPD,RPJMD, Dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dok			6	Dok	6	Dok	100	6	Dokumen	12	Dokumen	1200
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	1	Dok			2	Lap	2	Lap	100	6	Dokumen	8	Dokumen	800
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Pembangunan Manusia	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	1	Lap			6	Dok	6	Dok	100	2	Laporan	8	Laporan	800

Koordinasi Perancanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahaan	**Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang Infrastruktur dan kewilayahan**												0		#DIV/0!
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahaan	Jumlah koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan pembangunan Kewilayahaan	1	Dok								1	Dok	#VALUE!	Dok	#VALUE!
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPMJD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembangunan					1	Dok				1	Dok	1	Dok	0
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tersusunnya Dokumen Perencanaan pembagubab infrastruktur					1	Dok				1	Dok	1	Dok	0
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Dokumen					1	Dok				1	Dok	1		0
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencananaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksanya Monitoring Dan Evaluasi Infrastruktur	1	Lap			1	Dok						0		0
Asistensi Peyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan pembagubab infrastruktur					4	Dok				4	Dok	4	Dok	#DIV/0!
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring Dan Infrastruktur										1	Dok	1	Dok	#DIV/0!
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam													0		#DIV/0!

	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Prasarana Irigasi	Jumlah koordinasi Penyusunan Perencanaan Prasarana Irigasi			4	Org								4		#DIV/0!
	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Prasarana Air Minum	Jumlah koordinasi Penyusunan Perencanaan Prasarana Air Minum			4	keg								4		#DIV/0!
	Perencanaan Prasarana Air Minum	Jumlah Perencanaan Prasarana Air Minum			4	Keg								4		#DIV/0!
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif												0		#DIV/0!
	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			1	Dok								1		#DIV/0!
	Pengendalian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Pengendalian Pembangunan Infrastruktur			4	Kali								4		#DIV/0!
	Pengendalian Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen KLHS												0		#DIV/0!
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengelolaan sumber Daya Alam			4	Kali Koordinasi								4		#DIV/0!
	Program Peningkatan Kapasitas													0		#DIV/0!
	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek												0		#DIV/0!
	Program kerjasama Pembangunan													0		#DIV/0!
	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah												0		#DIV/0!
	Program Pengembangan Perumahan													0		#DIV/0!

Penyusunan Dokumen Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Perumahan												0		#DIV/0!
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan												0		#DIV/0!
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan													0		#DIV/0!
Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah	Jumlah Koordinasi Penyelesaian Perbatasan												0		#DIV/0!
Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang ekonomi dan SDA**												0		#DIV/0!
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	dok			1	Lap	1	Lap	100	1	Lap	2	Lap	200
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	Dok			1	Lap	0	Lap	0	1	Lap	1	Lap	100
Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	Lap			1	Lap	1	Lap	100	1	Lap	2	Lap	200
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah**												0		#DIV/0!
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Presentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan secara akuntabel dan tepat waktu**												0		#DIV/0!

Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah										1	Dok	1	Dok	#DIV/0!
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah laporan hasil kesepakatan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										1	Lap	1	Lap	#DIV/0!
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah laporan kesepakatan hasil desk	1	Lap								1	Lap	1	Lap	100
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil kesepakatan musrenbang	1	Lap								1	Lap	1	Lap	100
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan										12	Lap	12	Lap	#DIV/0!
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD	1	Lap								2	Dok	2	Dok	200
Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	Terlaksananya Koordinasi dan Penelaahan Atas Dokumen Perencanaan												0		#DIV/0!
Koordinasi Pengendalian Dan Pelaksanaan Pembangunan daerah di kabupaten/kota	Jumlah laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan												0		#DIV/0!
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Presentase Tersedianya dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**												0		#DIV/0!
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah										1	Dok	1	Dok	#DIV/0!

Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah jenis informasi perencanaan yang termanfaatkan	1	Dok								2	jenis	2	jenis	200
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Profil										1	Dok	1	Dok	0
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Presentase Tersedianya dokumen pelaporan evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**														
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	1	Dok								1	Dok	1	Dok	100
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala	1	Dok								1	Dok	1	Dok	100
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan**												0		#DIV/0!
Penelitian, Pengembangan Dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi Dan Inovasi	Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dok										0		0
Uji coba dan penerapan Rancang bangun / model replikasi dan inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Ujicoba dan Penerapan RancangBangun / model Replikasi dan inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi												0		#DIV/0!
Diseminasi Jenis, Prosedur dan metode pennyelanggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat Inovatif	Jumlah Diseminasi dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif												0		#DIV/0!
Sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi hasil Kelitbangan												0		#DIV/0!
Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Terlaksananya Pengembangan Kajian Bidang Sosial Kependudukan pembangunan dan Perencanaan Daerah												0		#DIV/0!

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomidan Pembangunan	Presentase Dokumen dan kajian Bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan yang tersedia												0		#DIV/0!
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen dan Kajian Pariwisata												0		#DIV/0!
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen dan Kajian Kesehatan												0		#DIV/0!
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen dan Kajian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan												0		#DIV/0!
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen dan Kajian Pengembangan Kelautan dan Perikanan												0		#DIV/0!
Penelitian dan Pengembangan Energi dan sumber daya Mineral	Jumlah Dokumen dan Kajian Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral												0		#DIV/0!
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen dan Kajian Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman												0		#DIV/0!
Penelitian dan Pengembangan BUMD	Jumlah Penelitian dan Pengembangan BUMD												0		#DIV/0!
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen dan Kajian Lingkungan Hidup												0		#DIV/0!
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Presentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan secara akuntabel dan tepat waktu												0		#DIV/0!
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Kegiatan BUMD Difasilitasi					1	Dok	1	Dok	100			1		0

Fasilitasi pemberian Rekomendasi Penelitian bagi warga negara Asing untuk diterbitkannya izin Penelitian dan instansi Yang berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian Bagi WNA yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang												0		#DIV/0!
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan												0		#DIV/0!
Program Peningkatan Kualitas Manajemen Perencanaan Litbang													0		#DIV/0!
Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Rapat Koordinasi Penelitian dan Pengembangan			30	Orang								30		#DIV/0!
Rapat Koordinasi Kelitbangan (Rakornas, FKPPD Regional, FKPPD Nasional, Rakorda)	Jumlah Rapat Koordinasi mengenai Kelitbangan			8	Kali								8		#DIV/0!
Penelitian Dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen			1	Dok								1		#DIV/0!
Pengembangan Kerjasama Dan Pembangunan Daerah	Jumlah Mou			5	Mou								5		#DIV/0!
Pengelolaan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Mou			1	Dok								1		#DIV/0!
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi													0		#DIV/0!

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			4	Triwulan								4		#DIV/0!
Peningkatkan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan SDM			1	Kegiatan								1		#DIV/0!
Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pameran Investasi yang diikuti			1	Kali								1		#DIV/0!
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi													0		#DIV/0!
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			4	Triwulan								4		#DIV/0!
Peningkatkan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan SDM			1	Kegiatan								1		#DIV/0!
Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pameran Investasi yang diikuti			1	Kali								1		#DIV/0!
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Pemanfaataan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Daerah												0		#DIV/0!
Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Dokumen Roadmap Inovasi daerah dan Perbub Inovasi												0		#DIV/0!
Penelitian, Pengembangan Dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi Dan Inovasi	Jumlah Dokumen Inovasi daerah										1	Dok	1	Dok	#DIV/0!
Ujicoba dan penerapan Rancang bangun / model replikasi dan inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Ujicoba dan Penerapan RancangBangun / model Replikasi dan inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi										1	Dok	1	Dok	#DIV/0!
Diseminasi Jenis, Prosedur dan metode pennyelanggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat Inovatif	Jumlah Diseminasi dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif										1	Dok	1	Dok	#DIV/0!

Sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi hasil Kelitbangan										12	Kec	12	Kec	0
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomidan Pembangunan	Presentase Dokumen dan kajian Bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan yang tersedia												0		#DIV/0!
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen dan Kajian Pariwisata										1	Dok	1	Dok	#DIV/0!
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen dan Kajian Kesehatan										1	Dok	1	Dok	#DIV/0!
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen dan Kajian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan										1	Dok	1	Dok	#DIV/0!
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen dan Kajian Pengembangan Kelautan dan Perikanan										1	Dok	1	Dok	#DIV/0!
Penelitian dan Pengembangan Energi dan sumber daya Mineral	Jumlah Dokumen dan Kajian Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral										1	Dok	1	Dok	#DIV/0!
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen dan Kajian Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman										1	Dok	1	Dok	#DIV/0!
Penelitian dan Pengembangan BUMD	Jumlah Penelitian dan Pengembangan BUMD										1	Dok	1	Dok	#DIV/0!
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen dan Kajian Lingkungan Hidup										1	Dok	1	Dok	#DIV/0!
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Presentase Penelitan dan Pengembangan dan Pengkajian Peraturan yang tersedia												0		#DIV/0!
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Kegiatan BUMD Difasilitasi										1	Dok	1	Dok	#DIV/0!
Fasilitasi pemberian Rekomendasi Penelitian bagi warga negara Asing untuk diterbitkannya izin Penelitian dan instansi Yang berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian Bagi WNA yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang										1	Dok	1	Dok	#DIV/0!

Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan										12	Kec	12	Kec	#DIV/0!

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**6,066,874,824.00**
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**831,945,725.00**
DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**1,255,170,605.00**
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**372,725,390.00**
	8,526,716,544.00

PEMERINTAH KABUPATEN
TOJO UNA-UNA

RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2024



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Merdeka Kota Bumi Mas Kel. Uemalingku, Kec. Ampana Kota Kode Pos 94683

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Nomor : 900/174.a/BPKAD

TENTANG

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(RENJA SKPD BPKAD)
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2024;

b. bahwa Rencana Kerja (RENJA) SKPD memuat arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanankan pembangunan daerah yang berkesinambungan;

c. bahwa Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2024 memuat Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan SKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evalausi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una Una Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una Una Nomor 106);

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (RENJA SKPD BPKAD) KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024.

KESATU : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, yang selanjutnya disebut (RENJA SKPD BPKAD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, adalah Dokumen Program/Kegiatan Periode 1 (satu) Tahun.

KEDUA : Renja SKPD BPKAD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. BAB 1 PENDAHULUAN;
b. BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA;
c. BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN;
d. BAB 4 PENUTUP.

KETIGA : Renja SKPD BPKAD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Tahun 2024.

Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampana
Pada tanggal : 10 Maret 2023

PLT. KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

RISMANTO,ST.,MM.
Pembina
NIP. 19830916 200701 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) iahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Program, Kegiatan dan sub kegiatan tersebut memuat indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana. Proses penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una mengacu pada Surat Bupati Tojo Una-Una Nomor 000.7.2.6/78/P2E-BAPPERIDA tentang Pemyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024. Oleh karena itu penyusunan Renja BPKAD dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi berjalan pada BPKAD, evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una.

Dalam dokumen Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 ini, BPKAD memiliki pagu Indikatif pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 231.762.267.240,- yang di alokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.8.311.269.642,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.5.730.081.598,-, Honorarium Non PNS sebesar Rp.651.000.000,-, Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Bantuan Keuangan sebesar Rp. 175.569.916.000,-, Belanja Tidak terduga yang disediakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- serta Belanja Hibah sebesar Rp.35.000.000.000,- yang didapat dari tahapan analisis perencanaan penganggaran RKPD oleh

(Bapperida dan internal). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023, BPKAD memiliki pagu Rp.193.350.607.294,-. Sampai dengan triwulan I, BPKAD memiliki realisasi sebesar Rp.14.147.530.379,- atau sebesar 7,31%. Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una ini diharapkan dapat mempertahankan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 Tahun berturut - turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011 – 2022 dan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2023.

Ampana, 2023

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

RISMANTO, S.T.,M.M
Pembina
NIP. 19830916 200701 1 004

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan ke hadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan sehingga Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 telah selesai disusun dalam upaya memenuhi visi dan misinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategik 2021 – 2026, yang telah memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan, yang semuanya dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BPKAD Kabuapten Tojo Una-una Tahun Anggaran 2024 Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu kepada Perencanaan Strategis, dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pagu anggaran yang tersedia Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan sistematika: Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan serta Penutup.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan diharapkan menjadi efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang beriaku sehingga kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini bermanfaat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una.

Kami ucapkan terima kasih Kepada semua pihak, khususnya para Pejabat Struktural maupun Staf Administrasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang telah bersama-sama dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 sehingga terwujudnya RENJA ini yang dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang

berkepentingan, semoga apa yang kita persembahkan ini dapat memberikan kebaikan bagi kita semua, Amiin.

Ampana, 2023

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

RISMANTO, S.T.,M.M
Pembina
NIP. 19830916 200701 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF i
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI 1
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 serta Capaian Renstra SKPD..... 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD..... 12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan SKPD 15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 19
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 19
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 20
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 24
BAB V PENUTUP..... 30

BAB 1

PENDAHULUAN

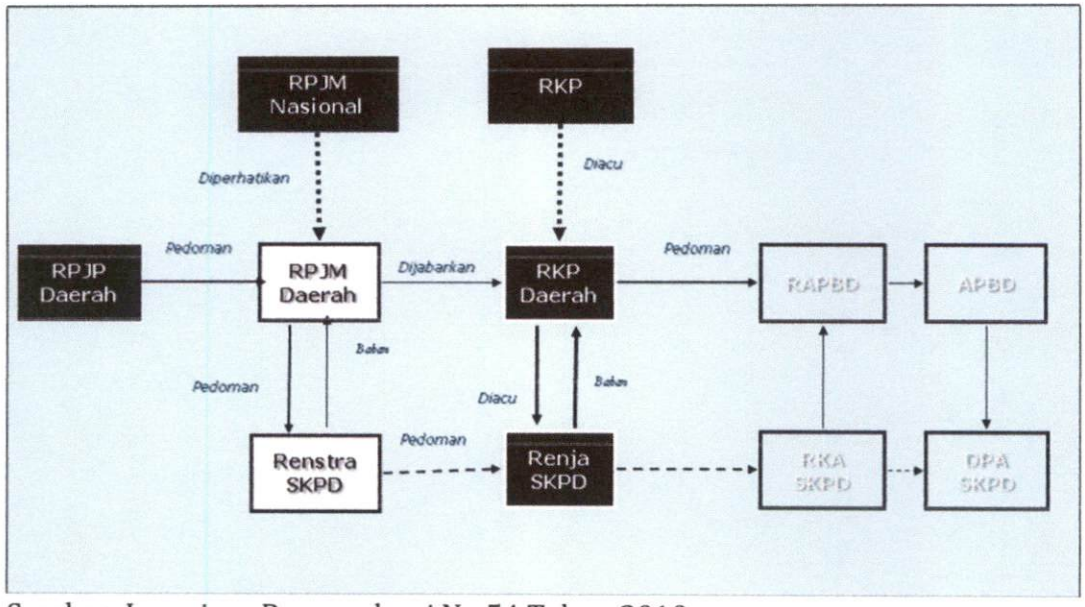
1.1. Latar Belakang

Perumusan rancangan awal Renja merupakan awal dari sebuah seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada OPD dalam menyusun Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 teknokratis dan partisipatif.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tojo Una Una merupakan Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembnagunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja BPKAD Tahun 2024 merupakan Dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Keterkaitan antara dokumen Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Sumber: Lampiran Permendagri No 54 Tahun 2010

Gambar 1.1
Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, maka disusunlah Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD yang telah ditetapkan.

Selain itu, Renja BPKAD Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) BPKAD, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja BPKAD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran dan

indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelaraan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra BPKAD dan RPJMD tahun bersangkutan.

Renja BPKAD Tahun 2024 juga mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja BPKAD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, daan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKAD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah;(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4500);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una Di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 – 2026;
20. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 Nomor 6).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja BPKAD Kabupaten Tojo Una – Una Tahun Anggaran 2024, antara lain untuk :

1. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;
2. Meningkatkan transparansi dan pastisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanan program;
3. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
5. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra BPKAD.

Sedangkan, tujuannya adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran;

2. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Kabupaten Tojo Una – Una Tahun Anggaran 2024;
3. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada BPKAD Kabupaten Tojo Una – Una Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BPKAD Tahun 2022
2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Tahun 2022
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi BPKAD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD BPKAD Tahun 2023

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran BPKAD Tahun 2024
3.3 Program dan Kegiatan BPKAD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam menjalankan tugasnya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Tojo Una-Una sebanyak 2 (dua) Sasaran.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi ini, didasarkan atas pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, evaluasi pelaksanaan Renstra, dan perkiraan pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) tahun berjalan. Dokumen Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan yaitu tahun 2023 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan RENJA SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2022 dan realisasi Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.2

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD
DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2023
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra OPD sd tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan OPD Tahun 2022			Target program/kegiatan Renja OPD tahun berjalan (2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2023		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)	12
5	02	01			**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	**Nilai Sakip OPD**									
5	02	01	2,01		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
5	02	01	2,01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	246 OPD	41 dokumen	41 OPD	41 OPD	100%	41 dokumen	123 dokumen	50%	Sekertariat
5	02	01	2.02		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
5	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100%	14 Bulan	42 Bulan	50%	Sekertariat
5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	246 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	100%	41 OPD	123 OPD	50%	Sekertariat
5	02	01	2,05		**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persentase Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**									
5	02	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	1 Orang	1 Orang	13%	Sekertariat
5	02	01	2,06		**Administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase Paket Hasil Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
5	02	01	2,06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	50%	Sekertariat
5	02	01	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	50%	Sekertariat
5	02	01	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	50%	Sekertariat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra OPD sd tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan OPD Tahun 2022			Target program/kegiatan Renja OPD tahun berjalan (2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2023		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)	12
5	02	01	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	50%	Sekertariat
5	02	01	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	50%	Sekertariat
5	02	01	2,06	9	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	50%	Sekertariat
5	**02**	**01**	**2,07**		**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan**									
5	02	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Geedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	66 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	33 Unit	50%	Sekertariat
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase Laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah**									
5	02	01	2.08	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 Lembar	500 Lembar	500 Lembar	500 Lembar	100%	500 Lembar	1500 Lembar	50%	Sekertariat
5	02	01	2.08	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Kominukasi, Sumber Daya air dan Listrik yang disediakan	72 Bulan	12 Rekening	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	50%	Sekertariat
5	02	01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	50%	Sekertariat
5	02	01	2.08	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	50%	Sekertariat
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan**									
5	02	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	162 Unit	27 Buah	27 Unit	27 Unit	100%	27 Unit	81 Unit	50%	Sekertariat
5	02	01	2.09	06	Pemeliaraan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	60 Item	10 Jenis	10 Item	10 Item	100%	10 Item	30 Item	50%	Sekertariat
5	02	01	2.09	09	Pemeliaraan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	72 Bulan	12 Buah	12 Bulan	12 Bulan	0%	12 Bulan	36 Bulan	50%	Sekertariat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra OPD sd tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan OPD Tahun 2022			Target program/kegiatan Renja OPD tahun berjalan (2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2023		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4	12
5	02	02			**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Devisiasi Realisasi belanja terhadap belanja total dalm APBD Persentase Anggaran sisa terhadap total anggaran tahun sebelumnya, Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan, Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)**									
5	02	02	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Dokumen Penganggaran keuangan daerah**									
5	02	02	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	50%	Bidang Anggaran
5	02	02	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan Verifikasi RKA-SKPD	RKA, Rancangan Kas dan Rancangan DPA - SKPD yang diverifikasi	246 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	100%	41 OPD	123 OPD	50%	Bidang Anggaran
5	02	02	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	50%	Bidang Anggaran
5	02	02	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pejabaran Perubahan APBD	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	50%	Bidang Anggaran
5	02	02	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebikajan Bidang Anggaran	18 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	50%	Bidang Anggaran
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	246 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	100%	41 OPD	123 OPD	50%	Bidang Anggaran
5	02	02	2,02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Dokumen Pengelolaan keuangan daerah**									
5	02	02	2,02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	76 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	47%	Bidang Perbendaharaan
5	02	02	2,02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	76 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	47%	Bidang Perbendaharaan
5	02	02	2,02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Aggaran kas dan SPD	55.200 SP2D	9200 SP2D	9200 SP2D	9200 SP2D	100%	9200 SP2D	27600 SP2D	50%	Bidang Perbendaharaan
5	02	02	2,02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi data Penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemeotongan atas SP2d dengan	246 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	100%	41 OPD	123 OPD	50%	Bidang Perbendaharaan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra OPD sd tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan OPD Tahun 2022			Target program/kegiatan Renja OPD tahun berjalan (2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2023		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)	12
5	02	02	2,02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Kas serta penatausahaan dan Pertanggujawaban sub Kegiatan	150 Juknis	25 Juknis	25 Juknis	25 Juknis	100%	25 Juknis	75 Juknis	50%	Bidang Perbendaharaan
5	**02**	**02**	**2,03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase Dokumen Penatausahaan keuangan daerah**									
5	02	02	2,03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntasi penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah	3.096 Dokumen	516 Dokumen	516 Dokumen	516 Dokumen	100%	516 Dokumen	1548 Dokumen	50%	Bidang Akuntansi
5	02	02	2,03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD K	Jumlah Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	50%	Bidang Akuntansi
5	02	02	2,03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	270 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	100%	45 Dokumen	135 Dokumen	50%	Bidang Akuntansi
5	02	02	2,03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3.024 Dokumen	504 Dokumen	504 Dokumen	504 Dokumen	100%	504 Dokumen	1512 Dokumen	50%	Bidang Akuntansi
5	**02**	**02**	**2,04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah**									
5	02	02	2,04	8	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan keuangan	Jumlah laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	804 Laporan	134 Laporan	134 Laporan	134 Laporan	100%	134 Laporan	402 Dokumen	50%	Bidang Perbendaharaan
5	02	02	2,4	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	72 Bulan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Dokumen	50%	Bidang Perbendaharaan
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Jumlah BMD yang terkelola dengan tertib dan Baik**									
5	**02**	**03**	**2,01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Dokumen Penngelolaan Barang milik**									
5	02	03	2,01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah	36 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	50%	Bidang Aset
5	02	03	2,01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang milik Daerah	246 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	100%	41 OPD	123 OPD	50%	Bidang Aset

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra OPD sd tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan OPD Tahun 2022			Target program/kegiatan Renja OPD tahun berjalan (2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2023		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)	12
5	02	03	2,01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang milik daerah	246 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	100%	41 OPD	123 OPD	50%	Bidang Aset
5	02	03	2,01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang milik daerah	12 OPD	2 OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	50%	Bidang Aset
5	02	03	2,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optomalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang milik daerah	24 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	50%	Bidang Aset
5	02	03	2,01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	492 Dokumen	82 Dokumen	82 Dokumen	82 Dokumen	100%	82 Dokumen	246 Dokumen	50%	Bidang Aset
5	02	03	2,01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di susun	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	50%	Bidang Aset
5	02	03	2,01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	246 Dokumen	41 Dokumen	41 OPD	41 OPD	100%	41 OPD	123 OPD	50%	Bidang Aset

Ampana, 2023

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

RISMANTO,S.T.,M.M.
Pembina
NIP. 19830916 200701 1 004

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan asset Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan pelayanan di dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah.

Tahun 2022 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una .

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022, dapt dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan beberapa aspek/fokus yaitu Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan

dengan diperolehnya opini WTP, Penetapan Peraturan APBD yang tepat waktu serta Pengelolaan Barang Milik yang tertib administrasi.

Untuk lebih jelasnya tentang pelayanan OPD BPKAD dapat kami uraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

NO	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2022 (tahun n-2)	2023 (Tahun n-1)	2024 (tahun n)	2025 (tahun n+1)	2022 (tahun n-2)	2023 (Tahun n-1)	2024 (tahun n)	2025 (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	
2	Persentase Pengelolaan Aset Yang Akurat			100 %	100%	100%	100%	96,5 %	97,5 %	100%	100%	
3	Nilai SAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			B	BB	BB	BB	B	-	BB	BB	

Sumber: BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una 2023, data diolah.

Dari tabel tersebut dapat diketahui capaian indikator kinerja utama pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Capaian Kinerja Opini Hasil Pemeriksaan oleh BPK-RI yang dilakukannya audit oleh Tim BPK-RI perwakilan Sulawesi Tengah untuk Kabupaten Tojo Una-Una adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Capaian Kinerja Pengelolaan Aset yang Akurat dengan realisasi sebesar 97,5 %, Adalah Hasil Proses pemeriksaaan BPKP (audited).

- Capaian Kinerja Nilai SAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una masih dilakukan Penilaian Oleh TIM PAN-RB.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja utama pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

- Komitmen dari semua elemen dari kepala daerah hingga staf penyusun LK OPD.
- Adanya Reward dan punisment yang tegas
- Adanya rekonsiliasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilaksanakan tiap Triwulan
- Sosialisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada pejabat penatausahaan keuangan daerah dan Bendahara Pengeluaran.
- Adanya asistensi penyusunan RKA APBD yang melibatkan unsur perencanaan dalam rangka sinkronisasi perencanaan anggaran.

Faktor penghambat :

- Pergantian Bendahara Pengeluaran dan Penerimaaan, Pengurus Barang Daerah
- Terbatasnya ketersediaan dan profesionalisme SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah
- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
- Kurangnya jumlah pegawai sesuai formasi yang dibutuhkan sehingga sedikit menghambat kelancaran pelaksanaan tugas.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD adalah Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategi adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una jangka menengah maka dapat ditetapkan isu strategis BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una.

Kabupaten Tojo Una-Una masih sangat membutuhkan bantuan Pemerintah Pusat dari segi anggaran maupun bidang tekhnis agar dapat menjadi daerah yang mandiri.

Kondisi tersebut tentunya menjadikan Kabupaten Tojo Una-Una khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menghadapi berbagai persoalan dan tantangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Hal yang mendesak dan perlu mendapat perbaikan dan perhatian serius agar dapat menentukan agenda sasaran serta program dan kegiatan dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada 5 tahun mendatang adalah :

1. Kualitas Sumber daya Aparatur Yang Masih Harus Ditingkatkan

   Peningkatan kualitas aparat yang di lakukan selama ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan akan tuntutan pekerjaan yang tertera dalam tugas dan fungsi masing-masing bidang kegiatan. Hal ini terlihat melalui penempatan tenaga tidak sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, sehingga mengakibatkan pelayanan dan tangung jawab masih jauh dari harapan. Guna mengantisipasi permasalahan ini ke depan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una melakukan program peningkatan kualitas aparat melalui pendidikan dan latihan baik formal dan informal, mengikutsertakan aparat ke pendidikan formal seperti jenjang pendidikan S1 dan S2 serta mengikutkan pada berbagai pelatihan yang susuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

2. Personil Yang Masih Kurang

   Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, kaitannya dengan Kabupaten Tojo Una-Una sebagai daerah baru dengan jumlah personil aparat yang tersedia dirasakan masih sangat kurang maka hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap capaian hasil dan kinerja aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dengan kondisi seperti ini kedepannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una akan memfokuskan pada pengrekrutan pegawai khusus pada pegawai yang memenuhi syarat dan mempunyai kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Sistem Manajemen Pembangunan Daerah yang belum terintegrasi

   Untuk mempertahankan WTP atas Lapaoran Keuangan Pemerintah Daerah serta yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah tentu saja tidak terlepas dari kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan

keuangan daerah. Oleh karena itu Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah harus mengintegrasikan sistem aplikasi yang telah ada dengan sistem aplikasi yang digunakan oleh organisasi perangkat daerah lainnya semisal sistem aplikasi perencanaan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Riview terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Tojo Una-Una

Nama SKPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**		**Nilai Sakip OPD**		**11.267.623.365**	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**		**Nilai Sakip OPD**		**11.267.623.365**	
a	**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**Persentase Dokumen Perecanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**107.380.000**			**Persentase Dokumen Perecanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**107.380.000**	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41 OPD	107.380.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41 OPD	107.380.000	
b	**Administrasi keuangan perangkat daerah**		**Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**8.409.419.642**			**Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**8.409.419.642**	
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Ampana	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	8.311.269.642	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Ampana	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	8.311.269.642	
2	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	41 OPD	98.150.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	41 OPD	98.150.000	
c	**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**Persentase Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**		**100.000.000**			**Persentase Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**		**100.000.000**	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tojo Una-Una	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	100.000.000	
d	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase Paket Hasil Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**497.974.750**			Persentase Paket Hasil Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**497.974.750**	
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Item	4.959.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Item	4.959.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ampana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	18 Item	6.637.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ampana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	18 Item	6.637.500	
3	Penyediaan bahan logistik kantor	Ampana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Bulan	155.899.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Ampana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Bulan	155.899.000	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ampana	Jumlah Paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	21.879.250	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Ampana	Jumlah Paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	21.879.250	
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Ampana	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	8.600.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Ampana	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	8.600.000	
6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	300.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	300.000.000	
e	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan**		**94.307.919**			**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan**		**94.307.919**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ampana	Jumlah unit Geedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	11 Unit	94.307.919	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ampana	Jumlah unit Geedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	11 Unit	94.307.919	
f	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**Persentase Laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah**		**1.890.716.254**	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**Persentase Laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah**		**1.890.716.254**	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Ampana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Lembar	3.600.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Ampana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Lembar	3.600.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Penyediaan Jasa Kominukasi, Sumber Daya air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	14.625.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Penyediaan Jasa Kominukasi, Sumber Daya air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	14.625.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ampana	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	3.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ampana	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	3.500.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	1.868.991.254	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	1.868.991.254	
g	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**		**Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan**		**167.824.800**			**Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan**		**167.824.800**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	27 Unit	123.524.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	27 Unit	123.524.800	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ampana	Jumlah Perlatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	10 Item	39.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ampana	Jumlah Perlatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	10 Item	39.300.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Bulan	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Bulan	5.000.000	
B	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**		Devisiasi Realisasi belanja terhadap belanja total dalm APBD Persentase Anggaran sisa terhadap total anggaran tahun sebelumnya, Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan, Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)		**219.757.729.375**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**		Devisiasi Realisasi belanja terhadap belanja total dalm APBD Persentase Anggaran sisa terhadap total anggaran tahun sebelumnya, Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan, Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)		**219.757.729.375**	
a	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		**Persentase Dokumen Penganggaran keuangan daerah**		**1.467.229.875**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		**Persentase Dokumen Penganggaran keuangan daerah**		**1.467.229.875**	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Tojo Una-Una	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	115.960.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Tojo Una-Una	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	115.960.000	
2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Tojo Una-Una	RKA, Rancangan Kas dan Rancangan DPA - SKPD yang diverifikasi	41 OPD	86.241.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Tojo Una-Una	RKA, Rancangan Kas dan Rancangan DPA - SKPD yang diverifikasi	41 OPD	86.241.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	124.813.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	124.813.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pejabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	755.996.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pejabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	755.996.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebikajan Bidang Anggaran	3 Dokumen	92.350.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebikajan Bidang Anggaran	3 Dokumen	92.350.000	
6	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 OPD	291.869.875	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 OPD	291.869.875	
b	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**Persentase Dokumen Pengelolaan keuangan daerah**		**768.805.000**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**Persentase Dokumen Pengelolaan keuangan daerah**		**768.805.000**	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Bulan	307.265.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Bulan	307.265.000	
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	9.200 SP2D	150.225.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	9200 SP2D	150.225.000	
3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Aggaran kas dan SPD	12 Bulan	60.788.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Aggaran kas dan SPD	12 Bulan	60.788.000	
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi data Penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemeotongan atas SP2d dengan instansi terkait	41 OPD	99.257.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi data Penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemeotongan atas SP2d dengan instansi terkait	41 OPD	99.257.000	
5	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Kas serta penatausahaan dan Pertanggujawaban sub Kegiatan	25 Juknis	151.270.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Kas serta penatausahaan dan Pertanggujawaban sub Kegiatan	25 Juknis	151.270.000	
c	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**Persentase Dokumen Penatausahaan keuangan daerah**		**449.278.500**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**Persentase Dokumen Penatausahaan keuangan daerah**		**449.278.500**	
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntasi penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah	516 Dokumen	47.520.500	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntasi penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah	516 Dokumen	47.520.500	
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	504 Dokumen	58.235.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	504 Dokumen	58.235.000	
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	45 Dokumen	280.672.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	45 Dokumen	280.672.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Propinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	62.851.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Propinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	62.851.000	
d	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah**		**217.072.416.000**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah**		**217.072.416.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	134 Dokumen	215.569.916.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	134 Dokumen	215.569.916.000	
2	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Bulan	1.502.500.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Bulan	1.502.500.000	
C	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Persentase Jumlah BMD yang terkelola dengan tertib dan Baik**		**736.914.500**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Persentase Jumlah BMD yang terkelola dengan tertib dan Baik**		**736.914.500**	
a	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Persentase Dokumen Penngelolaan Barang milik Daerah**		**736.914.500**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Persentase Dokumen Penngelolaan Barang milik Daerah**		**736.914.500**	
1	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah	6 Dokumen	304.848.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah	6 Dokumen	304.848.000	
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang milik Daerah	41 OPD	56.887.500	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang milik Daerah	41 OPD	56.887.500	
3	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang milik daerah	41 OPD	43.280.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang milik daerah	41 OPD	43.280.000	
4	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang milik daerah	2 Dokumen	22.110.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang milik daerah	2 Dokumen	22.110.000	
5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Optomalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang milik daerah	4 Dokumen	135.917.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Optomalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang milik daerah	4 Dokumen	135.917.000	
6	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	82 Dokumen	118.480.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	82 Dokumen	118.480.000	
7	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di susun	2 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di susun	2 Dokumen	20.000.000	
8	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Tojo Una-Una	Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Temuan BMDJumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	41 OPD	35.392.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Tojo Una-Una	Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Temuan BMDJumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	41 OPD	35.392.000	
Pagu Indikatif					**231.762.267.240**					**231.762.267.240**	

Sumber: BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2023, data diolah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah dalam menyusun Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan pada tahun-tahun berikutnya selalu mengutamakan hal yang berkaitan dengan visi dan misi kabupaten Tojo Una-una yakni "*Terwujudnya Masyarakat Tojo Una-Una Yang Hebat*"

Tabel 2.5
DAFTAR USULAN YANG AKAN DIAKOMODIR
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraain	Program/Kegiatan	Volume	Lokasi	Ket
Jumlah			Paket		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 telah mensinkronkan berbagai Program dan Kegiatan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan – kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una

NO	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH
1	Terselenggarakan Pelayanan Publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada Inovasi	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan publik	Nilai Sakip BPKAD
2	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah secara Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang semakin Berkualitas	Persentase administrasi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan perundangan	Meningkatkan kualitas manajemen kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan	Persentase administrasi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan perundangan

3		Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan perundangan	Meningkatkan kualitas manajemen kinerja dalam pengelolaan barang milik daerah secara berkelanjutan	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan perundangan

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

- **Tujuan RENJA BPKAD**

Dalam penyusunan Renja OPD haruslah menggambarkan semua Aktifitas OPD tersebut pada tahun berikutnya dan harus mengutamakan proses kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan yang dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi lembaga tersebut.

Dalam rangka mencapai misi ***"Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembenahan sistem penatausahaan keuangan dan aset daerah,*** maka dapat ditetapkan tujuan organisasi yaitu : Optimalisasi kinerja penatausahaan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui pembenahan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mencapai misi ***"Meningkatkan Pelayanan dan Optimalisasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ",*** maka dapat ditetapkan tujuan organisasi yaitu : Meningkatnya Pelayanan dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk mencapai misi ***"Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah"***, maka dapat ditetapkan tujuan

organisasi yaitu : *Menggunakan sistem pelaporan yang andal dan akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*

- **Sasaran RENJA BPKAD**

Sasaran Renja adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam waktu berikutnya.

Untuk mencapai tujuan ***"Meningkatnya Pelayanan dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah",*** maka dapat ditetapkan sasaran yang hendak dicapai antara lain:

a. Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan.
b. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana sumber daya aparatur dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Optimalisasi waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas penyusunan APBD sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja.
e. Meningkatnya sistem pengelolaan Aset Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan ***" Menggunakan Sistem pelaporan yang andal dan akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah",*** maka dapat ditetapkan sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan dilingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk mencapai tujuan ***"Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah",*** maka

dapat ditetapkan sasaran yang akan dicapai yaitu; Meningkatnya Pengembangan sumber daya manusia khususnya sumber daya PNS di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-una dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya hubungan antara tujuan perangkat daerah dengan sasaran daerah dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

TUJUAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN
1	Terselenggarakan Pelayanan Publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada Inovasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	B
2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah secara Transparan dan Akuntabel	Indeks Pengelolalaan Keuangan dan Aset Daerah	B

Tabel 3.3

SASARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Pelayanan Publik	87,5
2	Meningkatnya Pengelolaan keuangan daerah yang semakin berkualitas	Persentase administrasi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan perundangan	100%
3	Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan perundangan	92%

Tabel 3.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah yang akurat dan akuntabel	WTP
2	Persentase Pengelolaan Aset Yang Akurat	Persentase Pengelolaan Aset yang tertib dan Akurat	100%
3	Nilai SAKIP	Persentase Dokumen Penunjang SAKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah itu sendiri yang tetap mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Renca Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tahun Anggaran 2024 jumlah Program sebanyak 3 Program yang terdiri dari 12 Kegiatan yang sebagian besar dilaksanakan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah itu sendiri namun ada beberapa kegiatan yang bersifat sosialisasi ataupun Bimbingan Teknis serta pelatihan yang menyebar di 12 Kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una dengan total pagu indikatif yang dibutuhkan sebesar Rp. 231.762.267.240,-. Yang bersumber dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una dan Bantuan Keuangan.

Rancangan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, disusun berdasarkan pedoman yang ada dan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dokumen Perencanaan, baik dari tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten Tojo Una-Una yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Sekretariat. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang diemban oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

   a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

   a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan kegiatan sebagai berikut:

8. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.

   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

   a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
   b. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
   c. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
   d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
   e. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
   f. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Kabupaten/Kota.

9. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.

   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

   a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
   b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD;
   c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
   d. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait;
   e. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.

10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

    Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

    a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
    b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pembiayaan L-O dan Beban;
    c. Konsolidasi Laporan, Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
    d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

11. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.

    Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

    a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
    b. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dengan kegiatan sebagai berikut:

12. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

    Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

    a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
    b. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
    c. Pengamanan Barang Milik Daerah;
    d. Penilaian Barang Milik Daerah;
    e. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
    f. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
    g. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
    h. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, maka Kelompok Sasaran Program/Kegiatan adalah sebagai berikut :

Sasaran dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	**Meningkatnya Pengelolaan keuangan daerah yang semakin**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
		- Koordinasi Peyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
		- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
		- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
		- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
		- Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
		- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
		- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Siupervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
		- Rekonsiliasi data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait
		- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
		- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban
		- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

		- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
		- Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
2	**Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**
		Pengelolaan Barang Milik Daerah
		- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
		- Inventarisasi Barang Milik Daerah
		- Pengamanan Barang Milik Daerah
		- Penilaian Barang Milik Daerah
		- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
		- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
		- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
		- Pembinaan Pengeluaran Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Rincian rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una Una dapat dilihat dengan tabel di bawah ini :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**231.762.267.240,00**							**254.954.057.445,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**231.659.158.240,00**							**254.840.637.545,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**231.659.158.240,00**							**254.840.637.545,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**BB Nilai**		**BB Nilai**	**BB Nilai**	**11.164.514.365,00**						**BB Nilai**	**12.296.529.282,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	107.380.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	41 Laporan	118.118.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41 Laporan		41 Laporan	41 Laporan	107.380.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	41 Laporan	118.118.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	8.311.269.642,00			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	45 Orang/bulan	9.257.960.088,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	8.311.269.642,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	45 Orang/bulan	9.257.960.088,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	4 Orang	110.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	4 Orang	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	4 Orang	110.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Paket Hasil Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	493.015.750,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	18 Paket	542.317.325,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	6.637.500,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	18 Paket	7.301.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	155.899.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Paket	171.488.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	21.879.250,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Paket	24.067.175,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.600.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Dokumen	9.460.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	330.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	94.307.919,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	11 Unit	103.738.710,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit		11 Unit	11 Unit	94.307.919,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	11 Unit	103.738.710,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	1.890.716.254,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	500 Laporan	1.979.787.879,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan		500 Laporan	500 Laporan	3.600.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	500 Laporan	3.960.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.625.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	16.087.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Laporan	3.850.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.868.991.254,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	1.955.890.379,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	167.824.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	27 Unit	184.607.280,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit		27 Unit	27 Unit	123.524.800,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	27 Unit	135.877.280,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	39.300.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	10 Unit	43.230.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	1 Unit	5.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD*** ***Persentase anggaran sisa terhadap total anggaran tahun sebelumnya*** ***Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan*** ***Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)***	**100,00 Persen 0,00 Persen 16,74 Persen 58,17 Persen**		**100,00 Persen 0,00 Persen 16,74 Persen 58,17 Persen**	**100,00 Persen 0,00 Persen 16,74 Persen 58,17 Persen**	**219.757.729.375,00**						**100,00 Persen 0,00 Persen 16,74 Persen 58,17 Persen**	**241.733.502.313,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	1.467.229.875,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Dokumen	1.613.952.863,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	115.960.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Dokumen	127.556.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	41 Dokumen		41 Dokumen	41 Dokumen	86.241.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	41 Dokumen	94.865.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	755.996.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Dokumen	831.595.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	124.813.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Dokumen	137.294.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	92.350.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Dokumen	101.585.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang		41 Orang	41 Orang	291.869.875,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	41 Orang	321.056.863,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	768.805.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Dokumen	845.685.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	307.265.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Dokumen	337.991.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	9200 Dokumen		9200 Dokumen	9200 Dokumen	150.225.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	9200 Dokumen	165.247.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	60.788.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Dokumen	66.866.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	21 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	99.257.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	21 Dokumen	109.182.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	25 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	151.270.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	25 Dokumen	166.397.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	449.278.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	516 Laporan	494.206.350,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	516 Laporan		516 Laporan	516 Laporan	47.520.500,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	516 Laporan	52.272.550,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	504 Dokumen		504 Dokumen	504 Dokumen	58.235.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	504 Dokumen	64.058.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	45 Laporan		45 Laporan	45 Laporan	280.672.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	45 Laporan	308.739.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	62.851.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Dokumen	69.136.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	217.072.416.000,00			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	134 Laporan	238.779.657.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	134 Laporan		134 Laporan	134 Laporan	215.569.916.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	134 Laporan	237.126.907.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.502.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	1.652.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Persentase Jumlah BMD yang terkelola dengan tertib dan baik***	**92,50 Persen**		**92,50 Persen**	**92,50 Persen**	**736.914.500,00**						**92,50 Persen**	**810.605.950,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	736.914.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	61 Dokumen	810.605.950,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	61 Dokumen		61 Dokumen	61 Dokumen	56.887.500,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	61 Dokumen	62.576.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	41 Laporan		41 Laporan	41 Laporan	43.280.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	41 Laporan	47.608.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	22.110.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Laporan	24.321.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	304.848.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	6 Laporan	335.332.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	135.917.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	4 Dokumen	149.508.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	82 Laporan		82 Laporan	82 Laporan	118.480.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	82 Laporan	130.328.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Laporan	22.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang		41 Orang	41 Orang	35.392.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	41 Orang	38.931.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	X	-						**103.109.000,00**							**113.419.900,00**	
	X.XX	-						**103.109.000,00**							**113.419.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**BB Nilai**		**BB Nilai**	**BB Nilai**	**103.109.000,00**						**BB Nilai**	**113.419.900,00**	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	98.150.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	41 Dokumen	107.965.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	41 Dokumen		41 Dokumen	41 Dokumen	98.150.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	41 Dokumen	107.965.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Paket Hasil Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	4.959.000,00			-	-	-	-	5.454.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			-	-		-	-	4.959.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	-	5.454.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	JUMLAH							**231.762.267.240,00**							**254.954.057.445,00**	

BAB V

PENUTUP

Renja Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una , serta dan sebagai panduan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024. Penyusunan Renja 2024 dilakukan setelah mempelajari visi, misi dan program Pemerintah kabupaten Tojo Una-Una sebagai muatan dan masukkan dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk satu tahun kedepan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una ini dapat menjadi sebagai acuan dan pedoman yang digunakan sebagai masukkan dalam rangka penguatan peran serta partsipasi aktif dari semua stakeholders yang terkait didalam pengeloaan keuangan dan aset daerah serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja PD tahunan maupun lima tahunan.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 tidak lepas dari berbagai kendala yang ada diantaranya ketersediaan anggaran yang masih belum mencukupi dari kebutuhan yang ada sehingga sedikit membatasi ruang dalam menentukan Kegiatan yang akan dilaksanakan, namun demikian hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat menghalangi dalam perumusan program dan kegiatan yang semuanya

bertujuan untuk pencapaian Visi Misi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Dengan demikian, diharapkan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Tojo Una-Una di Tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini masih memerlukan penyempurnaan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Ampana, 2023

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

RISMANTO,S.T.,M.M.
Pembina
NIP. 19830916 200701 1 004

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA–UNA

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024. Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2023 dan uraian mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Didalamnya memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output dan outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami harapkan adanya kritik dan saran untuk kesempurnaan penyusunan Renja ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Ampana, 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Drs. SYAIFUL BAHRI, M.A.P
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19640110 199103 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-9

1.3 Maksud dan Tujuan I-11

1.4 Sistematika Penulisan I-11

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU **II-15**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD II-15

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-19

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD II-26

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II-21

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA **III-29**

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una . III-29

3.2 Program dan Kegiatan III-31

BAB IV RENCANA KERJA **IV-34**

BAB IV PENUTUP **IV-36**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR :

TANGGAL :

RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur dengan jelas tentang kewenangan konkuren bagi Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan daerah tersebut diikuti dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menetapkan pembentukan perangkat daerah baru berdasarkanurusandanbidangurusanpemerintahandaerah.

Sebagai konsekuensi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.Dengan adanya perubahan susunan perangkat daerah, sehingga perlu disusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Kewenangan Urusan Penunjang pada Bidang Keuangan, dimana dokumen tersebut memuat substansi rencana program dan kegiatan yang disertai dengan target kinerja perangkat daerah tahun 2024 dan rencana pendanaan dan sumber pendanaan.

Sebagai bagian dari rangkaian perencanaan RPJMD Teknokratik

Kabupaten Tojo Una-UnaTahun 2021-2026, Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 merupakan hasil dari pendekatan perencanaan teknokratis yang dipadukan dengan usulan politis, partisipatif, *top-down*, dan *bottom-up* yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik, dimana sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang tercantum dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) TeknokratikKabupaten Tojo Una-Unatahun 2021-2026, Kabupaten Tojo Una-Una menjadi Kabupaten hebat di bidang Pertanian, Pariwisata dan Kemaritiman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasimasyarakat.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-UnaTahun 2021-2026 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-UnaTahun 2005-2025. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian,dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap ketiga, RPJMD tahap keempat ini ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui pengembangan dan percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang/urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 merupakan rencana tahun pertama dalam pelaksanaan RPJMD Teknokratik Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2026 yang harus memuat rencana pencapaian indikator-indikator menuju Tojo Una-Una hebat di bidang pertanian, pariwisata dan kemaritiman, pencapaian indikator-indikator sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta beberapa indikator lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kebijakan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah serta muatan lokal lainnya. Adapun khusus untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, maka indikator hebat yang harus dicapai adalah : Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkualitas ditunjang dengan data base yanghandal dan akurat sesuai dengan potensi daerah yang ada di bidang pertanian, pariwisata dan kemaritiman.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa :

(1) Kepala Bappeda menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah kepada Kepala OPD perihal Penyampaian Rancangan Awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan RenjaOPD;

(2) Surat Edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud padaayat satu (1)

Memuat agenda penyusunan RKPD,pelaksanaanForumOPDdan Musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja OPD kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 yang merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan dan didalamnya memuat kebijakan pembangunan daerah tahun anggaran 2024.

Disamping mengacu pada RKPD Tahun 2024, penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026yang saat ini sedang dalam proses penyusunan sebagai bagian integral dari penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) TeknokratikKabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026. Diharapkan rancangan Renja yang akan disempurnakan pasca penyelenggaraan Forum Gabungan OPDdan musrenbang RKPD tingkat kabupaten akan menjadi bahan penyusunan dan penyempurnaan RKPD Tahun 2024. Selain itu Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 juga mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah dan Renstra Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-UnaTahun 2024 merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional,

kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasimasyarakat.

Konsepsi perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una dan perubahan Renstra OPDBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, memuat kerangka pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-UnaTahun 2024 yang memuat prioritas peningkatan kinerja pemerintahan daerah disusun dengan maksud memberikan landasan dan pedoman bagi semua aparatur daerah dalam memantapkan manajemen pemerintahan daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Bagi masing-masing bidang dan satuan kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una berkewajiban untuk mempedomani serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatandaerah.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah tahun 2024 di Kabupaten Tojo Una-Una.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 yang disusun merupakan bagian integral dari implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026yang menginginkan agar dalam periode kepemimpinan lima tahun dapat mewujudkan Kabupaten Tojo Una-Una menjadi Kabupaten yang hebat di bidng pertanian, pariwisata dan kemaritiman. Untuk itu penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una harus dilakukan secara serius dan bersinergi antar lembaga sehingga seluruh target indikator yang menjadi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Unayang telah dirumuskan dalam

RPJMD Teknokratik dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 dapat dicapai sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-UnaTahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una masuk dalam prioritas pembangunan yaitu : Pemantapan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan, denganfocus: Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas

Berkenaan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten Tojo Una-una tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo akan fokus pada pembangunan daerah ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una pada melalui optimalisasi penerimaan PAD yang dapat menunjang pembangunan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una – Una di Propinsi Sulawesi Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4342);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun2015-2021;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor517).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 10Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah;
20. Peraturan Daerah KabupatenTojo Una-una Nomor 1Tahun 2012 tentang PajakDaerah;
21. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;

1.3 Maksud danTujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 adalah untuk memaduserasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 dengan program dan kegiatan

pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun anggaran 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

a. Sebagai acuan/arah bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam menyusun program/kegiatan prioritas tahun 2024 berdasarkan ketersediaan sumberdaya dalam rangka mencapai Kabupaten Tojo Una-Una sebagai kabupaten hebat di bidang Pertanian, Pariwisata dan Kemaritiman;

b. Merumuskan rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan PendapatanDaerahKabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, proses penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, keterkaitan antara Renja Badan Pendapatan Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan Renja Kementrian Keuangan dan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD;

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun2024;

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 serta susunan garis besar isi dokumen;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU,

Pada bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu :

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun- tahunsebelumnya.

Analisis Kinerja Pelayanan OPD, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerjapelayanan;

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampak capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*), tantangan dan peluang, serta formulasi isu- isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan. Adapun beberapa Isu Strategis Kabupaten Tojo Una-UnaTahun 2024 diantaranya (a)sinergipembangunan pusat-provinsi-daerah dan desa meliputi implementasi Nawacita dalam Prioritas Pembangunan Daerah, pemberlakuan peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kebijakan nasional dan provinsi Jawa Barat

(Pengarusutamaan SDG's dan MEA), (b) pelayanan publik dalam bidang sosial, ekonomi, sarana dan prasarana, serta pemerintahan meliputi pemcapaian target penciri termaju Kabupaten Bogor, pencapaian indikator kinerja OPD, SPM, (c) kemiskinan, pengangguran, kependudukan, dan capaian IPM, (d) pengembangan potensi daerah (ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata), (e) penataan dan pengelolaan ruang meliputi pemekaran wilayah dan pemanfaatanruang;

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, memuat telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD. Tema Pembangunan 2024 Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Publik dalam Mendukung Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una Menjadi Kabupaten hebat di bidang Pertanian, Pariwisata dan Kemaritiman. Prioritas dan Fokus Pembangunan 2024 meliputi (1) penguatan manajemen dan kualitas administrasi perangkat daerah, (2) meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah, (3) meningkatkan pelayanan publik, (4) optimalisasi kinerja kecamatan, (5) meningkatkan kerjasama daerah, (6) meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel, (7) meningkatkan layanan keamanan dan ketertibanumum;

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, memuat kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Akan tetapi dalam evaluasi pelaksanaanrenjaOPD tahun lalu, pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tidak ada penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsiOPD;

Tujuandan Sasaran Renja OPD, pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RenstraOPD;

Program dan Kegiatan, pada bagian ini, program dankegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Pendapatan Daerah memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah yang kedua yaitu Pemantapan Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel dengan Fokus Pembangunan Pemantapan Manajemen Pemerintahan. Kontribusi pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan predikat kinerja baik. Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci sebagai berikut:

1) Jumlah dan macam pajak daerah dari rencana 19 pajak Daerah, terealisasi 19 pajak daerah 100%;
2) Optimalnya penerimaan pajak daerah dari rencana sebesar Rp. 11.684.450.000 terealisasi Rp. 11.412.985.463,08 atau 97,68%.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut menunjukkan telah tercapainya sasaran, yaitu : Meningkatnya pendapatan daerah. Pencapaian Indikator Kinerja Kunci diatas merupakan hasil kontribusi dari pelaksanaan 2 program, 6 Kegiatan dan 18 Sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Sebanyak 5 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan
2) Program Pengelolaan Pendapatand Daerah, Sebanyak 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun anggaran 2022 menghasilkan rata- rata capaian Indikator Kinerja Output sebesar 96,98%, adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp.6.873.919.894 atau 96,98%, dari total rencana anggaran sebesar Rp.7.087.890.487,00 uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
   a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 1 Sub kegiatan yaitu :
      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan ini

Rp.52.901.627,00 (96,43%) dari total anggaran Rp.54.856.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100.00%;

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi anggaran Belanja pada Kegiatan ini Rp. 3.689.550.770,00 (96,44%) dari total anggaran Rp.3.825.390.750,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100.00%;

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :
   - Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan ini Rp.175.919.400,00 (98,32%) dari total anggaran Rp.178.913.250,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100.00%;
   - Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan ini Rp.153.855.700,00 (99,21%) dari total anggaran Rp.155.076.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100.00%;
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan ini Rp.6.160.000,00(100,00%) dari total anggaran Rp.6.160.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100.00%;
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulasi SKPD dengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan ini Rp.308.272.508,00 (98,61%) dari total anggaran Rp.312.610.050,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100.00%;

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyuratdengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan ini Rp.3.040.000,00(100%) dari total anggaran Rp.3.040.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan100.00%;
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrikdengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan ini Rp.98.521.952,00(85,77%) dari total anggaran Rp.114.870.450,00 dengan realisasi fisik kegiatan100.00%;
   - Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantordengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan ini Rp.26.467.500,00(99,99%) dari total anggaran Rp.26.469.000,00

dengan realisasi fisik kegiatan100.00%;

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantordengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan ini Rp.843.532.740,00(96,15%) dari total anggaran Rp.877.257.437,00 dengan realisasi fisik kegiatan100.00%;

e) Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan,dengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan ini Rp.148.944.050,00(99,67%) dari total anggaran Rp.148.944.050,00 dengan realisasi fisik kegiatan100.00%;
- Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnyadengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan ini Rp.21.085.000,00(83,93%) dari total anggaran Rp.25.120.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan100.00%;

2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

a) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerahdengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan ini Rp.13.700.000,00(98,77%) dari total anggaran Rp.13.870.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100.00%;
- Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerahdengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan ini Rp.455.890.294,00(99,79%) dari total anggaran Rp.456.814.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan100.00%;
- Sub Kegiatan Penetapan Wajib pajak Daerahdengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan ini Rp.69.291.086,00(99,06%) dari total anggaran Rp.69.945.000,00,00 dengan realisasi fisik kegiatan100.00%;
- Sub Kegiatan Pelayanan dan konsultasi pajak daerahdengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan ini Rp.187.343.890,00(98.97%) dari total anggaran Rp.189.290.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan100.00%;
- Sub Kegiatan Penagihan pajak daerahdengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan ini Rp.370.863.511,00(99,06%) dari total anggaran Rp.374.349.750,00 dengan realisasi fisik kegiatan100.00%;

- Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan pajak Daerahdengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan ini Rp.252.269.800,00(99,48%) dari total anggaran Rp.253.568.750,00 dengan realisasi fisik kegiatan100.00%;

Prestasi dan Keberhasilan

Keberhasilan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 sebagai berikut:

1) Tercapainya realisasi penerimaan Pajak daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang yaitu dari rencana sebesar Rp. 11.684.460.000,00 terealisasi Rp.11.412.985.463,08 atau 97,68%;

Permasalahan dan Solusi

1) Masih terdapatnya wajib pajak yang belum sadar dan tertib dalam membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah;
2) Masih belum banyaknya tenaga juru penilai, juru sita dan pemeriksa pajak daerah yang kompeten dibidangnya;
3) Masih belum terintegrasinya sistem di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una baik dari bidang PBB, Pajak Daerah, BPHTB, Renbang dan Sekretariat (UPT) serta instansi terkait seperti BPN, Notaris (PPAT) danBank.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator kinerja kunci Badan PendapatanDaerahKabupaten Tojo Una-Unatahun2024 adalah:

1. Realisasi Pajak Daerah Terhadap PAD sebesar Rp.11.844.773 (15,9%)
2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Berkaitan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2010, indikator pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una adalah : Jumlah Pajak Daerah sebanyak 9 pajak daerah. Hasil analisis kinerja pelayanan OPD disajikan dalam tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana terlampir.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
4. Pengelolaan kesekretariatan badan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas danfungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una,Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. **Potensi dan lokasi objek pajak yang sangat strategis namun belum dioptimalkan** dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;
2. **Masih belum terintegrasinya sistem penerimaan pendapatan daerah antara Pajak Daerah, PBB, BPHTB,** yang terintegrasi antaraBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, BRI, BJB dan PPAT/Notaris serta SIPKD sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasikinerja;
3. **Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dankelembagaan/ ketatalaksanaanyangbelummemadai**khususnyadalamhalpajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB, karena institusiBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una baru terbentuk pada tahun 2012, yang didalamnya banyak pegawai dari luar yang baru masuk, sehingga belum terlalu menguasai permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi yang belum merata dari setiap pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tentang regulasitersebut;

4. **Kurangnyapengawasandanpemeriksaanpajakdaerah**,terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota pejualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusidaerah;
5. **Kurangnya sosialisasi dan informasi** tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajakdaerah;

Apabila capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una rendah/tidak mencapai target sesuai yang telah ditetapkan pada tahun 2016 yaitu optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan berdampak terhadap tidak tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menjadi Kabupaten hebat di bidang pertanian, pariwisata dan kemaritiman, tidak tercapainya prioritas pembangunan Kabupaten Tojo Unauna dan fokus pembangunan yaitu optimalisasi penerimaan PAD. Hal ini akan berdampak juga pada tidak tercapainya prioritas pembangunan provinsi Sulawesi Tengah dan prioritas nasional, khususnya yang berkaitan dengan pendapatandaerah.

Metode *SWOT Analysis* adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

1. **LINGKUNGAN INTERNAL KEKUATAN(*STRENGTH*):**

    1). **Hukum dan Perundangan**:Terbitnya Peraturan Daerah No. 370 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah. Sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dapat bersumber dari aturan yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah/badan legislatif daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemungutan pajak/retribusidaerah;

2). **Potensi dan lokasi**: letak geografis Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai penyangga pariwisata dan kemaritiman di Sulawesi Tengah dan Nasional yang strategis sudah barang tentu menjadikan suatu kekuatan terhadap perkembangan pembangunan sarana prasarana pariwisata, sektor industri dan sektor jasa pariwisata lainnya yang berpotensi menjadisumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sektor PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan yangSah;

3). **Kelembagaan dan Tata Laksana** :Pada tahun 2015 Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah berubah mengalami pemisahan fungsi menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini menjadi suatu kekuatan bagi Badan Pendapatan Daerah untuk lebih fokus melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja berdasarkan perbup 10 tahun 2016Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una adalah produktivitas, kualitas layanan, *responsiveness*, *responsibility* dan akuntabilitas.

4). **Sumber Daya Manusia**: Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang Strata-2 dan Strata-1 sebanyak 63%, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat wajibpajak;

5). **Pembiayaan** : Tersedianya anggaran/dana yang memadai untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;

6). **Sarana/Prasarana** : Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerahsehingga optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain itugedungyangrepresentatifdandilengkapidenganperalatan memadaimenjadikankekuatandibidangsarana/prasarana;

7). **Budaya Kerja;** Budaya kerja dalam satu institusi/organisasi haruslah memiliki kesamaan, dikarenakan disatukan oleh visi misi dan tujuan yang sama. Budaya kerja harus disosialisasikan terus menerus agar dapat berjalan sesuai denganharapan;

8). **Kepemimpinan;** Aspekkepemimpinanyangmenjadiperhatian adalah gaya kepemimpinan serta sikap dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una . Dalam memimpin organisasinya kedua aspek tersebut akan mempengaruhi kinerja para pegawai yang berada didalamnya. Hal ini terkait dengan *human relation*, *delegationofauthority*(pendelegasianwewenang)dan*divisonof work* (pembagian kerja). Selain itu, komitmen pimpinan dan staf yang sangat tinggi sebagai institusi baru, dapat mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una ;

2. KELEMAHAN (*WEAKNESSES*):

1). **Hukum dan Perundangan :** Masih belum banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah, PBB, BPHTB, pelayanan benda berharga dan lainnya, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga masih menyulitkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasikinerja;

2). **Potensi dan lokasi**: letak geografis Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai penyangga pariwisata dan kemaritiman di Sulawesi Tengah dan Nasional belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini terlihat masih belum tergali obyek pajak dan dipetakan secara detail potensi yang terkait dengan lokasi yang strategis tersebut;

3). **Sumber Daya Manusia :** Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pendapatan daerah yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB serta dana tranasfer, karena institusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Unabaru terbentuk pada tahun 2015, yang didalamnya banyak pegawai dari luar yang baru masuk, sehingga belum sepenuhnya menguasai permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkanterbitnyaberbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi dari setiap pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang belum merata tentang regulasi tersebut.

4). **Sarana/Prasarana**: Kendala sarana prasarana karena Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una belum memiliki sistem yang terintegrasi dan *on line* pada 12 kecamatan

3. LINGKUNGAN EKSTERNAL PELUANG(*OPPORTUNITY*):

1). Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatandaerah;

2). Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una atas pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una;

3). Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una;

4). Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una akan bertambah jumlahperusahaan/pengusahayangmelakukankegiatanbisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD;

5). Bantuan dana insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan pembangunandaerah;

6). Kemajuan teknologi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepadapublik;

7). Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup baik, sehingga mengakibatkan peningkatan dalam pendapatandaerah;

8). Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para *stakeholder*, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapatlebih baik;

4. ANCAMAN (*THREAT*):

1). Kesadaran masyarakat dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar masih rendah;

2). Luas wilayah yang besar dan keterbatasaan sumber pendapatan dan pembiayaan untuk pembangunan sangat menyulitkan menentukan skalaprioritas;

3). Dikarenakan adanya lokasi objek pajak/subjek pajak/retribusi dengan kabupaten/kota yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Tojo Una-

Una, maka akan berdampak terhadap pembagian realisasi pajak itu sendiri terhadap masing-masingwilayah;

4). Dengan adanya wacana pemekaran Kabupaten Tojo Una-Una menjadi ancaman pengurangan pendapatan daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Strategi Umum Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una :

a. **Tahap Perencanaan**; Tahap ditentukannya berapa besar target dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam periode waktu tertentu, pengelolaan dan pengolahan Data Potensi Pendapatan daerah yang lebih representatif danakurat;

b. **Tahap Pelaksanaan**; Kegiatan pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan yang menentukan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran dan pendataan akan diperoleh data wajib pajak/retribusi yang potensi sebagai dasar dalam menetapkan prediksi penerimaan pendapatan. menumbuhkembangkan pemahaman kepada masyarakat di bidang pendapatan daerah serta meningkatkan kapabilitas aparatur atas pengetahuan dan pemahaman mengenai pendapatandaerah;

c. **TahapKoordinasi**;Koordinasidenganinstansiterkaitsebagaiunit kerja pengelola sumber PAD diharapkan dapat lebih efektif dan efisien untuk menggali potensi-potensi baru yang belum diketahui atau yang akan dikelola oleh instansi-instansitersebut;

d. **Tahap Pengawasan**; Pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas pemungutan di lapangan saja, tetapi pengawasan pun dilakukan dengan pemeriksaan administratif terhadap hasil pungutan pajak dan retribusi daerah secara khusus. Demikian pula dengan pengawasan internal yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dapat mengantisipasi penyimpangan/ penyelewengan dalam pengelolaan hasil pemungutan pajak/retribusi daerah maupun kesalahan dalam pembuatan laporan;

e. **Tahap Evaluasi**; Evaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah diharapkan tidak hanya dilakukan secara insidentil, tetapidapatdilakukan secara berkesinambungan secara internal maupun dengan melibatkan instansi pengelola sumber PAD lainnya, sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan PAD dapat diikuti denganbaik;

Isu penting dalam rencana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya realisasi pendapatandaerah;
b. Optimalnya penerimaan dari pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi;dan
c. Meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi, sistem perencanaan, pendataan, penilaian, penetapan, penatausahaan, pembinaaan, pengembangan, penagihan, sistem pengawasan internal, evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umumanggaran.

Dengan telah ditetapkannya prioritas pembangunan pada tahun 2024 harus diarahkan untuk mendukung tercapainya Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una Tangguh, Maju, dan Sejahtera (TAMARA) yang tertuang di dalam RPJMD Teknokratik Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.4.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat Desa, Kecamatan (melalui Musrenbang) hingga tingkat Kabupaten (melalui Forum Gabungan OPD dan rapat intern bidang- bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una). Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling, yang dihadiri oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Telahaan dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan perangkat daerah dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi, Adapun Prioritas dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 (terlampir).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, bahwa Visi Kabupaten Tojo Una-Una adalah :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TANGGUH, MAJU, DAN SEJAHTERA (TAMARA) "

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Menurut Undang- undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, Misi Kabupaten Tojo Una-Una adalah:

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana Dan Lingkungan Berkelanjutan;
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal;
3. Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan, Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidkan dan Kesehatan Yang Berkeadilan;
5. Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart Governance.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah dan dalammelaksanakantugas pokok tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatandaerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatandaerah;
3. Pembinaandanpelaksanaantugasdibidangpendapatandaerah;
4. Pengelolaan kesekretariatan Badan;dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas danfungsinya.

Secaraumum tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait dengan pencapaian visidan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi kelima, yaitu Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart Governance**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat

merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik danidealistik.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una adalah penjabaran daripada Misi ke Lima Kabupaten Tojo Una-Una yaitu Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart Governance, Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Unadalam upayauntuk membangun Kelembagaan pemerintah daerah yang handal, profesional, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada Pelayanan Publik dari Pemerintah Kabupaten hingga Desa.

Tujuan dan sasaran yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan daripada misi kelima tersebut adalah Terselenggarakan Pelayanan Publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada Inovasi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran umum yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sesuai dengan misi, antara lain :

1. Optimalisasi Penerimaan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator kinerja yaitu Persentase Realisasi PAD terhadap Potensi PAD
2. Meningkatnya kualitas dan Kinerja BAPENDA dengan indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Kinerja Bapenda

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Kerja berupa pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dijalankan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.

Perumusan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendukung tercapainya target Kabupaten Tojo Una-Una menjadi kabupaten hebat di bidang pertanian, pariwisata dan kemaritiman;

2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;

3. Mendukung tercapainya perwujudan Kabupaten Tojo Una-Una yang memiliki keunggulanlokal;

4. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan olehpemerintah.

Dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokasilitas OPD, berikut disajikan rincian Rencana Program dan Kegiatan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.

BAB IV

P E N U T U P

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2016-2021.

Dalam rangka mencapai target sebagai Kabupaten hebat di bidang pertanian, pariwisata dan kemaritiman, isi dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2024 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Badan PendapatanDaerah.

Semoga Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumenini.

Ditetapkandi : Ampana

Tanggal : 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Drs. SYAIFUL BAHRI, M.A.P
Pembina Utama Madya,IV/d
NIP. 19640110 199103 1 009

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Nomor : /
Lampiran :1(satu)dokumen

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan tahun 2024 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja-PD;

b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah Dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun2015-2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor517);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Tojo Una - Una Tahun2016-2821(LembaranDaerahKabupaten Tojo Una – Una Tahun2012 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 08Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-UnaTahun 2012 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una – Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-UnaTahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor61);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1Tahun 2012 tentang PajakDaerah;

17. Peraturan Bupati Kabupaten Tojo Una - Una Nomor 40 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB);

18. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN2024.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una merupakan dokumen perencanaan yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun2024.

(2) Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan bagi:

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun2024.

b. Penyusunan program kerja bagi para pejabat eselon III, eselon IV dan Staf di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una .

Pasal 2

Sistematika Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari :

BABI	:	PENDAHULUAN
BABII	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
BABIII	:	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BABIV	:	PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkandi : Ampana

Tanggal : 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Drs. SYAIFUL BAHRI, M.A.P
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19640110 199103 1 009

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ SubKegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realsiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)						Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan (2023)			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d Tahun Berjalan (2023)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8=(7/6)*		*9*		*10=(5+7+9)*		*11=(10/4)*	
5.02	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN**			**14,909,585,710.00**		**2,936,630,455.00**		**3,262,499,737.00**		**3,188,708,058.00**	**98.91**	**97.43**		**2,715,947,553.00**		**5,904,655,611.00**	**33**	**45**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI SAKIP OPD**		**10,822,842,752.00**		**2,146,227,240.00**		**1,903,797,237.00**		**1,838,700,477.00**	**97.81**	**95.69**		**1,859,828,553.00**		**3,698,529,030.00**	**32**	**41**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**208,260,000.00**		**34,438,812.00**		**54,856,000.00**		**52,901,627.00**	**100.00**	**96.44**		**86,111,000**		**139,012,627**	**33**	**67**
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja, Renstra dan RKA	18 Dok	208,260,000.00	3 Dok	34,438,812	3 Dok	54,856,000.00	3 Dok	52,901,627	100.00	96.44	3 Dok	86,111,000.00	6 Dok	139,012,627	33	67
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**208,260,000.00**		**34,438,812.00**		**54,856,000.00**		**52,901,627.00**	**0.66**	**96.44**		**86,111,000**		**139,012,627**	**0**	**67**
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	2280 Dok	208,260,000.00	3 Dok	34,438,812	456 Dok	54,856,000.00	3 Dok	52,901,627	0.66	96.44	3 Dok	86,111,000.00	6 Dok	139,012,627	0	67
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**		**2,852,404,640.00**		**709,479,261.00**		**652,759,300.00**		**644,207,608.00**	**99.07**	**99.04**		**585,754,300**		**1,229,961,908**	**33**	**43**
5.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah dan Jenis ATK, Makanan dan Minuman, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor yang dibeli	192 jenis	824,011,640.00	32 jenis	165,111,500	32 jenis	178,913,250.00	31 jenis	175,919,400	**96.88**	98.33	32 jenis	192,935,250.00	63 jenis	368,854,650	33	45
5.02.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	90 jenis	602,618,000.00	13 jenis	157,071,860	15 jenis	155,076,000.00	15 jenis	153,855,700	**100.00**	99.21	15 jenis	138,966,000.00	30 jenis	292,821,700	33	49
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu	72 org	25,775,000.00	12 org	5,760,000	12 org	6,160,000.00	12 org	6,160,000	**100.00**	100.00	12 org	4,025,000.00	24 org	10,185,000	33	40
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulasi SKPD	Jumlah Rakor luar daerah dan koordinasi dan pembinaan dalam daerah	1,008 Kali	1,400,000,000.00	168 Kali	381,535,901	168 Kali	312,610,050.00	167 Kali	308,272,508	**99.40**	98.61	168 Kali	249,828,050.00	335 Kali	558,100,558	33	40
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**		**6,727,365,612.00**		**1,195,488,167.00**		**1,021,636,887.00**		**971,562,192.00**	**100.00**	**95.48**		**1,017,455,703**		**1,989,017,895**	**31**	**25**
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Materai	2580 lbr	21,900,000.00	590 lbr	5,900,000	304 lbr	3,040,000.00	304 lbr	3,040,000	**100.00**	100.00	304 lbr	3,040,000.00	608 lbr	6,080,000	24	28
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jenis dan jumlah komponen instalasi listik dan Rekening sumber daya listrik dan air yang dibayar	24 rek	649,601,870.00	3 rek	82,051,728	4 rek	114,870,450.00	4 rek	98,521,952	**100.00**	85.77	4 rek	97,510,950.00	8 rek	196,032,902	33	30
5.02.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan Jenis peralatan kantor yang diadakan	31 unit	412,085,710.00	3 unit	299,999,051	5 unit	26,469,000.00	5 unit	26,467,500	**100.00**	99.99	5 unit	26,217,000.00	10 unit	52,684,500	32	13
5.02.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Honorarium ADM pelaksanaan Tugas ASN, Non PNS, Staf Bagian pelayanan, Sopir, Cleaning Service dan Satpam	72 bln	5,643,778,032.00	12 bln	807,537,388	12 bln	877,257,437.00	12 bln	843,532,740	**100.00**	96.16	12 bln	890,687,753.00	24 bln	1,734,220,493	33	31
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**		**1,034,812,500.00**		**206,821,000.00**		**174,545,050.00**		**170,029,050.00**	**92.19**	**91.81**		**170,507,550.00**		**340,536,600.00**	**32**	**29**
5.02.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jenis dan Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	228 unit	833,762,500.00	37 unit	172,966,000	38 unit	149,425,050.00	38 unit	148,944,050	**100.00**	99.68	38 unit	145,387,550.00	76 unit	294,331,600	33	35
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jenis dan Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	192 unt	201,050,000.00	31 unit	33,855,000	32 unit	25,120,000.00	27 unit	21,085,000	**84.38**	83.94	32 unit	25,120,000.00	59 unit	46,205,000	31	23
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio Pajak Daerah terhadap Total PAD**		**4,086,742,958.00**		**790,403,215.00**		**1,358,702,500.00**		**1,350,007,581.00**	**100.00**	**99.18**		**856,119,000.00**		**2,206,126,581.00**	**34**	**49**
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**		**4,086,742,958.00**		**790,403,215.00**		**1,358,702,500.00**		**1,350,007,581.00**	**100.00**	**99.18**		**856,119,000.00**		**2,206,126,581.00**	**34**	**49**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ SubKegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realsiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)						Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan (2023)			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)					Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d Tahun Berjalan (2023)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8=(7/6)*		*9*			*10=(5+7+9)*		*11=(10/4)*	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang mengikuti Sosialisasi pajak Daerah	72 kec	104,000,000.00	12 kec	11,350,000	12 kec	13,870,000.00	12 kec	13,700,000	**100.00**	98.77	12 kec		13,870,000.00	24 kec	27,570,000	33	27
5.02.04.2.01.03	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pemutakhiran, Pendataan, Perekaman dan Penetapan Objek pajak Daerah	360,276 OP	780,000,000.00	64,046 OP	107,855,000	64,046 OP	456,814,000.00	64,046 OP	455,890,294	**100.00**	99.80	64,046 OP		330,461,500.00	128092 OP	786,351,794	36	101
5.02.04.2.01.03	Penetapan Wajib pajak Daerah	Jumlah Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB-P2	72 kec	601,180,000.00	12 kec	96,915,350	12 kec	69,945,000.00	12 kec	69,291,086	**100.00**	99.07	12 kec		69,945,000.00	24 kec	139,236,086	33	23
5.02.04.2.01.03	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Rekonsiliasi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Informasi dan Validasi Piutang Pajak	72 kec	730,000,000.00	11 kec	124,167,762	12 kec	190,155,000.00	12 kec	187,992,890	**100.00**	98.86	12 kec		142,260,000.00	24 kec	330,252,890	33	45
5.02.04.2.01.03	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Penagihan Pajak Daerah	360,276 OP	1,096,720,000.00	64,046 OP	275,952,400	64,046 OP	374,349,750.00	64,046 OP	370,863,511	**100.00**	99.07	64,046 OP		169,783,750.00	128092 OP	540,647,261	36	49
5.02.04.2.01.03	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan pajak Daerah	Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi pajak Daerah serta penyusunan Perda/Perbup, Kepbup.	72 kec	774,842,958.00	12 kec	174,162,703	12 kec	253,568,750.00	12 kec	252,269,800	**100.00**	99.49	12 kec		129,798,750.00	24 kec	382,068,550	33	49

Ampana, 2023
Mengetahui,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Drs. SYAIFUL BAHRI, M.A.P
Pembina Utama Madya, IV/d
Nip. 19640110 199103 1 009

5,446,441,900
5,331,414,497

97.89%

6,231,712,095

#REF!

#REF!

2280

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una

NO	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	**14,00%**	**14,20%**	**14,70%**	**15,20%**	**15%**	**13,87%**	**14,90%**	**15,90%**	**17,90%**	
2	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	-	-	**11.684.450.000,00** **100%**	**11.740.050.000,00** **100%**	**11.844.773.572,68** **100%**	**13.334.320.718,04** **100%**	**11.689.460.708,00** **106,27%**	**11.412.985.463,08** **97,68%**	**11.250.050.000,00** **100%**	**11.844.773.572,68** **100%**	**13.334.320.718,04** **100%**	

Tabel2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten TojoUna-Una

NamaOPD :BadanPendapatanDaerah

Lembar…….dari……

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Paguindikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				***25.896.000***	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				***25.896.000***
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	25.896.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	25.896.000

2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				***4.088.115.008***	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				***4.088.115.008***
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan	38 Orang /Bulan	4.088.115.008	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan	38 Orang /Bulan	4.088.115.008
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**532.069.183**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**532.069.183**
a.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bapenda	Jumlah Paket Bahan Logistik yang diadakan	32 Paket	171.003.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bapenda	Jumlah Paket Bahan Logistik yang diadakan	32 Paket	171.003.000
b.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bapenda	Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	111.675.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bapenda	Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	111.675.000
c.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bapenda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap.	4.025.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bapenda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap.	4.025.000

d.	Penyelenggaran Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	168 Lap.	245.366.183	Penyelenggaran Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	168 Lap.	245.366.183
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.010.265.870**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.010.265.870**
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Lap.	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Lap.	3.000.000
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Lap.	91.411.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Lap.	91.411.500
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3 Lap.	12.272.500	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3 Lap.	12.272.500

	Perlengkapan kantor		Peralatan dan Perlengkapan kantor			Perlengkapan kantor		Peralatan dan Perlengkapan kantor		
d.	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	12 Lap.	903.581.870	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	12 Lap.	903.581.870
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**				**163.095.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**				**163.095.000**
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapenda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipeliharan dan dibayarkan pajaknya	38 Unit	139.475.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapenda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipeliharan dan dibayarkan pajaknya	38 Unit	139.475.000

b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	32 Unit	23.620.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	32 Unit	23.620.000

6	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**498.511.500**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**498.511.500**
a.	Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan pajak daerah	12 Lap.	13.870.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan pajak daerah	12 Lap.	13.870.000
b.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah LaporanHasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12 Lap.	112.774.500	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah LaporanHasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12 Lap.	112.774.500
c.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dok.	69.408.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dok.	69.408.000
d.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	109.920.937	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	109.920.937

e.	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	12 Dok.	104.192.187	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	12 Dok.	104.192.187
f.	Pengendalian , Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian , Pengawasan Pajak Daerah	12 Dok.	88.345.876	Pengendalian , Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian , Pengawasan Pajak Daerah	12 Dok.	88.345.876

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku
Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Tojo Una-Una

Nama OPD : Badan Pendapatan Daerah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*

TABEL 3.1
PRIORITAS DAN SASARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
1	Mewujudkan Aparatur dan Sistem Pemerintahan Daerah yang profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis Smart Governance	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Oleh BPK	Optimalisasi Penerimaan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi PAD terhadap Potensi PAD
		Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pemerintah Daerah	Niali Sakip Daerah	Meningkatnya kualitas dan Kinerja BAPENDA	Persentase Capaian Kinerja Bapenda

Tabel 3.2
Tujuan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024
Kabupaten Tojo Una-Una

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024
1	Meningkatkan Pencapaian Target Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Target Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10.00%
2	Terselenggarakan Pelayanan Publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada inovasi	Nilai Sakip	B

Tabel 3.3
Sasaran Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024
1	Optimalisasi Penerimaan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi PAD terhadap Potensi PAD	100.0%
2	Meningkatnya kualitas dan Kinerja BAPENDA	Nilai Sakip	BB

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024
1	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Total PAD	14.70%
		Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	100.0%
2	Meningkatnya kualitas dan Kinerja BAPENDA	Nilai Sakip	BB

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	**Meningkatnya kualitas dan Kinerja BAPENDA**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Keuangan Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	**Optimalisasi Penerimaan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak
			Penetapan Wajib Pajak
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
			Penagihan Pajak Daerah
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Intensifikasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

PENAMBAHAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2024 (Rp)	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 (Rp)	KET
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
					TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
1	*2*	*3*	*3*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*12*	*13*	*15*
5.02	**BELANJA LANSUNG**										**6,317,952,561.00**	**6,317,952,561.00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pemerintah Daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas**		**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**B**					**5,819,441,061.00**	**5,819,441,061.00**	
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**97%**	**25,896,000.00**	**25,896,000.00**	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Tojo Una-Una			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok			25,896,000	25,896,000	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**97%**	**4,088,115,008.00**	**4,088,115,008.00**	
5.02.01.2.01.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tojo Una-Una				38 Org			4,088,115,008	4,088,115,008	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**532,069,183.00**	**532,069,183.00**	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor			Kab. Tojo Una-Una			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket			171,003,000	171,003,000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kab. Tojo Una-Una			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket			111,675,000	111,675,000	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Tojo Una-Una			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			4,025,000	4,025,000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulasi SKPD			Kab. Tojo Una-Una dan Luar Daerah			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168 Laporan			245,366,183	245,366,183	

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2024 (Rp)	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 (Rp)	KET
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
					TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
1	*2*	*3*	*3*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*12*	*13*	*15*
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**Tersedianya Anggaran Peningkatan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1,010,265,870.00**	**1,010,265,870.00**	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat			Kab. Tojo Una-Una			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan			3,000,000	3,000,000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik			Kab. Tojo Una-Una			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			91,411,500	91,411,500	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Kab. Tojo Una-Una			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan			12,272,500	12,272,500	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor			Kab. Tojo Una-Una			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			903,581,870	903,581,870	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100%**	**163,095,000.00**	**163,095,000.00**	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			Kab. Tojo Una-Una			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 Unit			139,475,000	139,475,000	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			Kab. Tojo Una-Una			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit			23,620,000	23,620,000	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAND DAERAH**	**Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas**		**Persentase realisasi penerimaan pajak daerah**	**100%**					**498,511,500.00**	**498,511,500.00**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**Persentase Pengelolaan Pajak Daerah**	**98%**	**498,511,500.00**	**498,511,500.00**	

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2024 (Rp)	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 (Rp)	KET
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
					TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
1	*2*	*3*	*3*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*12*	*13*	*15*
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah			Kab. Tojo Una-Una			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan			13,870,000	13,870,000	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Kab. Tojo Una-Una			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				112,774,500	112,774,500	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib pajak Daerah			Kab. Tojo Una-Una			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				69,408,000	69,408,000	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah			Kab. Tojo Una-Una dan Luar Daerah			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				109,920,937	109,920,937	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah			Kab. Tojo Una-Una			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				104,192,187	104,192,187	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan pajak Daerah			Kab. Tojo Una-Una dan Luar Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				88,345,876	88,345,876	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**6.817.952.561,00**							**7.265.645.443,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.817.952.561,00**							**7.265.645.443,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**6.817.952.561,00**							**7.265.645.443,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**BB Nilai**		**BB Nilai**	**BB Nilai**	**6.319.441.061,00**						**BB Nilai**	**6.692.357.219,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 %		100 %	100 %	25.896.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Dokumen	29.780.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	25.896.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Dokumen	29.780.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %		100 %	100 %	4.088.115.008,00			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	38 Orang/bulan	4.701.332.259,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan		38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	4.088.115.008,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	38 Orang/bulan	4.701.332.259,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pemenuhan kebutuhan administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %		100 %	100 %	532.069.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	32 Paket	611.879.560,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket		32 Paket	32 Paket	171.003.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	32 Paket	196.653.450,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	111.675.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	15 Paket	128.426.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.025.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	4.628.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168 Laporan		168 Laporan	168 Laporan	245.366.183,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	168 Laporan	282.171.110,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Peningkatan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %		100 %	100 %	1.510.265.870,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Laporan	1.161.805.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Laporan	3.450.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	91.411.500,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	4 Laporan	105.123.225,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	12.272.500,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Laporan	14.113.375,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.403.581.870,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	1.039.119.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	100 %		100 %	100 %	163.095.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	38 Unit	187.559.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 Unit		38 Unit	38 Unit	139.475.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	38 Unit	160.396.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit		32 Unit	32 Unit	23.620.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	32 Unit	27.163.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase realisasi penerimaan pajak daerah Rasio Pajak Daerah terhadap Total PAD***	**100,00 % 14,70 %**		**100,00 % 14,70 %**	**100,00 % 14,70 %**	**498.511.500,00**						**100,00 % 14,70 %**	**573.288.224,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah*	90 %		90 %	90 %	498.511.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur BAPENDA	12 Laporan	573.288.224,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.870.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur BAPENDA	12 Laporan	15.950.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	112.774.500,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur BAPENDA	12 Laporan	129.690.675,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	69.408.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur BAPENDA	12 Dokumen	79.819.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan		12 Layanan	12 Layanan	109.920.937,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur BAPENDA	12 Layanan	126.409.077,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	104.192.187,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur BAPENDA	12 Dokumen	119.821.015,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	88.345.876,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur BAPENDA	12 Dokumen	101.597.757,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H							**6.817.952.561,00**							**7.265.645.443,00**	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH KAB. TOJO UNA-UNA

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA – UNA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alamat. Jalan Merdeka No. Kota Bumi Mas Ampana Kode Pos 94683

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR :188.45/ /BKPSDMD/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA(RENJA) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tojo Una-Una perlu menetapkan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di BKPSDMD KabupatenTojo Una-Una.
b. bahwa mereka yang nama dan / atau jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tojo Una – Una tentang penetapan Pejabat Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 32 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten tojouna-una di propinsi Sulawesi tengah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2003 nomor 147, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4342).
2. undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4846).
3. undang-undang nomor25 tahun 2009 tentang pelayanan public (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5038).
4. undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2009 nomor 152, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5071).
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 224, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5587). Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republic

Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahanl embaran Negara republic Indonesia nomor 5679.

6. peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 keterbukaan informasi public (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5149,
7. peraturan menteri dalam negeri nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPEN TOJO UNA-UNA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA – UNA ;

KESATU : Menetapkan pejabat Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Pelaksana BPBD ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan padaa nggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten tojo una-una masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat ;

KETIGA : Keputusan Kepala badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini ;

Ditetapkan di Ampana
Padatanggal : Maret 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una

BURHANUDIN, S.Ag., M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.19650519 198403 1 015

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 188.45/ /BKPSDMD/2023
TANGGAL : Maret 2023
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PADA KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA – UNA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA – UNA

Ketua Tim : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tojo Una – Una

Sekretaris Tim : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Kelompok Kerja :

1. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Fasilitasi Profesi ASN
   Koordinator : Kabid Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Fasiltasi Profesi ASN

2. Bidang Mutasi dan Promosi ASN
   Koordinator : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN

3. Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kerja, Disiplin dan Penghargaan
   Koordinator : Kabid Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kerja, Disiplin dan Penghargaan

4. Bagian Sekretariat
   Koordinator : Kasubag Program, Keuangan dan Aset
   Anggota : Staf Penyusun Program

Ditetapkan di Ampana
Padatanggal : Maret 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una

BURHANUDIN, S.Ag., M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.119650519 198403 1 015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLah SWT, karena berkat izin dan Ridha-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 dapat di selesaikan

Rencana Kerja ini merupakan acuan bagi jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visis,misis,tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Rencana kerja yang telah disusun ini belum berarti sempurna tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat seluruh jajaran perangkat daerah. Kami sangat mengharapkan masukan maupun saran yang sifatnya konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja yang akan dating

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut membantu dan memberikan saran, pendapat serta dukungan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023.

Ampana, Maret 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

BURHANUDIN, S.Ag., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196505191984031015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 9
1.3 Maksud dan Tujuan 13
1.4 Sistematika Penulisan 14

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 16
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya MAnusia Daerah 16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 17
2.3 Isu – isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 18
2.4 Review terhadap Rencangan Awal RKPD 21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 22
3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi 22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 24

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .. 27

BAB V PENUTUP 28

DAFTAR LAMPIRAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja- yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan Pelaksanaan sistem perencanan pembangunan nasional, yaitu untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi, dan sinergi antar bidang, waktu, ruang dan fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah kabupaten/kota; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat ; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya manusia secara efisien dan efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Tojo Una – Una didalam menjalankan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan memperkuat sinergi antar bidang, wilayah dan antar pelaku pembangunan. Dalam hal pencapaian kinerja pembangunan diperlukan komitmen semua pihak khususnya Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat merealisasikan secara sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat kabupaten Tojo Una-Una.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) merupakan dokumen perencanaan BKPSDMD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja BKPSDMD merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian, sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian. Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan pewujudan aparatur yang profesional. Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tojo Una-Una diawali dengan persiapan penyusunan Renja BKPSDMD yang meliputi pembentukan tim penyusun Renja BKPSDMD, orientasi mengenai Renja BKPSDMD, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renja BKPSDMD yang meliputi tahap perumusan rancangan Renja BKPSDMD dan tahap penyajian rancangan Renja BKPSDMD. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan forum BKPSDMD yang merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan) untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja BKPSDMD. Proses penyusunan Renja BKPSDMD diakhiri dengan penetapan Renja BKPSDMD. Penetapan rancangan akhir Renja BKPSDMD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala BKPSDMD menetapkan Renja BKPSDMD untuk menjadi pedoman di lingkungan BKPSDMD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas BKPSDMD pada tahun 2024.

1.1.1. Pengertian dan Fungsi RENJA OPD

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya.

Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Darah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

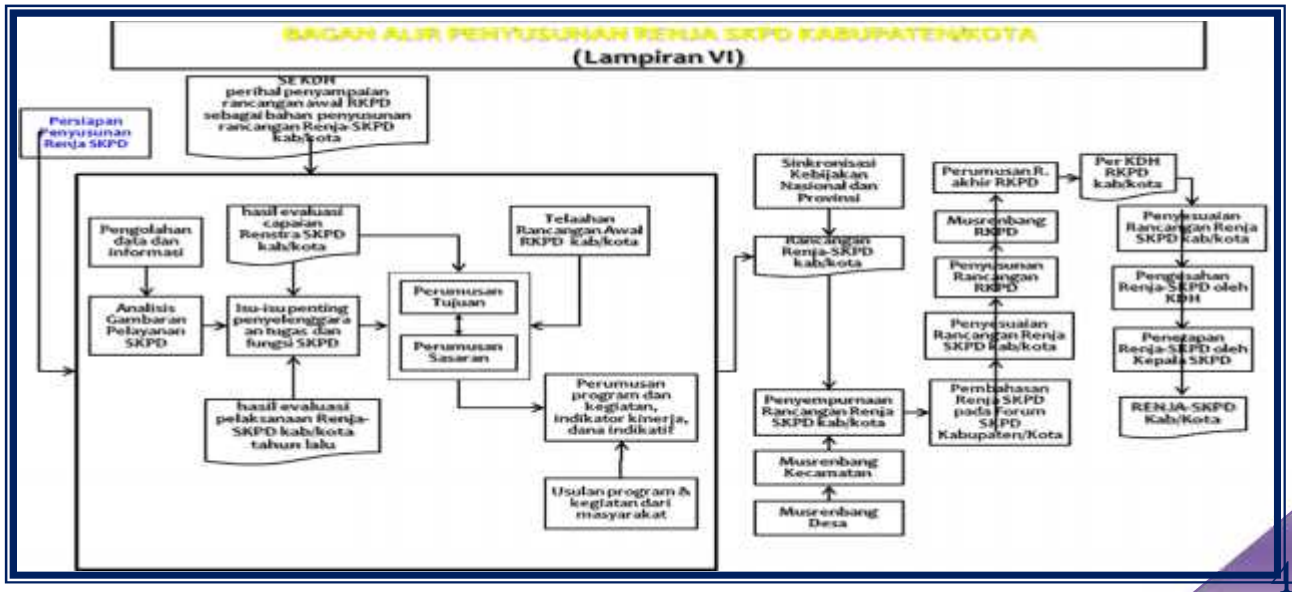
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja SOPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah, maka disusunlah RENJA – BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan OPD tahunan sebagai penjabaran dari Renja OPD yang telah ditetapkan.

1.1.2. Proses Penyusunan RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai implementasi teknis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Proses penyusunan RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Tahun 2022 dan mekanisme mengacu pada garis kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai Visi dan Misi Bupati.

Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan merupakan dokumen perencanaan yang berlaku 1(satu) tahun dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Kabupaten Tojo Una-Una 2016 - 2021 dan bersifat indikatif. Oleh karena itu, penyelarasan dan konsolidasi data dan informasi strategis yang dimuat didalam Renja ini sejalan dengan dokumen RPJMD kabupaten Tojo Una-Una 2016-2021. Adapun tahapan/mekanisme penyusunan Renja dapat digambarkan sebagai berikut ;



Tahapan penyusunan Renja OPD dimulai dari persiapan penyusunan rancangan Renja OPD, penyusunan rancangan Renja OPD, Pelaksanaan Forum OPD dan Penetapan Renja OPD.

a. Persiapan Penyusunan Rancangan Renja OPD

Kegiatan awal ini meliputi beberapa sub kegiatan yang sangat menentukan kualitas Renja OPD yang akan dihasilkan, antara lain :

1) Pembentukan Tim Penyusunan Renja OPD

Kepala OPD mempersiapkan Tim Penyusun Renja OPD dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja OPD. Tim penyusun yang terdiri dari pejabat dan staf OPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. serta melibatkan tenaga ahli/konsultan untuk penajaman dan mengarahkan penyusunan Renja.

2) Orientasi Mengenai Renja OPD

Kegiatan ini dimaksudkan agar seluruh anggota tim penyusun, yang terdiri dari beberapa bidang program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) mempunyai persamaan persepsi dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renja OPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD).

3) Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja

Rencana kegiatan tim penyusun mulai dari persiapan sampai penetapan Renja telah dituangkan dalam Agenda Kerja. Agenda kerja ini digunakan oleh tim dalam proses penyusunan untuk memudahkan dalam koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan Renja dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 -

2021 yang juga berlangsung bersamaan dengan melibatkan Bappeda dan Tim Konsultan.

4) Pengumpulan Data dan Informasi

Sebuah perencanaan yang baik harus berangkat dari data dan informasi yang akurat. Oleh karena itu data dan informasi yang benar maka perencanaan yang akan dihasilkan pun akan sesuai dengan yang diharapkan. Dokumen yang diperlukan antara lain peraturan perundang-undangan yang terkait; kebijakan pemerintah terkait; Renja Kementerian/Lembaga terkait, dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negera ; Renja OPD terkait di tingkat provinsi; Perda pembentukan Organisasi dan pelaksanaan tupoksi serta struktur organisasi; Renja OPD tahun berjalan; hasil evaluasi Renja OPD periode sebelumnya;

b. Penyusunan Rancangan Renja OPD

Penyusunan rancangan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) terdiri dari 2 tahapan, yaitu perumusan dan penyajian.

1) Tahap Perumusan Rancangan Renja BKPSDMD

Perumusan rancangan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Tahun 2020 dilakukan baik sebelum maupun sesudah Kepala Badan menerima Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan Rancangan Renja OPD.

Rancangan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) disusun berdasarkan Rancangan Teknokratik dengan mempertimbangkan koordinasi kebutuhan daerah dan usulan bidang-bidang untuk mengidentifikasikan pembagian tugas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2016-2021. Hasil perumusan rancangan awal Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) tahun 2024. Dilakukan melalui proses Forum OPD sebagai uji publik atas rancangan kebijakan pelayanan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuisa Daerah (BKPSDMD) dalam menangani dinamika dan aspirasi pelayanan para pemangku kepentingan, juga menjadi media komunikasi antara lintas OPD.

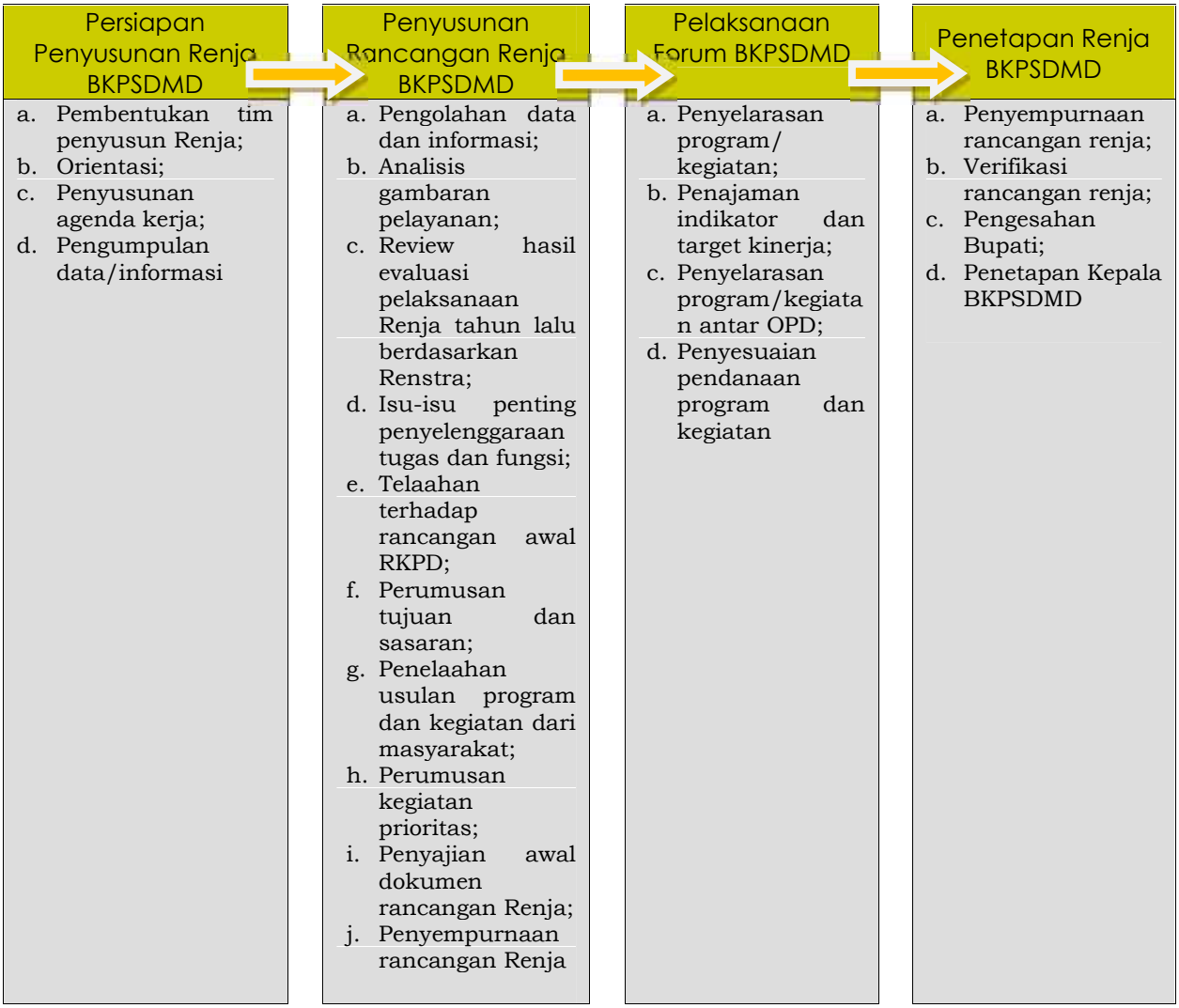
Tahapan Penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dilakukan melalui:

- Perumusan Substansi
- Penuangan hasil perumusan subtansi kedalam sistematika dokumen

2) Penyajian rancangan Renja BPKSDMD

Rancangan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) disajikan dengan sistematika sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010. Rancangan akhir Renja tersebut di verifikasi dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) dengan RPJMD Kabupaten Tojo Una – Una. Pada akhirnya rancangan Renja disahkan dengan Keputusan Bupati, maka Kepala Badan menetapkan Rencana Kerja Tahun 2024 menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan. Adapun tahapan penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar berikut ;

Gambar. 1.1.2
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA BKPSDMD TAHUN 2024



Seluruh dokumen rencana pembangunan merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja BKPSDMD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada BKPSDMD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una dan Renstra BKPSDMD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja BKPSDMD disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDMD, untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una-Una dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Tojo Una-Una.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis BKPSDMD (BKPSDMD) Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4. 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
14. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 TentangTentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794);
28. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Pemutahiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ/2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020;
30. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 8 Tahun 2021Tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;

34. Peraturan Daerah KabupatenTojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 2);
38. Surat Keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja BKPSDMD Kabupaten Tojo Una-Una.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan; sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran;
2. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus

memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) tahun 2024 adalah :

1. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur sejalan dengan RENJA-OPD dan RPJMD.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang 1 (satu) tahun.
3. Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan professional berdasarkan indikator kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Tahun 2024 disusun dengan sistematika seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Bab IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan .

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2023 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

b. Tujuan yang dikehendaki;

c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai dasar awal dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan capaian realisasi fisik sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran Rencana Kerja Tahun 2022 mencapai 97 % dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 6.010.742.987 (96%) dari total pagu anggaran Rp. 6.238.449.956 yang terdiri dari 3 Program 15 kegiatan 24 Sub kegiatan. Berikut adalah rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tojo Una-Una serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 menurut indikator program dapat dilihat dalam table T-C.29 sebagai berikut :

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada **tabel 2.1** yang terdapat pada daftar **lampiran I .**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Namun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum mempunyai dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tojo Una-Una. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tojo Una-Una dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Tojo Una-Una. Pada Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kab. Tojo Una-Una berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Adapun analisis indikator kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dapat dilihat pada **tabel 2.2** yang terdapat pada **lampiran II**

2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tojo Una - Una dimana posisi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tojo Una-Una juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan strategis terkait dengan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagai berikut:

1. **Sistem rekrutmen, penempatan dan distribusi aparatur harus ditingkatkan karena belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi;**

Dalam penetapan formasi masih terdapat kelemahan pada tingkat Satuan Organisasi perangkat Daerah. Hal ini timbul karena aparatur tersebut belum mempunyai kompetensi dalam bidang tersebut. Di samping itu, juga adanya perbedaan penetapan formasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Pengusulan Daerah.

2. **Penempatan Pegawai belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi;**

   Standar kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal, yang harus dimiliki seorang PNS, dalam melaksanakan tugas jabatannya. Kompetensi jabatan merupakan instrumen yang urgen, sebagai pedoman untuk menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan PNS dalam suatu jabatan, yang didasarkan pada prinsip profesionalisme sesuai dengan standar kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, serta syarat obyektif lainnya. Penempatan PNS sesuai dengan standar kompetensi jabatan, merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yan kapabel, akuntabel bersih dan berwibawa menuju *good and clean governance*.

3. **Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem informasi manajamen kepegawaian;**

   Kemajuan teknologi informatika yang berkembang pesat dewasa ini, belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh BKPSDMD Kabupaten Tojo Una-Una dalam mengaplikasikan data pegawai. Meskipun telah tersedia perangkat Sistem Informasi pelayanan Kepegawaian (SiPK) dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dimana masih perlu diintegrasikan dengan pelayanan adminitrasi kepegawaian.

   Data pegawai yang lengkap dan *up to date* merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyusunan program

perencanaan, peningkatan kapasitas serta pembinaan dan pengembangan karir sumber daya aparatur.

4. **Pelayanan administrasi kepegawaian masih perlu peningkatan guna mencapai pelayanan yang cepat, mudah dan tepat;**

   Kemudahan dan Kecepatan dalam memperoleh pelayanan dibidang administrasi kepegawaian merupakan salah satu kunci dalam mendorong terciptanya gairah aparatur dalam bekerja.

5. **Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan yang baik, bersih dan melayani;**

   Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, PNS dituntut untuk dapat bekerja secara profesionalisme, baik, bersih dan melayani masyarakat sepenuh hati. Oleh karena itu, satu dari berbagai harapan dilaksanakannya reformasi birokrasi adalah mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional yaitu pegawai yang mengerti akan hak dan kewajibannya, memahami tugas pokok dan fungsinya serta dapat melaksanakan tugas dengan baik, bersih sesuai aturan yang ada dan mampu melayani masyarakat berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Namun kenyataan yang ada sampai saat ini profesionalisme PNS yang baik, bersih dan melayani masih belum dapat diwujudkan.

6. **Disiplin aparatur daerah masih perlu ditingkatkan dengan menerapkan sistem *reward* dan *punishment* secara seimbang;**

   Saat ini sudah menjadi rahasia umum bahwa disiplin aparatur masih lemah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh belum diterapkan peraturan disiplin disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana peraturan yang berlaku. Belum adanya persamaan persepsi dan pemahaman di antara *stakeholder* dalam penegakan disiplin, serta masih adanya perbedaan perlakuan terhadap aparatur serta pemberian penghargaan yang masih kurang dalam melakukan pembinaan merupakan hal-hal yang perlu dibenahi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, dan efesien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) BKPSDMD dan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja BKPSDMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.

Program Kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, Hal ini dimaksudkan supaya adanya konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tojo Una - Una berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD yang dapat dijabarkan pada **tabel 2.4.** yang terdapat pada **lampiran III .**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mengemban amanah mandat Undang-Undang, Visi BKN Tahun 2020-2024 adalah melaksanakan Visi Presiden Nomor 8 (delapan) yaitu "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih Efektif, dan terpercaya" melaksanakan arahan presiden nomor 4 (empat) yaitu Penyederhanaan Birokrasi dan Agenda pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu "Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan "***Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."***

Terdapat dua nilai yang menjadi tujuan utama pembentukan karakter pegawai ASN, Yaitu : Profesional dan Bermartabat

3.1.2 Telaahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2021-2024 yaitu :

"***Mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi untuk mencapai pemerintahan yang berkelas dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden :" Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong "***

Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tojo Una-Una telah sejalan dengan Visi Institusi Pusat tersebut.

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1.	Program penunjang pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pemerintah Daerah	- Persentase Penempatan ASN sesuai ANJAB - Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) - Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) - Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga	Meningkatnya kualitas dan kompetensi ASN	1. Persentase ASN yang berkinerja baik 2. Persentase ASN yang disesuiakan dengan kompetensi nta

			kesehatan) - Persentase Pejabat struktural yang mengikuti Diklat PIM II - Persentase Pejabatat Struktural yang mengikuti Diklat PIM III - Persentase Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat PIM IV		

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah . Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2023 sebagai berikut

Tabel 3.2
Tujuan

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024
1	Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	61-70

Tabel 3.3
Sasaran

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2023
	Meningkatnya kualitas dan kompetensi ASN	Persentase ASN yang berkinerja baik	79,5
		Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya	16,54

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
1.	Persentase Pejabat struktural yang mengikuti diklat PIM II	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	4-5
2.	Persentase Pejabat struktural yang mengikuti diklat PIM III	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan (%)	6-8

3.	Persentase Pejabat struktural yang mengikuti diklat PIM IV		
4.	Presentase penempatan ASN sesuai ANJAB	Jumlah jabatan Adminstrasi	1.979
5.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
6	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pemangku jabatan fungsional	2.299
	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		

Rancangan awal Rencana kerja (RENJA) Tahun 2024 yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah Kabupaten Tojo Una-Una merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD). Rencana kerja ini merupakan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Rancangan awal rencana kerja tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 (terlampir).

Rencana kerja (Renja) yang telah disusun ini, diharapkan dapat memperlancar arus informasi dan komunikasi bidang kepegawaian sehingga secara keseluruhan dapat memberikan informasi bagi segenap institusi/organisasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam pengelolaan manajemen kepegawaian terutama dalam mengoptimalkan pemberdayaan aparatur yang ada dalam lingkungan instansinya.

Berhasil atau tidaknya suatu rencana kerja tidak hanya tergantung pada proses perumusannya saja akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh implementasinya. Oleh karena itu dalam penyusunan rencana kerja ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tojo Una-Una membutuhkan perhatian yang sangat serius dari seluruh komponen organisasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una termasuk dari para pegawai (aparatur pemerintah) baik dalam lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tojo Una-Una maupun dari seluruh komponen organisasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Tingkat perhatian tersebut dapat diwujudkan dalam pemberian sumbangan pikiran atau saran dalam perumusannya maupun turut membantu dalam memperbaiki dan memperlancar pelaksanaannya, dengan maksud agar rencana kerja yang telah dirumuskan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja (RENJA) tahunan tahun 2024, dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2024 yang akan datang.

Daftar Lampiran

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN TOJO UNA - UNA

KODE PROGRAM & KEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	6
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**Rp2,301,613,845.00**				**Rp2,389,750,000.00**
5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp1,158,444,345.00				Rp1,183,750,000.00
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan laporan kinerja dan keuangan		100%	Rp53,500,000.00				Rp65,000,000.00
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Touna	0 Dokumen,3 dokumen	Rp35,000,000.00		Kab. Touna	0 Dokumen,3 dokumen	Rp40,000,000.00
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Jumlah SDM dan Non PNS dan Jenis administrasi tiap bulan	Kab. Touna	0 Laporan, 8 orang	Rp18,500,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	0 Laporan, 8 orang	Rp25,000,000.00
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi keangan Daerah		100%	Rp0.00	DAU			Rp0.00
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Kab. Touna	12 bulan		Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	12 bulan	
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi umum prangkat daerah yang disediakan		100%	Rp291,902,827.00	DAU			Rp302,250,000.00
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan Jumlah Komponen instalasi listrik yang dibeli, Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Touna	5 jenis, 0 Paket	Rp2,078,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	5 jenis, 0 Paket	Rp2,250,000.00
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli, jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Touna	3 Unit, 0 Paket	Rp51,210,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	3 Unit, 0 Paket	Rp55,000,000.00
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah bahan logistik kantor yang dibeli, Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Touna	12 Bulan, 0 Paket	Rp75,125,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	12 Bulan, 0 Paket	Rp76,000,000.00
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan, Junlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Touna	4 Jenis, 0 Paket	Rp3,450,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	4 Jenis, 0 Paket	Rp4,000,000.00
5	3	1	2.06	9	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	Palu,Makassar Jakarta	0 Laporan, 35 Kali	Rp160,039,827.00	Dana Transfer Umum-DAU	Palu,Makassar Jakarta	0 Laporan, 35 Kali	Rp165,000,000.00
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		100%	Rp645,508,518.00	DAU			Rp647,000,000.00

5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Kab. Touna	12 Bulan	Rp101,251,000.00	DAU	Kab. Touna	12 Bulan	Rp102,000,000.00
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlad SDM Non PNS dan jenis administrasi keuangan tiap bulan	Kab. Touna	12 Bulan	Rp544,257,518.00	DAU	Kab. Touna	12 Bulan	Rp545,000,000.00
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terpelihara		100%	Rp167,533,000.00				Rp169,500,000.00
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, terpenuhinya kendaraan dinas untuk operasional pegawai	Kab. Touna	0 Unit, 23 Unit	Rp100,692,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	0 Unit, 23 Unit	Rp101,000,000.00
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelancaran proses adminstrasi perkantoran	Kab. Touna	41 Unit	Rp49,600,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	41 Unit	Rp50,000,000.00
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang di pelihara / direhabilitasi	Kab. Touna	1 Unit	Rp17,241,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	1 Unit	Rp18,500,000.00
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Rp1,118,169,500.00	DAU			Rp1,174,000,000.00
5	3	2	2.01		Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah capaian persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian		100%	Rp392,500,000.00				Rp409,000,000.00
5	3	2	2.01	2	Penyusun Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah kebutuhan ideal pegawai berdasarkan tahapan analisisnya	Kab. Touna	100 Formasi	Rp15,000,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	100 Formasi	Rp15,000,000.00
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah PNS yang memenuhi syarat menduduki jabatan	Kab. Touna	100 ASN	Rp220,000,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	100 ASN	Rp221,000,000.00
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumentasi Hasil kegiatan Koordinasi pelaksanaa adminstrasi pemberhentian,Jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun	Kab. Touna	0 Dokumen 96 org	Rp27,500,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	0 Dokumen 96 org	Rp28,000,000.00
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan yang difasilitasi kelembagaan KORPRI	Kab. Touna	1 Keg	Rp50,000,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	1 Keg	Rp55,000,000.00
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data ASN yang dikelola/di input dan sistem aplikasi yang dikembangkan	Kab. Touna	4414 ASN	Rp80,000,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	4414 ASN	Rp90,000,000.00
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah capaian persentase layanan mutasi		100%	Rp455,000,000.00	DAU			Rp482,000,000.00
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Meningkatnya kinerja ASN	Kab. Touna	50 SK	Rp30,000,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	50 SK	Rp31,000,000.00
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK kenaikan pangkat periode april dan oktober	Kab. Touna	1200 SK	Rp100,000,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	1200 SK	Rp101,000,000.00

5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Terselenggaranya Seleksi JPT Pratama secara transparan objek dan akuntabel	Kab. Touna	25 org	Rp325,000,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	25 org	Rp350,000,000.00
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah capaian persentase layanan pegembangan kompetensi ASN		100%	Rp222,514,000.00	DAU			Rp231,000,000.00
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian dinas Tkt. I dan II	Kab. Touna	100 orang	Rp80,000,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	100 orang	Rp85,000,000.00
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang memiliki SDM Aparatur melalui pendidikan tugas belajar	Palu,Makassar, Jawa	0 org	Rp127,150,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Palu,Makassar, Jawa	0 org	Rp130,000,000.00
5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terselenggaranya komitmen bersama dalam meningkatkan kompetensi ASN	palu	5 Kali	Rp15,364,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	palu	5 Kali	Rp16,000,000.00
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya		4500 ASN	Rp48,155,500.00	DAU			Rp52,000,000.00
5	3	2	2.04	6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumentasi hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	Kab. Touna	1 Dokumen	Rp18,155,500.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	1 Dokumen	Rp20,000,000.00
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Touna	0 Laporan	Rp5,000,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	0 Laporan	Rp6,000,000.00
5	3	2	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi disiplin ASN, Jumlah Sanksi Hukuman Disiplin yang dikeluarkan	Kab. Touna	0 Laporan, 2 Dokumen	Rp25,000,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	0 Laporan, 2 Dokumen	Rp26,000,000.00
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				Rp25,000,000.00	DAU			Rp32,000,000.00
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				Rp25,000,000.00	DAU			Rp32,000,000.00
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mempunyai sertifikasi kompetensi, manajerial dan teknis		100%	Rp25,000,000.00	DAU			Rp32,000,000.00
5	4	2	2.02	7	Penyelengaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional,Kepemimpinan,dan Prajabatan	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan	Kab. Touna	3 Peserta	Rp25,000,000.00	Dana Transfer Umum-DAU	Kab. Touna	3 Peserta	Rp32,000,000.00

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA UNA

BURHANUDIN, S.Ag.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650519 198403 1 001

2,311,708,845.00			
10,095,000.00			
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
6			
Rp6,021,449,301.00	**Rp5,671,449,301.00**	350,000,000.00	
Rp4,391,850,551.00	Rp4,291,343,551.00	100,507,000.00	
Rp55,452,500.00	Rp42,550,500.00	12,902,000.00	
Rp30,452,500.00	Rp30,452,500.00	0.00	
Rp25,000,000.00	Rp12,098,000.00	12,902,000.00	
Rp3,287,137,990.00	Rp3,287,137,990.00	0.00	
Rp3,287,137,990.00	Rp3,287,137,990.00	0.00	
Rp291,012,061.00	Rp236,815,625.00	54,196,436.00	########
Rp2,500,000.00	Rp1,500,000.00	1,000,000.00	
Rp19,696,436.00	Rp16,500,000.00	3,196,436.00	
Rp51,756,375.00	Rp51,756,375.00	0.00	
Rp8,301,250.00	Rp8,301,250.00	0.00	
Rp208,758,000.00	Rp158,758,000.00	50,000,000.00	
Rp599,205,000.00	Rp599,205,000.00	0.00	

	Rp102,570,000.00	Rp102,570,000.00	0.00
	Rp496,635,000.00	Rp496,635,000.00	0.00
	Rp159,043,000.00	Rp125,634,436.00	33,408,564.00
	Rp80,500,000.00	Rp50,500,000.00	
Rp30,000,000			30,000,000.00
	Rp28,700,000.00	Rp28,700,000.00	
			0.00
	Rp49,843,000.00	Rp46,434,436.00	
21,909,000.00			3,408,564.00
	Rp1,613,430,000.00	Rp1,363,937,000.00	249,493,000.00
	Rp383,522,500.00	Rp223,522,500.00	160,000,000.00
	Rp12,333,750.00	Rp12,333,750.00	0.00
	Rp174,219,500.00		
		Rp24,219,500.00	150,000,000.00
	Rp61,567,500.00	Rp51,567,500.00	10,000,000.00
	Rp7,781,250.00	Rp7,781,250.00	0.00
	Rp127,620,500.00		
		Rp127,620,500.00	0.00
	Rp526,108,500.00	Rp466,615,500.00	59,493,000.00
	Rp30,342,750.00	Rp30,342,750.00	0.00
1,000,000.00	Rp110,765,750.00	Rp90,563,750.00	20,202,000.00

Rp385,000,000.00	Rp345,709,000.00	39,291,000.00	
Rp540,841,250.00	Rp510,841,250.00	30,000,000.00	
Rp37,747,500.00	Rp7,747,500.00	30,000,000.00	
Rp453,218,500.00	Rp453,218,500.00	0.00	
Rp49,875,250.00	Rp49,875,250.00	0.00	BIMTEK Aplikasi Man
Rp162,957,750.00	Rp162,957,750.00	0.00	
Rp17,303,000.00	Rp17,303,000.00	0.00	
Rp22,098,750.00	Rp22,098,750.00	0.00	
Rp123,556,000.00	Rp123,556,000.00	0.00	
Rp16,168,750.00	Rp16,168,750.00	0.00	
Rp16,168,750.00	Rp16,168,750.00	0.00	
Rp16,168,750.00	Rp16,168,750.00		
Rp16,168,750.00	Rp16,168,750.00		

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Drs. MOH. SYARIEF, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19641201 199303 1 008

Lampiran I :

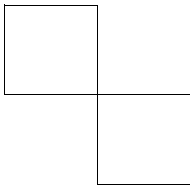
TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
KABUPATEN TOJO UNA - UNA

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2022 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 n-1)	PERKIRAAN REALIASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 (10/4)*	*12*
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terwujudnya Proses Pelayanan Administrasi perkantoran yang efektif, efesien dan tepat waktu.									
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**										
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan laporan kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100	100	100%	100 %	100	100%	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	16 dok	4 dok	4	4	100%	4 bln	12	75%	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah SDM dan Non PNS dan jenis administasi tiap bulan	32 dok	8 dok	8	8	100%	8 bln	24	75%	
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah									
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	42 bln	14 bln	14	14	0%	0 bln	28	67%	
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Administrasi umum prangkat daerah yang disediakan	100 %	100 %	100	100	100%	100 %	100	100%	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan Jumlah Komponen instalasi listrik yang dibeli	20 jenis	8 jenis	8	8	100%	8 jenis	24	120%	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	6 unit	2 unit	2	2	100%	2 unit	4	67%	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	48 bln	12 bln	12	12	100%	12 bln	36	75%	

5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	21	jenis	4	jenis	4	4	100%	4	jenis	12	57%	
5	03	01	2.06	09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsulteasi yang diikuti	143	kali	35	kali	35	35	100%	35	kali	105	73%	
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	100	%	100	100	100%	100	%	100	100%	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	48	bln	12	bln	12	12	100%	12	bln	36	75%	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlad SDM Non PNS dan jenis administrasi keuangan tiap bulan	12	bln	12	bln	12	12	100%	12	bln	36	75%	
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan barang milik daerah yang dipelihara	100	%	100	%	100	100	100%	100	%	100	100%	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya kendaraan dinas untuk operasional pegawai	92	unit	23	unit	23	23	100%	23	unit	69	75%	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelancaran proses adminstrasi perkantoran	164	unit	45	unit	45	45	100%	45	unit	135	82%	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung yang direhab	4	unit	1	unit	0	0	0%	0	unit	1	25%	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Terwujudnya PNS yang Profesional, berdisiplin dan meningkatnya Kesejahteraan Pegawai												
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Jumlah capaian persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	100	%	100	%	100	100	100%	100	%	100	100%	
5	03	02	2.01	02	Penyusun Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah kebutuhan ideal pegawai berdasarkan tahapan analisisnya	300	formasi	100	formasi	0	0	0%	100	formasi	200	67%	
5	03	02	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah PNS yang memenuhi syarat menduduki jabatan	300	ASN	100	ASN	0	0	100%	100	ASN	200	67%	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun	246	sk	36	sk	36	36	100%	36	ASN	108	44%	
5	03	02	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan yang difasilitasi kelembagaan KORPRI	2	keg	1	keg	0	0	0%	0	keg	1	50%	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data ASN yang dikelola/di input dan sistem aplikasi yang dikembangkan	8362	ASN	4300	ASN	4300	4300	100%	4300	ASN	12900	154%	
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	Jumlah capaian persentase layanan mutasi dan promosi ASN	100	%	100	%	100	100	100%	100	%	300	300%	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Meningkatnya kinerja ASN	215	sk	276	sk	276	276	100%	276	sk	828	385%	

5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK kenaikan pangkat periode april dan oktober	4920	sk	1888	sk	1888	1888	100%	1888	sk	5664	115%	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Terselenggaranya Seleksi JPT Pratama secara transparan objek dan akuntabel	100	0rg	71	0rg	71	71	100%	71	0rg	213	213%	
5	**03**	**02**	**2.03**		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah capaian persentase layanan pengembangana kompetensi ASN	100	%	100	org	100	100	100%	100	org	100	100%	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan kepemimpinan dan peningkatan kualitas aparatur	100	0rg	0	0rg	0	0	0%	0	0rg	0	0%	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang memiliki SDM Aparatur melalui pendidikan tugas belajar	0	0rg	2	0rg	2	2	100%	2	0rg	6	#DIV/0!	
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terselenggaranya komitmen bersama dalam meningkatkan kompetensi ASN	5	kali	5	kali	5	5	100%	5	kali	15	300%	
5	**03**	**02**	**2.04**		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	27000	ASN	2500	ASN	2300	2300	100%	100	ASN	4900	18%	
5	03	02	2.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Asn yang mendapatkan penghargaan dan tanda jasa aparatur	600	org	249	org	249	249	100%	249	org	747	125%	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dijatuhi hukuman disiplin	95	org	20	org	20	20	100%	20	org	60	63%	
5	03	02	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah sanksi hukuman disiplin	20	dok	19	dok	19	19	100%	19	dok	57	285%	
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**													
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Data PNS yang akurat												
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mempunyai sertifikasi kompetensi, manajerial dan teknis	100	%	100	kali	100	100	100%	100	kali	100	100%	
5	04	02	2.02	07	Penyelengaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional,Kepemimpinan,dan Prajabatan	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan	92	0rg	13	0rg	13	13	100%	13	0rg	87	95%	





Tabel 2.4

Riview terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Kabupaten Tojo Una-Una

Nama opd: BKPSDMD KAB. TOJO UNA-UNA

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					RANCANGAN AWAL RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6	8
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**Rp2,301,613,845.00**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**Rp2,389,750,000.00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN				Rp1,158,444,345.00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**				Rp1,183,750,000.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang disusun		Rp53,500,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang disusun		Rp65,000,000.00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Touna	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen,3 dokumen	Rp35,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Touna	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen,3 dokumen	Rp40,000,000.00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Touna	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Jumlah SDM dan Non PNS dan jenis administrasi tiap bulan	0 Laporan,8 orang	Rp18,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Touna	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Jumlah SDM dan Non PNS dan jenis administrasi tiap bulan	0 Laporan,8 orang	Rp25,000,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pembayaran gaji dan tunjangan PNS		Rp3,342,693,056.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pembayaran gaji dan tunjangan PNS		Rp3,368,159,056.00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Touna	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	12 bulan	Rp3,342,693,056.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Touna	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	12 bulan	Rp3,342,693,056.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi umum prangkat daerah yang disediakan		Rp291,902,827.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi umum prangkat daerah yang disediakan		Rp302,250,000.00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Touna	Jenis dan Jumlah Komponen instalasi listrik yang dibeli, jumlah paket komponen instalansi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 jenis, 0 Paket	Rp2,078,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Touna	Jenis dan Jumlah Komponen instalasi listrik yang dibeli, jumlah paket komponen instalansi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 jenis, 0 Paket	Rp2,250,000.00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Touna	Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli, Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Unit, 0 Paket	Rp51,210,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Kab. Touna	Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli, Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Unit, 0 Paket	Rp55,000,000.00	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Touna	Jenis dan jumlah bahan logistik kantor yang dibeli, jumlah paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	12 Bulan, 0 Paket	Rp75,125,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Touna	Jenis dan jumlah bahan logistik kantor yang dibeli, jumlah paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	12 Bulan, 0 Paket	Rp76,000,000.00	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Touna	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan, Jumlah Paket Brang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Jenis, 0 Paket	Rp3,450,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Touna	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan, Jumlah Paket Brang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Jenis, 0 Paket	Rp4,000,000.00	
9	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu,Makassar Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	0 Laporan,35 Kali	Rp160,039,827.00	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu,Makassar Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	0 Laporan,35 Kali	Rp165,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		Rp645,508,518.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		Rp647,000,000.00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Touna	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan, rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	12 Bulan	Rp101,251,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Touna	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan, rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	12 Bulan	Rp102,000,000.00	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Touna	Jumlad SDM Non PNS dan jenis administrasi keuangan tiap bulan	12 Bulan	Rp544,257,518.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Touna	Jumlad SDM Non PNS dan jenis administrasi keuangan tiap bulan	12 Bulan	Rp545,000,000.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan barang milik daerah yang dipelihara		Rp167,533,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan barang milik daerah yang dipelihara		Rp169,500,000.00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Touna	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, terpenuhinya kendaraan dinas untuk operasional pegawai	0 Unit, 23 Unit	Rp100,692,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Touna	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, terpenuhinya kendaraan dinas untuk operasional pegawai	0 Unit, 23 Unit	Rp101,000,000.00	
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Touna	Kelancaran proses adminstrasi perkantoran	41 Unit	Rp49,600,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Touna	Kelancaran proses adminstrasi perkantoran	41 Unit	Rp50,000,000.00	
9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Touna	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	Rp17,241,000.00	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Touna	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	Rp18,500,000.00	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Rp1,118,169,500.00	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Rp1,174,000,000.00	
	Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Presentase Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Rp392,500,000.00	Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Presentase Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Rp409,000,000.00	
2	Penyusun Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Touna	Jumlah kebutuhan ideal pegawai berdasarkan tahapan analisisnya	100 Formasi	Rp15,000,000.00	Penyusun Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Touna	Jumlah kebutuhan ideal pegawai berdasarkan tahapan analisisnya	100 Formasi	Rp15,000,000.00	
3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Touna	Jumlah PNS yang memenuhi syarat menduduki jabatan	100 ASN	Rp220,000,000.00	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan P	Kab. Touna	Jumlah PNS yang memenuhi syarat menduduki jabatan	100 ASN	Rp221,000,000.00	

6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Touna	Jumlah Dokumentasi Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan administrasi Pemberhentian, Jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun	0 Dokumen,96 org	Rp27,500,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Touna	Jumlah Dokumentasi Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan administrasi Pemberhentian, Jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun	0 Dokumen,96 org	Rp28,000,000.00	
8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Touna	Jumlah kegiatan yang difasilitasi kelembagaan KORPRI	1 Keg	Rp50,000,000.00	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Touna	Jumlah kegiatan yang difasilitasi kelembagaan KORPRI	1 Keg	Rp55,000,000.00	
10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Touna	Jumlah data ASN yang dikelola/di input dan sistem aplikasi yang dikembangkan	4414 ASN	Rp80,000,000.00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Touna	Jumlah data ASN yang dikelola/di input dan sistem aplikasi yang dikembangkan	4414 ASN	Rp90,000,000.00	
	Mutasi dan Promosi ASN		Presentase Mutasi dan Promosi ASN		Rp455,000,000.00	Mutasi dan Promosi ASN		Presentase Mutasi dan Promosi ASN		Rp482,000,000.00	
1	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Touna	Meningkatnya kinerja ASN	50 SK	Rp30,000,000.00	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Touna	Meningkatnya kinerja ASN	50 SK	Rp31,000,000.00	
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Touna	Jumlah SK kenaikan pangkat periode april dan oktober	1200 SK	Rp100,000,000.00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Touna	Jumlah SK kenaikan pangkat periode april dan oktober	1200 SK	Rp101,000,000.00	
3	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Touna	Terselenggaranya Seleksi JPT Pratama secara transparan objek dan akuntabel	25 org	Rp325,000,000.00	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Touna	Terselenggaranya Seleksi JPT Pratama secara transparan objek dan akuntabel	25 org	Rp350,000,000.00	
	Pengembangan Kompetensi ASN		Presentase Pengembangan Kompetensi ASN		Rp222,514,000.00	Pengembangan Kompetensi ASN		Presentase Pengembangan Kompetensi ASN		Rp231,000,000.00	
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Touna	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian dinas Tkt I dan II	100 orang	Rp80,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Touna	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian dinas Tkt I dan II	100 orang	Rp85,000,000.00	
4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Palu,Makassar, Jawa	Jumlah ASN yang memiliki SDM Aparatur melalui pendidikan tugas belajar	0 org	Rp127,150,000.00	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Palu,Makassar, Jawa	Jumlah ASN yang memiliki SDM Aparatur melalui pendidikan tugas belajar	0 org	Rp130,000,000.00	
5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	palu	Terselenggaranya komitmen bersama dalam meningkatkan kompetensi ASN	5 Kali	Rp15,364,000.00	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	palu	Terselenggaranya komitmen bersama dalam meningkatkan kompetensi ASN	5 Kali	Rp16,000,000.00	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Presentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Rp48,155,500.00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Presentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Rp52,000,000.00	
6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Kab. Touna	Jumlah Dokumentasi hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	1 Dokumen	Rp18,155,500.00	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Kab. Touna	Jumlah Dokumentasi hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	1 Dokumen	Rp20,000,000.00	
8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Touna	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran disiplin ASN	0 Laporan	Rp5,000,000.00	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Touna	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran disiplin ASN	0 Laporan	Rp6,000,000.00	
10	Evaluasi Disiplin ASN	Kab. Touna	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi disiplin ASN, Jumlah Sanksi Hukuman Disiplin yang dikeluarkan	0 Laporan, 2 Dokumen	Rp25,000,000.00	Evaluasi Disiplin ASN	Kab. Touna	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi disiplin ASN, Jumlah Sanksi Hukuman Disiplin yang dikeluarkan	0 Laporan, 2 Dokumen	Rp26,000,000.00	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				Rp25,000,000.00	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				Rp32,000,000.00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				Rp25,000,000.00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				Rp32,000,000.00	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		**Presentase pelaksanaan diklat**		Rp25,000,000.00	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		**Presentase pelaksanaan diklat**		Rp32,000,000.00	
7	Penyelengaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional,Kepemimpinan,dan Prajabatan	Kab. Touna	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan	3 Peserta	Rp25,000,000.00	Penyelengaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional,Kepemimpinan,dan Prajabatan	Kab. Touna	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan	3 Peserta	Rp32,000,000.00	

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

BURHANUDIN, S.Ag.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650519 198403 1 001

(Rp4,100,036,785.00)

Rp5,700,000,000

BIMTEK Aplikasi Manajemen Kepegawaian

TABEL 4.1
SASARAN DAN PROGRAM/KEGIAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TOJO U

NO	Sasaran Perangkat Daerah	
1	*2*	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PE
1	**Meningkatnya kinerja dan pelayanan perangkat daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**
1		Perencanaan, Penganggaran, dan
1		Penyusunan Dokumen Perencana
2		Koordinasi dan Penyusunan Lapo
2		Administrasi Keuangan Perangka
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan A
3		Administrasi Umum Perangkat Da
1		Penyediaan Komponen Instalasi l
2		Penyediaan Peralatan dan Perlen
3		Penyediaan Bahan Logistik Kanto
4		Penyediaan Barang Cetakan dan
5		Penyelengaraan Rapat Koordinas
4		Penyediaan Jasa Penunjang Urus
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sur
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umu
5		Pemeliharaan Barang Milik Daera
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,B Kendaraan Dinas Jabatan
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mes
3		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedu
2	Meningkatnya pelayanan adinistrasi kepegawaian	
	Meningkatnya Kualitas dan kompetensi aparatur	

6		Pengadaan,Pemberhentian dan I
1		Penyusun Rencana Kebutuhan, Je
2		Koordinasi dan Fasilitasi Pengada
3		Koordinasi Pelaksanaan Administ
4		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
5		Pengelolaan Sistem Informasi Ke
7		Mutasi dan Promosi ASN
1		Pengelolaan Mutasi ASN
2		Pengelolaan Kenaikan Pangkat AS
3		Pengelolaan Promosi ASN
8		Pengembangan Kompetensi ASN
1		Peningkatan Kapasitas Kinerja AS
2		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan
3		Koordinasi dan Kerjasama Pelaks
9		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Ap
1		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian
2		Pengelolaan Penyelesaian Pelang
3		Evaluasi Disiplin ASN
3		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Meningkatnya Kualitas dan kompetensi aparatur	PROGRAM PENGEMBANGAN SUI
9		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengen
1		Penyelengaraan Pengembangan

KEPALA BA
PENGEMBA
KABUPATE

BURHANUI
Pembina U
NIP. 19650

L

TAN DAN SUB KEGIATAN

N SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

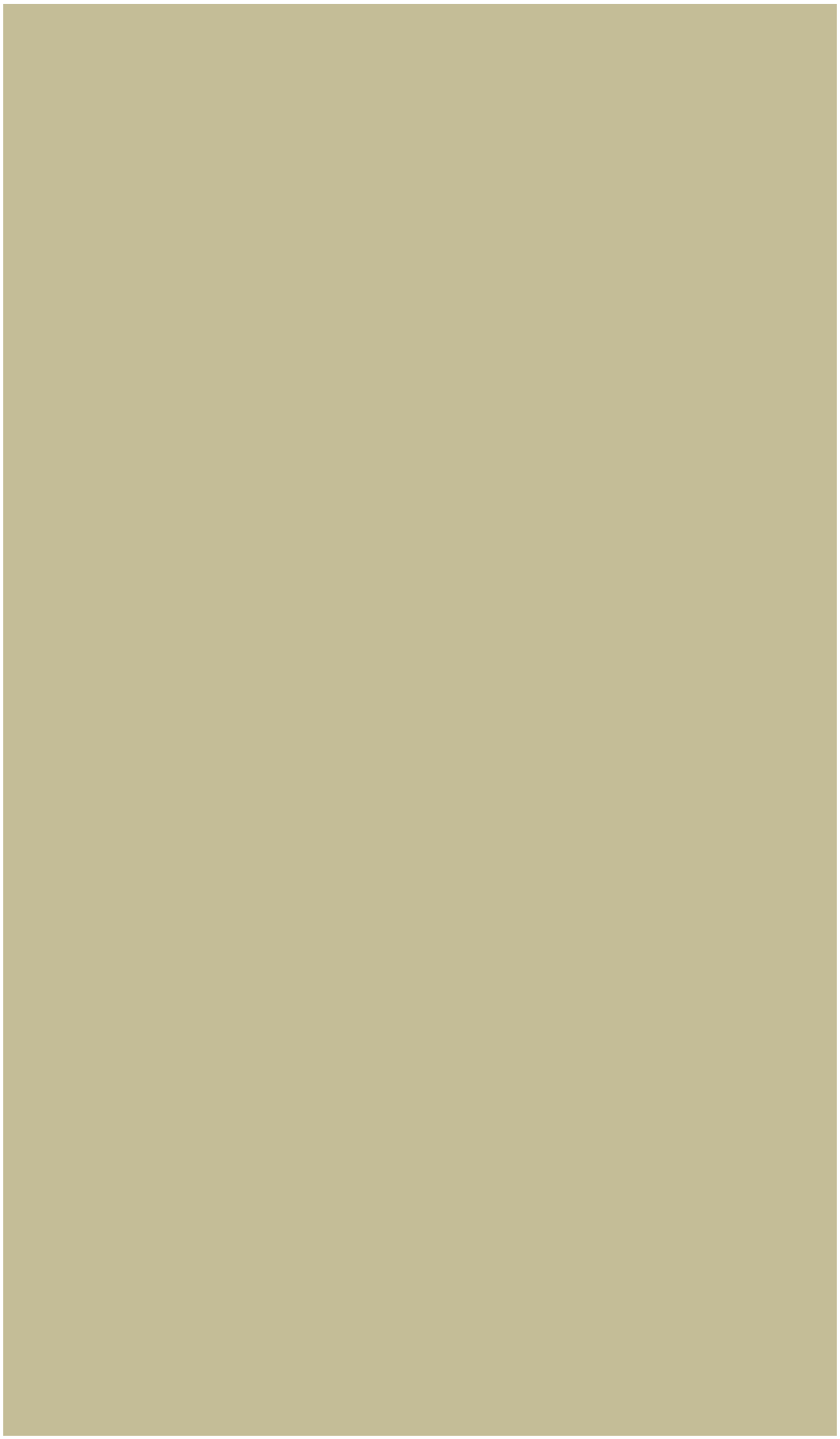
JNA - UNA

Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
3
EMERINTAHAN
N PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
n Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
aan Perangkat Daerah
oran Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
t Daerah
ASN
aerah
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
ngkapan Kantor
or
Penggandaan
si dan Konsultasi SKPD
an Pemerintahan Daerah
mber Daya Air dan Listrik
m Kantor
ah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
iaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
sin Lainnya
ng Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

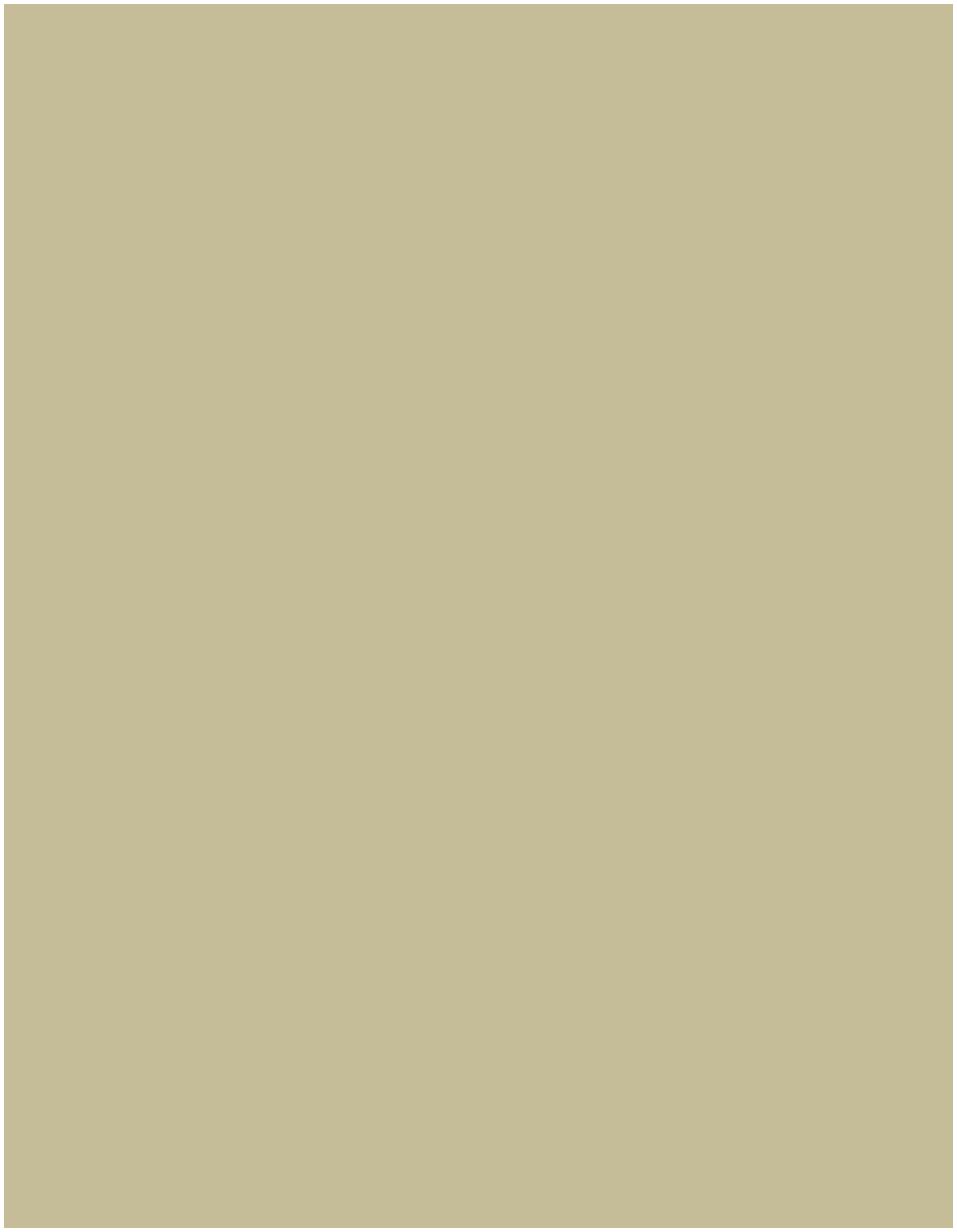
nformasi Kepegawaian ASN
enis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
aan PNS dan PPPK
trasi Pemberhentian
pegawaian
SN
SN
ı ASN
anaan Diklat
aratur
Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
ggaran Disiplin ASN
MBER DAYA MANUSIA
nbangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan

ADAN KEPEGAWAIAN DAN
ANGAN SDM DAERAH
N TOJO UNA-UNA

DIN, S.Ag.,M.Si
Itama Muda
0519 198403 1 001



########



BIMTEK Aplikasi Mana

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH						**5.644.306.901,00**							**5.757.909.056,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.644.306.901,00**							**5.757.909.056,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**5.619.306.901,00**							**5.725.909.056,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**BB Nilai**		**BB Nilai**	**BB Nilai**	**4.501.137.401,00**						**BB Nilai**	**4.551.909.056,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan laporan kinerja dan keuangan*	100 %		100 %	100 %	53.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dokumen DPA dan DPPA	3 Dokumen	65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dokumen DPA dan DPPA	3 Dokumen	40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	18.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dokumen DPA dan DPPA	8 Laporan	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	14 bln		14 bln	14 bln	3.342.693.056,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pengawai Negeri Sipil	41 Orang/bulan	3.368.159.056,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan		41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	3.342.693.056,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pengawai Negeri Sipil	41 Orang/bulan	3.368.159.056,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan administrasi umum perangkat daerah*	12 bln		12 bln	12 bln	291.902.827,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pendukung Kegiatan Kantor	5 Paket	302.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	2.078.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pendukung Kegiatan Kantor	5 Paket	2.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	51.210.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pendukung Kegiatan Kantor	3 Paket	55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	75.125.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pendukung Kegiatan Kantor	7 Paket	76.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.450.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pendukung Kegiatan Kantor	4 Paket	4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	160.039.827,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pendukung Kegiatan Kantor	2 Laporan	165.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	12 bln		12 bln	12 bln	645.508.518,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pendukung Kegiatan Kantor	12 Laporan	647.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	101.251.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pendukung Kegiatan Kantor	12 Laporan	102.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	544.257.518,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pendukung Kegiatan Kantor	12 Laporan	545.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 bln		12 bln	12 bln	167.533.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor, dll	23 Unit	169.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit		23 Unit	23 Unit	100.692.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor, dll	23 Unit	101.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit		41 Unit	41 Unit	49.600.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor, dll	41 Unit	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17.241.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor, dll	1 Unit	18.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)*** ***Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)*** ***Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)***	**58,16 Persen 25,68 Persen 6,01 Persen**		**58,16 Persen 25,68 Persen 6,01 Persen**	**58,16 Persen 25,68 Persen 6,01 Persen**	**1.118.169.500,00**						**58,16 Persen 25,68 Persen 6,01 Persen**	**1.174.000.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah Capaian Persentase Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian*	100 %		100 %	100 %	392.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	PNS dan PPPK	1 Dokumen	409.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	PNS dan PPPK	1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	PNS dan PPPK	1 Dokumen	221.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	90 Dokumen		90 Dokumen	90 Dokumen	27.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	PNS dan PPPK	90 Dokumen	28.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	PNS dan PPPK	1 Lembaga	55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	PNS dan PPPK	1 Dokumen	90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah Capaian Persentase Layanan Mutasi dan Promosi ASN*	100 %		100 %	100 %	455.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pegawai Negeri Sipil	3 Dokumen	482.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pegawai Negeri Sipil	3 Dokumen	31.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pegawai Negeri Sipil	4 Dokumen	101.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	325.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pegawai Negeri Sipil	50 Dokumen	350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah Capaian Persentase Layanan Pengembangan Kompetensi ASN*	100 %		100 %	100 %	222.514.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pegawai Negeri Sipil	100 Orang	231.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang		100 Orang	100 Orang	80.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pegawai Negeri Sipil	100 Orang	85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	127.150.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pegawai Negeri Sipil	2 Orang	130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	15.364.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pegawai Negeri Sipil	3 Dokumen	16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah ASN Yang dinilai dan di Evaluasi Kinerjanya*	4500 ASN		4500 ASN	4500 ASN	48.155.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	PNS dan PPPK	1 Dokumen	52.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.155.500,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	PNS dan PPPK	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	PNS dan PPPK	1 Laporan	6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	PNS dan PPPK	2 Laporan	26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**25.000.000,00**							**32.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang Sudah Mengikuti Diklat PIM Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang Sudah Mengikuti Diklat PIM Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM***	**43,50 Persen 100,00 Persen 72,14 Persen**		**43,50 Persen 100,00 Persen 72,14 Persen**	**43,50 Persen 100,00 Persen 72,14 Persen**	**25.000.000,00**						**43,50 Persen 100,00 Persen 72,14 Persen**	**32.000.000,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase SDM Aparatur yang mempunya Sertifikasi Kompetensi Manajerial dan Teknis*	80 %		80 %	80 %	25.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pejabat JPT, Administrator, Pengawas dan Fungsional	3 Laporan	32.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pejabat JPT, Administrator, Pengawas dan Fungsional	3 Laporan	32.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	J U M L A H							**5.644.306.901,00**							**5.757.909.056,00**	

RENCANA KERJA (RENJA)

INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TAHUN 2024





INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-nya, tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) yang dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024.

Renja ini secara garis besar mengupas tentang Evaluasi pelaksanaan rencana kerja, Analisis kinerja pelayanan kantor, Review rancangan awal RKPD, Isu-isu penting, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Serta Indikator Kinerja dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019 ini disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan selama setahun dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja

Dengan segala keterbatasan dan kesempurnaan penyusunan. Penyusunan Renja dari perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu disini. Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya, oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna sempurnanya Renja ini. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 maupun tahun-tahun berikutnya dalam melaksanakan tugas, maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Atas kerjasama dari semua pihak, khususnya para pejabat struktural maupun fungsional serta staf administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, serta tim penyusun Rencana Kerja Tahun 2024 sehingga terwujud Rencana Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Ampana, 2023

Tim Penyusun

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Inspektorat Daerah sebagai unit kerja Pengawasan yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang Pengawasan pembangunan daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan Inspektorat Daerah yang handal

dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Inspektorat Daerah, maka disusunlah Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah tahun 2024 sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Tahunan sebagai penjabaran dari Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nmegara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-una 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Tojo Una-una Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah tahun 2024 Kabupaten Tojo Una-Una.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Inspektorat Daerah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Inspektorat Daerah dalam turut mendukung suksesnya pencapaian

sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Rancangan Akhir Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD), analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi telaahan terhadap Rencana Kerja Program dan Kegiatan serta pendanaan SKPD Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Inspektorat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Rancangan Akhir Renja Dinas, Komunikasi dan Informatika terkait dengan kewenangan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026. Arah kebijakan dan langkah strategi serta program Organisasi Perangkat Daerah yang disusun secara berjangka memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan dan kebijakan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja Inspektorat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Inspektorat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan

kegiatannya.Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Tojo Una-Una

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (tahun lalu /n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) (2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			Catatan
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5		6	7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)*		11 = (10/4) *	12
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	01				INSPEKTORAT DAERAH														

6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															
6	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**															
6	01	01	2,02	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	88	Org	44	Org	44	Org	44	Org	100%	43	Org	44	%	50%	
6	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**															
6	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	Keg 6 Org	2	Keg 6 Org	2	Keg 6 Org	2	Keg 6 Org	100%	9	Kali	13	Kali	3,25	
6	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	Keg 43 Org	2	Keg 43 Org	2	Keg 43 Org	2	Keg 43 Org	100%	2	Kali	6	Kali	1,5	
6	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**															
6	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20	Bh	10	Bh	10	Bh	10	Bh	100%	12	Bulan	32	Bulan	1,6	

6	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	240	Rim	120	Rim	120	Rim	120	Rim	100%	12	Bulan	252	Bulan	1,05	
6	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Pcs	5	Pcs	5	Pcs	5	Pcs	100%	12	Bulan	22	Bulan	2,2	
6	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan										12	Surat Kabar /Buku	12	Surat Kabar/ Buku		
6	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Kali	15	Kali	15	Kali	15	Kali	100%	24	Keg	54	Keg	1,8	
6	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																
6	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600	Lembar	300	Lembar	300	Lembar	300	Lembar	100%	12	Bulan	612	Bulan	1,02	
6	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	Rekening	3	Rekening	3	Rekening	3	Rekening	100%	12	Bulan	18	Bulan	3	
6	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	PNS/Non PNS	18	PNS/Non PNS	18	PNS/Non PNS	18	PNS/Non PNS	100%	12	Bulan	48	Bulan	1,3	

6	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**															
6	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70	Unit	35	Unit	35	Unit	35	Unit	100%	12	Bulan	82	Bulan	1,2	
6	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	Unit	12	Unit	12	Unit	12	Unit	100%	12	Bulan	36	Bulan	1,5	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**															
6	**01**	**02**	2,01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**															
6	01	02	2,01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10	Keg	5	Keg	5	Keg	5	Keg	100%	41	OPD	51	OPD	5,1	
6	01	02	2,01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100%	41	OPD	53	OPD	4,42	
6	01	02	2,01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	41	OPD	45	OPD	11,25	
6	01	02	2,01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	41	OPD	45	OPD	11,25	
6	01	02	2,01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Kali	2	Kali	2	Kali	2	Kali	100%	41	OPD	45	OPD	11,25	

6	01	02	2,01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan TLHP APIP	8	Kali	4	Kali	4	Kali	4	Kali	100%	29	OPD	37	OPD	4,6	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**																
6	**01**	**03**	2,02		**Pendampingan dan Asistensi**																
6	01	03	2,02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	58	OPD	29	OPD	29	OPD	29	OPD	100%	41	OPD	99	OPD	1,7	
6	01	03	2,02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	16	Area Pencegahan Korupsi	8	Area Pencegahan Korupsi	8	Area Pencegahan Korupsi	8	Area Pencegahan Korupsi	100%	29	OPD	45	OPD	2,8	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Keberhasilan kinerja Inspektorat Daerah dapat dilihat dari pencapaian indicator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase tindak lanjut temuan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
2	Persentase pelanggaran pegawai		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
3	Jumlah temuan BPK		100 %	80 %	80-90 %	80-90 %	80-90 %	90-100 %	90-100 %			

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Inspektorat Daerah, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Inspektorat Daerah sebagai berikut:

1. Inspektorat tidak hanya menjadi pengawas intern tetapi juga sebagai quality assurance bagi SKPD - SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una. Dalam menjalankan fungsi sebagai quality assurance terdapat beberapa kegiatan berupa :
   a. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan DPA SKPD;
   b. Sosialisasi/ konsultatif pengawasan/ pemeriksaan kepada SKPD;
   c. Reviu LKPD secara berkelanjutan;
   d. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko;
   e. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaat barang/jasa (probity audit).
2. Memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian menjadi suatuyang harus diupayakan dalam opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una.
3. Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang langsung memiliki dampak

resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder.

4. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan BPK.
5. Peningkatan Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Tojo Una Una. Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan keuangan maupun dari penilaian yang diberikan oleh Kemenpan selaku pembina pemerintahan kinerja. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan.
6. Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan isu ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yng berkualitas.
7. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan.
8. Indeks Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona integritas untuk menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan upaya peningkatan pelayanan publik

Berdasarkan isu-isu strategis yang telah disebutkan di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas dalam rangka penyusunan program dan kegiatan;

2. Program dan kegiatan disusun berdasarkan ketersediaan dan dukungan dana;
3. Seluruh isu-isu strategis akan dijadikan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan selama lima Tahun.
4. Selanjutnya program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-una dan diharapkan akan selesai sampai dengan Tahun 2026.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

Berdasarkan hasil identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Inspektorat Daerah, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Inspektorat Daerah telah dilakukan reviu dengan melakukan reviu sebagai berikut:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
4. Tabel Reviu RKPD,

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Tojo Una-Una

Inspektorat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**					
	INSPEKTORAT DAERAH					**INSPEKTORAT DAERAH**					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43 Orang	30.625.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43 Orang	30.625.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	800.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	800.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	59.408.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	59.408.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.288.006	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.288.006	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	191.565.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	191.565.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5.000.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.100.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.100.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	193.582.528	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	193.582.528	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	148.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	148.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	16.250.689	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	16.250.689	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**					
	Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu					**Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu**					

	Pemeriksaan khusus	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu	24 Laporan	-	Pemeriksaan khusus	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu	24 Laporan	185.850.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**					
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40 Laporan	801.987.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40 Laporan	801.987.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan	582.300.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan	582.300.000	
	Reviu Laporan Kinerja	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan	626.100.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan	626.100.000	
	Reviu Laporan Keuangan	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12 Laporan	513.025.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12 Laporan	513.025.000	
	Pengawasan Desa	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 Laporan	688.400.000	Pengawasan Desa	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 Laporan	688.400.000	
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6 Kesepakatan	568.060.000	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6 Kesepakatan	568.060.000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	12 Dokumen	124.450.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	12 Dokumen	124.450.000	

	dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		dan TLHP APIP			dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		BPK RI dan TLHP APIP			
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	16 Laporan	72.800.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	16 Laporan	72.800.000	
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**					**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**					
	Pendampingan dan Asistensi					**Pendampingan dan Asistensi**					
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40 Perangkat Daerah	46.550.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40 Perangkat Daerah	46.550.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	88.100.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab.Tojo Una-Una	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	88.100.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Inspektorat Daerah selama tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan pada bagian kesatu klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari atas urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang menjadi urusan kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaiatan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar termasuk didalamnya bidang sosial. Sesuai dengan Tugas Pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yaitu unsur pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang sosial, dalam Misi 3 adalah Membangun keberdayaan rakyat serta penataan wilayah perdesaan secara

merata, mandiri dan berkelanjutan yang berbasis ekonomi, pertanian, pariwisata dan kemaritiman.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2019-2024, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang dikenal dengan tiga (3) dimensi pembangunan yaitu :

1. Dimensi Pembangunan manusia (Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, dan mental / karakter).
2. Dimensi Pembangunan sector unggulan (Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Ketenagakerjaan, Kemaritiman, Pariwisata dan Industri).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan (Antar Kelompok Pendapatan, Antar wilayah).

Selain dimensi di atas, terdapat Sembilan (9) agenda prioritas nasional dalam RPJMN 2019-2024 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokrasi dan tercepat;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system, dan penegakan hokum bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestic;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia.

Inspektorat Daerah di bawah naungan lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung agenda ke-2 prioritas nasional dalam RPJMN 2019-2024, yang diprioritaskan dalam Prioritas dan Sasaran Inspektorat Daerah pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Inspektorat Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut temuan
					Persentase pelanggaran pegawai
				Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah temuan BPK

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Inspektorat Daerah selama lima tahun. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada setiap misi yang dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap kegiatan pada Inspektorat Daerah sebagaimana table berikut :

Tujuan Inspektorat Daerah : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pengendalian lnternal Pemerintah Daerah

Tabel 3.2
Sasaran Inspektorat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023
1	Meningkatnya Nilai Maturitas Pengendalian Intern	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B – A Kriteria
		Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan Kegiatan Tahunan (PKPT)	80-90 %
		Jumlah temuan BPK	20-30 Kasus

3.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah berdasarkan RPJMD Kabubaten Tojo Una Una 2021-2026, sesuai tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Nilai Maturitas Pengendalian Intern	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	B – A Kriteria	Inspektur	Resume Penilaian SAKIP Pemerintah Daerah
		Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan Kegiatan Tahunan (PKPT)	$\frac{\text{Jumlah Pengawasan Tahunan}}{\text{Jumlah Program Pengawasan Kegiatan Tahunan}}$ X 100	80-90 %	Inspektur	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja
		Jumlah temuan BPK	Jumlah Temuan BPK	20-30 Kasus	Inspektur	Resume Penyelesian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK,

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, yang diimplementasikan pada program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di bidang Pengawasan yang merupakan urusan Penunjang Pemerintah Daerah.

Adapun rumusan rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten tojo Una-Una diantaranya didasarkan kepada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dimana, dalam mewujudkan visi Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una Tangguh, Maju dan Sejahtera (TAMARA) dan ke-5 Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui program dan kegiatan yang telah disusun.

Sasaran, Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Sasaran Perangkat Daerah	**Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**
1	2	**3**
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan Kegiatan Tahunan (PKPT)	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
		Reviu Laporan Kinerja
		Reviu Laporan Keuangan
		Kerjasama Pengawasan Internal
		Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemerinksaan APIP
3	Jumlah temuan BPK	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**
		Pendampingan dan Asistensi
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah dan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2023.

Rancangan Akhir Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Inspektorat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Inspektorat Daerah maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran aparatur pada lingkungan Inspektorat Daerah untuk bersama-sama melaksanakan program sesuai dengan tujuan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rancangan Akhir Renja ini. Pencapaian kinerja bukan hal yang mudah, untuk itu diperlukan tekad, usaha, dan perjuangan terus menerus untuk menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah mampu memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una.

Demikian Rancangan RENJA Inspektorat Daerah ini di susun sebagai syarat dalam penetapan belanja tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, olehnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua unsur yang terkait sehingga RENJA ini dapat disusun dengan baik.

Ampana, April 2023

Penyusun

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						**9.768.218.768,00**							**10.321.299.426,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**9.768.218.768,00**							**10.321.299.426,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**9.768.218.768,00**							**10.321.299.426,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**BB Nilai**		**BB Nilai**	**BB Nilai**	**5.656.446.768,00**						**BB Nilai**	**5.967.761.626,00**	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	4.988.827.545,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	43 Orang/bulan	5.200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan		43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	4.988.827.545,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	43 Orang/bulan	5.200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	30.625.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	43 Orang	35.218.750,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43 Orang		43 Orang	43 Orang	30.625.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	43 Orang	35.218.750,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	258.061.006,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Paket	296.769.677,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	800.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Paket	920.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	59.408.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	12 Paket	68.319.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.288.006,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Paket	6.081.207,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	12 Dokumen	1.150.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	191.565.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	12 Laporan	220.299.270,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	214.682.528,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	12 Laporan	246.884.907,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	12 Laporan	5.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	16.100.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	12 Laporan	18.515.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	193.582.528,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	12 Laporan	222.619.907,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	164.250.689,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	35 Unit	188.888.292,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit		35 Unit	35 Unit	148.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	35 Unit	170.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	16.250.689,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	10 Unit	18.688.292,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase OPD yang memenuhi maturitas SPIP***	**3 Level**		**3 Level**	**3 Level**	**3.977.122.000,00**						**3 Level**	**4.198.690.300,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase Hasil Pemeriksaan*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	3.904.322.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	40 Laporan	4.114.970.300,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	801.987.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	40 Laporan	862.285.050,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	582.300.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	40 Laporan	609.645.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	626.100.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	12 Laporan	660.015.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	513.025.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	12 Laporan	529.978.750,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	688.400.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	30 Laporan	731.660.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6 Kesepakatan		6 Kesepakatan	6 Kesepakatan	568.060.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	6 Kesepakatan	593.269.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	124.450.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	12 Dokumen	128.117.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu/Khusus*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	72.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	16 Laporan	83.720.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	72.800.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	16 Laporan	83.720.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Persentase OPD yang tertib administrasi Keuangan***	**100,00 Persen**		**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**134.650.000,00**						**100,00 Persen**	**154.847.500,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase Pendampingan dan Asistensi*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	134.650.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	40 perangkat daerah	154.847.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40 perangkat daerah		40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	46.550.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	40 perangkat daerah	53.532.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	88.100.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	4 Kegiatan	101.315.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H							**9.768.218.768,00**							**10.321.299.426,00**	

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TOJO BARAT

KABUPATEN TOJO UNA UNA
TAHUN 2024



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Tojo Barat Tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tojo Barat adalah dokumen perencanaan Kantor Kecamatan Tojo Barat untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan Kemasyarakatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Atas kerjasama dari semua pihak, khususnya para pejabat struktural maupun fungsional serta staf administrasi Kantor Kecamatan Tojo Barat dan Pemerintah Desa, serta tim penyusun RENJA Tahun 2024 sehingga terwujud laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Tombiano, 06 Maret 2024

Camat Tojo Barat

MUHAMMAD RUSLAN SIPARANTE, S.Pd
Pembina Tkt. I
Nip.19701115 199504 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD). Renja OPD Kecamatan Tojo Barat merupakan dokumen perencanaan OPD Kecamatan Tojo Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una Una yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2021– 2026, pada tahun 2024 memasuki tahun ke dua dalam implementasinya, Proses penyusunan Renja OPD Tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra OPD 2021-2026, dan RKPD Tahun 2023 sebagai pedoman penyusunan Renja OPD 2024.

Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una una.

Renja perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu untuk menjembatani perencanaan tingkat perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis

jangka menengah (RPJMD dan Renstra) untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja disusun oleh masing-masing perangkat daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja perangkat daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang akan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota serta sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi maupun APBN.

Renja OPD Kecamatan Tojo Barat Tahun 2024 merupakan bagian dari RKPD Kota Tojo Una Una dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan tahunan OPD Kecamatan Tojo Barat. Renja OPD disusun untuk memberikan informasi data bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan bagi OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja OPD. Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun mendatang akan makin mendekat pada ke tataran clean government dan good governance.

1.2. Landasan Hukum

Landasan peraturan dan perundang-undangan dalam penyusunan Renja OPD ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Landasan idil Pancasila;
2. Landasan konstitusional Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang sudah diamandemen;
3. Landasan Operasional, terdiri dari :
    1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
    2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794);
26. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Pemutahiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah;
27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ/2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020;
28. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBDPerubahanTahunAnggaran2021.

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 2);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kantor Kecamatan Tojo Barat tahun 2024 Kabupaten Tojo Una-Una adalah :

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan :

1. Untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi Perangkat kerja yang ada pada Lingkungan Kantor Kecamatan Tojo Barat untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban;
2. Sebagai acuan resmi bagi seluruh staf Kecamatan Tojo Barat dalam Menentukan Prioritas Program dan Kegiatan;
3. Sebagai Tolak ukur untuk mengukur dan melakukan Evaluasi Kinerja;
4. Memberikan Gambaran tentang kondisi umum Organisasi dalam kaitannya dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi sekaligus memberikan gambaran Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujutkan Visi dan Misi Bupati Tojo Una una;

1.3.2 Tujuan

Secara umum Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kantor Kecamatan Tojo Barat.

Selanjutnya secara khusus penyusunan Renja Kecamatan Tojo Barat ini juga bertujuan untuk :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan;
2. Menyediakan dokumen acuan resmi bagi seluruh aparatur kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas program dan kegiatan Kecamatan Tojo Barat tahun 2024 yang akan dibiayai oleh APBD II Kabupaten Tojo Una una;

3. Menjabarkan gambaran umum daerah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2024 kedepan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih baik;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu satu tahun.
5. Mewujudkan Dasar yang Kokoh bagi Keterkaitan antara Perencanaan dan Penganggaran;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Tojo Barat tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja OPD Kantor Kecamatan Tojo Barat.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPDKantor Kecamatan Tojo Barat, analisis kinerja pelayanan OPD Kantor Kecamatan Tojo Barat, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPDKantor Kecamatan Tojo Barat, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan kemasyarakatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, dan sasaran Renja OPDKantor Kecamatan Tojo Barat, serta Program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rincian pendanaan yang akan dituangkan dalam Renja Tahun 2024

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TOJO BARAT TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Kantor Kecamatan Tojo Barat tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD Kantor Kecamatan Tojo Barat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD Kantor Kecamatan Tojo Barat, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD Kantor Kecamatan Tojo Barat terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TOJO BARAT TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KANTOR KECAMATAN TOJO BARAT

Evaluasi pelaksanaan renja OPD Kantor Kecamatan Tojo Barat tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD Kantor Kecamatan Tojo Barat dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD Kantor Kecamatan Tojo Barat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TOJO BARAT
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TOJO BARAT DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN TOJO BARAT S/D TAHUN 2023
PROPINSI SULAWESI TENGAN KABUPATEN TOJO UNA UNA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output	Target RENSTRA kabupaten pada tahun 2022 - 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Tahun Lalu Realisasi		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun	
						Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA OPD yang diEvaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA OPD yang di Evaluasi (2022) (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA OPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (%)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
			Rp	K	Rp	Rp	Rp	K	%		Rp	%
4.01.05		Belanja Langsung	2.347.720.000	-	691.697.415	775.909.696	772.551.512	600	548	610.008.510	2.074.257.437	0,884
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	2.046.594.490	- -	592.422.415	624.680.196	621.362.013	100	98	482.154.010	1.695.938.438	5,19
7.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedinya Dok Perencanaan	104.760.000		26.807.375	30.761.250	30.761.250	100	100	9.100.000,00	66.668.625	0,64
7.01.01.2.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dok. Renstra, Renja, RKA, DPA, Lakip,dll	Rp104.760.000		26.807.375	30.761.250	30.761.250	100	100	9.100.000	66.668.625	0,64
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan	67.630.750		17.560.000	27.582.500	27.582.500	100	100	13.782.000	58.924.500	0,87
7.01.01.2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Keuangan	67.630.750		17.560.000	27.582.500	27.582.500	100	100	Rp 13.782.000	58.924.500	0,87
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian	60.000.000			16.705.000	14.049.180	100	84,10	32.105.000	46.154.180	0,77
7.01.01.2.05.0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang melakukan pelatihan	60.000.000			16.705.000	14.049.180	100,00	84,10	Rp 32.105.000	46.154.180	0,77
7.01.01.2.06	Administrasi umum Perangkat Daerah	Tersedinya Administrasi Umum Perangkat	651.200.220		191.361.846	150.587.246	150.581.246	100	100	99.808.500	441.751.592	0,68
7.01.01.2.06.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Administrasi Pelayanan Kantor	100.533.125		26.478.846	25.301.000	25.295.000	100	100	20.525.000	72.298.846	0,72

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TOJO BARAT
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output	Target RENSTRA kabupaten pada tahun 2022 - 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Tahun Lalu Realisasi		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun	
						Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA OPD yang diEvaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA OPD yang di Evaluasi (2022) (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA OPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (%)
7.01.01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kertas yang digandakan	34.190.657		8.388.000	7.006.246	7.006.246	100	100	4.589.500	19.983.746	0,58
7.01.01.2.06.0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang diberikan konsumsi	75.030.000		15.000.000	20.500.000	20.500.000	100	100	10.004.000	45.504.000	0,61
7.01.01.2.06.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi	441.446.438		141.495.000	97.780.000	97.780.000	100	100	64.690.000	303.965.000	0,69
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedinya Aset Kantor	192.106.000		32.816.250	53.125.000	52.470.000	100	98,77	7.560.000	85.286.250	0,44
7.01.01.2.07.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan gedung kantor dan mebeluer yang di adakan	192.106.000		32.816.250	53.125.000	52.470.000	100,00	98,77	7.560.000,00	92.846.250	0,48
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	854.447.520		256.888.944	276.759.200	276.757.837	100	100	294.089.310	533.646.781	0,62
7.01.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang diadakan	20.000.000		3.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	500.000	4.500.000	0,23
7.01.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Sumber Daya yang dibayarkan	170.880.000		36.618.000	30.746.000	30.745.637	100	100	34.080.000	101.443.637	0,59
7.01.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	663.567.520		217.270.944	245.013.200	245.012.200	100	100	259.509.310	721.792.454	1,09

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TOJO BARAT
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output	Target RENSTRA kabupaten pada tahun 2022 - 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Tahun Lalu Realisasi		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun	
						Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA OPD yang diEvaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA OPD yang di Evaluasi (2022) (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA OPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (%)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	116.450.000		66.988.000	69.160.000	69.160.000	100	100	25.709.200	136.148.000	1,169
7.01.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan yang dipelihara	70.000.000		23.000.000	30.000.000	30.000.000	100	100	16.419.200	69.419.200	0,99
7.01.01.2.09.0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	46.450.000		43.988.000	39.160.000	39.160.000	100	100,0	9.290.000,0	83.148.000	1,79
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	15.237.500		2.980.000	3.052.500	3.042.500	100	100	8.500.000	14.522.500	0,95
7.01.02.2.04	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan	15.237.500		2.980.000	3.052.500	3.042.500	100	100	8.500.000	6.022.500	0,95
7.01.02.2.04.0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Tersedianya Administrasi Pelayanan Kantor	15.237.500		2.980.000	3.052.500	3.042.500	100	99,67	8.500.000,00	14.522.500	0,95

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TOJO BARAT
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output	Target RENSTRA kabupaten pada tahun 2022 - 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Tahun Lalu Realisasi		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun	
						Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA OPD yang diEvaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA OPD yang di Evaluasi (2022) (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA OPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (%)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai IDM Kecamatan	60.000.000	-	- 47.120.000	74.090.000	74.059.999	100	50	66.655.500	187.835.499	3,13
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa	60.000.000		47.120.000	74.090.000	74.059.999	100	50,48	66.655.500,00	187.835.499	3,13
7.01.03.2.01.0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang	60.000.000		12.410.000	4.700.000	4.700.000	100	1,00	15.080.500,00	32.190.500	0,54
7.01.03.2.01.0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	228.280.000		34.710.000	69.390.000	69.359.999	100,0	99,96	51.575.000,00	155.644.999	0,68
7.01.06.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi PemberlakuanPembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan		1 keg	25.000.000						25.000.000	
7.01.06.2.01.0	Pencegahan Covid -19 ditingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			25.000.000						25.000.000	

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TOJO BARAT
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output	Target RENSTRA kabupaten pada tahun 2022 - 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Tahun Lalu Realisasi		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun	
						Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA OPD yang diEvaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA OPD yang di Evaluasi (2022) (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA OPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (%)
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yg tertangani	155.966.008	-	- 37.950.000	30.750.000	30.750.000	100	100	34.370.000	103.070.000	0,66
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Koordinasi Ketentaraman dan Ketertiban Umum	155.966.008	0	37.950.000	30.750.000	30.750.000	100	100	34.370.000	103.070.000	0,66
7.01.04.2.01.0	Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal Kecamatan	Tersedianya Jasa Pelayanan Kecamatan	155.966.008		37.950.000	30.750.000	30.750.000	100	100,00	34.370.000,00	103.070.000	0,66
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	30.450.002	-	- 2.100.000	37.847.000	37.847.000	100	100	3.150.000	43.097.000	1,42
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	30.450.002	0	2.100.000	37.847.000	37.847.000	100	100	3.150.000	43.097.000	1,42
7.01.05.2.01.0	Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intrasuku umat beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regiaonal dan Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	30.450.002		2.100.000	37.847.000	37.847.000	100	100,00	3.150.000,00	43.097.000	1,42

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TOJO BARAT
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output	Target RENSTRA kabupaten pada tahun 2022 - 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Tahun Lalu Realisasi		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun	
						Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA OPD yang diEvaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA OPD yang di Evaluasi (2022) (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA OPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (%)
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Satus Desa Maju	39.472.000	-	-	9.125.000	5.490.000	5490000	100	100	15.179.000	29.794.000	0,75
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomentasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan APBDes	39.472.000	0		9.125.000	5.490.000	5.490.000	100	100	15.179.000	29.794.000	0,75
7.01.06.2.01.0	Fasilitasi Penggunaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	Jumlah Desa yang di lakukan Pembinaan	39.472.000			9.125.000	5.490.000	5.490.000	100	100,00	15.179.000,00	29.794.000	0,75

Tombiano, 06 Maret 2024

Camat Tojo Barat

MUHAMMAD RUSLAN SIPARANTE, S.Pd
Pembina Tkt. I
Nip.19701115 199504 1 001

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD Kantor Kecamatan Tojo Barat berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan OPD Kantor Kecamatan Tojo Barat. Keberhasilan kinerja OPD Kantor Kecamatan Tojo Barat dapat dilihat dari pencapaian indicator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan OPD Kantor Kecamatan Tojo Barat dapat dilihat pada table berikut ini :

TABEL T-II.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR CAMAT TOJO BARAT
KABUPATEN TOJO UNA UNA

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
2	Tersedianya Jasa Pelayan Perkantoran		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
3	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah yang disediakan		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
4	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Daerah		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
5	Jumlah kendaraan Dinas yang diadakan		100%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
6	Jumlah Peralatan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan yang diadakan		100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%	
7	Jumlah Peralatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	20,00%	20,00%	
8	Jumlah Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas		100%	20,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
9	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
10	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		100%	0,00%	0,00%	33,00%	33.5%	33.5%	0,00%	0,00%	33,00%	0,00%	33.5%	
11	Jumlah Pakaian yang diadakan		100%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
12	Jumlah Dokumen yang disusun Perencanaan dan Keuangan yang disusun		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	8,.27%	20,00%	20,00%	20,00%	
13	Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	23,46%	20,00%	5,00%	20,00%	
14	Pelaksanan PKK Kecamatan		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
15	Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Paskibraka		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	20,00%	

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TOJO BARAT
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Pelaksanaan Festival Bahari Togean		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
17	Jumlah Desa yang melakukan Pemilihan		100%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
18	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	20,00%	
19	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/ Desa		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
20	Pelaksanaan STQ/MTQ		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	20,00%	
21	Persentas Tertibnya hewan ternak/mirasi		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	20,00%	
22	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Olahraga		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	
23	Terlaksananya Penyelenggaraan Bimtek dan Pembinaan Desa		100%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
24	Pelaksanaan Pembinaan Pemerintahan desa		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	20,00%	
25	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN TOJO BARAT

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Tojo Barat, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Kecamatan Tojo Barat sebagai berikut:

a. Tantangan dari Dalam (Internal)

Hal-hal yang menjadi tantangan dari dalam yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan di Bidang Perencanaan Bangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penguasaaan Ilmu Pemerintahan
2. Terbatasnya literature tentang Manajemen Pemerintahan dan Perundang-undangan yang menjadi referensi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan.
3. Belum tertatanya managemen Pemerintahan dan Penganggaran berbasis kinerja.

b. Tantangan dari Luar (Eksternal)

Hal-hal yang menjadi tantangan dari luar yaitu :

1. Belum maksimalnya koordinasi antara OPD Kabupaten dengan Pihak Kecamatan tentang Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Kurangnya pemahaman dari Aparatur dalam penetapan prioritas dan perhitungan anggaran yang berbasis kinerja pada pembangunan yang partisipatif dan transparan.
3. Belum optimalnya Sistem Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Tojo Barat, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Kantor Kecamatan Tojo Barat berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

TABEL 2.4

REVIEU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

Kabupaten Tojo Una Una

Perangkat Daerah : Kecamatan Tojo Barat

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Prog/Keg/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.641.623.005)		Prog/Keg/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana (Rp.641.623.005)		Catatan Penting
1	*3*	*6*	*7*	*8*	*13*		*3*	*6*	*7*	*8*	*13*		*13*
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
	1 Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat	Tersedianya Dokumen Perencanaan	5 Dok.	Rp	10.000.000	1 Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat	Tersedianya Dokumen Perencanaan	5 Dok.	Rp	10.000.000	
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Gaji,Tunjangan bagi ASN dan Dok Keuangan	1 Tahun	Rp	14.000.000	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Gaji,Tunjangan bagi ASN dan Dok Keuangan	1 Tahun	Rp	14.000.000	
	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn		Tersedianya Gaji,Tunjangan bagi ASN dan Dok Keuangan	1 Tahun	Rp	2.043.981.341	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Gaji,Tunjangan bagi ASN dan Dok Keuangan	1 Tahun	Rp	2.043.981.341	
	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Palu	Tersedinya ASN yang siap Pakai	1 Orang	Rp	10.000.000	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Palu	Tersedinya ASN yang siap Pakai	1 Orang	Rp	10.000.000	
	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Lancarnya Keg. Administrasi Perkantoran	1 Tahun	Rp	84.651.999	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Lancarnya Keg. Administrasi Perkantoran	1 Tahun	Rp	84.651.999	
	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kantor Camat	Terpenuhinya Perlengkapan gedung kantor	6 unit	Rp	10.000.000	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kantor Camat	Terpenuhinya Perlengkapan gedung kantor	6 unit	Rp	10.000.000	
	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Lancarnya kegiatan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	Rp	293.889.310	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Lancarnya kegiatan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	Rp	293.889.310	
	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 Tahun	Rp	25.709.200	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 Tahun	Rp	25.709.200	

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TOJO BARAT
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog/Keg/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.641.623.005)	Prog/Keg/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana (Rp.641.623.005)	
II	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik					Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik					
	1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang limpahkan kepada Camat	Kantor Camat	Lancarnya kegiatan Administrasi Perkantoran	12 bulan	Rp 8.500.000	1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang limpahkan kepada Camat	Kantor Camat	Lancarnya kegiatan Administrasi Perkantoran	12 bulan	Rp 8.500.000	
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
	1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Aula Kantor Camat	Dilaksanakannya Kegiatan di Desa	13 Desa	Rp 66.655.500	1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Aula Kantor Camat	Dilaksanakannya Kegiatan di Desa	13 Desa	Rp 66.655.500	
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tojo Barat	Terlaksananya kegiatan	12 bulan	Rp 34.370.000	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tojo Barat	Terlaksananya kegiatan	12 bulan	Rp 34.370.000	
V	Program Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum					Program Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum					
	1 Penyelenggraan Urusan Pemerintaahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	Kec. Tojo Barat	Terlaksananya kegiatan	3 keg.	Rp 3.150.000	1 Penyelenggraan Urusan Pemerintaahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	Kec. Tojo Barat	Terlaksananya kegiatan	3 keg.	Rp 3.150.000	
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
	1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Wilayah Kecamatan Tojo Barat	Terlaksananya Kegiatan APBDes	13 desa	Rp 15.179.000	1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Wilayah Kecamatan Tojo Barat	Terlaksananya Kegiatan APBDes	13 desa	Rp 15.179.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dean harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kecamatan Tojo Barat.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel. T-II.1.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024
Kabupaten Tojo Una-una

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Berdasarkan review/penalaahan hasil usulan program dan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan Tojo Barat ada usulan yang ditujukan ke Kecamatan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TOJO BARAT

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Tojo Barat selama tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2024 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan packa konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selaian prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

a. Program pro rakyat;

b. Program keadilan untuk semua; dan

c. Program pencapaian tujuan pembangunan millinium (MDG's)

Selain itu, pemerintah pusat juga baru saja menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendekatan *not business as usual*, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertunbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasarat serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi kaberhasilan pelaksanaan MP3EI.Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang *multiplier effect*-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TOJO BARAT

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menentukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Kecamatan Tojo Barat selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2024 dan prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan Kantor Camat Tojo Barat

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024
	Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan	90 %

Tabel 3.3
Sasaran Kantor Camat Tojo Barat

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di Wilayah	Angka Kriminilitas	0.0008 Kasus

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam tahun anggaran 2024, Kantor Camat Tojo Barat telah menetapkan 1 (Satu) tujuan yang akan dicapai. Sasaran tersebut terdapat 6 (enam program dan 12 kegiatan. Untuk kejelasan pencapaian implementasi rencana program dan kegiatan tersebut maka perlu dilengkapi dengan indicator kinerja kelompok sasarn serta pendanaan indikatif. Uraian ini dituangkan dalam tabel 4.1 berikut ini :

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Tojo Barat, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan Tojo Barat maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD.

Tombiano, 06 Maret 2023

Camat Tojo Barat

MUHAMMAD RUSLAN SIPARANTE, S.Pd
Pembina Tkt.I
Nip.19701115 199504 1 001

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN TOJO BARAT KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN TOJO BARAT						**2.771.704.346,00**							**3.091.070.651,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.771.704.346,00**							**3.091.070.651,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.586.753.846,00**							**2.885.070.651,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**CC Nilai**		**CC Nilai**	**CC Nilai**	**2.586.753.846,00**						**CC Nilai**	**2.885.070.651,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedinya Dokumen Perencanaan*	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	22.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	5 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	22.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	5 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi keuangan*	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	2.063.981.341,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	23 Orang/bulan	2.268.981.341,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan		23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.043.981.341,00	- Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	23 Orang/bulan	2.243.981.341,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	10 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian*	2 Orang		2 Orang	2 Orang	60.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	1 Orang	65.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	60.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	1 Orang	65.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %		100 %	100 %	102.593.195,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	10 Paket	139.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	20.525.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	10 Paket	25.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.068.195,00	- Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Paket	7.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	17.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330 Laporan		330 Laporan	330 Laporan	62.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	330 Laporan	90.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedinya Aset Kantor*	3 Unit		3 Unit	3 Unit	10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	1 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	1 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan*	100 %		100 %	100 %	293.889.310,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	12 Laporan	328.089.310,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	12 Laporan	700.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	34.080.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	12 Laporan	38.080.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	259.309.310,00	- Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	12 Laporan	289.309.310,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*	18 Unit		18 Unit	18 Unit	34.290.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	7 Unit	44.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	25.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	7 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit		17 Unit	17 Unit	9.290.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	17 Unit	14.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01	**KECAMATAN**						**184.950.500,00**							**206.000.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)***	**78,00 Persen**		**78,00 Persen**	**78,00 Persen**	**8.500.000,00**						**78,00 Persen**	**12.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Terlaksananya Urusan Pemerintahan*	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	8.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	3 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	8.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	3 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai IDM Kecamatan***	**0,6924 Poin**		**0,6924 Poin**	**0,6924 Poin**	**110.080.500,00**						**0,6924 Poin**	**114.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa*	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	110.080.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	9 Lembaga Kemasyarakatan	114.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	15.080.500,00	- Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	9 Lembaga Kemasyarakatan	17.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	95.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	4 Laporan	97.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani***	**100,00 Persen**		**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**34.370.000,00**						**100,00 Persen**	**40.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya Koordinasi Ketentaraman dan Ketertiban Umum*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	34.370.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	34.370.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**100,00 Persen**		**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**12.000.000,00**						**100,00 Persen**	**15.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum*	3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	12.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	100 Orang	15.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang		100 Orang	100 Orang	12.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	100 Orang	15.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Status Desa Tertinggal*** ***Status Desa Sangat Tertinggal*** ***Status Desa Maju*** ***Status Desa Berkembang***	**0 Desa** **0 Desa** **5 Desa** **8 Desa**		**0 Desa** **0 Desa** **5 Desa** **8 Desa**	**0 Desa** **0 Desa** **5 Desa** **8 Desa**	**20.000.000,00**						**0 Desa** **0 Desa** **5 Desa** **8 Desa**	**25.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan APBDes*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	4 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	4 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
	J U M L A H							**2.771.704.346,00**							**3.091.070.651,00**	

RENCANA KERJA

KECAMATAN TOJO
KABUPATEN TOJO UNA-UNA





TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Tojo Tahun 2024 telah berhasil disusun. Renja Kecamatan Tojo Tahun 2024 ini disusun sebagai pelaksanaan amanat undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Tojo Tahun 2024 akan memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Tojo di dalam upaya memenuhi visi misinya yang dijabarkan tiap tahunnya dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sejalan dengan hal tersebut proses penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tojo Tahun 2024 ini tidak terlepas atas kerja sama dari semua pihak, khususnya para pejabat struktural maupun staf Subag Keuangan dan Aset serta Subag Perencanaan dan Program Kantor Camat Tojo sehingga Tim penyusun Rencana Kerja Kecamatan Tojo Tahun 2024 dapat terwujud dan atasnya kami ucapkan terima kasih.

Uekuli, 31 Mei 2023

CAMAT TOJO

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN TOJO TOJO UNA-UNA

SUDARTO PALAKANA, SE
NIP. 19770522 200701 1 017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI **iii**

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistimatika Penulisan 4

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TOJO TAHUN LALU **5**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Tojo Tahun 2021 dan 2026 Serta Capaian Renstra SKPD ...……..... 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD …….... 7

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan SKPD ...……..... 9

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ....…….…..... 10

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **11**

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional……..... 11

B. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Camat Tojo ……..... 11

C. Program dan Kegiatan ...……..... 12

IV. PENUTUP **13**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tojo Tahun 2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Kantor Camat Tojo sebagai unit kerja Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan dukungan aparatur serta dukungan operasional dalam mendukung pelaksanaan Kegiatan kemasyarakatan khusunya pada Kegiatan Penertiban Ternak, Miras/ Obat-Obat Terlarang yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan

Dalam rangka Mendukung Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang baik **(*GOOD GOVERNANCE*)** dalam Penyelenggaraan Negara, Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diselenggarakan secara Profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk mewujudkan prinsip-prinsip ***GOOD GOVERNANCE*** yang mencakup Transparansi, Akuntabilitas Publik, dan Partisipasi, maka Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki Landasan Hukum yang semakin Kokoh, maka disusunlah Renja Kantor Camat Tojo tahun 2024 sebagai dokumen pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2023 Kantor Camat Tojo sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten TojoUna-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerinah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKDP) Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Noor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-UnaTahun 2016

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kantor Camat Tojo tahun 2024 Kabupaten Tojo Una - Una.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kantor Camat Tojountuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

Alternatif lain pernyataan maksud:

Memberikan pedoman kerja tahun 2024 bagi Kantor Camat Tojo, sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kantor Camat Tojo dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Khususnya Kecamatan Tojoyang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

Alternatif lain pernyataan tujuan:

1) Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kantor Camat Tojo;

2) Terwujudnya keselarasan Rencana Strategis Kantor Camat Tojo dengan perencanaan tahunan; dan
3) Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD);
4) Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kantor Camat Tojo Kabupaten Tojo Una – Una tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD), analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR CAMAT TOJO TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN KANTOR CAMAT TOJO TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan disesuaikan dengan kondisi perangkat daerah masing-masing dengan tabel format sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jkkklkl

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indicator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tojo
Kabupaten Tojo Una-Una

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-10	Tahun 2024 (thn-n)	Tahun 2024+2025 (thn n+1)	Tahun 2025 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn-n)	Tahun 2024+2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Kantor Camat Tojo, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Kantor Camat Tojo sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program Nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kantor Camat Tojo, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Kantor Camat Tojo berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

tabel

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

Tabel sebagai berikut:

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kantor Camat Tojo selama tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2024 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan packa konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Tabel 3.1

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KANTOR CAMAT TOJO

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menujukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah darah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Kantor Camat Tojo selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Kantor Camat Tojo pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2024 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

tabel

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Tojotahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Tojo dan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Tojo.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kantor Camat Tojo, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kantor Camat Tojo maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Kantor Camat Tojo tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2016-2021 yaitu: ***"Mewujudkan Masyarakat Tojo Una-Una Yang Hebat Dibidang Pertanian, Pariwisata Dan Kemaritiman di Tahun 2021"*.**

Uekuli, 06 April 2023

CAMAT TOJO

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KECAMATAN TOJO

SUDARTO PALAKANA, SE
NIP. 19770522 200701 1 017

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Camat Tojo
Pencapaian Renstra Kantor Camat Tojo s/d Tahun 2024
Kabupaten Tojo Una-Una

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) /Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renja sampai dengan tahun berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
	KECAMATAN TOJO									
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7:01	**KECAMATAN**									
7:01:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**B Nilai**		**CC Nilai**					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terpenuhinya administrasinya keuangan								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang	***64*** orang	32 orang	32 orang	1	32 orang	128 orang	4
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terpenuhinya administrasi kepegawaian								
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	**1 orang**	***3*** orang	1 orang	1 orang	1	1 orang	5 orang	5
7.01.01.2.06	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	***21*** paket	6 paket	6 paket	1	6 paket	33 paket	6
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan	***24*** bulan	12 bulan	12 bulan	1	12 bulan	48 paket	4
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) /Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renja sampai dengan tahun berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178 kali	***356*** kali	178 kali	178 kali	1	178 kali	712 kali	4
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 rekening	***4*** rekening	2 rekening	2 rekening	1	2 rekening	8 rekening	4
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 orang	***34*** orang	17 orang	17 orang	1	17 orang	68 orang	4
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah								
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	***20*** unit	10 unit	10 unit	1	10 unit	40 unit	4
7:01	**KECAMATAN**									
7:01:02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)**	**82,00 Persen**							
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	terlaksananya urusan pemerintahan								
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 bulan	*24* bulan	12 bulan	12 bulan	1	12 bulan	48 bulan	4
7:01:03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai IDM Kecamatan**	**0,6969 kegiatan**							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) /Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renja sampai dengan tahun berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11=(10/4)
7.01.03.2.01	Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	terlaksananya koordinasi pemberdayaan desa terselenggaranya urusan pemerintahan umum								
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 desa	***32*** desa	16 desa	16 desa	1	16 desa	64 desa	4
7:01:04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangan**	**100,00 Persen**							
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	terlaksananya koodinasi ketentraman dan ketertiban umum								
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 kegiatan	*2* kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1	1 kegiatan	4 kegiatan	4

RENCANA KERJA

KECAMATAN TOJO
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Satuan Ker Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Tojo Tahun 2024 telah berhasil disusun. Renja Kecamat Tojo Tahun 2024 ini disusun sebagai pelaksanaan amanat undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tenta Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 20 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tah 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Tojo Tahun 2024 akan memberikan arah dan fokus bagi pelaksana program dan kegiatan Kantor Camat Tojo di dalam upaya memenuhi visi misinya yang dijabarkan ti tahunnya dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sejalan dengan hal tersebut proses penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daer Kecamatan Tojo Tahun 2024 ini tidak terlepas atas kerja sama dari semua pihak, khususnya para pejab struktural maupun staf Subag Keuangan dan Aset serta Subag Perencanaan dan Program Kantor Cam Tojo sehingga Tim penyusun Rencana Kerja Kecamatan Tojo Tahun 2024 dapat terwujud dan atasn kami ucapkan terima kasih.

Uekuli, 31 Mei 2023

CAMAT TOJO

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN TOJO TOJO UNA-UNA

SUDARTO PALAKANA, SE

NIP. 19770522 200701 1 017

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Satu Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Tojo Tahun 2024 telah berhasil disusun. Ren Kecamatan Tojo Tahun 2024 ini disusun sebagai pelaksanaan amanat undang undang Nomor 25 Tah 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangun Daerah Tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Tojo Tahun 2024 akan memberikan arah dan fokus ba pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Tojo di dalam upaya memenuhi visi misinya ya dijabarkan tiap tahunnya dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sejalan dengan hal tersebut proses penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangk Daerah Kecamatan Tojo Tahun 2024 ini tidak terlepas atas kerja sama dari semua pihak, khususnya pa pejabat struktural maupun staf Subag Keuangan dan Aset serta Subag Perencanaan dan Program Kant Camat Tojo sehingga Tim penyusun Rencana Kerja Kecamatan Tojo Tahun 2024 dapat terwujud d atasnya kami ucapkan terima kasih.

rja
an
ng
13
un

an
ap

ah
at
at
ya

ıan
ŋja
.un
23
ıan

ıgi
.ng

kat
ara
tor
lan

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Tojo
Kabupaten Tojo Una-Una

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022(thn n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2024+2023 (tahun n+1)	Tahun 2022(tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	**Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran**											
2	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat-rapat		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
3	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat-rapat		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
4	Waktu penyediaan jasa administrasi		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
5	Waktu penyediaan jasa pelayan perkantoran		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
6	**Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran**											
7	Jumlah perlengkapan Kantor yang diadakan		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
8	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
9	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
10	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasinal yang dipelihara		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
11	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
12	**Keikut sertaan aparatur dalam mengikuti pelatihan**											
13	Pendidikan dan pelatihan formal		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
14	Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diikuti		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
15	**Meningkatkan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan**											
16	Jumlah Petugas yang melakukan Pembinaan Kamtibmas, Teritorial dan Sosial Kemasyarakatan		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
17	Jumlah Desa yang akan dinilai pada kegiatan lomba desa		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
18	Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan dan Monitoring PKK		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022(thn n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2024+2023 (tahun n+1)	Tahun 2022(tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
19	Jumlah Personil yan melakukan Kegiatan Paskibraka Kecamatan		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
20	Jumlah Pegawai yang melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
21	Jumlah Desa yang mengusulkan pembangunan pada kegiatan Musrembang Tingkat Desa/Kecamatan		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
22	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan STQ dan MTQ		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
23	Jumlah Desa yang di bina dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
24	Jumlah Desa yang di Monitoring Evaluasi Pengawasan Pembangunan Lintas SKPD di Wilayah Kecamatan		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
25	Jumlah Desa yang di bina dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
26	Kegiatan pembinaan olah raga		100,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Kabupaten Tojo Una-Una

Nama OPD : Kantor Camat Tojo

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN TOJO 1 PROGRAM PENUNJANG . URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 507,699,180	KECAMATAN TOJO 1 PROGRAM PENUNJANG . URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Rp 507,699,180	
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tojo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 orang	Rp 20,230,000	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tojo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 orang	Rp 20,230,000	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tojo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp 73,284,000	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tojo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp 73,284,000	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Tojo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 paket laporan	Rp 18,000,000	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Tojo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 paket laporan	Rp 18,000,000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tojo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp 106,494,499	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tojo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp 106,494,499	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tojo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 21,319,000	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tojo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 21,319,000	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tojo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 216,371,681	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tojo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 216,371,681	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tojo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	Rp 52,000,000	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tojo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	Rp 52,000,000	
	2 PROGRAM . PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)		Rp 143,000,000	2 PROGRAM . PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)		Rp 143,000,000	
	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tojo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	Rp 143,000,000	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Kec. Tojo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	Rp 143,000,000	
	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN . MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Nilai IDM Kecamatan		Rp 34,934,500	3 PROGRAM . PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN		Nilai IDM Kecamatan		Rp 34,934,500	
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tojo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Rp 34,934,500	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tojo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Rp 34,934,500	
	4 PROGRAM KOORDINASI . KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangan		Rp 42,600,000	4 PROGRAM KOORDINASI . KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangan		Rp 42,600,000	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- Pembinaan Kamtibmas, Teritorial dan Sosial Kemasyarakatan	Kec. Tojo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp 42,600,000	- Pembinaan Kamtibmas, Teritorial dan Sosial Kemasyarakatan	Kec. Tojo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp 42,600,000	
JUMLAH					Rp 728,233,680	JUMLAH				Rp 728,233,680	

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Tojo Una-Una

Nama OPD : Kantor Camat Tojo

	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KECAMATAN TOJO				
	1 PROGRAM PENUNJANG . URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp 507,699,180	
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tojo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 20,230,000	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tojo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 73,284,000	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Tojo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 18,000,000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tojo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 106,494,499	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tojo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 21,319,000	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tojo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 216,371,681	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tojo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 52,000,000	
	2 PROGRAM . PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Rp 143,000,000	
	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tojo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp 143,000,000	
	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN . MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Nilai IDM Kecamatan	Rp 34,934,500	
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tojo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 34,934,500	
	4 PROGRAM KOORDINASI . KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangan	Rp 42,600,000	

NO	RENCANA AWAL RKPD				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Pembinaan Kamtibmas, Teritorial dan Sosial Kemasyarakatan	Kec. Tojo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 42,600,000	
JUMLAH				Rp 728,233,680	

Tabel. III.1.

Prioritas dan Sasaran Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una

NO	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDI SASA PERAN DAE
	Meningkatknya Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang berkompeten dan memiliki potensi kerja dalam melakukan pelayanan prima serta memperkuat kelembagaan	Terwujudnya Sumber Daya aparatur yang berkualitas dan berkompeten dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Terselenggaranya urusan pemerintah di lingkungan SKPD Kec. Tojo	99.07%
	Terciptanya Sarana dan Prasarana aparatur yang digunakan aparatur selalu baik dan siap pakai	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana aparatur yang digunakan untuk pelayanan pada masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur untuk kelancaran pelayanan.	99.71%
	Terlaksannya Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Daerah.	Terpenuhinya SDM Aparatur yang berkualitas dan handal dalam pelayanan publik	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 Orang
	Terlaksananya kegiatan peningkatan penelenggaraan Pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan.	Terpenuhinya Kegiatan Pemerintahan Di Desa dan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan peningkatan penelenggaraan Pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan.	100%

KATOR ARAN NGKAT RAH
99.07%
99.71%
2 Orang
100%

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tojo
Kabupaten Tojo Una-Una

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
	Meningkatknya Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang berkompeten dan memiliki potensi kerja dalam melakukan pelayanan prima serta memperkuat kelembagaan	Terwujudnya Sumber Daya aparatur yang berkualitas dan berkompeten dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Terselenggaranya urusan pemerintah di lingkungan SKPD Kec. Tojo
	Terciptanya Sarana dan Prasarana aparatur yang digunakan aparatur selalu baik dan siap pakai	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana aparatur yang digunakan untuk pelayanan pada masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur untuk kelancaran pelayanan.
	Terlaksannya Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Daerah.	Terpenuhinya SDM Aparatur yang berkualitas dan handal dalam pelayanan publik	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Terlaksananya kegiatan peningkatan penelenggaraan Pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan.	Terpenuhinya Kegiatan Pemerintahan Di Desa dan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan peningkatan penelenggaraan Pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan.

Tabel 3.2

Sasaran dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Kantor Camat Tojo

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Meningkatknya Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang berkompeten dan memiliki potensi kerja dalam melakukan pelayanan prima serta memperkuat kelembagaan	Terwujudnya Sumber Daya aparatur yang berkualitas dan berkompeten dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
	Terciptanya Sarana dan Prasarana aparatur yang digunakan aparatur selalu baik dan siap pakai	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana aparatur yang digunakan untuk pelayanan pada masyarakat
	Terlaksannya Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Daerah.	Terpenuhinya SDM Aparatur yang berkualitas dan handal dalam pelayanan publik
	Terlaksananya kegiatan peningkatan penelenggaraan Pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan.	Terpenuhinya Kegiatan Pemerintahan Di Desa dan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN ULUBONGKA KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN ULUBONGKA						**2.610.947.154,00**							**2.652.648.721,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.610.947.154,00**							**2.652.648.721,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.451.290.688,00**							**2.486.648.721,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**CC Nilai**		**CC Nilai**	**CC Nilai**	**2.451.290.688,00**						**CC Nilai**	**2.486.648.721,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentasi ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	1.908.448.721,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	23 Orang/bulan	1.908.448.721,00	KECAMATAN ULUBONGKA
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan		23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	1.908.448.721,00	- Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	23 Orang/bulan	1.908.448.721,00	KECAMATAN ULUBONGKA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penyediaan bahan Logistik*	12 bulan		12 bulan	12 bulan	136.046.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	6 Paket	140.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	59.476.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	6 Paket	60.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	76.570.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	120 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya Kendaraan Dinas Kantor Terpenuhinya perlengkapan perlatan kantor*	1 unit 4 Jenis		1 unit 4 Jenis	1 unit 4 Jenis	70.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	1 Unit	85.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	1 Unit	40.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	1 Unit	45.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan administrasi kantor*	12 bulan		12 bulan	12 bulan	256.795.967,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	4 Laporan	263.200.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	13.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	4 Laporan	13.200.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	243.795.967,00	- Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	12 Laporan	250.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya aset milik daerah*	30 unit		30 unit	30 unit	80.000.000,00			-	-	Kantor Camat Ulubongka	-	90.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			-	-		-	-	40.000.000,00	-	-	-	-	Kantor Camat Ulubongka	-	45.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit		29 Unit	29 Unit	40.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Kantor Camat Ulubongka	29 Unit	45.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
	7.01	**KECAMATAN**						**159.656.466,00**							**166.000.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)***	**78,00 Persen**		**78,00 Persen**	**78,00 Persen**	**25.000.000,00**						**78,00 Persen**	**28.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Menigkatkan pelayanan Desa*	18 Desa		18 Desa	18 Desa	25.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Desa Desa Diwilayah Kecamatan	18 Dokumen	28.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Desa Desa Diwilayah Kecamatan	18 Dokumen	28.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai IDM Kecamatan***	**0,5868 Poin**		**0,5868 Poin**	**0,5868 Poin**	**40.000.000,00**						**0,5868 Poin**	**42.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Meningkatkan Partisipasi masyarakat Desa dalam Musyawarah Pembangunan*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	40.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Desa Desa Diwilayah Kecamatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	42.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18 Lembaga Kemasyarakatan		18 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penunjang Program Prioritas	Desa Desa Diwilayah Kecamatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	42.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani***	**100,00 Persen**		**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**14.656.466,00**						**100,00 Persen**	**15.000.000,00**	
	7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Menciptakan Kamtibmas Diwilayah Kecamatan*	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	14.656.466,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	4 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
	7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	14.656.466,00	- Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	4 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**100,00 Persen**		**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**80.000.000,00**						**100,00 Persen**	**81.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya kegiatan keagamaan dan olaraga*	5 kegiatan		5 kegiatan	5 kegiatan	80.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	50 Orang	81.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang		50 Orang	50 Orang	80.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	50 Orang	81.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
	J U M L A H							**2.610.947.154,00**							**2.652.648.721,00**	

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Ampana Kota dapat Terselesaikan.

Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan Program Kerja yang lebih maksimal Tahun 2024 pada Kecamatan Ampana Kota yang Pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 202 4

Sangat disadari, bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna namun diharapkan tetap dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut di atas.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa Meridhoi semua karya kita sebagai Wujud Pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Ampana, Februari 2023

Camat Ampana Kota

MOHAMAD AWALI, S.Sos, M.Si
Pembina IV.a
NIP. 19781009 201641 1 013

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Kecamatan Ampana Kota sebagai unit kerja Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan diperlukan kerjasamanya untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan dukungan aparatur serta dukungan operasional dalam mendukung pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pada kegiatan kemasyarakatan Kecamatan Ampana Kota Memprioritaskan kegiatan Penertiban Ternak, Miras/ Obat-Obat Terlarang, serta Pekerja Seks Komersial (PSK), pembinaan keagamaan, dan pembinaan seni budaya yang dimana untuk meningkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam rangka Mewujudkan ***Kabupaten Tojo Una – Una Tangguh, Maju, Dan Sejahtera (Tamara)*** Maka Kecamatan Ampana Kota menyelenggarakan pengawasan terhadap Proses Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan pada Program / Kegiatan di Lingkup Kerja Kecamatan Ampana Kota. Serta Mengelola Keberhasilan Organisasi secara sistematik dan mengembangkan pemikiran, sikap serta tindakan yang berorientasi pada kinerja, dan Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin berkualitas untuk mewujudkan prinsip-prinsip ***Kabupaten Tojo Una – Una Tangguh, Maju, Dan Sejahtera (Tamara)*** maka disusunlah Renja Kecamatan Ampana Kota tahun 2024 sebagai dokumen pedoman kerja tahunan Kecamatan Ampana Kota sebagai penjabaran dari Renstra OPD yang telah ditetapkan .

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja Tahun 2024 Kecamatan Ampana Kota sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019, (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 11);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Kabupaten Tojo Una-Una tentang RPJP Daerah Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025
11. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Ampana Kota tahun 2024 Kabupaten Tojo Una - Una.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Ampana Kota untuk secara berkesinambungan dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

Alternatif lain pernyataan maksud:

Memberikan pedoman kerja tahun 2024 bagi Kecamatan Ampana Kota, sesuai dengan Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Ampana Kota dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Khusnya Kecamatan Ampana Kota yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

Alternatif lain pernyataan tujuan:

1) Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Ampana Kota;
2) Terwujudnya keselarasan Rencana Strategis Kecamatan Ampana Kota dengan perencanaan tahunan; dan
3) Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan OPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD);
4) Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian RENSTRA SKPD), analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN AMPANA KOTA TAHUN LALU

Review hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan RENSTRA SKPD , serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN AMPANA KOTA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja RENSTRA SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL. T-II.1.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KANTOR CAMAT AMPANA KOTA

CAPAIAN RENSTRA KANTOR CAMAT AMPANA KOTA S/D TAHUN 2023

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

matan Ampana Kota

Urusan/Bidang Urusan merintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2) Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2023 (tahun berjalan/n-1) realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	Catatan
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*100*	*11=(10/4)**	*12*
R KEWILAYAHAN										
MATAN AMPANA KOTA										
RAM PENUNJANG AN PEMERINTAHAN AH KABUPATEN/KOTA	***Presentase Terselenggaranya Proses Pelayanan Administrasi Yang cepat dan tepat***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
istrasi Keuangan perangkat	***Presentase Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN***	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	
iaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang	64 Orang	68 Orang	68 Orang	100%	64 Orang	100%	100%	
istrasi Umum Perangkat	***Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***100%***	***95%***	***95%***	***95%***	***100%***	***100%***	***100%***	
iaan Peralatan dan kapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	8 Paket	95%	5 Paket	9 Paket	9 Paket	
iaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	6 Paket	18 Paket	6 Paket	50%	18 Paket	6 Paket	6 Paket	
iaan Barang Cetakan Dan aan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	25 Paket	60 Paket	25 Paket	80 %	60 Paket	25 Paket	25 Paket	
egaraan Rapat Koordinasi dan tasin SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Lap	48 Lap	305 Lap	48 Lap	80%	305 Lap	48 Lap	48 Lap	

iaan Jasa Penunjang Urusan ntahan	***Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***99%***	***100%***	***100%***	***100%***	
iaan Jasa Komunikasi Sumber ir dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	12 Lap	
iaan Jasa Peralatan dan gkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	4 Lap	12 Lap	4 Lap	90%	12 Lap	4 Lap	4 Lap	
iaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	12 Lap	
haraan Barang Milik Daerah ang Urusan Pemerintah	***Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100***	
iaan Jasa Pemeliharaan, Biaya haraan dan Pajak Kendaraan gan Dinas atau Kendaraan abatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	5 Unit	
haraan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3 Unit	4 Unit	2 Unit	100%	4 Unit	2 Unit	2 Unit	
RAM PENYELEGARAAN RINTAHAN DAN YANAN PUBLIK	***Presentase penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif, efektif dan efisien dan efisien diTingkat Kecamatan***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
nasi Penyelegaraan Kegiatan ntahan di Tingkat Kecamatan	***Presentase Rapat Koordinasi penyelegraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang terlaksana***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
katan Efektifitas Kegiatan ntahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dok	10 Dok	8 Dok	10 Dok	100%	8 Dok	10 Dok	10 Dok	
anaan Urusan Pemerintahan ilimpahkan Kepada Camat	***Presentase Pelaksanaan Urusan pemerintahan yg dilimpahkan kepada camat***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100***	
naan Urusan Pemerintahan erkait dengan Kewenangan ng di Limpahkan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	12 Lap	
RAM PEMBERDAYAAN ARAKAT DESA DAN RAHAN	***Jumlah presentasi Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	

an Pemberdayaan Kelurahan	***Jumlah Presentase Pemberdayaan Kelurahan***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100***	
katan Partisipasi Masyarakat Forum Perencanaan ngunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 LBM	50 LBM	12 LBM	70 LBM	100%	12 LBM	70 LBM	70 LBM	
dayaan Masyarakat di han	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan	10 Lap	10 Lap	10 Lap	10 Lap	100%	10 Lap	10 Lap	10 Lap	
si Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10 D/K	10 D/K	10 D/K	10 D/K	100%	10 D/K	10 D/K	10 D/K	
RAM KOORDINASI NTRAMAN DAN RTIBAN UMUM	***Presentase terlaksananya fasilitasi penyelegaraan ketentraman umum dan ketertiban umum***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
nasi Upaya Penyelegaraan raman dan Ketertiban Umum	***Presentase Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
tas dengan Kepolisian Negara ik Indonesia, Tentara Nasional esia dan Instansi Vertikal di h Kecamatan	Jumlah Laporan Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	100%	24 Kali	24 Kali	24 Kali	
RAM PENYELEGARAAN AN PEMERINTAHAN I	***Presentase Terselenggaranya Kerjasama aparatur Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
egaraan Urusan ntahan Umum Penugasan Daerah	***Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
aan Kerukunan Antar Suku trasuku, Umat Beragama, Ras longan Lainnya Guna udkan Stabilitas Keamanan Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang	2 Orang	2 Orang	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap Capaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Ampana Kota berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan SKPD Kecamatan Ampana Kota. Keberhasilan kinerja SKPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Ampana Kota dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. T-II.2.

CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR CAMAT AMPANA KOTA

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NO	Indikator *)	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
		standar nasional	(PP-6/'08)	Tahun 2020 (tahun n)	Tahun 2021 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2022 (tahun n+1)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n)	Tahun 2022 (tahun n+1)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2022 (tahun n+1)	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*	*-15*	*-16*	*-17*
A	Terselenggaranya Proses Pelayanan Administrasi Yang cepat dan tepat	-	1 Org/K1	1 Org/K1	2 Org/KI	2 Org/KI	2 Org/KI	2 Org/KI	1 Org/K1	2 Org/KI	2 Org/KI	2 Org/KI	2 Org/KI	2 Org/KI	
B	Tercapainya Program Penyelegaraan pemerintahan yang kolaboratif, efektif dan efisien diTingkat Kecamatan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
C	Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
D	Terlaksanya Program Penyelegaraan ketentraman dan ketertiban umum	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	20%	95%	95%	95%	
E	Terselenggaranya Kerjasama aparatur Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Ampana Kota, Permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah, Capaian Program Nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Kecamatan Ampana Kota sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

   Khusus Provinsi, uraikan mengenai Koordinasi dan sinergi Program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di Tingkat Pusat dalam rangka Pencapaian Kinerja Pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Ampana Kota, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Kecamatan Ampana Kota berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel. T-II.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Kabupaten Tojo Una-Una

Nama SKPD : Kantor Camat Ampana Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	URUSAN WAJIBOTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN				**Rp 7.649.389.187**	***URUSAN WAJIBOTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN***				**Rp 7.649.389.187**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Terselenggaranya Proses Pelayanan Administrasi Yang cepat dan tepat***	***100%***	***Rp 6.427.291.187***	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Terselenggaranya Proses Pelayanan Administrasi Yang cepat dan tepat***	***100%***	***Rp 6.492.069.048***	
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN***	***100%***	Rp 5.623.514.107	***Administrasi Keuangan perangkat Daerah***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN***	***100%***	Rp 5.623.514.107	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang	Rp 5.623.514.107	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang	Rp 5.623.514.107	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***Rp 168.033.712***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**100%**	***Rp 176.680.949***	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 47.087.493	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 47.358.368	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 53.108.759	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 53.639.847	
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	Rp 10.427.460	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	Rp 10.531.735	

	Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasin SKPD	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Rp	77.410.000	Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasin SKPD	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Rp	85.151.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan***	***100%***	***Rp***	***578.128.368***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Jumlah Presentasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan***	***100%***	***Rp***	***630.103.242***	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp	98.079.250	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp	102.983.213	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Rp	18.680.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Rp	19.614.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp	461.369.118	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp	507.506.030	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***	***100%***	***Rp***	***57.615.000***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***	***100%***	***Rp***	***61.770.750***	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Rp	32.115.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Rp	33.720.750	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	Rp	25.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	Rp	28.050.000	
	PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif, efektif dan efisien dan efisien diTingkat Kecamatan***	***100%***	***Rp***	***37.290.000***	***PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentasi penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif, efektif dan efisien dan efisien diTingkat Kecamatan***	***100%***	***Rp***	***78.099.000***	
	Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Rapat Koordinasi penyelegraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang terlaksana***	***100%***	***Rp***	***37.190.000***	***Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Rapat Koordinasi penyelegraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang terlaksana***	***100%***	***Rp***	***39.049.500***	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	Rp	37.190.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	Rp	39.049.500	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kantor Camat Ampana Kota	***Presentase Pelaksanaan Urusan pemerintahan yg dilimpahkan kepada camat***	***100%***	***Rp***	***100.000***	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat***		***Jumlah Presentasi Pelaksanaan Urusan pemerintahan yg dilimpahkan kepada camat***	***100%***	***Rp***	***110.000***	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	Rp	100.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	12 Laporan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	Rp	110.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kantor Camat Ampana Kota	***presentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan***	***100%***	***Rp***	***1.135.810.000***	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	Kantor Camat Ampana Kota	***Jumlah presentasi Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan***	***100%***	***Rp***	***1.249.391.000***	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Kantor Camat Ampana Kota*	***Presentase Pemberdayaan Kelurahan***	***100%***	***Rp***	***1.135.810.000***	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	*Kantor Camat Ampana Kota*	***Presentase Pemberdayaan Kelurahan***	***100%***	***Rp***	***1.249.391.000***	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50 Lembaga Masyarakat	Rp	17.400.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50 Lembaga Masyarakat	Rp	19.140.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan	10 Pokmas/Ormas	Rp	991.010.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan	10 Pokmas/Ormas	Rp	1.090.111.000	
	Evaluasi Kelurahan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	Rp	37.400.000	Evaluasi Kelurahan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	Rp	41.140.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	Rp	90.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	Rp	99.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase terlaksananya fasilitasi penyelegaraan ketentraman umum dan ketertiban umum***	***100%***	***Rp***	***22.985.000***	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Jumlah Presentasi terlaksananya fasilitasi penyelegaraan ketentraman umum dan ketertiban umum***	***100%***	***Rp***	***23.214.850***	

	Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib***	***100%***	***Rp***	***22.985.000***	***Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Jumlah Presentasi Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib***	***100%***	***Rp***	***23.214.850***	
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib	25 Laporan	Rp	22.985.000	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib	25 Laporan	Rp	23.214.850	
	PROGRAM PENYELEGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Terselenggaranya Kerjasama aparatur Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah***	***100%***	***Rp***	***26.013.000***	***PROGRAM PENYELEGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Jumlah Presentasi Terselenggaranya Kerjasama aparatur Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah***	***100%***	***Rp***	***27.354.300***	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah***	***100%***	***Rp***	***26.013.000***	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah***		***Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah***	***100%***	***Rp***	***27.354.300***	
	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	1 Orang	Rp	13.413.000	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	1 Orang	Rp	14.754.300	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Orang	Rp	12.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Orang	Rp	12.600.000	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Instrasuku, Umat Beragama , Ras dan Golongan Laiinya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Instrasuku, Umat Beragama , Ras dan Golongan Laiinya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2 Orang	Rp	600.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Instrasuku, Umat Beragama , Ras dan Golongan Laiinya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Instrasuku, Umat Beragama , Ras dan Golongan Laiinya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2 Orang	Rp	610.000	
JUMLAH TOTAL ANGGARAN 2024					**Rp**	**7.669.389.187**	**JUMLAH TOTAL ANGGARAN 2024**				**Rp**	**7.880.128.198**	

2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kecamatan Ampana Kota.

Kajian usulan program dan kegiatan pada merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Usulan Program dan Kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Tojo Una-Una

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	1 Unit	Agar Dapat Meningkatkan Pelayanan Kantor
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	1 Unit	Agardapat Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor
3	Pelaksanaan BIMTEK Dan Pelaksanaan DIKLAT PIM III dan PIM IV	Kecamatan Ampana Kota	Peningkatan Jumlah Aparatur Yaang Mengikuti BIMTEK dan DIKLAT	2 Orang	Agar Meningkatkan Kapasitas Kinerja Aparatur

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

`

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Ampana Kota selama tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2024 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan packa konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selaian itu, pemerintah pusat juga baru saja menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendeatan *not business as usual*, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasarat serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi kaberhasilan pelaksanaan MP3EI. Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang *multiplier effect*-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air

Tabel. T-III.1.

Prioritas dan Sasaran Kantor Camat Ampana Kota

Kabupaten Tojo Una-Una

NO	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Peningkatan kapasitas manajemen pemerintahan termasuk di Desa/Kelurahan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks kepuasan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
2	Penyelegaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang optimal.	Meningkatnya kualitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa dan Kelurahan	Jumlah Persentase Desa dan Kelurahan yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan yang tepat waktu
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Optimalisasi pembinaan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Oleh BPK	Meningkatnya kemajuan Desa	Jumlah Presentase Desa Berstatus Desa Maju
4	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa dan kelurahan dan peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan serta Penyelegaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatka kualitas pembangunan dan pemberdayaan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Tojo Una- Una dan Persentase status Desa Maju	Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah presentase penyelesaian Kasus Keamanan dan Ketertiban

Tabel. T-III.2.

Tujuan Kantor Camat Ampana Kota

Kabupaten Tojo Una-Una

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Nilai Sakib Kecamatan	CC
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	82,50
		Jumlah Persentase Desa dan Kelurahan yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa/kelurahan yang tepat waktu	100,00
2	Memajukan wilayah Kecamatan	Nilai IDM Kecamatan	0,7073
		Jumlah Persentase Desa Berstatus Desa Maju	50,00
		Jumlah Persentase penyelesaian Kasus Keamanan Dan Ketertiban	100%

Tabel. T-III.3.

Sasaran Kantor Camat Ampana Kota

Kabupaten Tojo Una-Una

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	82,50
2	Meningakatnya kualitas pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa dan kelurahan	Jumlah Persentase Desa dan Kelurahan yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa/kelurahan yang tepat waktu	100,00
3	Meningkatnya Kemajuan Desa	Jumlah Persentase Desa Berstatus Desa Maju	50,00
4	Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Persentase Penyelesaian Kasus Keamanan Dan Ketertiban	100%

Tabel. T-III.4.

Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Ampana Kota

Kabupaten Tojo Una-Una

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA INDIKATOR UTAMA PERANGKAT DAERAH
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya Capaian Status Desa Membangun	Terselenggaranya Proses Pelayanan Administrasi Yang cepat dan tepat	50%
		Tercapainya Program Penyelegaraan pemerintahan yang kolaboratif, efektif dan efisien diTingkat Kecamatan	100%
		Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%
		Terlaksanya Program Penyelegaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%
		Terselenggaranya Kerjasama aparatur Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	100%

.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Ampana Kota pada tahun 2024 dan perkiraan maju pada tahun 2025, sebagai rangkaian Penyusun Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Ampana Kota Tahun 2024 dengan mempedomi Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, Dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan adalah :

1. Program dan Kegiatan yang bersifat rutin setiap tahun.
2. Program dan kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilakukan
3. Program dan kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas masing – masing Desa/kelurahan se Kecamatan Ampana Kota Sebagaimana di lampirkan pada Tabel Program Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Ampana Kota

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN AMPANA KOTA KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN AMPANA KOTA						**7.669.389.187,00**							**7.874.586.695,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.669.389.187,00**							**7.874.586.695,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.447.291.187,00**							**6.529.668.895,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**B Nilai**		**B Nilai**	**B Nilai**	**6.447.291.187,00**						**B Nilai**	**6.529.668.895,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Presentasi Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	100 %		100 %	100 %	5.623.514.107,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	61 Orang/bulan	5.623.514.107,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan		61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	5.623.514.107,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	61 Orang/bulan	5.623.514.107,00	KECAMATAN AMPANA KOTA

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Presentasi Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %		100 %	100 %	188.033.712,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	5 Paket	206.837.083,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	47.087.493,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	5 Paket	51.796.242,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	53.108.759,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	18 Paket	58.419.635,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	60 Paket	10.427.460,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	60 Paket	11.470.206,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		305 Laporan	305 Laporan	77.410.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas5.Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	305 Laporan	85.151.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Presentasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan*	100 %		100 %	100 %	578.128.368,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Laporan	635.941.205,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	98.079.250,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Laporan	107.887.175,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	18.680.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Laporan	20.548.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	461.369.118,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Laporan	507.506.030,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Presentasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan*	100 %		100 %	100 %	57.615.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	5 Unit	63.376.500,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	32.115.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	5 Unit	35.326.500,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	25.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	5 Unit	28.050.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01	**KECAMATAN**						**1.222.098.000,00**							**1.344.917.800,00**	
1,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)***	**90,00 Persen**		**90,00 Persen**	**90,00 Persen**	**37.290.000,00**						**90,00 Persen**	**41.019.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Presentasi Rapat Koordinasi penyelegraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang terlaksana*	100 %		100 %	100 %	37.190.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5.Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	40.909.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	37.190.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	40.909.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA

	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Presentasi Pelaksanaan Urusan pemerintahan yg dilimpahkan kepada camat*	100 %		100 %	100 %	100.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Laporan	110.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Laporan	110.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai IDM Kecamatan***	**0,7033 Poin**		**0,7033 Poin**	**0,7033 Poin**	**1.135.810.000,00**						**0,7033 Poin**	**1.249.391.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Presentasi Pemberdayaan Kelurahan*	100 %		100 %	100 %	1.135.810.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	50 Lembaga Kemasyarak atan	1.249.391.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50 Lembaga Kemasyarak atan		50 Lembaga Kemasyarakatan	50 Lembaga Kemasyarak atan	17.400.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	50 Lembaga Kemasyarak atan	19.140.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	90.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Unit	99.000.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas		18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	991.010.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas5.Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	18 Pokmas / Ormas	1.090.111.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	37.400.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	10 Laporan	41.140.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani***	**100,00 Persen**		**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**22.985.000,00**						**100,00 Persen**	**25.283.500,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Presentasi Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib*	100 %		100 %	100 %	22.985.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	24 Laporan	25.283.500,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													

			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	22.985.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	24 Laporan	25.283.500,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**100,00 Persen**		**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**26.013.000,00**						**100,00 Persen**	**29.224.300,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Presentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	100 %		100 %	100 %	26.013.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	2 Orang	29.224.300,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Orang		2 Orang	2 Orang	13.413.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	2 Orang	14.754.300,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	2 Orang		2 Orang	2 Orang	600.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	2 Orang	610.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA

			Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional												
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Dokumen	13.860.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	J U M L A H							**7.669.389.187,00**							**7.874.586.695,00**	

Tabel. T-IV.2.

Sasaran dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Kantor Camat Ampana Kota

Kabupaten Tojo Una-Una

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	*Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi, dan Koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa dan kelurahan*	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***
		Administrasi Keuangan perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan
		Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasin SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	*Meningkatnya kualitas Layanan Pemerintah yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan*	***PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***
		Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan
3	*Meningkatnya Kemajuan Desa/Kelurahan*	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Evaluasi Kelurahan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
4	*Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***
		Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia, Tentara Nasional Uindonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	*Terwujudnya Kerjasama yang Baik dan Partisipasi aktif Masyarakat dalam Penyelegaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	***PROGRAM PENYELEGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***
		Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum Penugasan Kepala Daerah
		Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tojo Una - Una

Tahun 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Ampana Kota

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINE RJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2024	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	KET
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
					TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
7 . 01 . 01. 2.02	**Administrasi Keuangan**										**5.623.514.107**	**5.623.514.107**	
7. 01 . 01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Asn yang Menerima gaji dan tunjangan	61 orang	Jumlah Asn yang Menerima gaji dan tunjangan	61 orang	Jumlah Asn yang Menerima gaji dan tunjangan		**5.623.514.107**	**5.623.514.107**	
7. 01 . 01. 2.06	**Administrasi umum perangkat daerah**										**168.033.712**	**184.837.083**	
7. 01 . 01. 206. 02	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		47.087.493	51.796.242	
7. 01. 01. 2.06. 04	penyediaan Bahan logistik kantor		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Di Sediakan	18 Paket	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Di Sediakan	18 Paket	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		53.108.759	58.419.635	
7. 01. 01. 2.06. 05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Barang Cetakan dan Penggadaan yang Di Sediakan	60 Paket	Jumlah Barang Cetakan dan Penggadaan yang Di Sediakan	60 Paket	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan		10.427.460	11.470.206	
7. 01. 01. 2.06. 09	penyelenggaraan rapat rapat koordinasi dan konsultasi OPD		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	305 Laporan	Jumlah Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	305 Laporan	Terselegaranya Regulasi Pelayanan Regulasi Kepada Masyarakat yang Profesional		77.410.000	85.151.000	
7. 01. 01. 2. 08. 03	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**										**578.128.368**	**635.941.205**	

7. 01. 01. 2. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik		98.079.250	107.887.175	
7. 01. 01. 2. 08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	Tersedianya Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor		18.680.000	20.548.000	
7. 01. 01. 2. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		461.369.118	507.506.030	
7. 01. 01. 2. 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**57.615.000**	**63.376.500**	
7. 01. 01. 2. 09. 09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Terpeliharanya Pajak dan Kendaraan Dinas Kantor.		32.115.000	35.326.500	
7. 01. 01. 2. 09. 01	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Terpeliharalah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		25.500.000	28.050.000	
7. 01. 02	**PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										**37.290.000**	**41.019.000**	
7. 01. 02. 2. 01	**Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**										37.190.000	40.909.000	
7. 01. 02. 2. 01. 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	Terciptanya Efektifitas Kegiatan Pemerintah		37.190.000	40.909.000	
7. 01. 02. 2. 04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat**										**100.000**	**110.000**	

7. 01. 02. 2. 04. 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	Terselegaranya Urusan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif		100.000	110.000	
7. 01. 03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										**1.135.810.000**	**1.249.391.000**	
7. 01. 03. 2. 02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**										**1.135.810.000**	**1.249.391.000**	
7. 01. 03. 2. 02. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Laporan	Terjadinya Pengendalian Suatu Program Prioritas Untuk Kemajuan Wilayah/Masyarakat		17.400.000	19.140.000	
7. 01. 03. 2. 02. 03	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Laporan	Tercapainya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		991.010.000	1.090.111.000	
7. 01. 03. 2. 02. 04	evaluasi kelurahan		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan	Terwujudnya Lingkunagan yang Bersih Dan Tertib Administrasi Serta Mewujudkan Keluarga yang Sejahtera		37.400.000	41.140.000	
7. 01. 03. 2. 02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	6 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	6 Unit	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		90.000.000	99.000.000	
7. 01. 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										**22.985.000**	**25.283.500**	
7. 01 .04. 2. 01	**Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**										**22.985.000**	**25.283.500**	

7. 01. 04. 2. 01. 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Tertib		22.985.000	25.283.500	
7. 01. 05	**PROGRAM PENYELEGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										**26.013.000**	**28.614.300**	
7. 01. 05. 2. 01	**Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum Penugasan Kepala Daerah**										**26.013.000**	**28.614.300**	
7. 01. 05. 2. 01. 02	Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Orang	Terselegaranya Regulasi Pelayanan Kepada Masyarakat yang Profesional		13.413.000	14.754.300	
7.01.05.2.01. 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	Terselegaranya Kerjasama aparatur Pemerintah dengan Masyarakat Dalam Membangun Daerah		12.000.000	13.860.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Laiinya Guna Meweujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional , dan Nasional		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Laiinya Guna Meweujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional , dan Nasional	2 Orang	Jumlah Presentasi Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum	2 Orang	Terselegaranya Kerjasama aparatur Pemerintah dengan Masyarakat Dalam Membangun Daerah		600.000	610.000	
JUMLAH TOTAL											**7.669.389.187**	**7.591.774.187**	
JUMLAH PAGGU ANGGARAN TAHUN 2024											**2.025.875.080**	**2.228.462.588**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ampana Kota tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Ampana Kota dan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ampana Kota.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Ampana Kota, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan Ampana Kota maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Kecamatan Ampana Kota tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD.

Ampana, Februari 2023
Camat Ampana Kota

MOHAMAD AWALI, S.Sos, M.Si
Pembina IV.a
NIP. 19781009 201641 1 013

RENCAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD
1	2	3	4	5
		KECAMATAN AMPANA KOTA		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**		
	7.01	**KECAMATAN**		
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**B Nilai**
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Presentasi Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	100 %
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Presentasi Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Presentasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan*	100 %
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Presentasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan*	100 %
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit
	7.01	**KECAMATAN**		
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)***	**90,00 Persen**
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Presentasi Rapat Koordinasi penyelegraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang terlaksana*	100 %
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Presentasi Pelaksanaan Urusan pemerintahan yg dilimpahkan kepada camat*	100 %
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai IDM Kecamatan***	**0,7033 Poin**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Presentasi Pemberdayaan Kelurahan*	100 %
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan d		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50 Lembaga Kemasyarak atan
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas
	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10 Laporan
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani***	**100,00 Persen**

	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Presentasi Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib*	100 %
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Inst		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24 Laporan
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**100,00 Persen**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Presentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	100 %
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Orang
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainn		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2 Orang
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen
			J U M L A H	

A KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATA
TAHUN 2024

REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANG		
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
6	7	8	9	10
			7,669,389,187.00	
			7,669,389,187.00	
			6,447,291,187.00	
	B Nilai	**B Nilai**	**6,447,291,187.00**	
	100 %	100 %	5,623,514,107.00	
	61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	5,623,514,107.00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa
	100 %	100 %	188,033,712.00	
	5 Paket	5 Paket	47,087,493.00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa

	18 Paket	18 Paket	53,108,759.00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa

	60 Paket	60 Paket	10,427,460.00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa

	305 Laporan	305 Laporan	77,410,000.00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa
	100 %	100 %	578,128,368.00	

	12 Laporan	12 Laporan	98,079,250.00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa

	12 Laporan	12 Laporan	18,680,000.00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa

	12 Laporan	12 Laporan	461,369,118.00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa

	100 %	100 %	57,615,000.00	

s atau Kendaraan Dinas Jabatan

	5 Unit	5 Unit	32,115,000.00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa

	5 Unit	5 Unit	25,500,000.00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa
			1,222,098,000.00	
	90,00 Persen	**90,00 Persen**	**37,290,000.00**	
	100 %	100 %	37,190,000.00	

	1 Dokumen	1 Dokumen	37,190,000.00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa
	100 %	100 %	100,000.00	

	12 Laporan	12 Laporan	100,000.00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa
	0,7033 Poin	**0,7033 Poin**	**1,135,810,000.00**	
	100 %	100 %	1,135,810,000.00	

i Kelurahan

	50 Lembaga Kemasyarakatan	50 Lembaga Kemasyarak atan	17,400,000.00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa

	1 Unit	1 Unit	90,000,000.00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa

	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	991,010,000.00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa

	10 Laporan	10 Laporan	37,400,000.00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa
	100,00 Persen	**100,00 Persen**	**22,985,000.00**	

	100 %	100 %	22,985,000.00	

tansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

	24 Laporan	24 Laporan	22,985,000.00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa
	100,00 Persen	**100,00 Persen**	**26,013,000.00**	
	100 %	100 %	26,013,000.00	

dan Ketahanan Nasional

	2 Orang	2 Orang	13,413,000.00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa

ıya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

	2 Orang	2 Orang	600,000.00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa

	12 Dokumen	12 Dokumen	12,000,000.00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa
			7,669,389,187.00	

.N AMPANA KOTA KAB. TOJO UNA UNA

GKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	NASIONAL	DAERAH			
11	12	13	14	15	16
					7,874,586,695.00
					7,874,586,695.00
					6,529,668,895.00
				B Nilai	**6,529,668,895.00**
	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	61 Orang/bulan	5,623,514,107.00
DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	61 Orang/bulan	5,623,514,107.00
	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	5 Paket	206,837,083.00
DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	5 Paket	51,796,242.00

DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	18 Paket	58,419,635.00

DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	60 Paket	11,470,206.00

DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	305 Laporan	85,151,000.00
	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Laporan	635,941,205.00

DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Laporan	107,887,175.00

DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Laporan	20,548,000.00

DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Laporan	507,506,030.00

	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	5 Unit	63,376,500.00
DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	5 Unit	35,326,500.00
DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	5 Unit	28,050,000.00
					1,344,917,800.00
				90,00 Persen	**41,019,000.00**
	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	40,909,000.00
DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	40,909,000.00
	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Laporan	110,000.00

DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Laporan	110,000.00
				0,7033 Poin	**1,249,391,000.00**
	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	50 Lembaga Kemasyarak atan	1,249,391,000.00

DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	50 Lembaga Kemasyarak atan	19,140,000.00

DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Unit	99,000,000.00

DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	18 Pokmas / Ormas	1,090,111,000.00

DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	10 Laporan	41,140,000.00
				100,00 Persen	**25,283,500.00**

	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	24 Laporan	25,283,500.00

DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	24 Laporan	25,283,500.00
				100,00 Persen	**29,224,300.00**
	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	2 Orang	29,224,300.00

DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	2 Orang	14,754,300.00

DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	2 Orang	610,000.00

DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Dokumen	13,860,000.00
					7,874,586,695.00

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
17
KECAMATAN AMPANA KOTA
KECAMATAN AMPANA KOTA
KECAMATAN AMPANA KOTA
KECAMATAN AMPANA KOTA

KECAMATAN AMPANA KOTA

KECAMATAN AMPANA KOTA

KECAMATAN AMPANA KOTA

KECAMATAN AMPANA KOTA

KECAMATAN AMPANA KOTA

KECAMATAN AMPANA KOTA

KECAMATAN AMPANA KOTA

KECAMATAN AMPANA KOTA

KECAMATAN AMPANA KOTA

KECAMATAN AMPANA KOTA

KECAMATAN AMPANA KOTA

KECAMATAN AMPANA KOTA

KECAMATAN AMPANA KOTA

KECAMATAN AMPANA KOTA

KECAMATAN AMPANA KOTA

KECAMATAN AMPANA KOTA

KECAMATAN AMPANA KOTA

KECAMATAN AMPANA KOTA

KECAMATAN AMPANA KOTA

KECAMATAN AMPANA KOTA
KECAMATAN AMPANA KOTA
KECAMATAN AMPANA KOTA
KECAMATAN AMPANA KOTA
KECAMATAN AMPANA KOTA
KECAMATAN AMPANA KOTA

TABEL. T-II.1.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KANTOR CAMAT AMPANA KOTA

CAPAIAN RENSTRA KANTOR CAMAT AMPANA KOTA S/D TAHUN 2023

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ampana Kota

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	target capaian kinerja Renstra SKPD	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022			Target program / kegiatan	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2023		Catatan
						Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	(tahun n-3)	(tahun lalu /n-2) Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	(tahun berjalan/n-1)		
													realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*100	11=(10/4)*	12
7					*UNSUR KEWILAYAHAN*										
7	*01*	*01*			*KECAMATAN AMPANA KOTA*										
7	*01*	*01*	*2.02*		*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	*Presentase Terselenggaranya Proses Pelayanan Administrasi Yang cepat dan tepat*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	
7	*01*	*01*	*2.02*		*Administrasi Keuangan perangkat Daerah*	*Presentase Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	
7	*01*	*01*	*2.02*	*01*	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang	64 Orang	68 Orang	68 Orang	100%	64 Orang	100%	100%	
7	*01*	*01*	*2.06*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*100%*	*100%*	*95%*	*95%*	*95%*	*100%*	*100%*	*100%*	
7	*01*	*01*	*2.06*	*02*	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	8 Paket	95%	5 Paket	9 Paket	9 Paket	
7	*1*	*1*	*2.06*	*4*	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	6 Paket	18 Paket	6 Paket	50%	18 Paket	6 Paket	6 Paket	
7	*01*	*01*	*2.06*	*05*	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	25 Paket	60 Paket	25 Paket	80 %	60 Paket	25 Paket	25 Paket	
7	*01*	*01*	*2.06*	*09*	Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasin SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Lap	48 Lap	305 Lap	48 Lap	80%	305 Lap	48 Lap	48 Lap	

7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan***	***Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***99%***	***100%***	***100%***	***100%***	
7	*01*	*01*	*2.08*	*02*	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	12 Lap	
7	*01*	*01*	*2.08*	*03*	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	4 Lap	12 Lap	4 Lap	90%	12 Lap	4 Lap	4 Lap	
7	*01*	*01*	*2.08*	*04*	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	12 Lap	
7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100***	
7	*01*	*01*	*2.09*	*09*	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	5 Unit	
7	*01*	*01*	*2.09*	*01*	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3 Unit	4 Unit	2 Unit	100%	4 Unit	2 Unit	2 Unit	
7	***01***	***02***			***PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	***Presentase penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif, efektif dan efisien dan efisien diTingkat Kecamatan***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
7	***01***	***02***	***01***		***Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Presentase Rapat Koordinasi penyelegraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang terlaksana***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
7	*01*	*02*	*01*	*02*	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dok	10 Dok	8 Dok	10 Dok	100%	8 Dok	10 Dok	10 Dok	

7	***01***	***02***	***2.04***		***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat***	***Presentase Pelaksanaan Urusan pemerintahan yg dilimpahkan kepada camat***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100***	
7	*01*	*02*	*2.04*	*03*	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	12 Lap	
7	***01***	***03***			***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	***Jumlah presentasi Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
7	***01***	***03***	***2.02***		***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	***Jumlah Presentase Pemberdayaan Kelurahan***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100***	
7	*01*	*03*	*2.02*	*01*	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 LBM	50 LBM	12 LBM	70 LBM	100%	12 LBM	70 LBM	70 LBM	
7	*01*	*03*	*2.02*	*03*	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan	10 Lap	10 Lap	10 Lap	10 Lap	100%	10 Lap	10 Lap	10 Lap	
7	*01*	*03*	*2.02*	*04*	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10 D/K	10 D/K	10 D/K	10 D/K	100%	10 D/K	10 D/K	10 D/K	
7	***01***	***04***			***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	***Presentase terlaksananya fasilitasi penyelegaraan ketentraman umum dan ketertiban umum***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	***Presentase Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
7	*01*	*04*	*2.01*	*01*	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia Tentara Nasional Uindonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	100%	24 Kali	24 Kali	24 Kali	
7	***01***	***05***			***PROGRAM PENYELEGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	***Presentase Terselenggaranya Kerjasama aparatur Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	

7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum Penugasan Kepala Daerah***	***Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
7	*01*	*05*	*2.01*	*04*	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Instrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang	2 Orang	2 Orang	

Tabel. T-II.2.
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR CAMAT AMPANA KOTA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NO	Indikator *)	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
		standar nasional	(PP-6/'08)	Tahun 2019 (tahun n)	Tahun 2020 (tahun n+1)	Tahun 2022 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2019 (tahun n-2)	Tahun 2020 (tahun n)	Tahun 2021 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2022 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n+1)	
-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
A	Terselenggaranya Proses Pelayanan Administrasi Yang cepat dan tepat	-	1 Org/K1	1 Org/K1	2 Org/KI	2 Org/KI	2 Org/KI	2 Org/KI	1 Org/K1	2 Org/KI	2 Org/KI	2 Org/KI	2 Org/KI	2 Org/KI	
B	Tercapainya Program Penyelegaraan pemerintahan yang kolaboratif, efektif dan efisien diTingkat Kecamatan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
C	Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
D	Terlaksanya Program Penyelegaraan ketentraman dan ketertiban umum	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	20%	95%	95%	95%	
E	Terselenggaranya Kerjasama aparatur Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	

Tabel. T-III.1.

Prioritas dan Sasaran Kantor Camat Ampana Kota

Kabupaten Tojo Una-Una

NO	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Peningkatan kapasitas manajemen pemerintahan termasuk di Desa/Kelurahan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks kepuasan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
2	Penyelegaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang optimal.	Meningkatnya kualitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa dan Kelurahan	Jumlah Persentase Desa dan Kelurahan yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan yang tepat waktu
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Optimalisasi pembinaan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Oleh BPK	Meningkatnya kemajuan Desa	Jumlah Presentase Desa Berstatus Desa Maju
4	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa dan kelurahan dan peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan serta Penyelegaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatka kualitas pembangunan dan pemberdayaan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Tojo Una- Una dan Persentase status Desa Maju	Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah presentase penyelesaian Kasus Keamanan dan Ketertiban

Usulan Program dan Kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Tojo Una-Una

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Komputer/Laptop	Kantor Camat Ampana Kota	Peningkatan Pelayanan Yang Berkualitas	1 Unit	Agar Dapat Meningkatkan Pelayanan Kantor
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Kantor Camat Ampana Kota	Peningkatan Pelayanan Yang Berkualitas	1 Paket	Agar Roda Pemerintahan Yang Baik Dapat Terlaksana
3	Pelaksanaan BIMTEK Dan Pelaksanaan DIKLAT PIM III dan PIM IV	Kecamatan Ampana Kota	Peningkatan Jumlah Aparatur Yaang Mengikuti BIMTEK dan DIKLAT	2 Orang	Agar Meningkatkan Kapasitas Kinerja Aparatur

Tabel. T-II.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Kabupaten Tojo Una-Una

Nama SKPD : Kantor Camat Ampana Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	URUSAN WAJIBOTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN				**Rp 7,669,389,187**	***URUSAN WAJIBOTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN***				**Rp 7,669,389,187**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Terselenggaranya Proses Pelayanan Administrasi Yang cepat dan tepat***	***100%***	***Rp 6,447,291,187***	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Terselenggaranya Proses Pelayanan Administrasi Yang cepat dan tepat***	***100%***	***Rp 6,512,269,048***	
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN***	***100%***	Rp 5,623,514,107	***Administrasi Keuangan perangkat Daerah***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN***	***100%***	Rp 5,623,514,107	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang	Rp 5,623,514,107	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang	Rp 5,623,514,107	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***Rp 188,033,712***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**100%**	***Rp 196,880,949***	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 47,087,493	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 47,558,368	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 53,108,759	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 53,639,847	
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	Rp 10,427,460	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	Rp 10,531,735	
	Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasin SKPD	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Rp 77,410,000	Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasin SKPD	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Rp 85,151,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan***	***100%***	***Rp 578,128,368***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Jumlah Presentasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan***	***100%***	***Rp 630,103,242***	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 98,079,250	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 102,983,213	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Rp 18,680,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Rp 19,614,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 461,369,118	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 507,506,030	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***	***100%***	***Rp***	***57,615,000***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***	***100%***	***Rp***	***61,770,750***	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Rp	32,115,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Rp	33,720,750	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	Rp	25,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	Rp	28,050,000	
	PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif, efektif dan efisien dan efisien diTingkat Kecamatan***	***100%***	***Rp***	***37,290,000***	***PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentasi penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif, efektif dan efisien dan efisien diTingkat Kecamatan***	***100%***	***Rp***	***78,099,000***	
	Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Rapat Koordinasi penyelegraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang terlaksana***	***100%***	***Rp***	***37,190,000***	***Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Rapat Koordinasi penyelegraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang terlaksana***	***100%***	***Rp***	***39,049,500***	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	Rp	37,190,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	Rp	39,049,500	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kantor Camat Ampana Kota	***Presentase Pelaksanaan Urusan pemerintahan yg dilimpahkan kepada camat***	***100%***	***Rp***	***100,000***	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat***		***Jumlah Presentasi Pelaksanaan Urusan pemerintahan yg dilimpahkan kepada camat***	***100%***	***Rp***	***110,000***	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	Rp	100,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	12 Laporan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	Rp	110,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kantor Camat Ampana Kota	***presentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan***	***100%***	***Rp***	***1,135,810,000***	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	Kantor Camat Ampana Kota	***Jumlah presentasi Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan***	***100%***	***Rp***	***1,249,391,000***	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Kantor Camat Ampana Kota*	***Presentase Pemberdayaan Kelurahan***	***100%***	***Rp***	***1,135,810,000***	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	*Kantor Camat Ampana Kota*	***Presentase Pemberdayaan Kelurahan***	***100%***	***Rp***	***1,249,391,000***	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50 Lembaga Masyarakat	Rp	17,400,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50 Lembaga Masyarakat	Rp	19,140,000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan	10 Pokmas/Ormas	Rp	991,010,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan	10 Pokmas/Ormas	Rp	1,090,111,000	
	Evaluasi Kelurahan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	Rp	37,400,000	Evaluasi Kelurahan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	Rp	41,140,000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	Rp	90,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	Rp	99,000,000	

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase terlaksananya fasilitasi penyelegaraan ketentraman umum dan ketertiban umum***	***100%***	***Rp***	***22,985,000***	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Jumlah Presentasi terlaksananya fasilitasi penyelegaraan ketentraman umum dan ketertiban umum***	***Rp22,985,000***	***Rp***	***23,214,850***
	Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib***	***100%***	***Rp***	***22,985,000***	***Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Jumlah Presentasi Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib***	***100%***	***Rp***	***23,214,850***
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib	25 Laporan	Rp	22,985,000	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Laporan Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib	25 Laporan	Rp	23,214,850
	PROGRAM PENYELEGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Terselenggaranya Kerjasama aparatur Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah***	***100%***	***Rp***	***26,013,000***	***PROGRAM PENYELEGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Jumlah Presentasi Terselenggaranya Kerjasama aparatur Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah***	***100%***	***Rp***	***28,614,300***
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	***Kantor Camat Ampana Kota***	***Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah***	***100%***	***Rp***	***26,013,000***	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah***		***Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah***	***100%***	***Rp***	***28,614,300***
	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	1 Orang	Rp	13,413,000	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	1 Orang	Rp	14,754,300
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Orang	Rp	12,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Orang	Rp	13,200,000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Orang	Rp	600,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan	Kantor Camat Ampana Kota	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Orang	Rp	660,000
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN 2023				**Rp**	**7,669,389,187**	**JUMLAH TOTAL ANGGARAN 2023**				**Rp**	**7,891,588,198**

Tabel. IV.1

Rencana Program Dan Kegiatan Kantor Camat Ampana Kota Tahun 2024

Dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Tojo Una-Una

Nama SKPD : Kantor Camat Ampana Kota

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1					-2		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
7					***UNSUR KEWILAYAHAN***								
7	***01***	***01***			KECAMATAN AMPANA KOTA								
7	***01***	***01***	***2.02***		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Presentase Terselenggaranya Proses Pelayanan Administrasi Yang cepat dan tepat***	Kantor Camat Ampana Kota	***100%***	***Rp 6,233,102,306***	***DAU***		***100%***	***Rp 6,307,777,014***
7	***01***	***01***	***2.02***		Administrasi Keuangan perangkat Daerah	***Presentase Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN***	Kantor Camat Ampana Kota	***100%***	***Rp 5,486,355,226***	***DAU***			***5,486,355,226***
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Ampana Kota	61 orang	Rp 5,486,355,226	DAU		61 orang	Rp 5,486,355,226
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***100%***	***Rp 203,033,712***	***DAU***		***100%***	***Rp 223,337,083***
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Ampana Kota	5 Paket	Rp 37,087,493	DAU		6 Paket	Rp 40,796,242
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Ampana Kota	18 Paket	Rp 63,108,759	DAU		20 Paket	Rp 69,419,635
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor Camat Ampana Kota	***60 Paket***	Rp 15,427,460	DAU		66 Paket	Rp 16,970,206
7	01	01	2.06	09	Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasin SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Ampana Kota	305 Laporan	Rp 87,410,000	DAU		336 Laporan	Rp 96,151,000
7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***100%***	Rp 506,283,368	***DAU***		***100%***	***Rp 556,911,705***
7	*01*	*01*	*2.08*	*02*	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor Camat Ampana Kota	12 Laporan	Rp 34,564,250	DAU		12 Laporan	Rp 38,020,675
7	*01*	*01*	*2.08*	*03*	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Ampana Kota	12 Laporan	Rp 10,350,000	DAU		12 Laporan	Rp 11,385,000
7	*01*	*01*	*2.08*	*04*	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Ampana Kota	12 Laporan	Rp 461,369,118	DAU		12 Laporan	Rp 507,506,030

7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***100%***	***Rp***	***37,430,000***	***DAU***		***100%***	***Rp***	***41,173,000***
7	01	01	2.09	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kantor Camat Ampana Kota	5 Unit		26,930,000	DAU		5 Unit	Rp	29,623,000
7	01	01	2.09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor Camat Ampana Kota	4 Unit		10,500,000	DAU		4 Unit	Rp	11,550,000
7	***01***	***02***			***PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	***Presentasi penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif, efektif dan efisien dan efisien diTingkat Kecamatan***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***100%***	***Rp***	***41,290,000***	***DAU***		***100%***	***Rp***	***45,419,000***
7	***01***	***02***	***01***		***Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Presentase Rapat Koordinasi penyelegraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang terlaksana***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***100%***	***Rp***	***39,190,000***	***DAU***		***100%***	***Rp***	***43,109,000***
7	*01*	*02*	*01*	*02*	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Ampana Kota	8 Dokumen	Rp	39,190,000	DAU		8 Dokumen	Rp	43,109,000
7	***01***	***02***	***2.04***		***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat***	***Jumlah Presentasi Pelaksanaan Urusan pemerintahan yg dilimpahkan kepada camat***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***100%***	***Rp***	***2,100,000***	***DAU***		***100%***	***Rp***	***2,310,000***
7	*01*	*02*	*2.04*	*03*	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Ampana Kota	12 Laporan	Rp	2,100,000	DAU		12 Laporan	Rp	2,310,000
7	***01***	***03***			***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	***Jumlah presentasi Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan***	***Kantor Camat Ampana Kota***	***100%***	***Rp***	***1,150,770,000***	***DAU***		***100%***	***Rp***	***1,265,847,000***
7	***01***	***03***	***2.02***		***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	***Jumlah Presentase Pemberdayaan Kelurahan***	***Kantor Camat Ampana Kota***	100%	Rp	1,150,770,000	***DAU***		100%	Rp	1,265,847,000
7	*01*	*03*	*2.02*	*01*	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Ampana Kota	12 LBM	Rp	17,400,000	DAU		12 LBM	Rp	19,140,000
7	*01*	*03*	*2.02*	*03*	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan	Kantor Camat Ampana Kota	10 Laporan	Rp	1,095,970,000	DAU		10 Laporan	Rp	1,205,567,000
7	*01*	*03*	*2.02*	*04*	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kantor Camat Ampana Kota	1 Laporan	Rp	37,400,000	DAU		1 Laporan	Rp	41,140,000
7	01	03	202	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kantor Camat Ampana Kota	6 Unit	Rp	53,000,000	DAU		6 Unit	Rp	58,300,000

7	***01***	***04***			***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	***Jumlah Presentasi terlaksananya fasilitasi penyelegaraan ketentraman umum dan ketertiban umum***	Kantor Camat Ampana Kota	100%	Rp	22,985,000	***DAU***		***100%***	Rp	25,283,500
7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah Presentasi Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib***	***Kantor Camat Ampana Kota***	100%	Rp	22,985,000	***DAU***		***100%***	Rp	25,283,500
7	*01*	*04*	*2.01*	*01*	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia, Tentara Nasional Uindonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib	Kantor Camat Ampana Kota	12 Laporan	Rp	22,985,000	DAU		12 Laporan	Rp	25,283,500
7	***01***	***05***			***PROGRAM PENYELEGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	***Jumlah Presentasi Terselenggaranya Kerjasama aparatur Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah***	Kantor Camat Ampana Kota	100%	Rp	26,013,000	DAU		100%	Rp	28,614,300
7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum Penugasan Kepala Daerah***	***Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah***	***Kantor Camat Ampana Kota***	100%	Rp	26,013,000	***DAU***		100%	Rp	28,614,300
7	*01*	*05*	*2.01*	*02*	Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	Kantor Camat Ampana Kota	2 Orang	Rp	13,413,000	DAU		2 Orang	Rp	14,754,300
7	*01*	*05*	*2.01*	*08*	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kantor Camat Ampana Kota	Dokumen	Rp	12,600,000	DAU		Dokumen	Rp	13,860,000
JUMLAH TOTAL ANGGARAN									**Rp**	**7,474,160,306**				**Rp**	**7,672,940,814**

Tabel. T-III.2.
Tujuan Kantor Camat Ampana Kota
Kabupaten Tojo Una-Una

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Nilai Sakib Kecamatan	CC
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	82,50
		Jumlah Persentase Desa dan Kelurahan yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa/kelurahan yang tepat waktu	100,00
2	Memajukan wilayah Kecamatan	Nilai IDM Kecamatan	0,7073
		Jumlah Persentase Desa Berstatus Desa Maju	50,00
		Jumlah Persentase penyelesaian Kasus Keamanan Dan Ketertiban	100%

Tabel. T-III.3.
Sasaran Kantor Camat Ampana Kota
Kabupaten Tojo Una-Una

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	82,50
2	Meningakatnya kualitas pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa dan kelurahan	Jumlah Persentase Desa dan Kelurahan yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa/kelurahan yang tepat waktu	100,00
3	Meningkatnya Kemajuan Desa	Jumlah Persentase Desa Berstatus Desa Maju	50,00
4	Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Persentase Penyelesaian Kasus Keamanan Dan Ketertiban	100%

Tabel. T-III.4.

Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Ampana Kota
Kabupaten Tojo Una-Una

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA INDIKATOR UTAMA PERANGKAT DAERAH
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya Capaian Status Desa Membangun	Terselenggaranya Proses Pelayanan Administrasi Yang cepat dan tepat	50%
		Tercapainya Program Penyelegaraan pemerintahan yang kolaboratif, efektif dan efisien diTingkat Kecamatan	100%
		Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%
		Terlaksanya Program Penyelegaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%
		Terselenggaranya Kerjasama aparatur Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	100%

.

Tabel. T-IV.2.
Sasaran dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Kantor Camat Ampana Kota
Kabupaten Tojo Una-Una

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	*Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi, dan Koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa dan kelurahan*	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***
		Administrasi Keuangan perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan
		Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasin SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	*Meningkatnya kualitas Layanan Pemerintah yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan*	***PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***
		Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan
3	*Meningkatnya Kemajuan Desa/Kelurahan*	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Evaluasi Kelurahan
4	*Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***
		Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia, Tentara Nasional Uindonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	*Terwujudnya Kerjasama yang Baik dan Partisipasi aktif Masyarakat dalam Penyelegaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	***PROGRAM PENYELEGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***
		Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum Penugasan Kepala Daerah
		Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Instrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tojo Una - Una
Tahun 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Ampana Kota

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	KET
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
					TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
7 . 01 . 01. 2.02	**Administrasi Keuangan**										**5,623,514,107**	**5,623,514,107**	
7. 01 . 01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Asn yang Menerima gaji dan tunjangan	14 Bulan	Jumlah Asn yang Menerima gaji dan tunjangan	61 orang	Jumlah Asn yang Menerima gaji dan tunjangan		5,623,514,107	5,623,514,107	
7. 01 . 01. 2.06	**Administrasi umum perangkat daerah**										**188,033,712**	**206,837,083**	
7. 01 . 01. 206. 02	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		47,087,493	51,796,242	
7. 01. 01. 2.06. 04	penyediaan Bahan logistik kantor		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Di Sediakan	12 Bulan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Di Sediakan	18 Paket	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		53,108,759	58,419,635	
7. 01. 01. 2.06. 05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Barang Cetakan dan Penggadaan yang Di Sediakan	12 Bulan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggadaan yang Di Sediakan	60 Paket	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan		10,427,460	11,470,206	
7. 01. 01. 2.06. 09	penyelenggaraan rapat rapat koordinasi dan konsultasi OPD		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	12 Bulan	Jumlah Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	305 Laporan	Terselegaranya Regulasi Pelayanan Regulasi Kepada Masyarakat yang Profesional		77,410,000	85,151,000	
7. 01. 01. 2. 08. 03	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**										**578,128,368**	**635,941,205**	
7. 01. 01. 2. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik		98,079,250	107,887,175	
7. 01. 01. 2. 08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	Tersedianya Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor		18,680,000	20,548,000	
7. 01. 01. 2. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		461,369,118	507,506,030	
7. 01. 01. 2. 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**37,430,000**	**41,173,000**	
7. 01. 01. 2. 09. 09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Unit	Terpeliharanya Pajak dan Kendaraan Dinas Kantor.		32,115,000	35,326,500	
7. 01. 01. 2. 09. 01	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Terpeliharalah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		25,500,000	28,050,000	
7. 01. 02	**PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										**41,290,000**	**45,419,000**	
7. 01. 02. 2. 01	**Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**										39,190,000	43,109,000	
7. 01. 02. 2. 01. 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	Terciptanya Efektifitas Kegiatan Pemerintah		37,190,000	40,909,000	
7. 01. 02. 2. 04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat**										**2,100,000**	**2,310,000**	
7. 01. 02. 2. 04. 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Bulan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	Terselegaranya Urusan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif		100,000	110,000	

7. 01. 03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										**1,314,800,000**	**1,446,280,000**	
7. 01. 03. 2. 02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**										**1,045,810,000**	**1,150,391,000**	
7. 01. 03. 2. 02. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Bulan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Laporan	Terjadinya Pengendalian Suatu Program Prioritas Untuk Kemajuan Wilayah/Masyarakat		17,400,000	19,140,000	
7. 01. 03. 2. 02. 03	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Bulan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Laporan	Tercapainya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		991,010,000	1,090,111,000	
7. 01. 03. 2. 02. 04	evaluasi kelurahan		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Bulan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan	Terwujudnya Lingkunagan yang Bersih Dan Tertib Administrasi Serta		37,400,000	41,140,000	
7. 01. 03. 2. 02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	6 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	6 Unit	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		90,000,000	99,000,000	
7. 01. 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										**22,985,000**	**25,283,500**	
7. 01 .04. 2. 01	**Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**										**22,985,000**	**25,283,500**	
7. 01. 04. 2. 01. 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Tertib		22,985,000	25,283,500	
7. 01. 05	**PROGRAM PENYELEGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										**26,013,000**	**28,614,300**	
7. 01. 05. 2. 01	**Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum Penugasan Kepala Daerah**										**14,013,000**	**15,414,300**	
7. 01. 05. 2. 01. 02	Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Bulan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Orang	Terselegaranya Regulasi Pelayanan Kepada Masyarakat yang Profesional		13,413,000	14,754,300	
7. 01. 05. 2. 01. .08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	Terselegaranya Kejasama aparatur Pemerintah dengan Masyarakat dalam Membangun Daerah		12,000,000	13,200,000	
7.01.05.2.01. 04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Instrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Kecamatan Ampana kota	Kab. Tojo Una-Una Ampana Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	12 Bulan	Terselegaranya Kerjasama aparatur Pemerintah dengan Masyarakat Dalam Membangun DaerahJumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Terselegaranya Kerjasama aparatur Pemerintah dengan Masyarakat Dalam Membangun Daerah		600,000	660,000	
JUMLAH TOTAL											**7,794,764,187**	**8,574,240,606**	

JUMLAH PAGGU ANGGARAN TAHUN 2023	**2,208,680,080**	**2,120,459,088**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN AMPANA KOTA KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN AMPANA KOTA						**7.669.389.187,00**							**7.874.586.695,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.669.389.187,00**							**7.874.586.695,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.447.291.187,00**							**6.529.668.895,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**B Nilai**		**B Nilai**	**B Nilai**	**6.447.291.187,00**						**B Nilai**	**6.529.668.895,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Presentasi Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	100 %		100 %	100 %	5.623.514.107,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	61 Orang/bulan	5.623.514.107,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan		61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	5.623.514.107,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	61 Orang/bulan	5.623.514.107,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Presentasi Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %		100 %	100 %	188.033.712,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	5 Paket	206.837.083,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	47.087.493,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	5 Paket	51.796.242,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	53.108.759,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	18 Paket	58.419.635,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	60 Paket	10.427.460,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	60 Paket	11.470.206,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		305 Laporan	305 Laporan	77.410.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	305 Laporan	85.151.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Presentasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan*	100 %		100 %	100 %	578.128.368,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Laporan	635.941.205,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	98.079.250,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Laporan	107.887.175,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	18.680.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Laporan	20.548.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

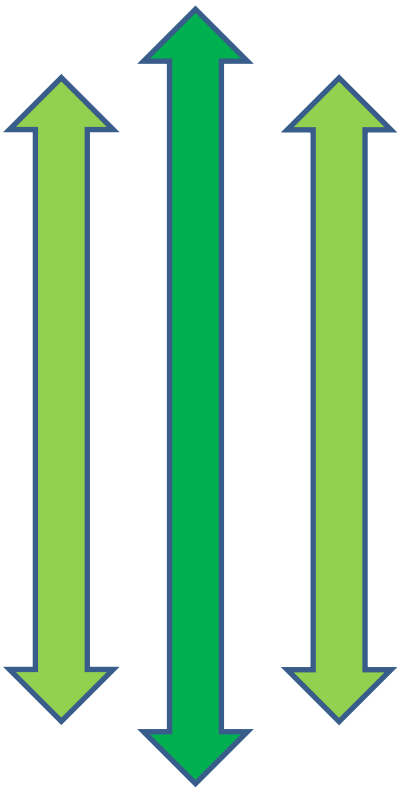
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	461.369.118,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Laporan	507.506.030,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Presentasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan*	100 %		100 %	100 %	57.615.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	5 Unit	63.376.500,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	32.115.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	5 Unit	35.326.500,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	25.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	5 Unit	28.050.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01	**KECAMATAN**						**1.222.098.000,00**							**1.344.917.800,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)***	**90,00 Persen**		**90,00 Persen**	**90,00 Persen**	**37.290.000,00**						**90,00 Persen**	**41.019.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Presentasi Rapat Koordinasi penyelegraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang terlaksana*	100 %		100 %	100 %	37.190.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	40.909.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	37.190.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	40.909.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Presentasi Pelaksanaan Urusan pemerintahan yg dilimpahkan kepada camat*	100 %		100 %	100 %	100.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Laporan	110.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Laporan	110.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai IDM Kecamatan***	**0,7033 Poin**		**0,7033 Poin**	**0,7033 Poin**	**1.135.810.000,00**						**0,7033 Poin**	**1.249.391.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Presentasi Pemberdayaan Kelurahan*	100 %		100 %	100 %	1.135.810.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	50 Lembaga Kemasyarakatan	1.249.391.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50 Lembaga Kemasyarakatan		50 Lembaga Kemasyarakatan	50 Lembaga Kemasyarakatan	17.400.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	50 Lembaga Kemasyarakatan	19.140.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	90.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Unit	99.000.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas		18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	991.010.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	18 Pokmas / Ormas	1.090.111.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	37.400.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	10 Laporan	41.140.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani***	**100,00 Persen**		**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**22.985.000,00**						**100,00 Persen**	**25.283.500,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Presentasi Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib*	100 %		100 %	100 %	22.985.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	24 Laporan	25.283.500,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	22.985.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	24 Laporan	25.283.500,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**100,00 Persen**		**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**26.013.000,00**						**100,00 Persen**	**29.224.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Presentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	100 %		100 %	100 %	26.013.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	2 Orang	29.224.300,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Orang		2 Orang	2 Orang	13.413.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	2 Orang	14.754.300,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2 Orang		2 Orang	2 Orang	600.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	2 Orang	610.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Dokumen	13.860.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
	J U M L A H							**7.669.389.187,00**							**7.874.586.695,00**	

RENCANA KERJA PERUBAHAN
KANTOR KECAMATAN AMPANA TETE
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA – UNA
KECAMATAN AMPANA TETE
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan hal di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu disusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja (Renja OPD).

Renja OPD yang termasuk Kecamatan merupakan dokumen perencanaan Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Kantor Kecamatan Ampana Tete. Renja OPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (ROPD).

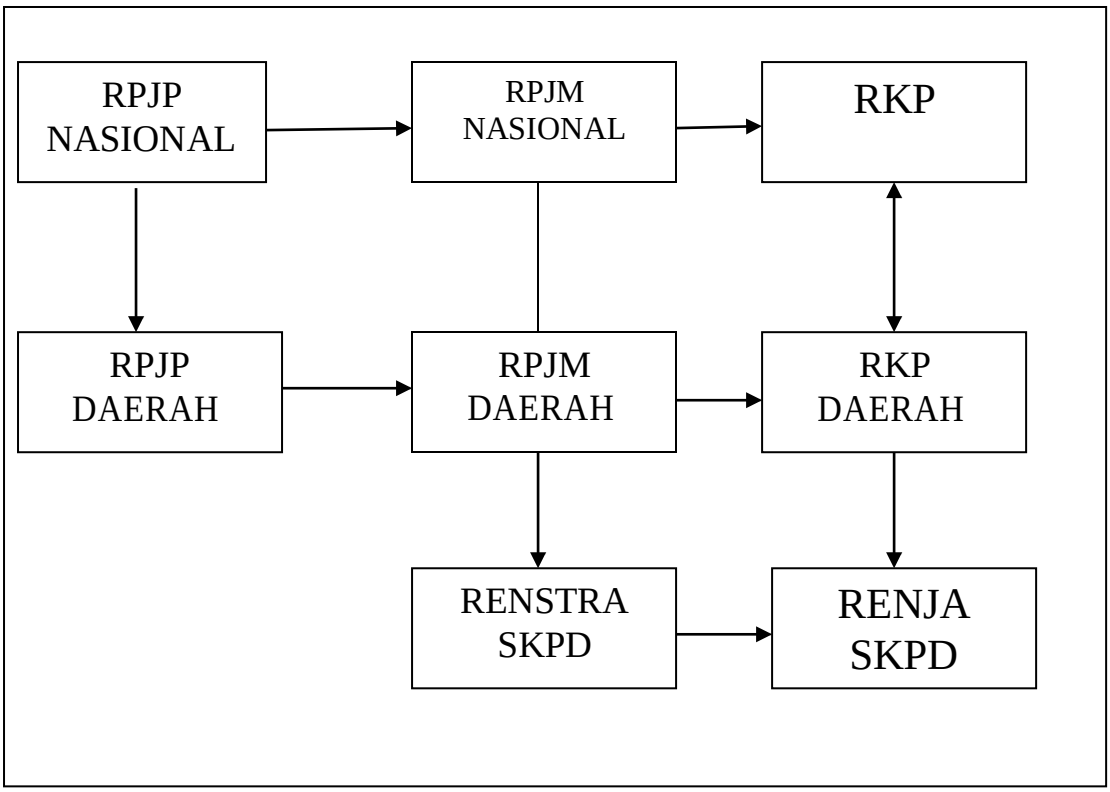
Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan ruang keleluasaan kepada pemerintah daerah khususnya OPD untuk berimprovisasi dalam penentuan proses perencanaan yang lebih bernilai strategis yang hasilnya tidak saja diukur secara konvensional melainkan harus diukur secara komprehensif. Disamping itu desentralisasi lebih menuntut kemandirian pemerintah daerah dan perlu didukung oleh kepabilitas daripada komponen maupun institusi pemerintah daerah.

Oleh sebab itu pemerintah daerah terus berupaya untuk menyempurnakanunit-unit atau Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Sejak pembentukannya Tahun 2005 lalu Pemerintah telah membetuk satuan-satuan kerja daerah sebagai penyelenggara urusan wajib pemerintah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dan pembentukan Kecamatan merupakan hasil Restrukturisasi kelembagaan pada Pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2009.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai implementasi teknis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Proses penyusunan Renja Kecamatan Ampana Tete Tahun 2023 dan mekanisme mengacu pada garis kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Rencana Kerja Kecamatan sebagai dokumen perencanaan pembangunan merupakan dokumen perencanaan yang berlaku 1 (satu) tahun dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan serta berpedoman kepada RPJM Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023.

Bagan 1.1
Kaitan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain



2.1 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ampana Tete Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Unadang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una – Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Tahun 2008 Nomor 35);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Nomor 46 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tojo Una – Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Tahun 2011 Nomor 46):

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Ampana Tete di Wilayah Kabupaten Tojo Una – Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Tahun 2014 Nomor 15);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Tahun 2015 Nomor 11);

24. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten TojoUna-Una Tahun 2016 Nomor).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ampana Tete Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf Kecamatan Ampana Tete dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Ampana Tete Tahun 2024 adalah :

1. Untuk memudahkan seluruh jajaran Aparatur Kecamatan Ampana Tete dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur sejalan dengan RPJMD dan RKPD;

2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Ampana Tete dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional dalam rentang waktu 1 (tahun) tahun;

3. Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan professional berdasarkan indikator kinerja.

1.4 Sistimatika Renja Kecamatan Ampana Tete

Renja Kecamatan Ampana Tete Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.2 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

2.4 Sumber Daya OPD

Bab III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Visi, Misi Kantor Kecamatan Ampana Tete

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SOPD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan.

Secara umum Rencana Kerja Kecamatan Ampana Tete Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra OPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun mendatang. Pada tahun 2022 Kecamatan Ampana Tete telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan yaitu :

1. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024, mulai dari proses musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, musrenbang tingkat Kecamatan dan forum OPD;
2. Menyusun Rencana Strategis OPD;
3. Menyusun Rencana Kerja OPD.

2.2 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, maka batas-batas wilayah, sosiologis dan kultural semakin kabur, hal ini di satu sisi menjadi peluang dalam menunjang pembangunan daerah namun disisi lain laju teknologi dan informasi dapat menjadi ancaman dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dan dalam menjaga kearifan lokal sekaligus meningkatkan pelayanan prima dengan didukung tehnologi mutakhir.

Penyelenggaraan pelayanan publik khusunya diwilayah yang memiliki karakteristik geografis seperti wilayah Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una- una menjadi hal yang penting karena keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan pelayanan publik.

Selain hal tersebut di atas isu SARA yang menjadi Isu Nasional mulai dari Konflik POSO, konflik aliran kepercayaan, serta konflik etnis dan konflik antar kepentingan Politik menjadi Isu strategis yang harus menjadi perhatian dalam ***Menuju Masyarakat Yang Hebat*** di wilayah Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una

Seperti dijelaskan sebelumnya, wilayah Kecamatan Ampana Tete sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan untuk digolongkan ke dalam wilayah rawan bencana sosial, namun demikian warga harus tetap waspada akan kemungkinan terjadinya konflik sosial.

Banyaknya pendatang menyebabkan daerah ini menjadi sangat beragam, baik dilihat dari agama, suku, dan lainnya. Isu yang kerap terjadi dan dapat menyebabkan konflik sosial adalah isu keagamaan. Pada umumnya warga muslim merasa keberatan jika ibadah keagamaan diselenggarakan di rumah warga. Sehingga jika ini terjadi maka dengan berbagai cara warga muslim akan mencegah kegiatan ini.

Berkaitan dengan masalah kenakalan remaja, isu yang kerap terjadi adalah arena Hiburan Malam yang tidak terkontrol oleh adanya minuman keras sehingga memicu adanya kesalahpahaman antar kelompok pemuda, sehingga mudah menyulut terjadinya perkelahian.

KONFLIK SOSIAL

Jenis konflik yang sering terjadi di Kecamatan Ampana Tete adalah konflik horizontal yang melibatkan warga, terutama antar kelompok pemuda di satu desa

maupun antar desa. Serta konflik antar warga yang menganut agama berlainan.

Selain itu beberapa kasus yang terjadi juga mengindikasikan rawan terjadi konflik vertikal, seperti kurangnya sosialisasi berbagai Peraturan Pemerintah seperti implementasi kebijakan penerapan perda penertiban ternak, dan lainnya. Kondisi ini dinilai masyarakat akan menimbulkan konflik sosial dimasa yang akan datang.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah konflik sosial Oleh Kecamatan adalah :

a) Silaturahmi antar warga masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan di semua bidang;
b) Pertemuan rutin antar aparat pemerintahan, ulama, dan tokoh masyarakat untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Hambatan yang mungkin dihadapi warga dalam menangani masalah konflik adalah :

1. Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
2. Keterbatasan dana untuk mengatasi masalah;
3. Kurang memadainya sumber daya manusia dalam menangani masalah;
4. Kinerja aparat keamanan khususnya polsek, koramil dan pol PP dan warga masyarakat lebih ditingkatkan.

TIPOLOGI KONFLIK YANG ADA DI KECAMATAN WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA :

a. Horizontal : antara masyarakat dengan masyarakat;
b. Vertikal : antara masyarakat dengan negara/pemerintah;
c. Diagonal : antara masyarakat dengan masyarakat dan dengan pemerintah.

1. Konflik Agraria;
2. Konflik wilayah dan Perbatasan *(Termasuk Isu Pemekaran wilayah ragam tingkatan);*
3. Konflik Kebijakan (akibat ketidakmerataan Pembangunan dan Penegakan hukum dan Kebijakan yang tidak jelas);
4. Konflik Identitas Kelompok (Suku/Agama/antar aliran Agama);
5. Konflik Politik (Ketidakpuasan Powersharing Politik baik dalam jabatan pemerintahan maupun tokoh masyarakat);
6. Konflik Ekonomi (ketidakmerataan atas akses pemanfaatan potensi sumberdaya ekonomi lokal).

SUMBER KONFLIK :

1. **Persoalan Distribusi Sumber daya yang tidak adil/Merata**, menyangkut:
   a. terjadinya jurang yang lebar perbedaan keadaan tingkat kesejahteraan ekonomi;
   b. Perbedaan tingkat pendidikan *(kualitas SDM);*
   c. Ketidak adilan dan ketidakmerataan akses politik,;
   d. Ketiadaan akses terhadap keadilan dan Hukum;
   e. Perbedaan dalam akses terhadap pengelolaan Pemerintahan dan pembangunan;
   f. serta Perbedaan tingkat kesejehtaraan dan pembagunan antara Wilayah Desa dan Kelurahan.

ALTERNATIF SOLUSI:

1) adanya Kebijakan yang menjamin terciptanya pemerataan pembangunan baik antar wilayah, sektor, maupun antar kelompok/golongan;
2) Adanya Kebijakan yang menjamin adanya keadilan dalam akses politik, pemerintahan, pengelolaan sumberdaya lokal dan pengembangan SDM serta mendorong penegakan hukum yang adil untuk semua.

2. **Persoalan Identitas** *(Penguatan Rasa berbeda Identitas terutama agama dan suku, pendatang dan orang asli)* manakala:
   a. kelompok yang satu lebih dominan dari yang lain;
   b. Kelompok yang satu lebih menguasai;
   c. Kelompok yang satu lebih sejahtera dari yang lainnya;
   d. Hal ini akan membuka ruang terjadinya pemahaman atas adanya penindasan dan pelecehan eksistensi identitas dari kelompok yang satu dengan yang lain, atau kelompok yang besar karena merasa kuat selalu mengeksploitasi dan memandang enteng/rendah kelompok yang lain;
   e. Peran dan nilai dari institusi lokal (adat) kurang dioptimalkan.

ALTERNATIF SOLUSI:

1) Menciptakan rasa saling menghargai, solidaritas dan empathy sosial yang kuat dengan mendorong terbentuknya forum-forum dialog dan kerjasama antar kelompok;

2) *Menumbuhkembangkan peran dan media komunikasi institusional lokal/adat;*
3) *Mengembangkan pendidikan kritis, pendidikan kebangsaan/kewargaan dan multikultural pada semua lapisan dan komponen masyarakat.*

3. **Distorsi Informasi dan Komunikasi**, kurang lancarnya komunikasi lintas kelompok/kultural, antara pemerintah dan masyarakat sehingga :
   a. mempertajam segregasi *(Pemilahan-milahan)* masyarakat berdasarkan identitas;
   b. melemahnya rasa saling kenal dan solidaritas;
   c. menguatnya prasangka negatif satu sama lainnya;
   d. Pada sisi lain keberadaan informasi tentang sesuatu hal atau kondisi masing-masing pihak sering mengalami distorsi/sengaja dipolitisasi *(provokasi)*, sehingga masing-masing pihak tidak memahami secara jelas dan benar tentang sesuatu hal atau kondisi kelompok lainnya.

ALTERNATIF SOLUSI:

1) *Membangun Komunikasi Sosial secara timbal balik intra/inter kelompok/golongan serta antara kelompok dengan pemerintah Daerah baik secara periodik maupun insidentil;*
2) *Mendorong kerja-kerja media massa yang untuk senantiasa menjadi pers pendidikan dan pers perdamaian (Peace jurnalism);*
3) *Pelaksanaan pemeruintahan yang benar-benar transparan dan akuntabel.*

4. **Kebijakan dan Manajemen pemerintahan yang kurang baik**.**Yang ditandai adanya:**
   a. Proses Pembuatan Kebijakan publik yang tidak partisipatif;
   b. kebijakan publik yang diskriminatif serta tidak peka terhadap keberagaman, kebutuhan dan nilai-nilai lokal;
   c. Kepemimpinan Birokrasi yang tidak dekat, tidak santun dan kurang adil dan perduli terhadap rakyat;
   d. Prilaku politisi dan birokrasi lokal yang arogan, kental KKN, otoriter, tidak simpati dan suka menggunakan cara kekerasan *(baik tutur kata maupun tindakan);*

e. Kebijakan Pembangunan yang kurang memperhatikan pemerataan pembangunan antar wilayah, antar sektor ataupun antar kelompok dalam masyarakat;
f. Rekruitmen politik, rekruitmen dan promosi aparat birokrasi yang kurang memperhatikan keragaman kelompok dan kebutuhan local;
g. Kebijakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai kearifan local;
h. Belum adanya Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi keadaan Krisis (tidak ada data Peta Kerawanan Konflik dan Sistem Siaga Dini).
i. Pelayanan publik yang belum optimal.

ALTERNATIF SOLUSI:

1) Melaksanakan Prinsip-prinsip Good Government secara optimal;
2) Mendorong proses dan subtansi Kebijakan publik yang partisipatif, sensitif terhadap: konflik/Bencana, Pemerataan antar wilayah/sektor dan kelompok, gender, lingkungan, keberagaman dan HAM pada semua sektor dan oleh setiap instasi Pemerintahan yang ada di daerah termasuk penerapan Peace trough Development (PTD) dalam sistem Perencanaan Pembangunan daera;
3) Mendorong pengembangan dan penerapan sistem kaderisasi bangsa yang ada di daerah, baik di dunia politik, birokrasi maupun swasta dalam suatu *master plan perencanann SDM Daerah* yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, nasional dan globalisasi baik penjenjangan pendidikan formal, fungsional, ketrampilan serta keterkaitannya dengan kebutuhan lapangan kerja serta kompetensi dan profesionalitas Birokrasi di Daerah;
4) Membentuk karakter dan figur kepemimpinan birokrasi publik daerah yang profesional, bertanggungjawab, memiliki integritas moral dan kebangsaan, rendah hati, dekat, tahu dan perduli dengan pesoalan rakyat.
5) Mendorong terciptanya dan terpeliharanya Sistem Pelayanan Publik yang berkualitas;
6) Pengembangan Sistem Informasi Kerawanan Konflik dan Sistem Siaga Dini;
7) Memasyarakatkan Pendidikan Multikulural/keberagaman dan Budaya perdamaian pada semua lapisan masyarakat termasuk menjadikannya kurikulum dalam institusi pendidikan di Kabupaten Tojo Una-Una.

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

2.3.1 A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 18 tahun 2009 tentang uraian tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, bahwa Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal pokok yaitu melakukan penyelenggaraan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan di bidang Pemerintahan, Pembangunan di wilayah Kecamatan;
b. Pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan pelimpahan sebagai kewenangan Pemerintahan dari Bupati;
c. Pengendalian atas penyelenggaraan program pembangunan dan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
d. Perumusan teknik mengenai penyelenggaraan tugas dibidang perekonomian, produksi, distribusi, pembinaan sosial, keorganisasian dan pembinaan Politik serta keamanan di wilayah Kecamatan;
e. Laporan dan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Kantor Kecamatan Ampana Tete memiliki struktur sebagai berikut :

- **Camat**
- **Sekretaris Kecamatan, membawahi:**
  1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset;
  2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- **Seksi Pemerintahan;**
- **Seksi Ketentraman dan Ketertiban;**
- **Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;**
- **Seksi Ekonomi dan Pembangunan** ;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

- Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Seksi di bawah Camat Ampana Tete mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. **Sekretaris Kecamatan**

   Tugas Pokok :

   Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dalam penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, penyusunan program, pengelolaan keuangan dan aset serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum.

   Fungsi :

   - Merencanakan operasional penyelenggaraan kegiatan di bidang Kesekretariatan Kecamatan;
   - Mendistribusikan tugas penyelenggaraan kegiatan dibidang Kesekretariatan Kecamatan;
   - Memberi petunjuk operasional atas penyelenggaraan kegiatan di bidang Kesekretariatan Kecamatan;
   - Mengevaluasi penyelenggaraan program di bidang Kesekretariatan Kecamatan;
   - Melakukan Pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan kegiatan pada masing-masing seksi;
   - Melaksanakan pembinaan organisasi melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur kecamatan;
   - Pengelolaan administrasi dan aset-aset kecamatan;
   - Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas di bidangkesekretariatan kecamatan; dan
   - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisanmaupun tertulis.

Sekretaris Kecamatan terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset

Tugas Pokok :

Sub Bagian Penyusun Progam, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi, menganalisis serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan di bidang penyusun program, keuangan dan aset.

Fungsi :

- Mengelola administrasi, menyiapkan dan menghimpun bahan dan data pada seksi dalam rangka penyusunan program, keuangan dan aset tahuanan Kecamatan;
- Menyiapkan dan menghimpun bahan penyusunan perencanaan strategis Kecamatan;
- Menyiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang penyusun program, keuangan dan aset Kecamatan;
- Menyusun laporan tahunan (LAKIP, LKPJ, LPPD, LKPD) serta dokumen lainnya yang diwajibkan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- Menyusun, mengelola dan menganalisa sumber-sumber pendapatan dinas dan pengeluaran keuangan serta perlengkapan dan aset Kecamatan;
- Melaksanakan penyelenggaraan pembukuan keuangan kecamatan;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugasSub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset;
- Menimbang pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan Dan Aset;
- Mengkoordinasikan hasil penyusunan dan program kecamatan kepada seksi melalui Sekretaris Kecamatan;
- Melakukan evaluasi dan pelaporan atas penyusunan perencanaan dan program kecamatan;
- Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan Melakukan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.2 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tugas Pokok:

Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi serta menyelengarakan kegiatan pengelolaan naskah dinas, perlengkapan rumah tangga, kebersihan, keamanan dan ketertiban serta administrasi kepegawaian.

Fungsi:

- Mengelola administrasi, menyusun rencana kerja tahunan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- Menyiapkan bahan dan data, membuat usulan rencana program serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- Menghimpun peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan penyusunan program serta mengumpulkan data dan melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Kecamatan;
- Menyiapkan bahan dan data , mengkasifikasikan serta menganalisis penataan kepegawaiaan;
- Menyiapkan bahan dan data serta membuat usulan pembuatan kartu pegawai (KARPEG), Kartu TASPEN, Asuransi kesehatan (ASKES), Kartu Suami/Istri (KARSU/KARSI);
- Menyiapkan bahan dan data serta usulan peralihan status dari CPNS menjadi PNS;
- Menyiapkan bahan dan data serta usulan formasi/jabatan CPNS, mutasi pegawai dan mutasi jabatan wilayah kerja (TOUR OF AREA) maupun mutasi jabatan antara unit kerja (TOUR OF DUTY);
- Menyiapkan bahan dan data serta membuat daftar susunan jabatan (DSJ), daftar susunan pegawai (DSP);
- Menyiapkan bahan dan data peraturan perundang-undangan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan pembinaan disiplin pegawai dan menghimpun daftar hadir dan daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan;
- Menyiapkan buku mutasi, daftar urut kepangkatan (DUK), mengupayakan kesejahteraan pegawai dan menghimpun lporan Pembayaran Pajak Penghasilan(LP2P);
- Menyiapkan bahan dan data pegawai yang ikut program tugas belajar, Izin belajar dan cuti pegawai;

- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.3 Seksi Pemerintahan.

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan pembinaan, perumusan kebijakan, merumuskan program dan melakukan pemantauan terhadap penyelengaraan kegiatan di bidang pemerintahan meliputi Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kependudukan, Catatan Sipil, Perwakilan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

Fungsi :

a. Mengelola administrasi, menyusun rencana kerja tahunan Seksi Pemerintahan;
b. Perumusan program kerja dan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan;
c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan;
d. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan;
e. Pengendalian atas pelaksanaan program di bidang Pemerintahan;
f. Perumusan kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan;
g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan pada wilayah Desa/Kelurahan;
h. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan di bidang pemerintahan Baik secara lisan maupun tertulis.

1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan pembinaan, perumusan kebijakan, merumuskan program dan melakukan pemantauan serta evaluasi tehadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban.

Fungsi :

a. Mengelola administrasi, menyusun rencana kerja tahuan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
b. Perumusan program kerja dan kebijakan teknis di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
d. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
e. Pengendalian atas pelaksanaan program di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
f. Perumusan kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban pada wilayah Desa/Kelurahan;
h. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan di bidang Ketentraman dan Ketertiban baik secara lisan maupun tertulis.

1.5 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokok :

Menghimpun bahan pembinaan, perumusan kebijakan, merumuskan program, dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap penyelengaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Fungsi :

- Mengelola administrasi, menyusun rencana kerja tahunan Seksi PemberdayaanMasyarakat;

- Perumusan program kerja dan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Pembinaan teknis atau penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Pengendalian atas pelaksanaan program di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Perumusan kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Melakukan pemantuan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidangPemberdayaan Masyarakat pada wilayah Desa/Kelurahan;
- Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas di bidangPemberdayaan Masyarakat; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan di bidang Pemberdayaan Masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.

1,6 Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Tugas Pokok :

Menghimpun bahan pembinaan, perumusan kebijakan, merumuskan program dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Fungsi

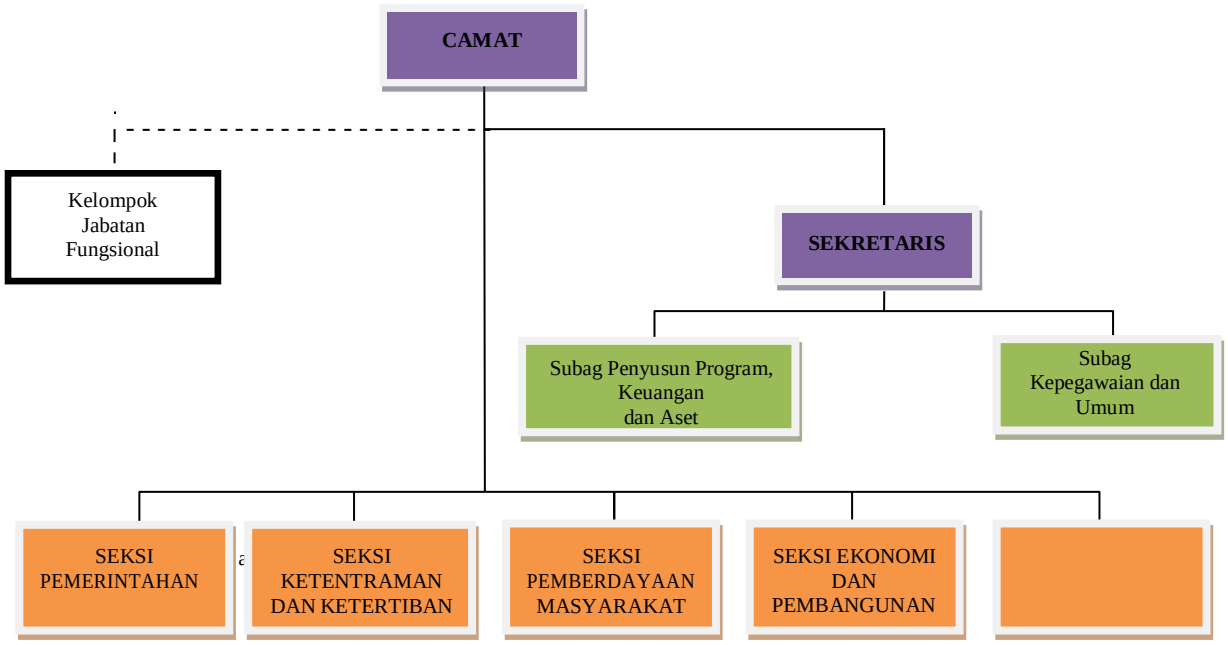
a. Mengelola administrasi, menyusun rencana kerja tahunan Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
b. Perumusan program kerja dan kebijakan teknis di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan pelaksanaan tugas di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
d. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan tugas di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
e. Pengendalian atas pelaksanaan program di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
f. Perumusan kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan tugas di bidang Ekonomi dan Pembangunan;

g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
h. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan di bidang Ekonomi dan Pembangunan baik secara lisan maupun tertulis.

2.3.1.B Struktur Organisasi

Gambar

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KECAMATAN ANPANA TETE
(TYPEB) KABUPATEN TOJO UNA-UNA



Sumber: Kantor Kecamatan Ampana Tete
Tahun 2024

2.4 Sumber Daya SKPD

a. Susunan Kepegawaian/SDM

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya yang berkaitan dengan keadaan Pegawai pada Kantor Camat Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una adalah sebagai berikut :

2.1.1. Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai posisi Januari 2024 sebanyak 29 orang yang terdiri dari : 17 orang Pegawai Organik dan 12 orang tenaga honorer/sukarela, kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4.1

Tingkat Pendidikan Pegawai

No.	Pendidikan	Organik	Non Organik		Jumlah
			Honorer	Sukarela	
1.	S2	2	-	-	2
2.	S1	12	2	-	14
3.	D3	-	2	-	2
4.	SLTA	11	11	-	21
5.	SLTP	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-
	T o t a l	**25**	**14**	**-**	**39**

Sumber: Kepegawaian Kantor Kecamatan Tahun 2024

2.1.2. Kualifikasi Penjenjangan Struktural :

- SPAMA / PIM II : -
- SPAMA / PIM III : 1 Orang
- ADUM/ PIM IV : 5 Orang

2.2.3. Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan :

Untuk keadaan pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.4.2.

Kualifikasi Golongan Pegawai

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	IV	3	
2.	III	12	
3.	II	10	
4.	I	-	
	Jumlah	**25**	

Sumber: Kepegawaian Kantor Camat Ampana Tete Tahun 2024

Tabel 2.4.3

Jabatan dan Jumlah Pegawai

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Camat	1 Orang	Eselon III
2.	Sekretaris	1 Orang	Eselon IV
3.	Kasi	4 Orang	Eselon IV
4.	Kasubag	2 Orang	Eselon IV
	Jumlah	**8 orang**	

Sumber: Kepegawaian Kantor Camat Ampana Tete Tahun 2024

Tabel 2.4.4

Esselon dan Jumlah Pegawai

Pegawai	Posisi per 01/01/2024
Eselon III	1 orang
Eselon IV	7 orang
Staf	17 orang
Honorer / Suka rela	14 orang
Jumlah	**39 Orang**

Sumber: Kepegawaian Kantor Kecamatan Ampana Tete Tahun 2024

b. **Sarana & Prasarana Penunjang**

Dalam melaksnakan Tugas Pokok dan Fungsinya selain Sumber Daya Manusia , sarana dan prasarana penunjang mutlak diperlukan oleh Kecamatan Ampana Tete agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. Adapaun daftar Inventaris/ sarana dan prasarana bagi aparatur Kecamatan Ampana Tete yang diperoleh mulai tahun 2015-2024 adalah sebagai berikut:

No.	DAFTAR BARANG INVENTARIS			Keterangan
	Nama/Jenis	Merk	Jumlah	
1	2	3	4	5
	Mobil	Toyota Hilux	1	**Baik**
	Mobil	Toyota Avanza	1	**Baik**
	Motor	Suzuki Tander	1	**Baik**
	Motor	Mio Soul	1	**Baik**
	Motor	Jupiter MX	1	**Baik**
	Motor	Honda Fario	1	**Sedang Rusak**
	Motor	Suzuki Smas	1	**Baik**
1	2	3	4	5
	Laptop	Asus & Lenovo	5	**Baik**
	Computer	Hp & Lenovo	4	**Baik**
	Printer	Epson	2	**Baik**
	Printer	Canon	5	**Baik**
	AC	Gree	2	**Baik**
	Sound System	DAT	1	**Baik**
	Kamera Digital	Sony	1	**Baik**
	Dispenser		2	**Rusak**
	Brankas	-	1	**Rusak**

	Infokus	-	1	**Rusak**
	SSB/Rig/Antena/Power	1 Paket	1	**Rusak**
	Suplai	-	-	
	HT	-	1	**Baik**
	Mesin Ketik	Brother	1	**Rusak**
	Toa	-	1	**Baik**
	Kursi	Sova	2	**Baik**
	kursi plastic	Nappolli	30	**Baik**
	Kursi Hitam	Citos	30	**Baik**
	Kursi Tunggu	-	1	**Baik**
	Papan Data	-	3	**Baik**
	Meja	-	15	**Baik**
	Lemari	-	8	**Baik**
	Vacum Cleaner	-	2	**Baik**
	Exchauspan	-	2	**Baik**
	Kipas Angin	Nikkon	2	**Baik**
	Mesin Rumput	Yasuka	2	**Rusak**
	Ampli Fire	Dat	1	**Baik**

Sumber: Kantor Kecamatan Ampana Tete Tahun 2024

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Visi, Misi Kantor Kecamatan Ampana Tete

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana OPD yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una harus di bawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Kantor Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una menjabarkan Visi sebagai berikut :



Untuk mencapai Visi yang ada, maka perlu dijabarkan kedalam Misi sebagai implementasi dari visi itu sendiri. Misi yang akan di usung Kantor Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

MISI 1	Membangun pelayanan kepada Masyarakat dengan berdasarkan sendi – sendi Pelayanan Prima.
MISI 2	Meningkatkan kemampuan aparatur dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan.

MISI 3	Menciptakan standar prosedur pelayanan yang mampu menampung aspirasi baik kebutuhan masyarakat dan kebutuhan regulasi yang ada.
MISI 4	Menciptakan komunikasi yang efektif kepada masyarakat dan Menciptakan jaringan dengan stokholder untuk meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat,

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan Kantor Camat Ampana Tete untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Hakekat yang ingin dicapai oleh visi, misi di atas adalah :

1. Mendorong Pemerintah yang Hebat dan GOOD GOVERNANCE dengan Meningkatkan Pelayanan Kecamatan, Kelurahan dan Desa kepada Masyarakat;
2. Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kepada Masyarakat dengan meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kecamatan;
3. Meningkatnya Disiplin Aparatur Kecamatan;
4. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Kecamatan;
5. Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan pada masyarakat.

Sasaran Kantor Camat Ampana Tete merupakan bagian integral dalam proses perencanaan yang matang untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh pada satuan kerjadi lingkungan Kantor Kecamatan Ampana Tete. Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait dijabarkan sebagai berikut:

a. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran kepada masyarakat;
b. Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur;
c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
d. Terciptanya pelayanan pemerintahan dan pembangunan pada masyarakat.

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	7 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali
			Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan		20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali
			Tersedianya pengelolaan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			Meningkatnya pelayanan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
2	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Bertambahnya perlengkapan gedung kantor	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn
			Bertambahnya peralatan gedung kantor	8 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1 Unit
			Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			Terpeliharanya kendaraan dinas/oprasional	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
3	Meningkatnya pelayanan pemerintah an dan pembangunan pada masyarakat	Terciptanya pelayanan pemerintahan dan pembanguna n pada masyarakat	Tersedianya fasilitas pada kegiatan penertiban ternak/miras	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 keg
			Tersedianya fasilitas pada kegiatan pembinaan keagamaan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Tersedianya fasilitas pada kegiatan lomba desa/kelurahan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Tersedianya fasiitas pada kegiatan bulan bhakti gotong royong	11 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Tersedianya fasilitas pada kegiatan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
			musrembang					
			Tersedianya fasilitas pada kegiatan PKK	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan secara terpadu	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Tersedianya fasilitas pada kegiatan kamtibmas dan teritorial	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Tersedianya fasilitas pada kegiatan penyelenggaraan MTQ / STQ	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Tersedianya fasilitas pada kegiatan festival bahari togean	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Tersedianya fasilitas pada pemilihan kepala desa	1 Keg	1Keg	1 Keg	1 Keg	1 keg
			Tersedianya fasilitas pada Pembinaan Olahraga	1 Keg	1Keg	1 Keg	1 Keg	1 keg
			Tersedianya fasilitas pada Pemberdayaan Masyarakat	1 Keg	1Keg	1 Keg	1 Keg	1 keg
			Tersedianya fasilitas pada Lomba Kelurahan	1 Keg	1Keg	1 Keg	1 Keg	1 keg

Sumber: Kantor Kecamatan Ampana Tete Tahun 2023

3.3 Proram dan Kegiatan

Program disusun sebagai management plant (rencana pengelolaan) dari upaya mewujudkan visi OPD. Untuk itu langkah awal yang dilakukan adalah menyusun kebijakan operasional sebagai payung dari program dan kegiatan itu sendiri. Dengan demikian kegiatan yang disusun dapat lebih operasional sehingga Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran dapat terealisir. Program dan kegiatan disusun dalam periode 5 (lima) tahun yang dibagi dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan prioritas program itu sendiri untuk dapat mencapai visi. Adapun kebijakan sebagaimana tertuang dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun kedepan.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan : Meningkatkan pelayanan adminstrasi perkantoran;

Sasaran : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran kepada Masyarakat.

❖ **Progam ini mempunyai agenda kegiatan sebagai berikut :**

1. Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah;
2. Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah;
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran;
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Tujuan : Meningkatkan sarana penunjang pelayanan kemasyarakatan;

Sasaran : adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Administrasi kepada Masyarakat.

❖ **Program ini mempunyai agenda kegiatan sebagai berikut :**

1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor;
2. Pengadaan Gengset Kantor Camat Ampana Tete
3. Pengadaan Wifi Kantor;
4. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Kantor;
5. Perencanaan Exterior Gedung Kantor;
6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

7. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor;
8. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan monitoring penyelenggaran pemerintahan lingkup Kecamatan Ampana Tete dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penertiban Ternak dan Miras;
2. Kegiatan Pembinaan Keagamaan;
3. Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan;
4. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong;
5. Kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan;
6. Kegiatan PKK Kecamatan;
7. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu;
8. Kegiatan Monitoring Pemb. Anggaran Desa;
9. Kegiatan Pembinaan Kantibmas dan Teritorial;
10. Kegiatan STQ/MTQ Tingkat kecamatan;
11. Kegiatan Festival Bahari Togean;
12. Kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
13. Kegiatan Lomba Kelurahan;
14. Kegiatan Pembinaan Olahraga;
15. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ampana Tete Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una, serta rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

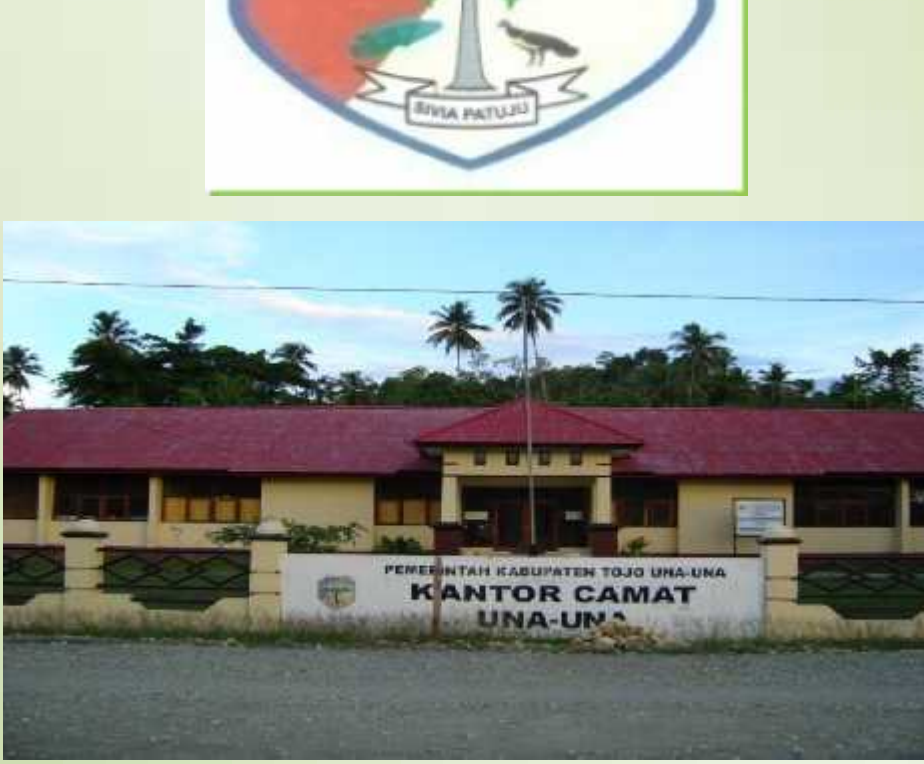
Rencana Kerja tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Ampana Tete. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Kecamatan Ampana Tete, penyusunan Rencana Kerja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di dalam Kecamatan Ampana Tete maupun di lingkup daerah.

Akhirnya, dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ampana Tete Tahun 2024 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RPJMD dan RKPD yang akan sekaligus mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2021-2026.

Ampana Tete, Maret 2024
CAMAT AMPANA TETE

ASRIN W. SOGA, S.Pd.I., MAP
Pembina IV/a
NIP. 19800406 200801 1 005

RENCANA KERJA
(RENJA)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)



KANTOR CAMAT UNA-UNA
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KECAMATAN UNA-UNA
Jln. Tadulako No. 243 Wakai Kode Pos 94691

SURAT KEPUTUSAN CAMAT UNA-UNA
KABUPATEN TOJO UNA – UNA
Nomor : 188.45 / /Unas

T E N T A N G
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN UNA-UNA (RENJA OPD KEC.UNA-UNA) KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

CAMAT UNA-UNA MEMUTUSKAN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2024 ;
b. bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD memuat arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanankan pembangunan daerah yang berkesinambungan ;
c. bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2024 memuat program / Kegiatan pembangunan SKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lemabaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

7. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
8. Peraturan Presiden republik indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menegah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan perturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulteng Tahun 2011-2016 (Lemabaran Daerah Propinsi Sulteng Tahun 2011 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor Tahun 2024 tentang rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024

Memperhatikan **:** Peraturan Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Una-Una Tahun 2024, yang selanjutnya disebut (Renja SKPD) Tahun 2024, adalah Dokumen Program / kegiatan periode 1 (satu) Tahun.

KEDUA : Renja SKPD Kecamatan Una-Una Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Bab 1 PENDAHULUAN.
b. Bab 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA.
c. Bab 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.
   Bab 4 PENUTUP.

KETIGA : Renja SKPD Kecamatan Una-Una Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 27 Tahun 2015 yang memuat Program / kegiatan, Indikator kinerja, lokasi kegiatan, Target pencapaian kinerja dan pagu indikatif.

putusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wakai
Pada Tanggal : 01 Maret 2023

CAMAT UNA-UNA

SABRIN ABD KARIM.S.Pd
Pembina IV/a
Nip.19780401 200312 1 010

LAMPIRAN **KEPUTUSAN CAMAT UNA-UNA**
Nomor :
Tanggal : 01 Maret 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA)
Kantor Camat Una-Una Tahun 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
PADA KANTOR CAMAT UNA-UNA
KABUPATEN TOJO UNA – UNA

Ketua Tim : **CAMAT UNA-UNA**
Sekretaris Tim : **SEKERTARIS KECAMATAN UNA-UNA**
Anggota : **KASUBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASSET**
Anggota : **RAHMAT.R.SE** (Operator Subag Perencanaan)
Kelompok Kerja:

1. **Seksi Pemerintahan**
   Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan
2. **Seksi Pemberdayaan**
   Koordinator : Kepala Seksi Pemberdayaan
3. **Seksi Trantib**
   Koordinator : Kepala Seksi Trantib
4. **Seksi Ekbang**
   Koordinator : Kepala Seksi Ekbang
5. **Seksi Kesos**
   Koordinator : Kepala Seksi Kesos

Ditetapkan di : Wakai
Pada Tanggal : 01 Maret 2023
CAMAT UNA-UNA

SABRIN ABD.KARIM.S.Pd
Pembina IV/a
Nip. 19780401 200312 1 010

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Una-Una Kabupaten TojoUna-Una Tahun 2024 merupakan kerangka kerja tahunan Kantor Camat Una-Una sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang berbasis lingkungan di Kabupaten Tojo Una-una dan akan menjadi bahan pembahasan dalam forum OPD yang menjadi acuan dalam Pelaksanaan Musrembang RKPD Tahun 2024. Renja ini mengacu pada Dokumen Renstra Kecamatan Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021- 2026.

Untuk itu kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya baik sejak pengumpulan data, pengolahan data sampai pada penyusunan naskah RENJA ini disampaikan ucapan terima kasih.

Semoga RENJA ini dapat bermanfaat untuk pembangunan Kantor Camat Una-Una di Kabupaten Tojo Una-Una.

Wakai, 01 Maret 2023
CAMAT UNA-UNA

SABRIN S.ABD.KARIM.S.Pd
Pembina
NIP. 19780401 200312 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iii
I.	PENDAHULUAN		
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Landasan Hukum	1
	C.	Maksud dan Tujuan	4
	D.	Sistimatika Penulisan	5
II.	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN UNA-UNA TAHUN LALU		6
	A.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Una-Una Tahun 2023 Serta Capaian Renstra OPD Kantor Camat Una-Una	6
	B.	Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kantor Camat Una-Una	10
	C.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan OPD Kantor Camat Una-Una	13
	D.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kantor Camat Una-Una	13
	E.	Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
III.	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		17
	A.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……	17
	B.	Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Camat Una-Una……	18
	C.	Program dan Kegiatan ……..	18
IV.	PENUTUP		23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undan- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumusan dalam rancangan awal RKPD.

Kecamatan Una-Una sebagai unit kerja Pemerintahan yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan Kantor Camat Una-Una yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Kecamatan Una-Una ,maka disusunlah Renja Kantor Camat Una-Una tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan OPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra OPD yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Kantor Camat Una-Una sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
7. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
8. Peraturan Presiden republik indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menegah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan perturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor ……. Tahun 2023 tentang rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kantor Camat Una-Una tahun 2024 Kabupaten Tojo Una-Una

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kantor Camat Una-Una untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan sesuai dengan posisi Tupoksi Kecamatan sebagai perpanjang tangan dari Bupati

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kantor Camat Una-Una dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kantor Camat Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renjadan sistematika penulisandokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD), analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta Program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN UNA-UNA TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN UNA-UNA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD Kantor Camat Una-Una berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan OPD Kantor Camat Una-Una.Keberhasilankinerja OPD dapatdilihatdaripencapaianindikatordan yang telah ditetapkan Hasil keberhasilan kinerja pelayanan OPD Kantor Camat Una-Una dapat dilihat pada table berikut ini:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA-OPD)

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN OPD

Identifikasi Permasalahan

Kantor Camat Una-Una sebagai OPD yang memiliki *leading sector* dalam bidang penyelenggaraan Pelayanan Publik,Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta Pengendali atas penyelenggaraan Pembangunan dan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan, tidak terlepas dari berbagai permasalahan strategis terkait dengan karakteristik wilayah KecamatanUna-Una yang merupakan wilayah kepulauan, antara lain:

- **Kondisi Geografis**

  Kondisi geografis Kecamatan Una-UnaKabupaten Tojo Una-Una yang merupakan wilayah Kepulauan sekaligus Daerah rawan bencana, menjadi kendala dalam memantau secara intens setiap detail wilayahnya, karena setiap wilayah khususnya di wilayah kepulauan menjadi titik yang rawan terhadap Gangguan, baik gangguan Keamanan dan Bencana Alam serta Pengrusakan lingkungan

- **Kondisi Sosiologis**

  Masyarakat Kecamatan Una-Una secara sociocultural merupakan masyarakat yang heterogen yang terdiri dari berbagai macam suku, agama,ras dan budaya. Hal ini di satu sisi menjadi suatu potensi kekayaan Budaya Daerah, namun disisi lain menyimpan potensi konflik, apabila tidak dikelola dengan baik.

- **Kurangnya SDM**

  Secara Internal kendala yang dihadapi adalah kurangnya SDM aparatur pengelola kegiatan dalam Wilayah Kecamatan Una-Una, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan sering terjadi dismanagement dan capaian kinerja tidak maksimal

- **Minimnya Sumber Pembiayaan**

  - Minimnya APBD dalam lingkup OPD Kantor CamatUna-Una Tahun Anggaran 2010-2015 menyebabkan minimnya kegiatan, khususnya Pelayanan, Pemantauan dan Monitoring serta Evaluasiterhadap Pelayanan Pemerintahan Desa dan situasi Kantramtibmas di seluruh wilayah dalam lingkup Kecamatan Una-Una
  - Kurang sinkronnya proses Perencanaan dan Penetapan anggaran antara DPRD dan TAPD menyebabkan beberapa kegiatan penting sebagaimana hal diatas tidak dapat terakomodir
  - Belum Maksimalnya Dokumen Renstra sebagai Master Plan OPD Kantor CamatUna-Una menyebabkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya mencapai target yang di harapkan

- Kurangnya lapangan kerja dan Pengganguran

  Kurangnya lapangan kerja, menyebabkan banyak masyarakat terutama warga

  pendatang yang mencari nafkan serabutan, seperti tukang batu, buruh dan menjadi ojek. Yang merupakan profesi sambilan karena kurangnya pendapatan dan lapangan kerja serta modal usaha di dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

  Mudahnya para remaja terpengaruh oleh orang lain, disebabkan karena mereka menganggur, tidak memiliki kegiatan positif, sehingga waktu luang yang adad isi

  Oleh hal-hal yang seringkali menimbulkan masalah perkelahianan tarkelompok, antar remaja desa.

- **Kenakalan remaja dan tingkat pendidikan**

  Meningkatnya angka kenakalan remaja, juga disebabkan oleh gaya hidup yang berubah. Kenakalan remaja teruta mabanyak terjadi ketika ada keramaian tertentu, misalnya ketika ada pentas olahraga, pentas musik, perayaan perkawinan, dan sebagainya. Jenis kenakalan remaja yang terjadi biasanya dalam bentuk perkelahian dan tawuranan tar warga. Minimimnya pendidikan masyarakat juga sebagai penyebab timbulnya kenakalan remaja.

  Rendahnya tingkat pendidikkan menjadi pangkal dari kemungkinan terjadinya masalah di Kecamatan Dengan tingkat pendidikkan yang rendah, banyak masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk hidup layak sehingga dapat memicu melakukan apapun untuk dapat bertahan hidup misalnya pencurian.

- Ketidakadilan

  Terbatasnya sarana ibadah untuk non muslim menyebabkan agama tertentu menyelenggarakan ibadah keagamaan di rumah warga. Kegiatan ini seringkali di curigai sebagai upaya menyebarkan agama tertentu sehingga memicu ketidak harmonissan antar warga.

  Konflik

  a. Tapal Batas;
  b. Pertanahan (agraria);

C. ISU-ISU STRATEGIS

Seperti dijelaskan sebelumnya, wilayah Kecamatan Una-Una sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan untuk digolongkan kedalam wilayah rawan bencana sosial, namun demikian warga harus tetap waspada akan kemungkinan terjadinya konflik sosial.

Banyaknya pendatang menyebabkan daerah ini menjadi sangat beragam, baik dilihat dari agama, suku, dan lainnya. Isu yang kerap terjadi dan dapat menyebabkan konflik social adalah isu keagamaan. Pada umumnya warga muslim merasa keberatan jika ibadah keagamaan diselenggarakan di rumah warga. Sehingga jika ini terjadi maka dengan berbagai cara wartga muslim akan mencegah kegiatan ini.

Berkaitan dengan masalah kenakalan remaja, isu yang kerap terjadi adalah arena

Ada kesalah pahaman antar kelompok pemuda, sehingga mudah menyulut terjadinya perkelahian.

KONFLIK SOSIAL

Jenis konflik yang sering terjadi di Kecamatan Una-Una adalah konflik horizontal yang melibatkan warga, terutama antar kelompok pemuda di satu desa maupun antar desa. Serta konflik antar warga yang menganut agama berlainan.

Selain itu beberapa kasus yang terjadi juga mengindikasikan rawan terjadikonflik

vertikal, seperti kurangnya sosialisasi berbagai Peraturan Pemerintah seperti implementasi kebijakan penerapan perda penertiban ternak, dan lainnya. Kondis iini dinilaimasyarakat akan menimbulkan konflik social dimasa yang akan datang.

Seperti di jelaskan oleh peserta diskusi, sampai saat ini belum terjadi konflik sosial yang berarti hingga menimbulkan dampak yang laur biasa. Kalaupun terjadi perkelahian antar warga, baik karena faktor agama atau pun karena kenakalan remaja, tidak sampai menelan korban atau menimulkan kerugian lainnya. Masalah masalah tersebut dapat segera diatasi oleha parat pemerintahan setempat.

F. UPAYA YANG DILAKUKAN MENGATASI MASALAH SOSIAL

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah konflik social Oleh Kecamatan adalah :

a) Silaturahmi antar warga masyarakat melalui pengajian atau penyuluhan.
b) Pertemuan rutin antar aparat pemerintahan, ulama, dan tokoh masyarakat untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Hambatan yang mungkin di hadapi warga dalam menangani masalah konflik adalah :

1. Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
2. Keterbatasan dana untuk mengatasi masalah
3. Kurang memadainya sumber daya manusia dalam menangani masalah.
4. Kinerja aparat keamanan khususnya polsek, koramil dan pol PP dan warga masyarakat lebih ditingkatkan

TIPOLOGI KONFLIK YANG ADA DI KECAMATAN DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA:

a. Horizontal : antara masyarakat dengan masyarakat
b. Vertikal : antara masyarakat dengan negara/pemerintah
c. Diagonal : antara masyarakat dengan masyarakat dan dengan Pemerintah

1. Konflik Agraria
2. Konflik wilayahdan Perbatasan (Termasuk Isu Pemekaran wilayah ragam tingkatan)
3. Konflik Kebijakan (akibat ketidak merataan Pembangunan dan Penegakan hokum dan Kebijakan yang tidak jelas)
4. Konflik Identitas Kelompok (Suku/Agama/antaraliran Agama)
5. Konflik Politik (Ketidak puasan Power sharing Politik baik dalam jabatan pemerintahan maupun tokoh masyarakat)
6. Konflik Ekonomi (ketidak merata anata sakses pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi lokal)

C. SUMBER KONFLIK :

Persoalan Distribusi Sumber daya yang tidak adil/Merata, menyangkut:

a. Terjadinya jurang yang lebar perbedaan keadaan tingkat kesejahteraan ekonomi,
b. Perbedaan tingkat pendidikan *(kualitas SDM),*
c. Ketidakadilan dan ketidak merataan akses politik,
d. Ketiada anak sester hadap keadilan dan Hukum
e. Perbedaan dalam akses terhadap pengelolaan Pemerintahan dan pembangunan
f. Serta Perbedaan tingkat kesejehtaraan dan pembagunan antara wilayah desa.

D. ALTERNATIF SOLUSI:

1) Adanya Kebijakan yang menjamin terciptanya pemerataan pembangunan baik antar wilayah, sektor, maupun antar kelompok/golongan
2) Adanya Kebijakan yang menjamin adanya keadilan dalam akses politik, pemerintahan, pengelolaan sumber daya local dan pengembangan SDM serta mendorong penegakan hukum yang adi luntuk semua.

Persoalan Identitas *(Penguatan Rasa berbeda Identitas terutama agama dan suku, pendatang dan orang asli)* manakala:

a. kelompok yang satu lebih dominandari yang lain,
b. Kelompok yang satu lebih menguasai
c. Kelompok yang satu lebih sejahtera dari yang lainnya
d. Hal ini akan membuk aruang terjadinya pehamaman atas adanya penindasan dan pelecehan eksistensii dentitas dari kelompok yang satu dengan yang lain, atau kelompok yang besar karena merasa kuat selalu mengeksploitasi dan memandang enteng/rendah kelompok yang lain.
e. Peran dan nilai dari institusi lokal (adat) kurang dioptimalkan

Distorsi Informasi dan Komunikasi, kurang lancarnya komunikasi lintas kelompok/kultural, antara pemerintah dan masyarakat sehingga:

a. Memper tajam segregasi (Pemilahan-milahan) masyarakat berdasarkan identitas,
b. melemahnya rasa saling kenal dan solidaritas,
c. menguatnya prasangkan egatif satu sama lainnya.
d. Padasisil FHTY ainkeberadaan informasi tentang sesuatu hal atau kondisi masing-masing pihak sering mengalami distorsi/sengaja dipolitisasi *(provokasi),*sehingga masing-masing pihak tidak memahami secara jelas dan benar tentang sesuatu hal atau kondisi kelompok lainnya.

Kebijakan dan Manajemen pemerintahan yang kurang baik.

Yang ditandai adanya:

a. Proses Pembuatan Kebijakan publik yang tidak partisipatif,
b. Kebijakan publik yang diskriminatif serta tidak peka terhadap keberagaman, kebutuhan dan nilai-nilai lokal.
c. Kepemimpinan Birokrasi yang tidak dekat, tidak santun dan kurang adil dan perduli terhada prakyat.
d. Prilaku politisi dan birokrasi local yang arogan, kental KKN, otoriter, tidak simpatian suka menggunakan cara kekerasan *(baiktutur kata maupun tindakan)*.
e. Kebijakan Pembangunan yang kurang memperhatikan pemerataan pembangunan antar wilayah, antar sector atau pun antar kelompok dalam masyarakat.
f. Rekruitmen politik, rekruitmen dan promosi aparat birokrasi yang kurang memperhatikan keragaman kelompok dan kebutuhan lokal.
g. Kebijakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai kearifanlokal
h. Belum adanya Kesiapan Pemerintah dalam menghadap ikeadaan Krisis (tidakada data PetaKerawananKonflikdanSistemSiagaDini)
i. Pelayanan publik yang belum optimal

ALTERNATIF SOLUSI:

1) Melaksanakan Prinsip-prinsip Good Government secara optimal.
2) Mendorong proses dan subtansi Kebijakan publik yang partisipatif, sensitive terhadap: konflik/Bencana, Pemerataan antar wilayah/sector dan kelompok, gender, lingkungan, keberagaman dan HAM pada semua sector dan oleh setiap instasi Pemerintahan yang ada di daerah termasuk penerapan Peace trough Development (PTD) dalam system Perencanaan Pembangunan daerah
3) Mendorong pengembangan dan penerapan system kaderisasi bangsa yang ada di daerah, baik di dunia politik, birokrasi maupun swasta dalam suatu *master plan perencanann SDM Daerah* yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, nasional dan globalisasi baik penjenjangan pendidikan formal, fungsional, ketrampilan serta keterkaitannya dengan kebutuhan lapangan kerja serta kompetensi dan profesionalitas Birokrasi di Daerah.
4) Membentuk karakter dan figure kepemimpinan birokrasi public daerah yang profesional, bertanggungjawab, memiliki integritas moral dan kebangsaan, rendah hati, dekat, tahu dan perduli dengan pesoalan rakyat.
5) Mendorong terciptanya dan terpeliharanya Sistem Pelayanan Publik yang berkualitas.
6) Pengmbangan Sistem Informasi Kerawanan Konflik dan Sistem Siaga Dini
7) Memasyarakatkan Pendidikan Multikulural/keberagaman dan Budaya perdamaian pada semua lapisan masyarakat termasuk menjadikannya kurikulum dalam institusi pendidikan yang di Kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati-Wakil Bupati

Kecamatan Una-Una sebagai bagian dari unsur pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una Una dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsinya harus senantiasa merujuk pada pencapaian Visi, Misi maupun Program Kerja Bupati –Wakil Bupati Periode Tahun 2021-2026 sebagaimana telah terdokumentasi dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 yaitu:

Visi Bupati-Wakil Bupati Tojo Una-Una

TERWUJUDNYA KABUPATEN TOJO UNA-UNA YANG TANGUH MAJU DAN SEJAHTERA (TAMARA)"

Pernyataan Visi tersebut dijabarkan lebih detail kedalam 5 **Misi** yang hendak diwujudkan yaitu:

1. Membangun Keberdayaan Rakyat serta penataan wilayah pedesaan secara merata. Mandiri dan berkelanjutan yang berbasis Ekonomi pertanian, pariwisata dan kemaritiman
2. Mewujudkan Kelenbagaan Birokrasi yang bersih efisien, efektif dan akuntabel
3. Mewujudkan Pengembangan Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi
4. Mewujudkan Pengaruh utama Gender dan Melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat
5. Mengembangkan Kemitraan Usaha Lokal, Investasi dan Pengembangan Infrastruktur

Berdasarkan hasil identifikasi, dalam penjabarannya Kecamatan Una-Una menjadi prioritas pembangunan pada perwujudan Visi, Misi dan Program Bupati –Wakil Bupati Tojo Una-Una tahun 2021-2026 yang menitikberatkan pembangunan disektor:

- Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- Pendidikan dan Kesehatan;
- Agrobisnis (Pertanian, Perikanan, perdagangan dan industri) dan Pariwisata Unggulan;
- Pembangunan Infra struktur;
- Pengelolaan, Penataan dan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Sumber Daya manusia;

Sebagai unsur Pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten di wilayah, Kecamatan Una-Una memilikileading sectord alam bidang Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta Pengendali atas Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemerintahan di wilayah, Kecamatan Una-Una memiliki peran yang strategis dalam mendukung perwujudan Visi-Misi Bupati yang telah ditetapkan

Peran Strategis yang diambil oleh OPD Kantor Camat Una-Una khususnya adalah pembangunan secara Non Fisik yaitu Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Una-Una **Menuju Masyarakat Madaniah** sesuai dengan Visi Bupati Tojo Una-Una. Peran strategis yang dimaksud adalah:

1. Perwujudan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan stabilitas wilayah Kecamatan;
3. Peningkatan pengetahuan tentang Pariwisata dan Agribisnis di tingkat masyarakat;
4. Peningkatan pengetahuan tentang Pengelolaan, Penataan dan Pelestarian sumber daya alam;

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan KecamatanUna-Una terbagi atas beberapa kawasan yang sangat potensial yaitu kawasan Agribisnis dan Pariwisata. Kawasan Pariwisata yang ada di wilayah Kecamatan Una-Una merupakan kawasan Pariwisata Unggulan DI Kabupaten TojoUna-Una yang harus dijagadan dilestarikan oleh semua komponen Pemerintah dan Masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Una-Una maupun Kepulauan Una-Una

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan pesatnya kemajuan Teknologi dan Informasi di Era Globalisasi saat ini, Kecamatan Una-Una semakin banyak menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan wilayah dan sosiologis serta cultural masyarakat yang semakin tidak menentu. Di satusisi Kemajuan Teknologi dan Informasi dapat meningkatkan proses Pelayanan kemasyarakatan yang lebih prima dan professional,akantetapidisisi lain dapat pula menjadi ancaman bagi keamanan, ketertiban serta pengelolaan lingkungan dalam wilayah Kecamatan Una-Una. Penyelenggaraan Pelayanandan Pengawasan serta Pengendalian khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik geografis sepertiwilayah Kecamatan Una-Una yang merupakan wilayah kepulauan menjadi hal yang sangat penting, karena dengan keterbatasannya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan Pelayanan,Pengawasan dan Pengendalian menjadi kendala tersendiri dan sangat serius dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kecamatan Una-Una .Selain hal tersebut diatas, konflik Aliran Kepercayaan, konfli ketnis dan suku, konflik batas-batas wilayah menjadi isustrategi yang harus menjadi perhatian dalam **Menuju Masyarakat Madaniah** di wilayah Kecamatan Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una.

2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kantor Camat Una-Una, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Kantor Camat Una-Una berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

2.3 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kantor Camat Una-Una.

Kajian usulan program dan kegiatan pada merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A.Telaan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kantor Camat Una-Una selama Tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2024 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan packa konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selaian prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

a. Program pro rakyat;
b. Program keadilan untuk semua; dan
c. Program pencapaian tujuan pembangunan millinium (MDG's)

Selaian itu, pemerintah pusat juga baru saja menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendeatan *not business as usual*, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertunbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK.

Prasarat serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi kaberhasilan pelaksanaan MP3EI.Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang *multiplier effect*-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN UNA-UNA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah darah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Kecamatan Una-Una selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Kantor Camat Una-Una pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2024 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. T-III.1.
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Una-Una
Kabupaten Tojo Una-Una

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2022	2023
Meningkatkan kualitas produk kebijakan pembangunan daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana kelembagaan	J Persentase administrasi perkantoran	20%	20%
		J Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	24%	23%
Terkendalinya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah serta tersusunnya laporan pelaksanaan yang transparan akuntabel	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perencana	J Persentase kapasitas sumber daya aparatur yang baik	0%	0%
		J Persentase Kapasitas Pegawai Aparatur	20%	20%
Meningkatnya Penyelengaraan Pemerintahn dan Kegiatan Kemasyarakatan	Meningkatnya Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	J Persentase pada Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	17%	21%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikanpermasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Kantor Camat Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta prognosisnya dapat dilihat pada **Lampiran V.1**

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Una-Unadan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir Tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kantor Camat Una-Una, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kantor Camat Una-Unamaupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Kantor Camat Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi Kepala Daerah Periode Tahun 2021-2026 yaitu:

“ Terciptanya Masyarakat yang Adil, Sejahtera dan Merata”.

Wakai, 01 Maret 2023
CAMAT UNA-UNA

SABRIN S.ABD.KARIM.S.Pd
Pembina
NIP. 19780401 200312 1 010

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA-OPD)

KANTOR CAMAT UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2024

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tojo Una Una
Tahun 2024

Perangkat Daerah : Kantor Camat Una-Una

No	Kode Rekening				Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2024	Pagu Perkiraan Maju Tahun 2025	Ket Prioritas Pembangunan Nasional
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	01				**KECAMATAN**												
I	01	001			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**												
1	01	001	2:02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**1,715,612,012**	**1,852,062,429**	
	01	001	2:02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Wakai	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah	12 Bulan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	12 Bulan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	12 Bulan	1,715,612,012	1,852,062,429	
2	01	001	2:06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**276,916,449**	**345,000,000**	
	01	001	2:06	016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Wakai	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah	6000 Liter/2 Expl	Jenis dan Bahan Logistik Kantor yang di Beli	6000 Liter/2 Expl	Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan	5 Paket	90,916,449	100,000,000	
	01	001	2:06	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Wakai	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah	2 Expler	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan	2 Expler	Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan	3 Paket	16,000,000	20,000,000	
	01	001	2:06	017	Fasilitas Kunjungan Tamu			Wakai	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah	800 Orang	Jumlah Tamu yang Diberikan Konsumsi	800 Orang	Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan	10 Laporan	20,000,000	25,000,000	
	01	001	2:06	018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Wakai	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah	100 Kali	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang di ikuti	100 Kali	Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan	100 Laporan	150,000,000	200,000,000	
3	01	001	2:07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**30,000,000**	**40,000,000**	
	01	001	2:07	022	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Wakai	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah	1 Unit	Jumlah dan Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan	1 Unit	30,000,000	40,000,000	
4	01	001	2:08		**Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**213,250,000**	**330,000,000**	
	01	001	2:08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Wakai	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah	1600 lembar	Jumlah Surat Bermaterai	1600 lembar	Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan	3 Laporan	20,000,000	25,000,000	
	01	001	2:08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Wakai	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah	3 Rekening	Jumlah Rekening Air dan Listrik,Internet yang dibayarkan	3 Rekening	Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan	3 Laporan	20,000,000	25,000,000	
	01	001	2:08	007	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Wakai	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah	20 Orang	Jumlah SDM Non Pns dan Jenis Administrasi Keuangan Tiap Bulan	20 Orang	Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan	20 Laporan	173,250,000	280,000,000	

5	**01**	**001**	2:06		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**30,000,000**	**40,000,000**	
	01	001	2:06	030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Wakai	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah	4 Unit	Jenis dan Jumlah Kendaraan yang di Pelihara	4 Unit	Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan	4 Unit	15,000,000	20,000,000	
	01	001	2:06	034	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Wakai	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah	10 Unit	Jenis dan Jumlah Peralatan yang di Pelihara	10 Unit	Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan	10 Unit	15,000,000	20,000,000	
II	**01**	**003**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**													
1	**01**	**003**	2:01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**65,000,000**	**90,000,000**	
	01	003	2:01	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Wakai	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah	1 Kegiatan	Jumlah Desa Dalam Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Kegiatan	Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan	5 Lembaga	15,000,000	20,000,000	
	01	003	2:01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Wakai	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah	4 Kegiatan	Jumlah Desa Dalam Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Kegiatan	Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan	4 Kegiatan	50,000,000	70,000,000	
III	**01**	**005**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**													
1	**01**	**005**	2:01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**24,000,000**	**30,000,000**	
	01	005	2:01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Wakai	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah	1 Kegiatan	Jumlah Desa Dalam Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan	1 Dokumen	24,000,000	30,000,000	
IV	**01**	**006**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**													
1	**01**	**006**	2:01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											**20,000,000**	**25,000,000**	
	01	006	2:01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Wakai	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah	1 Kegiatan	Jumlah Desa Dalam Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Kegiatan	Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan	1 Dokumen	20,000,000	25,000,000	
														JUMLAH		**2,374,778,461**	**2,752,062,429**	

Wakai, 01 Maret 2023
CAMAT UNA-UNA

SABRIN S.ABD.KARIM.S.Pd
NIP.19780401 200312 1 010

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN UNA-UNA KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN UNA-UNA						**2.374.778.461,00**							**2.747.062.429,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.374.778.461,00**							**2.747.062.429,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.265.778.461,00**							**2.607.062.429,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**CC Nilai**		**CC Nilai**	**CC Nilai**	**2.265.778.461,00**						**CC Nilai**	**2.607.062.429,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi keuangan*	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	1.715.612.012,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Bulan Orang/bulan	1.852.062.429,00	KECAMATAN UNA-UNA
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan Orang/bulan		12 Bulan Orang/bulan	12 Bulan Orang/bulan	1.715.612.012,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Bulan Orang/bulan	1.852.062.429,00	KECAMATAN UNA-UNA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %		100 %	100 %	276.916.449,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	6000 Ltr/2paket Paket	345.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6000 Ltr/2paket Paket		6000 Ltr/2paket Paket	6000 Ltr/2paket Paket	90.916.449,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	6000 Ltr/2paket Paket	100.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket Paket		2 Paket Paket	2 Paket Paket	16.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Paket Paket	20.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	10 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan Laporan		100 Laporan Laporan	100 Laporan Laporan	150.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	100 Laporan Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedinya Aset Kantor*	3 Unit		3 Unit	3 Unit	30.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Unit Unit	40.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit Unit		1 Unit Unit	1 Unit Unit	30.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Unit Unit	40.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan*	100 %		100 %	100 %	213.250.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Laporan Laporan	330.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan Laporan		3 Laporan Laporan	3 Laporan Laporan	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Laporan Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan Laporan		3 Laporan Laporan	3 Laporan Laporan	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Laporan Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan Laporan		20 Laporan Laporan	20 Laporan Laporan	173.250.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	20 Laporan Laporan	280.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*	8 Unit		8 Unit	8 Unit	30.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Unit Unit	40.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit Unit		5 Unit Unit	5 Unit Unit	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Unit Unit	20.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit Unit		10 Unit Unit	10 Unit Unit	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	10 Unit Unit	20.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
	7.01	**KECAMATAN**						**109.000.000,00**							**140.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai IDM Kecamatan***	**0,6429 Poin**		**0,6429 Poin**	**0,6429 Poin**	**85.000.000,00**						**0,6429 Poin**	**110.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa*	7 Keg		7 Keg	7 Keg	85.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Lembaga Lembaga Kemasyarakatan	110.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Lembaga Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan Laporan		4 Laporan Laporan	4 Laporan Laporan	70.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	4 Laporan Laporan	90.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**24.000.000,00**						**100 Persen**	**30.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Urusan Pemerintahan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum*	1 Keg 1 Keg		1 Keg 1 Keg	1 Keg 1 Keg	24.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Dokumen Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen Dokumen		1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	24.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Dokumen Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
	J U M L A H							**2.374.778.461,00**							**2.747.062.429,00**	

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN TOGEAN

TAHUN 2024







KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Togean telah dapat terselesaikan.

Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan Program Kerja yang lebih maksimal Tahun 2024 pada Kecamatan Togean yang Pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024.

Sangat disadari, bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna namun diharapkan tetap dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut di atas.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi semua karya kita sebagai Wujud Pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Lebiti, 20 Februari 2023

CAMAT TOGEAN

NASRUDIN, S.Pd
NIP. 19690720 199408 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Kecamatan Togean Togean sebagai unit kerja Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan dukungan aparatur serta dukungan operasional dalam mendukung pelaksanaan Kegiatan kemasyarakatan khususnya pada Kegiatan Penertiban Ternak, Miras/ Obat-Obat Terlarang, Pekerja Seks Komersial (PSK) serta Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Dalam rangka Mendukung Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang baik **(*GOOD GOVERNANCE*)** dalam Penyelenggaraan Negara, Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diselenggarakan secara Profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk mewujudkan prinsip-prinsip ***GOOD GOVERNANCE*** yang mencakup Transparansi, Akuntabilitas Publik, dan Partisipasi, maka Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki Landasan Hukum yang semakin Kokoh, maka disusunlah Renja Kecamatan Togean tahun 2024 sebagai dokumen pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan OPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Perubahan OPD yang telah ditetapkan

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja Tahun 2024 Kecamatan Togean sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden republik indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menegah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan perturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulteng Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Propinsi Sulteng Tahun 2011 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 28 Tahun 2016 tentang rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Togean tahun 2024 Kabupaten Tojo Una - Una.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kantor Camat Togean untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

Alternatif lain pernyataan maksud:

Memberikan pedoman kerja tahun 2024 bagi Kecamatan Togean, sesuai dengan Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Togean dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Khususnya Kecamatan Togean yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

Alternatif lain pernyataan tujuan:

1) Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Togean;

2) Terwujudnya keselarasan Rencana Strategis Kecamatan Togean dengan perencanaan tahunan; dan
3) Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan OPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD);
4) Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD Perubahan), analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TOGEAN TAHUN LALU

Review hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD Perubahan, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN KECAMATAN TOGEAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD PERUBAHAN

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD Perubahan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun

n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD Perubahan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perubahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berisikan kajian terhadap Capaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Togean berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan OPD Kecamatan Togean. Keberhasilan kinerja OPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan OPD Kecamatan Togean dilihat pada tabel berikut ini

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN OPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Togean, Permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah, Capaian Program Nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Kecamatan Togean sebagai berikut:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;

   Khusus Provinsi, uraikan mengenai Koordinasi dan sinergi Program antara OPD provinsi dengan OPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di Tingkat Pusat dalam rangka Pencapaian Kinerja Pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi OPD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perubahan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Togean, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Kecamatan Togean berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

4. PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kecamatan Togean.

Kajian usulan program dan kegiatan pada merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan

kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

`

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Togean selama tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2015 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan packa konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selaian prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

a. Program pro rakyat;
b. Program keadilan untuk semua; dan

c. Program pencapaian tujuan pembangunan millinium (MDG's)

Selaian itu, pemerintah pusat juga baru saja menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendeatan *not business as usual*, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunannasional.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasarat serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi kaberhasilan pelaksanaan MP3EI. Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang *multiplier effect*-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TOGEAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menujukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah darah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Kecamatan Togean selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Togean pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2024 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikanpermasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta prognosisnya dapat dilihat pada **Lampiran IV.1.**

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Togean tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Togean dan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Togean.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Togean, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan Togean maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Kecamatan Togean tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2022-2025 yaitu: **”Terciptanya Masyarakat yang Adil, Sejahtera dan Merata”.**

Lebiti, 20 Februari 2023

CAMAT TOGEAN

NASRUDIN, S.Pd
NIP. 19690720 199408 1 001

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN TOGEAN KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN TOGEAN						**2.081.250.352,00**							**2.315.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.081.250.352,00**							**2.315.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.933.250.352,00**							**2.140.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**CC Nilai**		**CC Nilai**	**CC Nilai**	**1.933.250.352,00**						**CC Nilai**	**2.140.000.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi keuangan*	100 %		100 %	100 %	1.510.471.063,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	18 Orang/bulan	1.600.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.510.471.063,00	- Kab. Tojo Una Una, Togean, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	18 Orang/bulan	1.600.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian*	3 Org		3 Org	3 Org	38.779.289,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Orang	45.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	38.779.289,00	- Kab. Tojo Una Una, Togean, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	1 Orang	45.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN

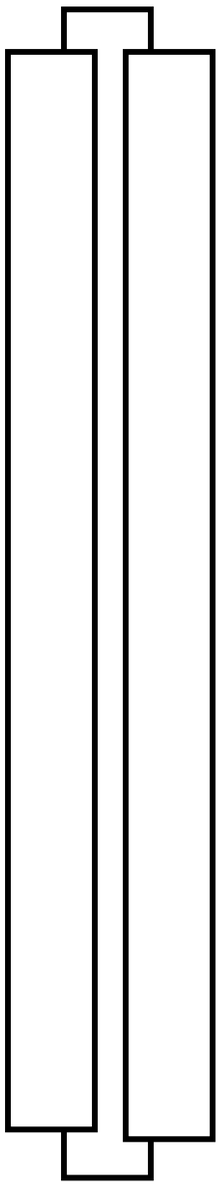
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %		100 %	100 %	192.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	15 Paket	270.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	2.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Togean, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	15 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	60.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Togean, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Paket	75.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Togean, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Togean, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Togean, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	120 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedinya Aset Kantor*	5 Unit		5 Unit	5 Unit	20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Unit	35.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Togean, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	2 Unit	35.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan*	100 %		100 %	100 %	136.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Togean, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Togean, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	122.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Togean, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	130.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*	10 Unit		10 Unit	10 Unit	35.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Unit	40.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	35.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Togean, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Unit	40.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
	7.01	**KECAMATAN**						**148.000.000,00**							**175.000.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)***	**0,73 Persen**		**0,73 Persen**	**0,73 Persen**	**8.000.000,00**						**0,73 Persen**	**15.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Terlaksananya Urusan Pemerintahan*	12 Bln		12 Bln	12 Bln	8.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Togean, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai IDM Kecamatan***	**0,5923 Poin**		**0,5923 Poin**	**0,5923 Poin**	**110.000.000,00**						**0,5923 Poin**	**125.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa*	5 Keg		5 Keg	5 Keg	110.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	16 Lembaga Kemasyarakatan	125.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Lembaga Kemasyarakatan		16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Togean, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	16 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	90.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Togean, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	4 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani***	**100,00 Persen**		**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**30.000.000,00**						**100,00 Persen**	**35.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Tersedianya Jasa Pelayanan Kecamatan*	1 Keg		1 Keg	1 Keg	30.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Togean, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
	J U M L A H							**2.081.250.352,00**							**2.315.000.000,00**	

RENCANA KERJA
(RENJA)



KANTOR CAMAT WALEA KEPULAUAN

TAHUN 2024

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kantor Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una telah berhasil disusun. Laporan Rencana Kerja (RENJA) 2024 Kantor Kecamatan Walea Kepulauan ini disusun sebagai Pejabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) 2021-2026

Rencana stratejik 2021-2026 telah memberikan arah dan fokus bagipelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una- Una di dalam upaya memenuhi visi misinya yang dijabarkan tiap tahunnya dalam Rencana Kinerja. Selama Tahun 2024,sejumlah capaian kinerja telah berhasil dicapai dan sejumlah lainya belum berhasil.

Untuk memenuhi fungsi utama itu, Laporan Rencana Kerja (RENJA) ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana Kerja 2024 asumsi pencapaian tahun anggaran 2022 (n-1) dan dan tahun anggaran 2024 (n+1). Rencana Kinerja (Performance Plan) 2024 merupakan sasaran kinerja yang ingindi capai selama tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Stratejik 2021-2024 Kantor Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una. Sementara itu capaian kinerja (Performance Plan) merupakan hasil seluruh Kegiatan selama tahun 2022 sesuai target yang ditetapkan dalam rencana kerja 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja, baik yang memenuhi maupun tidak memenuhi kami melakukan analisis lebih lanjut dengan melakukan identifikasi permasalahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian kinerja tersebut dimasa yang akan datang.

Atas kerjasama dari semua pihak, khususnya para pejabat struktural maupun fungsional serta staf administrasi unit Kantor Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-una, kami ucapkan terima kasih.

Popolii, Mei 2023

CAMAT WALEA KEPULAUAN,

RIKKI HENDRI, SP
Pembina, IV/a
NIP.19750510 200701 1 024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…. i
DAFTAR ISI ii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.3.1 Maksud 3
1.3.2 Tujuan 3
1.4 Sistimatika Penulisan 3
BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR CAMAT WALEA KEPULAUAN TAHUN LALU 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Walea Kepulauan 10
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan SKPD 11
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD… 14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat… 14
BAB 3 TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN 15
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 15
a. Telahan Kebijakan Nasional 15
b. Telahan Kebijakan Provinsi 16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Camat Walea Kepulauan 16
3.2.1 Tujuan dan Sasaran 16
3.2.2 Program dan Kegiatan 18
BAB 4 PENUTUP…. 19
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasimasyarakat.Penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Kantor Kecamatan Walea Kepulauan sebagai unit kerja yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang pemerintahan yang membawahi Desa dan Kelurahan diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Kantor Kecamat an Walea Kepulauan ,maka disusunlah Renja Kantor Kecamatan Walea Kepulauan 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan OPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra OPD yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Kantor Kecamatan Walea Kepulauan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794);
25. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Pemutahiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan NomenklaturPerencanaanPembangunan dan KeuanganDaerah;
26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ/2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020;
27. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBDPerubahanTahunAnggaran2021.

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51); Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 2).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kantor Kecamatan Walea Kepulauan tahun 2024 Kabupaten Tojo Una- Una adalah :

1.3.1 Maksud

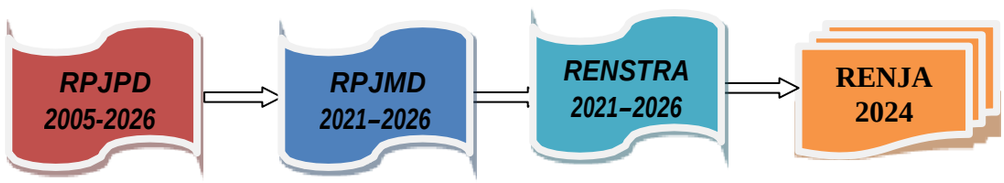
Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi OPD Kantor Kecamatan Walea Kepulauan untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas pada Kantor Kecamatan Walea Kepulauan dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Kerja 2024 Kantor Kecamatan Walea Kepulauan disusun merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Kantor Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 yang merupakan penjabaran terperinci dari RPJMD kabupaten Tojo Una-Una yang mengacu pada RPJPD Kabupaten yang merupakan suatu alur perencanaan yang tidak terpisahkan. Berdasarkan pola pikir tersebut diatas, maka sistimatika penyusunan Renja tahun 2024 dapat dilustrasikan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.4 : Bagan alur sistimatika pembuatan Rencana Kerja (Renja)

Sesuai alur pikir tersebut, Dokumen Rencana Kerja (Renja) akan disajikansebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renjadan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD), analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta Program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KANTOR KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Walea Kepulauan tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN WALEA KEPULAUAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel 2 sebagaimana terlampir.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN WALEA KEPULAUAN

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD Kantor Kecamatan Walea Kepulauan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan OPD Kantor Kecamatan Walea Kepulauan. Keberhasilan kinerja OPD dapat dilihat dari pencapaianindikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan OPD Kantor Kecamatan Walea Kepulauan dapat dilihat pada tabel 3 sebagaimana terlampir.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN OPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Walea Kepulauan, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis.

Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, maka batas-batas wilayah, sosiologis dan kultural semakin kabur, hal ni di satu sisi menjadi peluang dalam menunjang pembangunan daerah namun disisi lain laju teknologi dan

informasi dapt menjadi ancaman dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dan dalam menjaga kearifan lokal

Penyelenggaraan keamanan ketertiban daerah khusunya diwilayah yang memiliki karakteristik geografis kepulauan seperti Kabupaten Tojo Una-una menjadi hal yang penting karena keterbatasan sarana dan prasarana transportasi menjadi kendala tersendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah khususnya untuk wilayah terluar yang berbatasan dengan daerah lain

Akan menjadi Isu strategis yang harus menjadi perhatian dalam *Menuju Masyarakat Madaniah* di wilayah Tojo Una-Una.

MASALAH-MASALAH UMUM KECAMATAN

• Kurangnya lapangan kerja dan Pengganguran
Kurangnya lapangan kerja, menyebabkan banyak masyarakat terutama warga pendatang yang mencari nafkan serabutan dan merupakan profesi sambilan karena kurangnya pendapatan dan lapangan kerja serta modal usaha didalammeningkatkan taraf ekonomi keluarga.

• Kenakalan remaja dan tingkat pendidikan
Meningkatnya angka kenakalan remaja, juga disebabkan oleh gaya hidup yang berubah. Kenakalan remaja terutama banyak terjadi ketika ada keramaian tertentu, misalnya ketika ada pentas olahraga, pentas musik, perayaan perkawinan, dan sebagainya. Jenis kenakalan remaja yang terjadi biasanya dalam bentuk perkelahian dan tawuran antar warga. Minimnya pendidikan masyarakat juga sebagai penyebab timbulnya kenakalan remaja.

Konflik

a. Tapal Batas

b. Pertanahan (agraria)

- ISU-ISU STRATEGIS

  - Batas Desa / Wilayah
  - Air Bersih
  - Konflik kepemilikan
  - Pencegahan perusakan terumbu karang dan lingkungan
  - Pelestarian budaya.

Seperti dijelaskan sebelumnya, wilayah Kecamatan Walea Kepulauan sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan untuk digolongkan ke dalam wilayah rawan bencana sosial, namun demikian warga harus tetap waspada akan kemungkinan terjadinya konflik sosial.

Banyaknya pendatang menyebabkan daerah ini menjadi sangat beragam, baik dilihat dari agama, suku, dan lainnya. Berkaitan dengan masalah kenakalan remaja, isu yang kerap terjadi adalah arena ada kesalahpahaman antar kelompok pemuda, sehingga mudah menyulut terjadinya perkelahian.

KONFLIK SOSIAL

Jenis konflik yang sering terjadi di Kecamatan Walea Kepulauan adalah konflik

horizontal yang melibatkan warga, terutama antar kelompok pemuda di satu desa maupun antar desa.
Selain itu beberapa kasus yang terjadi juga mengindikasikan rawan terjadi konflik vertikal, seperti kurangnya sosialisasi berbagai Peraturan Pemerintah seperti implementasi kebijakan penerapan perda penertiban ternak, dan lainnya. Kondisi ini dinilai masyarakat akan menimbulkan konflik sosial dimasa yang akan datang. Seperti dijelaskan oleh peserta diskusi, sampai saat ini belum terjadi konflik sosial yang berarti hingga menimbulkan dampak yang laur biasa. Kalaupun terjadi perkelahian antar warga, baik karena faktor agama ataupun karena kenakalan remaja, tidak sampai menelan korban atau menimbulkan kerugian lainnya. Masalah-masalah tersebut dapat segera diatasi oleh aparat pemerintahan setempat.

- UPAYA YANG DILAKUKAN MENGATASI MASALAH SOSIAL
  Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah konflik sosial Oleh Kecamatan adalah :
  a) Silaturahmi antar warga masyarakat melalui pengajian atau penyuluhan.
  b) Pertemuan rutin antar aparat pemerintahan, ulama, dan tokoh masyarakat untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Hambatan yang mungkin dihadapi warga dalam menangani masalah konflik adalah :
1. Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
2. Keterbatasan dana untuk mengatasi masalah
3. Kurang memadainya sumber daya manusia dalam menangani masalah.

Secara garis besar Kecamatan Walea Kepulauan kendala-kendala umum yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya keterkaitan dan konsistensi *kebijakan perencanaan daerah* dengan *penganggaran daerah;*
2. Belum optimalnya fungsi penanaman modal dalam menarik minat investor dalam dan luar negeri;
3. Belum terintegrasinya dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Belum terintegritasnya *perencanaan* dan *penganggaran* yang mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu kepada *dokumen perencanaan*;
5. Rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; dan
6. Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan pembangunan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kantor Kecamatan Walea Kepulauan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Kantor Kecamatan Walea Kepulauan berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2018 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kantor Kecamatan WaleaKepulauan.

Kajian usulan program dan kegiatan pada merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dankegiatan Kantor Kecamatan Walea Kepulauan selama tahun 2020 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

A. Telahaan Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2016 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selaian prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

a. Program pro rakyat;
b. Program keadilan untuk semua; dan
c. Program pencapaian tujuan pembangunan millinium (MDG’s)

Selain itu, pemerintah pusat juga baru saja menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendekatan *not business as usual*, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasyarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang strategipeningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertunbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasyarat serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi kaberhasilan pelaksanaan MP3EI.Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang *multiplier effect*-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air.

B. Telahaan Kebijakan Provinsi

Telaahan kebijakan provinsi pada dasarnya dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2020 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan packa konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Kebijakan yang ditempuh mengacu pada isu-isu strategis daerah yang telah diimplementasikan dari RPJM Nasional. Hal-hal ini dapat dilihat dari keluaran peraturan daerah yang telah mengakomodir baik secara langsung maupun tidak program-program dimaksud. OPD sebagai basis terakhir diharapkan dapat merangkum semua permasalahan-permasalahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KANTOR KECAMATAN WALEA KEPULAUAN

3.2.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Renja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berasal dari penjabaran Rencana Strategis (Renstra).

Dengan diformulasikannya tujuan rencana kerja ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan Kantor Kecamatan Walea Kepulauan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan stratejik dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Adapun tujuan dari Kantor Kecamatan Walea Kepulauan adalah **Mendukung Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una yang lebih Sejahtera dan Mandiri.**

Sasaran Kantor Kecamatan Walea Kepulauan merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*).

Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sasaran Renja Kantor Kecamatan Walea Kepulauan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan satu tahun kedepan yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Kantor Kecamatan Walea Kepulauan Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruhsasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat dicapai.

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadaptujuan, Program-program yang telah ditetapkan sepenuhnya pencapaian sasaran yang terkait. Secara Keseluruhan sasaran dan program Kantor Kecamatan Walea Kepulauan dapat dijabarkan sebagai berikut

Tabel. T-III.1.

Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2023	2024
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berimbas pada pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	**80**	**85**
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	**Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)**	**80**	**85**
	Meningkatkanyakualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	**Nilai IDM Kecamatan**	**0,6244**	**0,6334**

3.2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikanpermasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Walea Kepulauan dan RKPD Kabupaten Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kantor Kecamatan Walea Kepulauan, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kantor Kecamatan Walea Kepulauan maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Kantor Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2021-2026 yaitu: "***Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una Tangguh, Maju Dan Sejahtera (Tamara)"***

Popolii, Mei 2023

CAMAT WALEA KEPULAUAN,

RIKKI HENDRI, SP
Pembina, IV/a
NIP.19750510 200701 1 024

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Tojo Una Una
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Walea Kepulauan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Walea Kepulauan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Walea Kepulauan								**666,043,066.00**					**800,500,000.00**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								**666,043,066.00**					**800,500,000.00**
7	**01**				**KECAMATAN**								**544,943,066.00**					**677,500,000.00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**544,943,066.00**					**677,500,000.00**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10.000.000,00**					**12.000.000,00**
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat Daerah	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popolii	C Nilai	4 Laporan	9 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**10.000.000,00**					**24.000.000,00**
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popolii		2 Orang	1 orang	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	24.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**259.943.066,00**					**332.000.000,00**
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Presentase terlaksananya kegiatan Administrasi Perangkat DAerah	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	C Nilai	4 Paket	100 Persen	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	120.000.000,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Presentase terlaksananya kegiatan Administrasi Perangkat DAerah	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	C Nilai	2 Paket	100 Persen	14.943.066,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.500.000,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase terlaksananya kegiatan Administrasi Perangkat DAerah	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	C Nilai	12 Laporan	100 Persen	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	16.500.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase terlaksananya kegiatan Administrasi Perangkat DAerah	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	C Nilai	12 Laporan	100 Persen	140.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	180.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**60.000.000,00**					**66.000.000,00**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popolii	C Nilai	4 Unit	3 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	33.000.000,00
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popolii	C Nilai	5 Unit	3 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	33.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**191.000.000,00**					**221.500.000,00**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popolii	C Nilai	12 Laporan	12 Bulan	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.000.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Popolii - Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua	C Nilai	12 Laporan	12 Bulan	17.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.000.000,00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popolii	C Nilai	12 Laporan	12 Bulan	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.500.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popolii	C Nilai	12 Laporan	12 Bulan	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	176.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**14.000.000,00**					**22.000.000,00**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumah Barang Milik Daerah Yang dipelihara	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	C Nilai	3 Unit	9 unit	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumah Barang Milik Daerah Yang dipelihara	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popolii	C Nilai	10 Unit	9 unit	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	12.000.000,00
7	**01**				**KECAMATAN**								**121.100.000,00**					**123.000.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**65.000.000,00**					**75.000.000,00**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**65.000.000,00**					**75.000.000,00**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
						Nilai IDM Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Presentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	0,5852 Poin	9 Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	0,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Nilai IDM Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	0,5852 Poin	12 Laporan	100 Persen	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.000.000,00
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**26.100.000,00**					**30.000.000,00**

7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**26.100.000,00**					**30.000.000,00**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
						Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Bulan Kegiatan Koordinasi yang dilakukan dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	100,00 Persen	12 Laporan	12 bulan	26.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	12 Laporan	30.000.000,00
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**6.000.000,00**					**6.000.000,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**6.000.000,00**					**6.000.000,00**
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,													
						Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Bulan Kegiatan Penyelenggaran Pemerintahan Umum	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	100,00 Persen	300 Orang	12 bulan	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	6.000.000,00
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**24.000.000,00**					**12.000.000,00**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi**								**24.000.000,00**					**12.000.000,00**
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
						Status Desa Berkembang Status Desa Maju Status Desa Sangat Tertinggal Status Desa Tertingga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	5 Desa 1 Desa 0 Desa 3 Desa	3 Dokumen	9 Desa	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	0,00
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
						Status Desa Berkembang Status Desa Maju Status Desa Sangat Tertinggal Status Desa Tertingga	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	5 Desa 1 Desa 0 Desa 3 Desa	27 Dokumen	9 Desa	9.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	27 Dokumen	12.000.000,00
												TOTAL	**2.173.916.336,00**					**2.308.373.270,00**

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2023

Nama SKPD : Kantor Camat Walea Kepulauan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD Tahun 2023			Target program /kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)*	12
	Program Penunjang Urusan Pemrintah Daerah	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**									
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun									
	-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun	15 dok	-	-	-	-	-	-	-	
	-Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Yang disusun	20 dok								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	-Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Jabatan	0	0 -	-	0	-	1 org	1 org	#DIV/0!	Wakep
	Administrasi Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 bl	80%	Wakep
	-Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 bl	80%	Wakep
	-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 kali	80%	Wakep
	-Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan tamu yang berkunjung	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 kali	80%	
	-Penyelenggraaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	450 kl	117 kl	89 kl	89 kl	100%	48 kali	254 kli	56%	Wakep

			Target	Realisasi	Target dan realisasi			Target	Perkiraan realisasi		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target program /kegiatan Renja SKPD tahun	Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)	Catatan
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)*	12
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				-Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainya yang diadakan									
				Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah										
				-Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 bl	80%	
				-Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 bl	80%	
				-Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 bl	80%	
				-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 bl	80%	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				-Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	10 unit	4 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	6 unit	60%	
				-Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	10 unit	4 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	6 unit	60%	
				-Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras pendukung Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara	15 unit	6 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	9 unit	60%	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan**									
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat										

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan	Target dan realisasi			Target program /kegiatan Renja SKPD tahun	Perkiraan realisasi		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)*	12
				-Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan		100 izin	- -	- -	- -	-	- -	- -	-	
				-Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Non Perizinan		250 izin	- -	- -	- -	-	- -	- -	-	

				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa											
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											
				-Peningktan Partispasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa	Prosentase Kehadiran masyarakat dalam forum musrenbang	5 keg	2 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	4 keg	80%	
				-Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	30 keg	12 keg	6 keg	6 keg	100%	6 keg	24 keg	80%	

				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum**										
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum											
				-Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia,TNI,dan Instansi Vertikan diwilayah Kecamatan	Jumlah bulan kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum	60 bl	24 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	48 bl	80%	
				-Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan yang dilakukan	36 kali	- -	- -	- -	-	- -	- -	-	
				Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**										
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											
				-Kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama dan ras guna meujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan	5 keg	2 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg	60%	

Kode				**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Target capaian kinerja Renstra SKPD**	**Realisasi target kinerja hasil program dan**	**Target dan realisasi**			**Target program /kegiatan Renja SKPD**	**Perkiraan realisasi**		**Catatan**
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)*	12
				-Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Bulan Kegiatan yang dilakukan	60 bl	- -	- -	- -	-	- -	- -	-	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**									
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa										
				-Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa	45 Desa	- -	- -	- -	-	- -	- -	-	-
				-Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa	45 Desa	0 -	- -	0 -	-	9 Desa	9 Desa	20%	
				-Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa	45 Desa	- -	- -	- -	-	- -	- -	-	
				-Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa	9 Desa	3 -	- -	0 -	-	1 Desa	4 Desa	44%	
				-Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa	45 Desa	1 -	- -	- -	-	- -	- -	-	

Popolii, APRIL 2023

CAMAT WALEA KEPULAUAN,

RIKKI HENDRI, SP
NIP.19750510 200701 1 024

Tabel 2.4

Nama SKPD: Kantor Camat Walea Kepulauan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Popolii**			**544,943,066**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Popolii**			**544,943,066**	
1	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Popolii**	**Presentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**4 Dok**	**10,000,000**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Popolii**	**Presentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**4 Dok**	**10,000,000**	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Popolii	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun	4 Dok	10,000,000	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Popolii	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun	4 Dok	10,000,000	
2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Luar Daerah**	**Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Jabatan**	**2 Orang**	**10,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Luar Daerah**	**Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Jabatan**	**2 Orang**	**10,000,000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Jabatan	2 org	10,000,000	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi*	Luar Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Jabatan	2 org	10,000,000	

3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Popolii**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administarsi Perangkat Daerah**		**259,943,066**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Popolii**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administarsi Perangkat Daerah**		**259,943,066**	
	Penyediaan Logistik Kantor	Popolii	Jumlah BBM	9000 liter	90,000,000	*Penyediaan Logistik Kantor*	Popolii	Jumlah BBM	9000 liter	90,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Popolii	Jumlah Spanduk, Cetak dan Penggandaan	2 jenis	14,943,066	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Popolii	Jumlah Spanduk, Cetak dan Penggandaan	2 jenis	14,943,066	
	Fasiitasi Kunjungan Tamu	Popolii	Jumlah Tamu yang berkunjung	12 Laporan	15,000,000	*Fasiitasi Kunjungan Tamu*	Popolii	Jumlah Tamu yang berkunjung	12 Laporan	15,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat- Rapat Konsultasi dan Koordinasi	Kabupaten Tojo Una-Una dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	12 Laporan	140,000,000	*Penyelenggaraan Rapat- Rapat Konsultasi dan Koordinasi*	Kabupaten Tojo Una-Una dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	12 Laporan	140,000,000	
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Popolii**	**Jumlah BMD penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**10 buah**	**60,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Popolii**	**Jumlah BMD penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**10 buah**	**60,000,000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Popolii	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	4 buah	30,000,000	*Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya*	Popolii	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	4 buah	30,000,000	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Popolii	Jumlah Sarana dan Parsaran pendukung lainya yang diadakn	10 buah	30,000,000	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau*		Jumlah Sarana dan Parsaran pendukung lainya yang diadakn	10 buah	30,000,000	
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Popoli i**	**Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang**	**12 bulan**	**191,000,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Popoli i**	**Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang**	**12 bulan**	**191,000,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Popoii	Jumlah Perangko/Materai yang dibeli	12 Laporan	12,000,000	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Popoii	Jumlah Perangko/Materai yang dibeli	12 Laporan	12,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Popolii	Jumlah Pembayaran Air, listrik dan Jasa Komunikasi	12 Laporan	17,000,000	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik*	Popolii	Jumlah Pembayaran Air, listrik dan Jasa Komunikasi	12 Laporan	17,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Popolii	Jumlah Bulan Penyediaa Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	12 Laporan	12,000,000	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Popolii	Jumlah Bulan Penyediaa Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	12 Laporan	12,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Popolii	Jumlah Bulan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	150,000,000	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Popolii	Jumlah Bulan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	150,000,000	
6	**Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Popoli i**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan DInas**	**3 unit**	**14,000,000**	**Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Popoli i**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan DInas**	**3 unit**	**14,000,000**	

	Rancangan Awal RKPD	**Hasil Analisis Kebutuhan**	

No	**Program/Kegiatan**	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan,pajak dan periizinan kendaraan Dinas	Popolii	Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan DInas	3 Unit	4,000,000	*Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan,pajak dan periizinan kendaraan Dinas*	Popolii	Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan DInas	3 Unit	4,000,000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Popolii	Jumlah Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	10 unit	10,000,000	*Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya*	Popolii	Jumlah Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	10 unit	10,000,000	
II	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Popoli i**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9 Desa	**65,000,000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Popoli i**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9 Desa	**65,000,000**	
1.	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Popoli i**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**9 Desa**	**65,000,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Popoli i**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**9 Desa**	**65,000,000**	
	Peningkatan Partispasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan	Popolii	Jumlah Desa ynag berpartispasi	9 Desa	10,000,000	*Peningkatan Partispasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan*	Popolii	Jumlah Desa ynag berpartispasi	9 Desa	10,000,000	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Popolii	Jumlah Desa ynag berpartispasi	9 Desa	55,000,000	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Popolii	Jumlah Desa ynag berpartispasi	9 Desa	55,000,000	
III	**Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum**	**Popolii**	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketertiban Umum	12 bln	**26,100,000**	**Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum**	**Popolii**	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketertiban Umum	12 bln	**26,100,000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Popolii**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketertiban Umum**	**12 bln**	**26,100,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Popolii**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketertiban Umum**	**12 bln**	**26,100,000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,TNI dan Instansi Vertikal lainnya di Kecamatan	Popolii	Jumlah Bulan Insentif Unsur Tripika Kecamatan	12 bulan	26,100,000	*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,TNI dan Instansi Vertikal lainnya di Kecamatan*	Popolii	Jumlah Bulan Insentif Unsur Tripika Kecamatan	12 bulan	26,100,000	
III	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Popolii**	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Keg	**6,000,000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Popolii**	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Keg	**6,000,000**	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	**Popolii**	**Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan**	**1 Keg**	**6,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**Popolii**	**Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan**	**1 Keg**	**6,000,000**	
	Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku, Umat beragama, RAS dan golongan lainnya guna meujudkan stabilitas keamanan lokal, regional	Popolii	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Keg	6,000,000	*Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku, Umat beragama, RAS dan golongan lainnya guna meujudkan stabilitas keamanan lokal, regional*	Popolii	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Keg	6,000,000	
IV	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemrintah Desa**	**Popolii**	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	2 Keg	**24,000,000**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemrintah Desa**	**Popolii**	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	2 Keg	**24,000,000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	**Popolii**	Jumah Desa	9 Desa	**24,000,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Popolii**	Jumah Desa	9 Desa	**24,000,000**	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Popolii	Jumah Desa	3 Desa	15,000,000	*Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	Popolii	Jumah Desa	3 Desa	15,000,000	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	**Popolii**	Jumlah Desa	9 Desa	9,000,000	*Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	**Popolii**	Jumlah Desa	9 Desa	9,000,000	
Pagu Indikatif					**666,043,066**					**666,043,066**	

Popolii, APRIL 2023

CAMAT WALEA KEPULAUAN,

RIKKI HENDRI, SP

NIP.19750510 200701 1 024

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN WALEA KEPULAUAN KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN WALEA KEPULAUAN						**2.173.916.336,00**							**2.308.373.270,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.173.916.336,00**							**2.308.373.270,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.052.816.336,00**							**2.185.373.270,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**C Nilai**		**C Nilai**	**C Nilai**	**2.052.816.336,00**						**C Nilai**	**2.185.373.270,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat Daerah*	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	10.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	4 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popolii	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	4 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya GAnji dan Tunjangan ASN*	20 Orang		20 Orang	20 Orang	1.507.873.270,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	GAJI ASN	17 Orang/bulan	1.507.873.270,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.507.873.270,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popolii	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	GAJI ASN	17 Orang/bulan	1.507.873.270,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang mengikuti Diklat*	1 orang		1 orang	1 orang	10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN	2 Orang	24.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popolii	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN	2 Orang	24.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase terlaksananya kegiatan Administrasi Perangkat DAerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	259.943.066,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	4 Paket	332.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	90.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	4 Paket	120.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	14.943.066,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	2 Paket	15.500.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	12 Laporan	16.500.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	12 Laporan	180.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan*	3 Unit		3 Unit	3 Unit	60.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	4 Unit	66.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popolii	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	4 Unit	33.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popolii	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	5 Unit	33.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	191.000.000,00			-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	221.500.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popolii	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	13.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	17.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Popolii - Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	19.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popolii	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	13.500.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popolii	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	176.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumah Barang Milik Daerah Yang dipelihara*	9 unit		9 unit	9 unit	14.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	3 Unit	22.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	4.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	3 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popolii	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	10 Unit	12.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01	**KECAMATAN**						**121.100.000,00**							**123.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai IDM Kecamatan***	**0,5852 Poin**		**0,5852 Poin**	**0,5852 Poin**	**65.000.000,00**						**0,5852 Poin**	**75.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Presentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	65.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	9 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	9 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	12 Laporan	75.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani***	**100,00 Persen**		**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**26.100.000,00**						**100,00 Persen**	**30.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Bulan Kegiatan Koordinasi yang dilakukan dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum*	12 bulan		12 bulan	12 bulan	26.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	12 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	26.100.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	12 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**100,00 Persen**		**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**6.000.000,00**						**100,00 Persen**	**6.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Bulan Kegiatan Penyelenggaran Pemerintahan Umum*	12 bulan		12 bulan	12 bulan	6.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	300 Orang	6.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang		300 Orang	300 Orang	6.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	300 Orang	6.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Status Desa Berkembang*** **5 Desa** ***Status Desa Maju*** **1 Desa** ***Status Desa Sangat Tertinggal*** **0 Desa** ***Status Desa Tertingga*** **3 Desa**	**5 Desa** **1 Desa** **0 Desa** **3 Desa**		**5 Desa** **1 Desa** **0 Desa** **3 Desa**	**5 Desa** **1 Desa** **0 Desa** **3 Desa**	**24.000.000,00**						**5 Desa** **1 Desa** **0 Desa** **3 Desa**	**12.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah desa*	9 Desa		9 Desa	9 Desa	24.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	3 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	3 Dokumen	0,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	27 Dokumen		27 Dokumen	27 Dokumen	9.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN	27 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
	J U M L A H							**2.173.916.336,00**							**2.308.373.270,00**	

RANCANGAN AWAL

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN WALEA BESAR

TAHUN 2024

RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

TAHUN 2016 - 2021

KECAMATAN WALEA BESAR



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KECAMATAN WALEA BESAR
Jalan Pulau Walea Bahi Nomor 1 Pasokan , Kode Pos : 94683
Website.tojounaunakab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT WALEA BESAR KABUPATEN TOJO UNA – UNA
Nomor : 188.4/ 17/WB/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT WALEA BESAR KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Menimbang :

a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una, perlu disusun dokumen rencana strategis tahun 2021-2026 Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una-Una;
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan Camat Walea Besar tentang rencana strategis Kantor Camat Walea Besar Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026.

Mengingat **:**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan ,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;

Menetapkan :

M E M U T U S K A N

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja)) Tahun 2021-2026

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Walea Besar Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini terdiri dari :

Bab I Pendahuluan.

Bab II Gambaran Pelayanan Kantor Camat Walea Besar

Bab III Isu Strategi Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Opd

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Strategi Dan Kebijakan

Bab V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Bab VII Penutup

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasokan
Pada Tanggal : Mei 2023

Camat Walea Besar
Kabupaten Tojo Una –Una

ABD. MANAN TJ. PANJILI, S.Pd
Pembina, IV/a
NIP.19670203 198903 1 012

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT WALEA BESAR

Nomor : 188.4/ /WB/2023

Tanggal : Mei 2023

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021-2026**

Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021-2026

Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una-Una

Ketua : **CAMAT WALEA BSAR**
Sekretaris : **SEKRETARIS CAMAT WALEA BESAR**
Kelompok Kerja :

1. **Bidang Pemeritahan** :
   Kordinator : Kasie Pemerintahan Anggota
   Anggota : Staf

2. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**::
   Kordinator : Kasie Pemberdayaan dan Kesejateraan Rakyat
   Anggota : Staf

3. **Bidang Pembangunan :**
   Kordinator : Kasie Ekonomi dan Pembangunan

   Anggota : Staf

CAMAT WALEA BESAR

ABD. MANAN TJ. PANJILI, S.Pd
Pembina, IV/a
NIP.19670203 198903 1 012

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KECAMATAN WALEA BESAR

Jln. Tadulako No. 243 Wakai Kode Pos 94691

SURAT KEPUTUSAN CAMAT WALEA BESAR

KABUPATEN TOJO UNA – UNA

Nomor : 188.4/01. /WB/2024

T E N T A N G

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN WALEA BESAR (RENJA SKPD KEC.WALEA BESAR) KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

CAMAT WALEA BESAR

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2024 ;
b. bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD memuat arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanankan pembangunan daerah yang berkesinambungan ;
c. bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2022 memuat program / Kegiatan pembangunan SKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126 ,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan ,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

:

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Propensi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propensi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Propensi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 24);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016;

Menetapkan ***M E M U T U S K A N***

KESATU : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Walea Besar Tahun 2023, yang selanjutnya disebut (Renja SKPD) Tahun 2024, adalah Dokumen Program / kegiatan periode 1 (satu) tahun.

KEDUA : Renja SKPD Kecamatan Walea Besar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Bab 1 PENDAHULUAN.
b. Bab 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA.
c. Bab 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.
d. Bab 4 PENUTUP.

KETIGA : Renja SKPD Kecamatan Walea Besar Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 26 Tahun 2015 yang memuat Program / kegiatan, Indikator kinerja, lokasi kegiatan, Target pencapaian kinerja dan pagu indikatif.

putusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasokan
Pada Tanggal : 23 Mei 2023

CAMAT WALEA BESAR
KABUPATEN TOJO UNA –UNA

ABD.MANAN TJ.PANJILI,S.Pd
Pembina IV/a
NIP. 19670203 198903 1 012

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Walea Besar Tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Walea Besar adalah dokumen perencanaan Kantor Kecamatan Walea Besar untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan Kemasyarakatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Atas kerjasama dari semua pihak, khususnya para pejabat struktural maupun fungsional serta staf administrasi Kantor Kecamatan Walea Besar dan Pemerintah Desa, serta tim penyusun RENJA Tahun 2024 sehingga terwujud laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Pasokan, 23 Mei 2023

Camat Walea Besar

ABD. MANAN TJ. PANJILI, S.Pd
Pembina
Nip.19670203 198903 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD). Renja OPD Kecamatan Walea Besar merupakan dokumen perencanaan OPD Kecamatan Walea Besar untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una Una yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2021– 2026, pada tahun 2022 memasuki tahun ke empat dalam implementasinya, Proses penyusunan Renja OPD Tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra OPD 2021-2026, dan RKPD Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan Renja OPD 2024.

Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una una.

Renja perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu untuk menjembatani perencanaan tingkat perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja disusun oleh masing-masing perangkat daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja perangkat daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang akan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota serta sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi maupun APBN.

Renja OPD Kecamatan Walea Besar Tahun 2024 merupakan bagian dari RKPD Kota Tojo Una Una dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan tahunan OPD Kecamatan Walea Besar. Renja OPD disusun untuk memberikan informasi data bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan bagi OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja OPD. Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun mendatang akan makin mendekat pada ke tataran clean government dan good governance.

1.2. Landasan Hukum

Landasan peraturan dan perundang-undangan dalam penyusunan Renja OPD ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Landasan idil Pancasila;

2. Landasan konstitusional Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang sudah diamandemen;
3. Landasan Operasional, terdiri dari :
    1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
    2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
    4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
    5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794);
26. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Pemutahiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

KeuanganDaerah;

27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ/2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020;
28. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBDPerubahanTahunAnggaran2021.
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 7);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 2);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kantor Kecamatan Walea Besar tahun 2024 Kabupaten Tojo Una-Una adalah :

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan :

1. Untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi Perangkat kerja yang ada pada Lingkungan Kantor Kecamatan Walea Besar untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban;
2. Sebagai acuan resmi bagi seluruh staf Kecamatan Walea Besar dalam Menentukan Prioritas Program dan Kegiatan;
3. Sebagai Tolak ukur untuk mengukur dan melakukan Evaluasi Kinerja;
4. Memberikan Gambaran tentang kondisi umum Organisasi dalam kaitannya dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi sekaligus memberikan gambaran Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujutkan Visi dan Misi Bupati Tojo Una una;

1.3.2 Tujuan

Secara umum Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kantor Kecamatan Walea Besar.

Selanjutnya secara khusus penyusunan Renja Kecamatan Walea Besar ini juga bertujuan untuk :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan;
2. Menyediakan dokumen acuan resmi bagi seluruh aparatur kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas program dan kegiatan Kecamatan Walea Besar tahun 2024 yang akan dibiayai oleh APBD II Kabupaten Tojo Una una;

3. Menjabarkan gambaran umum daerah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2024 kedepan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih baik;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu satu tahun.
5. Mewujudkan Dasar yang Kokoh bagi Keterkaitan antara Perencanaan dan Penganggaran;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Walea Besar tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja OPD Kantor Kecamatan Walea Besar.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPDKantor Kecamatan Walea Besar, analisis kinerja pelayanan OPD Kantor Kecamatan Walea Besar, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPDKantor Kecamatan Walea Besar, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan kemasyarakatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, dan sasaran Renja OPD Kantor Kecamatan Walea Besar, serta Program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rincian pendanaan yang akan dituangkan dalam Renja Tahun 2024

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WALEA BESAR TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Kantor Kecamatan Walea Besar tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD Kantor Kecamatan Walea Besar dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD Kantor Kecamatan Walea Besar, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD Kantor Kecamatan Walea Besar terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WALEA BESAR TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KANTOR KECAMATAN WALEA BESAR

Evaluasi pelaksanaan renja OPD Kantor Kecamatan Walea Besar tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD Kantor Kecamatan Walea Besar dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD Kantor Kecamatan Walea Besar berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD Kantor Kecamatan Walea Besar berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan OPD Kantor Kecamatan Walea Besar. Keberhasilan kinerja OPD Kantor Kecamatan Walea Besar dapat dilihat dari pencapaian indicator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan OPD Kantor Kecamatan Walea Besar dapat dilihat pada table berikut ini :

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN WALEA BESAR

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Walea Besar, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Kecamatan Walea Besar sebagai berikut:

a. Tantangan dari Dalam (Internal)

Hal-hal yang menjadi tantangan dari dalam yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan di Bidang Perencanaan Bangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penguasaaan Ilmu Pemerintahan
2. Terbatasnya literature tentang Manajemen Pemerintahan dan Perundang-undangan yang menjadi referensi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan.
3. Belum tertatanya managemen Pemerintahan dan Penganggaran berbasis kinerja.

b. Tantangan dari Luar (Eksternal)

Hal-hal yang menjadi tantangan dari luar yaitu :

1. Belum maksimalnya koordinasi antara OPD Kabupaten dengan Pihak Kecamatan tentang Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Kurangnya pemahaman dari Aparatur dalam penetapan prioritas dan perhitungan anggaran yang berbasis kinerja pada pembangunan yang partisipatif dan transparan.
3. Belum optimalnya Sistem Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Walea Besar, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Kantor Kecamatan Walea Besar berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dean harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kecamatan Walea Besar.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel. T-II.1.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023
Kabupaten Tojo Una-una

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Jalan Malapo Biga	Desa Malapo	Terpenuhinya Transportasi Pelayanan bagi masyarakat	1Paket	

Berdasarkan review/penalaahan hasil usulan program dan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan Walea Besar ada usulan yang ditujukan ke Kecamatan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN WALEA BESAR

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Walea Besar selama tahun 2023 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2024 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan packa konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selaian prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

a. Program pro rakyat;

b. Program keadilan untuk semua; dan

c. Program pencapaian tujuan pembangunan millinium (MDG's)

Selain itu, pemerintah pusat juga baru saja menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendekatan *not business as usual*, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertunbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasarat serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi kaberhasilan pelaksanaan MP3EI.Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang *multiplier effect*-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN WALEA BESAR

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menentukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Kecamatan Walea Besar selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2024 dan prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan Kantor Camat Tojo Barat

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024
	Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan	90 %

Tabel 3.3
Sasaran Kantor Camat Walea Besar

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di Wilayah	Angka Kriminilitas	0.000 Kasus

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam tahun anggaran 2024, Kantor Camat Walea Besar telah menetapkan 4 (Empat) tujuan yang akan dicapai. Ke Empat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 4 (Empat) sasaran dari 4 sasaran tersebut terdapat 6 (enam program dan 12 kegiatan. Untuk kejelasan pencapaian implementasi rencana program dan kegiatan tersebut maka perlu dilengkapi dengan indicator kinerja kelompok sasarn serta pendanaan indikatif. Uraian ini dituangkan dalam tabel 4.1 berikut ini :

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una Una tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2023.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una-Una.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Walea Besar, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan Walea Besar maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD.

Pasokan, 23 Mei 2024

Camat Walea Besar

ABD. MANAN TJ. PANJILI, S.Pd
Pembina
Nip.19670203 198903 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 1
C. Maksud dan Tujuan 4
D. Sistimatika Penulisan 5

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WALEA BESAR TAHUN LALU 6
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Walea Besar Tahun 2021 dan 2022 Serta Capaian Renstra SKPD 6
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 10
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan SKPD 13
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 13
E. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 16

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 17
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 17
B. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Camat Walea Besar..... 18
C. Program dan Kegiatan 18

IV. PENUTUP 23

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PANCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
PROPINSI SULAWESI TENGAH KABUPATEN TOJO UNA UNA KECAMATAN WALEA BESAR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) sub kegiatan (sub output)	Target kinerja capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d kegiatan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

Pasokan, 23 Mei 2023

CAMAT WALEA BESAR

ABD. MANAN TJ. PANJILI S.Pd
Nip.19670203 198903 1 012

TABEL T-II.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR CAMAT WALEA BESAR
KABUPATEN TOJO UNA UNA

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran		100%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	
2	Tersedianya Jasa Pelayan Perkantoran		100%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	
3	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah yang disediakan		100%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	
4	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Daerah		100%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	
5	Jumlah kendaraan Dinas yang diadakan		100%	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
6	Jumlah Peralatan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan yang diadakan		100%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	0.00%	25.00%	0.00%	25.00%	25.00%	0.00%	
7	Jumlah Peralatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan		100%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	0.00%	20.00%	20.00%	
8	Jumlah Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas		100%	20.00%	0.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	0.00%	20.00%	20.00%	20.00%	
9	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor		100%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	25.00%	20.00%	20.00%	20.00%	
10	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		100%	0.00%	0.00%	33.00%	33.5%	33.5%	0.00%	0.00%	33.00%	0.00%	33.5%	
11	Jumlah Pakaian yang diadakan		100%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	
12	Jumlah Dokumen yang disusun Perencanaan dan Keuangan yang disusun		100%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	8,.27%	20.00%	20.00%	20.00%	
13	Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan		100%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	23.46%	20.00%	5.00%	20.00%	
14	Pelaksanan PKK Kecamatan		100%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	
15	Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Paskibraka		100%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	0.00%	20.00%	
16	Pelaksanaan Festival Bahari Togean		100%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Jumlah Desa yang melakukan Pemilihan		100%	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	
18	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu		100%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	0.00%	20.00%	
19	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/ Desa		100%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	
20	Pelaksanaan STQ/MTQ		100%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	0.00%	20.00%	
21	Persentas Tertibnya hewan ternak/mirasi		100%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	0.00%	20.00%	
22	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Olahraga		100%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	0.00%	
23	Terlaksananya Penyelenggaraan Bimtek dan Pembinaan Desa		100%	0.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	0.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	
24	Pelaksanaan Pembinaan Pemerintahan desa		100%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	0.00%	20.00%	
25	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi		100%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	0.00%	

Pasokan, 23 Mei 2023

CAMAT WALEA BESAR

ABD. MANAN TJ. PANJILI S.Pd

Nip.19670203 198903 1 012

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN …….
PROVINSI SULAWESI TENGAH KABUPATEN TOJO UNA UNA
KECAMATAN WALEA BESAR

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	*5*	*6*	*7*	*11*	*12*

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA UNA TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WALEA BESAR

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	KET PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
						TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
7.01.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										Rp 555,494,017		
7. 01. 01. 2. 01		Perencanaan,Penggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
7.01.01.2.01.01		a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		ASN Kantor Camat	Kantor Camat	Terwujudnya Sinergitas antara Perencanaan dan Evaluasi	12 Bulan	Jumlah Dok Renstra,Renja,RKA,DPA, Lakip,dll	5 Dok		100%		Rp 2,200,000	
7. 01. 01. 2. 02	1	Aministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
7.01.01.2.02		a.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
7.01.01.2.02.07		a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		ASN Kantor Camat	Kantor Camat	Terwujudnya Sinergitas di antara Keuangan dan	12 Bulan	Jumlah Dok. Keuangan	15 Dok		100%		Rp 6,600,000	
7.01.01.2.05	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
7.01.01.2.05.09		a.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		ASN Kantor	Palu	Meningkatnya Kapasitas ASN Kantor Camat	1 Orang	Diklat ASN Kantor Camat Tojo Barat	1 Orang		100%		Rp 33,550,000	
7.01.01.2.06	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah										Rp 260,323,000		
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Masyarakat dan ASN	Kantor Camat	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran berjalan dengan baik	100%	Tersedianya Administrasi Pelayanan Kantor	12 bulan		100%	Rp 103,825,000	Rp 103,825,000	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		ASN Kantor	Kantor Camat	Tersedianya Dokumen yang telah digandakan	100%	Jumlah kertas yang digandakan	32700 Lembar		100%		Rp 8,000,000	
7.01.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Masyarakat dan ASN	Rumah jabatan	Pelaksanaan Kegiatan berjalan dengan baik		Jumlah Tamu yang diberikan konsumsi	375 org		100%		Rp 17,050,000	
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		ASN Kantor	Dalam Daerha dan Luar Daerah	Pelaksanaan Kegiatan berjalan dengan baik	100%	Terwujudnya rapat-rapat, koordinasi,	231 kali		100%	Rp 156,498,000	Rp 198,000,000	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	KET PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
					TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Rp 10,157,000		
.01.01.2.07.10	a.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		ASN Kantor dan Masyarakat	Kantor Camat	Sarana dan prasarana gedung kantor dalam keadaan	6 Unit	Jumlah dan Jenis Peralatan gedung	6 Unit		100%	Rp 10,157,000	Rp 11,000,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Rp 160,454,017		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		ASN Kantor	Kantor camat	Tersedianya Dokumen dan surat yang bermaterai		Jumlah Materai yang diadakan			100%	Rp 14,800,017	Rp 11,000,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		ASN dan Masyarakat	Kantor camat dan Rujab	Pelayanan Masyarakat berjalan dengan baik	100%	Jumlah Rekening Jasa Sumber	4 Rekening		100%	Rp 3,000,000	Rp 3,300,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		ASN Kantor	Kantor camat	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran berjalan dengan baik	100%	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	12 bulan		100%	Rp 142,654,000	Rp 219,641,692	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Rp 25,990,000		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		ASN Kantor	Kantor camat	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik	100%	Jumlah dan Jenis Kendaraan yang dipelihara	7 Unit		100%		Rp 15,400,000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		ASN dan Masyarakat	Kantor camat	Pelaksanan Kegiatan berjalan dengan baik	100%	Jumlah Peralatan yang dipelihara	17 unit		100%		Rp 11,000,000	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**												
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat												
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		ASN dan Masyarakat	Kantor Camat	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran berjalan dengan baik	100%	Tersedianya Administrasi Pelayanan Kantor	12 bulan		100%		Rp 6,600,000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										Rp 98,570,000		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa												

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	KET PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
					TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Desa se wilayah Kec. Walea Besar	Aula Kantor Camat Walea Besar	Usulan Prioritas Desa dapat tersusun dengan baik	100%	Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang	13 desa		100%	Rp 77,250,000	Rp 33,000,000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Mayarakat	Kec. Walea Besar	Pelaksanaan Kegiatan berjalan dengan baik		Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	3 keg.		100%	Rp 21,320,000	Rp 27,500,000	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										Rp 555,494,017		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum												
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah		Unsur Tripika	Kec. Walea Besar	Pelaksanaan Kegiatan berjalan dengan baik	100%	Tersedianya Jasa Pelayanan Kecamatan	12 bulan		100%		Rp 5,500,000	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**												
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah												
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas		Mayarakat	Kec. Walea Besar	Pelaksanaan Kegiatan berjalan dengan baik		Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	3 keg.		100%		Rp 6,600,000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**												
7.01.06.2.01	fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Desa	Wilayah Kecamatan Walea Besar	Pelaksanaan Kegiatan berjalan dengan baik	100%	Jumlah Desa yang di lakukan Pembinaan	8 desa		100%		Rp 22,000,000	
Jumlah											**Rp 555,494,017**	**Rp 741,766,692**	

PRIORITAS DAN SASARAN KANR CAMAT WALEA BESAR

NO	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN WALEA BESAR KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN WALEA BESAR						**1.479.946.627,00**							**1.468.392.429,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.479.946.627,00**							**1.468.392.429,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.354.946.627,00**							**1.303.392.429,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**CC Nilai**		**CC Nilai**	**CC Nilai**	**1.354.946.627,00**						**CC Nilai**	**1.303.392.429,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	849.332.362,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	9 Orang/bulan	852.062.429,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan		9 Orang/bulan	9 Orang/bulan	849.332.362,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	9 Orang/bulan	852.062.429,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	305.414.265,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	5 Paket	352.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	100.414.265,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	5 Paket	120.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32700 Paket		32700 Paket	32700 Paket	6.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	32700 Paket	7.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	19.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	3 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231 Laporan		231 Laporan	231 Laporan	180.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	231 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	6 Unit	12.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	6 Unit	12.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prensetase Jasa Penunjang Yang diadakan*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	155.200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	5 Laporan	42.330.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	11.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	5 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	4 Laporan	6.600.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	138.200.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semua Kel/Desa	-	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	11 Laporan	20.730.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Barang Milik daerah yang dipelihara*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	35.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	7 Unit	45.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	7 Unit	23.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	10 Unit	22.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	7.01	**KECAMATAN**						**125.000.000,00**							**165.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai IDM Kecamatan***	**0,6026 Poin**		**0,6026 Poin**	**0,6026 Poin**	**80.000.000,00**						**0,6026 Poin**	**110.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Presentase Kegiatan Koordinasi pemberdayaan Desa*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	80.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	110.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Desa	4 Laporan	70.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani***	**100,00 Persen**		**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**25.000.000,00**						**100,00 Persen**	**30.000.000,00**	
	7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	3 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	3 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Status Desa Berkembang*** ***Status Desa Maju*** ***Status Desa Sangat Tertinggal*** ***Status Desa Tertinggal***	**4 Desa** **1 Desa** **0 Desa** **3 Desa**		**4 Desa** **1 Desa** **0 Desa** **3 Desa**	**4 Desa** **1 Desa** **0 Desa** **3 Desa**	**20.000.000,00**						**4 Desa** **1 Desa** **0 Desa** **3 Desa**	**25.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	8 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	8 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
	J U M L A H							**1.479.946.627,00**							**1.468.392.429,00**	

RENCANA KERJA

(RENJA)



KANTOR KECAMATAN TALATAKO

KABUPATEN TOJO UNA UNA

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KANTOR KECAMATAN TALATAKO

Desa Kalia Kode Pos 94691

SURAT KEPUTUSAN CAMAT TALATAKO
KABUPATEN TOJO UNA – UNA
Nomor : 188.45 / /TLK/2023

T E N T A N G

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KANTOR KECAMATAN TALATAKO KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

CAMAT TALATAKO MEMUTUSKAN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2023 ;

b. bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD memuat arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanankan pembangunan daerah yang berkesinambungan ;

c. bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2021 memuat program / Kegiatan pembangunan SKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lemabaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden republik indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menegah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan perturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulteng Tahun 2011-2016 (Lemabaran Daerah Propinsi Sulteng Tahun 2011 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor Tahun 2022 tentang rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Talatako Tahun 2024, yang selanjutnya disebut (Renja SKPD) Tahun 2024, adalah Dokumen Program / kegiatan periode 1 (satu) Tahun

KEDUA : Renja SKPD Kantor Kecamatan Talatako Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Bab 1 PENDAHULUAN.
b. Bab 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA.
c. Bab 3 TUJUAN,SASARAN,PROGRAMDAN KEGIATAN.
d. Bab 4 PENUTUP

KETIGA : Renja SKPD Kantor Kecamatan Talatako Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 27 Tahun 2015 yang memuat Program / kegiatan, Indikator kinerja, lokasi kegiatan, Target pencapaian kinerja dan pagu indikatif.

putusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Di Tetapkan di : Kalia
Pada Tanggal : 27 Maret 2023

CAMAT TALATAKO

TAMSIL TAMRIN HASAN, S.Pd
Pembina Tkt. I
Nip. 19670704 199302 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TALATAKO

Nomor : 188.45/ /TLK/2023
Tanggal : 27 Maret 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Talatako Tahun 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
PADA KANTOR KECAMATAN TALATAKO KABUPATEN TOJO UNA – UNA

Ketua Tim : **CAMAT TALATAKO**
Sekretaris Tim : **SEKRETARIS KANTOR CAMAT TALATAKO**
Anggota : **KASUBAG PENYUSUN PROGRAM KEUANGAN DAN ASET**
Anggota : **FADLUN BADJEBER** (Operator Subag Perencanaan)

Kelompok Kerja :
1. Seksi Pemerintahan
   Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan
2. Seksi Ekbang
   Koordinator : Kepala Seksi Ekbang
3. Seksi Trantib
   Koordinator : Kepala Seksi Trantib
4. Seksi PMD
   Koordinator : Kepala Seksi PMD

Ditetapkan di : Kalia
Pada Tanggal : 27 Maret 2023

CAMAT TALATAKO

TAMSIL TAMRIN HASAN, S.Pd
Pembina Tkt. I
Nip. 19670704 199302 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kantor Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una telah berhasil disusun.

Renja Kantor Kecamatan Talatako Tahun 2024 memuat program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mempertimbangkan RPJMN 2021-2026, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una serta bersifat indikatif.

Semoga Rancangan RENJA ini dapat bermanfaat untuk pembangunan di Wilayah Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una.

Atas kerjasama dari semua pihak, khususnya para pejabat struktural maupun fungsional serta staf administrasi unit Kantor Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-una, kami ucapkan terima kasih.

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistimatika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR CAMAT TALATAKO

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Talatako Dan Capaian Renstra OPD..... 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 8
2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan OPD 11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 9
2.5 Penalaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 14

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi..... 15
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Camat Talatako 17

BAB IV PENUTUP 21

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Kantor Kecamatan Talatako sebagai unit kerja yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang pemerintahan yang membawahi Desa dan Kelurahan diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Talatako maka disusunlah Renja Kantor Kecamatan Talatako 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan OPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra OPD yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Kantor Kecamatan Talatako sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Dearah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor …….. Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Renja Kantor Kecamatan Talatako Tahun 2024 Kabupaten Tojo Una-Una.

1.3.1. Maksud

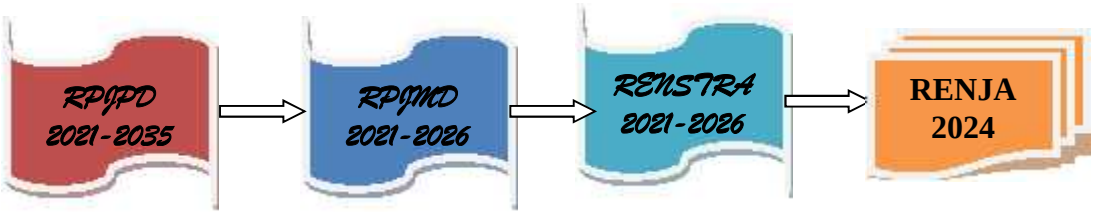
Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi OPD Kantor Kecamatan Talatako untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas pada Kantor Kecamatan Talatako dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja 2023 Kantor Kecamatan Talatako disusun dengan sistematika sebagai berikut:



Gambar 1.4 : Bagan alur sistimatika pembuatan Rencana Kerja (Renja)

Sesuai alur pikir tersebut, Dokumen Rencana Kerja (Renja) akan disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renjadan sistematika penulisandokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta Program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN TALATAKO

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Talatako tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN TALATAKO DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun 2023 dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berisikan kajian terhadap Capaian Kinerja Pelayanan OPD Kantor Kecamatan Talatako berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan OPD Kantor Kecamatan Talatako. Keberhasilan kinerja OPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan OPD Kantor Kecamatan Talatako dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN OPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Talatako, Permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah, Capaian Program Nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Kantor Kecamatan Talatako sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
   Khusus Provinsi, uraikan mengenai Koordinasi dan sinergi Program antara OPD provinsi dengan OPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di Tingkat Pusat dalam rangka Pencapaian Kinerja Pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kantor Kecamatan Talatako, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Kantor Kecamatan Talatako berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

2.5. PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2023 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kecamatan Talatako.

Kajian usulan program dan kegiatan pada merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kantor Kecamatan Talatako selama tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

a. Telahaan Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2023 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan packa konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selaian prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

a. Program pro rakyat;
b. Program keadilan untuk semua; dan
c. Program pencapaian tujuan pembangunan

Selain itu, pemerintah pusat juga baru saja menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendekatan *not business as usual*, melibatkan seluruh

pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertunbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasyarat serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi kaberhasilan pelaksanaan MP3EI. Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang *multiplier effect*-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air.

b. Telahaan Kebijakan Provinsi

Telaahan kebijakan provinsi pada dasarnya dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2024 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan packa konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Kebijakan yang ditempuh mengacu pada isu-isu strategis daerah yang telah diimplementasikan dari RPJM Nasional. Hal-hal ini dapat dilihat dari

keluaran peraturan daerah yang telah mengakomodir baik secara langsung maupun tidak program-program dimaksud. OPD sebagai basis terakhir diharapkan dapat merangkum semua permasalahan-permasalahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Talatako

3.2.1. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan Renja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) yang berasal dari penjabaran Rencana Strategis (Renstra).

Dengan diformulasikannya tujuan rencana kerja ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan Kantor Kecamatan Talatako untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuans tratejik dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Adapun tujuan dari Kantor Kecamatan Talatako adalah *Terwujudnya Pelayanan Prima Dan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan*

Sasaran Kantor Kecamatan Talatako merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan kegiatan dan alokasi

sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sasaran Renja Kantor Kecamatan Talatako merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan satu tahun kedepan yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Kantor Kecamatan Talatako Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat dicapai.

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, Program-program yang telah ditetapkan sepenuhnya pencapaian sasaran yang terkait. Secara Keseluruhan sasaran dan program Kantor Kecamatan Talatako dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan

   Meningkatnya Kapasitas Aparatur pengelola secara Institusional sebagai perwujudan Good Governance.

2. Sasaran

   - ✓ Terwujudnya Kwalitas Sumber Daya Masyarakat aparatur dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat
   - ✓ Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
   - ✓ Program peningkatan Disiplin Aparatur
   - ✓ Program peningkatan SDM Aparatur

- ✓ Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- ✓ Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

3.2.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu.

Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikanpermasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Kantor Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta prognosisnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel III.2

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una untuk disusun mencakup visi,misi,tujuan, sasaran,kebijakan,program dan kegiatan tahun 2023, renja ini disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan dibidang pemerintahan dan pembangunan di kecamatan.

Adanya Renja ini diharapkan bagi Kantor Kecamatan Talatako serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang konprehensip.

Kalia, Maret 2023

CAMAT TALATAKO

TAMSIL TAMRIN HASAN, S.Pd
Penata Tkt. I
Nip. 19670704 199302 1 003

TABEL 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kantor Kecamatan Talatako Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

lembar .... dari ....

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)
4.01	**4.01**	**21**	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip OPD**	**Kec Talatako**	**1 Thn**		**441,646,566**			**1 Thn**		**503,700,000**	
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Administrasi Umum PD**				184,646,566					208,150,000	
4.01	4.01	21	18	- Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor yang di sediakan	Kec Talatako	3	Paket	50,000,000	DAU		3	Paket	57,500,000	DAU
4.01	4.01	21	20	- Penyediaan barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang digandakan	Kec Talatako	2	Paket	5,000,000	DAU		2	Paket	5,750,000	DAU
4.01	4.01	21	21	- Fasilitas kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang di layani	Kec Talatako	150	Laporan	6,000,000	DAU		150	Laporan	6,900,000	DAU
4.01	4.01	21	23	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang di Ikuti	Kec Talatako	140	Laporan	123,646,566	DAU		140	Laporan	138,000,000	DAU
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Aset kantor Penunjang Urusan PD**				15,000,000					17,250,000	
4.01	4.01	21	07	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Aset yang di adakan	Kec Talatako	1	Unit	15,000,000	DAU		1	Unit	17,250,000	DAU
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD**				197,000,000					226,550,000	
4.01	4.01	21	09	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Materai yang digunakan	Kec Talatako	300	Laporan	3,000,000	DAU		300	Laporan	3,450,000	DAU
4.01	4.01	21	20	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa yang di bayarkan	Kec Talatako	12	Laporan	4,000,000	DAU		12	Laporan	4,600,000	DAU
4.01	4.01	21	22	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ASN yang dibayarkan Honornya	Kec Talatako	12	Laporan	190,000,000	DAU		12	Laporan	218,500,000	DAU
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan barang**				45,000,000					51,750,000	
4.01	4.01	21	24	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang di pelihara	Kec Talatako	2	Unit	5,000,000	DAU		2	Unit	5,750,000	DAU
4.01	4.01	21	28	- Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana yang di pelihara	Kec Talatako	20	Unit	40,000,000	DAU		20	Unit	46,000,000	DAU
4.01	**4.01**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN**	**Nilai IDM Kecamatan**	**Kec Talatako**	**1 Thn**		**120,000,000**			**1 Thn**		138,000,000	**DAU**
				Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa**				120,000,000					138,000,000	
4.01	4.01			- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musywarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang	Kec Talatako	10	Lembaga kemasyarakatn	20,000,000	DAU		10	Lembaga	23,000,000	DAU
				- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kec Talatako	350	Laporan	100,000,000	DAU		350	Laporan	115,000,000	
4.01	**4.01**	**21**	**15**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yg tertangani**	**Kec Talatako**	**1 Thn**		**24,000,000**	**-**		**1 Thn**		**27,600,000**	**-**
				Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya Koordinasi Ketentaraman dan Ketertiban Umum**				24,000,000					27,600,000	
4.01	4.01	21	01	- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec Talatako	12	Laporan	24,000,000	DAU		12	Laporan	27,600,000	DAU
Total Pagu Indikatif Pertahun									**585,646,566**	**DAU**				**669,300,000**	**DAU**

Tabel 2.4

Riview terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Tojo Una-Una

Nama SKPD: Kantor Kecamatan Talatako

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Tahun 2024		Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Tahun 2024		
				Target	Pagu Indikatif				Target	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(5)	(10)	(11)
I.	**1. Prorgram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**		**Nilai Sakip OPD**		**441,646,566**	**1. Prorgram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**		**Nilai Sakip OPD**		**441,646,566**	
	- Penyediaan Bahan logistik Kantor	Kec. Talatako	Jumlah Bahan logistik kantor yang di sediakan	3 Paket	50,000,000	- Penyediaan Bahan logistik Kantor	Kec. Talatako	Jumlah Bahan logistik kantor yang di sediakan	3 Paket	50,000,000	
	- Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kec. Talatako	Jumlah Dokumen yang digandakan	2 Paket	5,000,000	- Penyediaan barang Cetakan Dan Penggandaan	Kec. Talatako	Jumlah Dokumen yang digandakan	2 Paket	5,000,000	
	Fasilitas kunjungan Tamu	Kec. Talatako	Jumlah tamu yang di layani	150 laporan	6,000,000	Fasilitas kunjungan Tamu	Kec. Talatako	Jumlah tamu yang di layani	150 laporan	6,000,000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Talatako	Jumlah Rapat Koordinasi yang di Ikuti	140 Laporan	123,646,566	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Talatako	Jumlah Dokumen yang di gandakan	140 Laporan	123,646,566	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Talatako	jumlah Aset yang di adakan	1 Unit	15,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Talatako	Terpenuhinya semua Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	1 Unit	15,000,000	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Talatako	jumlah Materai yang digunakan	300 laporan	3,000,000	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Talatako	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	300 laporan	3,000,000	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Talatako	Jumlah rekening jasa yang di bayarkan	12 laporan	4,000,000	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Talatako	Tersedianya jasa Komunikasi, SDA dan listrik	12 laporan	4,000,000	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Talatako	Jumlah ASN yang dibayarkan Honornya	12 Bln	190,000,000	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Talatako	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bln	190,000,000	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan dinas Jabatan	Kec. Talatako	Jumlah kendaraan dinas yang di pelihara	2 Unit	5,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan dinas Jabatan	Kec. Talatako	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	2 Unit	5,000,000	
	- Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Talatako	Jumlah sarana dan Prasarana yang di pelihara	19 Unit	40,000,000	Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Talatako	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	19 Unit	40,000,000	
II.	**2. Program Pemberdayaa Masyarakat Desa/Kelurahan**		**Nilai IDM Kecamatan**		**120,000,000**	**2. Program Pemberdayaa Masyarakat Desa/Kelurahan**		**Nilai IDM Kecamatan**		**120,000,000**	

	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musywarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang	10	Lembaga kemasyarakatn	20,000,000	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musywarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Terlaksananya kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musywarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	Lembaga kemasyarakatn	20,000,000	
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	350	laporan	100,000,000	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	350	laporan	100,000,000	
III.	**3. Program Koordinasi Ketntraman dan Ketertiban Umum**	**-**	**Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yg tertangani**			**24,000,000**	**3. Program Koordinasi Ketntraman dan Ketertiban Umum**	**-**	**Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yg tertangani**			**24,000,000**	
	- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	-	Terlaksananya Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	laporan	24,000,000	- Kegiatan Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Teritorial	-	Jumlah Petugas yang melakukan Kamtibmas, Teritorial dan Sosial Kemasyarakatan	12	Laporan	24,000,000	
TOTAL						**585,646,566**	**TOTAL**					**585,646,566**	

Tabel 2.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
KANTOR KECAMATAN TALATAKO

	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pertanian,Peri wisata dan kemaritiman	**1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**	**- Indeks Reformasi Birokrasi**	**1. Prorgram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**- Nilai Sakip OPD**	**100%**		**425,249,500**		**276,968,000**		**441,646,566**		**580,625,000**		**580,625,000**
			a. Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor yang di sediakan	100%	3 Paket	55,962,250	3 Paket	43,000,000	3 Paket	50,000,000	3 Paket	50,000,000	3 Paket	50,000,000
			b. Penyediaan barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang digandakan	100%	1250 Paket	5,013,250	1,500 Paket	5,625,000	2 Paket	5,000,000	1,500 Paket	5,625,000	1,500 Paket	5,625,000
			c. Fasilitas kunjungan Tamu	- Jumlah tamu yang di layani	100%	150 Laporan	5,000,000	300 Laporan	9,200,000	150 Laporan	6,000,000	300 Laporan	7,500,000	300 Laporan	7,500,000
			d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang di Ikuti	100%	95 Laporan	126,553,000	110 Laporan	134,638,000	140 Laporan	123,646,566	120 Laporan	155,000,000	150 Laporan	155,000,000
			e. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Aset yang di adakan	100%	1 Unit	10,976,000	4 Unit	63,505,000	1 Unit	15,000,000	7 Unit	90,000,000	7 Unit	90,000,000
			f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Materai yang digunakan	100%	500 Laporan	5,000,000	300 Laporan	3,000,000	300 Laporan	3,000,000	300 Laporan	3,000,000	300 Laporan	3,000,000
			g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa yang di bayarkan	0%	12 Laporan	495,000	12 Laporan	2,500,000	12 Laporan	4,000,000	12 Laporan	4,500,000	12 Laporan	4,500,000
			h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ASN yang dibayarkan Honornya	100%	12 Laporan	201,000,000	12 Laporan	250,000	12 Laporan	190,000,000	12 Laporan	230,000,000	12 Laporan	230,000,000
			i Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang di pelihara	100%	2 Unit	6,000,000	2 Unit	6,000,000	2 Unit	5,000,000	4 Unit	20,000,000	4 Unit	20,000,000
			j. Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana yang di pelihara	100%	12 Unit	9,250,000	12 Unit	9,250,000	20 Unit	40,000,000	15 Unit	15,000,000	15 Unit	15,000,000

		-	**2. Program Pemberdayaa Masyarakat Desa/Kelurahan**	**Nilai IDM Kecamatan**	**100%**		**81,750,000**		**240,000,000**		**120,000,000**		**295,000,000**		**295,000,000**
			a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang	100%	6 Lembaga Kemasyarakatan	16,950,000	6 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	10 Lembaga kemasyarakatan	20,000,000	6 Lembaga kemasyarakatan	45,000,000	6 Lembaga kemasyarakatan	45,000,000
			b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	100%	350 Laporan	64,800,000	350 Laporan	200,000,000	350 Laporan	100,000,000	350 Laporan	250,000,000	350 Laporan	250,000,000
			3. Program Koordinasi Ketntraman dan Ketertiban Umum	**Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yg tertangani**	100%		18,000,000		30,000,000		24,000,000		35,000,000		35,000,000
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	Tersedianya Jasa Pelayanan Kecamatan	100%	12 Laporan	18,000,000	12 Laporan	30,000,000	12 Laporan	24,000,000	12 Laporan	35,000,000	12 Laporan	35,000,000
							524,999,500		**546,968,000**		**585,646,566**		**910,625,000**		**910,625,000**

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD

DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2026

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2023)	Perkiraan Capaian Target program dan kegiatan OPD s/d Tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)*	(12)
4.01 4.01 21 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip OPD**									
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah										
4.01 4.01 21 18	- Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor yang Tersedia	15 Paket	6 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	15 Paket	100%	
4.01 4.01 21 20	- Penyediaan barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang digandakan	7500 Paket	1250 Paket	2500 Paket	2500 Paket	100%	6000 Paket	7500 Paket	100%	
4.01 4.01 21 21	- Fasilitas kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang di layani	1350 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	100%	300 Laporan	1350 Laporan	100%	
4.01 4.01 21 23	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang di lkuti	625 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	100%	110 Laporan	625 Laporan	100%	
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
4.01 4.01 21 07	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Aset yang di adakan	26 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	8 Unit	26 Unit	100%	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan										
4.01 4.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang digunakan	1700 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	100%	500 Laporan	1700 Laporan	100%	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa yang di bayarkan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ASN yang dibayarkan Honornya	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%	
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang di pelihara	16 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 unit	16 unit	100%	
	- Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana yang di pelihara	69 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	20 unit	69 unit	100%	
4.01 4.01 21 15	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN**	**Nilai IDM Kecamatan**									
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
4.01 4.01 21 01	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musywarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemas	100%	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100%	
4.01 4.01 21 02	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	35 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	35 Laporan	100%	
4.01 4.01 21 15	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yg tertangani**									
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum										
4.01 4.01 21 05	- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	Tersedianya Jasa Pelayanan Kecamatan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN TALATAKO KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN TALATAKO						**1.711.338.465,00**							**1.963.845.684,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.711.338.465,00**							**1.963.845.684,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.567.338.465,00**							**1.798.245.684,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**CC Nilai**		**CC Nilai**	**CC Nilai**	**1.567.338.465,00**						**CC Nilai**	**1.798.245.684,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*terlaksananya Administrasi Keuangan PD*	12 bln		12 bln	12 bln	1.125.691.899,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai	12 Orang/bulan	1.294.545.684,00	KECAMATAN TALATAKO
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.125.691.899,00	- Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai	12 Orang/bulan	1.294.545.684,00	KECAMATAN TALATAKO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah*	100 %		100 %	100 %	184.646.566,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	3 Paket	208.150.000,00	KECAMATAN TALATAKO
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	3 Paket	57.500.000,00	KECAMATAN TALATAKO
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	2 Paket	5.750.000,00	KECAMATAN TALATAKO
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	150 Laporan	6.900.000,00	KECAMATAN TALATAKO
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 Laporan		140 Laporan	140 Laporan	123.646.566,00	- Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	140 Laporan	138.000.000,00	KECAMATAN TALATAKO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*tercapainya pengadaan barang milik daerah*	7 unit		7 unit	7 unit	15.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerinyah Kecamatan	1 Unit	17.250.000,00	KECAMATAN TALATAKO
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerinyah Kecamatan	1 Unit	17.250.000,00	KECAMATAN TALATAKO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tersedianya jasa penunjang urusan PD*	100 %		100 %	100 %	197.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	300 Laporan	226.550.000,00	KECAMATAN TALATAKO
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan		300 Laporan	300 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	300 Laporan	3.450.000,00	KECAMATAN TALATAKO
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Laporan	4.600.000,00	KECAMATAN TALATAKO
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	190.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	12 Laporan	218.500.000,00	KECAMATAN TALATAKO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tercapainya pemeliharaan barang milk Daerah*	19 unit		19 unit	19 unit	45.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Sarana dan Prasarana Kantor	2 Unit	51.750.000,00	KECAMATAN TALATAKO
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Sarana dan Prasarana Kantor	2 Unit	5.750.000,00	KECAMATAN TALATAKO
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		20 Unit	20 Unit	40.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Sarana dan Prasarana Kantor	20 Unit	46.000.000,00	KECAMATAN TALATAKO
	7.01	**KECAMATAN**						**144.000.000,00**							**165.600.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai IDM Kecamatan***	**0,6002 Poin**		**0,6002 Poin**	**0,6002 Poin**	**120.000.000,00**						**0,6002 Poin**	**138.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*terlaksananyakoordinasi keg. pemberdayaan Desa*	9 keg		9 keg	9 keg	120.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	10 Lembaga Kemasyarakatan	138.000.000,00	KECAMATAN TALATAKO
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	10 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000,00	KECAMATAN TALATAKO
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	350 Laporan		350 Laporan	350 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	350 Laporan	115.000.000,00	KECAMATAN TALATAKO
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Terlaksanannya Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum***	**100 Pesen**		**100 Pesen**	**100 Pesen**	**24.000.000,00**						**100 Pesen**	**27.600.000,00**	
	7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum*	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	60 Laporan	27.600.000,00	KECAMATAN TALATAKO
	7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	24.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	60 Laporan	27.600.000,00	KECAMATAN TALATAKO
	J U M L A H							**1.711.338.465,00**							**1.963.845.684,00**	

RENCANA KERJA PERUBAHAN
KANTOR KECAMATAN RATOLINDO
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA

SUMOLI, 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan hal di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu disusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja (Renja OPD).

Renja OPD yang termasuk Kecamatan merupakan dokumen perencanaan Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Kantor Kecamatan Ratolindo. Renja OPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (ROPD).

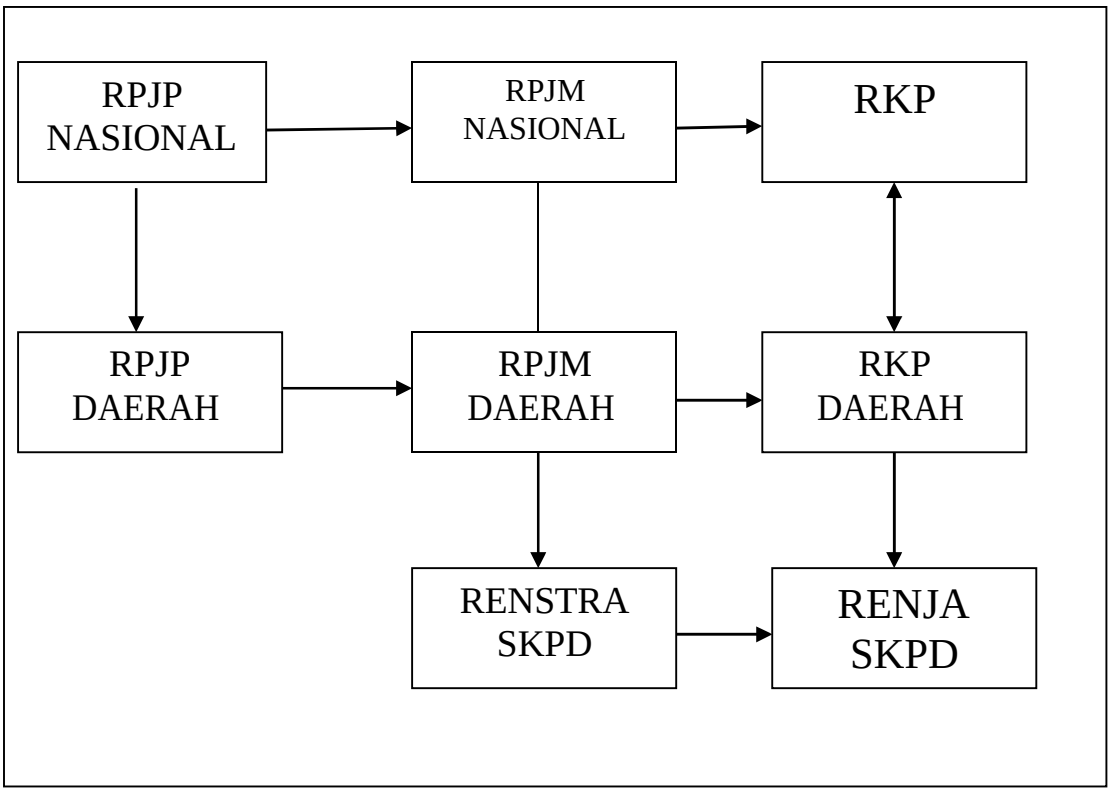
Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan ruang keleluasaan kepada pemerintah daerah khususnya OPD untuk berimprovisasi dalam penentuan proses perencanaan yang lebih bernilai strategis yang hasilnya tidak saja diukur secara konvensional melainkan harus diukur secara komprehensif. Disamping itu desentralisasi lebih menuntut kemandirian pemerintah daerah dan perlu didukung oleh kepabilitas daripada komponen maupun institusi pemerintah daerah.

Oleh sebab itu pemerintah daerah terus berupaya untuk menyempurnakanunit-unit atau Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Sejak pembentukannya Tahun 2005 lalu Pemerintah telah membetuk satuan-satuan kerja daerah sebagai penyelenggara urusan wajib pemerintah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dan pembentukan Kecamatan merupakan hasil Restrukturisasi kelembagaan pada Pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2009.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai implementasi teknis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Proses penyusunan Renja Kecamatan Ratolindo Tahun 2023 dan mekanisme mengacu pada garis kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Rencana Kerja Kecamatan sebagai dokumen perencanaan pembangunan merupakan dokumen perencanaan yang berlaku 1 (satu) tahun dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan serta berpedoman kepada RPJM Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023.

Bagan 1.1
Kaitan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain



2.1 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ratolindo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Unadang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una – Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Tahun 2008 Nomor 35);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Tahun 2010 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Nomor 46 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tojo Una – Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Tahun 2011 Nomor 46):

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Ratolindo di Wilayah Kabupaten Tojo Una – Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Tahun 2014 Nomor 15);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una – Una Tahun 2015 Nomor 11);

24. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten TojoUna-Una Tahun 2016 Nomor).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ratolindo Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf Kecamatan Ratolindo dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Ratolindo tahun 2024 adalah :

1. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Ratolindo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur sejalan dengan RPJMD dan RKPD;

2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Ratolindo dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional dalam rentang waktu 1 (tahun) tahun;

3. Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan professional berdasarkan indikator kinerja.

1.4 Sistimatika Renja Kecamatan Ratolindo

Renja Kecamatan Ratolindo Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.2 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

2.4 Sumber Daya OPD

Bab III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Visi, Misi Kantor Kecamatan Ratolindo

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SOPD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan.

Secara umum Rencana Kerja Kecamatan Ratolindo Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra OPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun mendatang. Pada tahun 2022 Kecamatan Ratolindo telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan yaitu :

1. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024, mulai dari proses musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, musrenbang tingkat Kecamatan dan forum OPD;
2. Menyusun Rencana Strategis OPD;
3. Menyusun Rencana Kerja OPD.

2.2 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, maka batas-batas wilayah, sosiologis dan kultural semakin kabur, hal ini di satu sisi menjadi peluang dalam menunjang pembangunan daerah namun disisi lain laju teknologi dan informasi dapat menjadi ancaman dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dan dalam menjaga kearifan lokal sekaligus meningkatkan pelayanan prima dengan didukung tehnologi mutakhir.

Penyelenggaraan pelayanan publik khusunya diwilayah yang memiliki karakteristik geografis seperti wilayah Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una menjadi hal yang penting karena keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan pelayanan publik.

Selain hal tersebut di atas isu SARA yang menjadi Isu Nasional mulai dari Konflik POSO, konflik aliran kepercayaan, serta konflik etnis dan konflik antar kepentingan Politik menjadi Isu strategis yang harus menjadi perhatian dalam ***Menuju Masyarakat Yang Hebat*** di wilayah Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una

Seperti dijelaskan sebelumnya, wilayah Kecamatan Ratolindo sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan untuk digolongkan ke dalam wilayah rawan bencana sosial, namun demikian warga harus tetap waspada akan kemungkinan terjadinya konflik sosial.

Banyaknya pendatang menyebabkan daerah ini menjadi sangat beragam, baik dilihat dari agama, suku, dan lainnya. Isu yang kerap terjadi dan dapat menyebabkan konflik sosial adalah isu keagamaan. Pada umumnya warga muslim merasa keberatan jika ibadah keagamaan diselenggarakan di rumah warga. Sehingga jika ini terjadi maka dengan berbagai cara warga muslim akan mencegah kegiatan ini.

Berkaitan dengan masalah kenakalan remaja, isu yang kerap terjadi adalah arena Hiburan Malam yang tidak terkontrol oleh adanya minuman keras sehingga memicu adanya kesalahpahaman antar kelompok pemuda, sehingga mudah menyulut terjadinya perkelahian.

KONFLIK SOSIAL

Jenis konflik yang sering terjadi di Kecamatan Ratolindo adalah konflik horizontal yang melibatkan warga, terutama antar kelompok pemuda di satu desa maupun antar desa. Serta konflik antar warga yang menganut agama berlainan.

Selain itu beberapa kasus yang terjadi juga mengindikasikan rawan terjadi konflik vertikal, seperti kurangnya sosialisasi berbagai Peraturan Pemerintah seperti implementasi kebijakan penerapan perda penertiban ternak, dan lainnya. Kondisi ini dinilai masyarakat akan menimbulkan konflik sosial dimasa yang akan datang.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah konflik sosial Oleh Kecamatan adalah :

a) Silaturahmi antar warga masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan di semua bidang;
b) Pertemuan rutin antar aparat pemerintahan, ulama, dan tokoh masyarakat untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Hambatan yang mungkin dihadapi warga dalam menangani masalah konflik adalah :

1. Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
2. Keterbatasan dana untuk mengatasi masalah;
3. Kurang memadainya sumber daya manusia dalam menangani masalah;
4. Kinerja aparat keamanan khususnya polsek, koramil dan pol PP dan warga masyarakat lebih ditingkatkan.

TIPOLOGI KONFLIK YANG ADA DI KECAMATAN WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA:

a. Horizontal : antara masyarakat dengan masyarakat;
b. Vertikal : antara masyarakat dengan negara/pemerintah;
c. Diagonal : antara masyarakat dengan masyarakat dan dengan pemerintah.

1. Konflik Agraria;
2. Konflik wilayah dan Perbatasan *(Termasuk Isu Pemekaran wilayah ragam tingkatan);*
3. Konflik Kebijakan *(akibat ketidakmerataan Pembangunan dan Penegakan hukum dan Kebijakan yang tidak jelas);*
4. Konflik Identitas Kelompok (Suku/Agama/antar aliran Agama);
5. Konflik Politik *(Ketidakpuasan Powersharing Politik baik dalam jabatan pemerintahan maupun tokoh masyarakat);*
6. Konflik Ekonomi *(ketidakmerataan atas akses pemanfaatan potensi sumberdaya ekonomi lokal).*

SUMBER KONFLIK :

1. **<u>Persoalan Distribusi Sumber daya yang tidak adil/Merata</u>**, menyangkut:
   a. terjadinya jurang yang lebar perbedaan keadaan tingkat kesejahteraan ekonomi;
   b. Perbedaan tingkat pendidikan *(kualitas SDM);*
   c. Ketidak adilan dan ketidakmerataan akses politik,;
   d. Ketiadaan akses terhadap keadilan dan Hukum;
   e. Perbedaan dalam akses terhadap pengelolaan Pemerintahan dan pembangunan;
   f. serta Perbedaan tingkat kesejehtaraan dan pembagunan antara Wilayah Desa dan Kelurahan.

ALTERNATIF SOLUSI:

1) adanya Kebijakan yang menjamin terciptanya pemerataan pembangunan baik antar wilayah, sektor, maupun antar kelompok/golongan;
2) Adanya Kebijakan yang menjamin adanya keadilan dalam akses politik, pemerintahan, pengelolaan sumberdaya lokal dan pengembangan SDM serta mendorong penegakan hukum yang adil untuk semua.

2. **<u>Persoalan Identitas</u>** *(Penguatan Rasa berbeda Identitas terutama agama dan suku, pendatang dan orang asli)* manakala:
   a. kelompok yang satu lebih dominan dari yang lain;
   b. Kelompok yang satu lebih menguasai;
   c. Kelompok yang satu lebih sejahtera dari yang lainnya;
   d. Hal ini akan membuka ruang terjadinya pemahaman atas adanya penindasan dan pelecehan eksistensi identitas dari kelompok yang satu dengan yang lain, atau kelompok yang besar karena merasa kuat selalu mengeksploitasi dan memandang enteng/rendah kelompok yang lain;
   e. Peran dan nilai dari institusi lokal (adat) kurang dioptimalkan.

ALTERNATIF SOLUSI:

1) Menciptakan rasa saling menghargai, solidaritas dan empathy sosial yang kuat dengan mendorong terbentuknya forum-forum dialog dan kerjasama antar kelompok;

2) *Menumbuhkembangkan peran dan media komunikasi institusional lokal/adat;*
3) *Mengembangkan pendidikan kritis, pendidikan kebangsaan/kewargaan dan multikultural pada semua lapisan dan komponen masyarakat.*

3. **<u>Distorsi Informasi dan Komunikasi</u>**, kurang lancarnya komunikasi lintas kelompok/kultural, antara pemerintah dan masyarakat sehingga :
   a. mempertajam segregasi *(Pemilahan-milahan)* masyarakat berdasarkan identitas;
   b. melemahnya rasa saling kenal dan solidaritas;
   c. menguatnya prasangka negatif satu sama lainnya;
   d. Pada sisi lain keberadaan informasi tentang sesuatu hal atau kondisi masing-masing pihak sering mengalami distorsi/sengaja dipolitisasi *(provokasi),* sehingga masing-masing pihak tidak memahami secara jelas dan benar tentang sesuatu hal atau kondisi kelompok lainnya.

<u>ALTERNATIF SOLUSI:</u>

1) *Membangun Komunikasi Sosial secara timbal balik intra/inter kelompok/golongan serta antara kelompok dengan pemerintah Daerah baik secara periodik maupun insidentil;*
2) *Mendorong kerja-kerja media massa yang untuk senantiasa menjadi pers pendidikan dan pers perdamaian (Peace jurnalism);*
3) *Pelaksanaan pemeruintahan yang benar-benar transparan dan akuntabel.*

4. <u>Kebijakan dan Manajemen pemerintahan yang kurang baik.Yang ditandai adanya:</u>

a. Proses Pembuatan Kebijakan publik yang tidak partisipatif;
b. kebijakan publik yang diskriminatif serta tidak peka terhadap keberagaman, kebutuhan dan nilai-nilai lokal;
c. Kepemimpinan Birokrasi yang tidak dekat, tidak santun dan kurang adil dan perduli terhadap rakyat;
d. Prilaku politisi dan birokrasi lokal yang arogan, kental KKN, otoriter, tidak simpati dan suka menggunakan cara kekerasan *(baik tutur kata maupun tindakan);*

e. Kebijakan Pembangunan yang kurang memperhatikan pemerataan pembangunan antar wilayah, antar sektor ataupun antar kelompok dalam masyarakat;
f. Rekruitmen politik, rekruitmen dan promosi aparat birokrasi yang kurang memperhatikan keragaman kelompok dan kebutuhan local;
g. Kebijakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai kearifan local;
h. Belum adanya Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi keadaan Krisis (tidak ada data Peta Kerawanan Konflik dan Sistem Siaga Dini).
i. Pelayanan publik yang belum optimal.

ALTERNATIF SOLUSI:

1) Melaksanakan Prinsip-prinsip Good Government secara optimal;
2) Mendorong proses dan subtansi Kebijakan publik yang partisipatif, sensitif terhadap: konflik/Bencana, Pemerataan antar wilayah/sektor dan kelompok, gender, lingkungan, keberagaman dan HAM pada semua sektor dan oleh setiap instasi Pemerintahan yang ada di daerah termasuk penerapan Peace trough Development (PTD) dalam sistem Perencanaan Pembangunan daera;
3) Mendorong pengembangan dan penerapan sistem kaderisasi bangsa yang ada di daerah, baik di dunia politik, birokrasi maupun swasta dalam suatu *master plan perencanann SDM Daerah* yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, nasional dan globalisasi baik penjenjangan pendidikan formal, fungsional, ketrampilan serta keterkaitannya dengan kebutuhan lapangan kerja serta kompetensi dan profesionalitas Birokrasi di Daerah;
4) Membentuk karakter dan figur kepemimpinan birokrasi publik daerah yang profesional, bertanggungjawab, memiliki integritas moral dan kebangsaan, rendah hati, dekat, tahu dan perduli dengan pesoalan rakyat.
5) Mendorong terciptanya dan terpeliharanya Sistem Pelayanan Publik yang berkualitas;
6) Pengembangan Sistem Informasi Kerawanan Konflik dan Sistem Siaga Dini;
7) Memasyarakatkan Pendidikan Multikulural/keberagaman dan Budaya perdamaian pada semua lapisan masyarakat termasuk menjadikannya kurikulum dalam institusi pendidikan di Kabupaten Tojo Una-Una.

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

2.3.1 A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 18 tahun 2009 tentang uraian tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, bahwa Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal pokok yaitu melakukan penyelenggaraan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan di bidang Pemerintahan, Pembangunan di wilayah Kecamatan;
b. Pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan pelimpahan sebagai kewenangan Pemerintahan dari Bupati;
c. Pengendalian atas penyelenggaraan program pembangunan dan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
d. Perumusan teknik mengenai penyelenggaraan tugas dibidang perekonomian, produksi, distribusi, pembinaan sosial, keorganisasian dan pembinaan Politik serta keamanan di wilayah Kecamatan;
e. Laporan dan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Kantor Kecamatan Ratolindo memiliki struktur sebagai berikut :

- **Camat**
- **Sekretaris Kecamatan, membawahi:**
  1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset;
  2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- **Seksi Pemerintahan;**
- **Seksi Ketentraman dan Ketertiban;**
- **Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;**
- **Seksi Ekonomi dan Pembangunan;**
- **Seksi Kesejahteraan Rakyat;**
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

- Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Seksi di bawah Camat Ratolindo mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. **Sekretaris Kecamatan**

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dalam penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, penyusunan program, pengelolaan keuangan dan aset serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum.

Fungsi :

- Merencanakan operasional penyelenggaraan kegiatan di bidang Kesekretariatan Kecamatan;
- Mendistribusikan tugas penyelenggaraan kegiatan dibidang Kesekretariatan Kecamatan;
- Memberi petunjuk operasional atas penyelenggaraan kegiatan di bidang Kesekretariatan Kecamatan;
- Mengevaluasi penyelenggaraan program di bidang Kesekretariatan Kecamatan;
- Melakukan Pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan kegiatan pada masing-masing seksi;
- Melaksanakan pembinaan organisasi melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur kecamatan;
- Pengelolaan administrasi dan aset-aset kecamatan;
- Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris Kecamatan terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset

Tugas Pokok :

Sub Bagian Penyusun Progam, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi, menganalisis serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan di bidang penyusun program, keuangan dan aset.

Fungsi :

- Mengelola administrasi, menyiapkan dan menghimpun bahan dan data pada seksi dalam rangka penyusunan program, keuangan dan aset tahuanan Kecamatan;
- Menyiapkan dan menghimpun bahan penyusunan perencanaan strategis Kecamatan;
- Menyiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang penyusun program, keuangan dan aset Kecamatan;
- Menyusun laporan tahunan (LAKIP, LKPJ, LPPD, LKPD) serta dokumen lainnya yang diwajibkan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- Menyusun, mengelola dan menganalisa sumber-sumber pendapatan dinas dan pengeluaran keuangan serta perlengkapan dan aset Kecamatan;
- Melaksanakan penyelenggaraan pembukuan keuangan kecamatan;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset;
- Menimbang pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan Dan Aset;
- Mengkoordinasikan hasil penyusunan dan program kecamatan kepada seksi melalui Sekretaris Kecamatan;
- Melakukan evaluasi dan pelaporan atas penyusunan perencanaan dan program kecamatan;
- Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
- Melakukan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.2 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tugas Pokok:

Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi serta menyelengarakan kegiatan pengelolaan naskah dinas, perlengkapan rumah tangga, kebersihan, keamanan dan ketertiban serta administrasi kepegawaian.

Fungsi:

- Mengelola administrasi, menyusun rencana kerja tahunan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- Menyiapkan bahan dan data, membuat usulan rencana program serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- Menghimpun peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan penyusunan program serta mengumpulkan data dan melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Kecamatan;
- Menyiapkan bahan dan data , mengkasifikasikan serta menganalisis penataan kepegawaiaan;
- Menyiapkan bahan dan data serta membuat usulan pembuatan kartu pegawai (KARPEG), Kartu TASPEN, Asuransi kesehatan (ASKES), Kartu Suami/Istri (KARSU/KARSI);
- Menyiapkan bahan dan data serta usulan peralihan status dari CPNS menjadi PNS;
- Menyiapkan bahan dan data serta usulan formasi/jabatan CPNS, mutasi pegawai dan mutasi jabatan wilayah kerja (TOUR OF AREA) maupun mutasi jabatan antara unit kerja (TOUR OF DUTY);
- Menyiapkan bahan dan data serta membuat daftar susunan jabatan (DSJ), daftar susunan pegawai (DSP);
- Menyiapkan bahan dan data peraturan perundang-undangan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan pembinaan disiplin pegawai dan menghimpun daftar hadir dan daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan;
- Menyiapkan buku mutasi, daftar urut kepangkatan (DUK), mengupayakan kesejahteraan pegawai dan menghimpun lporan Pembayaran Pajak Penghasilan(LP2P);
- Menyiapkan bahan dan data pegawai yang ikut program tugas belajar, Izin belajar dan cuti pegawai;

- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.3 Seksi Pemerintahan.

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan pembinaan, perumusan kebijakan, merumuskan program dan melakukan pemantauan terhadap penyelengaraan kegiatan di bidang pemerintahan meliputi Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kependudukan, Catatan Sipil, Perwakilan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

Fungsi :

a. Mengelola administrasi, menyusun rencana kerja tahunan Seksi Pemerintahan;
b. Perumusan program kerja dan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan;
c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan;
d. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan;
e. Pengendalian atas pelaksanaan program di bidang Pemerintahan;
f. Perumusan kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan;
g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan pada wilayah Desa/Kelurahan;
h. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan di bidang pemerintahan

   Baik secara lisan maupun tertulis.

1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan pembinaan, perumusan kebijakan, merumuskan program dan melakukan pemantauan serta evaluasi tehadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban.

Fungsi :

a. Mengelola administrasi, menyusun rencana kerja tahuan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
b. Perumusan program kerja dan kebijakan teknis di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
d. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
e. Pengendalian atas pelaksanaan program di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
f. Perumusan kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban pada wilayah Desa/Kelurahan;
h. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan di bidang Ketentraman dan Ketertiban baik secara lisan maupun tertulis.

1.5 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokok :

Menghimpun bahan pembinaan, perumusan kebijakan, merumuskan program, dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap penyelengaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Fungsi :

) Mengelola administrasi, menyusun rencana kerja tahunan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- Perumusan program kerja dan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Pembinaan teknis atau penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Pengendalian atas pelaksanaan program di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Perumusan kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Melakukan pemantuan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat pada wilayah Desa/Kelurahan;
- Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan di bidang Pemberdayaan Masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.

1,6 Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Tugas Pokok :

Menghimpun bahan pembinaan, perumusan kebijakan, merumuskan program dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Fungsi

a. Mengelola administrasi, menyusun rencana kerja tahunan Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
b. Perumusan program kerja dan kebijakan teknis di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan pelaksanaan tugas di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
d. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan tugas di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
e. Pengendalian atas pelaksanaan program di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
f. Perumusan kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan tugas di bidang Ekonomi dan Pembangunan;

g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
h. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan di bidang Ekonomi dan Pembangunan baik secara lisan maupun tertulis.

1,7 Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok :

Melnghimpun bahan pembinaan, perumusan kebijakan, merumuskan program dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat.

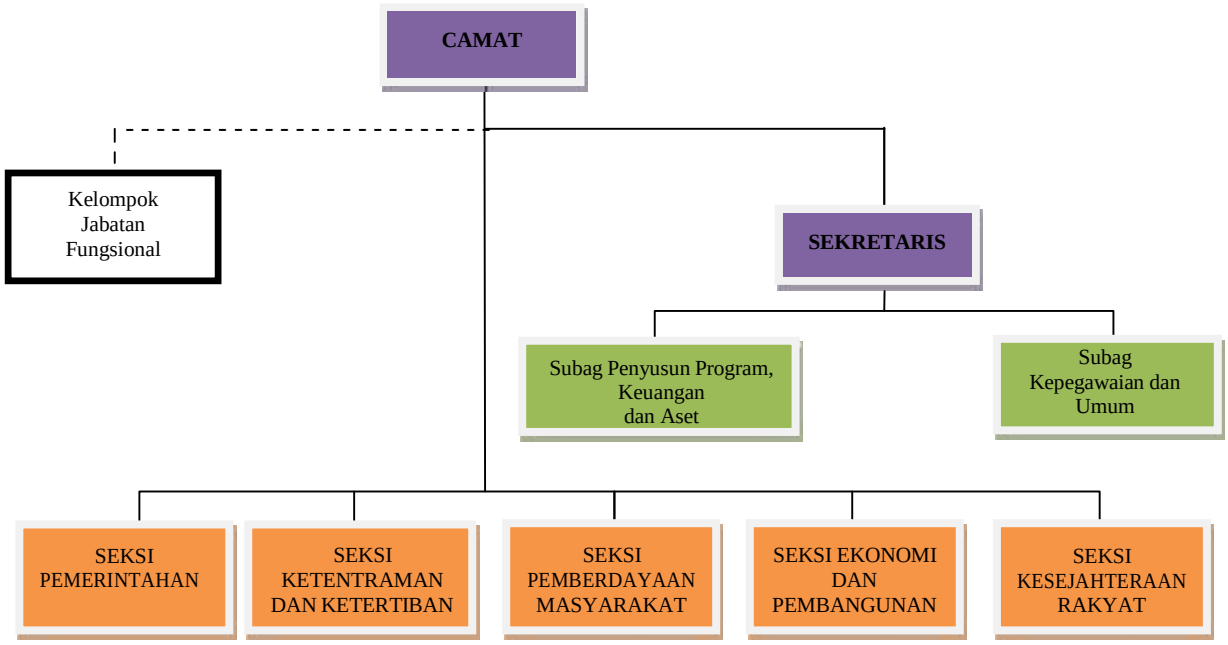
Fungsi

a. Mengelola administrasi, menyusun rencana kerja tahunan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
b. Perumusan program kerja dan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Rakyat;
c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan pelaksanaan tugas di bidang Kesejahteraan Rakyat;
d. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan tugas di bidang Kesejahteraan Rakyat;
e. Pengendalian atas pelaksanaan progrm di bidang Kesejahteraan Rakyat;
f. Perumusan kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan tugas di bidang Kesejahteraan Rakyat;
g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Desa/Kelurahan;
h. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas di bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan di bidang Kesejahteraan Rakyat baik secara lisan maupun tertulis.

2.3.1.B Struktur Organisasi

Gambar

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KECAMATAN RATOLINDO (TYPE A)
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



Sumber: Kantor Kecamatan Ratolindo Tahun 2024

2.4 Sumber Daya SKPD

a. Susunan Kepegawaian/SDM

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya yang berkaitan dengan keadaan Pegawai pada Kantor Camat Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una adalah sebagai berikut :

2.1.1. Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai posisi Januari 2024 sebanyak 29 orang yang terdiri dari : 17 orang Pegawai Organik dan 12 orang tenaga honorer/sukarela, kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4.1

Tingkat Pendidikan Pegawai

No.	Pendidikan	Organik	Non Organik		Jumlah
			Honorer	Sukarela	
1.	S2	-	-	-	-
2.	S1	12	2	-	14
3.	D3	-	-	-	-
4.	SLTA	5	10	-	15
5.	SLTP	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-
	T o t a l	**17**	**12**	**-**	**29**

Sumber: Kepegawaian Kantor Kecamatan Ratolindo Tahun 2024

2.1.2. Kualifikasi Penjenjangan Struktural :

- SPAMA / PIM II : -
- SPAMA / PIM III : 1 Orang
- ADUM/ PIM IV : 5 Orang

2.2.3. Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan :

Untuk keadaan pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.4.2.

Kualifikasi Golongan Pegawai

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	IV	1	
2.	III	11	
3.	II	5	
4.	I	-	
	Jumlah	**17**	

Sumber: Kepegawaian Kantor Camat Ratolindo Tahun 2024

Tabel 2.4.3

Jabatan dan Jumlah Pegawai

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Camat	1 Orang	Eselon III
2.	Sekretaris	1 Orang	Eselon III
3.	Kasi	5 Orang	Eselon IV
4.	Kasubag	2 Orang	Eselon IV
	Jumlah	**9 orang**	

Sumber: Kepegawaian Kantor Camat Ratolindo Tahun 2024

Tabel 2.4.4

Esselon dan Jumlah Pegawai

Pegawai	Posisi per 01/01/2024
Eselon III	2 orang
Eselon IV	7 orang
Staf	8 orang
Honorer / Suka rela	12 orang
Jumlah	**29 Orang**

Sumber: Kepegawaian Kantor Kecamatan Ratolindo Tahun 2024

b. **Sarana & Prasarana Penunjang**

Dalam melaksnakan Tugas Pokok dan Fungsinya selain Sumber Daya Manusia , sarana dan prasarana penunjang mutlak diperlukan oleh Kecamatan Ratolindo agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. Adapaun daftar Inventaris/ sarana dan prasarana bagi aparatur Kecamatan Ratolindo yang diperoleh mulai tahun 2015-2024 adalah sebagai berikut:

No.	DAFTAR BARANG INVENTARIS			Keterangan
	Nama/Jenis	Merk	Jumlah	
1	2	3	4	5
	Mobil	Toyota Avanza	1	**Baik**
	Motor	Yamaha Mio M3	1	**Baik**
	Motor	Honda Beat	1	**Baik**
	Motor	Suzuki Smash Titan	1	**Rusak Sedang**
1	2	3	4	5
	Laptop	Asus & Lenovo	9	**Baik**
	Computer	Hp & Lenovo	8	**Baik**
	Printer	Brother	1	**Baik**
	Printer	Epson	4	**Baik**
	Printer	Canon	13	**Baik**
	Printer	HP	2 letter z	**Baik**
	AC	Gree	8	**Baik**
	Sound System	DAT	1	**Baik**
	Kamera Digital	Sony	1	**Baik**
	Kamera	Samsung	1	**Baik**
	Dispenser	Sanken	1	**Baik**
	Brankas	-	1	**Baik**

	Infokus	-	1	**Baik**
	SSB/Rig/Antena/Power	1 Paket	1	**Baik**
	Suplai	-	-	
	HT	-	1	**Baik**
	Mesin Ketik	Brother	1	**Baik**
	Toa	-	3	**Baik**
	Kursi	Frontline	22	**Baik**
	kursi plastic	Nappolli	88	**Baik**
	Kursi Hitam	Citos	18	**Baik**
	Kursi Tunggu	-	5	**Baik**
	Papan Data	-	3	**Baik**
	Meja	-	20	**Baik**
	Lemari	-	7	**Baik**
	Vacum Cleaner	-	2	**Baik**
	Exchauspan	-	2	**Baik**
	Kipas Angin	Nikkon	2	**Baik**
	Mesin Rumput	Yasuka	2	**Baik**
	Ampli Fire	Dat	1	**Baik**

Sumber: Kantor Kecamatan Ratolindo Tahun 2024

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Visi, Misi Kantor Kecamatan Ratolindo

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana OPD yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una harus di bawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh OPD Lingk
maka
beriku

> ***"Kecamatan Ratolindo Menjadi Penyedia Pelayanan Prima dan Fasilitator Pemberdayaan Yang Hebat Tahun 2024. "***

Untuk mencapai Visi yang ada, maka perlu dijabarkan kedalam Misi sebagai implementasi dari visi itu sendiri. Misi yang akan di usung Kantor Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

	menciptakan jaringan dengan stokholder untuk meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat.
MISI 1	Membangun pelayanan kepada Masyarakat dengan berdasarkan sendi – sendi Pelayanan Prima.
MISI 2	Meningkatkan kemampuan aparatur dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan.

MISI 3	Menciptakan standar prosedur pelayanan yang mampu menampung aspirasi baik kebutuhan masyarakat dan kebutuhan regulasi yang ada.
MISI 4	Menciptakan komunikasi yang efektif kepada masyarakat dan

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan Kantor Camat Ratolindo untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Hakekat yang ingin dicapai oleh visi, misi di atas adalah :

1. Mendorong Pemerintah yang Hebat dan GOOD GOVERNANCE dengan Meningkatkan Pelayanan Kecamatan, Kelurahan dan Desa kepada Masyarakat;
2. Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kepada Masyarakat dengan meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kecamatan;
3. Meningkatnya Disiplin Aparatur Kecamatan;
4. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Kecamatan;
5. Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan pada masyarakat.

Sasaran Kantor Camat Ratolindo merupakan bagian integral dalam proses perencanaan yang matang untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh pada satuan kerja di lingkungan Kantor Kecamatan Ratolindo. Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait dijabarkan sebagai berikut:

a. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran kepada masyarakat;
b. Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur;
c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
d. Terciptanya pelayanan pemerintahan dan pembangunan pada masyarakat.

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananaya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	7 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali
			Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan		20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali
			Tersedianya pengelolaan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			Meningkatnya pelayanan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
2	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Bertambahnya perlengkapan gedung kantor	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn
			Bertambahnya peralatan gedung kantor	8 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1 Unit
			Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			Terpeliharanya kendaraan dinas/oprasional	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
3	Meningkatnya pelayanan pemerintahan dan pembangunan pada masyarakat	Terciptanya pelayanan pemerintahan dan pembangunan pada masyarakat	Tersedianya fasilitas pada kegiatan penertiban ternak/miras	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 keg
			Tersedianya fasilitas pada kegiatan pembinaan keagamaan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Tersedianya fasilitas pada kegiatan lomba desa/kelurahan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Tersedianya fasiitas pada kegiatan bulan bhakti gotong royong	11 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Tersedianya fasilitas pada kegiatan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
			musrembang					
			Tersedianya fasilitas pada kegiatan PKK	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan secara terpadu	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Tersedianya fasilitas pada kegiatan kamtibmas dan teritorial	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Tersedianya fasilitas pada kegiatan penyelenggaraan MTQ / STQ	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Tersedianya fasilitas pada kegiatan festival bahari togean	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Tersedianya fasilitas pada pemilihan kepala desa	1 Keg	1Keg	1 Keg	1 Keg	1 keg
			Tersedianya fasilitas pada Pembinaan Olahraga	1 Keg	1Keg	1 Keg	1 Keg	1 keg
			Tersedianya fasilitas pada Pemberdayaan Masyarakat	1 Keg	1Keg	1 Keg	1 Keg	1 keg
			Tersedianya fasilitas pada Lomba Kelurahan	1 Keg	1Keg	1 Keg	1 Keg	1 keg

Sumber: Kantor Kecamatan Ratolindo Tahun 2023

3.3 Proram dan Kegiatan

Program disusun sebagai management plant (rencana pengelolaan) dari upaya mewujudkan visi OPD. Untuk itu langkah awal yang dilakukan adalah menyusun kebijakan operasional sebagai payung dari program dan kegiatan itu sendiri. Dengan demikian kegiatan yang disusun dapat lebih operasional sehingga Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran dapat terealisir. Program dan kegiatan disusun dalam periode 5 (lima) tahun yang dibagi dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan prioritas program itu sendiri untuk dapat mencapai visi. Adapun kebijakan sebagaimana tertuang dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun kedepan.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan : Meningkatkan pelayanan adminstrasi perkantoran;

Sasaran : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran kepada Masyarakat.

❖ **Progam ini mempunyai agenda kegiatan sebagai berikut :**

1. Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah;
2. Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah;
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran;
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Tujuan : Meningkatkan sarana penunjang pelayanan kemasyarakatan;

Sasaran : adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Administrasi kepada Masyarakat.

❖ **Program ini mempunyai agenda kegiatan sebagai berikut :**

1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor;
2. Pengadaan Gengset Kantor Camat Ratolindo
3. Pengadaan Wifi Kantor;
4. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Kantor;
5. Perencanaan Exterior Gedung Kantor;
6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

7. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor;
8. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan monitoring penyelenggaran pemerintahan lingkup Kecamatan Ratolindo dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penertiban Ternak dan Miras;
2. Kegiatan Pembinaan Keagamaan;
3. Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan;
4. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong;
5. Kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan;
6. Kegiatan PKK Kecamatan;
7. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu;
8. Kegiatan Monitoring Pemb. Anggaran Desa;
9. Kegiatan Pembinaan Kantibmas dan Teritorial;
10. Kegiatan STQ/MTQ Tingkat kecamatan;
11. Kegiatan Festival Bahari Togean;
12. Kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
13. Kegiatan Lomba Kelurahan;
14. Kegiatan Pembinaan Olahraga;
15. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ratolindo Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una, serta rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ratolindo. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Kecamatan Ratolindo, penyusunan Rencana Kerja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di dalam Kecamatan Ratolindo maupun di lingkup daerah.

Akhirnya, dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ratolindo Tahun 2024 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RPJMD dan RKPD yang akan sekaligus mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2021-2026.

Sumoli, Maret 2024
CAMAT RATOLINDO

MIKNAF HEDAR, S.Sos
Pembina Tkt I
NIP. 19660915 199103 1 015

TABEL. T-II.1.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KANTOR CAMAT RATOLINDO

CAPAIAN RENSTRA KANTOR CAMAT RATOLINDO S/D TAHUN 2023

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ratolindo

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022			Target program / kegiatan	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2023		Catatan
							Tahun 2026 (akhir periode Renstra	(tahun n-3)	(tahun lalu /n-2) Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Renja SKPD (tahun n-1)	(tahun berjalan/n-1)		
													realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*100	11=(10/4)*	12
7					***UNSUR KEWILAYAHAN***										
7	*01*	*01*			***KECAMATAN RATOLINDO***										
7	*01*	*01*	*2.02*		***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Presentase Terselenggaranya Proses Pelayanan Administrasi Yang cepat dan tepat***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
7	*01*	*01*	*2.02*		***Administrasi Keuangan perangkat Daerah***	***Presentase Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN***	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	
7	*01*	*01*	*2.02*	*01*	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang	64 Orang	63 Orang	63 Orang	100%	63 Orang	100%	100%	
7	*01*	*01*	*2.06*		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***100%***	***95%***	***95%***	***95%***	***100%***	***100%***	***100%***	
7	*01*	*01*	*2.06*	*02*	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5 Paket	7 Paket	5 Paket	95%	5 Paket	7 Paket	7 Paket	
7	*1*	*1*	*2.06*	*4*	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	18 Paket	20 Paket	18 Paket	95%	18 Paket	20 Paket	20 Paket	
7	*01*	*01*	*2.06*	*05*	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	65 Paket	60 Paket	65 Paket	60 Paket	98 %	60 Paket	60 Paket	60 Paket	
7	*01*	*01*	*2.06*	*06*	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
7	*01*	*01*	*2.06*	*09*	Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasin SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	335 Lap	305 Lap	325 Lap	320 Lap	95%	203 Lap	203 Lap	203 Lap	

7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan***	***Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
7	*01*	*01*	*2.08*	*02*	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	12 Lap	
7	*01*	*01*	*2.08*	*03*	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	12 Lap	
7	*01*	*01*	*2.08*	*04*	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	12 Lap	
7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100***	
7	*01*	*01*	*2.09*	*09*	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	5 Unit	
7	*01*	*01*	*2.09*	*01*	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	4 Unit	
7	***01***	***02***			***PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	***Presentase penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif, efektif dan efisien dan efisien di Tingkat Kecamatan***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
7	***01***	***02***	***01***		***Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Presentase Rapat Koordinasi penyelegraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang terlaksana***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
7	*01*	*02*	*01*	*02*	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	100%	8 Dok	8 Dok	8 Dok	
7	***01***	***03***			***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	***Jumlah presentasi Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***98%***	***100%***	***100%***	***100%***	
7	***01***	***03***	***2.02***		***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	***Jumlah Presentase Pemberdayaan Kelurahan***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***98%***	***100%***	***100%***	***100***	
7	*01*	*03*	*2.02*	*01*	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 LBM	12 LBM	12 LBM	11 LBM	98%	12 LBM	12 LBM	12 LBM	

7	*01*	*03*	*2.02*	*03*	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan	10 Lap	10 Lap	10 Lap	10 Lap	100%	10 Lap	10 Lap	10 Lap	
7	***01***	***04***			***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	***Presentase terlaksananya fasilitasi penyelegaraan ketentraman umum dan ketertiban umum***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	***Presentase Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
7	*01*	*04*	*2.01*	*01*	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia, Tentara Nasional Uindonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	12 Lap	
7	***01***	***05***			***PROGRAM PENYELEGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	***Presentase Terselenggaranya Kerjasama aparatur Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	

7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum Penugasan Kepala Daerah***	***Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	
7	*01*	*05*	*2.01*	*04*	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Instrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	14 Orang	14 Orang	14 Orang	14 Orang	100%	14 Orang	14 Orang	14 Orang	

Tabel. T-II.2.
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR CAMAT RATOLINDO
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NO	Indikator *)	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
		standar nasional	(PP-6/'08)	Tahun 2019 (tahun n)	Tahun 2020 (tahun n+1)	Tahun 2022 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2019 (tahun n-2)	Tahun 2020 (tahun n)	Tahun 2021 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2022 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n+1)	
-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
A	Terselenggaranya Proses Pelayanan Administrasi Yang cepat dan tepat	-	1 Org/K1	1 Org/K1	2 Org/KI	2 Org/KI	2 Org/KI	2 Org/KI	1 Org/K1	2 Org/KI	2 Org/KI	2 Org/KI	2 Org/KI	2 Org/KI	
B	Tercapainya Program Penyelegaraan pemerintahan yang kolaboratif, efektif dan efisien diTingkat Kecamatan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
C	Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
D	Terlaksanya Program Penyelegaraan ketentraman dan ketertiban umum	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	20%	95%	95%	95%	
E	Terselenggaranya Kerjasama aparatur Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	

Tabel. T-III.1.

Prioritas dan Sasaran Kantor Camat Ratolindo

Kabupaten Tojo Una-Una

NO	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Kecamatan Ratolindo	Terselegaranya Regulasi Pelayanan Kepada Masyarakat yang Profesional	Terwujudnya kualitas Sumber Daya Aparatur Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Terselegaranya Regulasi Pelayanan Kepada Masyarakat yang Profesional
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Ratolindo	Terselegaranya Proses Pelayanan Administrasi yang Cepat dan Tepat	Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang Memadai guna Mendukung tertib Pelayanan Administrasi	Terselegaranya Proses Pelayanan Administrasi yang Cepat dan Tepat
3	Meningkatnya Jalinan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lainnya Dalam Penyelegaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ratolindo	Terselegaranya Penyelegaraan Pemerintahan yang Kolaboratif, Efektif dan Efisien	Terselegaranya Penyelegaraan Pemerintahan yang Kolaboratif, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Jalinan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lainnya Dalam Penyelegaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
4		Kecamatan Ratolindo	Terselegaranya Kerjasama Aparatur Pemerintah Dengan Masyarakat dalam Pembnagunan Daerah	Terselegaranya Kerjasama Aparatur Pemerintah Dengan Masyarakat dalam Pembnagunan Daerah	Meningkatkan Jalinan Kerjasama Aparatur Kecamatan dan Masyarakat Secara Terpadu Dalam Mewujudkan Kondisi Sosial Masyarakat yang Dinamis dan Taat Hukum

Usulan Program dan Kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Tojo Una-Una

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Komputer/Laptop	Kantor Camat Ratoliondo	Peningkatan Pelayanan Yang Berkualitas	3 Unit	Agar Dapat Meningkatkan Pelayanan Kantor
2	Pengadaan Printer	Kantor Camat Ratoliondo	Peningkatan Pelayanan Yang Berkualitas	2 Paket	Agar Roda Pemerintahan Yang Baik Dapat Terlaksana
3	Pelaksanaan BIMTEK Dan Pelaksanaan DIKLAT PIM III dan PIM IV	Kantor Camat Ratoliondo	Peningkatan Jumlah Aparatur Yaang Mengikuti BIMTEK dan DIKLAT	3 Orang	Agar Meningkatkan Kapasitas Kinerja Aparatur

Tabel. T-II.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Tojo Una-Una

Nama SKPD : Kantor Camat Ratolindo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	URUSAN WAJIBOTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN				**Rp 7,612,078,232**	***URUSAN WAJIBOTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN***				**Rp 7,612,078,232**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Kantor Camat Ratolindo***	***Presentase Terselenggaranya Proses Pelayanan Administrasi Yang cepat dan tepat***	***100%***	***Rp 5,048,124,232***	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	***Kantor Camat Ratolindo***	***Presentase Terselenggaranya Proses Pelayanan Administrasi Yang cepat dan tepat***	***100%***	***Rp 5,693,563,629***	
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	***Kantor Camat Ratolindo***	***Presentase Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN***	***100%***	Rp 5,048,124,232	***Administrasi Keuangan perangkat Daerah***	***Kantor Camat Ratolindo***	***Presentase Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN***	***100%***	Rp 5,048,124,232	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang	Rp 5,048,124,232	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang	Rp 5,048,124,232	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Ratolindo	***Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***Rp 176,147,000***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Kantor Camat Ratolindo	***Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**100%**	***Rp 183,730,840***	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 22,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 22,220,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	Rp 55,679,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	Rp 56,235,790	
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	Rp 11,775,000	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	Rp 11,892,750	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Media	Rp 1,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Media	Rp 1,818,000	
	Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasin SKPD	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203 Laporan	Rp 84,893,000	Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasin SKPD	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203 Laporan	Rp 93,382,300	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kantor Camat Ratolindo	***Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan***	***100%***	***Rp 441,656,067***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan***	Kantor Camat Ratolindo	***Jumlah Presentasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan***	***100%***	***Rp 484,236,674***	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 31,700,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 33,285,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp -	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp -	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 409,956,067	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 450,951,674	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Ratolindo	***Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***	***100%***	***Rp***	***76,399,000***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Kantor Camat Ratolindo	***Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***	***100%***	***Rp***	***83,213,900***	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Rp	16,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Rp	17,325,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Rp	59,899,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Rp	65,888,900	
	PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	***Kantor Camat Ratolindo***	***Presentase penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif, efektif dan efisien dan efisien diTingkat Kecamatan***	***100%***	***Rp***	***63,500,000***	***PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	***Kantor Camat Ratolindo***	***Presentasi penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif, efektif dan efisien dan efisien diTingkat Kecamatan***	***100%***	***Rp***	***133,350,000***	
	Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Ratolindo	***Presentase Rapat Koordinasi penyelegraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang terlaksana***	***100%***	***Rp***	***63,500,000***	***Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	Kantor Camat Ratolindo	***Presentase Rapat Koordinasi penyelegraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang terlaksana***	***100%***	***Rp***	***66,675,000***	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	Rp	63,500,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	Rp	66,675,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	***Kantor Camat Ratolindo***	***presentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan***	***100%***	***Rp***	***2,414,200,000***	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	***Kantor Camat Ratolindo***	***Jumlah presentasi Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan***	***100%***	***Rp***	***2,340,410,040***	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	***Kantor Camat Ratolindo***	***Presentase Pemberdayaan Kelurahan***	***100%***	***Rp***	***2,414,200,000***	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	***Kantor Camat Ratolindo***	***Presentase Pemberdayaan Kelurahan***	***100%***	***Rp***	***2,340,410,040***	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Masyarakat	Rp	14,200,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Masyarakat	Rp	14,200,000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan	10 Pokmas/Ormas	Rp	2,114,736,400	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan	10 Pokmas/Ormas	Rp	2,326,210,040	

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	***Kantor Camat Ratolindo***	***Presentase terlaksananya fasilitasi penyelegaraan ketentraman umum dan ketertiban umum***	***100%***	***Rp***	***73,254,000***	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	***Kantor Camat Ratolindo***	***Jumlah Presentasi terlaksananya fasilitasi penyelegaraan ketentraman umum dan ketertiban umum***	***Rp 73,254,000***	***Rp***	***73,986,540***	
	Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	***Kantor Camat Ratolindo***	***Presentase Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib***	***100%***	***Rp***	***73,254,000***	***Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	***Kantor Camat Ratolindo***	***Jumlah Presentasi Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib***	***100%***	***Rp***	***73,986,540***	
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Laporan Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib	12 Laporan	Rp	73,254,000	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Laporan Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib	12 Laporan	Rp	73,986,540	
	PROGRAM PENYELEGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	***Kantor Camat Ratolindo***	***Presentase Terselenggaranya Kerjasama aparatur Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah***	***100%***	***Rp***	***13,000,000***	***PROGRAM PENYELEGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	***Kantor Camat Ratolindo***	***Jumlah Presentasi Terselenggaranya Kerjasama aparatur Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah***	***100%***	***Rp***	***13,000,000***	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	***Kantor Camat Ratolindo***	***Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah***	***100%***	***Rp***	***13,000,000***	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah***	***Kantor Camat Ratolindo***	***Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah***	***100%***	***Rp***	***13,000,000***	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas KeamananLokal, Regional, dan Nasional	2 Orang	Rp	13,000,000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kantor Camat Ratolindo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas KeamananLokal, Regional, dan Nasional	2 Orang	Rp	13,000,000	
JUMLAH TOTAL ANGGARAN 2023					**Rp**	**7,612,078,232**	**JUMLAH TOTAL ANGGARAN 2023**				**Rp**	**-**	

Tabel. IV.1
Rencana Program Dan Kegiatan Kantor Camat Ratolindo Tahun 2023
Dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Tojo Una-Una

Nama SKPD : Kantor Camat Ratolindo

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1					-2		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
7					***UNSUR KEWILAYAHAN***								
7	***01***	***01***			KECAMATAN RATOLINDO								
7	***01***	***01***	***2.02***		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Presentase Terselenggaranya Proses Pelayanan Administrasi Yang cepat dan tepat***	Kantor Camat Ratolindo	***100%***	***Rp 5,048,124,232***	***DAU***		***100%***	***Rp 5,811,746,506***
7	***01***	***01***	***2.02***		Administrasi Keuangan perangkat Daerah	***Presentase Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN***	Kantor Camat Ratolindo	***100%***	***Rp 5,048,124,232***	***DAU***			***5,048,124,232***
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Ratolindo	61 orang	Rp 5,048,124,232	DAU		61 orang	Rp 5,048,124,232
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Kantor Camat Ratolindo***	***100%***	***Rp 176,147,000***	***DAU***		***100%***	***Rp 193,761,700***
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Ratolindo	5 Paket	Rp 22,000,000	DAU		6 Paket	Rp 24,200,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Ratolindo	18 Paket	Rp 55,679,000	DAU		20 Paket	Rp 61,246,900
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor Camat Ratolindo	***60 Paket***	Rp 11,775,000	DAU		66 Paket	Rp 12,952,500
7	01	01	2.06	6	Penyediaaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Camat Ratolindo	*1 Media*	Rp 1,800,000	DAU		*1 Media*	Rp 1,980,000
7	01	01	2.06	09	Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasin SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Ratolindo	305 Laporan	Rp 84,893,000	DAU		336 Laporan	Rp 93,382,300
7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan***	***Kantor Camat Ratolindo***	***100%***	Rp 441,656,067	***DAU***		***100%***	***Rp 485,821,674***
7	*01*	*01*	*2.08*	*02*	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor Camat Ratolindo	12 Laporan	Rp 31,700,000	DAU		12 Laporan	Rp 34,870,000
7	*01*	*01*	*2.08*	*03*	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Ratolindo	12 Laporan	Rp -	DAU		12 Laporan	Rp -
7	*01*	*01*	*2.08*	*04*	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Ratolindo	12 Laporan	Rp 409,956,067	DAU		12 Laporan	Rp 450,951,674

7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***	***Kantor Camat Ratolindo***	***100%***	***Rp***	***76,399,000***	***DAU***		***100%***	***Rp***	***84,038,900***
7	01	01	2.09	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kantor Camat Ratolindo	5 Unit		16,500,000	DAU		5 Unit	Rp	18,150,000
7	01	01	2.09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor Camat Ratolindo	4 Unit		59,899,000	DAU		4 Unit	Rp	65,888,900
7	***01***	***02***			***PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	***Presentasi penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif, efektif dan efisien dan efisien diTingkat Kecamatan***	***Kantor Camat Ratolindo***	***100%***	***Rp***	***63,500,000***	***DAU***		***100%***	***#REF!***	
7	***01***	***02***	***01***		***Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Presentase Rapat Koordinasi penyelegraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang terlaksana***	***Kantor Camat Ratolindo***	***100%***	***Rp***	***63,500,000***	***DAU***		***100%***	***Rp***	***69,850,000***
7	*01*	*02*	*01*	*02*	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Ratolindo	8 Dokumen	Rp	63,500,000	DAU		8 Dokumen	Rp	69,850,000
7	***01***	***03***			***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	***Jumlah presentasi Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan***	***Kantor Camat Ratolindo***	***100%***	***Rp***	***2,414,200,000***	***DAU***		***100%***	***Rp***	***2,341,830,040***
7	***01***	***03***	***2.02***		***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	***Jumlah Presentase Pemberdayaan Kelurahan***	***Kantor Camat Ratolindo***	100%	Rp	2,414,200,000	***DAU***		100%	Rp	2,341,830,040
7	*01*	*03*	*2.02*	*01*	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Ratolindo	12 LBM	Rp	14,200,000	DAU		12 LBM	Rp	15,620,000
7	*01*	*03*	*2.02*	*03*	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan	Kantor Camat Ratolindo	10 Laporan	Rp	2,114,736,400	DAU		10 Laporan	Rp	2,326,210,040

7	***01***	***04***			***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	***Jumlah Presentasi terlaksananya fasilitasi penyelegaraan ketentraman umum dan ketertiban umum***	Kantor Camat Ratolindo	100%	Rp	73,254,000	***DAU***		***100%***	Rp	80,579,400
7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah Presentasi Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib***	***Kantor Camat Ratolindo***	100%	Rp	73,254,000	***DAU***		***100%***	Rp	80,579,400
7	*01*	*04*	*2.01*	*01*	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia, Tentara Nasional Uindonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penangganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib	Kantor Camat Ratolindo	12 Laporan	Rp	73,254,000	DAU		12 Laporan	Rp	80,579,400
7	***01***	***05***			***PROGRAM PENYELEGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	***Jumlah Presentasi Terselenggaranya Kerjasama aparatur Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah***	Kantor Camat Ratolindo	100%	Rp	13,000,000	DAU		100%	Rp	14,300,000
7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum Penugasan Kepala Daerah***	***Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah***	***Kantor Camat Ratolindo***	100%	Rp	13,000,000	***DAU***		100%	Rp	14,300,000
7	*01*	*05*	*2.01*	*04*	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Instrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kantor Camat Ratolindo	2 Orang	Rp	13,000,000	DAU		2 Orang	Rp	14,300,000
JUMLAH TOTAL ANGGARAN									**Rp**	**7,612,078,232**				**#REF!**	

Tabel. T-III.2.
Tujuan Kantor Camat Ratolindo
Kabupaten Tojo Una-Una

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
1	Mendorong Pemerintahan dengan prinsip Good and Clean Governance dengan penekanan pada peningkatan Kualitas SDM Apartur	Terselegaranya Regulasi Pelayanan Kepada Masyarakat yang Profesional	Mengoptimalkan Pelayanan Publik dengan Berbasis Elektronik dan Memanfaatkan Media Sosial
2	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat	Terselegaranya Proses Pelayanan Administrasi yang Cepat dan Tepat	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan
3	Meningkatkan Jalinan Koordinasi Dengan Pejabat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Lainnya Dalam Penyelegaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselegaranya Penyelegaraan Pemerintahan yang Kolaboratif, Efektif dan Efisien	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	Meningkatkan Jalinan Kerjasama Aparatur Kecamatan dan Masyarakat Secara Terpadu Dalam Mewujudkan Kondisi Sosial Masyarakat yang Dinmis dan Taat Hukum	Terselegaranya Kerjasama Aparatur Pemerintah Dengan Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban fi Wilayah Kecamatan

Tabel. T-III.3.

Sasaran Kantor Camat Ratolindo

Kabupaten Tojo Una-Una

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi, dan Koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel
2	Meningkatnya kualitas Layanan Pemerintah yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan	Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perecanaan dan Penganggaran, dan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Rutin, dan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan serta peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
3	Meningkatnya Kemajuan Desa/Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan didesa dan Kelurahan
4	Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan kepolisian negara Repoblik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
5	Terwujudnya Kerjasama yang Baik dan Partisipasi aktif Masyarakat dalam Penyelegaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselegaranya Urusan Pemerintahan Umum	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah Kecamatan, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan di wilayah Kecamatan dan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di wilayah Kecamatan.

Tabel. T-III.4.

Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Ratolindo

Kabupaten Tojo Una-Una

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA INDIKATOR UTAMA PERANGKAT DAERAH
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselegaranya Proses Pelayanan Administrasi yang Cepat dan Tepat	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi, dan Koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa dan kelurahan
2	Terpenuhinya Sarana dan Sarana Prasarana Aparatur	Terselegaranya Regulasi Pelayanan Kepada Masyarakat yang Profesional	Meningkatnya kualitas Layanan Pemerintah yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan
3	Tercapainya Aparatur yang Profesional dan Handal	Terselegaranya Kerjasama Aparatur Pemerintah Dengan Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Terwujudnya Kerjasama yang Baik dan Partisipasi aktif Masyarakat dalam Penyelegaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
4	Tercapainya Program Peningkatan Penyelegaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Terselegaranya Penyelegaraan Pemerintahan yang Kolaboratif, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kemajuan Desa/Kelurahan

Tabel. T-IV.2.
Sasaran dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Kantor Ratolindo
Kabupaten Tojo Una-Una

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	*Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi, dan Koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa dan kelurahan*	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***
		Administrasi Keuangan perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasin SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	*Meningkatnya kualitas Layanan Pemerintah yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan*	***PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***
		Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3	*Meningkatnya Kemajuan Desa/Kelurahan*	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	*Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***
		Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia, Tentara Nasional Uindonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	*Terwujudnya Kerjasama yang Baik dan Partisipasi aktif Masyarakat dalam Penyelegaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	***PROGRAM PENYELEGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***
		Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum Penugasan Kepala Daerah
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Instrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tojo Una - Una
Tahun 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Ratolindo

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	KET
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
					TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
7 . 01 . 01. 2.02	**Administrasi Keuangan**										**5,048,124,232**	**5,048,124,232**	
7. 01 . 01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Asn yang Menerima gaji dan tunjangan	14 Bulan	Jumlah Asn yang Menerima gaji dan tunjangan	61 orang	Jumlah Asn yang Menerima gaji dan tunjangan		**5,048,124,232**	**5,048,124,232**	
7. 01 . 01. 2.06	**Administrasi umum perangkat daerah**										**209,214,097**	**230,135,507**	
7. 01 . 01. 206. 02	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		42,000,000	46,200,000	
7. 01. 01. 2.06. 04	penyediaan Bahan logistik kantor		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Di Sediakan	12 Bulan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Di Sediakan	18 Paket	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		56,439,097	62,083,007	
7. 01. 01. 2.06. 05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Barang Cetakan dan Penggadaan yang Di Sediakan	12 Bulan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggadaan yang Di Sediakan	60 Paket	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan		12,375,000	13,612,500	
7. 01. 01. 2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	1 Media	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan		1,800,000	1,980,000	
7. 01. 01. 2.06. 09	penyelenggaraan rapat rapat koordinasi dan konsultasi OPD		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	12 Bulan	Jumlah Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	305 Laporan	Terselegaranya Regulasi Pelayanan Regulasi Kepada Masyarakat yang Profesional		96,600,000	106,260,000	
7. 01. 01. 2. 08. 03	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**										**446,656,067**	**491,321,674**	
7. 01. 01. 2. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik		33,700,000	37,070,000	
7. 01. 01. 2. 08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	Tersedianya Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor		3,000,000	3,300,000	
7. 01. 01. 2. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		409,956,067	450,951,674	
7. 01. 01. 2. 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**57,500,000**	**63,250,000**	
7. 01. 01. 2. 09. 09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Unit	Terpeliharanya Pajak dan Kendaraan Dinas Kantor.		16,500,000	18,150,000	
7. 01. 01. 2. 09. 01	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Terpeliharalah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		41,000,000	45,100,000	
7. 01. 02	**PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										**67,500,000**	**74,250,000**	
7. 01. 02. 2. 01	**Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**										65,500,000	72,050,000	
7. 01. 02. 2. 01. 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	Terciptanya Efektifitas Kegiatan Pemerintah		65,500,000	72,050,000	
7. 01. 02. 2. 04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat**										**2,000,000**	**2,200,000**	

7. 01. 02. 2. 04. 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Bulan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	Terselegaranya Urusan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif		2,000,000	2,200,000	
7. 01. 03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										**1,314,800,000**	**1,446,280,000**	
7. 01. 03. 2. 02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**										**1,314,800,000**	**1,446,280,000**	
7. 01. 03. 2. 02. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Bulan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Laporan	Terjadinya Pengendalian Suatu Program Prioritas Untuk Kemajuan Wilayah/Masyarakat		15,200,000	16,720,000	
7. 01. 03. 2. 02. 03	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Bulan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Laporan	Tercapainya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1,200,000,000	1,320,000,000	
7. 01. 03. 2. 02. 04	evaluasi kelurahan		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Bulan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan	Terwujudnya Lingkunagan yang Bersih Dan Tertib Administrasi Serta		3,000,000	3,300,000	
7. 01. 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										**73,254,000**	**80,579,400**	
7. 01 .04. 2. 01	**Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**										**73,254,000**	**80,579,400**	
7. 01. 04. 2. 01. 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Tertib		73,254,000	80,579,400	
7. 01. 05	**PROGRAM PENYELEGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										**16,000,000**	**17,600,000**	
7. 01. 05. 2. 01	**Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum Penugasan Kepala Daerah**										**16,000,000**	**17,600,000**	
7. 01. 05. 2. 01. 02	Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Bulan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Orang	Terselegaranya Regulasi Pelayanan Kepada Masyarakat yang Profesional		3,000,000	3,300,000	
7.01.05.2.01. 04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Instrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	12 Bulan	Terselegaranya Kerjasama aparatur Pemerintah dengan Masyarakat Dalam Membangun DaerahJumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Terselegaranya Kerjasama aparatur Pemerintah dengan Masyarakat Dalam Membangun Daerah		13,000,000	14,300,000	
JUMLAH TOTAL											**7,175,548,396**	**7,893,103,236**	
JUMLAH PAGGU ANGGARAN TAHUN 2023											**2,184,924,164**	**2,403,416,580**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tojo Una - Una
Tahun 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Ratolindo

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2024	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	KET Prioritas pembangunan
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
					TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
7 . 01 . 01. 2.02	**Administrasi Keuangan**												
7. 01 . 01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Asn yang Menerima gaji dan tunjangan	14 Bulan	Jumlah Asn yang Menerima gaji dan tunjangan	63 orang	Jumlah Asn yang Menerima gaji dan tunjangan		**5,048,124,232**	**5,048,124,232**	
7. 01 . 01. 2.06	**Administrasi umum perangkat daerah**										**209,214,097**	**230,135,507**	
7. 01 . 01. 206. 02	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		42,000,000	46,200,000	
7. 01. 01. 2.06. 04	penyediaan Bahan logistik kantor		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Di Sediakan	12 Bulan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Di Sediakan	18 Paket	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		56,439,097	62,083,007	
7. 01. 01. 2.06. 05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Barang Cetakan dan Penggadaan yang Di Sediakan	12 Bulan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggadaan yang Di Sediakan	60 Paket	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan		12,375,000	13,612,500	
7. 01. 01. 2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang -undangan		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang -undangan	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang -undangan	1 Media	Tersedianya Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang -undangan		1,800,000	1,980,000	
7. 01. 01. 2.06. 09	penyelenggaraan rapat rapat koordinasi dan konsultasi OPD		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	12 Bulan	Jumlah Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	305 Laporan	Terselegaranya Regulasi Pelayanan Regulasi Kepada Masyarakat yang Profesional		96,600,000	106,260,000	
7. 01. 01. 2. 08. 03	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**										**504,156,067**	**554,571,674**	
7. 01. 01. 2. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik		33,700,000	37,070,000	
7. 01. 01. 2. 08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	Tersedianya Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor		3,000,000	3,300,000	
7. 01. 01. 2. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		409,956,067	450,951,674	
7. 01. 01. 2. 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**57,500,000**	**63,250,000**	
7. 01. 01. 2. 09. 09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Unit	Terpeliharanya Pajak dan Kendaraan Dinas Kantor.		16,500,000	18,150,000	
7. 01. 01. 2. 09. 01	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Terpeliharalah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		41,000,000	45,100,000	
7. 01. 02	**PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										**67,500,000**	**74,250,000**	
7. 01. 02. 2. 01	**Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**										67,500,000	74,250,000	
7. 01. 02. 2. 01. 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	Terciptanya Efektifitas Kegiatan Pemerintah		65,500,000	72,050,000	
7. 01. 02. 2. 04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat**										**2,000,000**	**2,200,000**	
7. 01. 02. 2. 04. 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Bulan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	Terselegaranya Urusan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif		2,000,000	2,200,000	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2024	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	KET Prioritas pembangunan
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
					TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7. 01. 03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										**1,218,200,000**	**1,340,020,000**	
7. 01. 03. 2. 02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**										**1,218,200,000**	**1,340,020,000**	
7. 01. 03. 2. 02. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	12 Bulan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	7 Laporan	Terjadinya Pengendalian Suatu Program Prioritas Untuk Kemajuan Wilayah/Masyarakat		15,200,000	16,720,000	
7. 01. 03. 2. 02. 03	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Bulan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Laporan	Tercapainya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1,200,000,000	1,320,000,000	
7. 01. 03. 2. 02. 04	evaluasi kelurahan		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Bulan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan	Terwujudnya Lingkunagan yang Bersih Dan Tertib Administrasi Serta Mewujudkan Keluarga yang Sejahtera		3,000,000	3,300,000	
7. 01. 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										**73,254,000**	**80,579,400**	
7. 01 .04. 2. 01	**Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**										**73,254,000**	**80,579,400**	
7. 01. 04. 2. 01. 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Tertib		73,254,000	80,579,400	
7. 01. 05	**PROGRAM PENYELEGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										**16,000,000**	**17,600,000**	
7. 01. 05. 2. 01	**Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum Penugasan Kepala Daerah**										**16,000,000**	**17,600,000**	
7. 01. 05. 2. 01. 02	Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	12 Bulan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Orang	Terselegaranya Regulasi Pelayanan Kepada Masyarakat yang Profesional		3,000,000	3,300,000	
7.01.05.2.01. 04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Instrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Kecamatan Ratolindo	Kab. Tojo Una-Una Ratolindo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	12 Bulan	Terselegaranya Kerjasama aparatur Pemerintah dengan Masyarakat Dalam Membangun DaerahJumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal	2 Orang	Terselegaranya Kerjasama aparatur Pemerintah dengan Masyarakat Dalam Membangun Daerah	2 Orang	13,000,000	14,300,000	
JUMLAH TOTAL											**7,136,448,396**	**7,850,093,236**	

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN BATUDAKA



KABUPATEN TOJO UNA UNA

TAHUN 2024

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Batudaka Tahun 2023 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Batudaka adalah dokumen perencanaan Kantor Kecamatan Batudaka untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan Kemasyarakatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Atas kerjasama dari semua pihak, khususnya para pejabat struktural maupun fungsional serta staf administrasi Kantor Kecamatan Batudaka dan Pemerintah Desa, serta tim penyusun RENJA Tahun 2023 sehingga terwujud laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Molowagu, April 202

Camat Batudaka

ARMAN K. TAMBILALO, S.Pi.MAP

Pembina IV/a
Nip.19770412 200701 1 013

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD). Renja OPD Kecamatan Batudaka merupakan dokumen perencanaan OPD Kecamatan Batudaka untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una Una yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2021– 2026, pada tahun 2023 memasuki tahun ke dua dalam implementasinya, Proses penyusunan Renja OPD Tahun 2021 disusun berdasarkan Renstra OPD 2021-2026, dan RKPD Tahun 2023 sebagai pedoman penyusunan Renja OPD 2023.

Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una una.

Renja perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu untuk menjembatani perencanaan tingkat perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja disusun oleh masing-masing perangkat daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja perangkat daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang akan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota serta sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi maupun APBN.

Renja OPD Kecamatan Batudaka Tahun 2023 merupakan bagian dari RKPD Kota Tojo Una Una dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan tahunan OPD Kecamatan Batudaka. Renja OPD disusun untuk memberikan informasi data bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan bagi OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja OPD. Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun mendatang akan makin mendekat pada ke tataran clean government dan good governance.

1.2. Landasan Hukum

Landasan peraturan dan perundang-undangan dalam penyusunan Renja OPD ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Landasan idil Pancasila;
2. Landasan konstitusional Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang sudah diamandemen;
3. Landasan Operasional, terdiri dari :
    1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
    2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
    4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
    5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembina IV/aan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794);
26. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Pemutahiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah;
27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ/2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020;
28. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 2);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kantor Kecamatan Batudaka tahun 2024 Kabupaten Tojo Una-Una adalah :

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan :

1. Untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi Perangkat kerja yang ada pada Lingkungan Kantor Kecamatan Batudaka untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban;
2. Sebagai acuan resmi bagi seluruh staf Kecamatan Batudaka dalam Menentukan Prioritas Program dan Kegiatan;
3. Sebagai Tolak ukur untuk mengukur dan melakukan Evaluasi Kinerja;
4. Memberikan Gambaran tentang kondisi umum Organisasi dalam kaitannya dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi sekaligus memberikan gambaran Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujutkan Visi dan Misi Bupati Tojo Una una;

1.3.2 Tujuan

Secara umum Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kantor Kecamatan Batudaka.

Selanjutnya secara khusus penyusunan Renja Kecamatan Batudaka ini juga bertujuan untuk :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan;
2. Menyediakan dokumen acuan resmi bagi seluruh aparatur kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas program dan kegiatan Kecamatan Batudaka tahun

2023 yang akan dibiayai oleh APBD II Kabupaten Tojo Una una;

3. Menjabarkan gambaran umum daerah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2023 kedepan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih baik;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu satu tahun.
5. Mewujudkan Dasar yang Kokoh bagi Keterkaitan antara Perencanaan dan Penganggaran;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Batudaka tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja OPD Kantor Kecamatan Batudaka.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPDKantor Kecamatan Batudaka, analisis kinerja pelayanan OPD Kantor Kecamatan Batudaka, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPDKantor Kecamatan Batudaka, review terhadap rancangan awal

RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan kemasyarakatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, dan sasaran Renja OPD Kantor Kecamatan Batudaka, serta Program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rincian pendanaan yang akan dituangkan dalam Renja Tahun 2024

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BATUDAKA TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Kantor Kecamatan Batudaka tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD Kantor Kecamatan Batudaka dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD Kantor Kecamatan Batudaka, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD Kantor Kecamatan Batudaka terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BATUDAKA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KANTOR KECAMATAN BATUDAKA

Evaluasi pelaksanaan renja OPD Kantor Kecamatan Batudaka tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD Kantor Kecamatan Batudaka dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD Kantor Kecamatan Batudaka berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD Kantor Kecamatan Batudaka berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan OPD Kantor Kecamatan Batudaka. Keberhasilan kinerja OPD Kantor Kecamatan Batudaka dapat dilihat dari pencapaian indicator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan OPD Kantor Kecamatan Batudaka dapat dilihat pada table berikut ini :

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN BATUDAKA

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Batudaka, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Kecamatan Batudaka sebagai berikut:

a. Tantangan dari Dalam (Internal)

Hal-hal yang menjadi tantangan dari dalam yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan di Bidang Perencanaan Bangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penguasaaan Ilmu Pemerintahan
2. Terbatasnya literature tentang Manajemen Pemerintahan dan Perundang-undangan yang menjadi referensi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan.
3. Belum tertatanya managemen Pemerintahan dan Penganggaran berbasis kinerja.

b. Tantangan dari Luar (Eksternal)

Hal-hal yang menjadi tantangan dari luar yaitu :

1. Belum maksimalnya koordinasi antara OPD Kabupaten dengan Pihak Kecamatan tentang Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Kurangnya pemahaman dari Aparatur dalam penetapan prioritas dan perhitungan anggaran yang berbasis kinerja pada pembangunan yang partisipatif dan transparan.
3. Belum optimalnya Sistem Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Batudaka, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Kantor Kecamatan Batudaka berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dean harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2023 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kecamatan Batudaka.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel. T-II.1.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023
Kabupaten Tojo Una-una

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Kantor Desa Molowagu	Desa Molowagu	Terpenuhinya tempat Pelayanan bagi masyarakat	1 Unit1	

Berdasarkan review/penalaahan hasil usulan program dan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan Batudaka ada usulan yang ditujukan ke Kecamatan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BATUDAKA

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Batudaka selama tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2023 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan packa konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selaian prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

a. Program pro rakyat;

b. Program keadilan untuk semua; dan

c. Program pencapaian tujuan pembangunan millinium (MDG's)

Selain itu, pemerintah pusat juga baru saja menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendekatan *not business as usual*, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertunbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasarat serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi kaberhasilan pelaksanaan MP3EI.Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang *multiplier effect*-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BATUDAKA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menentukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Kecamatan Batudaka selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2024 dan prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan Kantor Camat Batudaka

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2023
	Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan	90 %

Tabel 3.3
Sasaran Kantor Camat Batudaka

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di Wilayah	Angka Kriminilitas	0.0005 Kasus

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam tahun anggaran 2023, Kantor Camat Batudaka telah menetapkan 4 (Empat) tujuan yang akan dicapai. Ke Empat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 4 (Empat) sasaran dari 4 sasaran tersebut terdapat 6 (enam program dan 12 kegiatan. Untuk kejelasan pencapaian implementasi rencana program dan kegiatan tersebut maka perlu dilengkapi dengan indicator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif. Uraian ini dituangkan dalam tabel 4.1 berikut ini :

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batudaka Kabupaten Tojo Una Una tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2023.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batudaka Kabupaten Tojo Una-Una.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Batudaka, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan Batudaka maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Kecamatan Batudaka Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD.

Molowagu, April 2022
Camat Batudaka

ARMAN K. TAMBILALO, S.Pi.MAP
Pembina IV/a
Nip.19770412 200701 1 013

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BATUDAKA KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BATUDAKA						**1.905.945.989,00**							**1.967.331.343,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.905.945.989,00**							**1.967.331.343,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.786.768.989,00**							**1.836.236.643,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**		**-**	**-**	**1.786.768.989,00**						**-**	**1.836.236.643,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	1.292.091.861,00			-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	15 Orang/bulan	1.292.091.861,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan		15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.292.091.861,00	- Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	15 Orang/bulan	1.292.091.861,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 persen		100 persen	100 persen	179.722.349,00			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Paket	197.694.585,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	42.801.562,00	- Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Paket	47.081.719,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	22712 Paket		22712 Paket	22712 Paket	9.967.337,00	- Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	22712 Paket	10.964.071,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	30 Laporan	22.000.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	106.953.450,00	- Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Laporan	117.648.795,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	47.530.597,00			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Unit	52.283.657,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	13.030.597,00	- Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Unit	14.333.657,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	34.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	8 Unit	37.950.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	250.174.182,00			-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	400 Laporan	275.191.540,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan		400 Laporan	400 Laporan	5.750.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	400 Laporan	6.325.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	13.800.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Laporan	15.180.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	230.624.182,00	- Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	50 Laporan	253.686.540,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	17.250.000,00			-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	7 Unit	18.975.000,00	KECAMATAN BATUDAKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	17.250.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	7 Unit	18.975.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01	**KECAMATAN**						**119.177.000,00**							**131.094.700,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**		**-**	**-**	**5.750.000,00**						**-**	**6.325.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	5.750.000,00			-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Laporan	6.325.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	5.750.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	5 Laporan	6.325.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**		**-**	**-**	**71.952.000,00**						**-**	**79.147.200,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-		-	-	71.952.000,00			-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	79.147.200,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	25.702.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	28.272.200,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	46.250.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Laporan	50.875.000,00	KECAMATAN BATUDAKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**		**-**	**-**	**22.500.000,00**						**-**	**24.750.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	-	22.500.000,00			-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	24.750.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	22.500.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	12 Laporan	24.750.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**		**-**	**-**	**8.625.000,00**						**-**	**9.487.500,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-		-	-	8.625.000,00			-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Orang	9.487.500,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3 Orang		3 Orang	3 Orang	8.625.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	3 Orang	9.487.500,00	KECAMATAN BATUDAKA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**		**-**	**-**	**10.350.000,00**						**-**	**11.385.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-		-	-	10.350.000,00			-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	9 Dokumen	11.385.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	10.350.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	-	9 Dokumen	11.385.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
	J U M L A H							**1.905.945.989,00**							**1.967.331.343,00**	

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 untuk bahan pembahasan dalam Forum OPD yang akan menjadi acuan dalam Pelaksanaan Musrembang RKPD tahun 2024.

Rancangan Renja ini mengacu pada Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya baik sejak pengumpulan data, pengolahan data sampai pada penyusunan naskah Rancangan RENJA ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya.

Semoga Rancangan RENJA ini dapat bermanfaat untuk pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una.

Ampana, ... 2023

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tojo Una-Una

HERLINA LEONITA SANDEWAH, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670318 199803 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.4. Sistimatika Penulisan 3

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANG, POLITIK DAN KEWASPADAAN TAHUN LALU 4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan 2023 Serta Capaian Renstra OPD 4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan OPD 7
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 8
2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 9

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 10
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 10
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbangpol..... 11
3.3. Program dan Kegiatan 11

IV. PENUTUP 12

DAFTAR TABEL

Tabel 01. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2021 Kabupaten Tojo Una-Una

Tabel 02. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una

Tabel 03. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Tojo Una-Una

Tabel 04. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Tojo Una-Una

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, dan mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unit kerja yang memiliki tugas pokok ***Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Nasional serta Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah***, untuk itu diperlukan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam rangka mencapai sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 akan dijadikan landasan dalam penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2022-2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tojo Una-una di Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011–2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una 2005–2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tojo Una-Una 2011–2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una secara konsekuen dan konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan rencana, tugas pokok dan fungsi yang diemban.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya rencana kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis *kinerja pelayanan OPD*, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta Program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN LALU

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan kinerja dilakukan menggunakan konsep value for money, penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator – indikator sebagai berikut :

a. indikator masukan (input) untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana) SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya dapat dianalisis apakah sumer daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan

b. Indikator keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun nonfisik.

c. Indikator hasil (outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang pencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022 DAN 2023 SERTA CAPAIAN RENSTRA OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2022 dan tahun 2023 dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau realisasi APBD untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tahun lalu (2022);

   Pada renja 2022 Badan Kesbangpol telah merencanakan dan melaksanakan 10 program dan 54 kegiatan.

   Dari 10 program dan 54 kegiatan tersebut setelah pelaksanaannya bahwa realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan pada renja tahun lalu sebanyak 5 program dan 43 kegiatan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Dari 10 program dan 54 kegiatan tersebut setelah pelaksanaannya bahwa realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan pada renja tahun lalu sebanyak 4 program dan 11 kegiatan dengan capaian 100%.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Dari 10 program dan 54 kegiatan tersebut setelah pelaksanaannya bahwa realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2022, setelah pelaksanaannya realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

   Ketersediaan anggaran yang cukup dan ketersediaan sumber daya manusia yang baik untuk pencapaian, terpenuhinya dan melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesbang dan Politik;

   Dengan pencapaian target yang rata-rata 100% sangat berimplikasi mendukung terhadap pencapaian target Renstra – PD pada akhir periode tahun 2023 dapat tercapai.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

   Penyediaan anggaran kegiatan yang cukup agar target kinerja dapat tercapai sepenuhnya sehingga konsistensi terhadap terget Renstra PD dapat tercapai.

Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun berjalan (realisasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran) sebagai bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun selanjutnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Keberhasilan kinerja OPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel berikut

(Tabel 2)

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN OPD

Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, maka batas-batas wilayah, sosiologis dan kultural semakin kabur, hal ini di satu sisi menjadi peluang dalam menunjang pembangunan daerah namun disisi lain laju teknologi dan informasi dapt menjadi ancaman dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dan dalam menjaga kearifan lokal.

Penyelenggaraan keamanan ketertiban daerah khusunya diwilayah yang memiliki karakteristik geografis kepulauan seperti Kabupaten Tojo Una-una menjadi hal yang penting karena keterbatasan sarana dan prasarana transportasi menjadi kendala tersendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah khususnya untuk wilayah terluar yang berbatasan dengan daerah lain.

Selain hal tersebut di atas isu SARA yang menjadi Isu Nasional mulai dari Konflik POSO, konflik aliran kepercayaan, serta konflik etnis dan konflik antar kepentingan Politik menjadi Isu strategis yang harus menjadi perhatian dalam ***Menuju Masyarakat Yang Hebat*** di wilayah Tojo Una-Una. Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang, maka secara eksplisit Isu strategis yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

1. Keamanan di Wilayah Perbatasan/pulau terluar
2. Tojo Una-Una yang berbatasan langsung dengan daerah Konflik Poso merupakan daerah rawan konflik
3. Isu demokratisasi dan kelembagaan ormas, orsos

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2019 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2020 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk mempedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2013 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selain prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

a. Program pro rakyat;
b. Program keadilan untuk semua; dan
c. Program pencapaian tujuan pembangunan millinium (MDG's)

Selaian itu, pemerintah pusat juga baru saja menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendeatan *not business as usual*, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasarat serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi kaberhasilan pelaksanaan MP3EI. Berdasarkan

ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang *multiplier effect*-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama lima tahun.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta prognosisnya dapat dilihat pada tabel berikut.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-una didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah (terutama misi ke - 5), yakni **Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart Governance**. Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2024 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mencakup 5 program dengan 11 sub kegiatan, sebagai berikut

Tabel 4.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Kesbangpol Tahun 2024

No.	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	A.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.
		C.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No.	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan
		D.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		E.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
III.	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta

			Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Pemantauan Situasi Politik di Daerah

No.	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan
IV.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
V.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
VI.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasiltasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo una-una tahun 2024 serta pendanaan, tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rencana kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun 2024

No.	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.634.537.220
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								3.634.537.220
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.668.502.446
A.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	KT	100 %	2 Dok	100 %	1.150.000

No.	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.477.195.794
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Dukungan sebesar 87 % terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		100 %	12 Bulan	100 %	2.477.195.794

C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai sakip OPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	KT	100%	2 orang	100%	2.000.000

No.	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah								16494.000
1.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Capaian penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Tersedianya Bahan Logistik kantor	Terlaksananya administrasi Umum prangkat daerah		100 %	4 paket	100 %	66.700.000
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Sakip OPD	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	10000 paker	100 %	7.562.500
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	2 laporan	100 %	170.000.000
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah								55.000.000

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Pengadaan Mebel	Nilai Sakip OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang urusan pemerintah		100%	24 unit	100%	25.000.000
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang urusan pemerintah		100%	2 unit	100%	30.000.000
D.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								79.512.416
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Sakip OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintahan		100 %	1150 laporan	100%	1.455.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Sakip OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintahan		100%	12 laporan	100%	38.815.000
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Sakip OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintahan		100%	12 laporan	100%	369.023.511

No.	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
E.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Sakip OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah	KT	100%	16 unit	100%	60.000.000
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Sakip OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	KT	100%	37 unit	100%	10.000.000
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sakip OPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	KT	100%	1 unit	100%	10.000.000

No.	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	

II.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								750.000.000
A.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								750.000.000
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pembuatan rumusan kebijakan untuk melaksanakan pembinaan ideologi pancasila dan Pendidikan Bela Negara		100 %	100 orang	100 %	750.000.000

No.	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
III.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								877.169.274

A.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Peningkatan Pendidikan untuk partai politik serta etika budaya politik	KT	100%	9 Dokumen	100%	877.169.274
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
IV.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								10.000.000
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan	Pembuatan rumusan kebijakan teknis dan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 12	KT	100%	10 laporan	100%	10.000.000

		sosial dan pelestarian budaya di 12 kecamatan.	Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	kecamatan					
V.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								10.000.000
A.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Ormas yang diberdayakan dan diawasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	Pembinaan Terhadap LSM, ORMAS, OKP dan Persentase tersedianya data organisasi kemasyarakatan	KT	100%	50 orang	100%	10.000.000

			Asing di Daerah						

No.	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
V.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								775.999.900
A.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persentase potensi gangguan/konflik yang tertangani	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Pembuatan rumusan kebijakan dalam menangani potensi gangguan/konflik yang akan terjadi	KT	100%	10 laporan	100%	10.000.000

			Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
No.	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
1.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	persentase potensi gangguan/konflik yang tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan rumusan kebijakan dalam menangani potensi gangguan/konflik yang akan terjadi	KT	100 %	1 dokumen	100 %	10.000.000

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una Una tahun 2020 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2020.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam ran a pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di interen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2020 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2016-2021 yaitu: ***" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TOJO UNA-UNA YANG HEBAT DIBIDANG PERTANIAN, PARIWISATA DAN KEMARITIMAN".***

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**6.913.980.170,00**							**7.411.947.846,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**6.913.980.170,00**							**7.411.947.846,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**6.913.980.170,00**							**7.411.947.846,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP OPD***	**BB Nilai**		**BB Nilai**	**BB Nilai**	**3.268.751.805,00**						**BB Nilai**	**3.759.064.576,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja*	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	OPD	3 Dokumen	1.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	OPD	3 Dokumen	1.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedinya gaji dan Tunjangan ASN*	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	2.477.195.794,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	21 Orang/bulan	2.848.775.163,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan		21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.477.195.794,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	21 Orang/bulan	2.848.775.163,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah*	2 org		2 org	2 org	2.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Orang	2.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	2.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Orang	2.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	244.262.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	4 Paket	280.901.875,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	66.700.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	4 Paket	76.705.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket		10000 Paket	10000 Paket	7.562.500,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	10000 Paket	8.696.875,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	170.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	2 Laporan	195.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang urusan pemerintah*	26 unit		26 unit	26 unit	55.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	OPD dan ASN	24 Unit	63.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	24 Unit	25.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	OPD dan ASN	24 Unit	28.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	OPD dan ASN	2 Unit	34.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintahan*	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	409.293.511,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1150 Laporan	470.687.538,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1150 Laporan		1150 Laporan	1150 Laporan	1.455.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1150 Laporan	1.673.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	38.815.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	12 Laporan	44.637.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	369.023.511,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	12 Laporan	424.377.038,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang milik daerah*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	80.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	16 Unit	92.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	60.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	16 Unit	69.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit		37 Unit	37 Unit	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	37 Unit	11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	1 Unit	11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara*** ***Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila***	**79,50 Persen** **79,50 Persen**		**79,50 Persen** **79,50 Persen**	**79,50 Persen** **79,50 Persen**	**1.761.032.700,00**						**79,50 Persen** **79,50 Persen**	**1.762.687.605,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Pembuatan rumusan kebijakan untuk melaksanakan pembinaan ideologi pancasila dan Pendidikan Bela Negara*	1 keg		1 keg	1 keg	1.761.032.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Penunjang Program Prioritas	ASN, PELAJAR	100 Orang	1.762.687.605,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	1.750.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Penunjang Program Prioritas	ASN, PELAJAR	100 Orang	1.750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.032.700,00	- Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ASN, PELAJAR	1 Laporan	12.687.605,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik.***	**100,00 Persen**		**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**1.844.195.665,00**						**100,00 Persen**	**1.844.195.665,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Peningkatan Pendidikan untuk partai politik serta etika budaya politik*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	1.844.195.665,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat, Partai Politik	9 Dokumen	1.844.195.665,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	1.844.195.665,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat, Partai Politik	9 Dokumen	1.844.195.665,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Presentase Ormas yang diberdayakan dan diawasi***	**100,00 Persen**		**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**10.000.000,00**						**100,00 Persen**	**11.500.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Pembinaan Terhadap LSM, ORMAS, OKP dan Persentase tersedianya data organisasi kemasyarakatan*	1 keg		1 keg	1 keg	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ORMAS dan OKP	50 Orang	11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	ORMAS dan OKP	50 Orang	11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 12 kecamatan.***	**17,50 Persen**		**17,50 Persen**	**17,50 Persen**	**10.000.000,00**						**17,50 Persen**	**11.500.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Pembuatan rumusan kebijakan teknis dan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 12 kecamatan*	1 keg		1 keg	1 keg	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	10 Laporan	11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	10 Laporan	11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***persentase potensi gangguan/konflik yang tertangani***	**100,00 Persen**		**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**20.000.000,00**						**100,00 Persen**	**23.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Pembuatan rumusan kebijakan dalam menangani potensi gangguan/konflik yang akan terjadi*	1 keg		1 keg	1 keg	20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	10 Laporan	23.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	10 Laporan	11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1 Dokumen	11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**6.913.980.170,00**							**7.411.947.846,00**	